



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp846.356.884.184,23
b.	Belanja	<u>Rp926.299.787.597,14</u>
	defisit	(Rp 79.942.903.412,91)
c.	Pembiayaan	
	1. Penerimaan	Rp137.355.387.470,00
	2. Pengeluaran	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>
	pembiayaan netto	Rp133.355.387.470,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.138.536.876,77 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp871.495.421.061,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp846.356.884.184,23</u> |
| Selisih | Rp 25.138.536.876,77 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp78.946.620.188,86 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.005.246.407.786,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 926.299.787.597,14</u> |
| Selisih | Rp 78.946.620.188,86 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp53.808.083.312,09) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. defisit setelah perubahan | (Rp133.750.986.725,00) |
| 2. Realisasi | <u>(Rp 79.942.903.412,91)</u> |
| Selisih | (Rp 53.808.083.312,09) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp395.599.255,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp137.750.986.725,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp137.355.387.470,00</u> |
| Selisih | Rp 395.599.255,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp4.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp4.000.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan sejumlah Rp395.599.255,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp133.750.986.725,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp133.355.387.470,00</u> |
| selisih | Rp 395.599.255,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp137.250.986.724,87
b. penggunaan SAL tahun berjalan	Rp137.250.986.724,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp 53.412.484.057,09
d. jumlah saldo anggaran lebih akhir	Rp 53.412.484.056,96

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	jumlah asset	Rp1.551.690.760.266,81
b.	jumlah kewajiban	Rp 8.831.158.439,12
c.	jumlah ekuitas	Rp1.542.859.601.827,69

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan	Rp801.032.308.367,88
b.	jumlah beban	Rp867.666.687.807,34
c.	surplus/defisit kegiatan operasional	(Rp 66.634.379.439,46)
d.	surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp 186.343.070,00
e.	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	(Rp 66.448.036.369,46)
f.	surplus/defisit pos luar biasa	Rp 0,00
g.	surplus/defisit LO	(Rp 66.448.036.369,46)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	saldo kas daerah per 1 januari 2024	Rp137.757.538.526,14
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 33.895.959.702,39
c.	arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp117.838.863.115,30)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 104.400.745,00
e.	saldo kas daerah per 31 Desember Tahun 2024	Rp 53.921.120.643,23

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	surplus/defisit LO	(Rp 66.448.036.369,46)
b.	koreksi nilai persediaan	Rp 85.833.220,21
c.	selisih revaluasi asset	Rp 0,00
d.	koreksi ekuitas lainnya	(Rp 65.470.967.283,30)
e.	dampak akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap	Rp 0,00
f.	dampak akumulatif atas perubahan nilai amortisasi aset lainnya	Rp 0,00
g.	dampak akumulatif atas perubahan nilai asset lainnya	Rp 0,00
h.	jumlah ekuitas akhir	Rp1.542.859.601.827,69

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.10/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tertuang dalam lampiran BAB VIII point C angka 1 Ketentuan Umum, “mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 141

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024 Audited	%	Realisasi 2023 Audited
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88
4	Retribusi Daerah	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
6	Lain-lain PAD yang sah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40	742.046.959.415,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55	55.478.000.512,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 + 10)	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17	797.524.959.927,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
13	Pendapatan Hibah	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	8.412.879.414,00
15	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (13 s.d 14)	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58	8.412.879.414,00
16	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 15)	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12	913.345.884.385,81
17	BELANJA DAERAH				
18	BELANJA OPERASI				
19	Belanja Pegawai	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00
20	Belanja Barang dan Jasa	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20
21	Belanja Hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43	23.980.505.000,00
22	Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00
23	Jumlah Belanja Operasi (19 s.d 22)	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20
24	BELANJA MODAL				
25	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	-
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38	33.092.550.506,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47	35.617.596.997,30
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42	70.488.019.993,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71	1.754.080.380,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	-	-
31	Jumlah Belanja Modal (25 s.d 30)	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30
32	BELANJA TAK TERDUGA				
33	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
34	Jumlah Belanja Tak terduga (33)	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
35	BELANJA TRANSFER				
36	Belanja Bagi Hasil	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	78,88	5.511.251.457,44
37	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	100,00	101.318.340.303,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d 37)	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44
39	TOTAL BELANJA DAERAH (23 + 31 + 34 + 38)	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15	929.775.827.118,94
40	SURPLUS / (DEFISIT) (16-39)	(133.750.986.725,00)	(79.942.903.412,91)	59,77	(16.429.942.733,13)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024 Audited	%	Realisasi 2023 Audited
41	PEMBIAYAAN				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	100,00	153.535.018.028,00
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	104.400.745,00	20,88	145.911.430,00
45	Total Penerimaan (43 s.d 44)	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	99,71	153.680.929.458,00
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
47	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
48	Total Pengeluaran (47)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
49	PEMBIAYAAN NETTO (45-48)	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	99,70	153.680.929.458,00
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (40+49)	0,00	53.412.484.057,09	0,00	137.250.986.724,87

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembin / Tk.1/IV.b
NIP.19710602200604 1 005



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024



Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	871.495.421.061	846.356.884.184,23	(25.138.536.876)	97,11
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.478.021.164	40.516.963.975,37	(1.961.057.188)	95,38
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	41.360.364.822	39.527.718.221,37	(1.832.646.600)	95,56
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001		RSUD Muhammad Zein	31.684.000.000	29.565.756.335,37	(2.118.243.664)	93,31
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0	18.889.428.129,68	18.889.428.129	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	31.684.000.000	10.676.328.205,69	(21.007.671.794)	33,70
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.684.000.000	10.676.328.205,69	(21.007.671.794)	33,70
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	18.889.428.129,68	18.889.428.129	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	3.195.000.000	3.028.369.538,00	(166.630.462)	94,78
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	18.889.428.129,68	18.889.428.129	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.489.000.000	7.647.958.667,69	(20.841.041.332)	26,85
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002		UPT Puskesmas Manggar	2.741.000.570	2.733.679.909,00	(7.320.661)	99,73
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	2.741.000.570	2.733.679.909,00	(7.320.661)	99,73
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.741.000.570	2.733.679.909,00	(7.320.661)	99,73
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000	113.860.000,00	63.860.000	227,71
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.691.000.570	2.619.819.909,00	(71.180.661)	97,34
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003		UPT Puskesmas Mengkubang	1.104.784.593	1.100.585.695,00	(4.198.898)	99,61
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	1.104.784.593	1.100.585.695,00	(4.198.898)	99,62
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.104.784.593	1.100.585.695,00	(4.198.898)	99,62
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	55.000.000	51.408.000,00	(3.592.000)	93,46
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.049.784.593	1.049.177.695,00	(606.898)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004		UPT Puskesmas Gantung	2.274.915.734	2.364.814.922,00	89.899.188	103,95
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	2.274.915.734	2.364.814.922,00	89.899.188	103,95
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.274.915.734	2.364.814.922,00	89.899.188	103,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	148.394.000	164.739.000,00	16.345.000	111,01
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.126.521.734	2.200.075.922,00	73.554.188	103,45
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005		UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.827.144.000	1.701.323.184,00	(125.820.816)	93,11
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	1.827.144.000	1.701.323.184,00	(125.820.816)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.827.144.000	1.701.323.184,00	(125.820.816)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000	126.060.000,00	26.060.000	126,06
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.727.144.000	1.575.263.184,00	(151.880.816)	91,20
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006		UPT Puskesmas Simpang Pesak	755.684.511	812.304.959,00	56.620.448	107,49
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	755.684.511	812.304.959,00	56.620.448	107,48
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	755.684.511	812.304.959,00	56.620.448	107,48
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	37.800.000	53.657.000,00	15.857.000	141,94
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	717.884.511	758.647.959,00	40.763.448	105,68
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007		UPT Puskesmas Renggiang	507.885.449	649.986.572,00	142.101.123	127,97
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	507.885.449	649.986.572,00	142.101.123	127,98
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.885.449	649.986.572,00	142.101.123	127,98
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	29.706.063	69.039.000,00	39.332.937	232,40
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.179.386	580.947.572,00	102.768.186	121,48
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008		UPT Puskesmas Dendang	464.949.965	599.266.645,00	134.316.680	128,88
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	464.949.965	599.266.645,00	134.316.680	128,88
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	464.949.965	599.266.645,00	134.316.680	128,88
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	26.250.000	54.947.000,00	28.697.000	209,31
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	438.699.965	544.319.645,00	105.619.680	124,07
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.117.656.342	989.245.754,00	(128.410.588)	88,51
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.117.656.342	989.245.754,00	(128.410.588)	88,51
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.117.656.342	989.245.754,00	(128.410.588)	88,51
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.117.656.342	989.245.754,00	(128.410.588)	88,51
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.102.656.342	984.420.904,00	(118.235.438)	89,28
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.000.000	4.824.850,00	(10.175.150)	32,17
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.287.849.412	1.236.046.840,00	(51.802.572)	95,97
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.600.000	5.400.000,00	(4.200.000)	56,25

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	9.600.000	5.400.000,00	(4.200.000)	56,25
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	9.600.000	5.400.000,00	(4.200.000)	56,25
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.600.000	5.400.000,00	(4.200.000)	56,25
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	9.600.000	5.400.000,00	(4.200.000)	56,25
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	182.420.000	217.506.000,00	35.086.000	119,23
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	182.420.000	217.506.000,00	35.086.000	119,23
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	182.420.000	217.506.000,00	35.086.000	119,23
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.420.000	217.506.000,00	35.086.000	119,23
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	180.420.000	215.478.000,00	35.058.000	119,43
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000	2.028.000,00	28.000	101,40
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	101.029.412	125.185.840,00	24.156.428	123,91
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	101.029.412	125.185.840,00	24.156.428	123,91
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	101.029.412	125.185.840,00	24.156.428	123,90
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.029.412	125.185.840,00	24.156.428	123,90
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	101.029.412	125.185.840,00	24.156.428	123,90
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	830.000.000	707.033.000,00	(122.967.000)	85,18
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	830.000.000	707.033.000,00	(122.967.000)	85,18
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	830.000.000	707.033.000,00	(122.967.000)	85,18
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	830.000.000	707.033.000,00	(122.967.000)	85,18
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	830.000.000	707.033.000,00	(122.967.000)	85,18
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	117.000.000	123.532.000,00	6.532.000	105,58
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	117.000.000	123.532.000,00	6.532.000	105,58
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	117.000.000	123.532.000,00	6.532.000	105,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.000.000	123.532.000,00	6.532.000	105,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	117.000.000	123.532.000,00	6.532.000	105,57
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	47.800.000	57.390.000,00	9.590.000	120,06
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	47.800.000	57.390.000,00	9.590.000	120,06
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	47.800.000	57.390.000,00	9.590.000	120,06
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.800.000	57.390.000,00	9.590.000	120,06
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	47.800.000	57.390.000,00	9.590.000	120,06

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.305.605.000	1.325.687.780,00	20.082.780	101,53
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	210.605.000	175.140.400,00	(35.464.600)	83,16
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	210.605.000	175.140.400,00	(35.464.600)	83,16
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	210.605.000	175.140.400,00	(35.464.600)	83,15
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.605.000	175.140.400,00	(35.464.600)	83,15
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	210.105.000	174.946.000,00	(35.159.000)	83,26
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000	194.400,00	(305,600)	38,88
3.3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.095.000.000	1.150.547.380,00	55.547.380	105,07
3.3	3.31.3.30.0.00.14.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.095.000.000	1.150.547.380,00	55.547.380	105,07
3.3	3.31.3.30.0.00.14.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.095.000.000	1.150.547.380,00	55.547.380	105,06
3.3	3.31.3.30.0.00.14.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.095.000.000	1.150.547.380,00	55.547.380	105,06
3.3	3.31.3.30.0.00.14.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.094.500.000	1.148.542.500,00	54.042.500	104,93
3.3	3.31.3.30.0.00.14.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000	2.004.880,00	1.504.880	400,98
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	40.700.000	59.900.000,00	19.200.000	147,17
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	40.700.000	59.900.000,00	19.200.000	147,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	40.700.000	59.900.000,00	19.200.000	147,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	40.700.000	59.900.000,00	19.200.000	147,16
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.700.000	59.900.000,00	19.200.000	147,16
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	40.700.000	59.900.000,00	19.200.000	147,16
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	826.246.382.781	803.068.102.884,86	(23.178.279.896)	97,19
5.02			KEUANGAN	826.246.382.781	803.068.102.884,86	(23.178.279.896)	97,19
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	826.246.382.781	803.068.102.884,86	(23.178.279.896)	97,19
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	826.246.382.781	803.068.102.884,86	(23.178.279.896)	97,18
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.212.464.690	56.514.627.619,86	(697.837.070)	98,78
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	41.745.502.690	45.008.024.533,50	3.262.521.843	107,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000	207.052.515,00	177.052.515	690,17
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.820.000.000	4.814.815.725,37	(5.184.274)	99,89
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.616.962.000	6.484.734.845,99	(4.132.227.154)	61,07
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	767.784.168.091	746.071.353.252,00	(21.712.814.839)	97,17
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000	703.539.971.834,00	(11.440.261.166)	98,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091	42.531.381.418,00	(10.272.553.673)	80,54
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	482.122.013,00	(767.627.987)	38,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000	0,00	(249.750.000)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1.000.000.000	482.122.013,00	(517.877.987)	48,21
7			UNSUR KEWILAYAHAN	136.862.704	150.182.704,00	13.320.000	109,73
7.01			KECAMATAN	136.862.704	150.182.704,00	13.320.000	109,73
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Manggar	16.000.000	15.790.000,00	(210.000)	98,68
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	16.000.000	15.790.000,00	(210.000)	98,68
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.000.000	15.790.000,00	(210.000)	98,68
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	16.000.000	15.790.000,00	(210.000)	98,68
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Gantung	15.500.000	18.510.000,00	3.010.000	119,41
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.500.000	18.510.000,00	3.010.000	119,42
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.500.000	18.510.000,00	3.010.000	119,42
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.500.000	18.510.000,00	3.010.000	119,42
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Kelapa Kampit	27.500.000	35.395.000,00	7.895.000	128,70
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	27.500.000	35.395.000,00	7.895.000	128,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.500.000	35.395.000,00	7.895.000	128,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	27.500.000	35.395.000,00	7.895.000	128,71
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Simpang Pesak	64.862.704	65.142.704,00	280.000	100,43
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	64.862.704	65.142.704,00	280.000	100,43
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.862.704	65.142.704,00	280.000	100,43
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	64.862.704	65.142.704,00	280.000	100,43
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Damar	13.000.000	15.345.000,00	2.345.000	118,03
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	13.000.000	15.345.000,00	2.345.000	118,04
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.000.000	15.345.000,00	2.345.000	118,04
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	13.000.000	15.345.000,00	2.345.000	118,04
		5	Belanja	1.005.246.407.786	926.299.787.597,14	(78.946.620.188)	92,14
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	568.317.350.598	524.421.156.146,30	(43.896.194.451)	92,27
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	232.554.365.834	222.004.653.129,24	(10.549.712.704)	95,46

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	232.554.365.834	222.004.653.129,24	(10.549.712.704)	95,46
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	232.554.365.834	222.004.653.129,24	(10.549.712.704)	95,45
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	207.388.829.989	198.792.072.125,00	(8.596.757.864)	95,84
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	168.994.623.514	162.197.411.535,00	(6.797.211.979)	95,98
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.829.212.536	34.171.314.342,00	(1.657.898.194)	95,37
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.564.993.939	2.423.346.248,00	(141.647.691)	94,48
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.165.535.845	23.212.581.004,24	(1.952.954.840)	92,23
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.910.392.205	5.843.026.912,00	(67.365.293)	98,85
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.661.595.940	15.786.467.492,24	(1.875.128.447)	89,37
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.593.547.700	1.583.086.600,00	(10.461.100)	99,34
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	217.419.105.329	194.319.717.805,00	(23.099.387.524)	89,37
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	124.224.913.104	111.263.427.304,00	(12.961.485.800)	89,56
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	124.224.913.104	111.263.427.304,00	(12.961.485.800)	89,56
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	120.891.980.607	108.330.361.111,00	(12.561.619.496)	89,60
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	83.896.319.526	75.106.234.325,00	(8.790.085.201)	89,51
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.995.661.081	33.224.126.786,00	(3.771.534.295)	89,81
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.332.932.497	2.933.066.193,00	(399.866.304)	88,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.189.112.000	1.790.891.740,00	(398.220.260)	81,81
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	991.760.000	990.479.119,00	(1.280.881)	99,87
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.060.497	151.695.334,00	(365,163)	99,76
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001		RSUD Muhammad Zein	62.127.031.999	55.407.869.255,00	(6.719.162.744)	89,18
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	62.127.031.999	55.407.869.255,00	(6.719.162.744)	89,18
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.194.286.499	51.123.010.700,00	(5.071.275.799)	90,98
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.855.288.884	17.903.708.141,00	(2.951.580.743)	85,84
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.338.997.615	33.219.302.559,00	(2.119.695.056)	94,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.932.745.500	4.284.858.555,00	(1.647.886.945)	72,21
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.191.745.500	2.590.443.455,00	(1.601.302.045)	61,79
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.542.000.000	1.496.675.100,00	(45.324.900)	97,06
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.000.000	197.740.000,00	(1.260.000)	99,37
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002		UPT Puskesmas Manggar	5.739.463.423	5.299.970.899,00	(439.492.524)	92,34

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	5.739.463.423	5.299.970.899,00	(439.492.524)	92,34
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.432.246.423	5.012.945.899,00	(419.300.524)	92,28
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.825.105.675	2.634.340.278,00	(190.765.397)	93,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.607.140.748	2.378.605.621,00	(228.535.127)	91,23
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	307.217.000	287.025.000,00	(20.192.000)	93,43
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.217.000	287.025.000,00	(20.192.000)	93,43
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003		UPT Puskesmas Mengkubang	4.025.394.244	3.692.604.405,00	(332.789.839)	91,73
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	5	BELANJA DAERAH	4.025.394.244	3.692.604.405,00	(332.789.839)	91,73
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.986.762.744	3.654.264.405,00	(332.498.339)	91,65
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	1.925.105.468	1.784.290.879,00	(140.814.589)	92,68
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.061.657.276	1.869.973.526,00	(191.683.750)	90,70
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	38.631.500	38.340.000,00	(291,500)	99,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.631.500	38.340.000,00	(291,500)	99,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004		UPT Puskesmas Gantung	5.730.958.304	5.172.381.456,00	(558.576.848)	90,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	5	BELANJA DAERAH	5.730.958.304	5.172.381.456,00	(558.576.848)	90,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.492.757.304	4.974.100.456,00	(518.656.848)	90,56
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.500.987	2.469.157.701,00	(31.343.286)	98,75
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.992.256.317	2.504.942.755,00	(487.313.562)	83,70
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	238.201.000	198.281.000,00	(39.920.000)	83,23
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.201.000	198.281.000,00	(39.920.000)	83,23
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005		UPT Puskesmas Kelapa Kampit	5.345.308.503	4.580.321.491,00	(764.987.012)	85,68
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	5	BELANJA DAERAH	5.345.308.503	4.580.321.491,00	(764.987.012)	85,68
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.239.684.503	4.532.491.491,00	(707.193.012)	86,5
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	2.385.595.469	2.273.916.658,00	(111.678.811)	95,31
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.854.089.034	2.258.574.833,00	(595.514.201)	79,12
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	105.624.000	47.830.000,00	(57.794.000)	45,28
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.624.000	47.830.000,00	(57.794.000)	45,28
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006		UPT Puskesmas Simpang Pesak	3.802.934.014	3.256.231.999,00	(546.702.015)	85,62
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5	BELANJA DAERAH	3.802.934.014	3.256.231.999,00	(546.702.015)	85,62
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.258.088.714	2.861.877.853,00	(396.210.861)	87,84

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	1.627.162.682	1.483.975.675,00	(143.187.007)	91,20
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.630.926.032	1.377.902.178,00	(253.023.854)	84,48
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.2	BELANJA MODAL	544.845.300	394.354.146,00	(150.491.154)	72,37
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.345.300	65.098.000,00	(149.247.300)	30,37
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.500.000	299.480.285,00	(1.019.715)	99,65
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000	29.775.861,00	(224.139)	99,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007		UPT Puskesmas Renggiang	3.582.587.272	3.243.391.365,00	(339.195.907)	90,53
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	5	BELANJA DAERAH	3.582.587.272	3.243.391.365,00	(339.195.907)	90,53
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.508.026.272	3.197.166.365,00	(310.859.907)	91,14
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	1.069.239.150	1.052.859.212,00	(16.379.938)	98,46
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.438.787.122	2.144.307.153,00	(294.479.969)	87,93
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	74.561.000	46.225.000,00	(28.336.000)	62,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.561.000	46.225.000,00	(28.336.000)	62,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008		UPT Puskesmas Dendang	2.840.514.466	2.403.519.631,00	(436.994.835)	84,61
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	5	BELANJA DAERAH	2.840.514.466	2.403.519.631,00	(436.994.835)	84,62
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.779.602.466	2.386.989.631,00	(392.612.835)	85,87
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	1.191.233.378	1.140.654.817,00	(50.578.561)	95,75
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.369.088	1.246.334.814,00	(342.034.274)	78,46
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	60.912.000	16.530.000,00	(44.382.000)	27,14
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.912.000	16.530.000,00	(44.382.000)	27,14
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85.546.798.399	77.136.835.568,06	(8.409.962.830)	90,16
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	85.546.798.399	77.136.835.568,06	(8.409.962.830)	90,16
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5	BELANJA DAERAH	85.546.798.399	77.136.835.568,06	(8.409.962.830)	90,17
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.071.371.402	15.127.678.699,00	(2.943.692.703)	83,70
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.948.898.224	5.478.484.990,00	(470.413.234)	92,09
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.122.473.178	9.649.193.709,00	(2.473.279.469)	79,59
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	67.475.426.997	62.009.156.869,06	(5.466.270.127)	91,90
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	515.581.000	394.900.000,00	(120.681.000)	76,59
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.908.124.997	61.562.756.869,06	(5.345.368.127)	92,01
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000	51.500.000,00	(221.000)	99,56

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.105.892.850	8.535.613.060,00	(570.279.790)	93,73
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.105.892.850	8.535.613.060,00	(570.279.790)	93,73
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.105.892.850	8.535.613.060,00	(570.279.790)	93,73
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.084.083.000	2.876.329.060,00	(207.753.940)	93,26
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.734.083.000	1.526.329.060,00	(207.753.940)	88,01
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.350.000.000	1.350.000.000,00	0	100,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.021.809.850	5.659.284.000,00	(362.525.850)	93,98
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.914.000	7.389.000,00	(22.525.000)	24,69
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.991.895.850	5.651.895.000,00	(340.000.850)	94,32
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.500.596.336	15.893.236.789,00	(607.359.547)	96,31
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	11.041.774.334	10.864.633.848,00	(177.140.486)	98,39
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	11.041.774.334	10.864.633.848,00	(177.140.486)	98,40
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.942.317.334	10.765.533.848,00	(176.783.486)	98,37
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.251.212.334	5.175.855.036,00	(75.357.298)	98,56
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.691.105.000	5.589.678.812,00	(101.426.188)	98,21
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	99.457.000	99.100.000,00	(357.000)	99,64
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.457.000	99.100.000,00	(357.000)	99,64
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.458.822.002	5.028.602.941,00	(430.219.061)	92,11
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	5.458.822.002	5.028.602.941,00	(430.219.061)	92,12
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.030.494.002	4.639.097.941,00	(391.396.061)	92,21
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.988.597.502	1.768.339.750,00	(220.257.752)	88,92
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.041.896.500	2.870.758.191,00	(171.138.309)	94,37
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	428.328.000	389.505.000,00	(38.823.000)	90,93
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	428.328.000	389.505.000,00	(38.823.000)	90,93
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.190.591.850	6.531.099.795,00	(659.492.055)	90,82
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.190.591.850	6.531.099.795,00	(659.492.055)	90,82
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	7.190.591.850	6.531.099.795,00	(659.492.055)	90,82
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.732.936.350	6.083.980.795,00	(648.955.555)	90,35
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.092.741.580	1.985.750.401,00	(106.991.179)	94,89
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.448.194.770	3.909.230.394,00	(538.964.376)	87,87

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	192.000.000	189.000.000,00	(3.000.000)	98,43
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	457.655.500	447.119.000,00	(10.536.500)	97,70
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.952.500	324.575.000,00	(10.377.500)	96,90
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.703.000	122.544.000,00	(159.000)	99,87
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	101.853.032.968	91.186.776.430,00	(10.666.256.538)	89,52
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.724.205.900	6.926.864.882,00	(797.341.018)	89,67
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.724.205.900	6.926.864.882,00	(797.341.018)	89,67
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	7.724.205.900	6.926.864.882,00	(797.341.018)	89,68
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.394.672.900	6.603.364.882,00	(791.308.018)	89,29
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.575.644.982	4.059.307.665,00	(516.337.317)	88,71
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.819.027.918	2.544.057.217,00	(274.970.701)	90,25
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	329.533.000	323.500.000,00	(6.033.000)	98,17
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.813.000	272.087.000,00	(4.726.000)	98,29
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.720.000	51.413.000,00	(1.307.000)	97,51
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	790.313.000	606.829.900,00	(183.483.100)	76,78
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	790.313.000	606.829.900,00	(183.483.100)	76,78
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	790.313.000	606.829.900,00	(183.483.100)	76,78
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	790.313.000	606.829.900,00	(183.483.100)	76,78
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.313.000	606.829.900,00	(183.483.100)	76,78
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	313.792.892	293.766.842,00	(20.026.050)	93,61
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	313.792.892	293.766.842,00	(20.026.050)	93,61
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	313.792.892	293.766.842,00	(20.026.050)	93,62
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	313.792.892	293.766.842,00	(20.026.050)	93,62
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.792.892	293.766.842,00	(20.026.050)	93,62
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	500.305.000	307.592.500,00	(192.712.500)	61,48
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	500.305.000	307.592.500,00	(192.712.500)	61,48
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	5	BELANJA DAERAH	500.305.000	307.592.500,00	(192.712.500)	61,47
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	500.305.000	307.592.500,00	(192.712.500)	61,47

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.305.000	307.592.500,00	(192.712.500)	61,47
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.712.402.004	11.868.556.105,00	(1.843.845.899)	86,55
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	13.712.402.004	11.868.556.105,00	(1.843.845.899)	86,55
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.712.402.004	11.868.556.105,00	(1.843.845.899)	86,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.567.988.504	10.745.008.666,00	(1.822.979.838)	85,5
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.049.378.848	3.802.051.761,00	(247.327.087)	93,89
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.518.609.656	6.942.956.905,00	(1.575.652.751)	81,5
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.144.413.500	1.123.547.439,00	(20.866.061)	98,18
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.144.413.500	1.123.547.439,00	(20.866.061)	98,18
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.614.318.008	5.196.278.683,00	(418.039.325)	92,55
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008	5.196.278.683,00	(418.039.325)	92,55
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.614.318.008	5.196.278.683,00	(418.039.325)	92,54
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.439.784.008	5.023.503.683,00	(416.280.325)	92,34
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.193.736.302	2.964.059.598,00	(229.676.704)	92,81
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.246.047.706	2.059.444.085,00	(186.603.621)	91,68
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	174.534.000	172.775.000,00	(1.759.000)	98,98
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.534.000	172.775.000,00	(1.759.000)	98,98
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.769.432.494	6.960.018.970,00	(809.413.524)	89,58
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.769.432.494	6.960.018.970,00	(809.413.524)	89,58
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.769.432.494	6.960.018.970,00	(809.413.524)	89,57
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.699.923.494	6.891.418.970,00	(808.504.524)	89,5
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.526.900.670	4.096.397.019,00	(430.503.651)	90,48
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.173.022.824	2.795.021.951,00	(378.000.873)	88,09
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	69.509.000	68.600.000,00	(909.000)	98,68
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.509.000	68.600.000,00	(909.000)	98,68
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.742.845.000	2.752.657.842,00	(990.187.158)	73,54
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.742.845.000	2.752.657.842,00	(990.187.158)	73,54
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.742.845.000	2.752.657.842,00	(990.187.158)	73,54
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.742.845.000	2.752.657.842,00	(990.187.158)	73,54

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.845.000	2.752.657.842,00	(990.187.158)	73,54
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.270.265.206	15.953.810.635,00	(1.316.454.571)	92,37
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	17.270.265.206	15.953.810.635,00	(1.316.454.571)	92,37
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.270.265.206	15.953.810.635,00	(1.316.454.571)	92,37
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.547.330.218	11.258.472.135,00	(1.288.858.083)	89,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.067.392.944	2.897.743.978,00	(169.648.966)	94,46
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.479.937.274	8.360.728.157,00	(1.119.209.117)	88,18
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.722.934.988	4.695.338.500,00	(27.596.488)	99,42
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.922.909.500	2.896.535.500,00	(26.374.000)	99,09
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.800.025.488	1.798.803.000,00	(1.222.488)	99,93
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.916.374.030	9.973.835.931,00	(942.538.099)	91,36
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.916.374.030	9.973.835.931,00	(942.538.099)	91,36
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	10.916.374.030	9.973.835.931,00	(942.538.099)	91,37
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.420.554.030	9.511.085.431,00	(909.468.599)	91,26
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.872.367.430	4.493.975.250,00	(378.392.180)	92,23
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.548.186.600	5.017.110.181,00	(531.076.419)	90,43
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	495.820.000	462.750.500,00	(33.069.500)	93,32
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.820.000	462.750.500,00	(33.069.500)	93,32
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.099.182.840	843.257.117,00	(255.925.723)	76,71
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.099.182.840	843.257.117,00	(255.925.723)	76,71
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.099.182.840	843.257.117,00	(255.925.723)	76,71
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	999.182.840	743.617.617,00	(255.565.223)	74,42
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.182.840	743.617.617,00	(255.565.223)	74,42
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	99.639.500,00	(360.500)	99,64
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	99.639.500,00	(360.500)	99,64
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.359.533.495	5.485.463.150,00	(874.070.345)	86,25
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.359.533.495	5.485.463.150,00	(874.070.345)	86,25
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	6.359.533.495	5.485.463.150,00	(874.070.345)	86,26
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.061.894.495	5.190.284.547,00	(871.609.948)	85,62
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.895.165.150	2.414.591.248,00	(480.573.902)	83,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.166.729.345	2.775.693.299,00	(391.036.046)	87,65
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	297.639.000	295.178.603,00	(2.460.397)	99,17
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.639.000	95.342.000,00	(2.297.000)	97,65
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	199.836.603,00	(163.397)	99,92
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.827.648.114	11.881.729.347,00	(945.918.767)	92,62
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.827.648.114	11.881.729.347,00	(945.918.767)	92,62
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.827.648.114	11.881.729.347,00	(945.918.767)	92,62
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.642.754.114	11.709.911.347,00	(932.842.767)	92,62
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.509.560.514	3.271.756.059,00	(237.804.455)	93,21
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.133.193.600	5.438.155.288,00	(695.038.312)	88,67
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000,00	0	100,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	184.894.000	171.818.000,00	(13.076.000)	92,93
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.404.000	99.638.000,00	(12.766.000)	88,64
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.490.000	72.180.000,00	(310.000)	99,56
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	274.361.000	230.036.000,00	(44.325.000)	83,84
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	274.361.000	230.036.000,00	(44.325.000)	83,84
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	274.361.000	230.036.000,00	(44.325.000)	83,84
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	274.361.000	230.036.000,00	(44.325.000)	83,84
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.361.000	230.036.000,00	(44.325.000)	83,84
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	281.359.000	237.287.818,00	(44.071.182)	84,33
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	281.359.000	237.287.818,00	(44.071.182)	84,33
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	281.359.000	237.287.818,00	(44.071.182)	84,34
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	281.359.000	237.287.818,00	(44.071.182)	84,34
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.359.000	237.287.818,00	(44.071.182)	84,34
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.219.705.802	6.462.255.517,00	(757.450.285)	89,50
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.219.705.802	6.462.255.517,00	(757.450.285)	89,50
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	7.219.705.802	6.462.255.517,00	(757.450.285)	89,51
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.175.909.802	6.419.395.517,00	(756.514.285)	89,45
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.406.229.138	2.974.183.807,00	(432.045.331)	87,31
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.769.680.664	3.445.211.710,00	(324.468.954)	91,39

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	43.796.000	42.860.000,00	(936.000)	97,85
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.796.000	42.860.000,00	(936.000)	97,85
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.202.813.183	4.988.069.464,00	(214.743.719)	95,87
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.202.813.183	4.988.069.464,00	(214.743.719)	95,87
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.202.813.183	4.988.069.464,00	(214.743.719)	95,87
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.192.533.183	4.988.069.464,00	(204.463.719)	96,06
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.761.528.048	3.703.172.948,00	(58.355.100)	98,45
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.431.005.135	1.284.896.516,00	(146.108.619)	89,79
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.280.000	0,00	(10.280.000)	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.280.000	0,00	(10.280.000)	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	234.176.000	218.465.727,00	(15.710.273)	93,29
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	234.176.000	218.465.727,00	(15.710.273)	93,29
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	234.176.000	218.465.727,00	(15.710.273)	93,29
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	234.176.000	218.465.727,00	(15.710.273)	93,29
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.176.000	218.465.727,00	(15.710.273)	93,29
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	46.564.946.142	40.361.130.446,00	(6.203.815.696)	86,67
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.147.244.990	15.860.968.219,00	(1.286.276.771)	92,49
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	17.147.244.990	15.860.968.219,00	(1.286.276.771)	92,49
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.147.244.990	15.860.968.219,00	(1.286.276.771)	92,5
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.254.978.990	14.177.172.307,00	(1.077.806.683)	92,93
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.281.189.900	3.987.989.963,00	(293.199.937)	93,15
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.973.789.090	10.189.182.344,00	(784.606.746)	92,84
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.892.266.000	1.683.795.912,00	(208.470.088)	88,98
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	581.446.000	572.404.962,00	(9.041.038)	98,45
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.310.820.000	1.111.390.950,00	(199.429.050)	84,79
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.204.353.202	3.417.543.606,00	(2.786.809.596)	55,08
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.204.353.202	3.417.543.606,00	(2.786.809.596)	55,08
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	6.204.353.202	3.417.543.606,00	(2.786.809.596)	55,07
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.361.956.202	2.692.882.856,00	(669.073.346)	80,09
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.361.956.202	2.692.882.856,00	(669.073.346)	80,09

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.842.397.000	724.660.750,00	(2.117.736.250)	25,48
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.000.000	91.602.750,00	(13.397.250)	87,23
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.737.397.000	633.058.000,00	(2.104.339.000)	23,12
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14.584.458.032	13.419.492.257,00	(1.164.965.775)	92,01
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	14.584.458.032	13.419.492.257,00	(1.164.965.775)	92,01
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	14.584.458.032	13.419.492.257,00	(1.164.965.775)	92,01
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.370.776.032	13.232.846.257,00	(1.137.929.775)	92,07
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.014.452.568	8.755.899.616,00	(258.552.952)	97,12
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.356.323.464	4.476.946.641,00	(879.376.823)	83,57
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	213.682.000	186.646.000,00	(27.036.000)	87,34
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.182.000	181.146.000,00	(27.036.000)	87,01
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.500.000	5.500.000,00	0	100,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.095.526.918	7.288.609.856,00	(806.917.062)	90,03
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.095.526.918	7.288.609.856,00	(806.917.062)	90,03
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	8.095.526.918	7.288.609.856,00	(806.917.062)	90,03
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.435.952.918	6.731.363.856,00	(704.589.062)	90,51
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.438.774.418	3.108.429.086,00	(330.345.332)	90,39
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.997.178.500	3.622.934.770,00	(374.243.730)	90,64
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	659.574.000	557.246.000,00	(102.328.000)	84,48
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.874.000	357.876.000,00	(101.998.000)	77,81
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.700.000	199.370.000,00	(330.000)	99,82
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	533.363.000	374.516.508,00	(158.846.492)	70,21
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	533.363.000	374.516.508,00	(158.846.492)	70,21
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	533.363.000	374.516.508,00	(158.846.492)	70,21
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	533.363.000	374.516.508,00	(158.846.492)	70,21
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.363.000	374.516.508,00	(158.846.492)	70,21
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.667.943.190	84.536.840.282,00	(9.131.102.908)	90,25
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	48.060.558.164	44.726.876.326,00	(3.333.681.838)	93,06
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	48.060.558.164	44.726.876.326,00	(3.333.681.838)	93,06
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	48.060.558.164	44.726.876.326,00	(3.333.681.838)	93,06

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	46.404.732.164	43.238.348.826,00	(3.166.383.338)	93,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.367.639.446	15.293.023.531,00	(1.074.615.915)	93,43
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.047.092.718	24.955.325.295,00	(2.091.767.423)	92,26
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.990.000.000	2.990.000.000,00	0	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.655.826.000	1.488.527.500,00	(167.298.500)	89,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.655.826.000	1.488.527.500,00	(167.298.500)	89,90
4.02			SEKRETARIAT DPRD	45.607.385.026	39.809.963.956,00	(5.797.421.070)	87,28
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	45.607.385.026	39.809.963.956,00	(5.797.421.070)	87,28
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	45.607.385.026	39.809.963.956,00	(5.797.421.070)	87,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	44.708.873.026	38.994.688.962,00	(5.714.184.064)	87,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.024.296.402	15.713.396.939,00	(310.899.463)	98,06
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.684.576.624	23.281.292.023,00	(5.403.284.601)	81,15
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	898.512.000	815.274.994,00	(83.237.006)	90,73
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	678.998.000	649.448.016,00	(29.549.984)	95,65
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.514.000	165.826.978,00	(53.687.022)	75,54
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	133.187.261.267	128.078.743.574,84	(5.108.517.692)	96,16
5.01			PERENCANAAN	8.477.825.758	7.138.631.280,00	(1.339.194.478)	84,20
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.477.825.758	7.138.631.280,00	(1.339.194.478)	84,20
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	8.477.825.758	7.138.631.280,00	(1.339.194.478)	84,20
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.477.825.758	7.138.631.280,00	(1.339.194.478)	84,20
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.735.696.262	4.158.311.148,00	(577.385.114)	87,81
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.129.496	2.980.320.132,00	(761.809.364)	79,64
5.02			KEUANGAN	115.400.416.899	112.189.017.122,84	(3.211.399.776)	97,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	115.400.416.899	112.189.017.122,84	(3.211.399.776)	97,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	115.400.416.899	112.189.017.122,84	(3.211.399.776)	97,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.624.900.921	13.236.890.066,00	(1.388.010.855)	90,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.587.796.938	7.996.232.941,00	(591.563.997)	93,10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.037.103.983	5.240.657.125,00	(796.446.858)	86,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	258.530.000	215.337.000,00	(43.193.000)	83,29

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.530.000	215.337.000,00	(43.193.000)	83,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	559.132.832,00	(440.867.168)	55,90
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	559.132.832,00	(440.867.168)	55,90
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	99.516.985.978	98.177.657.224,84	(1.339.328.753)	98,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.340.051.078	5.001.045.629,84	(1.339.005.448)	78,87
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.934.900	93.176.611.595,00	(323,305)	100,00
5.03			KEPEGAWAIAN	7.435.169.610	7.100.584.781,00	(334.584.829)	95,49
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.435.169.610	7.100.584.781,00	(334.584.829)	95,49
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.435.169.610	7.100.584.781,00	(334.584.829)	95,5
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.312.532.610	6.980.134.781,00	(332.397.829)	95,45
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.033.542.794	4.026.686.606,00	(6.856.188)	99,82
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.278.989.816	2.953.448.175,00	(325.541.641)	90,06
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	122.637.000	120.450.000,00	(2.187.000)	98,21
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.637.000	120.450.000,00	(2.187.000)	98,21
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	922.595.000	860.206.119,00	(62.388.881)	93,23
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	922.595.000	860.206.119,00	(62.388.881)	93,23
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	922.595.000	860.206.119,00	(62.388.881)	93,23
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	922.595.000	860.206.119,00	(62.388.881)	93,23
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	922.595.000	860.206.119,00	(62.388.881)	93,23
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	951.254.000	790.304.272,00	(160.949.728)	83,08
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	951.254.000	790.304.272,00	(160.949.728)	83,08
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	951.254.000	790.304.272,00	(160.949.728)	83,07
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	951.254.000	790.304.272,00	(160.949.728)	83,07
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.254.000	790.304.272,00	(160.949.728)	83,07
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.574.842.322	12.553.325.537,00	(1.021.516.785)	92,47
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	13.574.842.322	12.553.325.537,00	(1.021.516.785)	92,47
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	13.574.842.322	12.553.325.537,00	(1.021.516.785)	92,47
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.574.842.322	12.553.325.537,00	(1.021.516.785)	92,46
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.061.766.322	12.043.811.537,00	(1.017.954.785)	92,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.282.996.322	8.906.991.655,00	(376.004.667)	95,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.778.770.000	3.136.819.882,00	(641.950.118)	83,01
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	513.076.000	509.514.000,00	(3.562.000)	99,31
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.376.000	233.314.000,00	(3.062.000)	98,70
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	276.700.000	276.200.000,00	(500.000)	99,81
7			UNSUR KEWILAYAHAN	23.385.605.106	21.988.886.604,00	(1.396.718.502)	94,02
7.01			KECAMATAN	23.385.605.106	21.988.886.604,00	(1.396.718.502)	94,02
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Manggar	3.788.594.079	3.418.433.239,00	(370.160.840)	90,22
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.788.594.079	3.418.433.239,00	(370.160.840)	90,23
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.788.594.079	3.418.433.239,00	(370.160.840)	90,23
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.976.943.100	1.717.025.624,00	(259.917.476)	86,84
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.811.650.979	1.701.407.615,00	(110.243.364)	93,90
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Gantung	3.591.562.006	3.464.023.935,00	(127.538.071)	96,44
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.591.562.006	3.464.023.935,00	(127.538.071)	96,45
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.473.915.006	3.354.591.935,00	(119.323.071)	96,56
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.999.226.800	1.959.798.976,00	(39.427.824)	98,03
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.474.688.206	1.394.792.959,00	(79.895.247)	94,57
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	117.647.000	109.432.000,00	(8.215.000)	93,01
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.647.000	109.432.000,00	(8.215.000)	93,01
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Kelapa Kampit	3.600.542.644	3.381.113.761,00	(219.428.883)	93,90
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	3.600.542.644	3.381.113.761,00	(219.428.883)	93,90
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.542.644	3.381.113.761,00	(219.428.883)	93,90
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.193.074.000	2.043.757.705,00	(149.316.295)	93,18
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.407.468.644	1.337.356.056,00	(70.112.588)	95,01
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Simpang Pesak	3.062.752.602	2.904.059.736,00	(158.692.866)	94,81
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	3.062.752.602	2.904.059.736,00	(158.692.866)	94,81
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.062.752.602	2.904.059.736,00	(158.692.866)	94,81
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.760.890.312	1.616.256.068,00	(144.634.244)	91,79
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.301.862.290	1.287.803.668,00	(14.058.622)	98,92
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Damar	3.177.054.559	2.965.466.104,00	(211.588.455)	93,34
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	3.177.054.559	2.965.466.104,00	(211.588.455)	93,34

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.091.250.559	2.883.316.104,00	(207.934.455)	93,26
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.931.166.559	1.827.559.516,00	(103.607.043)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.084.000	1.055.756.588,00	(104.327.412)	91,01
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	85.804.000	82.150.000,00	(3.654.000)	95,73
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.804.000	82.150.000,00	(3.654.000)	95,73
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Simpang Renggiang	3.025.273.732	2.850.637.026,00	(174.636.706)	94,22
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	3.025.273.732	2.850.637.026,00	(174.636.706)	94,23
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.893.141.732	2.719.936.426,00	(173.205.306)	94,01
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.458.679.400	1.393.537.606,00	(65.141.794)	95,53
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.462.332	1.326.398.820,00	(108.063.512)	92,46

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	RÉALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	132.132.000	130.700.600,00	(1.431.400)	98,92
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.002.000	15.270.000,00	(732,000)	95,43
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.130.000	115.430.600,00	(699,400)	99,40
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Dendang	3.139.825.484	3.005.152.803,00	(134.672.681)	95,71
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	3.139.825.484	3.005.152.803,00	(134.672.681)	95,70
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.089.179.484	2.966.207.803,00	(122.971.681)	96,01
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.740.035.152	1.676.366.916,00	(63.668.236)	96,34
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.144.332	1.289.840.887,00	(59.303.445)	95,59
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.646.000	38.945.000,00	(11.701.000)	76,90
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.646.000	38.945.000,00	(11.701.000)	76,90
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.695.426.193	23.172.928.577,00	(1.522.497.616)	93,83
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.695.426.193	23.172.928.577,00	(1.522.497.616)	93,83
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.695.426.193	23.172.928.577,00	(1.522.497.616)	93,83
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	24.695.426.193	23.172.928.577,00	(1.522.497.616)	93,82
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.585.172.193	23.064.324.577,00	(1.520.847.616)	93,81
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.003.849.024	1.854.651.464,00	(149.197.560)	92,54
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.123.662.874	4.752.031.613,00	(1.371.631.261)	77,59
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	16.457.660.295	16.457.641.500,00	(18,795)	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	110.254.000	108.604.000,00	(1.650.000)	98,5
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.254.000	108.604.000,00	(1.650.000)	98,5
			Jumlah	(133.750.986.725)	(79.942.903.412,91)	53.808.083.312	59,76

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN KAB. BELITUNG TIMUR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
PENDAPATAN DAERAH	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12	913.345.884.385,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81
Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88
Retribusi Daerah	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
Lain-lain PAD yang Sah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81
PENDAPATAN TRANSFER	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17	797.524.959.927,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.154.152.000,00	638.804.819.351,00	99,02	691.913.115.463,00
Dana Bagi Hasil Pajak	18.606.203.000,00	18.606.203.000,00	100,00	24.174.487.432,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	65.545.830.000,00	65.545.830.000,00	100,00	131.597.403.410,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	450.361.356.000,00	449.044.881.195,00	99,71	431.104.192.225,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	110.640.763.000,00	105.607.905.156,00	95,45	105.037.032.396,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	645.154.152.000,00	638.804.819.351,00	99,02	691.913.115.463,00
Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	100,00	38.883.640.000,00
Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	30.100.485.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	69.826.081.000,00	69.826.081.000,00	100,00	38.883.640.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55	55.478.000.512,00
Pendapatan Bagi Hasil	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55	52.921.000.512,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.557.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55	55.478.000.512,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17	797.524.959.927,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58	8.412.879.414,00
Pendapatan Hibah	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	8.412.879.414,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58	8.412.879.414,00
JUMLAH PENDAPATAN	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12	913.345.884.385,81
BELANJA DAERAH	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15	929.775.827.118,94
BELANJA OPERASI	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20
Belanja Pegawai	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00
Belanja Barang dan Jasa	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20
Belanja Hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43	23.980.505.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20
BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38	33.092.550.506,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47	35.617.596.997,30
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42	70.488.019.993,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71	1.754.080.380,00
Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
BELANJA TRANSFER	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.847.791.380,00	4.582.381.939,39	78,36	5.016.180.284,17
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	492.259.698,00	418.663.690,45	85,05	495.071.173,27
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	100,00	101.318.340.303,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44
JUMLAH BELANJA	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15	929.775.827.118,94
SURPLUS/DEFISIT	(133.750.986.725,00)	(79.942.903.412,91)	59,77	(16.429.942.733,13)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
PEMBIAYAAN DAERAH	141.750.986.725,00	141.355.387.470,00	99,72	153.680.929.458,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	99,71	153.680.929.458,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	100,00	153.535.018.028,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	104.400.745,00	20,88	145.911.430,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	99,71	153.680.929.458,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	99,70	153.680.929.458,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	53.412.484.057,09	0,00	137.250.986.724,87

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	232.554.365.834,00	222.004.653.129,24	-10.549.712.704,76	95,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.680.559.514,00	168.496.161.179,00	-7.184.398.335,00	95,91	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.800.000,00	6.664.000,00	-136.000,00	98,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.800.000,00	1.750.000,00	-50.000,00	97,22	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.750.000,00	-50.000,00	97,22	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.750.000,00	-50.000,00	97,22	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.000.000,00	1.956.000,00	-44.000,00	97,79	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.956.000,00	-44.000,00	97,79	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.956.000,00	-44.000,00	97,79	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.500.000,00	1.485.000,00	-15.000,00	99,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.485.000,00	-15.000,00	99,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.485.000,00	-15.000,00	99,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00	1.473.000,00	-27.000,00	98,20	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.473.000,00	-27.000,00	98,20	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.473.000,00	-27.000,00	98,20	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	169.005.420.514,00	162.206.188.535,00	-6.799.231.979,00	95,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	168.994.623.514,00	162.197.411.535,00	-6.797.211.979,00	95,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.994.623.514,00	162.197.411.535,00	-6.797.211.979,00	95,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	168.994.623.514,00	162.197.411.535,00	-6.797.211.979,00	95,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5.997.000,00	3.977.000,00	-2.020.000,00	66,31	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.997.000,00	3.977.000,00	-2.020.000,00	66,31	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.997.000,00	3.977.000,00	-2.020.000,00	66,31	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	137.559.000,00	127.719.000,00	-9.840.000,00	92,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	87.663.000,00	78.663.000,00	-9.000.000,00	89,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.663.000,00	78.663.000,00	-9.000.000,00	89,73	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.663.000,00	78.663.000,00	-9.000.000,00	89,73	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	49.896.000,00	49.056.000,00	-840.000,00	98,31	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.896.000,00	49.056.000,00	-840.000,00	98,31	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.896.000,00	49.056.000,00	-840.000,00	98,31	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.998.000,00	16.998.000,00	-8.000.000,00	67,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.998.000,00	16.998.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.998.000,00	16.998.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.998.000,00	16.998.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.032.530.000,00	978.580.091,00	-53.949.909,00	94,77	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	31.797.000,00	-3.203.000,00	90,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	31.797.000,00	-3.203.000,00	90,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.797.000,00	-3.203.000,00	90,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	261.763.000,00	224.399.000,00	-37.364.000,00	85,72	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	261.763.000,00	224.399.000,00	-37.364.000,00	85,72	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.763.000,00	224.399.000,00	-37.364.000,00	85,72	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	18.512.000,00	-1.488.000,00	92,56	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.512.000,00	-1.488.000,00	92,56	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.512.000,00	-1.488.000,00	92,56	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	128.467.000,00	126.241.000,00	-2.226.000,00	98,26	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	128.467.000,00	126.241.000,00	-2.226.000,00	98,26	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.467.000,00	126.241.000,00	-2.226.000,00	98,26	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	65.000.000,00	58.295.320,00	-6.704.680,00	89,68	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	58.295.320,00	-6.704.680,00	89,68	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	58.295.320,00	-6.704.680,00	89,68	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	500.000.000,00	499.935.771,00	-64.229,00	99,98	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.935.771,00	-64.229,00	99,98	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.935.771,00	-64.229,00	99,98	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	22.300.000,00	19.400.000,00	-2.900.000,00	86,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.300.000,00	19.400.000,00	-2.900.000,00	86,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	19.400.000,00	-2.900.000,00	86,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	716.207.000,00	704.025.600,00	-12.181.400,00	98,29	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	350.600.000,00	349.485.600,00	-1.114.400,00	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	350.600.000,00	349.485.600,00	-1.114.400,00	99,68	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.600.000,00	349.485.600,00	-1.114.400,00	99,68	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	365.607.000,00	354.540.000,00	-11.067.000,00	96,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	365.607.000,00	354.540.000,00	-11.067.000,00	96,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.607.000,00	354.540.000,00	-11.067.000,00	96,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.194.425.000,00	3.899.347.207,00	-295.077.793,00	92,96	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	233.400.000,00	142.464.707,00	-90.935.293,00	61,03	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	233.400.000,00	142.464.707,00	-90.935.293,00	61,03	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.400.000,00	142.464.707,00	-90.935.293,00	61,03	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	611.625.000,00	594.150.000,00	-17.475.000,00	97,14	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	611.625.000,00	594.150.000,00	-17.475.000,00	97,14	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.625.000,00	594.150.000,00	-17.475.000,00	97,14	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.347.000.000,00	3.162.732.500,00	-184.267.500,00	94,49	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.347.000.000,00	3.162.732.500,00	-184.267.500,00	94,49	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.347.000.000,00	3.162.732.500,00	-184.267.500,00	94,49	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	562.620.000,00	556.638.746,00	-5.981.254,00	98,93	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	70.000.000,00	69.771.195,00	-228.805,00	99,67	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.771.195,00	-228.805,00	99,67	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.771.195,00	-228.805,00	99,67	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	404.660.000,00	399.047.551,00	-5.612.449,00	98,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	404.660.000,00	399.047.551,00	-5.612.449,00	98,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.660.000,00	399.047.551,00	-5.612.449,00	98,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	87.960.000,00	87.820.000,00	-140.000,00	99,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	87.960.000,00	87.820.000,00	-140.000,00	99,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.960.000,00	87.820.000,00	-140.000,00	99,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.694.441.320,00	53.365.508.931,24	-3.328.932.388,76	94,12	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	31.658.144.420,00	30.034.896.099,00	-1.623.248.321,00	94,87	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	480.636.000,00	388.829.367,97	-91.806.632,03	80,89	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	480.636.000,00	388.829.367,97	-91.806.632,03	80,89	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	480.636.000,00	388.829.367,97	-91.806.632,03	80,89	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.459.410.000,00	3.257.048.571,38	-202.361.428,62	94,15	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	249.825.000,00	202.399.196,00	-47.425.804,00	81,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	249.825.000,00	202.399.196,00	-47.425.804,00	81,01	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.209.585.000,00	3.054.649.375,38	-154.935.624,62	95,17	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.209.585.000,00	3.054.649.375,38	-154.935.624,62	95,17	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	134.629.000,00	101.800.052,00	-32.828.948,00	75,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.629.000,00	101.800.052,00	-28.828.948,00	77,93	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	130.629.000,00	101.800.052,00	-28.828.948,00	77,93	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	112.000.000,00	111.568.500,00	-431.500,00	99,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	112.000.000,00	111.568.500,00	-431.500,00	99,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.000.000,00	111.568.500,00	-431.500,00	99,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.469.800.000,00	1.433.894.398,00	-35.905.602,00	97,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	1.469.800.000,00	1.433.894.398,00	-35.905.602,00	97,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.469.800.000,00	1.433.894.398,00	-35.905.602,00	97,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	427.952.000,00	419.365.000,00	-8.587.000,00	97,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	38.303.000,00	36.977.000,00	-1.326.000,00	96,53	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.05	Belanja Hibah	38.303.000,00	36.977.000,00	-1.326.000,00	96,53	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	389.649.000,00	382.388.000,00	-7.261.000,00	98,13	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.649.000,00	382.388.000,00	-7.261.000,00	98,13	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	199.485.000,00	192.621.000,00	-6.864.000,00	96,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	199.485.000,00	192.621.000,00	-6.864.000,00	96,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.485.000,00	192.621.000,00	-6.864.000,00	96,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	1.105.676.000,00	1.099.800.000,00	-5.876.000,00	99,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	100.516.000,00	100.000.000,00	-516.000,00	99,48	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1.05	Belanja Hibah	100.516.000,00	100.000.000,00	-516.000,00	99,48	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	1.005.160.000,00	999.800.000,00	-5.360.000,00	99,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.005.160.000,00	999.800.000,00	-5.360.000,00	99,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	682.826.000,00	573.871.993,00	-108.954.007,00	84,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	682.826.000,00	573.871.993,00	-108.954.007,00	84,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.826.000,00	573.871.993,00	-108.954.007,00	84,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	2.874.388.100,00	2.679.497.300,00	-194.890.800,00	93,21	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.874.388.100,00	2.679.497.300,00	-194.890.800,00	93,21	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.874.388.100,00	2.679.497.300,00	-194.890.800,00	93,21	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	80.746.000,00	53.685.000,00	-27.061.000,00	66,48	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	80.746.000,00	53.685.000,00	-27.061.000,00	66,48	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.746.000,00	53.685.000,00	-27.061.000,00	66,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	7.000.000,00	5.670.000,00	-1.330.000,00	81,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.670.000,00	-1.330.000,00	81,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.670.000,00	-1.330.000,00	81,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	15.508.157.320,00	15.468.346.839,00	-39.810.481,00	99,74	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	12.894.601.320,00	12.865.030.220,00	-29.571.100,00	99,77	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.775.501.131,00	12.760.930.220,00	-14.570.911,00	99,88	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	119.100.189,00	104.100.000,00	-15.000.189,00	87,40	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	2.613.556.000,00	2.603.316.619,00	-10.239.381,00	99,60	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.529.570.500,00	1.529.519.819,00	-50.681,00	99,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.083.985.500,00	1.073.796.800,00	-10.188.700,00	99,06	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	20.000.000,00	18.170.000,00	-1.830.000,00	90,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.170.000,00	-1.830.000,00	90,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.170.000,00	-1.830.000,00	90,84	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	9.963.000,00	9.858.000,00	-105.000,00	98,94	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	9.963.000,00	9.858.000,00	-105.000,00	98,94	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.963.000,00	9.858.000,00	-105.000,00	98,94	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	374.800.000,00	371.040.000,00	-3.760.000,00	98,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	374.800.000,00	371.040.000,00	-3.760.000,00	98,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.800.000,00	371.040.000,00	-3.760.000,00	98,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	762.660.000,00	711.187.710,65	-51.472.289,35	93,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	762.660.000,00	711.187.710,65	-51.472.289,35	93,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	762.660.000,00	711.187.710,65	-51.472.289,35	93,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	49.994.000,00	42.611.000,00	-7.383.000,00	85,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	49.994.000,00	42.611.000,00	-7.383.000,00	85,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.994.000,00	42.611.000,00	-7.383.000,00	85,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	3.898.022.000,00	3.096.031.367,00	-801.990.633,00	79,42	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	3.874.022.000,00	3.072.031.367,00	-801.990.633,00	79,29	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.874.022.000,00	3.072.031.367,00	-801.990.633,00	79,29	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16.979.634.600,00	15.767.806.355,24	-1.211.828.244,76	92,86	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	517.200.000,00	449.600.732,85	-67.599.267,15	86,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	517.200.000,00	449.600.732,85	-67.599.267,15	86,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	517.200.000,00	449.600.732,85	-67.599.267,15	86,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		PEMBANGUNAN LABORATORIUM	301.406.000,00	230.865.908,01	-70.540.091,99	76,59	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	301.406.000,00	230.865.908,01	-70.540.091,99	76,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.406.000,00	230.865.908,01	-70.540.091,99	76,59	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	149.828.000,00	149.464.323,28	-363.676,72	99,75	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	149.828.000,00	149.464.323,28	-363.676,72	99,75	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.828.000,00	149.464.323,28	-363.676,72	99,75	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.809.500.340,00	1.797.366.059,23	-12.134.280,77	99,32	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	1.809.500.340,00	1.797.366.059,23	-12.134.280,77	99,32	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.809.500.340,00	1.797.366.059,23	-12.134.280,77	99,32	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	642.588.000,00	461.351.891,87	-181.236.108,13	71,79	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	20.328.000,00	0,00	-20.328.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.328.000,00	0,00	-20.328.000,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	622.260.000,00	461.351.891,87	-160.908.108,13	74,14	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	622.260.000,00	461.351.891,87	-160.908.108,13	74,14	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	399.478.000,00	398.912.552,30	-565.447,70	99,85	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	399.478.000,00	398.912.552,30	-565.447,70	99,85	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.478.000,00	398.912.552,30	-565.447,70	99,85	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018		REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	630.622.000,00	456.712.354,38	-173.909.645,62	72,42	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	630.622.000,00	456.712.354,38	-173.909.645,62	72,42	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	630.622.000,00	456.712.354,38	-173.909.645,62	72,42	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.133.634.000,00	1.089.512.011,32	-44.121.988,68	96,10	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	1.133.634.000,00	1.089.512.011,32	-44.121.988,68	96,10	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.133.634.000,00	1.089.512.011,32	-44.121.988,68	96,10	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	401.644.000,00	391.755.000,00	-9.889.000,00	97,53	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	401.644.000,00	391.755.000,00	-9.889.000,00	97,53	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.644.000,00	391.755.000,00	-9.889.000,00	97,53	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034		PERLENGKAPAN BELAJAR PESERTA DIDIK	200.271.000,00	195.172.000,00	-5.099.000,00	97,45	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	200.271.000,00	195.172.000,00	-5.099.000,00	97,45	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.271.000,00	195.172.000,00	-5.099.000,00	97,45	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	620.238.000,00	607.279.890,00	-12.958.110,00	97,91	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	620.238.000,00	607.279.890,00	-12.958.110,00	97,91	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.238.000,00	607.279.890,00	-12.958.110,00	97,91	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	650.000.000,00	532.499.606,00	-117.500.394,00	81,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	532.499.606,00	-117.500.394,00	81,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	532.499.606,00	-117.500.394,00	81,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.524.935.200,00	1.180.040.800,00	-344.894.400,00	77,38	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	1.524.935.200,00	1.180.040.800,00	-344.894.400,00	77,38	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.524.935.200,00	1.180.040.800,00	-344.894.400,00	77,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	99.712.000,00	73.356.800,00	-26.355.200,00	73,56	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	99.712.000,00	73.356.800,00	-26.355.200,00	73,56	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.712.000,00	73.356.800,00	-26.355.200,00	73,56	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	32.998.000,00	22.505.500,00	-10.492.500,00	68,20	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	32.998.000,00	22.505.500,00	-10.492.500,00	68,20	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.998.000,00	22.505.500,00	-10.492.500,00	68,20	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	7.233.654.060,00	7.186.953.626,00	-46.700.434,00	99,35	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	5.905.205.560,00	5.860.926.528,00	-44.279.032,00	99,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.869.544.810,00	5.860.926.528,00	-8.618.282,00	99,85	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	35.660.750,00	0,00	-35.660.750,00	0,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	1.328.448.500,00	1.326.027.098,00	-2.421.402,00	99,81	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	826.340.300,00	823.937.298,00	-2.403.002,00	99,70	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	502.108.200,00	502.089.800,00	-18.400,00	99,99	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10.000.000,00	4.200.000,00	-5.800.000,00	42,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	4.200.000,00	-5.800.000,00	42,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.200.000,00	-5.800.000,00	42,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	114.994.000,00	114.312.000,00	-682.000,00	99,40	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	114.994.000,00	114.312.000,00	-682.000,00	99,40	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.994.000,00	114.312.000,00	-682.000,00	99,40	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	200.000.000,00	193.255.300,00	-6.744.700,00	96,62	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	193.255.300,00	-6.744.700,00	96,62	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	193.255.300,00	-6.744.700,00	96,62	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	299.942.000,00	225.700.000,00	-74.242.000,00	75,24	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	299.942.000,00	225.700.000,00	-74.242.000,00	75,24	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.942.000,00	225.700.000,00	-74.242.000,00	75,24	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	6.866.431.800,00	6.454.930.082,00	-411.501.718,00	94,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	473.997.000,00	452.671.100,00	-21.325.900,00	95,50	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.640.000,00	2.087.000,00	-18.553.000,00	10,11	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	2.087.000,00	-18.553.000,00	10,11	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	453.357.000,00	450.584.100,00	-2.772.900,00	99,38	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.500.000,00	37.972.000,00	-528.000,00	98,62	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.857.000,00	412.612.100,00	-2.244.900,00	99,45	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003		REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD	249.307.000,00	248.457.400,00	-849.600,00	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	249.307.000,00	248.457.400,00	-849.600,00	99,65	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	249.307.000,00	248.457.400,00	-849.600,00	99,65	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004		REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	151.422.300,00	147.639.200,00	-3.783.100,00	97,50	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	151.422.300,00	147.639.200,00	-3.783.100,00	97,50	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.422.300,00	147.639.200,00	-3.783.100,00	97,50	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		PENGADAAN MEBEL PAUD	48.257.000,00	47.490.000,00	-767.000,00	98,41	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	48.257.000,00	47.490.000,00	-767.000,00	98,41	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.257.000,00	47.490.000,00	-767.000,00	98,41	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	239.625.000,00	230.650.000,00	-8.975.000,00	96,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	239.625.000,00	230.650.000,00	-8.975.000,00	96,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.625.000,00	230.650.000,00	-8.975.000,00	96,25	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	278.751.000,00	277.940.000,00	-811.000,00	99,70	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.2	BELANJA MODAL	147.951.000,00	147.140.000,00	-811.000,00	99,45	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.951.000,00	147.140.000,00	-811.000,00	99,45	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	2.363.242.500,00	2.155.906.300,00	-207.336.200,00	91,22	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.363.242.500,00	2.155.906.300,00	-207.336.200,00	91,22	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.363.242.500,00	2.155.906.300,00	-207.336.200,00	91,22	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	79.229.000,00	44.447.000,00	-34.782.000,00	56,09	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	79.229.000,00	44.447.000,00	-34.782.000,00	56,09	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.229.000,00	44.447.000,00	-34.782.000,00	56,09	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	141.540.000,00	140.904.200,00	-635.800,00	99,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	141.540.000,00	140.904.200,00	-635.800,00	99,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.540.000,00	140.904.200,00	-635.800,00	99,55	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.170.880.000,00	2.168.856.387,00	-2.023.613,00	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.027.233.095,00	2.025.241.482,00	-1.991.613,00	99,90	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.633.095,00	417.561.482,00	-71.613,00	99,98	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	1.609.600.000,00	1.607.680.000,00	-1.920.000,00	99,88	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	143.646.905,00	143.614.905,00	-32.000,00	99,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.646.905,00	143.614.905,00	-32.000,00	99,97	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	51.315.000,00	42.785.455,00	-8.529.545,00	83,37	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	51.315.000,00	42.785.455,00	-8.529.545,00	83,37	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.315.000,00	42.785.455,00	-8.529.545,00	83,37	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	618.866.000,00	497.183.040,00	-121.682.960,00	80,33	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2	BELANJA MODAL	618.866.000,00	497.183.040,00	-121.682.960,00	80,33	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.866.000,00	497.183.040,00	-121.682.960,00	80,33	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.190.230.500,00	1.107.876.395,00	-82.354.105,00	93,08	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0011		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN	29.059.000,00	27.900.000,00	-1.159.000,00	96,01	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0011	5.2	BELANJA MODAL	29.059.000,00	27.900.000,00	-1.159.000,00	96,01	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.059.000,00	27.900.000,00	-1.159.000,00	96,01	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	248.881.200,00	222.656.400,00	-26.224.800,00	89,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	248.881.200,00	222.656.400,00	-26.224.800,00	89,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.881.200,00	222.656.400,00	-26.224.800,00	89,46	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	42.000.000,00	27.138.700,00	-14.861.300,00	64,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	27.138.700,00	-14.861.300,00	64,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	27.138.700,00	-14.861.300,00	64,61	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	20.000.000,00	19.593.000,00	-407.000,00	97,96	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.593.000,00	-407.000,00	97,96	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.593.000,00	-407.000,00	97,96	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	495.320.000,00	474.346.695,00	-20.973.305,00	95,76	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	470.320.000,00	449.346.695,00	-20.973.305,00	95,54	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.960.000,00	178.956.695,00	-10.003.305,00	94,70	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	281.360.000,00	270.390.000,00	-10.970.000,00	96,10	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	15.000.000,00	14.103.000,00	-897.000,00	94,02	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.103.000,00	-897.000,00	94,02	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.103.000,00	-897.000,00	94,02	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20.000.000,00	19.185.000,00	-815.000,00	95,92	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.1	BELANJA OPERASI	542.000,00	485.000,00	-57.000,00	89,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.000,00	485.000,00	-57.000,00	89,48	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.2	BELANJA MODAL	19.458.000,00	18.700.000,00	-758.000,00	96,10	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.458.000,00	18.700.000,00	-758.000,00	96,10	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	220.000.000,00	203.510.000,00	-16.490.000,00	92,50	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	131.859.500,00	120.970.000,00	-10.889.500,00	91,74	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.859.500,00	120.970.000,00	-10.889.500,00	91,74	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2	BELANJA MODAL	88.140.500,00	82.540.000,00	-5.600.500,00	93,64	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.686.500,00	80.340.000,00	-5.346.500,00	93,76	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.454.000,00	2.200.000,00	-254.000,00	89,64	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	99.970.300,00	99.443.600,00	-526.700,00	99,47	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.2	BELANJA MODAL	99.970.300,00	99.443.600,00	-526.700,00	99,47	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.970.300,00	99.443.600,00	-526.700,00	99,47	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	46.358.000,00	35.130.000,00	-11.228.000,00	75,77	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	26.408.000,00	23.550.000,00	-2.858.000,00	89,17	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	26.408.000,00	23.550.000,00	-2.858.000,00	89,17	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.408.000,00	23.550.000,00	-2.858.000,00	89,17	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.408.000,00	23.550.000,00	-2.858.000,00	89,17	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	19.950.000,00	11.580.000,00	-8.370.000,00	58,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002		PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	19.950.000,00	11.580.000,00	-8.370.000,00	58,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.950.000,00	11.580.000,00	-8.370.000,00	58,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	11.580.000,00	-8.370.000,00	58,04	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	113.007.000,00	94.805.019,00	-18.201.981,00	83,89	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	113.007.000,00	94.805.019,00	-18.201.981,00	83,89	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	87.507.000,00	71.435.019,00	-16.071.981,00	81,63	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.507.000,00	71.435.019,00	-16.071.981,00	81,63	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.507.000,00	71.435.019,00	-16.071.981,00	81,63	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	25.500.000,00	23.370.000,00	-2.130.000,00	91,64	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	23.370.000,00	-2.130.000,00	91,64	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	23.370.000,00	-2.130.000,00	91,64	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.1.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	20.000.000,00	13.048.000,00	-6.952.000,00	65,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06.2.01		PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	13.048.000,00	-6.952.000,00	65,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007		PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR BAHASA DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	13.048.000,00	-6.952.000,00	65,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.048.000,00	-6.952.000,00	65,23	
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.048.000,00	-6.952.000,00	65,23	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	124.224.913.104,00	111.263.427.304,00	-12.961.485.800,00	89,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.317.843.842,00	77.068.729.341,00	-9.249.114.501,00	89,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.259.000,00	17.766.000,00	-493.000,00	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.259.000,00	17.766.000,00	-493.000,00	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.259.000,00	17.766.000,00	-493.000,00	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.259.000,00	17.766.000,00	-493.000,00	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	83.917.746.526,00	75.124.690.525,00	-8.793.056.001,00	89,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	83.896.319.526,00	75.106.234.325,00	-8.790.085.201,00	89,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.896.319.526,00	75.106.234.325,00	-8.790.085.201,00	89,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	83.896.319.526,00	75.106.234.325,00	-8.790.085.201,00	89,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	21.427.000,00	18.456.200,00	-2.970.800,00	86,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.427.000,00	18.456.200,00	-2.970.800,00	86,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.427.000,00	18.456.200,00	-2.970.800,00	86,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	28.500.000,00	17.000.000,00	-11.500.000,00	59,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	13.500.000,00	7.000.000,00	-6.500.000,00	51,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	7.000.000,00	-6.500.000,00	51,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	7.000.000,00	-6.500.000,00	51,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	619.351.500,00	544.322.002,00	-75.029.498,00	87,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.477.000,00	15.980.500,00	-6.496.500,00	71,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.477.000,00	15.980.500,00	-6.496.500,00	71,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.477.000,00	15.980.500,00	-6.496.500,00	71,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	129.695.000,00	116.825.400,00	-12.869.600,00	90,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.695.000,00	116.825.400,00	-12.869.600,00	90,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.695.000,00	116.825.400,00	-12.869.600,00	90,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.624.000,00	14.161.500,00	-5.462.500,00	72,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.624.000,00	14.161.500,00	-5.462.500,00	72,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.624.000,00	14.161.500,00	-5.462.500,00	72,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	91.944.000,00	76.644.500,00	-15.299.500,00	83,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.944.000,00	76.644.500,00	-15.299.500,00	83,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.944.000,00	76.644.500,00	-15.299.500,00	83,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	94.886.500,00	60.308.000,00	-34.578.500,00	63,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	94.886.500,00	60.308.000,00	-34.578.500,00	63,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.886.500,00	60.308.000,00	-34.578.500,00	63,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	250.000.000,00	249.977.102,00	-22.898,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.977.102,00	-22.898,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.977.102,00	-22.898,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.725.000,00	10.425.000,00	-300.000,00	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.725.000,00	10.425.000,00	-300.000,00	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	10.425.000,00	-300.000,00	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	118.487.000,00	97.460.000,00	-21.027.000,00	82,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	47.442.000,00	30.200.000,00	-17.242.000,00	63,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	47.442.000,00	30.200.000,00	-17.242.000,00	63,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.442.000,00	30.200.000,00	-17.242.000,00	63,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.045.000,00	67.260.000,00	-3.785.000,00	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	71.045.000,00	67.260.000,00	-3.785.000,00	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.045.000,00	67.260.000,00	-3.785.000,00	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	878.589.816,00	732.900.061,00	-145.689.755,00	83,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	913.000,00	-2.087.000,00	30,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	913.000,00	-2.087.000,00	30,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	913.000,00	-2.087.000,00	30,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	268.660.000,00	258.619.501,00	-10.040.499,00	96,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	268.660.000,00	258.619.501,00	-10.040.499,00	96,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.660.000,00	258.619.501,00	-10.040.499,00	96,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	606.929.816,00	473.367.560,00	-133.562.256,00	77,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	606.929.816,00	473.367.560,00	-133.562.256,00	77,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.929.816,00	473.367.560,00	-133.562.256,00	77,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	736.910.000,00	534.590.753,00	-202.319.247,00	72,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN , DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	39.419.492,00	-830.508,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	39.419.492,00	-830.508,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	39.419.492,00	-830.508,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	331.980.000,00	233.272.261,00	-98.707.739,00	70,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	331.980.000,00	233.272.261,00	-98.707.739,00	70,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.980.000,00	233.272.261,00	-98.707.739,00	70,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	56.470.000,00	47.463.000,00	-9.007.000,00	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	56.470.000,00	47.463.000,00	-9.007.000,00	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.470.000,00	47.463.000,00	-9.007.000,00	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	308.210.000,00	214.436.000,00	-93.774.000,00	69,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	308.210.000,00	214.436.000,00	-93.774.000,00	69,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.210.000,00	214.436.000,00	-93.774.000,00	69,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.722.636.262,00	32.484.350.606,00	-3.238.285.656,00	90,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.375.586.332,00	7.047.529.302,00	-328.057.030,00	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	1.528.258.122,00	1.499.232.024,00	-29.026.098,00	98,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	190.429.625,00	186.973.790,00	-3.455.835,00	98,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.429.625,00	186.973.790,00	-3.455.835,00	98,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.337.828.497,00	1.312.258.234,00	-25.570.263,00	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.215.900.000,00	1.190.500.000,00	-25.400.000,00	97,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.928.497,00	121.758.234,00	-170.263,00	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	124.920.910,00	78.864.740,00	-46.056.170,00	63,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	124.920.910,00	78.864.740,00	-46.056.170,00	63,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.920.910,00	78.864.740,00	-46.056.170,00	63,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.029.892.000,00	1.028.416.219,00	-1.475.781,00	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.021.892.000,00	1.020.416.219,00	-1.475.781,00	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	991.760.000,00	990.479.119,00	-1.280.881,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.132.000,00	29.937.100,00	-194.900,00	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	204.736.090,00	203.535.000,00	-1.201.090,00	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	204.736.090,00	203.535.000,00	-1.201.090,00	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.736.090,00	203.535.000,00	-1.201.090,00	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	240.220.200,00	171.243.868,00	-68.976.332,00	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	240.220.200,00	171.243.868,00	-68.976.332,00	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.220.200,00	171.243.868,00	-68.976.332,00	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	4.068.346.010,00	3.901.667.340,00	-166.678.670,00	95,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.068.346.010,00	3.901.667.340,00	-166.678.670,00	95,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.068.346.010,00	3.901.667.340,00	-166.678.670,00	95,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0024		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA	109.995.000,00	104.470.111,00	-5.524.889,00	94,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	109.995.000,00	104.470.111,00	-5.524.889,00	94,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.995.000,00	104.470.111,00	-5.524.889,00	94,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	69.218.000,00	60.100.000,00	-9.118.000,00	86,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	69.218.000,00	60.100.000,00	-9.118.000,00	86,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.218.000,00	60.100.000,00	-9.118.000,00	86,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.347.049.930,00	25.436.821.304,00	-2.910.228.626,00	89,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	388.058.000,00	337.206.279,00	-50.851.721,00	86,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	384.498.000,00	333.696.279,00	-50.801.721,00	86,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.498.000,00	333.696.279,00	-50.801.721,00	86,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.560.000,00	3.510.000,00	-50.000,00	98,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.560.000,00	3.510.000,00	-50.000,00	98,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	41.207.000,00	40.950.000,00	-257.000,00	99,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.207.000,00	40.950.000,00	-257.000,00	99,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.207.000,00	40.950.000,00	-257.000,00	99,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	114.500.000,00	91.663.200,00	-22.836.800,00	80,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	114.500.000,00	91.663.200,00	-22.836.800,00	80,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.500.000,00	91.663.200,00	-22.836.800,00	80,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	310.424.000,00	303.263.000,00	-7.161.000,00	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	310.424.000,00	303.263.000,00	-7.161.000,00	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.424.000,00	303.263.000,00	-7.161.000,00	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	442.637.000,00	380.787.025,00	-61.849.975,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	442.637.000,00	380.787.025,00	-61.849.975,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.637.000,00	380.787.025,00	-61.849.975,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	1.338.021.000,00	1.167.004.500,00	-171.016.500,00	87,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.120.999.000,00	949.982.500,00	-171.016.500,00	84,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.999.000,00	949.982.500,00	-171.016.500,00	84,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	217.022.000,00	217.022.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.022.000,00	217.022.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	561.602.500,00	518.638.475,00	-42.964.025,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	561.602.500,00	518.638.475,00	-42.964.025,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.602.500,00	518.638.475,00	-42.964.025,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	34.436.500,00	0,00	-34.436.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.436.500,00	0,00	-34.436.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.436.500,00	0,00	-34.436.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	765.043.000,00	706.415.125,00	-58.627.875,00	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	765.043.000,00	706.415.125,00	-58.627.875,00	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.043.000,00	706.415.125,00	-58.627.875,00	92,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	204.417.000,00	204.022.620,00	-394.380,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	204.417.000,00	204.022.620,00	-394.380,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.417.000,00	204.022.620,00	-394.380,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	894.949.700,00	862.886.266,00	-32.063.434,00	96,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	894.949.700,00	862.886.266,00	-32.063.434,00	96,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.949.700,00	862.886.266,00	-32.063.434,00	96,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	168.607.000,00	127.780.800,00	-40.826.200,00	75,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	168.607.000,00	127.780.800,00	-40.826.200,00	75,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.607.000,00	127.780.800,00	-40.826.200,00	75,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0013		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	369.014.460,00	234.899.360,00	-134.115.100,00	63,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	269.902.460,00	234.899.360,00	-35.003.100,00	87,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.902.460,00	234.899.360,00	-35.003.100,00	87,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0013	5.2	BELANJA MODAL	99.112.000,00	0,00	-99.112.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.112.000,00	0,00	-99.112.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0014		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	40.356.000,00	4.500.000,00	-35.856.000,00	11,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	40.356.000,00	4.500.000,00	-35.856.000,00	11,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.356.000,00	4.500.000,00	-35.856.000,00	11,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	91.104.000,00	83.330.093,00	-7.773.907,00	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	91.104.000,00	83.330.093,00	-7.773.907,00	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.104.000,00	83.330.093,00	-7.773.907,00	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	10.394.000,00	8.184.800,00	-2.209.200,00	78,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	10.394.000,00	8.184.800,00	-2.209.200,00	78,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.394.000,00	8.184.800,00	-2.209.200,00	78,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	518.603.420,00	232.855.000,00	-285.748.420,00	44,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	518.603.420,00	232.855.000,00	-285.748.420,00	44,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.603.420,00	232.855.000,00	-285.748.420,00	44,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGLOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	234.551.000,00	200.803.350,00	-33.747.650,00	85,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	234.551.000,00	200.803.350,00	-33.747.650,00	85,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.551.000,00	200.803.350,00	-33.747.650,00	85,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	268.201.000,00	134.185.704,00	-134.015.296,00	50,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	268.201.000,00	134.185.704,00	-134.015.296,00	50,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.201.000,00	134.185.704,00	-134.015.296,00	50,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0022		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	52.879.000,00	41.281.000,00	-11.598.000,00	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	52.879.000,00	41.281.000,00	-11.598.000,00	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.879.000,00	41.281.000,00	-11.598.000,00	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	690.769.150,00	205.595.965,00	-485.173.185,00	29,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	517.323.150,00	205.595.965,00	-311.727.185,00	39,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.323.150,00	205.595.965,00	-311.727.185,00	39,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	173.446.000,00	0,00	-173.446.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.446.000,00	0,00	-173.446.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	20.456.106.200,00	19.340.016.274,00	-1.116.089.926,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	20.456.106.200,00	19.340.016.274,00	-1.116.089.926,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.456.106.200,00	19.340.016.274,00	-1.116.089.926,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	58.715.000,00	20.299.000,00	-38.416.000,00	34,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	58.715.000,00	20.299.000,00	-38.416.000,00	34,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.715.000,00	20.299.000,00	-38.416.000,00	34,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	129.482.000,00	59.791.968,00	-69.690.032,00	46,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	97.554.000,00	59.791.968,00	-37.762.032,00	61,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.554.000,00	59.791.968,00	-37.762.032,00	61,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0029	5.2	BELANJA MODAL	31.928.000,00	0,00	-31.928.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.928.000,00	0,00	-31.928.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	13.101.000,00	11.882.000,00	-1.219.000,00	90,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	13.101.000,00	11.882.000,00	-1.219.000,00	90,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.101.000,00	11.882.000,00	-1.219.000,00	90,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	23.580.000,00	0,00	-23.580.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	23.580.000,00	0,00	-23.580.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.580.000,00	0,00	-23.580.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	126.291.000,00	118.579.500,00	-7.711.500,00	93,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	126.291.000,00	118.579.500,00	-7.711.500,00	93,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.291.000,00	118.579.500,00	-7.711.500,00	93,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.930.020.000,00	1.516.250.137,00	-413.769.863,00	78,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKW DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	721.382.000,00	494.798.516,00	-226.583.484,00	68,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	37.082.000,00	23.153.186,00	-13.928.814,00	62,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.082.000,00	23.153.186,00	-13.928.814,00	62,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.082.000,00	23.153.186,00	-13.928.814,00	62,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	424.185.000,00	326.484.790,00	-97.700.210,00	76,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	424.185.000,00	326.484.790,00	-97.700.210,00	76,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.185.000,00	326.484.790,00	-97.700.210,00	76,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	260.115.000,00	145.160.540,00	-114.954.460,00	55,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	260.115.000,00	145.160.540,00	-114.954.460,00	55,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.115.000,00	145.160.540,00	-114.954.460,00	55,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.208.638.000,00	1.021.451.621,00	-187.186.379,00	84,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.208.638.000,00	1.021.451.621,00	-187.186.379,00	84,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.208.638.000,00	1.021.451.621,00	-187.186.379,00	84,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.638.000,00	1.021.451.621,00	-187.186.379,00	84,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10.168.000,00	5.173.000,00	-4.995.000,00	50,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.04		PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	4.995.000,00	0,00	-4.995.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	4.995.000,00	0,00	-4.995.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	0,00	-4.995.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	0,00	-4.995.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	5.173.000,00	5.173.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	5.173.000,00	5.173.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.173.000,00	5.173.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.173.000,00	5.173.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.245.000,00	188.924.220,00	-55.320.780,00	77,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.036.000,00	27.891.520,00	-3.144.480,00	89,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31.036.000,00	27.891.520,00	-3.144.480,00	89,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.036.000,00	27.891.520,00	-3.144.480,00	89,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.036.000,00	27.891.520,00	-3.144.480,00	89,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.739.000,00	71.160.000,00	-39.579.000,00	64,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	110.739.000,00	71.160.000,00	-39.579.000,00	64,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.739.000,00	71.160.000,00	-39.579.000,00	64,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.739.000,00	71.160.000,00	-39.579.000,00	64,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.470.000,00	89.872.700,00	-12.597.300,00	87,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	102.470.000,00	89.872.700,00	-12.597.300,00	87,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.470.000,00	89.872.700,00	-12.597.300,00	87,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.470.000,00	89.872.700,00	-12.597.300,00	87,70	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : RSUD Muhammad Zein

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	31.684.000.000,00	29.565.756.335,37	-2.118.243.664,63	93,31	
	1.02.0.00.0.00.03.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.684.000.000,00	29.565.756.335,37	-2.118.243.664,63	93,31	
	1.02.0.00.0.00.03.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	3.195.000.000,00	3.028.369.538,00	-166.630.462,00	94,78	
	1.02.0.00.0.00.03.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.489.000.000,00	26.537.386.797,37	-1.951.613.202,63	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001		5	BELANJA DAERAH	62.127.031.999,00	55.407.869.255,00	-6.719.162.744,00	89,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.021.237.999,00	51.107.465.397,00	-4.913.772.602,00	91,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.318.861.932,00	8.147.777.499,00	-171.084.433,00	97,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.318.861.932,00	8.147.777.499,00	-171.084.433,00	97,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.318.861.932,00	8.147.777.499,00	-171.084.433,00	97,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.318.861.932,00	8.147.777.499,00	-171.084.433,00	97,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	75.000.000,00	72.408.898,00	-2.591.102,00	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	75.000.000,00	72.408.898,00	-2.591.102,00	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.408.898,00	-2.591.102,00	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.408.898,00	-2.591.102,00	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	157.923.500,00	130.065.000,00	-27.858.500,00	82,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	68.342.000,00	64.065.000,00	-4.277.000,00	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	68.342.000,00	64.065.000,00	-4.277.000,00	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.342.000,00	64.065.000,00	-4.277.000,00	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	89.581.500,00	66.000.000,00	-23.581.500,00	73,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	89.581.500,00	66.000.000,00	-23.581.500,00	73,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.581.500,00	66.000.000,00	-23.581.500,00	73,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.414.223.224,00	4.236.082.500,00	-178.140.724,00	95,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.414.223.224,00	4.236.082.500,00	-178.140.724,00	95,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.414.223.224,00	4.236.082.500,00	-178.140.724,00	95,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.414.223.224,00	4.236.082.500,00	-178.140.724,00	95,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.144.000,00	30.800.252,00	-343.748,00	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	31.144.000,00	30.800.252,00	-343.748,00	98,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	31.144.000,00	30.800.252,00	-343.748,00	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.144.000,00	30.800.252,00	-343.748,00	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	43.024.085.343,00	38.490.331.248,00	-4.533.754.095,00	89,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	43.024.085.343,00	38.490.331.248,00	-4.533.754.095,00	89,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.947.794.843,00	36.511.810.051,00	-4.435.984.792,00	89,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.536.426.952,00	9.755.930.642,00	-2.780.496.310,00	77,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.411.367.891,00	26.755.879.409,00	-1.655.488.482,00	94,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.076.290.500,00	1.978.521.197,00	-97.769.303,00	95,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.678.290.500,00	1.583.096.197,00	-95.194.303,00	94,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	197.685.000,00	-1.315.000,00	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.000.000,00	197.740.000,00	-1.260.000,00	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.832.836.500,00	2.286.966.358,00	-1.545.870.142,00	59,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.832.836.500,00	2.286.966.358,00	-1.545.870.142,00	59,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	2.355.531.500,00	877.282.258,00	-1.478.249.242,00	37,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.355.531.500,00	877.282.258,00	-1.478.249.242,00	37,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.355.531.500,00	877.282.258,00	-1.478.249.242,00	37,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	1.477.305.000,00	1.409.684.100,00	-67.620.900,00	95,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	134.305.000,00	110.694.000,00	-23.611.000,00	82,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.305.000,00	110.694.000,00	-23.611.000,00	82,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	1.343.000.000,00	1.298.990.100,00	-44.009.900,00	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.343.000.000,00	1.298.990.100,00	-44.009.900,00	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.272.957.500,00	2.013.437.500,00	-259.520.000,00	88,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	2.272.957.500,00	2.013.437.500,00	-259.520.000,00	88,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	2.272.957.500,00	2.013.437.500,00	-259.520.000,00	88,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.272.957.500,00	2.013.437.500,00	-259.520.000,00	88,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.272.957.500,00	2.013.437.500,00	-259.520.000,00	88,58	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : UPT Puskesmas Manggar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	2.741.000.570,00	2.733.679.909,00	-7.320.661,00	99,73	
	1.02.0.00.0.00.03.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.741.000.570,00	2.733.679.909,00	-7.320.661,00	99,73	
	1.02.0.00.0.00.03.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	113.860.000,00	63.860.000,00	227,71	
	1.02.0.00.0.00.03.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.691.000.570,00	2.619.819.909,00	-71.180.661,00	97,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002		5	BELANJA DAERAH	5.739.463.423,00	5.299.970.899,00	-439.492.524,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.499.266.923,00	4.088.838.678,00	-410.428.245,00	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.349.272.675,00	1.349.272.668,00	(7,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.349.272.675,00	1.349.272.668,00	(7,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.349.272.675,00	1.349.272.668,00	(7,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.349.272.675,00	1.349.272.668,00	(7,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	26.244.000,00	13.051.000,00	-13.193.000,00	49,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.244.000,00	13.051.000,00	-13.193.000,00	49,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.244.000,00	13.051.000,00	-13.193.000,00	49,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.244.000,00	13.051.000,00	-13.193.000,00	49,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	323.750.248,00	320.992.500,00	-2.757.748,00	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	323.750.248,00	320.992.500,00	-2.757.748,00	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	323.750.248,00	320.992.500,00	-2.757.748,00	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.750.248,00	320.992.500,00	-2.757.748,00	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.800.000.000,00	2.405.522.510,00	-394.477.490,00	85,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.800.000.000,00	2.405.522.510,00	-394.477.490,00	85,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.492.783.000,00	2.118.497.510,00	-374.285.490,00	84,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.365.000.000,00	1.174.234.762,00	-190.765.238,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.127.783.000,00	944.262.748,00	-183.520.252,00	83,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	307.217.000,00	287.025.000,00	-20.192.000,00	93,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.217.000,00	287.025.000,00	-20.192.000,00	93,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	926.346.500,00	900.109.721,00	-26.236.779,00	97,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.720.000,00	36.341.400,00	-378.600,00	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	36.720.000,00	36.341.400,00	-378.600,00	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	36.720.000,00	36.341.400,00	-378.600,00	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.720.000,00	36.341.400,00	-378.600,00	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	876.302.000,00	850.448.321,00	-25.853.679,00	97,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	20.160.000,00	19.480.000,00	-680.000,00	96,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.160.000,00	19.480.000,00	-680.000,00	96,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	19.480.000,00	-680.000,00	96,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	6.900.000,00	5.000.000,00	-1.900.000,00	72,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	5.000.000,00	-1.900.000,00	72,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	5.000.000,00	-1.900.000,00	72,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	192.660.000,00	184.095.400,00	-8.564.600,00	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	192.660.000,00	184.095.400,00	-8.564.600,00	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.660.000,00	184.095.400,00	-8.564.600,00	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	28.020.000,00	25.080.000,00	-2.940.000,00	89,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	28.020.000,00	25.080.000,00	-2.940.000,00	89,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.020.000,00	25.080.000,00	-2.940.000,00	89,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	207.120.000,00	202.920.000,00	-4.200.000,00	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	207.120.000,00	202.920.000,00	-4.200.000,00	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.120.000,00	202.920.000,00	-4.200.000,00	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	245.292.000,00	242.942.921,00	-2.349.079,00	99,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	245.292.000,00	242.942.921,00	-2.349.079,00	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	110.833.000,00	110.832.848,00	(152,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.459.000,00	132.110.073,00	-2.348.927,00	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	15.360.000,00	15.140.000,00	-220.000,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	15.360.000,00	15.140.000,00	-220.000,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.140.000,00	-220.000,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	17.300.000,00	13.110.000,00	-4.190.000,00	75,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	17.300.000,00	13.110.000,00	-4.190.000,00	75,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	13.110.000,00	-4.190.000,00	75,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	68.130.000,00	67.320.000,00	-810.000,00	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	68.130.000,00	67.320.000,00	-810.000,00	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.130.000,00	67.320.000,00	-810.000,00	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	13.324.500,00	13.320.000,00	-4.500,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.03.0002		PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	13.324.500,00	13.320.000,00	-4.500,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.324.500,00	13.320.000,00	-4.500,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.324.500,00	13.320.000,00	-4.500,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	298.730.000,00	298.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	298.730.000,00	298.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	298.730.000,00	298.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	298.730.000,00	298.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.730.000,00	298.730.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.120.000,00	12.292.500,00	-2.827.500,00	81,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.120.000,00	12.292.500,00	-2.827.500,00	81,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	15.120.000,00	12.292.500,00	-2.827.500,00	81,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.120.000,00	12.292.500,00	-2.827.500,00	81,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	12.292.500,00	-2.827.500,00	81,29	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : UPT Puskesmas Mengkubang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	1.104.784.593,00	1.100.585.695,00	-4.198.898,00	99,61	
	1.02.0.00.0.00.03.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.104.784.593,00	1.100.585.695,00	-4.198.898,00	99,61	
	1.02.0.00.0.00.03.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	55.000.000,00	51.408.000,00	-3.592.000,00	93,46	
	1.02.0.00.0.00.03.0003		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.049.784.593,00	1.049.177.695,00	-606.898,00	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003		5	BELANJA DAERAH	4.025.394.244,00	3.692.604.405,00	-332.789.839,00	91,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.889.773.244,00	2.672.901.020,00	-216.872.224,00	92,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.235.096.538,00	1.235.096.487,00	(51,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.235.096.538,00	1.235.096.487,00	(51,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.235.096.538,00	1.235.096.487,00	(51,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.235.096.538,00	1.235.096.487,00	(51,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	382.415.706,00	357.838.900,00	-24.576.806,00	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	87.840.000,00	63.641.400,00	-24.198.600,00	72,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.840.000,00	63.641.400,00	-24.198.600,00	72,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.840.000,00	63.641.400,00	-24.198.600,00	72,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	294.575.706,00	294.197.500,00	-378.206,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	294.575.706,00	294.197.500,00	-378.206,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.575.706,00	294.197.500,00	-378.206,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	160.120.000,00	138.042.800,00	-22.077.200,00	86,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	160.120.000,00	138.042.800,00	-22.077.200,00	86,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.120.000,00	138.042.800,00	-22.077.200,00	86,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.120.000,00	138.042.800,00	-22.077.200,00	86,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.112.141.000,00	941.922.833,00	-170.218.167,00	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.112.141.000,00	941.922.833,00	-170.218.167,00	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.073.509.500,00	903.582.833,00	-169.926.667,00	84,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	596.785.930,00	459.988.099,00	-136.797.831,00	77,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.723.570,00	443.594.734,00	-33.128.836,00	93,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	38.631.500,00	38.340.000,00	-291.500,00	99,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.631.500,00	38.340.000,00	-291.500,00	99,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	957.891.000,00	851.663.385,00	-106.227.615,00	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.856.000,00	107.005.836,00	-850.164,00	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	55.900.000,00	55.511.721,00	-388.279,00	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.900.000,00	55.511.721,00	-388.279,00	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.900.000,00	55.511.721,00	-388.279,00	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	51.956.000,00	51.494.115,00	-461.885,00	99,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	51.956.000,00	51.494.115,00	-461.885,00	99,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.956.000,00	51.494.115,00	-461.885,00	99,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	817.970.000,00	731.337.549,00	-86.632.451,00	89,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	22.275.000,00	14.580.000,00	-7.695.000,00	65,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.275.000,00	14.580.000,00	-7.695.000,00	65,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.275.000,00	14.580.000,00	-7.695.000,00	65,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	5.590.000,00	4.390.000,00	-1.200.000,00	78,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.590.000,00	4.390.000,00	-1.200.000,00	78,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	4.390.000,00	-1.200.000,00	78,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	33.600.000,00	32.520.000,00	-1.080.000,00	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	32.520.000,00	-1.080.000,00	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	32.520.000,00	-1.080.000,00	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	145.822.000,00	145.002.000,00	-820.000,00	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	145.822.000,00	145.002.000,00	-820.000,00	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.822.000,00	145.002.000,00	-820.000,00	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	81.280.000,00	65.292.500,00	-15.987.500,00	80,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	81.280.000,00	65.292.500,00	-15.987.500,00	80,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.280.000,00	65.292.500,00	-15.987.500,00	80,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	17.280.000,00	13.440.000,00	-3.840.000,00	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	13.440.000,00	-3.840.000,00	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	13.440.000,00	-3.840.000,00	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	190.380.000,00	172.980.000,00	-17.400.000,00	90,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	190.380.000,00	172.980.000,00	-17.400.000,00	90,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.380.000,00	172.980.000,00	-17.400.000,00	90,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	221.303.000,00	183.773.049,00	-37.529.951,00	83,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	221.303.000,00	183.773.049,00	-37.529.951,00	83,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	93.223.000,00	89.206.293,00	-4.016.707,00	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.080.000,00	94.566.756,00	-33.513.244,00	73,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0040		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	8.640.000,00	8.280.000,00	-360.000,00	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	8.280.000,00	-360.000,00	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.280.000,00	-360.000,00	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	44.400.000,00	44.280.000,00	-120.000,00	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	44.400.000,00	44.280.000,00	-120.000,00	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.280.000,00	-120.000,00	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	32.065.000,00	13.320.000,00	-18.745.000,00	41,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.03.0002		PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	32.065.000,00	13.320.000,00	-18.745.000,00	41,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.065.000,00	13.320.000,00	-18.745.000,00	41,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.065.000,00	13.320.000,00	-18.745.000,00	41,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	177.730.000,00	168.040.000,00	-9.690.000,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	177.730.000,00	168.040.000,00	-9.690.000,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	177.730.000,00	168.040.000,00	-9.690.000,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	177.730.000,00	168.040.000,00	-9.690.000,00	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.730.000,00	168.040.000,00	-9.690.000,00	94,54	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : UPT Puskesmas Gantung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	2.274.915.734,00	2.364.814.922,00	89.899.188,00	103,95	
	1.02.0.00.0.00.03.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.274.915.734,00	2.364.814.922,00	89.899.188,00	103,95	
	1.02.0.00.0.00.03.0004		4.1.02	Retribusi Daerah	148.394.000,00	164.739.000,00	16.345.000,00	111,01	
	1.02.0.00.0.00.03.0004		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.126.521.734,00	2.200.075.922,00	73.554.188,00	103,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004		5	BELANJA DAERAH	5.730.958.304,00	5.172.381.456,00	-558.576.848,00	90,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.720.537.304,00	4.300.858.132,00	-419.679.172,00	91,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.421.345.579,00	1.416.311.096,00	-5.034.483,00	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.421.345.579,00	1.416.311.096,00	-5.034.483,00	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.421.345.579,00	1.416.311.096,00	-5.034.483,00	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.345.579,00	1.416.311.096,00	-5.034.483,00	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	240.071.000,00	213.900.744,00	-26.170.256,00	89,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.999.000,00	24.770.500,00	-228.500,00	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.999.000,00	24.770.500,00	-228.500,00	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.000,00	24.770.500,00	-228.500,00	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	81.878.000,00	70.897.500,00	-10.980.500,00	86,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.878.000,00	70.897.500,00	-10.980.500,00	86,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.878.000,00	70.897.500,00	-10.980.500,00	86,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.196.000,00	7.358.875,00	-837.125,00	89,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.196.000,00	7.358.875,00	-837.125,00	89,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.196.000,00	7.358.875,00	-837.125,00	89,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	99.998.000,00	85.948.750,00	-14.049.250,00	85,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.998.000,00	85.948.750,00	-14.049.250,00	85,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.998.000,00	85.948.750,00	-14.049.250,00	85,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.000.000,00	24.925.119,00	-74.881,00	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.925.119,00	-74.881,00	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.925.119,00	-74.881,00	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34.208.000,00	0,00	-34.208.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.208.000,00	0,00	-34.208.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	34.208.000,00	0,00	-34.208.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.208.000,00	0,00	-34.208.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	478.353.206,00	454.100.022,00	-24.253.184,00	94,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	123.000.000,00	99.557.187,00	-23.442.813,00	80,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.000.000,00	99.557.187,00	-23.442.813,00	80,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	99.557.187,00	-23.442.813,00	80,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	355.353.206,00	354.542.835,00	-810.371,00	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	355.353.206,00	354.542.835,00	-810.371,00	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.353.206,00	354.542.835,00	-810.371,00	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	235.233.000,00	220.103.400,00	-15.129.600,00	93,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	181.763.000,00	173.823.400,00	-7.939.600,00	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	181.763.000,00	173.823.400,00	-7.939.600,00	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.763.000,00	173.823.400,00	-7.939.600,00	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	53.470.000,00	46.280.000,00	-7.190.000,00	86,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	53.470.000,00	46.280.000,00	-7.190.000,00	86,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.470.000,00	46.280.000,00	-7.190.000,00	86,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.311.326.519,00	1.996.442.870,00	-314.883.649,00	86,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.311.326.519,00	1.996.442.870,00	-314.883.649,00	86,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.107.333.519,00	1.798.161.870,00	-309.171.649,00	85,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	957.819.408,00	944.716.341,00	-13.103.067,00	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.149.514.111,00	853.445.529,00	-296.068.582,00	74,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	203.993.000,00	198.281.000,00	-5.712.000,00	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.993.000,00	198.281.000,00	-5.712.000,00	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	854.007.000,00	717.927.040,00	-136.079.960,00	84,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.336.000,00	78.029.377,00	-306.623,00	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	53.856.000,00	53.657.479,00	-198.521,00	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	53.856.000,00	53.657.479,00	-198.521,00	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.856.000,00	53.657.479,00	-198.521,00	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	24.480.000,00	24.371.898,00	-108.102,00	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.480.000,00	24.371.898,00	-108.102,00	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.371.898,00	-108.102,00	99,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	775.657.000,00	639.897.663,00	-135.759.337,00	82,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	23.520.000,00	23.364.324,00	-155.676,00	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.520.000,00	23.364.324,00	-155.676,00	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.364.324,00	-155.676,00	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	6.300.000,00	2.700.000,00	-3.600.000,00	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	2.700.000,00	-3.600.000,00	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	2.700.000,00	-3.600.000,00	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	13.860.000,00	11.460.000,00	-2.400.000,00	82,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	11.460.000,00	-2.400.000,00	82,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	11.460.000,00	-2.400.000,00	82,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	225.227.000,00	139.483.000,00	-85.744.000,00	61,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	225.227.000,00	139.483.000,00	-85.744.000,00	61,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.227.000,00	139.483.000,00	-85.744.000,00	61,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	19.672.000,00	16.092.000,00	-3.580.000,00	81,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	19.672.000,00	16.092.000,00	-3.580.000,00	81,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.672.000,00	16.092.000,00	-3.580.000,00	81,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	148.860.000,00	142.980.000,00	-5.880.000,00	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	148.860.000,00	142.980.000,00	-5.880.000,00	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.860.000,00	142.980.000,00	-5.880.000,00	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	197.218.000,00	170.018.339,00	-27.199.661,00	86,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	197.218.000,00	170.018.339,00	-27.199.661,00	86,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	121.336.000,00	108.130.264,00	-13.205.736,00	89,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.882.000,00	61.888.075,00	-13.993.925,00	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	13.200.000,00	12.060.000,00	-1.140.000,00	91,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	12.060.000,00	-1.140.000,00	91,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	12.060.000,00	-1.140.000,00	91,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	65.040.000,00	59.580.000,00	-5.460.000,00	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	65.040.000,00	59.580.000,00	-5.460.000,00	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.040.000,00	59.580.000,00	-5.460.000,00	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	137.655.000,00	137.604.284,00	-50.716,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	137.655.000,00	137.604.284,00	-50.716,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03.2.02.0002		PEMEMUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	137.655.000,00	137.604.284,00	-50.716,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.655.000,00	137.604.284,00	-50.716,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.655.000,00	137.604.284,00	-50.716,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.759.000,00	15.992.000,00	-2.767.000,00	85,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.759.000,00	15.992.000,00	-2.767.000,00	85,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIK DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	18.759.000,00	15.992.000,00	-2.767.000,00	85,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.759.000,00	15.992.000,00	-2.767.000,00	85,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.759.000,00	15.992.000,00	-2.767.000,00	85,24	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : UPT Puskesmas Kelapa Kampit

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	1.827.144.000,00	1.701.323.184,00	-125.820.816,00	93,11	
	1.02.0.00.0.00.03.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.827.144.000,00	1.701.323.184,00	-125.820.816,00	93,11	
	1.02.0.00.0.00.03.0005		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	126.060.000,00	26.060.000,00	126,05	
	1.02.0.00.0.00.03.0005		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.727.144.000,00	1.575.263.184,00	-151.880.816,00	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005		5	BELANJA DAERAH	5.345.308.503,00	4.580.321.491,00	-764.987.012,00	85,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.391.389.503,00	3.761.680.310,00	-629.709.193,00	85,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.463.385.175,00	1.463.258.562,00	-126.613,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.463.385.175,00	1.463.258.562,00	-126.613,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.463.385.175,00	1.463.258.562,00	-126.613,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.463.385.175,00	1.463.258.562,00	-126.613,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.344.500,00	147.306.186,00	-21.038.314,00	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.578.000,00	7.657.000,00	-921.000,00	89,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.578.000,00	7.657.000,00	-921.000,00	89,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.578.000,00	7.657.000,00	-921.000,00	89,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.837.000,00	40.002.522,00	-16.834.478,00	70,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.837.000,00	40.002.522,00	-16.834.478,00	70,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.837.000,00	40.002.522,00	-16.834.478,00	70,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.896.000,00	1.818.000,00	-78.000,00	95,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.896.000,00	1.818.000,00	-78.000,00	95,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.896.000,00	1.818.000,00	-78.000,00	95,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	51.033.500,00	47.871.480,00	-3.162.020,00	93,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	51.033.500,00	47.871.480,00	-3.162.020,00	93,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.033.500,00	47.871.480,00	-3.162.020,00	93,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.000.000,00	49.957.184,00	-42.816,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.957.184,00	-42.816,00	99,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.957.184,00	-42.816,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	490.754.538,00	467.015.613,00	-23.738.925,00	95,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.312.000,00	1.040.000,00	-272.000,00	79,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.312.000,00	1.040.000,00	-272.000,00	79,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.000,00	1.040.000,00	-272.000,00	79,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	44.400.000,00	23.128.113,00	-21.271.887,00	52,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.400.000,00	23.128.113,00	-21.271.887,00	52,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	23.128.113,00	-21.271.887,00	52,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	445.042.538,00	442.847.500,00	-2.195.038,00	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	445.042.538,00	442.847.500,00	-2.195.038,00	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.042.538,00	442.847.500,00	-2.195.038,00	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	319.650.000,00	296.616.100,00	-23.033.900,00	92,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	260.580.000,00	247.696.100,00	-12.883.900,00	95,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.580.000,00	247.696.100,00	-12.883.900,00	95,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.580.000,00	247.696.100,00	-12.883.900,00	95,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59.070.000,00	48.920.000,00	-10.150.000,00	82,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.070.000,00	48.920.000,00	-10.150.000,00	82,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.070.000,00	48.920.000,00	-10.150.000,00	82,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.949.255.290,00	1.387.483.849,00	-561.771.441,00	71,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.949.255.290,00	1.387.483.849,00	-561.771.441,00	71,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.843.631.290,00	1.339.653.849,00	-503.977.441,00	72,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	818.210.294,00	706.658.096,00	-111.552.198,00	86,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.420.996,00	632.995.753,00	-392.425.243,00	61,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	105.624.000,00	47.830.000,00	-57.794.000,00	45,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.624.000,00	47.830.000,00	-57.794.000,00	45,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	800.176.500,00	678.263.681,00	-121.912.819,00	84,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	786.846.000,00	664.943.681,00	-121.902.319,00	84,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0001		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0002		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0005		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	60.720.000,00	51.060.000,00	-9.660.000,00	84,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.720.000,00	51.060.000,00	-9.660.000,00	84,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	51.060.000,00	-9.660.000,00	84,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0011		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	16.560.000,00	13.680.000,00	-2.880.000,00	82,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.560.000,00	13.680.000,00	-2.880.000,00	82,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	13.680.000,00	-2.880.000,00	82,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0012		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	5.700.000,00	2.880.000,00	-2.820.000,00	50,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	2.880.000,00	-2.820.000,00	50,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	2.880.000,00	-2.820.000,00	50,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	147.380.000,00	96.313.500,00	-51.066.500,00	65,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	147.380.000,00	96.313.500,00	-51.066.500,00	65,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.380.000,00	96.313.500,00	-51.066.500,00	65,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	14.160.000,00	-840.000,00	94,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.160.000,00	-840.000,00	94,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.160.000,00	-840.000,00	94,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	19.356.000,00	17.916.000,00	-1.440.000,00	92,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	19.356.000,00	17.916.000,00	-1.440.000,00	92,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.356.000,00	17.916.000,00	-1.440.000,00	92,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	112.080.000,00	110.880.000,00	-1.200.000,00	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	112.080.000,00	110.880.000,00	-1.200.000,00	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.080.000,00	110.880.000,00	-1.200.000,00	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	218.308.000,00	179.792.181,00	-38.515.819,00	82,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	218.308.000,00	179.792.181,00	-38.515.819,00	82,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.308.000,00	75.792.181,00	-38.515.819,00	66,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0041		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.160.000,00	1.320.000,00	-840.000,00	61,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.320.000,00	-840.000,00	61,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.320.000,00	-840.000,00	61,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	57.582.000,00	53.682.000,00	-3.900.000,00	93,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	57.582.000,00	53.682.000,00	-3.900.000,00	93,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.582.000,00	53.682.000,00	-3.900.000,00	93,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	98.340.000,00	89.600.000,00	-8.740.000,00	91,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	98.340.000,00	89.600.000,00	-8.740.000,00	91,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.340.000,00	89.600.000,00	-8.740.000,00	91,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	13.330.500,00	13.320.000,00	-10.500,00	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.03.0002		PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	13.330.500,00	13.320.000,00	-10.500,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.330.500,00	13.320.000,00	-10.500,00	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.330.500,00	13.320.000,00	-10.500,00	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	151.822.500,00	139.657.500,00	-12.165.000,00	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	151.822.500,00	139.657.500,00	-12.165.000,00	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	151.822.500,00	139.657.500,00	-12.165.000,00	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.822.500,00	139.657.500,00	-12.165.000,00	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.822.500,00	139.657.500,00	-12.165.000,00	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.920.000,00	720.000,00	-1.200.000,00	37,5	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.920.000,00	720.000,00	-1.200.000,00	37,5	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	1.920.000,00	720.000,00	-1.200.000,00	37,5	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	720.000,00	-1.200.000,00	37,5	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	720.000,00	-1.200.000,00	37,5	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : UPT Puskesmas Simpang Pesak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	755.684.511,00	812.304.959,00	56.620.448,00	107,49	
	1.02.0.00.0.00.03.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	755.684.511,00	812.304.959,00	56.620.448,00	107,49	
	1.02.0.00.0.00.03.0006		4.1.02	Retribusi Daerah	37.800.000,00	53.657.000,00	15.857.000,00	141,94	
	1.02.0.00.0.00.03.0006		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	717.884.511,00	758.647.959,00	40.763.448,00	105,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006		5	BELANJA DAERAH	3.802.934.014,00	3.256.231.999,00	-546.702.015,00	85,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.606.521.014,00	2.218.535.054,00	-387.985.960,00	85,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.089.282.682,00	1.089.282.656,00	(26,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.089.282.682,00	1.089.282.656,00	(26,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.089.282.682,00	1.089.282.656,00	(26,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.089.282.682,00	1.089.282.656,00	(26,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	156.387.000,00	114.430.472,00	-41.956.528,00	73,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.000.000,00	10.640.000,00	-360.000,00	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.640.000,00	-360.000,00	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.640.000,00	-360.000,00	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	41.494.000,00	21.240.000,00	-20.254.000,00	51,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.494.000,00	21.240.000,00	-20.254.000,00	51,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.494.000,00	21.240.000,00	-20.254.000,00	51,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.200.000,00	8.550.000,00	-1.650.000,00	83,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	8.550.000,00	-1.650.000,00	83,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	8.550.000,00	-1.650.000,00	83,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	36.796.000,00	21.262.000,00	-15.534.000,00	57,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.796.000,00	21.262.000,00	-15.534.000,00	57,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.796.000,00	21.262.000,00	-15.534.000,00	57,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.897.000,00	27.750.000,00	-4.147.000,00	86,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.897.000,00	27.750.000,00	-4.147.000,00	86,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.897.000,00	27.750.000,00	-4.147.000,00	86,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.000.000,00	24.988.472,00	-11.528,00	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.988.472,00	-11.528,00	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.988.472,00	-11.528,00	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	78.094.000,00	65.098.000,00	-12.996.000,00	83,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	7.683.000,00	7.605.000,00	-78.000,00	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.683.000,00	7.605.000,00	-78.000,00	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.683.000,00	7.605.000,00	-78.000,00	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.581.000,00	8.000.000,00	-12.581.000,00	38,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.581.000,00	8.000.000,00	-12.581.000,00	38,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.581.000,00	8.000.000,00	-12.581.000,00	38,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	49.830.000,00	49.493.000,00	-337.000,00	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	49.830.000,00	49.493.000,00	-337.000,00	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.830.000,00	49.493.000,00	-337.000,00	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	305.064.332,00	304.467.333,00	-596.999,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.400.000,00	68.029.833,00	-370.167,00	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.400.000,00	68.029.833,00	-370.167,00	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	68.029.833,00	-370.167,00	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	236.664.332,00	236.437.500,00	-226.832,00	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	236.664.332,00	236.437.500,00	-226.832,00	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.664.332,00	236.437.500,00	-226.832,00	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.893.000,00	149.222.800,00	-22.670.200,00	86,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	150.773.000,00	133.380.800,00	-17.392.200,00	88,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.773.000,00	133.380.800,00	-17.392.200,00	88,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.773.000,00	133.380.800,00	-17.392.200,00	88,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.120.000,00	15.842.000,00	-5.278.000,00	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.120.000,00	15.842.000,00	-5.278.000,00	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	15.842.000,00	-5.278.000,00	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	805.800.000,00	496.033.793,00	-309.766.207,00	61,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	805.800.000,00	496.033.793,00	-309.766.207,00	61,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	669.548.700,00	496.033.793,00	-173.514.907,00	74,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	441.480.000,00	311.763.303,00	-129.716.697,00	70,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.068.700,00	184.270.490,00	-43.798.210,00	80,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	136.251.300,00	0,00	-136.251.300,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.251.300,00	0,00	-136.251.300,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.067.243.000,00	908.528.945,00	-158.714.055,00	85,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	330.500.000,00	329.256.146,00	-1.243.854,00	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	258.500.000,00	257.426.741,00	-1.073.259,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	258.500.000,00	257.426.741,00	-1.073.259,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.500.000,00	227.650.880,00	-849.120,00	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.775.861,00	-224.139,00	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	72.000.000,00	71.829.405,00	-170.595,00	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	71.829.405,00	-170.595,00	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.000.000,00	71.829.405,00	-170.595,00	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	736.743.000,00	579.272.799,00	-157.470.201,00	78,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0001		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	41.880.000,00	41.820.000,00	-60.000,00	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.880.000,00	41.820.000,00	-60.000,00	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.880.000,00	41.820.000,00	-60.000,00	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0002		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	13.680.000,00	12.100.000,00	-1.580.000,00	88,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.680.000,00	12.100.000,00	-1.580.000,00	88,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	12.100.000,00	-1.580.000,00	88,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0005		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	30.240.000,00	29.100.000,00	-1.140.000,00	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.240.000,00	29.100.000,00	-1.140.000,00	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	29.100.000,00	-1.140.000,00	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0011		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	14.400.000,00	14.340.000,00	-60.000,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.340.000,00	-60.000,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.340.000,00	-60.000,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0012		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0015		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	170.700.000,00	69.934.000,00	-100.766.000,00	40,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	170.700.000,00	69.934.000,00	-100.766.000,00	40,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.700.000,00	69.934.000,00	-100.766.000,00	40,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0017		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	19.200.000,00	18.180.000,00	-1.020.000,00	94,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	18.180.000,00	-1.020.000,00	94,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	18.180.000,00	-1.020.000,00	94,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0020		PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	19.680.000,00	14.100.000,00	-5.580.000,00	71,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	19.680.000,00	14.100.000,00	-5.580.000,00	71,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	14.100.000,00	-5.580.000,00	71,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	98.280.000,00	88.740.000,00	-9.540.000,00	90,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	98.280.000,00	88.740.000,00	-9.540.000,00	90,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.280.000,00	88.740.000,00	-9.540.000,00	90,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	166.563.000,00	137.958.799,00	-28.604.201,00	82,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	166.563.000,00	137.958.799,00	-28.604.201,00	82,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	96.400.000,00	82.929.716,00	-13.470.284,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.163.000,00	55.029.083,00	-15.133.917,00	78,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	600.000,00	480.000,00	-120.000,00	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	480.000,00	-120.000,00	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	480.000,00	-120.000,00	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	44.280.000,00	43.260.000,00	-1.020.000,00	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	44.280.000,00	43.260.000,00	-1.020.000,00	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.280.000,00	43.260.000,00	-1.020.000,00	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	111.000.000,00	109.260.000,00	-1.740.000,00	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	111.000.000,00	109.260.000,00	-1.740.000,00	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.000.000,00	109.260.000,00	-1.740.000,00	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.420.000,00	8.418.000,00	-2.000,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.420.000,00	8.418.000,00	-2.000,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	8.420.000,00	8.418.000,00	-2.000,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.420.000,00	8.418.000,00	-2.000,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	8.418.000,00	-2.000,00	99,97	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : UPT Puskesmas Renggiang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	507.885.449,00	649.986.572,00	142.101.123,00	127,97	
	1.02.0.00.0.00.03.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.885.449,00	649.986.572,00	142.101.123,00	127,97	
	1.02.0.00.0.00.03.0007		4.1.02	Retribusi Daerah	29.706.063,00	69.039.000,00	39.332.937,00	232,40	
	1.02.0.00.0.00.03.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.179.386,00	580.947.572,00	102.768.186,00	121,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007		5	BELANJA DAERAH	3.582.587.272,00	3.243.391.365,00	-339.195.907,00	90,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.280.987.272,00	2.129.330.986,00	-151.656.286,00	93,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	749.115.150,00	749.115.150,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	749.115.150,00	749.115.150,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	749.115.150,00	749.115.150,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	749.115.150,00	749.115.150,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	278.168.000,00	263.754.095,00	-14.413.905,00	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	9.912.500,00	-87.500,00	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.912.500,00	-87.500,00	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.912.500,00	-87.500,00	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	105.340.000,00	104.147.000,00	-1.193.000,00	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.340.000,00	104.147.000,00	-1.193.000,00	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.340.000,00	104.147.000,00	-1.193.000,00	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.947.000,00	12.569.000,00	-7.378.000,00	63,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.947.000,00	12.569.000,00	-7.378.000,00	63,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.947.000,00	12.569.000,00	-7.378.000,00	63,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	51.608.000,00	50.271.000,00	-1.337.000,00	97,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.608.000,00	50.271.000,00	-1.337.000,00	97,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.608.000,00	50.271.000,00	-1.337.000,00	97,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	66.273.000,00	64.656.000,00	-1.617.000,00	97,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	66.273.000,00	64.656.000,00	-1.617.000,00	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.273.000,00	64.656.000,00	-1.617.000,00	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.000.000,00	22.198.595,00	-2.801.405,00	88,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.198.595,00	-2.801.405,00	88,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.198.595,00	-2.801.405,00	88,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	523.294.122,00	492.333.250,00	-30.960.872,00	94,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.800.000,00	97.163.250,00	-3.636.750,00	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.800.000,00	97.163.250,00	-3.636.750,00	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	97.163.250,00	-3.636.750,00	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	422.494.122,00	395.170.000,00	-27.324.122,00	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	422.494.122,00	395.170.000,00	-27.324.122,00	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.494.122,00	395.170.000,00	-27.324.122,00	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	194.070.000,00	162.805.461,00	-31.264.539,00	83,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	150.980.000,00	136.845.461,00	-14.134.539,00	90,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.980.000,00	136.845.461,00	-14.134.539,00	90,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.980.000,00	136.845.461,00	-14.134.539,00	90,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	43.090.000,00	25.960.000,00	-17.130.000,00	60,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.090.000,00	25.960.000,00	-17.130.000,00	60,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00	25.960.000,00	-17.130.000,00	60,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	536.340.000,00	461.323.030,00	-75.016.970,00	86,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	536.340.000,00	461.323.030,00	-75.016.970,00	86,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	461.779.000,00	415.098.030,00	-46.680.970,00	89,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	231.804.000,00	215.476.519,00	-16.327.481,00	92,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.975.000,00	199.621.511,00	-30.353.489,00	86,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	74.561.000,00	46.225.000,00	-28.336.000,00	61,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.561.000,00	46.225.000,00	-28.336.000,00	61,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	983.923.500,00	803.257.879,00	-180.665.621,00	81,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.381.500,00	139.528.500,00	-50.853.000,00	73,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	46.970.000,00	0,00	-46.970.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.970.000,00	0,00	-46.970.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.970.000,00	0,00	-46.970.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	99.964.000,00	99.735.000,00	-229.000,00	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.964.000,00	99.735.000,00	-229.000,00	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.964.000,00	99.735.000,00	-229.000,00	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.463.500,00	0,00	-3.463.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.463.500,00	0,00	-3.463.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.463.500,00	0,00	-3.463.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	39.984.000,00	39.793.500,00	-190.500,00	99,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	39.984.000,00	39.793.500,00	-190.500,00	99,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.984.000,00	39.793.500,00	-190.500,00	99,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	780.222.000,00	650.409.379,00	-129.812.621,00	83,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	39.360.000,00	39.015.000,00	-345.000,00	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.360.000,00	39.015.000,00	-345.000,00	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.360.000,00	39.015.000,00	-345.000,00	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	13.104.000,00	10.284.000,00	-2.820.000,00	78,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.104.000,00	10.284.000,00	-2.820.000,00	78,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.104.000,00	10.284.000,00	-2.820.000,00	78,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	43.200.000,00	30.480.000,00	-12.720.000,00	70,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	30.480.000,00	-12.720.000,00	70,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	30.480.000,00	-12.720.000,00	70,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.760.000,00	1.680.000,00	-4.080.000,00	29,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	1.680.000,00	-4.080.000,00	29,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	1.680.000,00	-4.080.000,00	29,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFeksi HIV	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	165.298.000,00	151.553.000,00	-13.745.000,00	91,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	165.298.000,00	151.553.000,00	-13.745.000,00	91,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.298.000,00	151.553.000,00	-13.745.000,00	91,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	7.920.000,00	7.200.000,00	-720.000,00	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.200.000,00	-720.000,00	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.200.000,00	-720.000,00	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	16.020.000,00	11.040.000,00	-4.980.000,00	68,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	16.020.000,00	11.040.000,00	-4.980.000,00	68,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	11.040.000,00	-4.980.000,00	68,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	177.000.000,00	155.340.000,00	-21.660.000,00	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	177.000.000,00	155.340.000,00	-21.660.000,00	87,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	155.340.000,00	-21.660.000,00	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	192.320.000,00	157.717.379,00	-34.602.621,00	82,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	192.320.000,00	157.717.379,00	-34.602.621,00	82,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	88.320.000,00	88.267.543,00	-52.457,00	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	69.449.836,00	-34.550.164,00	66,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	8.640.000,00	2.160.000,00	-6.480.000,00	25,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	2.160.000,00	-6.480.000,00	25,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	2.160.000,00	-6.480.000,00	25,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	21.120.000,00	18.720.000,00	-2.400.000,00	88,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	21.120.000,00	18.720.000,00	-2.400.000,00	88,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	18.720.000,00	-2.400.000,00	88,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	86.640.000,00	62.340.000,00	-24.300.000,00	71,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	86.640.000,00	62.340.000,00	-24.300.000,00	71,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.640.000,00	62.340.000,00	-24.300.000,00	71,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	284.332.500,00	278.302.500,00	-6.030.000,00	97,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	284.332.500,00	278.302.500,00	-6.030.000,00	97,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	284.332.500,00	278.302.500,00	-6.030.000,00	97,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	284.332.500,00	278.302.500,00	-6.030.000,00	97,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.332.500,00	278.302.500,00	-6.030.000,00	97,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.344.000,00	32.500.000,00	-844.000,00	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.344.000,00	32.500.000,00	-844.000,00	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	33.344.000,00	32.500.000,00	-844.000,00	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.344.000,00	32.500.000,00	-844.000,00	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.344.000,00	32.500.000,00	-844.000,00	97,46	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
Organisasi : UPT Puskesmas Dendang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0008		4	PENDAPATAN DAERAH	464.949.965,00	599.266.645,00	134.316.680,00	128,88	
	1.02.0.00.0.00.03.0008		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	464.949.965,00	599.266.645,00	134.316.680,00	128,88	
	1.02.0.00.0.00.03.0008		4.1.02	Retribusi Daerah	26.250.000,00	54.947.000,00	28.697.000,00	209,32	
	1.02.0.00.0.00.03.0008		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	438.699.965,00	544.319.645,00	105.619.680,00	124,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008		5	BELANJA DAERAH	2.840.514.466,00	2.403.519.631,00	-436.994.835,00	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.720.466,00	1.864.925.476,00	-340.794.990,00	84,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	864.988.978,00	822.319.569,00	-42.669.409,00	95,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	864.988.978,00	822.319.569,00	-42.669.409,00	95,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	864.988.978,00	822.319.569,00	-42.669.409,00	95,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	864.988.978,00	822.319.569,00	-42.669.409,00	95,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	142.763.000,00	110.343.415,00	-32.419.585,00	77,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.118.000,00	5.961.000,00	-4.157.000,00	58,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.118.000,00	5.961.000,00	-4.157.000,00	58,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.118.000,00	5.961.000,00	-4.157.000,00	58,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.721.000,00	23.184.500,00	-10.536.500,00	68,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.721.000,00	23.184.500,00	-10.536.500,00	68,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.721.000,00	23.184.500,00	-10.536.500,00	68,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	24.069.000,00	16.364.600,00	-7.704.400,00	67,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.069.000,00	16.364.600,00	-7.704.400,00	67,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.069.000,00	16.364.600,00	-7.704.400,00	67,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.535.000,00	18.073.000,00	-7.462.000,00	70,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.535.000,00	18.073.000,00	-7.462.000,00	70,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.535.000,00	18.073.000,00	-7.462.000,00	70,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.320.000,00	22.100.000,00	-2.220.000,00	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.320.000,00	22.100.000,00	-2.220.000,00	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.320.000,00	22.100.000,00	-2.220.000,00	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.000.000,00	24.660.315,00	-339.685,00	98,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.660.315,00	-339.685,00	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.660.315,00	-339.685,00	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60.912.000,00	16.530.000,00	-44.382.000,00	27,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	16.884.000,00	16.530.000,00	-354.000,00	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	16.884.000,00	16.530.000,00	-354.000,00	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.884.000,00	16.530.000,00	-354.000,00	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	44.028.000,00	0,00	-44.028.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	44.028.000,00	0,00	-44.028.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.028.000,00	0,00	-44.028.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	412.226.488,00	298.112.000,00	-114.114.488,00	72,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	61.020.000,00	53.712.000,00	-7.308.000,00	88,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.020.000,00	53.712.000,00	-7.308.000,00	88,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.020.000,00	53.712.000,00	-7.308.000,00	88,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	351.206.488,00	244.400.000,00	-106.806.488,00	69,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	351.206.488,00	244.400.000,00	-106.806.488,00	69,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.206.488,00	244.400.000,00	-106.806.488,00	69,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	201.582.000,00	154.322.950,00	-47.259.050,00	76,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	169.862.000,00	147.782.950,00	-22.079.050,00	87,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.862.000,00	147.782.950,00	-22.079.050,00	87,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.862.000,00	147.782.950,00	-22.079.050,00	87,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.720.000,00	6.540.000,00	-25.180.000,00	20,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.720.000,00	6.540.000,00	-25.180.000,00	20,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.720.000,00	6.540.000,00	-25.180.000,00	20,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	523.248.000,00	463.297.542,00	-59.950.458,00	88,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	523.248.000,00	463.297.542,00	-59.950.458,00	88,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	523.248.000,00	463.297.542,00	-59.950.458,00	88,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	255.974.400,00	287.850.049,00	31.875.649,00	112,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.273.600,00	175.447.493,00	-91.826.107,00	65,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	552.644.000,00	458.024.155,00	-94.619.845,00	82,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.882.000,00	83.642.106,00	-239.894,00	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	33.970.000,00	33.818.250,00	-151.750,00	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.970.000,00	33.818.250,00	-151.750,00	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.970.000,00	33.818.250,00	-151.750,00	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	49.912.000,00	49.823.856,00	-88.144,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	49.912.000,00	49.823.856,00	-88.144,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.912.000,00	49.823.856,00	-88.144,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	455.418.000,00	361.062.049,00	-94.355.951,00	79,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	4.080.000,00	1.920.000,00	-2.160.000,00	47,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	1.920.000,00	-2.160.000,00	47,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	1.920.000,00	-2.160.000,00	47,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	14.760.000,00	900.000,00	-13.860.000,00	6,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.760.000,00	900.000,00	-13.860.000,00	6,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00	900.000,00	-13.860.000,00	6,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	20.160.000,00	20.040.000,00	-120.000,00	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.160.000,00	20.040.000,00	-120.000,00	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.040.000,00	-120.000,00	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	27.600.000,00	24.000.000,00	-3.600.000,00	86,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	24.000.000,00	-3.600.000,00	86,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	24.000.000,00	-3.600.000,00	86,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	93.572.000,00	80.476.000,00	-13.096.000,00	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	93.572.000,00	80.476.000,00	-13.096.000,00	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.572.000,00	80.476.000,00	-13.096.000,00	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	16.408.000,00	11.976.000,00	-4.432.000,00	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	16.408.000,00	11.976.000,00	-4.432.000,00	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.408.000,00	11.976.000,00	-4.432.000,00	72,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	50.880.000,00	48.720.000,00	-2.160.000,00	95,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	50.880.000,00	48.720.000,00	-2.160.000,00	95,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.880.000,00	48.720.000,00	-2.160.000,00	95,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	116.238.000,00	94.790.049,00	-21.447.951,00	81,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	116.238.000,00	94.790.049,00	-21.447.951,00	81,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	70.270.000,00	30.485.199,00	-39.784.801,00	43,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.968.000,00	64.304.850,00	18.336.850,00	139,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	14.400.000,00	2.640.000,00	-11.760.000,00	18,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	2.640.000,00	-11.760.000,00	18,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	2.640.000,00	-11.760.000,00	18,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	80.400.000,00	67.680.000,00	-12.720.000,00	84,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	80.400.000,00	67.680.000,00	-12.720.000,00	84,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	67.680.000,00	-12.720.000,00	84,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	13.344.000,00	13.320.000,00	-24.000,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.03.0002		PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	13.344.000,00	13.320.000,00	-24.000,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.344.000,00	13.320.000,00	-24.000,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.344.000,00	13.320.000,00	-24.000,00	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.400.000,00	6.820.000,00	-1.580.000,00	81,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.400.000,00	6.820.000,00	-1.580.000,00	81,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	8.400.000,00	6.820.000,00	-1.580.000,00	81,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	6.820.000,00	-1.580.000,00	81,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	6.820.000,00	-1.580.000,00	81,19	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.1.04.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.117.656.342,00	989.245.754,00	-128.410.588,00	88,51	
	1.03.2.10.1.04.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.117.656.342,00	989.245.754,00	-128.410.588,00	88,51	
	1.03.2.10.1.04.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.102.656.342,00	984.420.904,00	-118.235.438,00	89,27	
	1.03.2.10.1.04.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.000.000,00	4.824.850,00	-10.175.150,00	32,16	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000		5	BELANJA DAERAH	85.546.798.399,00	77.136.835.568,06	-8.409.962.830,94	90,16	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.658.208.052,00	9.110.737.747,00	-1.547.470.305,00	85,48	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.948.898.224,00	5.478.484.990,00	-470.413.234,00	92,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.948.898.224,00	5.478.484.990,00	-470.413.234,00	92,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.948.898.224,00	5.478.484.990,00	-470.413.234,00	92,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.948.898.224,00	5.478.484.990,00	-470.413.234,00	92,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	285.611.000,00	207.530.804,00	-78.080.196,00	72,66	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	148.500.000,00	147.690.000,00	-810.000,00	99,45	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.500.000,00	147.690.000,00	-810.000,00	99,45	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.500.000,00	147.690.000,00	-810.000,00	99,45	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	59.613.000,00	26.600.346,00	-33.012.654,00	44,62	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	59.613.000,00	26.600.346,00	-33.012.654,00	44,62	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.613.000,00	26.600.346,00	-33.012.654,00	44,62	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	77.498.000,00	33.240.458,00	-44.257.542,00	42,89	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	77.498.000,00	33.240.458,00	-44.257.542,00	42,89	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.498.000,00	33.240.458,00	-44.257.542,00	42,89	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	789.690.000,00	698.871.950,00	-90.818.050,00	88,49	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.811.000,00	0,00	-14.811.000,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.811.000,00	0,00	-14.811.000,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.811.000,00	0,00	-14.811.000,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	97.457.000,00	87.357.895,00	-10.099.105,00	89,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.457.000,00	87.357.895,00	-10.099.105,00	89,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.457.000,00	87.357.895,00	-10.099.105,00	89,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	36.900.000,00	27.268.500,00	-9.631.500,00	73,89	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.900.000,00	27.268.500,00	-9.631.500,00	73,89	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	27.268.500,00	-9.631.500,00	73,89	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	119.950.000,00	79.260.000,00	-40.690.000,00	66,07	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	119.950.000,00	79.260.000,00	-40.690.000,00	66,07	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.950.000,00	79.260.000,00	-40.690.000,00	66,07	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.852.000,00	37.089.650,00	-8.762.350,00	80,88	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	45.852.000,00	37.089.650,00	-8.762.350,00	80,88	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.852.000,00	37.089.650,00	-8.762.350,00	80,88	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	450.000.000,00	449.995.905,00	-4.095,00	99,99	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	449.995.905,00	-4.095,00	99,99	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	449.995.905,00	-4.095,00	99,99	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	24.720.000,00	17.900.000,00	-6.820.000,00	72,41	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.720.000,00	17.900.000,00	-6.820.000,00	72,41	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	17.900.000,00	-6.820.000,00	72,41	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.081.000,00	15.900.000,00	-111.181.000,00	12,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.537.000,00	0,00	-7.537.000,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.537.000,00	0,00	-7.537.000,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.537.000,00	0,00	-7.537.000,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	119.544.000,00	15.900.000,00	-103.644.000,00	13,30	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	119.544.000,00	15.900.000,00	-103.644.000,00	13,30	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.544.000,00	15.900.000,00	-103.644.000,00	13,30	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.094.097.828,00	1.606.616.830,00	-487.480.998,00	76,72	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.000.000,00	4.600.000,00	-2.400.000,00	65,71	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	4.600.000,00	-2.400.000,00	65,71	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.600.000,00	-2.400.000,00	65,71	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	829.405.000,00	810.269.330,00	-19.135.670,00	97,69	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	829.405.000,00	810.269.330,00	-19.135.670,00	97,69	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.405.000,00	810.269.330,00	-19.135.670,00	97,69	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.257.692.828,00	791.747.500,00	-465.945.328,00	62,95	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.257.692.828,00	791.747.500,00	-465.945.328,00	62,95	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.692.828,00	791.747.500,00	-465.945.328,00	62,95	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.412.830.000,00	1.103.333.173,00	-309.496.827,00	78,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.250.000,00	25.373.800,00	-15.876.200,00	61,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.250.000,00	25.373.800,00	-15.876.200,00	61,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	25.373.800,00	-15.876.200,00	61,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	750.280.000,00	642.839.273,00	-107.440.727,00	85,67	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.280.000,00	642.839.273,00	-107.440.727,00	85,67	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.280.000,00	642.839.273,00	-107.440.727,00	85,67	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	385.500.000,00	206.748.100,00	-178.751.900,00	53,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	385.500.000,00	206.748.100,00	-178.751.900,00	53,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.500.000,00	206.748.100,00	-178.751.900,00	53,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	202.100.000,00	199.372.000,00	-2.728.000,00	98,65	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	202.100.000,00	199.372.000,00	-2.728.000,00	98,65	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.100.000,00	199.372.000,00	-2.728.000,00	98,65	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	33.700.000,00	29.000.000,00	-4.700.000,00	86,05	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	33.700.000,00	29.000.000,00	-4.700.000,00	86,05	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	29.000.000,00	-4.700.000,00	86,05	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.819.764.496,00	12.572.858.000,00	-3.246.906.496,00	79,47	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.786.043.136,00	8.740.417.750,00	-2.045.625.386,00	81,03	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	2.499.068.092,00	2.125.034.500,00	-374.033.592,00	85,03	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	99.750.000,00	81.074.400,00	-18.675.600,00	81,27	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.750.000,00	81.074.400,00	-18.675.600,00	81,27	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2	BELANJA MODAL	2.399.318.092,00	2.043.960.100,00	-355.357.992,00	85,18	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.399.318.092,00	2.043.960.100,00	-355.357.992,00	85,18	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0113		PEMBANGUNAN KANAL BANJIR	1.630.645.302,00	1.334.390.750,00	-296.254.552,00	81,83	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.1	BELANJA OPERASI	91.125.000,00	91.125.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.125.000,00	91.125.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2	BELANJA MODAL	1.539.520.302,00	1.243.265.750,00	-296.254.552,00	80,75	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.539.520.302,00	1.243.265.750,00	-296.254.552,00	80,75	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0115		PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	5.316.416.213,00	4.213.784.600,00	-1.102.631.613,00	79,25	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2	BELANJA MODAL	5.316.416.213,00	4.213.784.600,00	-1.102.631.613,00	79,25	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.316.416.213,00	4.213.784.600,00	-1.102.631.613,00	79,25	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0120		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	100.000.000,00	99.067.000,00	-933.000,00	99,06	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0120	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.067.000,00	-933.000,00	99,06	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0120	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.067.000,00	-933.000,00	99,06	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0121		PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	1.239.913.529,00	968.140.900,00	-271.772.629,00	78,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0121	5.2	BELANJA MODAL	1.239.913.529,00	968.140.900,00	-271.772.629,00	78,08	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0121	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.239.913.529,00	968.140.900,00	-271.772.629,00	78,08	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.033.721.360,00	3.832.440.250,00	-1.201.281.110,00	76,13	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0002		PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	4.633.721.360,00	3.435.640.250,00	-1.198.081.110,00	74,14	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.633.721.360,00	3.435.640.250,00	-1.198.081.110,00	74,14	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.633.721.360,00	3.435.640.250,00	-1.198.081.110,00	74,14	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0035		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	400.000.000,00	396.800.000,00	-3.200.000,00	99,20	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	396.800.000,00	-3.200.000,00	99,20	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	396.800.000,00	-3.200.000,00	99,20	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.363.403.935,00	3.407.531.934,59	-955.872.000,41	78,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.363.403.935,00	3.407.531.934,59	-955.872.000,41	78,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	910.424.820,00	392.787.000,00	-517.637.820,00	43,14	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	910.424.820,00	392.787.000,00	-517.637.820,00	43,14	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	910.424.820,00	392.787.000,00	-517.637.820,00	43,14	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	2.406.814.790,00	2.074.279.000,00	-332.535.790,00	86,18	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	2.406.814.790,00	2.074.279.000,00	-332.535.790,00	86,18	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.406.814.790,00	2.074.279.000,00	-332.535.790,00	86,18	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0031		OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	394.836.325,00	393.568.200,00	-1.268.125,00	99,67	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	394.836.325,00	393.568.200,00	-1.268.125,00	99,67	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	394.836.325,00	393.568.200,00	-1.268.125,00	99,67	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	651.328.000,00	546.897.734,59	-104.430.265,41	83,96	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	651.328.000,00	546.897.734,59	-104.430.265,41	83,96	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	651.328.000,00	546.897.734,59	-104.430.265,41	83,96	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.655.700.000,00	3.646.200.000,00	-9.500.000,00	99,74	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.655.700.000,00	3.646.200.000,00	-9.500.000,00	99,74	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	3.655.700.000,00	3.646.200.000,00	-9.500.000,00	99,74	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	3.588.500.000,00	3.579.000.000,00	-9.500.000,00	99,73	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.500.000,00	379.000.000,00	-9.500.000,00	97,55	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.570.223.000,00	7.553.863.484,47	-16.359.515,53	99,78	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.570.223.000,00	7.553.863.484,47	-16.359.515,53	99,78	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	598.907.000,00	597.401.492,80	-1.505.507,20	99,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	598.907.000,00	597.401.492,80	-1.505.507,20	99,74	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	598.907.000,00	597.401.492,80	-1.505.507,20	99,74	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0019		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	249.200.000,00	246.721.482,10	-2.478.517,90	99,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	249.200.000,00	246.721.482,10	-2.478.517,90	99,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0019	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249.200.000,00	246.721.482,10	-2.478.517,90	99,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0028		REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	349.716.000,00	348.313.000,00	-1.403.000,00	99,59	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	349.716.000,00	348.313.000,00	-1.403.000,00	99,59	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	349.716.000,00	348.313.000,00	-1.403.000,00	99,59	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0029		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	6.372.400.000,00	6.361.427.509,57	-10.972.490,43	99,82	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	6.372.400.000,00	6.361.427.509,57	-10.972.490,43	99,82	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.372.400.000,00	6.361.427.509,57	-10.972.490,43	99,82	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	487.394.000,00	219.878.000,00	-267.516.000,00	45,11	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	487.394.000,00	219.878.000,00	-267.516.000,00	45,11	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	189.648.000,00	-10.352.000,00	94,82	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	189.648.000,00	-10.352.000,00	94,82	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	189.648.000,00	-10.352.000,00	94,82	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	287.394.000,00	30.230.000,00	-257.164.000,00	10,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	287.394.000,00	30.230.000,00	-257.164.000,00	10,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.394.000,00	30.230.000,00	-257.164.000,00	10,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.275.960.000,00	1.130.147.050,00	-145.812.950,00	88,57	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.275.960.000,00	1.130.147.050,00	-145.812.950,00	88,57	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	1.275.960.000,00	1.130.147.050,00	-145.812.950,00	88,57	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	975.960.000,00	830.852.200,00	-145.107.800,00	85,13	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.960.000,00	830.852.200,00	-145.107.800,00	85,13	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.294.850,00	-705.150,00	99,76	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	299.294.850,00	-705.150,00	99,76	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	39.760.034.316,00	38.132.980.300,00	-1.627.054.016,00	95,90	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	39.760.034.316,00	38.132.980.300,00	-1.627.054.016,00	95,90	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	200.000.000,00	199.600.000,00	-400.000,00	99,79	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.600.000,00	-400.000,00	99,79	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.600.000,00	-400.000,00	99,79	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	23.669.711.166,00	22.678.712.000,00	-990.999.166,00	95,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	151.612.500,00	71.165.000,00	-80.447.500,00	46,93	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.612.500,00	71.165.000,00	-80.447.500,00	46,93	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	23.518.098.666,00	22.607.547.000,00	-910.551.666,00	96,12	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.518.098.666,00	22.607.547.000,00	-910.551.666,00	96,12	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	5.425.615.000,00	5.302.605.500,00	-123.009.500,00	97,73	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	140.200.000,00	92.092.500,00	-48.107.500,00	65,68	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.200.000,00	92.092.500,00	-48.107.500,00	65,68	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	5.285.415.000,00	5.210.513.000,00	-74.902.000,00	98,58	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.285.415.000,00	5.210.513.000,00	-74.902.000,00	98,58	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0037		PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR	5.868.712.000,00	5.370.621.000,00	-498.091.000,00	91,51	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	2.560.000,00	-16.640.000,00	13,33	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	2.560.000,00	-16.640.000,00	13,33	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.2	BELANJA MODAL	5.849.512.000,00	5.368.061.000,00	-481.451.000,00	91,76	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.849.512.000,00	5.368.061.000,00	-481.451.000,00	91,76	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	199.399.718,00	198.778.000,00	-621.718,00	99,68	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	199.399.718,00	198.778.000,00	-621.718,00	99,68	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.399.718,00	198.778.000,00	-621.718,00	99,68	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	496.598.460,00	496.008.800,00	-589.660,00	99,88	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	496.598.460,00	496.008.800,00	-589.660,00	99,88	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.598.460,00	496.008.800,00	-589.660,00	99,88	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	2.550.950.272,00	2.541.533.000,00	-9.417.272,00	99,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	2.550.950.272,00	2.541.533.000,00	-9.417.272,00	99,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.550.950.272,00	2.541.533.000,00	-9.417.272,00	99,63	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.349.047.700,00	1.345.122.000,00	-3.925.700,00	99,70	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	1.349.047.700,00	1.345.122.000,00	-3.925.700,00	99,70	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.349.047.700,00	1.345.122.000,00	-3.925.700,00	99,70	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	482.754.000,00	353.814.584,00	-128.939.416,00	73,29	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	292.938.000,00	260.255.095,00	-32.682.905,00	88,84	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0010		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	192.942.000,00	175.414.095,00	-17.527.905,00	90,91	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	192.942.000,00	175.414.095,00	-17.527.905,00	90,91	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.942.000,00	175.414.095,00	-17.527.905,00	90,91	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0016		PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS	99.996.000,00	84.841.000,00	-15.155.000,00	84,84	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	99.996.000,00	84.841.000,00	-15.155.000,00	84,84	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.996.000,00	84.841.000,00	-15.155.000,00	84,84	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.816.000,00	93.559.489,00	-96.256.511,00	49,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0013		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	20.008.080,00	-19.991.920,00	50,02	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	20.008.080,00	-19.991.920,00	50,02	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	20.008.080,00	-19.991.920,00	50,02	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0014		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA SIPJAKI	149.816.000,00	73.551.409,00	-76.264.591,00	49,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	149.816.000,00	73.551.409,00	-76.264.591,00	49,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.816.000,00	73.551.409,00	-76.264.591,00	49,09	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.473.356.600,00	1.008.824.468,00	-464.532.132,00	68,47	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	397.952.000,00	175.550.004,00	-222.401.996,00	44,11	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0003		PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	99.978.100,00	0,00	-99.978.100,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.978.100,00	0,00	-99.978.100,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.978.100,00	0,00	-99.978.100,00	0,00	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0006		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA	297.973.900,00	175.550.004,00	-122.423.896,00	58,91	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	297.973.900,00	175.550.004,00	-122.423.896,00	58,91	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.973.900,00	175.550.004,00	-122.423.896,00	58,91	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	699.622.100,00	618.179.900,00	-81.442.200,00	88,35	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.03.0005		PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	699.622.100,00	618.179.900,00	-81.442.200,00	88,35	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	699.622.100,00	618.179.900,00	-81.442.200,00	88,35	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.622.100,00	618.179.900,00	-81.442.200,00	88,35	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	375.782.500,00	215.094.564,00	-160.687.936,00	57,23	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	272.587.500,00	160.887.500,00	-111.700.000,00	59,02	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	272.587.500,00	160.887.500,00	-111.700.000,00	59,02	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.587.500,00	160.887.500,00	-111.700.000,00	59,02	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0008		PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK	103.195.000,00	54.207.064,00	-48.987.936,00	52,52	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.474.000,00	2.707.064,00	-48.766.936,00	5,25	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.474.000,00	2.707.064,00	-48.766.936,00	5,25	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0008	5.2	BELANJA MODAL	51.721.000,00	51.500.000,00	-221.000,00	99,57	
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	-221.000,00	99,57	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.105.892.850,00	8.535.613.060,00	-570.279.790,00	93,73	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.4.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.516.000,00	0,00	-22.516.000,00	0,00	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.516.000,00	0,00	-22.516.000,00	0,00	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	22.516.000,00	0,00	-22.516.000,00	0,00	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	22.516.000,00	0,00	-22.516.000,00	0,00	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.516.000,00	0,00	-22.516.000,00	0,00	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	742.567.000,00	664.485.000,00	-78.082.000,00	89,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	650.840.000,00	600.998.000,00	-49.842.000,00	92,34	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.01.0007		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	650.840.000,00	600.998.000,00	-49.842.000,00	92,34	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	650.840.000,00	600.998.000,00	-49.842.000,00	92,34	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.840.000,00	600.998.000,00	-49.842.000,00	92,34	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	91.727.000,00	63.487.000,00	-28.240.000,00	69,21	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	37.766.000,00	19.010.000,00	-18.756.000,00	50,33	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.766.000,00	19.010.000,00	-18.756.000,00	50,33	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.766.000,00	19.010.000,00	-18.756.000,00	50,33	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	53.961.000,00	44.477.000,00	-9.484.000,00	82,42	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.961.000,00	44.477.000,00	-9.484.000,00	82,42	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.961.000,00	44.477.000,00	-9.484.000,00	82,42	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.4.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	116.180.000,00	77.755.000,00	-38.425.000,00	66,92	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	116.180.000,00	77.755.000,00	-38.425.000,00	66,92	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03.2.02.0014		SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	116.180.000,00	77.755.000,00	-38.425.000,00	66,92	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	116.180.000,00	77.755.000,00	-38.425.000,00	66,92	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.180.000,00	77.755.000,00	-38.425.000,00	66,92	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.4.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.618.608.000,00	1.565.602.000,00	-53.006.000,00	96,72	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.618.608.000,00	1.565.602.000,00	-53.006.000,00	96,72	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.618.608.000,00	1.565.602.000,00	-53.006.000,00	96,72	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.618.608.000,00	1.565.602.000,00	-53.006.000,00	96,72	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.608.000,00	215.602.000,00	-53.006.000,00	80,26	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.606.021.850,00	6.227.771.060,00	-378.250.790,00	94,27	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	6.606.021.850,00	6.227.771.060,00	-378.250.790,00	94,27	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0001		PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	194.123.000,00	190.148.000,00	-3.975.000,00	97,95	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	194.123.000,00	190.148.000,00	-3.975.000,00	97,95	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.123.000,00	190.148.000,00	-3.975.000,00	97,95	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	6.411.898.850,00	6.037.623.060,00	-374.275.790,00	94,16	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	412.605.000,00	378.339.060,00	-34.265.940,00	91,69	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.605.000,00	378.339.060,00	-34.265.940,00	91,69	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.999.293.850,00	5.659.284.000,00	-340.009.850,00	94,33	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.398.000,00	7.389.000,00	-9.000,00	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.991.895.850,00	5.651.895.000,00	-340.000.850,00	94,32	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000		5	BELANJA DAERAH	500.305.000,00	307.592.500,00	-192.712.500,00	61,48	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	500.305.000,00	307.592.500,00	-192.712.500,00	61,48	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01		PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.305.000,00	307.592.500,00	-192.712.500,00	61,48	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	139.760.000,00	0,00	-139.760.000,00	0,00	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.760.000,00	0,00	-139.760.000,00	0,00	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.760.000,00	0,00	-139.760.000,00	0,00	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA	360.545.000,00	307.592.500,00	-52.952.500,00	85,31	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	360.545.000,00	307.592.500,00	-52.952.500,00	85,31	
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.545.000,00	307.592.500,00	-52.952.500,00	85,31	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5		BELANJA DAERAH	11.041.774.334,00	10.864.633.848,00	-177.140.486,00	98,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.898.988.334,00	6.769.392.348,00	-129.595.986,00	98,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.251.212.334,00	5.175.855.036,00	-75.357.298,00	98,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.251.212.334,00	5.175.855.036,00	-75.357.298,00	98,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	5.251.212.334,00	5.175.855.036,00	-75.357.298,00	98,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	5.251.212.334,00	5.175.855.036,00	-75.357.298,00	98,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	166.350.000,00	161.225.000,00	-5.125.000,00	96,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	141.350.000,00	138.850.000,00	-2.500.000,00	98,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1		BELANJA OPERASI	141.350.000,00	138.850.000,00	-2.500.000,00	98,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	141.350.000,00	138.850.000,00	-2.500.000,00	98,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25.000.000,00	22.375.000,00	-2.625.000,00	89,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1		BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.375.000,00	-2.625.000,00	89,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.375.000,00	-2.625.000,00	89,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	455.032.000,00	442.708.751,00	-12.323.249,00	97,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	39.991.000,00	39.866.000,00	-125.000,00	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	39.991.000,00	39.866.000,00	-125.000,00	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	39.991.000,00	39.866.000,00	-125.000,00	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.848.000,00	45.192.000,00	-2.656.000,00	94,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	47.848.000,00	45.192.000,00	-2.656.000,00	94,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	47.848.000,00	45.192.000,00	-2.656.000,00	94,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	73.211.000,00	70.794.000,00	-2.417.000,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	73.211.000,00	70.794.000,00	-2.417.000,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	73.211.000,00	70.794.000,00	-2.417.000,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.967.000,00	93.479.000,00	-1.488.000,00	98,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1		BELANJA OPERASI	94.967.000,00	93.479.000,00	-1.488.000,00	98,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	94.967.000,00	93.479.000,00	-1.488.000,00	98,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	39.015.000,00	33.687.100,00	-5.327.900,00	86,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.015.000,00	33.687.100,00	-5.327.900,00	86,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.015.000,00	33.687.100,00	-5.327.900,00	86,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	160.000.000,00	159.690.651,00	-309.349,00	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	159.690.651,00	-309.349,00	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	159.690.651,00	-309.349,00	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	99.457.000,00	99.100.000,00	-357.000,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	99.457.000,00	99.100.000,00	-357.000,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	99.457.000,00	99.100.000,00	-357.000,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.457.000,00	99.100.000,00	-357.000,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.503.000,00	85.116.478,00	-13.386.522,00	86,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	35.303.000,00	31.070.500,00	-4.232.500,00	88,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.303.000,00	31.070.500,00	-4.232.500,00	88,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.303.000,00	31.070.500,00	-4.232.500,00	88,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	63.200.000,00	54.045.978,00	-9.154.022,00	85,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.200.000,00	54.045.978,00	-9.154.022,00	85,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	54.045.978,00	-9.154.022,00	85,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	828.434.000,00	805.387.083,00	-23.046.917,00	97,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	647.514.000,00	626.127.300,00	-21.386.700,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	647.514.000,00	626.127.300,00	-21.386.700,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.514.000,00	626.127.300,00	-21.386.700,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	150.000.000,00	149.664.783,00	-335.217,00	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.664.783,00	-335.217,00	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.664.783,00	-335.217,00	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	30.920.000,00	29.595.000,00	-1.325.000,00	95,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	30.920.000,00	29.595.000,00	-1.325.000,00	95,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.920.000,00	29.595.000,00	-1.325.000,00	95,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.634.780.000,00	3.620.439.500,00	-14.340.500,00	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	207.330.000,00	196.369.500,00	-10.960.500,00	94,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	89.250.000,00	87.909.000,00	-1.341.000,00	98,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.250.000,00	87.909.000,00	-1.341.000,00	98,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	87.909.000,00	-1.341.000,00	98,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	118.080.000,00	108.460.500,00	-9.619.500,00	91,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	118.080.000,00	108.460.500,00	-9.619.500,00	91,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.080.000,00	108.460.500,00	-9.619.500,00	91,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	3.427.450.000,00	3.424.070.000,00	-3.380.000,00	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	3.427.450.000,00	3.424.070.000,00	-3.380.000,00	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.427.450.000,00	3.424.070.000,00	-3.380.000,00	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.427.450.000,00	3.424.070.000,00	-3.380.000,00	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	508.006.000,00	474.802.000,00	-33.204.000,00	93,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	508.006.000,00	474.802.000,00	-33.204.000,00	93,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.496.000,00	81.352.000,00	-144.000,00	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.496.000,00	81.352.000,00	-144.000,00	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.496.000,00	81.352.000,00	-144.000,00	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007		PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	426.510.000,00	393.450.000,00	-33.060.000,00	92,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	426.510.000,00	393.450.000,00	-33.060.000,00	92,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.510.000,00	393.450.000,00	-33.060.000,00	92,24	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	5.458.822.002,00	5.028.602.941,00	-430.219.061,00	92,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.038.963.002,00	3.668.695.291,00	-370.267.711,00	90,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.459.000,00	5.088.000,00	-371.000,00	93,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.159.000,00	1.873.000,00	-286.000,00	86,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.159.000,00	1.873.000,00	-286.000,00	86,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.159.000,00	1.873.000,00	-286.000,00	86,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.300.000,00	3.215.000,00	-85.000,00	97,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.215.000,00	-85.000,00	97,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.215.000,00	-85.000,00	97,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.990.466.502,00	1.770.002.750,00	-220.463.752,00	88,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.988.597.502,00	1.768.339.750,00	-220.257.752,00	88,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.988.597.502,00	1.768.339.750,00	-220.257.752,00	88,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.988.597.502,00	1.768.339.750,00	-220.257.752,00	88,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.869.000,00	1.663.000,00	-206.000,00	88,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.869.000,00	1.663.000,00	-206.000,00	88,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.869.000,00	1.663.000,00	-206.000,00	88,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.838.000,00	1.728.000,00	-110.000,00	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.838.000,00	1.728.000,00	-110.000,00	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.838.000,00	1.728.000,00	-110.000,00	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.000,00	1.728.000,00	-110.000,00	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	76.000.000,00	24.500.000,00	-51.500.000,00	32,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	62.500.000,00	24.500.000,00	-38.000.000,00	39,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.500.000,00	24.500.000,00	-38.000.000,00	39,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	24.500.000,00	-38.000.000,00	39,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	501.042.000,00	491.457.830,00	-9.584.170,00	98,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.994.000,00	19.844.000,00	-150.000,00	99,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.994.000,00	19.844.000,00	-150.000,00	99,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.000,00	19.844.000,00	-150.000,00	99,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.979.000,00	18.268.000,00	-1.711.000,00	91,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.979.000,00	18.268.000,00	-1.711.000,00	91,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.979.000,00	18.268.000,00	-1.711.000,00	91,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	32.536.000,00	30.417.500,00	-2.118.500,00	93,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.536.000,00	30.417.500,00	-2.118.500,00	93,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.536.000,00	30.417.500,00	-2.118.500,00	93,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.995.000,00	29.474.500,00	-520.500,00	98,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.995.000,00	29.474.500,00	-520.500,00	98,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.995.000,00	29.474.500,00	-520.500,00	98,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.538.000,00	20.507.750,00	-3.030.250,00	87,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.538.000,00	20.507.750,00	-3.030.250,00	87,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.538.000,00	20.507.750,00	-3.030.250,00	87,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	375.000.000,00	372.946.080,00	-2.053.920,00	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	372.946.080,00	-2.053.920,00	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	372.946.080,00	-2.053.920,00	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56.391.000,00	33.300.000,00	-23.091.000,00	59,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	56.391.000,00	33.300.000,00	-23.091.000,00	59,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	56.391.000,00	33.300.000,00	-23.091.000,00	59,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.391.000,00	33.300.000,00	-23.091.000,00	59,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.107.166.500,00	1.060.230.111,00	-46.936.389,00	95,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	58.629.000,00	34.111.500,00	-24.517.500,00	58,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.629.000,00	34.111.500,00	-24.517.500,00	58,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.629.000,00	34.111.500,00	-24.517.500,00	58,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.020.000,00	84.010.111,00	-1.009.889,00	98,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.020.000,00	84.010.111,00	-1.009.889,00	98,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.020.000,00	84.010.111,00	-1.009.889,00	98,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	963.517.500,00	942.108.500,00	-21.409.000,00	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	963.517.500,00	942.108.500,00	-21.409.000,00	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	963.517.500,00	942.108.500,00	-21.409.000,00	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	300.600.000,00	282.388.600,00	-18.211.400,00	93,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	224.650.000,00	209.120.600,00	-15.529.400,00	93,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	224.650.000,00	209.120.600,00	-15.529.400,00	93,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.650.000,00	209.120.600,00	-15.529.400,00	93,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	75.950.000,00	73.268.000,00	-2.682.000,00	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	75.950.000,00	73.268.000,00	-2.682.000,00	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.950.000,00	73.268.000,00	-2.682.000,00	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.419.859.000,00	1.359.907.650,00	-59.951.350,00	95,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	38.250.000,00	37.560.000,00	-690.000,00	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	38.250.000,00	37.560.000,00	-690.000,00	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.250.000,00	37.560.000,00	-690.000,00	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	37.560.000,00	-690.000,00	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.180.301.000,00	1.131.264.650,00	-49.036.350,00	95,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0008		PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	79.480.000,00	67.920.000,00	-11.560.000,00	85,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	79.480.000,00	67.920.000,00	-11.560.000,00	85,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.480.000,00	67.920.000,00	-11.560.000,00	85,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	28.020.000,00	27.320.000,00	-700.000,00	97,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	28.020.000,00	27.320.000,00	-700.000,00	97,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.020.000,00	27.320.000,00	-700.000,00	97,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	200.797.000,00	182.780.000,00	-18.017.000,00	91,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	20.160.000,00	15.750.000,00	-4.410.000,00	78,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	15.750.000,00	-4.410.000,00	78,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	180.637.000,00	167.030.000,00	-13.607.000,00	92,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.637.000,00	167.030.000,00	-13.607.000,00	92,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	862.139.000,00	843.379.650,00	-18.759.350,00	97,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	801.750.000,00	783.604.650,00	-18.145.350,00	97,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.750.000,00	783.604.650,00	-18.145.350,00	97,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	60.389.000,00	59.775.000,00	-614.000,00	98,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.389.000,00	59.775.000,00	-614.000,00	98,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	201.308.000,00	191.083.000,00	-10.225.000,00	94,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	159.311.000,00	157.700.000,00	-1.611.000,00	98,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.400.000,00	28.300.000,00	-100.000,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	28.300.000,00	-100.000,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	130.911.000,00	129.400.000,00	-1.511.000,00	98,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.911.000,00	129.400.000,00	-1.511.000,00	98,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	41.997.000,00	33.383.000,00	-8.614.000,00	79,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	41.997.000,00	33.383.000,00	-8.614.000,00	79,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.997.000,00	33.383.000,00	-8.614.000,00	79,48	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000		5		BELANJA DAERAH	7.190.591.850,00	6.531.099.795,00	-659.492.055,00	90,82	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.6.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.804.147.850,00	4.341.572.922,00	-462.574.928,00	90,37	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.092.741.580,00	1.985.750.401,00	-106.991.179,00	94,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.092.741.580,00	1.985.750.401,00	-106.991.179,00	94,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.092.741.580,00	1.985.750.401,00	-106.991.179,00	94,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.092.741.580,00	1.985.750.401,00	-106.991.179,00	94,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.000.000,00	7.500.000,00	-25.500.000,00	22,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.000.000,00	7.500.000,00	-25.500.000,00	22,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1		BELANJA OPERASI	33.000.000,00	7.500.000,00	-25.500.000,00	22,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	7.500.000,00	-25.500.000,00	22,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	516.771.500,00	465.299.460,00	-51.472.040,00	90,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	37.695.000,00	32.169.000,00	-5.526.000,00	85,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	37.695.000,00	32.169.000,00	-5.526.000,00	85,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	37.695.000,00	32.169.000,00	-5.526.000,00	85,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	62.512.000,00	50.305.000,00	-12.207.000,00	80,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	62.512.000,00	50.305.000,00	-12.207.000,00	80,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	62.512.000,00	50.305.000,00	-12.207.000,00	80,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.508.000,00	2.230.000,00	-278.000,00	88,91	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	2.508.000,00	2.230.000,00	-278.000,00	88,91	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.508.000,00	2.230.000,00	-278.000,00	88,91	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0004			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66.933.000,00	56.056.000,00	-10.877.000,00	83,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1		BELANJA OPERASI	66.933.000,00	56.056.000,00	-10.877.000,00	83,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	66.933.000,00	56.056.000,00	-10.877.000,00	83,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	44.523.500,00	26.511.900,00	-18.011.600,00	59,54	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	44.523.500,00	26.511.900,00	-18.011.600,00	59,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.523.500,00	26.511.900,00	-18.011.600,00	59,54	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	19.200.000,00	15.696.000,00	-3.504.000,00	81,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	15.696.000,00	-3.504.000,00	81,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	15.696.000,00	-3.504.000,00	81,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	275.000.000,00	274.391.560,00	-608.440,00	99,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	274.391.560,00	-608.440,00	99,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	274.391.560,00	-608.440,00	99,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	8.400.000,00	7.940.000,00	-460.000,00	94,52	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	7.940.000,00	-460.000,00	94,52	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.940.000,00	-460.000,00	94,52	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	334.952.500,00	324.575.000,00	-10.377.500,00	96,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	12.151.000,00	12.000.000,00	-151.000,00	98,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.151.000,00	12.000.000,00	-151.000,00	98,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.151.000,00	12.000.000,00	-151.000,00	98,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	187.919.000,00	186.875.000,00	-1.044.000,00	99,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	187.919.000,00	186.875.000,00	-1.044.000,00	99,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.919.000,00	186.875.000,00	-1.044.000,00	99,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	134.882.500,00	125.700.000,00	-9.182.500,00	93,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	134.882.500,00	125.700.000,00	-9.182.500,00	93,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.882.500,00	125.700.000,00	-9.182.500,00	93,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.498.639.270,00	1.267.743.061,00	-230.896.209,00	84,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	110.251.000,00	98.206.500,00	-12.044.500,00	89,07	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.251.000,00	98.206.500,00	-12.044.500,00	89,07	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.251.000,00	98.206.500,00	-12.044.500,00	89,07	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	133.680.000,00	76.529.061,00	-57.150.939,00	57,24	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.680.000,00	76.529.061,00	-57.150.939,00	57,24	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.680.000,00	76.529.061,00	-57.150.939,00	57,24	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.254.708.270,00	1.093.007.500,00	-161.700.770,00	87,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.254.708.270,00	1.093.007.500,00	-161.700.770,00	87,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.254.708.270,00	1.093.007.500,00	-161.700.770,00	87,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	328.043.000,00	290.705.000,00	-37.338.000,00	88,61	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.550.000,00	37.560.500,00	-1.989.500,00	94,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.550.000,00	37.560.500,00	-1.989.500,00	94,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	37.560.500,00	-1.989.500,00	94,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.380.000,00	106.237.500,00	-29.142.500,00	78,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.380.000,00	106.237.500,00	-29.142.500,00	78,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.380.000,00	106.237.500,00	-29.142.500,00	78,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.490.000,00	6.470.000,00	-3.020.000,00	68,17	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.490.000,00	6.470.000,00	-3.020.000,00	68,17	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.490.000,00	6.470.000,00	-3.020.000,00	68,17	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.320.000,00	4.730.000,00	-2.590.000,00	64,61	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.320.000,00	4.730.000,00	-2.590.000,00	64,61	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	4.730.000,00	-2.590.000,00	64,61	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	136.303.000,00	135.707.000,00	-596.000,00	99,56	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.163.000,00	-437.000,00	96,78	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.163.000,00	-437.000,00	96,78	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	122.703.000,00	122.544.000,00	-159.000,00	99,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.703.000,00	122.544.000,00	-159.000,00	99,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.6.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	975.925.000,00	927.809.300,00	-48.115.700,00	95,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.02		PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.579.000,00	18.048.100,00	-6.530.900,00	73,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	24.579.000,00	18.048.100,00	-6.530.900,00	73,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.579.000,00	18.048.100,00	-6.530.900,00	73,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.579.000,00	18.048.100,00	-6.530.900,00	73,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	951.346.000,00	909.761.200,00	-41.584.800,00	95,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	869.160.000,00	828.478.200,00	-40.681.800,00	95,31	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	869.160.000,00	828.478.200,00	-40.681.800,00	95,31	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.160.000,00	828.478.200,00	-40.681.800,00	95,31	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	58.770.000,00	58.118.000,00	-652.000,00	98,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.770.000,00	58.118.000,00	-652.000,00	98,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.770.000,00	58.118.000,00	-652.000,00	98,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	23.416.000,00	23.165.000,00	-251.000,00	98,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.416.000,00	23.165.000,00	-251.000,00	98,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.416.000,00	23.165.000,00	-251.000,00	98,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	276.081.000,00	224.682.173,00	-51.398.827,00	81,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	225.552.000,00	214.194.000,00	-11.358.000,00	94,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKINAN	72.090.000,00	67.725.000,00	-4.365.000,00	93,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.090.000,00	67.725.000,00	-4.365.000,00	93,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.090.000,00	67.725.000,00	-4.365.000,00	93,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	58.327.000,00	53.940.000,00	-4.387.000,00	92,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.327.000,00	53.940.000,00	-4.387.000,00	92,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.327.000,00	53.940.000,00	-4.387.000,00	92,47	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	55.222.000,00	54.755.000,00	-467.000,00	99,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.222.000,00	54.755.000,00	-467.000,00	99,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.222.000,00	54.755.000,00	-467.000,00	99,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	39.913.000,00	37.774.000,00	-2.139.000,00	94,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.913.000,00	37.774.000,00	-2.139.000,00	94,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.913.000,00	37.774.000,00	-2.139.000,00	94,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	50.529.000,00	10.488.173,00	-40.040.827,00	20,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0002		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	10.395.000,00	0,00	-10.395.000,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.395.000,00	0,00	-10.395.000,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.395.000,00	0,00	-10.395.000,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0012		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	20.000.000,00	3.400.220,00	-16.599.780,00	17,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	3.400.220,00	-16.599.780,00	17,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	3.400.220,00	-16.599.780,00	17,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0013		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	20.134.000,00	7.087.953,00	-13.046.047,00	35,20	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	20.134.000,00	7.087.953,00	-13.046.047,00	35,20	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.134.000,00	7.087.953,00	-13.046.047,00	35,20	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	295.460.000,00	282.175.000,00	-13.285.000,00	95,50	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.01		PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	26.960.000,00	24.750.000,00	-2.210.000,00	91,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.01.0003		PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	26.960.000,00	24.750.000,00	-2.210.000,00	91,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.960.000,00	24.750.000,00	-2.210.000,00	91,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.960.000,00	24.750.000,00	-2.210.000,00	91,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	268.500.000,00	257.425.000,00	-11.075.000,00	95,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.500.000,00	68.425.000,00	-8.075.000,00	89,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.500.000,00	68.425.000,00	-8.075.000,00	89,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	68.425.000,00	-8.075.000,00	89,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	192.000.000,00	189.000.000,00	-3.000.000,00	98,43	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	192.000.000,00	189.000.000,00	-3.000.000,00	98,43	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	192.000.000,00	189.000.000,00	-3.000.000,00	98,43	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	795.194.000,00	712.117.000,00	-83.077.000,00	89,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	94.230.000,00	93.671.000,00	-559.000,00	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	94.230.000,00	93.671.000,00	-559.000,00	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.230.000,00	93.671.000,00	-559.000,00	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.230.000,00	93.671.000,00	-559.000,00	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	700.964.000,00	618.446.000,00	-82.518.000,00	88,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	700.964.000,00	618.446.000,00	-82.518.000,00	88,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.964.000,00	618.446.000,00	-82.518.000,00	88,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.964.000,00	618.446.000,00	-82.518.000,00	88,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.6.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	43.784.000,00	42.743.400,00	-1.040.600,00	97,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	43.784.000,00	42.743.400,00	-1.040.600,00	97,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001		REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	43.784.000,00	42.743.400,00	-1.040.600,00	97,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.784.000,00	42.743.400,00	-1.040.600,00	97,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.784.000,00	42.743.400,00	-1.040.600,00	97,62	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	790.313.000,00	606.829.900,00	-183.483.100,00	76,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.8.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.037.000,00	34.995.000,00	-2.042.000,00	94,48	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	37.037.000,00	34.995.000,00	-2.042.000,00	94,48	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02.2.01.0003		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	37.037.000,00	34.995.000,00	-2.042.000,00	94,48	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.037.000,00	34.995.000,00	-2.042.000,00	94,48	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.037.000,00	34.995.000,00	-2.042.000,00	94,48	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	265.878.000,00	185.998.000,00	-79.880.000,00	69,95	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.104.000,00	95.746.000,00	-358.000,00	99,62	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.104.000,00	95.746.000,00	-358.000,00	99,62	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.104.000,00	95.746.000,00	-358.000,00	99,62	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.104.000,00	95.746.000,00	-358.000,00	99,62	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	169.774.000,00	90.252.000,00	-79.522.000,00	53,16	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	169.774.000,00	90.252.000,00	-79.522.000,00	53,16	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.774.000,00	90.252.000,00	-79.522.000,00	53,16	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.774.000,00	90.252.000,00	-79.522.000,00	53,16	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.8.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.041.000,00	52.816.000,00	-225.000,00	99,57	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04.2.03		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.041.000,00	52.816.000,00	-225.000,00	99,57	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04.2.03.0001		PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.041.000,00	52.816.000,00	-225.000,00	99,57	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.041.000,00	52.816.000,00	-225.000,00	99,57	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.041.000,00	52.816.000,00	-225.000,00	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.8.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000,00	99.007.600,00	-45.155.400,00	68,67	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	144.163.000,00	99.007.600,00	-45.155.400,00	68,67	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	144.163.000,00	99.007.600,00	-45.155.400,00	68,67	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	144.163.000,00	99.007.600,00	-45.155.400,00	68,67	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.163.000,00	99.007.600,00	-45.155.400,00	68,67	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	290.194.000,00	234.013.300,00	-56.180.700,00	80,64	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.968.000,00	69.532.000,00	-436.000,00	99,37	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	69.968.000,00	69.532.000,00	-436.000,00	99,37	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.968.000,00	69.532.000,00	-436.000,00	99,37	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.968.000,00	69.532.000,00	-436.000,00	99,37	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.826.000,00	95.480.500,00	-36.345.500,00	72,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.02.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	131.826.000,00	95.480.500,00	-36.345.500,00	72,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	131.826.000,00	95.480.500,00	-36.345.500,00	72,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.826.000,00	95.480.500,00	-36.345.500,00	72,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.400.000,00	69.000.800,00	-19.399.200,00	78,05	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	88.400.000,00	69.000.800,00	-19.399.200,00	78,05	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	69.000.800,00	-19.399.200,00	78,05	
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	69.000.800,00	-19.399.200,00	78,05	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.2.17.0.00.06.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	101.029.412,00	125.185.840,00	24.156.428,00	123,91	
	2.07.2.17.0.00.06.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.029.412,00	125.185.840,00	24.156.428,00	123,91	
	2.07.2.17.0.00.06.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	101.029.412,00	125.185.840,00	24.156.428,00	123,91	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	7.724.205.900,00	6.926.864.882,00	-797.341.018,00	89,67	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.7.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.823.487.400,00	6.125.226.109,00	-698.261.291,00	89,76	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.455.000,00	7.715.000,00	-740.000,00	91,24	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.455.000,00	7.715.000,00	-740.000,00	91,24	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.455.000,00	7.715.000,00	-740.000,00	91,24	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.455.000,00	7.715.000,00	-740.000,00	91,24	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.575.644.982,00	4.059.307.665,00	-516.337.317,00	88,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.575.644.982,00	4.059.307.665,00	-516.337.317,00	88,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.575.644.982,00	4.059.307.665,00	-516.337.317,00	88,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.575.644.982,00	4.059.307.665,00	-516.337.317,00	88,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37.800.000,00	32.215.000,00	-5.585.000,00	85,22	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	26.800.000,00	26.465.000,00	-335.000,00	98,75	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.800.000,00	26.465.000,00	-335.000,00	98,75	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	26.465.000,00	-335.000,00	98,75	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	11.000.000,00	5.750.000,00	-5.250.000,00	52,27	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	5.750.000,00	-5.250.000,00	52,27	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	5.750.000,00	-5.250.000,00	52,27	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	642.503.000,00	615.314.265,00	-27.188.735,00	95,76	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	18.625.000,00	-1.375.000,00	93,12	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.625.000,00	-1.375.000,00	93,12	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.625.000,00	-1.375.000,00	93,12	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	62.503.000,00	48.806.500,00	-13.696.500,00	78,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.503.000,00	48.806.500,00	-13.696.500,00	78,08	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.503.000,00	48.806.500,00	-13.696.500,00	78,08	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	35.000.000,00	32.135.000,00	-2.865.000,00	91,81	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.135.000,00	-2.865.000,00	91,81	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.135.000,00	-2.865.000,00	91,81	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	45.000.000,00	41.853.000,00	-3.147.000,00	93,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	41.853.000,00	-3.147.000,00	93,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	41.853.000,00	-3.147.000,00	93,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	35.907.600,00	-4.092.400,00	89,76	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	35.907.600,00	-4.092.400,00	89,76	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	35.907.600,00	-4.092.400,00	89,76	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	40.000.000,00	39.099.000,00	-901.000,00	97,74	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.099.000,00	-901.000,00	97,74	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.099.000,00	-901.000,00	97,74	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	400.000.000,00	398.888.165,00	-1.111.835,00	99,72	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.888.165,00	-1.111.835,00	99,72	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	398.888.165,00	-1.111.835,00	99,72	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	329.533.000,00	323.500.000,00	-6.033.000,00	98,16	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	38.215.000,00	37.787.000,00	-428.000,00	98,88	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	38.215.000,00	37.787.000,00	-428.000,00	98,88	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.215.000,00	37.787.000,00	-428.000,00	98,88	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	52.720.000,00	51.413.000,00	-1.307.000,00	97,52	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	52.720.000,00	51.413.000,00	-1.307.000,00	97,52	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.720.000,00	51.413.000,00	-1.307.000,00	97,52	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	238.598.000,00	234.300.000,00	-4.298.000,00	98,19	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	238.598.000,00	234.300.000,00	-4.298.000,00	98,19	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.598.000,00	234.300.000,00	-4.298.000,00	98,19	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	836.403.964,00	731.510.467,00	-104.893.497,00	87,45	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	320.984.448,00	300.577.500,00	-20.406.948,00	93,64	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	320.984.448,00	300.577.500,00	-20.406.948,00	93,64	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.984.448,00	300.577.500,00	-20.406.948,00	93,64	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	113.768.000,00	93.010.967,00	-20.757.033,00	81,75	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.768.000,00	93.010.967,00	-20.757.033,00	81,75	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.768.000,00	93.010.967,00	-20.757.033,00	81,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	401.651.516,00	337.922.000,00	-63.729.516,00	84,13	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	401.651.516,00	337.922.000,00	-63.729.516,00	84,13	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.651.516,00	337.922.000,00	-63.729.516,00	84,13	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	393.147.454,00	355.663.712,00	-37.483.742,00	90,46	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	259.387.454,00	227.945.712,00	-31.441.742,00	87,87	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	259.387.454,00	227.945.712,00	-31.441.742,00	87,87	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.387.454,00	227.945.712,00	-31.441.742,00	87,87	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	125.800.000,00	121.264.000,00	-4.536.000,00	96,39	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.800.000,00	121.264.000,00	-4.536.000,00	96,39	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.800.000,00	121.264.000,00	-4.536.000,00	96,39	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.960.000,00	6.454.000,00	-1.506.000,00	81,08	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.960.000,00	6.454.000,00	-1.506.000,00	81,08	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	6.454.000,00	-1.506.000,00	81,08	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.7.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	33.000.000,00	30.783.800,00	-2.216.200,00	93,28	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02.2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	33.000.000,00	30.783.800,00	-2.216.200,00	93,28	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO	33.000.000,00	30.783.800,00	-2.216.200,00	93,28	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	30.783.800,00	-2.216.200,00	93,28	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	30.783.800,00	-2.216.200,00	93,28	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	622.217.500,00	552.050.637,00	-70.166.863,00	88,72	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	622.217.500,00	552.050.637,00	-70.166.863,00	88,72	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	403.160.000,00	378.569.000,00	-24.591.000,00	93,90	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	403.160.000,00	378.569.000,00	-24.591.000,00	93,90	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.160.000,00	378.569.000,00	-24.591.000,00	93,90	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0002		KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA	219.057.500,00	173.481.637,00	-45.575.863,00	79,19	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	219.057.500,00	173.481.637,00	-45.575.863,00	79,19	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.057.500,00	173.481.637,00	-45.575.863,00	79,19	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.7.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	55.885.000,00	49.520.680,00	-6.364.320,00	88,61	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	55.885.000,00	49.520.680,00	-6.364.320,00	88,61	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04.2.03.0003		JOB FAIR/BURSA KERJA	55.885.000,00	49.520.680,00	-6.364.320,00	88,61	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.885.000,00	49.520.680,00	-6.364.320,00	88,61	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.885.000,00	49.520.680,00	-6.364.320,00	88,61	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000,00	169.283.656,00	-20.332.344,00	89,27	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.092.000,00	21.848.000,00	-4.244.000,00	83,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0001		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	11.456.000,00	10.850.000,00	-606.000,00	94,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.456.000,00	10.850.000,00	-606.000,00	94,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.456.000,00	10.850.000,00	-606.000,00	94,71	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	14.636.000,00	10.998.000,00	-3.638.000,00	75,14	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.636.000,00	10.998.000,00	-3.638.000,00	75,14	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.636.000,00	10.998.000,00	-3.638.000,00	75,14	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.524.000,00	147.435.656,00	-16.088.344,00	90,16	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.862.000,00	53.604.600,00	-2.257.400,00	95,95	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.862.000,00	53.604.600,00	-2.257.400,00	95,95	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.862.000,00	53.604.600,00	-2.257.400,00	95,95	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0002		PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	27.024.456,00	-7.975.544,00	77,21	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	27.024.456,00	-7.975.544,00	77,21	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	27.024.456,00	-7.975.544,00	77,21	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0003		PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	11.138.000,00	7.171.600,00	-3.966.400,00	64,38	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.138.000,00	7.171.600,00	-3.966.400,00	64,38	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.138.000,00	7.171.600,00	-3.966.400,00	64,38	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0004		PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.524.000,00	59.635.000,00	-1.889.000,00	96,92	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.524.000,00	59.635.000,00	-1.889.000,00	96,92	
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.524.000,00	59.635.000,00	-1.889.000,00	96,92	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	71.445.000,00	34.918.400,00	-36.526.600,00	48,87	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	71.445.000,00	34.918.400,00	-36.526.600,00	48,87	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.445.000,00	34.918.400,00	-36.526.600,00	48,87	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.445.000,00	34.918.400,00	-36.526.600,00	48,87	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.445.000,00	34.918.400,00	-36.526.600,00	48,87	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	158.909.000,00	106.431.443,00	-52.477.557,00	66,97	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.909.000,00	106.431.443,00	-52.477.557,00	66,97	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	158.909.000,00	106.431.443,00	-52.477.557,00	66,97	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	158.909.000,00	106.431.443,00	-52.477.557,00	66,97	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.909.000,00	106.431.443,00	-52.477.557,00	66,97	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	274.245.000,00	215.827.336,00	-58.417.664,00	78,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	274.245.000,00	215.827.336,00	-58.417.664,00	78,69	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	33.000.000,00	30.068.580,00	-2.931.420,00	91,11	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	30.068.580,00	-2.931.420,00	91,11	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	30.068.580,00	-2.931.420,00	91,11	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	241.245.000,00	185.758.756,00	-55.486.244,00	77,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	241.245.000,00	185.758.756,00	-55.486.244,00	77,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.245.000,00	185.758.756,00	-55.486.244,00	77,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	594.583.840,00	486.079.938,00	-108.503.902,00	81,75	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	594.583.840,00	486.079.938,00	-108.503.902,00	81,75	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01.0006		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	594.583.840,00	486.079.938,00	-108.503.902,00	81,75	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	494.583.840,00	386.440.438,00	-108.143.402,00	78,13	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.583.840,00	386.440.438,00	-108.143.402,00	78,13	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.639.500,00	-360.500,00	99,63	
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.639.500,00	-360.500,00	99,63	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	9.600.000,00	5.400.000,00	-4.200.000,00	56,25	
	2.09.3.27.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.600.000,00	5.400.000,00	-4.200.000,00	56,25	
	2.09.3.27.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	9.600.000,00	5.400.000,00	-4.200.000,00	56,25	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	313.792.892,00	293.766.842,00	-20.026.050,00	93,61	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	193.792.892,00	190.506.692,00	-3.286.200,00	98,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	58.231.000,00	56.964.300,00	-1.266.700,00	97,82	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0006		PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA	29.500.000,00	28.533.200,00	-966.800,00	96,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.500.000,00	28.533.200,00	-966.800,00	96,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	28.533.200,00	-966.800,00	96,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	18.731.000,00	18.680.000,00	-51.000,00	99,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	18.731.000,00	18.680.000,00	-51.000,00	99,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.731.000,00	18.680.000,00	-51.000,00	99,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0016		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	10.000.000,00	9.751.100,00	-248.900,00	97,51	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.751.100,00	-248.900,00	97,51	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.751.100,00	-248.900,00	97,51	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	51.409.392,00	50.868.392,00	-541.000,00	98,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	51.409.392,00	50.868.392,00	-541.000,00	98,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.409.392,00	50.868.392,00	-541.000,00	98,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.409.392,00	50.868.392,00	-541.000,00	98,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	84.152.500,00	82.674.000,00	-1.478.500,00	98,24	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	10.000.000,00	9.877.500,00	-122.500,00	98,77	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.877.500,00	-122.500,00	98,77	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.877.500,00	-122.500,00	98,77	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	74.152.500,00	72.796.500,00	-1.356.000,00	98,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.152.500,00	72.796.500,00	-1.356.000,00	98,17	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.152.500,00	72.796.500,00	-1.356.000,00	98,17	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.9.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000,00	19.545.000,00	-455.000,00	97,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	10.000.000,00	9.676.500,00	-323.500,00	96,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	10.000.000,00	9.676.500,00	-323.500,00	96,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.676.500,00	-323.500,00	96,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.676.500,00	-323.500,00	96,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	9.868.500,00	-131.500,00	98,68	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	9.868.500,00	-131.500,00	98,68	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.868.500,00	-131.500,00	98,68	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.868.500,00	-131.500,00	98,68	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.9.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	83.715.150,00	-16.284.850,00	83,71	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	83.715.150,00	-16.284.850,00	83,71	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	83.715.150,00	-16.284.850,00	83,71	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.715.150,00	-16.284.850,00	83,71	
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	83.715.150,00	-16.284.850,00	83,71	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.047.200.732,00	10.521.712.296,00	-525.488.436,00	95,24	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.955.000,00	18.270.700,00	-1.684.300,00	91,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.955.000,00	18.270.700,00	-1.684.300,00	91,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.955.000,00	18.270.700,00	-1.684.300,00	91,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.955.000,00	18.270.700,00	-1.684.300,00	91,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.014.452.568,00	8.755.899.616,00	-258.552.952,00	97,13	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.014.452.568,00	8.755.899.616,00	-258.552.952,00	97,13	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.014.452.568,00	8.755.899.616,00	-258.552.952,00	97,13	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.014.452.568,00	8.755.899.616,00	-258.552.952,00	97,13	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	107.100.000,00	78.147.000,00	-28.953.000,00	72,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	54.600.000,00	54.522.000,00	-78.000,00	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.600.000,00	54.522.000,00	-78.000,00	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	54.522.000,00	-78.000,00	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	52.500.000,00	23.625.000,00	-28.875.000,00	45,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000,00	23.625.000,00	-28.875.000,00	45,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	23.625.000,00	-28.875.000,00	45,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	644.267.000,00	504.809.924,00	-139.457.076,00	78,35	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.018.000,00	15.212.500,00	-805.500,00	94,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.018.000,00	15.212.500,00	-805.500,00	94,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.018.000,00	15.212.500,00	-805.500,00	94,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.171.000,00	59.589.000,00	-11.582.000,00	83,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.171.000,00	59.589.000,00	-11.582.000,00	83,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.171.000,00	59.589.000,00	-11.582.000,00	83,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	53.185.000,00	45.029.500,00	-8.155.500,00	84,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.185.000,00	45.029.500,00	-8.155.500,00	84,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.185.000,00	45.029.500,00	-8.155.500,00	84,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	56.114.000,00	51.162.600,00	-4.951.400,00	91,17	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.114.000,00	51.162.600,00	-4.951.400,00	91,17	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.114.000,00	51.162.600,00	-4.951.400,00	91,17	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	39.447.000,00	32.037.250,00	-7.409.750,00	81,21	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.447.000,00	32.037.250,00	-7.409.750,00	81,21	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.447.000,00	32.037.250,00	-7.409.750,00	81,21	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.760.000,00	2.880.000,00	-2.880.000,00	50,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	2.880.000,00	-2.880.000,00	50,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	2.880.000,00	-2.880.000,00	50,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	2.572.000,00	2.280.000,00	-292.000,00	88,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.572.000,00	2.280.000,00	-292.000,00	88,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.572.000,00	2.280.000,00	-292.000,00	88,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	400.000.000,00	296.619.074,00	-103.380.926,00	74,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	296.619.074,00	-103.380.926,00	74,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	296.619.074,00	-103.380.926,00	74,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	65.497.000,00	60.440.000,00	-5.057.000,00	92,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	59.873.000,00	54.885.000,00	-4.988.000,00	91,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	59.873.000,00	54.885.000,00	-4.988.000,00	91,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.873.000,00	54.885.000,00	-4.988.000,00	91,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.624.000,00	5.555.000,00	-69.000,00	98,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	5.624.000,00	5.555.000,00	-69.000,00	98,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.624.000,00	5.555.000,00	-69.000,00	98,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	796.921.164,00	784.195.061,00	-12.726.103,00	98,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.200.000,00	3.630.000,00	-570.000,00	86,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	3.630.000,00	-570.000,00	86,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.630.000,00	-570.000,00	86,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	140.760.000,00	134.889.561,00	-5.870.439,00	95,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.760.000,00	134.889.561,00	-5.870.439,00	95,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.760.000,00	134.889.561,00	-5.870.439,00	95,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	4.158.000,00	-842.000,00	83,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.158.000,00	-842.000,00	83,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.158.000,00	-842.000,00	83,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	646.961.164,00	641.517.500,00	-5.443.664,00	99,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	646.961.164,00	641.517.500,00	-5.443.664,00	99,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.961.164,00	641.517.500,00	-5.443.664,00	99,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	399.008.000,00	319.949.995,00	-79.058.005,00	80,18	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	35.061.995,00	-5.188.005,00	87,11	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	35.061.995,00	-5.188.005,00	87,11	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	35.061.995,00	-5.188.005,00	87,11	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	242.230.000,00	185.646.800,00	-56.583.200,00	76,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	242.230.000,00	185.646.800,00	-56.583.200,00	76,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.230.000,00	185.646.800,00	-56.583.200,00	76,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	56.128.000,00	55.979.300,00	-148.700,00	99,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.128.000,00	53.979.300,00	-148.700,00	99,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.128.000,00	53.979.300,00	-148.700,00	99,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	43.360.000,00	33.161.900,00	-10.198.100,00	76,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	43.360.000,00	33.161.900,00	-10.198.100,00	76,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.360.000,00	33.161.900,00	-10.198.100,00	76,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	17.040.000,00	10.100.000,00	-6.940.000,00	59,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	17.040.000,00	10.100.000,00	-6.940.000,00	59,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	10.100.000,00	-6.940.000,00	59,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.655.619.300,00	1.392.503.790,00	-263.115.510,00	84,10	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.383.119.300,00	1.180.203.790,00	-202.915.510,00	85,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	1.383.119.300,00	1.180.203.790,00	-202.915.510,00	85,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.383.119.300,00	1.180.203.790,00	-202.915.510,00	85,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.383.119.300,00	1.180.203.790,00	-202.915.510,00	85,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	272.500.000,00	212.300.000,00	-60.200.000,00	77,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	272.500.000,00	212.300.000,00	-60.200.000,00	77,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	272.500.000,00	212.300.000,00	-60.200.000,00	77,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.500.000,00	212.300.000,00	-60.200.000,00	77,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0008		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	204.758.000,00	181.515.774,00	-23.242.226,00	88,64	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	186.585.000,00	165.446.936,00	-21.138.064,00	88,67	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	186.585.000,00	165.446.936,00	-21.138.064,00	88,67	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	186.585.000,00	165.446.936,00	-21.138.064,00	88,67	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.585.000,00	165.446.936,00	-21.138.064,00	88,67	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	18.173.000,00	16.068.838,00	-2.104.162,00	88,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.04.0010		PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	18.173.000,00	16.068.838,00	-2.104.162,00	88,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	18.173.000,00	16.068.838,00	-2.104.162,00	88,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.173.000,00	16.068.838,00	-2.104.162,00	88,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.994.000,00	91.617.600,00	-8.376.400,00	91,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	99.994.000,00	91.617.600,00	-8.376.400,00	91,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	99.994.000,00	91.617.600,00	-8.376.400,00	91,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.994.000,00	91.617.600,00	-8.376.400,00	91,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.994.000,00	91.617.600,00	-8.376.400,00	91,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	648.876.000,00	513.099.233,00	-135.776.767,00	79,07	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	648.876.000,00	513.099.233,00	-135.776.767,00	79,07	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06.2.01.0005		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN	648.876.000,00	513.099.233,00	-135.776.767,00	79,07	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	648.876.000,00	513.099.233,00	-135.776.767,00	79,07	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.876.000,00	513.099.233,00	-135.776.767,00	79,07	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	924.510.000,00	715.543.564,00	-208.966.436,00	77,39	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	924.510.000,00	715.543.564,00	-208.966.436,00	77,39	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	148.043.000,00	118.867.000,00	-29.176.000,00	80,29	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	148.043.000,00	118.867.000,00	-29.176.000,00	80,29	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.043.000,00	118.867.000,00	-29.176.000,00	80,29	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	515.911.000,00	375.531.564,00	-140.379.436,00	72,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	515.911.000,00	375.531.564,00	-140.379.436,00	72,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.911.000,00	375.531.564,00	-140.379.436,00	72,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	142.685.000,00	120.706.000,00	-21.979.000,00	84,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	142.685.000,00	120.706.000,00	-21.979.000,00	84,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.685.000,00	120.706.000,00	-21.979.000,00	84,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	97.885.000,00	85.649.000,00	-12.236.000,00	87,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	97.885.000,00	85.649.000,00	-12.236.000,00	87,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.885.000,00	85.649.000,00	-12.236.000,00	87,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0008		PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI	19.986.000,00	14.790.000,00	-5.196.000,00	74,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.986.000,00	14.790.000,00	-5.196.000,00	74,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.986.000,00	14.790.000,00	-5.196.000,00	74,00	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	830.000.000,00	707.033.000,00	-122.967.000,00	85,18	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	830.000.000,00	707.033.000,00	-122.967.000,00	85,18	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	830.000.000,00	707.033.000,00	-122.967.000,00	85,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.712.402.004,00	11.868.556.105,00	-1.843.845.899,00	86,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.630.720.210,00	5.161.180.572,00	-469.539.638,00	91,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.071.938.848,00	3.817.171.761,00	-254.767.087,00	93,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.071.938.848,00	3.817.171.761,00	-254.767.087,00	93,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.071.938.848,00	3.817.171.761,00	-254.767.087,00	93,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.049.378.848,00	3.802.051.761,00	-247.327.087,00	93,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.560.000,00	15.120.000,00	-7.440.000,00	67,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	39.700.000,00	13.500.000,00	-26.200.000,00	34,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39.700.000,00	13.500.000,00	-26.200.000,00	34,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	39.700.000,00	13.500.000,00	-26.200.000,00	34,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.700.000,00	13.500.000,00	-26.200.000,00	34,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	399.991.000,00	364.287.800,00	-35.703.200,00	91,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.971.000,00	3.683.000,00	-288.000,00	92,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.971.000,00	3.683.000,00	-288.000,00	92,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.971.000,00	3.683.000,00	-288.000,00	92,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.673.000,00	38.715.500,00	-957.500,00	97,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.673.000,00	38.715.500,00	-957.500,00	97,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.673.000,00	38.715.500,00	-957.500,00	97,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	9.048.000,00	-952.000,00	90,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.048.000,00	-952.000,00	90,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.048.000,00	-952.000,00	90,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.350.000,00	28.236.500,00	-5.113.500,00	84,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.350.000,00	28.236.500,00	-5.113.500,00	84,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.350.000,00	28.236.500,00	-5.113.500,00	84,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.997.000,00	4.210.800,00	-8.786.200,00	32,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.997.000,00	4.210.800,00	-8.786.200,00	32,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.997.000,00	4.210.800,00	-8.786.200,00	32,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	300.000.000,00	280.394.000,00	-19.606.000,00	93,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	280.394.000,00	-19.606.000,00	93,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	280.394.000,00	-19.606.000,00	93,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	172.803.000,00	170.145.000,00	-2.658.000,00	98,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	172.803.000,00	170.145.000,00	-2.658.000,00	98,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	172.803.000,00	170.145.000,00	-2.658.000,00	98,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.803.000,00	170.145.000,00	-2.658.000,00	98,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	722.447.362,00	632.465.411,00	-89.981.951,00	87,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	33,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	33,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	33,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.000.000,00	125.715.411,00	-9.284.589,00	93,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	125.715.411,00	-9.284.589,00	93,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	125.715.411,00	-9.284.589,00	93,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	581.447.362,00	504.750.000,00	-76.697.362,00	86,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	581.447.362,00	504.750.000,00	-76.697.362,00	86,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.447.362,00	504.750.000,00	-76.697.362,00	86,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	223.840.000,00	163.610.600,00	-60.229.400,00	73,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	204.350.000,00	154.460.600,00	-49.889.400,00	75,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.350.000,00	154.460.600,00	-49.889.400,00	75,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.350.000,00	154.460.600,00	-49.889.400,00	75,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.490.000,00	9.150.000,00	-10.340.000,00	46,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.490.000,00	9.150.000,00	-10.340.000,00	46,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.490.000,00	9.150.000,00	-10.340.000,00	46,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	324.689.000,00	258.837.566,00	-65.851.434,00	79,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	257.931.000,00	215.796.566,00	-42.134.434,00	83,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002		PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	257.931.000,00	215.796.566,00	-42.134.434,00	83,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	257.931.000,00	215.796.566,00	-42.134.434,00	83,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.931.000,00	215.796.566,00	-42.134.434,00	83,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	66.758.000,00	43.041.000,00	-23.717.000,00	64,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002		PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	66.758.000,00	43.041.000,00	-23.717.000,00	64,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.758.000,00	43.041.000,00	-23.717.000,00	64,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.758.000,00	43.041.000,00	-23.717.000,00	64,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.277.327.300,00	1.071.547.097,00	-205.780.203,00	83,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.087.227.800,00	894.572.197,00	-192.655.603,00	82,28	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	157.241.000,00	26.699.000,00	-130.542.000,00	16,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.241.000,00	26.699.000,00	-130.542.000,00	16,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.241.000,00	26.699.000,00	-130.542.000,00	16,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGLOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	929.986.800,00	867.873.197,00	-62.113.603,00	93,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	346.113.300,00	301.042.758,00	-45.070.542,00	86,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.113.300,00	301.042.758,00	-45.070.542,00	86,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	583.873.500,00	566.830.439,00	-17.043.061,00	97,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	583.873.500,00	566.830.439,00	-17.043.061,00	97,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	10.560.000,00	8.425.000,00	-2.135.000,00	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001		PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	10.560.000,00	8.425.000,00	-2.135.000,00	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.560.000,00	8.425.000,00	-2.135.000,00	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	8.425.000,00	-2.135.000,00	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	179.539.500,00	168.549.900,00	-10.989.600,00	93,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013		KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI	179.539.500,00	168.549.900,00	-10.989.600,00	93,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	168.279.500,00	157.320.900,00	-10.958.600,00	93,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.279.500,00	157.320.900,00	-10.958.600,00	93,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	5.2	BELANJA MODAL	11.260.000,00	11.229.000,00	-31.000,00	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.260.000,00	11.229.000,00	-31.000,00	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.861.000,00	4.800.000,00	-61.000,00	98,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	4.861.000,00	4.800.000,00	-61.000,00	98,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007		PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	4.861.000,00	4.800.000,00	-61.000,00	98,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	4.861.000,00	4.800.000,00	-61.000,00	98,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.861.000,00	4.800.000,00	-61.000,00	98,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39.087.500,00	35.391.500,00	-3.696.000,00	90,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	39.087.500,00	35.391.500,00	-3.696.000,00	90,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	39.087.500,00	35.391.500,00	-3.696.000,00	90,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.087.500,00	35.391.500,00	-3.696.000,00	90,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.087.500,00	35.391.500,00	-3.696.000,00	90,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	22.681.000,00	6.216.000,00	-16.465.000,00	27,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.681.000,00	6.216.000,00	-16.465.000,00	27,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	12.553.000,00	0,00	-12.553.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.553.000,00	0,00	-12.553.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.553.000,00	0,00	-12.553.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	10.128.000,00	6.216.000,00	-3.912.000,00	61,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.128.000,00	6.216.000,00	-3.912.000,00	61,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.128.000,00	6.216.000,00	-3.912.000,00	61,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.424.000,00	25.974.000,00	-450.000,00	98,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02		PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.424.000,00	25.974.000,00	-450.000,00	98,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001		PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	26.424.000,00	25.974.000,00	-450.000,00	98,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.424.000,00	25.974.000,00	-450.000,00	98,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.424.000,00	25.974.000,00	-450.000,00	98,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	205.232.000,00	181.071.870,00	-24.160.130,00	88,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.232.000,00	181.071.870,00	-24.160.130,00	88,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	153.196.000,00	135.002.870,00	-18.193.130,00	88,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.196.000,00	135.002.870,00	-18.193.130,00	88,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.196.000,00	135.002.870,00	-18.193.130,00	88,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	46.681.000,00	46.069.000,00	-612.000,00	98,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.681.000,00	46.069.000,00	-612.000,00	98,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.681.000,00	46.069.000,00	-612.000,00	98,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	5.355.000,00	0,00	-5.355.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.355.000,00	0,00	-5.355.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000,00	0,00	-5.355.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	57.783.000,00	840.000,00	-56.943.000,00	1,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.783.000,00	840.000,00	-56.943.000,00	1,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	57.783.000,00	840.000,00	-56.943.000,00	1,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.783.000,00	840.000,00	-56.943.000,00	1,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.783.000,00	840.000,00	-56.943.000,00	1,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	52.627.500,00	30.687.500,00	-21.940.000,00	58,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	52.627.500,00	30.687.500,00	-21.940.000,00	58,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	19.756.000,00	0,00	-19.756.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.756.000,00	0,00	-19.756.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.756.000,00	0,00	-19.756.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0006		PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	32.871.500,00	30.687.500,00	-2.184.000,00	93,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.871.500,00	30.687.500,00	-2.184.000,00	93,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.871.500,00	30.687.500,00	-2.184.000,00	93,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.070.969.494,00	5.092.010.000,00	-978.959.494,00	83,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	6.070.969.494,00	5.092.010.000,00	-978.959.494,00	83,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.552.000,00	630.000,00	-5.922.000,00	9,61	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.552.000,00	630.000,00	-5.922.000,00	9,61	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.552.000,00	630.000,00	-5.922.000,00	9,61	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	12.576.000,00	12.543.000,00	-33.000,00	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	12.576.000,00	12.543.000,00	-33.000,00	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.576.000,00	12.543.000,00	-33.000,00	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0016		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGUMPULAN SAMPAH	359.040.000,00	358.000.000,00	-1.040.000,00	99,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	359.040.000,00	358.000.000,00	-1.040.000,00	99,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.040.000,00	358.000.000,00	-1.040.000,00	99,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	5.692.801.494,00	4.720.837.000,00	-971.964.494,00	82,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	5.692.801.494,00	4.720.837.000,00	-971.964.494,00	82,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.692.801.494,00	4.720.837.000,00	-971.964.494,00	82,92	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	5.614.318.008,00	5.196.278.683,00	-418.039.325,00	92,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.787.603.008,00	4.407.511.683,00	-380.091.325,00	92,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.762.000,00	5.799.000,00	-963.000,00	85,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.762.000,00	5.799.000,00	-963.000,00	85,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	6.762.000,00	5.799.000,00	-963.000,00	85,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	6.762.000,00	5.799.000,00	-963.000,00	85,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.193.736.302,00	2.964.059.598,00	-229.676.704,00	92,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.193.736.302,00	2.964.059.598,00	-229.676.704,00	92,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	3.193.736.302,00	2.964.059.598,00	-229.676.704,00	92,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	3.193.736.302,00	2.964.059.598,00	-229.676.704,00	92,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	55,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	55,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1		BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	55,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	55,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	887.373.500,00	833.706.039,00	-53.667.461,00	93,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.896.000,00	12.563.500,00	-1.332.500,00	90,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	13.896.000,00	12.563.500,00	-1.332.500,00	90,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	13.896.000,00	12.563.500,00	-1.332.500,00	90,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	359.293.000,00	334.594.000,00	-24.699.000,00	93,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	184.759.000,00	161.819.000,00	-22.940.000,00	87,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	184.759.000,00	161.819.000,00	-22.940.000,00	87,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2		BELANJA MODAL	174.534.000,00	172.775.000,00	-1.759.000,00	98,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.534.000,00	172.775.000,00	-1.759.000,00	98,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.873.000,00	33.533.900,00	-12.339.100,00	73,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	45.873.000,00	33.533.900,00	-12.339.100,00	73,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	45.873.000,00	33.533.900,00	-12.339.100,00	73,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	52.024.000,00	41.539.600,00	-10.484.400,00	79,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.024.000,00	41.539.600,00	-10.484.400,00	79,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.024.000,00	41.539.600,00	-10.484.400,00	79,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	5.885.000,00	-1.115.000,00	84,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.885.000,00	-1.115.000,00	84,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.885.000,00	-1.115.000,00	84,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	1.840.000,00	-1.760.000,00	51,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	1.840.000,00	-1.760.000,00	51,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.840.000,00	-1.760.000,00	51,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	350.000.000,00	349.952.339,00	-47.661,00	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	349.952.339,00	-47.661,00	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	349.952.339,00	-47.661,00	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	55.687.500,00	53.797.700,00	-1.889.800,00	96,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	55.687.500,00	53.797.700,00	-1.889.800,00	96,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.687.500,00	53.797.700,00	-1.889.800,00	96,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	398.251.206,00	329.521.096,00	-68.730.110,00	82,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.032.000,00	1.532.700,00	-2.499.300,00	38,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.032.000,00	1.532.700,00	-2.499.300,00	38,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000,00	1.532.700,00	-2.499.300,00	38,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	128.178.000,00	92.608.396,00	-35.569.604,00	72,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.178.000,00	92.608.396,00	-35.569.604,00	72,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.178.000,00	92.608.396,00	-35.569.604,00	72,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	266.041.206,00	235.380.000,00	-30.661.206,00	88,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	266.041.206,00	235.380.000,00	-30.661.206,00	88,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.041.206,00	235.380.000,00	-30.661.206,00	88,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	291.480.000,00	268.925.950,00	-22.554.050,00	92,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.550.000,00	39.281.800,00	-268.200,00	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.550.000,00	39.281.800,00	-268.200,00	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	39.281.800,00	-268.200,00	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	184.360.000,00	172.399.150,00	-11.960.850,00	93,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	184.360.000,00	172.399.150,00	-11.960.850,00	93,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.360.000,00	172.399.150,00	-11.960.850,00	93,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	34.000.000,00	33.850.000,00	-150.000,00	99,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	33.850.000,00	-150.000,00	99,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.850.000,00	-150.000,00	99,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	33.570.000,00	23.395.000,00	-10.175.000,00	69,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.570.000,00	23.395.000,00	-10.175.000,00	69,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.570.000,00	23.395.000,00	-10.175.000,00	69,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	327.290.500,00	302.985.500,00	-24.305.000,00	92,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	327.290.500,00	302.985.500,00	-24.305.000,00	92,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001		PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	10.636.000,00	10.464.000,00	-172.000,00	98,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.636.000,00	10.464.000,00	-172.000,00	98,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.636.000,00	10.464.000,00	-172.000,00	98,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	98.850.000,00	98.736.000,00	-114.000,00	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	98.850.000,00	98.736.000,00	-114.000,00	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	98.736.000,00	-114.000,00	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007		PENERBITAN DOKUMEN ATAS HASIL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	217.804.500,00	193.785.500,00	-24.019.000,00	88,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	217.804.500,00	193.785.500,00	-24.019.000,00	88,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.804.500,00	193.785.500,00	-24.019.000,00	88,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	265.230.000,00	253.842.000,00	-11.388.000,00	95,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	168.331.000,00	166.316.500,00	-2.014.500,00	98,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	168.331.000,00	166.316.500,00	-2.014.500,00	98,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.331.000,00	166.316.500,00	-2.014.500,00	98,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.331.000,00	166.316.500,00	-2.014.500,00	98,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	96.899.000,00	87.525.500,00	-9.373.500,00	90,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL	96.899.000,00	87.525.500,00	-9.373.500,00	90,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.899.000,00	87.525.500,00	-9.373.500,00	90,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.899.000,00	87.525.500,00	-9.373.500,00	90,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	234.194.500,00	231.939.500,00	-2.255.000,00	99,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	75.252.000,00	73.817.000,00	-1.435.000,00	98,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	75.252.000,00	73.817.000,00	-1.435.000,00	98,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.252.000,00	73.817.000,00	-1.435.000,00	98,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.252.000,00	73.817.000,00	-1.435.000,00	98,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	158.942.500,00	158.122.500,00	-820.000,00	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	158.942.500,00	158.122.500,00	-820.000,00	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.942.500,00	158.122.500,00	-820.000,00	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.942.500,00	158.122.500,00	-820.000,00	99,48	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	7.769.432.494,00	6.960.018.970,00	-809.413.524,00	89,58	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.855.436.494,00	5.217.038.831,00	-638.397.663,00	89,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.526.900.670,00	4.096.397.019,00	-430.503.651,00	90,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.526.900.670,00	4.096.397.019,00	-430.503.651,00	90,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	4.526.900.670,00	4.096.397.019,00	-430.503.651,00	90,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	4.526.900.670,00	4.096.397.019,00	-430.503.651,00	90,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0011			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0011	5.1		BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	276.372.000,00	235.071.561,00	-41.300.439,00	85,05	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.351.000,00	4.695.000,00	-656.000,00	87,74	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	5.351.000,00	4.695.000,00	-656.000,00	87,74	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.351.000,00	4.695.000,00	-656.000,00	87,74	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	43.595.000,00	23.110.000,00	-20.485.000,00	53,01	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1		BELANJA OPERASI	43.595.000,00	23.110.000,00	-20.485.000,00	53,01	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	43.595.000,00	23.110.000,00	-20.485.000,00	53,01	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.401.000,00	15.409.370,00	-1.991.630,00	88,55	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	17.401.000,00	15.409.370,00	-1.991.630,00	88,55	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	17.401.000,00	15.409.370,00	-1.991.630,00	88,55	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009			PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	200.000.000,00	181.971.191,00	-18.028.809,00	90,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	200.000.000,00	181.971.191,00	-18.028.809,00	90,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	181.971.191,00	-18.028.809,00	90,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010			PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5.004.000,00	4.865.000,00	-139.000,00	97,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.004.000,00	4.865.000,00	-139.000,00	97,22	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.004.000,00	4.865.000,00	-139.000,00	97,22	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	69.509.000,00	68.600.000,00	-909.000,00	98,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.509.000,00	68.600.000,00	-909.000,00	98,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	69.509.000,00	68.600.000,00	-909.000,00	98,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.509.000,00	68.600.000,00	-909.000,00	98,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	742.872.824,00	621.024.274,00	-121.848.550,00	83,59	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.000.000,00	46.898.794,00	-4.101.206,00	91,95	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	46.898.794,00	-4.101.206,00	91,95	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	46.898.794,00	-4.101.206,00	91,95	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	689.872.824,00	572.125.480,00	-117.747.344,00	82,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	689.872.824,00	572.125.480,00	-117.747.344,00	82,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.872.824,00	572.125.480,00	-117.747.344,00	82,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	235.282.000,00	195.945.977,00	-39.336.023,00	83,28	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.550.000,00	39.543.000,00	-7.000,00	99,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.550.000,00	39.543.000,00	-7.000,00	99,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	39.543.000,00	-7.000,00	99,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	182.140.000,00	145.147.977,00	-36.992.023,00	79,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.140.000,00	145.147.977,00	-36.992.023,00	79,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.140.000,00	145.147.977,00	-36.992.023,00	79,69	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.592.000,00	11.255.000,00	-2.337.000,00	82,80	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.592.000,00	11.255.000,00	-2.337.000,00	82,80	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.592.000,00	11.255.000,00	-2.337.000,00	82,80	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.242.071.500,00	1.083.604.040,00	-158.467.460,00	87,24	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.242.071.500,00	1.083.604.040,00	-158.467.460,00	87,24	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.009.125.000,00	922.763.840,00	-86.361.160,00	91,44	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.009.125.000,00	922.763.840,00	-86.361.160,00	91,44	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.009.125.000,00	922.763.840,00	-86.361.160,00	91,44	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	70.037.500,00	47.846.200,00	-22.191.300,00	68,31	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	70.037.500,00	47.846.200,00	-22.191.300,00	68,31	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.037.500,00	47.846.200,00	-22.191.300,00	68,31	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009		PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	5.408.000,00	900.000,00	-4.508.000,00	16,64	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.408.000,00	900.000,00	-4.508.000,00	16,64	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.408.000,00	900.000,00	-4.508.000,00	16,64	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	41.100.000,00	0,00	-41.100.000,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	41.100.000,00	0,00	-41.100.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	0,00	-41.100.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	116.401.000,00	112.094.000,00	-4.307.000,00	96,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	116.401.000,00	112.094.000,00	-4.307.000,00	96,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.401.000,00	112.094.000,00	-4.307.000,00	96,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	671.924.500,00	659.376.099,00	-12.548.401,00	98,13	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	671.924.500,00	659.376.099,00	-12.548.401,00	98,13	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	18.216.000,00	18.112.000,00	-104.000,00	99,42	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.216.000,00	18.112.000,00	-104.000,00	99,42	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.216.000,00	18.112.000,00	-104.000,00	99,42	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	78.958.500,00	71.421.500,00	-7.537.000,00	90,45	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	78.958.500,00	71.421.500,00	-7.537.000,00	90,45	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.958.500,00	71.421.500,00	-7.537.000,00	90,45	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	574.750.000,00	569.842.599,00	-4.907.401,00	99,14	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	574.750.000,00	569.842.599,00	-4.907.401,00	99,14	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.750.000,00	569.842.599,00	-4.907.401,00	99,14	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	117.000.000,00	123.532.000,00	6.532.000,00	105,58	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.000.000,00	123.532.000,00	6.532.000,00	105,58	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	117.000.000,00	123.532.000,00	6.532.000,00	105,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.270.265.206,00	15.953.810.635,00	-1.316.454.571,00	92,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.566.525.944,00	5.073.876.734,00	-492.649.210,00	91,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.214.000,00	4.884.000,00	-1.330.000,00	78,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.214.000,00	4.884.000,00	-1.330.000,00	78,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.214.000,00	4.884.000,00	-1.330.000,00	78,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.214.000,00	4.884.000,00	-1.330.000,00	78,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.067.392.944,00	2.897.743.978,00	-169.648.966,00	94,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.067.392.944,00	2.897.743.978,00	-169.648.966,00	94,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.067.392.944,00	2.897.743.978,00	-169.648.966,00	94,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.067.392.944,00	2.897.743.978,00	-169.648.966,00	94,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	82.140.000,00	50.449.916,00	-31.690.084,00	61,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	21.500.000,00	21.400.000,00	-100.000,00	99,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.400.000,00	-100.000,00	99,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.400.000,00	-100.000,00	99,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38.664.000,00	29.049.916,00	-9.614.084,00	75,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.664.000,00	29.049.916,00	-9.614.084,00	75,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.664.000,00	29.049.916,00	-9.614.084,00	75,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.976.000,00	0,00	-21.976.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.976.000,00	0,00	-21.976.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.976.000,00	0,00	-21.976.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	838.431.000,00	699.037.579,00	-139.393.421,00	83,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.986.000,00	10.250.000,00	-736.000,00	93,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.986.000,00	10.250.000,00	-736.000,00	93,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.986.000,00	10.250.000,00	-736.000,00	93,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	55.957.000,00	48.488.000,00	-7.469.000,00	86,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.078.000,00	45.838.000,00	-7.240.000,00	86,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.078.000,00	45.838.000,00	-7.240.000,00	86,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.879.000,00	2.650.000,00	-229.000,00	92,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.879.000,00	2.650.000,00	-229.000,00	92,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	44.066.000,00	38.471.000,00	-5.595.000,00	87,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.066.000,00	38.471.000,00	-5.595.000,00	87,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.066.000,00	38.471.000,00	-5.595.000,00	87,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.994.000,00	15.823.500,00	-5.170.500,00	75,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.994.000,00	15.823.500,00	-5.170.500,00	75,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.994.000,00	15.823.500,00	-5.170.500,00	75,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	107.220.000,00	77.610.300,00	-29.609.700,00	72,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	107.220.000,00	77.610.300,00	-29.609.700,00	72,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.220.000,00	77.610.300,00	-29.609.700,00	72,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	599.208.000,00	508.394.779,00	-90.813.221,00	84,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	599.208.000,00	508.394.779,00	-90.813.221,00	84,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.208.000,00	508.394.779,00	-90.813.221,00	84,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	161.090.000,00	151.000.000,00	-10.090.000,00	93,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	161.090.000,00	151.000.000,00	-10.090.000,00	93,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	161.090.000,00	151.000.000,00	-10.090.000,00	93,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.090.000,00	151.000.000,00	-10.090.000,00	93,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	776.358.000,00	705.814.461,00	-70.543.539,00	90,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	48.263.000,00	45.020.000,00	-3.243.000,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.263.000,00	45.020.000,00	-3.243.000,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.263.000,00	45.020.000,00	-3.243.000,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	106.920.000,00	97.204.461,00	-9.715.539,00	90,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	106.920.000,00	97.204.461,00	-9.715.539,00	90,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.920.000,00	97.204.461,00	-9.715.539,00	90,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	621.175.000,00	563.590.000,00	-57.585.000,00	90,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	621.175.000,00	563.590.000,00	-57.585.000,00	90,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.175.000,00	563.590.000,00	-57.585.000,00	90,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	634.900.000,00	564.946.800,00	-69.953.200,00	88,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	39.989.500,00	-260.500,00	99,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	39.989.500,00	-260.500,00	99,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	39.989.500,00	-260.500,00	99,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	524.010.000,00	460.146.700,00	-63.863.300,00	87,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	524.010.000,00	460.146.700,00	-63.863.300,00	87,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.010.000,00	460.146.700,00	-63.863.300,00	87,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.800.000,00	40.360.600,00	-439.400,00	98,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	40.360.600,00	-439.400,00	98,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.360.600,00	-439.400,00	98,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	29.840.000,00	24.450.000,00	-5.390.000,00	81,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	29.840.000,00	24.450.000,00	-5.390.000,00	81,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.840.000,00	24.450.000,00	-5.390.000,00	81,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.564.287.262,00	10.063.573.361,00	-500.713.901,00	95,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	8.021.791.388,00	7.873.147.223,00	-148.644.165,00	98,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	2.865.662.488,00	2.845.187.000,00	-20.475.488,00	99,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	464.708.000,00	454.675.000,00	-10.033.000,00	97,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.708.000,00	454.675.000,00	-10.033.000,00	97,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.400.954.488,00	2.390.512.000,00	-10.442.488,00	99,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.427.000,00	790.872.000,00	-9.555.000,00	98,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.527.488,00	1.599.640.000,00	-887.488,00	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	5.156.128.900,00	5.027.960.223,00	-128.168.677,00	97,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.935.956.900,00	4.808.622.223,00	-127.334.677,00	97,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.935.956.900,00	4.808.622.223,00	-127.334.677,00	97,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	220.172.000,00	219.338.000,00	-834.000,00	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.674.000,00	20.175.000,00	-499.000,00	97,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.498.000,00	199.163.000,00	-335.000,00	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	134.115.500,00	130.327.500,00	-3.788.000,00	97,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	134.115.500,00	130.327.500,00	-3.788.000,00	97,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	134.115.500,00	130.327.500,00	-3.788.000,00	97,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.115.500,00	130.327.500,00	-3.788.000,00	97,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	9.695.000,00	7.487.500,00	-2.207.500,00	77,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	9.695.000,00	7.487.500,00	-2.207.500,00	77,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.695.000,00	7.487.500,00	-2.207.500,00	77,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.695.000,00	7.487.500,00	-2.207.500,00	77,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	240.091.000,00	235.990.380,00	-4.100.620,00	98,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	23.694.000,00	20.863.800,00	-2.830.200,00	88,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.694.000,00	20.863.800,00	-2.830.200,00	88,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.694.000,00	20.863.800,00	-2.830.200,00	88,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004		PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	16.200.000,00	15.000.000,00	-1.200.000,00	92,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	15.000.000,00	-1.200.000,00	92,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	15.000.000,00	-1.200.000,00	92,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	200.197.000,00	200.126.580,00	-70.420,00	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	200.197.000,00	200.126.580,00	-70.420,00	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.197.000,00	200.126.580,00	-70.420,00	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	185.709.500,00	148.298.258,00	-37.411.242,00	79,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	65.920.500,00	55.957.500,00	-9.963.000,00	84,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.920.500,00	55.957.500,00	-9.963.000,00	84,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.920.500,00	55.957.500,00	-9.963.000,00	84,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	78.246.000,00	55.610.758,00	-22.635.242,00	71,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	78.246.000,00	55.610.758,00	-22.635.242,00	71,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.246.000,00	55.610.758,00	-22.635.242,00	71,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	41.543.000,00	36.730.000,00	-4.813.000,00	88,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	41.543.000,00	36.730.000,00	-4.813.000,00	88,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.543.000,00	36.730.000,00	-4.813.000,00	88,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.934.746.874,00	1.644.022.500,00	-290.724.374,00	84,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	164.998.500,00	122.592.500,00	-42.406.000,00	74,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	164.998.500,00	122.592.500,00	-42.406.000,00	74,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.998.500,00	122.592.500,00	-42.406.000,00	74,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.769.748.374,00	1.521.430.000,00	-248.318.374,00	85,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	333.244.374,00	86.630.000,00	-246.614.374,00	25,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.244.374,00	86.630.000,00	-246.614.374,00	25,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.436.504.000,00	1.434.800.000,00	-1.704.000,00	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.436.504.000,00	1.434.800.000,00	-1.704.000,00	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.638.000,00	9.900.000,00	-1.738.000,00	85,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	11.638.000,00	9.900.000,00	-1.738.000,00	85,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.900.000,00	6.300.000,00	-1.600.000,00	79,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	6.300.000,00	-1.600.000,00	79,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.738.000,00	3.600.000,00	-138.000,00	96,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.738.000,00	3.600.000,00	-138.000,00	96,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16		PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.500.000,00	14.400.000,00	-12.100.000,00	54,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.500.000,00	14.400.000,00	-12.100.000,00	54,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	14.400.000,00	-12.100.000,00	54,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	14.400.000,00	-12.100.000,00	54,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.139.452.000,00	816.360.540,00	-323.091.460,00	71,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12		PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13		PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.039.452.000,00	816.360.540,00	-223.091.460,00	78,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0011		PEMEMUHAN FASILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	1.039.452.000,00	816.360.540,00	-223.091.460,00	78,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0011	5.1	BELANJA OPERASI	541.854.500,00	322.922.040,00	-218.932.460,00	59,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.854.500,00	322.922.040,00	-218.932.460,00	59,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0011	5.2	BELANJA MODAL	497.597.500,00	493.438.500,00	-4.159.000,00	99,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497.597.500,00	493.438.500,00	-4.159.000,00	99,16	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	10.916.374.030,00	9.973.835.931,00	-942.538.099,00	91,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.807.677.430,00	6.205.595.213,00	-602.082.217,00	91,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.872.367.430,00	4.493.975.250,00	-378.392.180,00	92,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.872.367.430,00	4.493.975.250,00	-378.392.180,00	92,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.872.367.430,00	4.493.975.250,00	-378.392.180,00	92,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.872.367.430,00	4.493.975.250,00	-378.392.180,00	92,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	80.222.000,00	39.714.449,00	-40.507.551,00	49,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	80.222.000,00	39.714.449,00	-40.507.551,00	49,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	80.222.000,00	39.714.449,00	-40.507.551,00	49,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.222.000,00	39.714.449,00	-40.507.551,00	49,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	629.275.000,00	584.589.034,00	-44.685.966,00	92,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.036.000,00	33.122.000,00	-914.000,00	97,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.036.000,00	33.122.000,00	-914.000,00	97,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.036.000,00	33.122.000,00	-914.000,00	97,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.284.000,00	57.180.400,00	-13.103.600,00	81,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.284.000,00	57.180.400,00	-13.103.600,00	81,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.284.000,00	57.180.400,00	-13.103.600,00	81,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.965.000,00	49.127.250,00	-10.837.750,00	81,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.965.000,00	49.127.250,00	-10.837.750,00	81,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.965.000,00	49.127.250,00	-10.837.750,00	81,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	64.990.000,00	59.844.540,00	-5.145.460,00	92,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.990.000,00	59.844.540,00	-5.145.460,00	92,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.990.000,00	59.844.540,00	-5.145.460,00	92,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	400.000.000,00	385.314.844,00	-14.685.156,00	96,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	385.314.844,00	-14.685.156,00	96,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	385.314.844,00	-14.685.156,00	96,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	262.460.000,00	231.044.000,00	-31.416.000,00	88,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	36.810.000,00	36.329.000,00	-481.000,00	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	36.810.000,00	36.329.000,00	-481.000,00	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.810.000,00	36.329.000,00	-481.000,00	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	225.650.000,00	194.715.000,00	-30.935.000,00	86,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	225.650.000,00	194.715.000,00	-30.935.000,00	86,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.650.000,00	194.715.000,00	-30.935.000,00	86,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	543.964.500,00	456.115.566,00	-87.848.934,00	83,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	92.562.500,00	69.942.500,00	-22.620.000,00	75,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	92.562.500,00	69.942.500,00	-22.620.000,00	75,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.562.500,00	69.942.500,00	-22.620.000,00	75,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	215.080.000,00	154.146.266,00	-60.933.734,00	71,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	215.080.000,00	154.146.266,00	-60.933.734,00	71,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.080.000,00	154.146.266,00	-60.933.734,00	71,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	236.322.000,00	232.026.800,00	-4.295.200,00	98,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	236.322.000,00	232.026.800,00	-4.295.200,00	98,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.322.000,00	232.026.800,00	-4.295.200,00	98,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	419.388.500,00	400.156.914,00	-19.231.586,00	95,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	234.776.500,00	217.736.700,00	-17.039.800,00	92,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	234.776.500,00	217.736.700,00	-17.039.800,00	92,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.776.500,00	217.736.700,00	-17.039.800,00	92,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	121.662.000,00	121.545.214,00	-116.786,00	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	121.662.000,00	121.545.214,00	-116.786,00	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.662.000,00	121.545.214,00	-116.786,00	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.950.000,00	49.120.000,00	-1.830.000,00	96,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	50.950.000,00	49.120.000,00	-1.830.000,00	96,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.950.000,00	49.120.000,00	-1.830.000,00	96,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.000.000,00	11.755.000,00	-245.000,00	97,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.755.000,00	-245.000,00	97,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.755.000,00	-245.000,00	97,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.225.653.000,00	1.051.580.773,00	-174.072.227,00	85,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.225.653.000,00	1.051.580.773,00	-174.072.227,00	85,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0002		MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	31.330.000,00	27.651.500,00	-3.678.500,00	88,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.330.000,00	27.651.500,00	-3.678.500,00	88,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.330.000,00	27.651.500,00	-3.678.500,00	88,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0004		PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	527.002.500,00	471.294.200,00	-55.708.300,00	89,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	527.002.500,00	471.294.200,00	-55.708.300,00	89,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.002.500,00	471.294.200,00	-55.708.300,00	89,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0005		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	277.732.500,00	219.287.500,00	-58.445.000,00	78,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	277.732.500,00	219.287.500,00	-58.445.000,00	78,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.732.500,00	219.287.500,00	-58.445.000,00	78,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	293.375.000,00	255.768.993,00	-37.606.007,00	87,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	293.375.000,00	255.768.993,00	-37.606.007,00	87,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.375.000,00	255.768.993,00	-37.606.007,00	87,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	96.213.000,00	77.578.580,00	-18.634.420,00	80,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	96.213.000,00	77.578.580,00	-18.634.420,00	80,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.213.000,00	77.578.580,00	-18.634.420,00	80,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.883.043.600,00	2.716.659.945,00	-166.383.655,00	94,22	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.246.025.600,00	2.217.329.633,00	-28.695.967,00	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002		PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.598.100,00	14.142.510,00	-6.455.590,00	68,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.598.100,00	14.142.510,00	-6.455.590,00	68,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.598.100,00	14.142.510,00	-6.455.590,00	68,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003		PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	2.225.427.500,00	2.203.187.123,00	-22.240.377,00	99,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.099.383.500,00	2.077.762.623,00	-21.620.877,00	98,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.383.500,00	2.077.762.623,00	-21.620.877,00	98,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	126.044.000,00	125.424.500,00	-619.500,00	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.044.000,00	125.424.500,00	-619.500,00	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	637.018.000,00	499.330.312,00	-137.687.688,00	78,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0003		PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	94.581.500,00	93.880.000,00	-701.500,00	99,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	94.531.500,00	93.880.000,00	-651.500,00	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.531.500,00	93.880.000,00	-651.500,00	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	18.113.500,00	17.661.720,00	-451.780,00	97,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.329.000,00	5.259.720,00	-69.280,00	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.329.000,00	5.259.720,00	-69.280,00	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	12.784.500,00	12.402.000,00	-382.500,00	97,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.784.500,00	12.402.000,00	-382.500,00	97,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0007		PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	15.460.000,00	0,00	-15.460.000,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.460.000,00	0,00	-15.460.000,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000,00	0,00	-15.460.000,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0009		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	138.731.000,00	123.480.646,00	-15.250.354,00	89,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	138.731.000,00	123.480.646,00	-15.250.354,00	89,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.731.000,00	123.480.646,00	-15.250.354,00	89,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0010		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	237.883.000,00	175.881.127,00	-62.001.873,00	73,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	237.883.000,00	175.881.127,00	-62.001.873,00	73,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.883.000,00	175.881.127,00	-62.001.873,00	73,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0012		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE	132.249.000,00	88.426.819,00	-43.822.181,00	66,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	132.249.000,00	88.426.819,00	-43.822.181,00	66,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.249.000,00	88.426.819,00	-43.822.181,00	66,86	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	274.361.000,00	230.036.000,00	-44.325.000,00	83,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	274.361.000,00	230.036.000,00	-44.325.000,00	83,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.361.000,00	230.036.000,00	-44.325.000,00	83,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	174.608.000,00	153.770.000,00	-20.838.000,00	88,06	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.608.000,00	153.770.000,00	-20.838.000,00	88,06	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.608.000,00	153.770.000,00	-20.838.000,00	88,06	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	99.753.000,00	76.266.000,00	-23.487.000,00	76,45	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.753.000,00	76.266.000,00	-23.487.000,00	76,45	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.753.000,00	76.266.000,00	-23.487.000,00	76,45	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	281.359.000,00	237.287.818,00	-44.071.182,00	84,33	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	281.359.000,00	237.287.818,00	-44.071.182,00	84,33	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.359.000,00	237.287.818,00	-44.071.182,00	84,33	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002		PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.346.000,00	10.112.917,00	-38.233.083,00	20,91	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.346.000,00	10.112.917,00	-38.233.083,00	20,91	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.346.000,00	10.112.917,00	-38.233.083,00	20,91	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	39.872.000,00	38.708.000,00	-1.164.000,00	97,08	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.872.000,00	38.708.000,00	-1.164.000,00	97,08	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.872.000,00	38.708.000,00	-1.164.000,00	97,08	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.141.000,00	188.466.901,00	-4.674.099,00	97,57	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	193.141.000,00	188.466.901,00	-4.674.099,00	97,57	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.141.000,00	188.466.901,00	-4.674.099,00	97,57	

LAMPIRAN 1.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000		5		BELANJA DAERAH	6.359.533.495,00	5.485.463.150,00	-874.070.345,00	86,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.907.578.995,00	4.232.306.696,00	-675.272.299,00	86,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.01			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.350.000,00	5.907.000,00	-443.000,00	93,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.01.0001			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.350.000,00	5.907.000,00	-443.000,00	93,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	6.350.000,00	5.907.000,00	-443.000,00	93,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	5.907.000,00	-443.000,00	93,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.895.165.150,00	2.414.591.248,00	-480.573.902,00	83,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.895.165.150,00	2.414.591.248,00	-480.573.902,00	83,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.895.165.150,00	2.414.591.248,00	-480.573.902,00	83,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.895.165.150,00	2.414.591.248,00	-480.573.902,00	83,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	36.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	33,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.05.0011			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	36.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	33,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1		BELANJA OPERASI	36.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	33,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	33,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	620.491.000,00	575.598.175,00	-44.892.825,00	92,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.215.000,00	18.662.000,00	-1.553.000,00	92,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	20.215.000,00	18.662.000,00	-1.553.000,00	92,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	20.215.000,00	18.662.000,00	-1.553.000,00	92,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	122.060.000,00	102.228.000,00	-19.832.000,00	83,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	122.060.000,00	102.228.000,00	-19.832.000,00	83,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	122.060.000,00	102.228.000,00	-19.832.000,00	83,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	31.400.000,00	27.557.300,00	-3.842.700,00	87,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	31.400.000,00	27.557.300,00	-3.842.700,00	87,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	27.557.300,00	-3.842.700,00	87,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0004			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	36.949.000,00	30.330.600,00	-6.618.400,00	82,08	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1		BELANJA OPERASI	36.949.000,00	30.330.600,00	-6.618.400,00	82,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.949.000,00	30.330.600,00	-6.618.400,00	82,08	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.457.000,00	39.971.000,00	-10.486.000,00	79,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.457.000,00	39.971.000,00	-10.486.000,00	79,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.457.000,00	39.971.000,00	-10.486.000,00	79,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.435.000,00	3.392.000,00	-1.043.000,00	76,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.435.000,00	3.392.000,00	-1.043.000,00	76,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.435.000,00	3.392.000,00	-1.043.000,00	76,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.975.000,00	4.222.000,00	-753.000,00	84,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.975.000,00	4.222.000,00	-753.000,00	84,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	4.222.000,00	-753.000,00	84,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	350.000.000,00	349.235.275,00	-764.725,00	99,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	349.235.275,00	-764.725,00	99,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	349.235.275,00	-764.725,00	99,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50.614.000,00	50.022.000,00	-592.000,00	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.614.000,00	50.022.000,00	-592.000,00	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	50.614.000,00	50.022.000,00	-592.000,00	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.614.000,00	50.022.000,00	-592.000,00	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	738.278.845,00	634.501.970,00	-103.776.875,00	85,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	183.575.000,00	181.877.500,00	-1.697.500,00	99,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	183.575.000,00	181.877.500,00	-1.697.500,00	99,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.575.000,00	181.877.500,00	-1.697.500,00	99,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	166.660.000,00	126.928.970,00	-39.731.030,00	76,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	166.660.000,00	126.928.970,00	-39.731.030,00	76,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.660.000,00	126.928.970,00	-39.731.030,00	76,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	388.043.845,00	325.695.500,00	-62.348.345,00	83,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	388.043.845,00	325.695.500,00	-62.348.345,00	83,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.043.845,00	325.695.500,00	-62.348.345,00	83,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	560.680.000,00	539.686.303,00	-20.993.697,00	96,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	146.130.000,00	129.616.200,00	-16.513.800,00	88,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.130.000,00	129.616.200,00	-16.513.800,00	88,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.130.000,00	129.616.200,00	-16.513.800,00	88,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	391.150.000,00	389.122.103,00	-2.027.897,00	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	191.150.000,00	189.285.500,00	-1.864.500,00	99,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.150.000,00	189.285.500,00	-1.864.500,00	99,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.836.603,00	-163.397,00	99,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.836.603,00	-163.397,00	99,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	23.400.000,00	20.948.000,00	-2.452.000,00	89,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	20.948.000,00	-2.452.000,00	89,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	20.948.000,00	-2.452.000,00	89,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.246.000,00	33.010.000,00	-6.236.000,00	84,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.026.000,00	2.910.000,00	-6.116.000,00	32,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	9.026.000,00	2.910.000,00	-6.116.000,00	32,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.026.000,00	2.910.000,00	-6.116.000,00	32,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.026.000,00	2.910.000,00	-6.116.000,00	32,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	30.220.000,00	30.100.000,00	-120.000,00	99,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.02.0003		PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH PADA SISTEM PIR (POTENSI INVESTASI REGIONAL)	30.220.000,00	30.100.000,00	-120.000,00	99,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.220.000,00	30.100.000,00	-120.000,00	99,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.220.000,00	30.100.000,00	-120.000,00	99,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	367.385.000,00	347.305.593,00	-20.079.407,00	94,53	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.385.000,00	347.305.593,00	-20.079.407,00	94,53	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	237.452.000,00	229.911.197,00	-7.540.803,00	96,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.452.000,00	229.911.197,00	-7.540.803,00	96,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.452.000,00	229.911.197,00	-7.540.803,00	96,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0003		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	129.933.000,00	117.394.396,00	-12.538.604,00	90,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	129.933.000,00	117.394.396,00	-12.538.604,00	90,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.933.000,00	117.394.396,00	-12.538.604,00	90,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	281.695.000,00	267.650.000,00	-14.045.000,00	95,01	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	281.695.000,00	267.650.000,00	-14.045.000,00	95,01	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	243.635.000,00	238.755.000,00	-4.880.000,00	97,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	196.610.000,00	193.435.000,00	-3.175.000,00	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.610.000,00	193.435.000,00	-3.175.000,00	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	47.025.000,00	45.320.000,00	-1.705.000,00	96,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.025.000,00	45.320.000,00	-1.705.000,00	96,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	38.060.000,00	28.895.000,00	-9.165.000,00	75,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.060.000,00	28.895.000,00	-9.165.000,00	75,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.060.000,00	28.895.000,00	-9.165.000,00	75,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	716.485.500,00	562.151.861,00	-154.333.639,00	78,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	716.485.500,00	562.151.861,00	-154.333.639,00	78,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	125.940.500,00	50.338.000,00	-75.602.500,00	39,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	125.940.500,00	50.338.000,00	-75.602.500,00	39,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.940.500,00	50.338.000,00	-75.602.500,00	39,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	405.144.000,00	348.148.361,00	-56.995.639,00	85,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	405.144.000,00	348.148.361,00	-56.995.639,00	85,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.144.000,00	348.148.361,00	-56.995.639,00	85,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	185.401.000,00	163.665.500,00	-21.735.500,00	88,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	185.401.000,00	163.665.500,00	-21.735.500,00	88,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.401.000,00	163.665.500,00	-21.735.500,00	88,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.143.000,00	43.039.000,00	-4.104.000,00	91,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.143.000,00	43.039.000,00	-4.104.000,00	91,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	47.143.000,00	43.039.000,00	-4.104.000,00	91,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.143.000,00	43.039.000,00	-4.104.000,00	91,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.143.000,00	43.039.000,00	-4.104.000,00	91,29	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	47.800.000,00	57.390.000,00	9.590.000,00	120,06	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.800.000,00	57.390.000,00	9.590.000,00	120,06	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	47.800.000,00	57.390.000,00	9.590.000,00	120,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.827.648.114,00	11.881.729.347,00	-945.918.767,00	92,62	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.764.732.514,00	6.071.124.803,00	-693.607.711,00	89,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.234.000,00	7.807.000,00	-13.427.000,00	36,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.234.000,00	7.807.000,00	-13.427.000,00	36,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.234.000,00	7.807.000,00	-13.427.000,00	36,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.234.000,00	7.807.000,00	-13.427.000,00	36,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.509.560.514,00	3.271.756.059,00	-237.804.455,00	93,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.509.560.514,00	3.271.756.059,00	-237.804.455,00	93,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.509.560.514,00	3.271.756.059,00	-237.804.455,00	93,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.509.560.514,00	3.271.756.059,00	-237.804.455,00	93,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	520.795.000,00	402.793.796,00	-118.001.204,00	77,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	22.988.000,00	-2.012.000,00	91,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.988.000,00	-2.012.000,00	91,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.988.000,00	-2.012.000,00	91,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.000.000,00	62.135.000,00	-7.865.000,00	88,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	62.135.000,00	-7.865.000,00	88,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	62.135.000,00	-7.865.000,00	88,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	23.869.000,00	14.119.500,00	-9.749.500,00	59,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.869.000,00	14.119.500,00	-9.749.500,00	59,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.869.000,00	14.119.500,00	-9.749.500,00	59,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.976.000,00	40.370.000,00	-9.606.000,00	80,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.976.000,00	40.370.000,00	-9.606.000,00	80,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.976.000,00	40.370.000,00	-9.606.000,00	80,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.000.000,00	19.022.000,00	-7.978.000,00	70,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	19.022.000,00	-7.978.000,00	70,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	19.022.000,00	-7.978.000,00	70,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	74.950.000,00	54.580.000,00	-20.370.000,00	72,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	74.950.000,00	54.580.000,00	-20.370.000,00	72,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.950.000,00	54.580.000,00	-20.370.000,00	72,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	250.000.000,00	189.579.296,00	-60.420.704,00	75,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	189.579.296,00	-60.420.704,00	75,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	189.579.296,00	-60.420.704,00	75,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	112.404.000,00	99.638.000,00	-12.766.000,00	88,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	12.151.000,00	9.900.000,00	-2.251.000,00	81,47	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.151.000,00	9.900.000,00	-2.251.000,00	81,47	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.151.000,00	9.900.000,00	-2.251.000,00	81,47	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	100.253.000,00	89.738.000,00	-10.515.000,00	89,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	100.253.000,00	89.738.000,00	-10.515.000,00	89,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.253.000,00	89.738.000,00	-10.515.000,00	89,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.456.159.000,00	1.287.586.748,00	-168.572.252,00	88,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	620.291.000,00	575.513.500,00	-44.777.500,00	92,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	620.291.000,00	575.513.500,00	-44.777.500,00	92,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.291.000,00	575.513.500,00	-44.777.500,00	92,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	249.843.000,00	149.760.248,00	-100.082.752,00	59,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	249.843.000,00	149.760.248,00	-100.082.752,00	59,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.843.000,00	149.760.248,00	-100.082.752,00	59,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	278.987.000,00	269.858.000,00	-9.129.000,00	96,72	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	278.987.000,00	269.858.000,00	-9.129.000,00	96,72	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.987.000,00	269.858.000,00	-9.129.000,00	96,72	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.038.000,00	292.455.000,00	-14.583.000,00	95,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	307.038.000,00	292.455.000,00	-14.583.000,00	95,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.038.000,00	292.455.000,00	-14.583.000,00	95,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.099.580.000,00	1.001.543.200,00	-98.036.800,00	91,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	263.030.000,00	220.510.500,00	-42.519.500,00	83,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	263.030.000,00	220.510.500,00	-42.519.500,00	83,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.030.000,00	220.510.500,00	-42.519.500,00	83,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59.995.000,00	33.375.300,00	-26.619.700,00	55,63	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.995.000,00	33.375.300,00	-26.619.700,00	55,63	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.995.000,00	33.375.300,00	-26.619.700,00	55,63	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	39.852.000,00	39.500.000,00	-352.000,00	99,11	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.852.000,00	39.500.000,00	-352.000,00	99,11	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.852.000,00	39.500.000,00	-352.000,00	99,11	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	736.703.000,00	708.157.400,00	-28.545.600,00	96,12	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	736.703.000,00	708.157.400,00	-28.545.600,00	96,12	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.703.000,00	708.157.400,00	-28.545.600,00	96,12	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	680.467.000,00	630.732.210,00	-49.734.790,00	92,69	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	451.594.000,00	423.174.810,00	-28.419.190,00	93,70	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR	24.993.000,00	24.993.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.993.000,00	24.993.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.993.000,00	24.993.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	115.926.000,00	103.700.800,00	-12.225.200,00	89,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.926.000,00	103.700.800,00	-12.225.200,00	89,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.926.000,00	103.700.800,00	-12.225.200,00	89,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007		PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU BERPRESTASI	35.625.000,00	35.000.000,00	-625.000,00	98,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.625.000,00	35.000.000,00	-625.000,00	98,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.625.000,00	35.000.000,00	-625.000,00	98,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0008		PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA	275.050.000,00	259.481.010,00	-15.568.990,00	94,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	275.050.000,00	259.481.010,00	-15.568.990,00	94,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.050.000,00	259.481.010,00	-15.568.990,00	94,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.873.000,00	207.557.400,00	-21.315.600,00	90,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA	78.596.000,00	71.596.000,00	-7.000.000,00	91,09	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.596.000,00	71.596.000,00	-7.000.000,00	91,09	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.596.000,00	71.596.000,00	-7.000.000,00	91,09	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	150.277.000,00	135.961.400,00	-14.315.600,00	90,47	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.277.000,00	135.961.400,00	-14.315.600,00	90,47	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.277.000,00	135.961.400,00	-14.315.600,00	90,47	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.115.676.600,00	4.932.899.794,00	-182.776.806,00	96,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.938.000,00	128.685.200,00	-20.252.800,00	86,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	74.999.000,00	56.505.200,00	-18.493.800,00	75,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.999.000,00	56.505.200,00	-18.493.800,00	75,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.000,00	56.505.200,00	-18.493.800,00	75,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	73.219.000,00	72.180.000,00	-1.039.000,00	98,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	729.000,00	0,00	-729.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.000,00	0,00	-729.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	72.490.000,00	72.180.000,00	-310.000,00	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.490.000,00	72.180.000,00	-310.000,00	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	891.096.600,00	834.176.700,00	-56.919.900,00	93,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	384.511.500,00	338.246.000,00	-46.265.500,00	87,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	384.511.500,00	338.246.000,00	-46.265.500,00	87,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.511.500,00	338.246.000,00	-46.265.500,00	87,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	499.985.100,00	495.930.700,00	-4.054.400,00	99,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	499.985.100,00	495.930.700,00	-4.054.400,00	99,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.985.100,00	495.930.700,00	-4.054.400,00	99,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003		PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	6.600.000,00	0,00	-6.600.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	0,00	-6.600.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	-6.600.000,00	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	455.938.000,00	376.665.040,00	-79.272.960,00	82,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001		SELEKSI ATLET DAERAH	49.800.000,00	47.800.000,00	-2.000.000,00	95,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.800.000,00	47.800.000,00	-2.000.000,00	95,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	47.800.000,00	-2.000.000,00	95,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002		PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)	349.343.000,00	280.966.000,00	-68.377.000,00	80,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	349.343.000,00	280.966.000,00	-68.377.000,00	80,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.343.000,00	280.966.000,00	-68.377.000,00	80,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	13.092.000,00	12.299.040,00	-792.960,00	93,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.092.000,00	12.299.040,00	-792.960,00	93,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.092.000,00	12.299.040,00	-792.960,00	93,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	43.703.000,00	35.600.000,00	-8.103.000,00	81,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.703.000,00	35.600.000,00	-8.103.000,00	81,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.703.000,00	35.600.000,00	-8.103.000,00	81,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	3.009.278.000,00	3.006.954.854,00	-2.323.146,00	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002		PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0003		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	9.278.000,00	6.954.854,00	-2.323.146,00	74,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.278.000,00	6.954.854,00	-2.323.146,00	74,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.278.000,00	6.954.854,00	-2.323.146,00	74,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	610.426.000,00	586.418.000,00	-24.008.000,00	96,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001		PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	260.999.000,00	260.769.000,00	-230.000,00	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.999.000,00	260.769.000,00	-230.000,00	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.999.000,00	260.769.000,00	-230.000,00	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0002		PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	75.977.000,00	65.977.000,00	-10.000.000,00	86,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.977.000,00	65.977.000,00	-10.000.000,00	86,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.977.000,00	65.977.000,00	-10.000.000,00	86,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0004		PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN	273.450.000,00	259.672.000,00	-13.778.000,00	94,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	273.450.000,00	259.672.000,00	-13.778.000,00	94,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.450.000,00	259.672.000,00	-13.778.000,00	94,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	266.772.000,00	246.972.540,00	-19.799.460,00	92,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	266.772.000,00	246.972.540,00	-19.799.460,00	92,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	48.181.000,00	38.783.000,00	-9.398.000,00	80,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.181.000,00	38.783.000,00	-9.398.000,00	80,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.181.000,00	38.783.000,00	-9.398.000,00	80,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003		PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	95.000.000,00	93.467.000,00	-1.533.000,00	98,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	93.467.000,00	-1.533.000,00	98,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	93.467.000,00	-1.533.000,00	98,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005		PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	123.591.000,00	114.722.540,00	-8.868.460,00	92,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	123.591.000,00	114.722.540,00	-8.868.460,00	92,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.591.000,00	114.722.540,00	-8.868.460,00	92,82	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
	2.22.3.26.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	182.420.000,00	217.506.000,00
	2.22.3.26.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.420.000,00	217.506.000,00
	2.22.3.26.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	180.420.000,00	215.478.000,00
	2.22.3.26.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	2.028.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	7.219.705.802,00	6.462.255.517,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.473.174.844,00	4.780.764.041,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.406.229.138,00	2.974.183.807,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.406.229.138,00	2.974.183.807,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.406.229.138,00	2.974.183.807,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.406.229.138,00	2.974.183.807,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	590.145.000,00	537.547.092,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	20.818.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	20.818.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.818.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.000.000,00	51.372.900,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	51.372.900,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	51.372.900,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	40.000.000,00	34.926.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	34.926.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.926.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	80.145.000,00	58.852.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.145.000,00	58.852.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.145.000,00	58.852.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	30.125.600,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	30.125.600,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	30.125.600,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	350.000.000,00	341.452.592,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	341.452.592,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	341.452.592,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.796.000,00	42.860.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	43.796.000,00	42.860.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	43.796.000,00	42.860.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.796.000,00	42.860.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.036.640.706,00	921.277.722,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	192.900.000,00	138.382.722,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	192.900.000,00	138.382.722,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.900.000,00	138.382.722,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	843.740.706,00	782.895.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	843.740.706,00	782.895.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.740.706,00	782.895.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	396.364.000,00	304.895.420,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.300.000,00	34.457.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.300.000,00	34.457.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	34.457.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	271.080.000,00	201.944.920,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	271.080.000,00	201.944.920,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.080.000,00	201.944.920,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	39.984.000,00	38.999.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.984.000,00	38.999.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.984.000,00	38.999.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	29.494.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	29.494.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	29.494.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.644.140.000,00	1.604.111.976,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.01		PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	946.162.000,00	907.193.976,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	946.162.000,00	907.193.976,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	946.162.000,00	907.193.976,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.162.000,00	907.193.976,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.932.000,00	156.892.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.02.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	157.932.000,00	156.892.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	157.932.000,00	156.892.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.932.000,00	156.892.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	540.046.000,00	540.026.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.03.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	540.046.000,00	540.026.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	540.046.000,00	540.026.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.046.000,00	540.026.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	31.168.000,00	29.940.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.168.000,00	29.940.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03.2.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	31.168.000,00	29.940.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.168.000,00	29.940.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.168.000,00	29.940.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	34.505.000,00	12.785.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	34.505.000,00	12.785.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	34.505.000,00	12.785.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.505.000,00	12.785.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	12.785.000,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	36.717.958,00	34.654.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06.2.01		PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	36.717.958,00	34.654.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06.2.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	36.717.958,00	34.654.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.717.958,00	34.654.500,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.717.958,00	34.654.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.683.483.202,00	1.951.090.332,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	515.000.000,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.02.0002		PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	515.000.000,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	515.000.000,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.000.000,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	4.053.964.702,00	1.845.058.332,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.842.397.000,00	724.660.750,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.842.397.000,00	724.660.750,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.000.000,00	91.602.750,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.737.397.000,00	633.058.000,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	857.140.702,00	782.730.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	857.140.702,00	782.730.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.140.702,00	782.730.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0006		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	354.427.000,00	337.667.082,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	354.427.000,00	337.667.082,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.427.000,00	337.667.082,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04		PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.518.500,00	106.032.000,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0007		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN STANDAR USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH DI KABUPATEN?KOTA	49.969.000,00	46.798.200,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.969.000,00	46.798.200,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.969.000,00	46.798.200,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0009		PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DI TINGKAT KAB/KOTA	64.549.500,00	59.233.800,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.549.500,00	59.233.800,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.549.500,00	59.233.800,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	739.325.000,00	720.660.486,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	739.325.000,00	720.660.486,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	195.725.000,00	185.219.986,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	195.725.000,00	185.219.986,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.725.000,00	185.219.986,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	543.600.000,00	535.440.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	543.600.000,00	535.440.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.600.000,00	535.440.500,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	781.545.000,00	745.792.788,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	681.659.000,00	667.130.788,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.01.0008		PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI	681.659.000,00	667.130.788,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	681.659.000,00	667.130.788,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.659.000,00	667.130.788,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	99.886.000,00	78.662.000,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	99.886.000,00	78.662.000,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.886.000,00	78.662.000,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.886.000,00	78.662.000,00

ERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
UN 2025
N PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
IAN 2024

| PEMBIAYAAN



BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
35.086.000,00	119,23	
35.086.000,00	119,23	
35.058.000,00	119,43	
28.000,00	101,40	
-757.450.285,00	89,50	
-692.410.803,00	87,34	
-432.045.331,00	87,31	
-432.045.331,00	87,31	
-432.045.331,00	87,31	
-432.045.331,00	87,31	
-52.597.908,00	91,08	
-4.182.000,00	83,27	
-4.182.000,00	83,27	
-4.182.000,00	83,27	
-8.627.100,00	85,62	
-8.627.100,00	85,62	
-8.627.100,00	85,62	
-5.074.000,00	87,31	
-5.074.000,00	87,31	
-5.074.000,00	87,31	
-21.293.000,00	73,43	
-21.293.000,00	73,43	
-21.293.000,00	73,43	
-4.874.400,00	86,07	

BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-4.874.400,00	86,07	
-4.874.400,00	86,07	
-8.547.408,00	97,55	
-8.547.408,00	97,55	
-8.547.408,00	97,55	
-936.000,00	97,86	
-936.000,00	97,86	
-936.000,00	97,86	
-936.000,00	97,86	
-115.362.984,00	88,87	
-54.517.278,00	71,73	
-54.517.278,00	71,73	
-54.517.278,00	71,73	
-60.845.706,00	92,78	
-60.845.706,00	92,78	
-60.845.706,00	92,78	
-91.468.580,00	76,92	
-843.000,00	97,61	
-843.000,00	97,61	
-843.000,00	97,61	
-69.135.080,00	74,49	
-69.135.080,00	74,49	
-69.135.080,00	74,49	
-985.000,00	97,53	
-985.000,00	97,53	
-985.000,00	97,53	
-20.505.500,00	58,98	
-20.505.500,00	58,98	
-20.505.500,00	58,98	
-40.028.024,00	97,56	
-38.968.024,00	95,88	
-38.968.024,00	95,88	
-38.968.024,00	95,88	

BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-38.968.024,00	95,88	
-1.040.000,00	99,34	
-1.040.000,00	99,34	
-1.040.000,00	99,34	
-1.040.000,00	99,34	
-20.000,00	99,99	
-20.000,00	99,99	
-20.000,00	99,99	
-20.000,00	99,99	
-1.228.000,00	96,06	
-1.228.000,00	96,06	
-1.228.000,00	96,06	
-1.228.000,00	96,06	
-1.228.000,00	96,06	
-21.720.000,00	37,05	
-21.720.000,00	37,05	
-21.720.000,00	37,05	
-21.720.000,00	37,05	
-21.720.000,00	37,05	
-2.063.458,00	94,38	
-2.063.458,00	94,38	
-2.063.458,00	94,38	
-2.063.458,00	94,38	
-2.063.458,00	94,38	
-2.786.809.596,00	55,08	
-2.732.392.870,00	41,65	
-515.000.000,00	0,00	
-515.000.000,00	0,00	
-515.000.000,00	0,00	
-515.000.000,00	0,00	
-2.208.906.370,00	45,51	
-2.117.736.250,00	25,49	
-2.117.736.250,00	25,49	
-13.397.250,00	87,24	

BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-2.104.339.000,00	23,12	
-74.410.202,00	91,31	
-74.410.202,00	91,31	
-74.410.202,00	91,31	
-16.759.918,00	95,27	
-16.759.918,00	95,27	
-16.759.918,00	95,27	
-8.486.500,00	92,58	
-3.170.800,00	93,65	
-3.170.800,00	93,65	
-3.170.800,00	93,65	
-5.315.700,00	91,76	
-5.315.700,00	91,76	
-5.315.700,00	91,76	
-18.664.514,00	97,47	
-18.664.514,00	97,47	
-10.505.014,00	94,63	
-10.505.014,00	94,63	
-10.505.014,00	94,63	
-8.159.500,00	98,49	
-8.159.500,00	98,49	
-8.159.500,00	98,49	
-35.752.212,00	95,42	
-14.528.212,00	97,86	
-14.528.212,00	97,86	
-14.528.212,00	97,86	
-14.528.212,00	97,86	
-21.224.000,00	78,75	
-21.224.000,00	78,75	
-21.224.000,00	78,75	
-21.224.000,00	78,75	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		5		BELANJA DAERAH	5.202.813.183,00	4.988.069.464,00	-214.743.719,00	95,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.731.469.683,00	4.547.507.220,00	-183.962.463,00	96,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.761.528.048,00	3.703.172.948,00	-58.355.100,00	98,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.761.528.048,00	3.703.172.948,00	-58.355.100,00	98,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	3.761.528.048,00	3.703.172.948,00	-58.355.100,00	98,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	3.761.528.048,00	3.703.172.948,00	-58.355.100,00	98,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	63.055.000,00	45.672.007,00	-17.382.993,00	72,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0009			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	63.055.000,00	45.672.007,00	-17.382.993,00	72,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1		BELANJA OPERASI	63.055.000,00	45.672.007,00	-17.382.993,00	72,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	63.055.000,00	45.672.007,00	-17.382.993,00	72,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	267.452.000,00	253.538.383,00	-13.913.617,00	94,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.060.000,00	11.055.000,00	-2.005.000,00	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	13.060.000,00	11.055.000,00	-2.005.000,00	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	13.060.000,00	11.055.000,00	-2.005.000,00	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	48.800.000,00	43.831.000,00	-4.969.000,00	89,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	48.800.000,00	43.831.000,00	-4.969.000,00	89,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	43.831.000,00	-4.969.000,00	89,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.755.000,00	19.444.800,00	-3.310.200,00	85,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	22.755.000,00	19.444.800,00	-3.310.200,00	85,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	22.755.000,00	19.444.800,00	-3.310.200,00	85,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0004			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	37.918.000,00	35.972.500,00	-1.945.500,00	94,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1		BELANJA OPERASI	37.918.000,00	35.972.500,00	-1.945.500,00	94,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	37.918.000,00	35.972.500,00	-1.945.500,00	94,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.919.000,00	18.405.250,00	-1.513.750,00	92,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	19.919.000,00	18.405.250,00	-1.513.750,00	92,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	19.919.000,00	18.405.250,00	-1.513.750,00	92,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009			PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	125.000.000,00	124.829.833,00	-170.167,00	99,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.829.833,00	-170.167,00	99,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.829.833,00	-170.167,00	99,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	464.624.635,00	379.043.633,00	-85.581.002,00	81,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.256.000,00	1.230.000,00	-2.026.000,00	37,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.256.000,00	1.230.000,00	-2.026.000,00	37,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.256.000,00	1.230.000,00	-2.026.000,00	37,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	94.100.000,00	83.938.633,00	-10.161.367,00	89,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.100.000,00	83.938.633,00	-10.161.367,00	89,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.100.000,00	83.938.633,00	-10.161.367,00	89,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	367.268.635,00	293.875.000,00	-73.393.635,00	80,01	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	367.268.635,00	293.875.000,00	-73.393.635,00	80,01	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.268.635,00	293.875.000,00	-73.393.635,00	80,01	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	174.810.000,00	166.080.249,00	-8.729.751,00	95,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.850.000,00	34.819.000,00	-5.031.000,00	87,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.850.000,00	34.819.000,00	-5.031.000,00	87,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.850.000,00	34.819.000,00	-5.031.000,00	87,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	117.230.000,00	115.150.250,00	-2.079.750,00	98,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.230.000,00	115.150.250,00	-2.079.750,00	98,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.230.000,00	115.150.250,00	-2.079.750,00	98,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.730.000,00	16.110.999,00	-1.619.001,00	90,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.730.000,00	16.110.999,00	-1.619.001,00	90,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.730.000,00	16.110.999,00	-1.619.001,00	90,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	460.295.500,00	429.731.744,00	-30.563.756,00	93,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.032.500,00	353.639.027,00	-20.393.473,00	94,54	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.785.000,00	91.201.126,00	-9.583.874,00	90,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.785.000,00	91.201.126,00	-9.583.874,00	90,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.785.000,00	91.201.126,00	-9.583.874,00	90,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0006		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.967.500,00	262.437.901,00	-529.599,00	99,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	262.967.500,00	262.437.901,00	-529.599,00	99,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.967.500,00	262.437.901,00	-529.599,00	99,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	10.280.000,00	0,00	-10.280.000,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	10.280.000,00	0,00	-10.280.000,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.280.000,00	0,00	-10.280.000,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.263.000,00	76.092.717,00	-10.170.283,00	88,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	68.375.000,00	58.571.717,00	-9.803.283,00	85,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.375.000,00	58.571.717,00	-9.803.283,00	85,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.375.000,00	58.571.717,00	-9.803.283,00	85,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	17.888.000,00	17.521.000,00	-367.000,00	97,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.888.000,00	17.521.000,00	-367.000,00	97,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.888.000,00	17.521.000,00	-367.000,00	97,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11.048.000,00	10.830.500,00	-217.500,00	98,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01		PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.048.000,00	10.830.500,00	-217.500,00	98,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0002		PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	11.048.000,00	10.830.500,00	-217.500,00	98,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.048.000,00	10.830.500,00	-217.500,00	98,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.048.000,00	10.830.500,00	-217.500,00	98,03	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	234.176.000,00	218.465.727,00	-15.710.273,00	93,29	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	234.176.000,00	218.465.727,00	-15.710.273,00	93,29	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.206.000,00	79.915.600,00	-5.290.400,00	93,79	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0002		PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	63.246.000,00	57.955.600,00	-5.290.400,00	91,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.246.000,00	57.955.600,00	-5.290.400,00	91,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.246.000,00	57.955.600,00	-5.290.400,00	91,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.02		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.267.000,00	33.762.500,00	-504.500,00	98,52	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0002		AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	34.267.000,00	33.762.500,00	-504.500,00	98,52	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.267.000,00	33.762.500,00	-504.500,00	98,52	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.267.000,00	33.762.500,00	-504.500,00	98,52	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	114.703.000,00	104.787.627,00	-9.915.373,00	91,35	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	73.368.000,00	64.120.896,00	-9.247.104,00	87,39	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.368.000,00	64.120.896,00	-9.247.104,00	87,39	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.368.000,00	64.120.896,00	-9.247.104,00	87,39	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.335.000,00	40.666.731,00	-668.269,00	98,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.335.000,00	40.666.731,00	-668.269,00	98,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.335.000,00	40.666.731,00	-668.269,00	98,38	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Organisasi : Dinas Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	210.605.000,00	175.140.400,00	-35.464.600,00	83,16	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.605.000,00	175.140.400,00	-35.464.600,00	83,16	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	210.105.000,00	174.946.000,00	-35.159.000,00	83,26	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	194.400,00	-305.600,00	38,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.147.244.990,00	15.860.968.219,00	-1.286.276.771,00	92,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.008.505.690,00	6.396.932.373,00	-611.573.317,00	91,27	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	162.000.000,00	161.940.000,00	-60.000,00	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	162.000.000,00	161.940.000,00	-60.000,00	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	162.000.000,00	161.940.000,00	-60.000,00	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	161.940.000,00	-60.000,00	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.281.189.900,00	3.987.989.963,00	-293.199.937,00	93,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.281.189.900,00	3.987.989.963,00	-293.199.937,00	93,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.281.189.900,00	3.987.989.963,00	-293.199.937,00	93,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.281.189.900,00	3.987.989.963,00	-293.199.937,00	93,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	126.255.000,00	111.075.000,00	-15.180.000,00	87,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	30.255.000,00	28.800.000,00	-1.455.000,00	95,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.255.000,00	28.800.000,00	-1.455.000,00	95,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.255.000,00	28.800.000,00	-1.455.000,00	95,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34.500.000,00	26.275.000,00	-8.225.000,00	76,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.500.000,00	26.275.000,00	-8.225.000,00	76,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	26.275.000,00	-8.225.000,00	76,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	61.500.000,00	56.000.000,00	-5.500.000,00	91,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	61.500.000,00	56.000.000,00	-5.500.000,00	91,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	56.000.000,00	-5.500.000,00	91,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	771.023.000,00	728.538.559,00	-42.484.441,00	94,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	54.858.000,00	49.118.000,00	-5.740.000,00	89,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.858.000,00	49.118.000,00	-5.740.000,00	89,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.858.000,00	49.118.000,00	-5.740.000,00	89,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.068.000,00	93.795.500,00	-10.272.500,00	90,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.068.000,00	93.795.500,00	-10.272.500,00	90,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.068.000,00	93.795.500,00	-10.272.500,00	90,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	73.107.000,00	72.230.000,00	-877.000,00	98,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.995.000,00	2.880.000,00	-115.000,00	96,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	2.880.000,00	-115.000,00	96,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	70.112.000,00	69.350.000,00	-762.000,00	98,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.112.000,00	69.350.000,00	-762.000,00	98,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.356.000,00	66.420.000,00	-5.936.000,00	91,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.356.000,00	66.420.000,00	-5.936.000,00	91,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.356.000,00	66.420.000,00	-5.936.000,00	91,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.136.000,00	41.148.600,00	-7.987.400,00	83,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.136.000,00	41.148.600,00	-7.987.400,00	83,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.136.000,00	41.148.600,00	-7.987.400,00	83,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	400.000.000,00	388.521.459,00	-11.478.541,00	97,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	388.521.459,00	-11.478.541,00	97,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	388.521.459,00	-11.478.541,00	97,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	17.498.000,00	17.305.000,00	-193.000,00	98,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.050.000,00	14.905.000,00	-145.000,00	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	14.905.000,00	-145.000,00	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.448.000,00	2.400.000,00	-48.000,00	98,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.448.000,00	2.400.000,00	-48.000,00	98,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	185.711.000,00	181.150.000,00	-4.561.000,00	97,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	185.711.000,00	181.150.000,00	-4.561.000,00	97,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	185.711.000,00	181.150.000,00	-4.561.000,00	97,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.711.000,00	181.150.000,00	-4.561.000,00	97,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	658.015.874,00	508.055.301,00	-149.960.573,00	77,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	168.131.500,00	131.940.500,00	-36.191.000,00	78,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.131.500,00	131.940.500,00	-36.191.000,00	78,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.131.500,00	131.940.500,00	-36.191.000,00	78,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	273.600.000,00	167.289.301,00	-106.310.699,00	61,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	273.600.000,00	167.289.301,00	-106.310.699,00	61,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.600.000,00	167.289.301,00	-106.310.699,00	61,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.987.000,00	12.172.000,00	-815.000,00	93,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.987.000,00	12.172.000,00	-815.000,00	93,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.987.000,00	12.172.000,00	-815.000,00	93,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	203.297.374,00	196.653.500,00	-6.643.874,00	96,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	203.297.374,00	196.653.500,00	-6.643.874,00	96,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.297.374,00	196.653.500,00	-6.643.874,00	96,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	824.310.916,00	718.183.550,00	-106.127.366,00	87,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	39.925.250,00	-324.750,00	99,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	39.925.250,00	-324.750,00	99,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	39.925.250,00	-324.750,00	99,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	373.900.916,00	352.783.200,00	-21.117.716,00	94,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	373.900.916,00	352.783.200,00	-21.117.716,00	94,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.900.916,00	352.783.200,00	-21.117.716,00	94,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	47.150.000,00	47.128.500,00	-21.500,00	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.150.000,00	47.128.500,00	-21.500,00	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.150.000,00	47.128.500,00	-21.500,00	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	102.000.000,00	72.493.450,00	-29.506.550,00	71,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	72.493.450,00	-29.506.550,00	71,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	72.493.450,00	-29.506.550,00	71,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	261.010.000,00	205.853.150,00	-55.156.850,00	78,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	261.010.000,00	205.853.150,00	-55.156.850,00	78,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261.010.000,00	205.853.150,00	-55.156.850,00	78,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.529.530.800,00	4.254.345.524,00	-275.185.276,00	93,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.723.453.000,00	3.534.132.600,00	-189.320.400,00	94,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	283.679.000,00	247.224.600,00	-36.454.400,00	87,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	283.679.000,00	247.224.600,00	-36.454.400,00	87,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.679.000,00	247.224.600,00	-36.454.400,00	87,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	199.700.000,00	198.628.000,00	-1.072.000,00	99,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	199.700.000,00	198.628.000,00	-1.072.000,00	99,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.700.000,00	198.628.000,00	-1.072.000,00	99,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	3.240.074.000,00	3.088.280.000,00	-151.794.000,00	95,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.240.074.000,00	3.088.280.000,00	-151.794.000,00	95,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.074.000,00	3.088.280.000,00	-151.794.000,00	95,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	670.230.000,00	615.574.130,00	-54.655.870,00	91,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	494.242.500,00	442.255.630,00	-51.986.870,00	89,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	494.242.500,00	442.255.630,00	-51.986.870,00	89,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.242.500,00	442.255.630,00	-51.986.870,00	89,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002		PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	175.987.500,00	173.318.500,00	-2.669.000,00	98,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.987.500,00	173.318.500,00	-2.669.000,00	98,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.987.500,00	173.318.500,00	-2.669.000,00	98,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03		PENGLOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	82.806.500,00	82.460.794,00	-345.706,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002		PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	82.806.500,00	82.460.794,00	-345.706,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.806.500,00	82.460.794,00	-345.706,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.806.500,00	82.460.794,00	-345.706,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04		PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.041.300,00	22.178.000,00	-30.863.300,00	41,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002		PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	53.041.300,00	22.178.000,00	-30.863.300,00	41,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.041.300,00	22.178.000,00	-30.863.300,00	41,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.041.300,00	22.178.000,00	-30.863.300,00	41,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.457.845.500,00	3.277.953.410,00	-179.892.090,00	94,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	294.009.000,00	262.992.240,00	-31.016.760,00	89,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	157.080.000,00	136.600.000,00	-20.480.000,00	86,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.080.000,00	136.600.000,00	-20.480.000,00	86,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.080.000,00	136.600.000,00	-20.480.000,00	86,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	136.929.000,00	126.392.240,00	-10.536.760,00	92,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	136.929.000,00	126.392.240,00	-10.536.760,00	92,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.929.000,00	126.392.240,00	-10.536.760,00	92,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03		PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.870.000,00	45.468.000,00	-402.000,00	99,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002		PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.870.000,00	45.468.000,00	-402.000,00	99,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.870.000,00	45.468.000,00	-402.000,00	99,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.870.000,00	45.468.000,00	-402.000,00	99,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGLOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	3.117.966.500,00	2.969.493.170,00	-148.473.330,00	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.469.000,00	73.370.566,00	-3.098.434,00	95,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.469.000,00	73.370.566,00	-3.098.434,00	95,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.469.000,00	73.370.566,00	-3.098.434,00	95,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.685.513.500,00	1.580.170.124,00	-105.343.376,00	93,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.163.593.500,00	1.114.244.604,00	-49.348.896,00	95,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.593.500,00	1.114.244.604,00	-49.348.896,00	95,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	521.920.000,00	465.925.520,00	-55.994.480,00	89,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.920.000,00	211.169.120,00	-1.750.880,00	99,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	309.000.000,00	254.756.400,00	-54.243.600,00	82,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.348.160.000,00	1.308.267.650,00	-39.892.350,00	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.348.160.000,00	1.308.267.650,00	-39.892.350,00	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.160.000,00	1.308.267.650,00	-39.892.350,00	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004		PENGLOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.824.000,00	7.684.830,00	-139.170,00	98,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.824.000,00	7.684.830,00	-139.170,00	98,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.824.000,00	7.684.830,00	-139.170,00	98,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	114.767.500,00	75.836.312,00	-38.931.188,00	66,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	114.767.500,00	75.836.312,00	-38.931.188,00	66,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001		PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	76.279.500,00	41.343.000,00	-34.936.500,00	54,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.189.500,00	36.743.000,00	-34.446.500,00	51,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.189.500,00	36.743.000,00	-34.446.500,00	51,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.090.000,00	4.600.000,00	-490.000,00	90,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.090.000,00	4.600.000,00	-490.000,00	90,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0002		PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	38.488.000,00	34.493.312,00	-3.994.688,00	89,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.884.000,00	33.987.470,00	-3.896.530,00	89,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.884.000,00	33.987.470,00	-3.896.530,00	89,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	604.000,00	505.842,00	-98.158,00	83,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.000,00	505.842,00	-98.158,00	83,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.036.595.500,00	1.855.900.600,00	-180.694.900,00	91,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01		PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	219.100.500,00	190.046.700,00	-29.053.800,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.100.500,00	190.046.700,00	-29.053.800,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	219.100.500,00	190.046.700,00	-29.053.800,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.100.500,00	190.046.700,00	-29.053.800,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	809.830.000,00	706.110.400,00	-103.719.600,00	87,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001		PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	809.830.000,00	706.110.400,00	-103.719.600,00	87,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	220.769.000,00	206.277.000,00	-14.492.000,00	93,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.769.000,00	206.277.000,00	-14.492.000,00	93,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	589.061.000,00	499.833.400,00	-89.227.600,00	84,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.561.000,00	103.230.000,00	-1.331.000,00	98,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	484.500.000,00	396.603.400,00	-87.896.600,00	81,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.007.665.000,00	959.743.500,00	-47.921.500,00	95,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.615.500,00	124.216.000,00	-40.399.500,00	75,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.005.500,00	68.666.000,00	-39.339.500,00	63,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.005.500,00	68.666.000,00	-39.339.500,00	63,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	56.610.000,00	55.550.000,00	-1.060.000,00	98,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.610.000,00	55.550.000,00	-1.060.000,00	98,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	843.049.500,00	835.527.500,00	-7.522.000,00	99,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	843.049.500,00	835.527.500,00	-7.522.000,00	99,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.049.500,00	835.527.500,00	-7.522.000,00	99,10	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.095.000.000,00	1.150.547.380,00	55.547.380,00	105,07	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.095.000.000,00	1.150.547.380,00	55.547.380,00	105,07	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.094.500.000,00	1.148.542.500,00	54.042.500,00	104,93	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	2.004.880,00	1.504.880,00	400,97	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	8.095.526.918,00	7.288.609.856,00	-806.917.062,00	90,03	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.137.607.918,00	4.501.842.656,00	-635.765.262,00	87,62	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.994.000,00	3.696.000,00	-1.298.000,00	74,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.994.000,00	3.696.000,00	-1.298.000,00	74,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.994.000,00	3.696.000,00	-1.298.000,00	74,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.994.000,00	3.696.000,00	-1.298.000,00	74,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.449.719.418,00	3.116.725.806,00	-332.993.612,00	90,34	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.449.719.418,00	3.116.725.806,00	-332.993.612,00	90,34	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.449.719.418,00	3.116.725.806,00	-332.993.612,00	90,34	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.438.774.418,00	3.108.429.086,00	-330.345.332,00	90,39	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.945.000,00	8.296.720,00	-2.648.280,00	75,80	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	570.622.000,00	433.997.808,00	-136.624.192,00	76,05	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.256.000,00	11.746.000,00	-7.510.000,00	60,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.256.000,00	11.746.000,00	-7.510.000,00	60,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.256.000,00	11.746.000,00	-7.510.000,00	60,99	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	102.558.000,00	92.021.500,00	-10.536.500,00	89,72	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.558.000,00	92.021.500,00	-10.536.500,00	89,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.558.000,00	92.021.500,00	-10.536.500,00	89,72	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	36.961.000,00	31.651.000,00	-5.310.000,00	85,63	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.961.000,00	31.651.000,00	-5.310.000,00	85,63	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.961.000,00	31.651.000,00	-5.310.000,00	85,63	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	34.151.000,00	31.203.000,00	-2.948.000,00	91,36	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.151.000,00	31.203.000,00	-2.948.000,00	91,36	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.151.000,00	31.203.000,00	-2.948.000,00	91,36	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	67.588.000,00	42.872.500,00	-24.715.500,00	63,43	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.588.000,00	42.872.500,00	-24.715.500,00	63,43	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.588.000,00	42.872.500,00	-24.715.500,00	63,43	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.640.000,00	1.540.000,00	-4.100.000,00	27,30	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.640.000,00	1.540.000,00	-4.100.000,00	27,30	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	1.540.000,00	-4.100.000,00	27,30	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.468.000,00	4.242.000,00	-226.000,00	94,94	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.468.000,00	4.242.000,00	-226.000,00	94,94	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.468.000,00	4.242.000,00	-226.000,00	94,94	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	300.000.000,00	218.721.808,00	-81.278.192,00	72,90	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	218.721.808,00	-81.278.192,00	72,90	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	218.721.808,00	-81.278.192,00	72,90	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	364.035.000,00	281.350.000,00	-82.685.000,00	77,28	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	232.804.000,00	168.000.000,00	-64.804.000,00	72,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	232.804.000,00	168.000.000,00	-64.804.000,00	72,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.804.000,00	168.000.000,00	-64.804.000,00	72,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	131.231.000,00	113.350.000,00	-17.881.000,00	86,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	131.231.000,00	113.350.000,00	-17.881.000,00	86,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.231.000,00	113.350.000,00	-17.881.000,00	86,37	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	431.837.500,00	375.947.219,00	-55.890.281,00	87,05	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	38.987.500,00	34.687.500,00	-4.300.000,00	88,97	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.987.500,00	34.687.500,00	-4.300.000,00	88,97	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.987.500,00	34.687.500,00	-4.300.000,00	88,97	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	124.620.000,00	73.149.719,00	-51.470.281,00	58,69	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	124.620.000,00	73.149.719,00	-51.470.281,00	58,69	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.620.000,00	73.149.719,00	-51.470.281,00	58,69	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	268.230.000,00	268.110.000,00	-120.000,00	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	268.230.000,00	268.110.000,00	-120.000,00	99,95	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.230.000,00	268.110.000,00	-120.000,00	99,95	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	299.400.000,00	273.125.823,00	-26.274.177,00	91,22	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	233.420.000,00	210.466.823,00	-22.953.177,00	90,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	233.420.000,00	210.466.823,00	-22.953.177,00	90,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.420.000,00	210.466.823,00	-22.953.177,00	90,16	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	44.880.000,00	43.903.000,00	-977.000,00	97,82	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.880.000,00	43.903.000,00	-977.000,00	97,82	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.880.000,00	43.903.000,00	-977.000,00	97,82	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	21.100.000,00	18.756.000,00	-2.344.000,00	88,89	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.100.000,00	18.756.000,00	-2.344.000,00	88,89	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	18.756.000,00	-2.344.000,00	88,89	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.379.043.000,00	1.267.437.921,00	-111.605.079,00	91,90	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.379.043.000,00	1.267.437.921,00	-111.605.079,00	91,90	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	199.700.000,00	199.370.000,00	-330.000,00	99,83	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	199.700.000,00	199.370.000,00	-330.000,00	99,83	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.700.000,00	199.370.000,00	-330.000,00	99,83	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.179.343.000,00	1.068.067.921,00	-111.275.079,00	90,56	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.144.525.000,00	1.033.791.921,00	-110.733.079,00	90,32	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.144.525.000,00	1.033.791.921,00	-110.733.079,00	90,32	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	34.818.000,00	34.276.000,00	-542.000,00	98,44	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.818.000,00	34.276.000,00	-542.000,00	98,44	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.414.182.000,00	1.391.032.800,00	-23.149.200,00	98,36	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.01		MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	30.900.000,00	21.245.000,00	-9.655.000,00	68,75	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.01.0003		PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	30.900.000,00	21.245.000,00	-9.655.000,00	68,75	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.900.000,00	21.245.000,00	-9.655.000,00	68,75	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	21.245.000,00	-9.655.000,00	68,75	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	1.373.307.000,00	1.363.312.800,00	-9.994.200,00	99,27	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	76.470.000,00	74.011.000,00	-2.459.000,00	96,78	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.470.000,00	74.011.000,00	-2.459.000,00	96,78	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.470.000,00	74.011.000,00	-2.459.000,00	96,78	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	1.296.837.000,00	1.289.301.800,00	-7.535.200,00	99,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.296.837.000,00	1.289.301.800,00	-7.535.200,00	99,41	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.837.000,00	1.289.301.800,00	-7.535.200,00	99,41	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.03		PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.975.000,00	6.475.000,00	-3.500.000,00	64,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.03.0003		PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	9.975.000,00	6.475.000,00	-3.500.000,00	64,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.975.000,00	6.475.000,00	-3.500.000,00	64,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	6.475.000,00	-3.500.000,00	64,91	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.694.000,00	128.296.479,00	-36.397.521,00	77,89	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	164.694.000,00	128.296.479,00	-36.397.521,00	77,89	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	147.194.000,00	111.277.691,00	-35.916.309,00	75,59	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.173.000,00	69.027.691,00	-17.145.309,00	80,10	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.173.000,00	69.027.691,00	-17.145.309,00	80,10	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	61.021.000,00	42.250.000,00	-18.771.000,00	69,23	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.021.000,00	42.250.000,00	-18.771.000,00	69,23	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	17.500.000,00	17.018.788,00	-481.212,00	97,25	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.018.788,00	-481.212,00	97,25	
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.018.788,00	-481.212,00	97,25	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.095.000.000,00	1.150.547.380,00	55.547.380,00	105,07	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.095.000.000,00	1.150.547.380,00	55.547.380,00	105,07	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.094.500.000,00	1.148.542.500,00	54.042.500,00	104,93	
	3.31.3.30.0.00.14.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	2.004.880,00	1.504.880,00	400,97	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	533.363.000,00	374.516.508,00	-158.846.492,00	70,21	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	489.503.000,00	332.016.008,00	-157.486.992,00	67,82	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	489.503.000,00	332.016.008,00	-157.486.992,00	67,82	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	4.953.000,00	4.503.000,00	-450.000,00	90,91	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.953.000,00	4.503.000,00	-450.000,00	90,91	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.953.000,00	4.503.000,00	-450.000,00	90,91	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	43.208.000,00	41.329.800,00	-1.878.200,00	95,65	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.208.000,00	41.329.800,00	-1.878.200,00	95,65	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.208.000,00	41.329.800,00	-1.878.200,00	95,65	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	6.210.000,00	6.200.000,00	-10.000,00	99,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.210.000,00	6.200.000,00	-10.000,00	99,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	6.200.000,00	-10.000,00	99,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	422.002.000,00	270.321.208,00	-151.680.792,00	64,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	422.002.000,00	270.321.208,00	-151.680.792,00	64,05	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.002.000,00	270.321.208,00	-151.680.792,00	64,05	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0006		EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.130.000,00	9.662.000,00	-3.468.000,00	73,58	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.130.000,00	9.662.000,00	-3.468.000,00	73,58	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.130.000,00	9.662.000,00	-3.468.000,00	73,58	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.061.000,00	2.798.000,00	-263.000,00	91,40	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3.061.000,00	2.798.000,00	-263.000,00	91,40	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3.061.000,00	2.798.000,00	-263.000,00	91,40	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.061.000,00	2.798.000,00	-263.000,00	91,40	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.061.000,00	2.798.000,00	-263.000,00	91,40	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	40.799.000,00	39.702.500,00	-1.096.500,00	97,31	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.799.000,00	39.702.500,00	-1.096.500,00	97,31	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04.2.01.0002		DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS	40.799.000,00	39.702.500,00	-1.096.500,00	97,31	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.799.000,00	39.702.500,00	-1.096.500,00	97,31	
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.799.000,00	39.702.500,00	-1.096.500,00	97,31	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	40.700.000,00	59.900.000,00	19.200.000,00	147,17	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.700.000,00	59.900.000,00	19.200.000,00	147,17	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	40.700.000,00	59.900.000,00	19.200.000,00	147,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	48.060.558.164,00	44.726.876.326,00	-3.333.681.838,00	93,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.680.918.664,00	32.041.697.027,00	-2.639.221.637,00	92,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	125.000.000,00	122.826.626,00	-2.173.374,00	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	125.000.000,00	122.826.626,00	-2.173.374,00	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	122.826.626,00	-2.173.374,00	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	122.826.626,00	-2.173.374,00	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.589.519.520,00	14.656.175.171,00	-933.344.349,00	94,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.489.519.520,00	14.570.784.671,00	-918.734.849,00	94,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.489.519.520,00	14.570.784.671,00	-918.734.849,00	94,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.489.519.520,00	14.570.784.671,00	-918.734.849,00	94,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	75.000.000,00	67.780.500,00	-7.219.500,00	90,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	67.780.500,00	-7.219.500,00	90,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	67.780.500,00	-7.219.500,00	90,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	25.000.000,00	17.610.000,00	-7.390.000,00	70,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	17.610.000,00	-7.390.000,00	70,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	17.610.000,00	-7.390.000,00	70,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	37.327.000,00	31.837.000,00	-5.490.000,00	85,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	37.327.000,00	31.837.000,00	-5.490.000,00	85,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.327.000,00	31.837.000,00	-5.490.000,00	85,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.327.000,00	31.837.000,00	-5.490.000,00	85,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	285.773.800,00	232.778.990,00	-52.994.810,00	81,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	77.771.800,00	60.769.752,00	-17.002.048,00	78,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.771.800,00	60.769.752,00	-17.002.048,00	78,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.771.800,00	60.769.752,00	-17.002.048,00	78,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	208.002.000,00	172.009.238,00	-35.992.762,00	82,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	208.002.000,00	172.009.238,00	-35.992.762,00	82,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.002.000,00	172.009.238,00	-35.992.762,00	82,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.056.694.000,00	2.952.444.128,00	-104.249.872,00	96,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	237.973.000,00	230.391.000,00	-7.582.000,00	96,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	237.973.000,00	230.391.000,00	-7.582.000,00	96,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.973.000,00	230.391.000,00	-7.582.000,00	96,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	915.699.000,00	854.951.000,00	-60.748.000,00	93,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	915.699.000,00	854.951.000,00	-60.748.000,00	93,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.699.000,00	854.951.000,00	-60.748.000,00	93,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	158.272.000,00	123.853.900,00	-34.418.100,00	78,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	158.272.000,00	123.853.900,00	-34.418.100,00	78,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.272.000,00	123.853.900,00	-34.418.100,00	78,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	144.750.000,00	143.515.000,00	-1.235.000,00	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	144.750.000,00	143.515.000,00	-1.235.000,00	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.750.000,00	143.515.000,00	-1.235.000,00	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.600.000.000,00	1.599.733.228,00	-266.772,00	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.599.733.228,00	-266.772,00	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	1.599.733.228,00	-266.772,00	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.667.116.000,00	1.499.127.500,00	-167.988.500,00	89,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	991.680.000,00	847.000.000,00	-144.680.000,00	85,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	991.680.000,00	847.000.000,00	-144.680.000,00	85,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	991.680.000,00	847.000.000,00	-144.680.000,00	85,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	132.176.000,00	130.207.000,00	-1.969.000,00	98,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	132.176.000,00	130.207.000,00	-1.969.000,00	98,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.176.000,00	130.207.000,00	-1.969.000,00	98,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	543.260.000,00	521.920.500,00	-21.339.500,00	96,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.290.000,00	10.600.000,00	-690.000,00	93,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.290.000,00	10.600.000,00	-690.000,00	93,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	531.970.000,00	511.320.500,00	-20.649.500,00	96,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.970.000,00	511.320.500,00	-20.649.500,00	96,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.929.494.568,00	4.394.183.486,00	-535.311.082,00	89,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.013.400.000,00	896.369.988,00	-117.030.012,00	88,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.013.400.000,00	896.369.988,00	-117.030.012,00	88,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.400.000,00	896.369.988,00	-117.030.012,00	88,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	280.679.000,00	237.805.000,00	-42.874.000,00	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.679.000,00	237.805.000,00	-42.874.000,00	84,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.679.000,00	237.805.000,00	-42.874.000,00	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.635.415.568,00	3.260.008.498,00	-375.407.070,00	89,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.635.415.568,00	3.260.008.498,00	-375.407.070,00	89,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.635.415.568,00	3.260.008.498,00	-375.407.070,00	89,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.547.405.000,00	3.165.316.008,00	-382.088.992,00	89,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	599.890.000,00	407.107.500,00	-192.782.500,00	67,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	599.890.000,00	407.107.500,00	-192.782.500,00	67,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.890.000,00	407.107.500,00	-192.782.500,00	67,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.710.015.000,00	1.625.790.008,00	-84.224.992,00	95,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.710.015.000,00	1.625.790.008,00	-84.224.992,00	95,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.710.015.000,00	1.625.790.008,00	-84.224.992,00	95,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	20.000.000,00	17.500.000,00	-2.500.000,00	87,5	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.500.000,00	-2.500.000,00	87,5	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.500.000,00	-2.500.000,00	87,5	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	682.200.000,00	586.937.000,00	-95.263.000,00	86,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	682.200.000,00	586.937.000,00	-95.263.000,00	86,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.200.000,00	586.937.000,00	-95.263.000,00	86,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	342.710.000,00	336.331.000,00	-6.379.000,00	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	342.710.000,00	336.331.000,00	-6.379.000,00	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.710.000,00	336.331.000,00	-6.379.000,00	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	192.590.000,00	191.650.500,00	-939.500,00	99,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	192.590.000,00	191.650.500,00	-939.500,00	99,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.590.000,00	191.650.500,00	-939.500,00	99,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.111.378.276,00	898.972.068,00	-212.406.208,00	80,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	468.291.138,00	342.238.860,00	-126.052.278,00	73,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	468.291.138,00	342.238.860,00	-126.052.278,00	73,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	468.291.138,00	342.238.860,00	-126.052.278,00	73,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	213.258.350,00	167.200.000,00	-46.058.350,00	78,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	213.258.350,00	167.200.000,00	-46.058.350,00	78,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.258.350,00	167.200.000,00	-46.058.350,00	78,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	20.000.000,00	9.533.208,00	-10.466.792,00	47,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	9.533.208,00	-10.466.792,00	47,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.533.208,00	-10.466.792,00	47,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	409.828.788,00	380.000.000,00	-29.828.788,00	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	409.828.788,00	380.000.000,00	-29.828.788,00	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	409.828.788,00	380.000.000,00	-29.828.788,00	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	2.409.845.000,00	2.315.026.500,00	-94.818.500,00	96,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	338.938.000,00	336.994.000,00	-1.944.000,00	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	338.938.000,00	336.994.000,00	-1.944.000,00	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.938.000,00	336.994.000,00	-1.944.000,00	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	337.609.000,00	308.836.500,00	-28.772.500,00	91,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	337.609.000,00	308.836.500,00	-28.772.500,00	91,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.609.000,00	308.836.500,00	-28.772.500,00	91,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	1.733.298.000,00	1.669.196.000,00	-64.102.000,00	96,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.733.298.000,00	1.669.196.000,00	-64.102.000,00	96,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.298.000,00	1.669.196.000,00	-64.102.000,00	96,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	555.867.500,00	458.439.914,00	-97.427.586,00	82,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	143.520.000,00	101.543.306,00	-41.976.694,00	70,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	143.520.000,00	101.543.306,00	-41.976.694,00	70,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.520.000,00	101.543.306,00	-41.976.694,00	70,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	94.621.000,00	71.130.542,00	-23.490.458,00	75,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.621.000,00	71.130.542,00	-23.490.458,00	75,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.621.000,00	71.130.542,00	-23.490.458,00	75,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	257.144.500,00	239.862.810,00	-17.281.690,00	93,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	257.144.500,00	239.862.810,00	-17.281.690,00	93,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.144.500,00	239.862.810,00	-17.281.690,00	93,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	60.582.000,00	45.903.256,00	-14.678.744,00	75,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.582.000,00	45.903.256,00	-14.678.744,00	75,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.582.000,00	45.903.256,00	-14.678.744,00	75,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.365.498.000,00	1.314.569.636,00	-50.928.364,00	96,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	676.038.500,00	667.714.431,00	-8.324.069,00	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	676.038.500,00	667.714.431,00	-8.324.069,00	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.038.500,00	667.714.431,00	-8.324.069,00	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	440.742.000,00	410.736.785,00	-30.005.215,00	93,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	440.742.000,00	410.736.785,00	-30.005.215,00	93,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.742.000,00	410.736.785,00	-30.005.215,00	93,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	248.717.500,00	236.118.420,00	-12.599.080,00	94,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	248.717.500,00	236.118.420,00	-12.599.080,00	94,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.717.500,00	236.118.420,00	-12.599.080,00	94,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.960.279.000,00	11.352.050.477,00	-608.228.523,00	94,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	332.835.000,00	314.996.235,00	-17.838.765,00	94,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	279.467.500,00	266.367.735,00	-13.099.765,00	95,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	279.467.500,00	266.367.735,00	-13.099.765,00	95,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.467.500,00	266.367.735,00	-13.099.765,00	95,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	26.217.500,00	23.253.500,00	-2.964.000,00	88,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.217.500,00	23.253.500,00	-2.964.000,00	88,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.217.500,00	23.253.500,00	-2.964.000,00	88,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	27.150.000,00	25.375.000,00	-1.775.000,00	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.150.000,00	25.375.000,00	-1.775.000,00	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	25.375.000,00	-1.775.000,00	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.937.547.000,00	10.459.106.725,00	-478.440.275,00	95,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	9.194.547.000,00	8.928.913.685,00	-265.633.315,00	97,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.194.547.000,00	8.928.913.685,00	-265.633.315,00	97,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.204.547.000,00	5.938.913.685,00	-265.633.315,00	95,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.990.000.000,00	2.990.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	120.000.000,00	97.805.040,00	-22.194.960,00	81,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	97.805.040,00	-22.194.960,00	81,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	97.805.040,00	-22.194.960,00	81,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1.623.000.000,00	1.432.388.000,00	-190.612.000,00	88,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.623.000.000,00	1.432.388.000,00	-190.612.000,00	88,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.623.000.000,00	1.432.388.000,00	-190.612.000,00	88,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	586.358.500,00	476.213.577,00	-110.144.923,00	81,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	174.030.000,00	164.330.263,00	-9.699.737,00	94,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.030.000,00	164.330.263,00	-9.699.737,00	94,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.030.000,00	164.330.263,00	-9.699.737,00	94,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	149.018.500,00	82.681.039,00	-66.337.461,00	55,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.018.500,00	82.681.039,00	-66.337.461,00	55,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.018.500,00	82.681.039,00	-66.337.461,00	55,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	263.310.000,00	229.202.275,00	-34.107.725,00	87,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	263.310.000,00	229.202.275,00	-34.107.725,00	87,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.310.000,00	229.202.275,00	-34.107.725,00	87,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	103.538.500,00	101.733.940,00	-1.804.560,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	93.284.500,00	91.658.940,00	-1.625.560,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	93.284.500,00	91.658.940,00	-1.625.560,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.284.500,00	91.658.940,00	-1.625.560,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	10.254.000,00	10.075.000,00	-179.000,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.254.000,00	10.075.000,00	-179.000,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.254.000,00	10.075.000,00	-179.000,00	98,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.419.360.500,00	1.333.128.822,00	-86.231.678,00	93,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	349.991.500,00	327.882.897,00	-22.108.603,00	93,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	100.000.000,00	85.304.600,00	-14.695.400,00	85,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	85.304.600,00	-14.695.400,00	85,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	85.304.600,00	-14.695.400,00	85,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	199.998.000,00	198.972.797,00	-1.025.203,00	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.998.000,00	198.972.797,00	-1.025.203,00	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.998.000,00	198.972.797,00	-1.025.203,00	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	49.993.500,00	43.605.500,00	-6.388.000,00	87,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.993.500,00	43.605.500,00	-6.388.000,00	87,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.993.500,00	43.605.500,00	-6.388.000,00	87,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	144.514.000,00	128.491.100,00	-16.022.900,00	88,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	94.067.500,00	88.067.500,00	-6.000.000,00	93,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.067.500,00	88.067.500,00	-6.000.000,00	93,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.067.500,00	88.067.500,00	-6.000.000,00	93,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	50.446.500,00	40.423.600,00	-10.022.900,00	80,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.446.500,00	40.423.600,00	-10.022.900,00	80,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.446.500,00	40.423.600,00	-10.022.900,00	80,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	864.895.000,00	820.544.825,00	-44.350.175,00	94,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	401.997.500,00	385.046.855,00	-16.950.645,00	95,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	401.997.500,00	385.046.855,00	-16.950.645,00	95,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.997.500,00	385.046.855,00	-16.950.645,00	95,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	263.339.500,00	255.266.732,00	-8.072.768,00	96,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	263.339.500,00	255.266.732,00	-8.072.768,00	96,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.339.500,00	255.266.732,00	-8.072.768,00	96,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	199.558.000,00	180.231.238,00	-19.326.762,00	90,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.558.000,00	180.231.238,00	-19.326.762,00	90,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.558.000,00	180.231.238,00	-19.326.762,00	90,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	59.960.000,00	56.210.000,00	-3.750.000,00	93,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	49.960.000,00	46.210.000,00	-3.750.000,00	92,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.960.000,00	46.210.000,00	-3.750.000,00	92,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000,00	46.210.000,00	-3.750.000,00	92,49	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000			5	BELANJA DAERAH	45.607.385.026,00	39.809.963.956,00	-5.797.421.070,00	87,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.182.820.026,00	21.593.302.403,00	-1.589.517.623,00	93,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.765.049.402,00	2.739.034.863,00	-26.014.539,00	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.765.049.402,00	2.739.034.863,00	-26.014.539,00	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.765.049.402,00	2.739.034.863,00	-26.014.539,00	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.765.049.402,00	2.739.034.863,00	-26.014.539,00	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	634.292.000,00	531.482.477,00	-102.809.523,00	83,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	112.292.000,00	89.680.000,00	-22.612.000,00	79,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1		BELANJA OPERASI	112.292.000,00	89.680.000,00	-22.612.000,00	79,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	112.292.000,00	89.680.000,00	-22.612.000,00	79,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	75.000.000,00	32.502.829,00	-42.497.171,00	43,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1		BELANJA OPERASI	75.000.000,00	32.502.829,00	-42.497.171,00	43,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	32.502.829,00	-42.497.171,00	43,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	447.000.000,00	409.299.648,00	-37.700.352,00	91,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1		BELANJA OPERASI	447.000.000,00	409.299.648,00	-37.700.352,00	91,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	447.000.000,00	409.299.648,00	-37.700.352,00	91,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.221.154.000,00	1.788.923.063,00	-432.230.937,00	80,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	49.983.000,00	47.684.500,00	-2.298.500,00	95,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	49.983.000,00	47.684.500,00	-2.298.500,00	95,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	49.983.000,00	47.684.500,00	-2.298.500,00	95,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	746.618.000,00	692.121.000,00	-54.497.000,00	92,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	746.618.000,00	692.121.000,00	-54.497.000,00	92,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	746.618.000,00	692.121.000,00	-54.497.000,00	92,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	81.950.000,00	64.196.000,00	-17.754.000,00	78,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	81.950.000,00	64.196.000,00	-17.754.000,00	78,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	81.950.000,00	64.196.000,00	-17.754.000,00	78,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	731.849.000,00	535.129.000,00	-196.720.000,00	73,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	731.849.000,00	535.129.000,00	-196.720.000,00	73,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.849.000,00	535.129.000,00	-196.720.000,00	73,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	156.963.000,00	121.553.105,00	-35.409.895,00	77,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	156.963.000,00	121.553.105,00	-35.409.895,00	77,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.963.000,00	121.553.105,00	-35.409.895,00	77,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	61.796.000,00	30.689.000,00	-31.107.000,00	49,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	61.796.000,00	30.689.000,00	-31.107.000,00	49,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.796.000,00	30.689.000,00	-31.107.000,00	49,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	350.000.000,00	255.797.958,00	-94.202.042,00	73,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	255.797.958,00	-94.202.042,00	73,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	255.797.958,00	-94.202.042,00	73,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	41.995.000,00	41.752.500,00	-242.500,00	99,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	41.995.000,00	41.752.500,00	-242.500,00	99,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.995.000,00	41.752.500,00	-242.500,00	99,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	743.472.000,00	713.644.516,00	-29.827.484,00	95,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	289.364.500,00	287.250.016,00	-2.114.484,00	99,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	289.364.500,00	287.250.016,00	-2.114.484,00	99,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.364.500,00	287.250.016,00	-2.114.484,00	99,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	389.633.500,00	362.198.000,00	-27.435.500,00	92,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	389.633.500,00	362.198.000,00	-27.435.500,00	92,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.633.500,00	362.198.000,00	-27.435.500,00	92,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	64.474.000,00	64.196.500,00	-277.500,00	99,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	64.474.000,00	64.196.500,00	-277.500,00	99,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.474.000,00	64.196.500,00	-277.500,00	99,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.539.770.716,00	1.197.753.453,00	-342.017.263,00	77,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.000.000,00	9.500.000,00	-5.500.000,00	63,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	9.500.000,00	-5.500.000,00	63,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.500.000,00	-5.500.000,00	63,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	330.100.000,00	255.448.399,00	-74.651.601,00	77,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	330.100.000,00	255.448.399,00	-74.651.601,00	77,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.100.000,00	255.448.399,00	-74.651.601,00	77,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.194.670.716,00	932.805.054,00	-261.865.662,00	78,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.194.670.716,00	932.805.054,00	-261.865.662,00	78,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.194.670.716,00	932.805.054,00	-261.865.662,00	78,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	993.039.908,00	691.387.708,00	-301.652.200,00	69,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	39.327.600,00	-922.400,00	97,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	39.327.600,00	-922.400,00	97,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	39.327.600,00	-922.400,00	97,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	483.014.908,00	300.062.700,00	-182.952.208,00	62,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	483.014.908,00	300.062.700,00	-182.952.208,00	62,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.014.908,00	300.062.700,00	-182.952.208,00	62,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	125.838.000,00	69.099.500,00	-56.738.500,00	54,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	125.838.000,00	69.099.500,00	-56.738.500,00	54,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.838.000,00	69.099.500,00	-56.738.500,00	54,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	252.425.000,00	212.183.950,00	-40.241.050,00	84,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.090.000,00	149.296.000,00	-794.000,00	99,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.090.000,00	149.296.000,00	-794.000,00	99,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	102.335.000,00	62.887.950,00	-39.447.050,00	61,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.335.000,00	62.887.950,00	-39.447.050,00	61,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	91.512.000,00	70.713.958,00	-20.798.042,00	77,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	38.807.000,00	31.971.430,00	-6.835.570,00	82,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.807.000,00	31.971.430,00	-6.835.570,00	82,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	52.705.000,00	38.742.528,00	-13.962.472,00	73,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.705.000,00	38.742.528,00	-13.962.472,00	73,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	14.116.087.000,00	13.773.985.823,00	-342.101.177,00	97,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	13.259.247.000,00	12.974.362.076,00	-284.884.924,00	97,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.259.247.000,00	12.974.362.076,00	-284.884.924,00	97,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.259.247.000,00	12.974.362.076,00	-284.884.924,00	97,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	468.340.000,00	448.750.000,00	-19.590.000,00	95,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	468.340.000,00	448.750.000,00	-19.590.000,00	95,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.340.000,00	448.750.000,00	-19.590.000,00	95,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	388.500.000,00	350.873.747,00	-37.626.253,00	90,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	388.500.000,00	350.873.747,00	-37.626.253,00	90,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.500.000,00	350.873.747,00	-37.626.253,00	90,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	169.955.000,00	157.090.500,00	-12.864.500,00	92,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	1.002.000,00	995.000,00	-7.000,00	99,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.000,00	995.000,00	-7.000,00	99,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.000,00	995.000,00	-7.000,00	99,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002		FASILITASI FRAKSI DPRD	96.458.000,00	88.331.500,00	-8.126.500,00	91,57	

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
							ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1		BELANJA OPERASI		96.458.000,00	88.331.500,00	-8.126.500,00	91,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		96.458.000,00	88.331.500,00	-8.126.500,00	91,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003			FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD		72.495.000,00	67.764.000,00	-4.731.000,00	93,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1		BELANJA OPERASI		72.495.000,00	67.764.000,00	-4.731.000,00	93,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		72.495.000,00	67.764.000,00	-4.731.000,00	93,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		22.424.565.000,00	18.216.661.553,00	-4.207.903.447,00	81,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01			PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD		1.373.963.000,00	1.269.787.576,00	-104.175.424,00	92,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002			PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH		1.333.963.000,00	1.265.521.576,00	-68.441.424,00	94,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI		1.333.963.000,00	1.265.521.576,00	-68.441.424,00	94,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		1.333.963.000,00	1.265.521.576,00	-68.441.424,00	94,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005			PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD		40.000.000,00	4.266.000,00	-35.734.000,00	10,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1		BELANJA OPERASI		40.000.000,00	4.266.000,00	-35.734.000,00	10,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		40.000.000,00	4.266.000,00	-35.734.000,00	10,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02			PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN		88.512.500,00	59.147.800,00	-29.364.700,00	66,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001			PEMBAHASAN KUA DAN PPAS		20.420.000,00	14.937.500,00	-5.482.500,00	73,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI		20.420.000,00	14.937.500,00	-5.482.500,00	73,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		20.420.000,00	14.937.500,00	-5.482.500,00	73,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002			PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS		20.420.000,00	8.017.000,00	-12.403.000,00	39,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI		20.420.000,00	8.017.000,00	-12.403.000,00	39,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		20.420.000,00	8.017.000,00	-12.403.000,00	39,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003			PEMBAHASAN APBD		20.420.000,00	20.124.800,00	-295.200,00	98,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1		BELANJA OPERASI		20.420.000,00	20.124.800,00	-295.200,00	98,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		20.420.000,00	20.124.800,00	-295.200,00	98,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004			PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN		20.420.000,00	11.416.000,00	-9.004.000,00	55,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1		BELANJA OPERASI		20.420.000,00	11.416.000,00	-9.004.000,00	55,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		20.420.000,00	11.416.000,00	-9.004.000,00	55,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006			PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD		6.832.500,00	4.652.500,00	-2.180.000,00	68,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1		BELANJA OPERASI		6.832.500,00	4.652.500,00	-2.180.000,00	68,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		6.832.500,00	4.652.500,00	-2.180.000,00	68,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03			PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		13.123.016.000,00	10.713.612.780,00	-2.409.403.220,00	81,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001			PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM		3.928.740.500,00	3.285.437.385,00	-643.303.115,00	83,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1		BELANJA OPERASI		3.928.740.500,00	3.285.437.385,00	-643.303.115,00	83,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		3.928.740.500,00	3.285.437.385,00	-643.303.115,00	83,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002			PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR		65.500.000,00	55.160.226,00	-10.339.774,00	84,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1		BELANJA OPERASI		65.500.000,00	55.160.226,00	-10.339.774,00	84,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	55.160.226,00	-10.339.774,00	84,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.277.049.500,00	3.293.600.173,00	-983.449.327,00	77,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.277.049.500,00	3.293.600.173,00	-983.449.327,00	77,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.277.049.500,00	3.293.600.173,00	-983.449.327,00	77,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	3.371.000.000,00	2.634.873.264,00	-736.126.736,00	78,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.371.000.000,00	2.634.873.264,00	-736.126.736,00	78,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.371.000.000,00	2.634.873.264,00	-736.126.736,00	78,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	701.173.500,00	675.213.005,00	-25.960.495,00	96,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	701.173.500,00	675.213.005,00	-25.960.495,00	96,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.173.500,00	675.213.005,00	-25.960.495,00	96,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007		PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	477.000.000,00	474.454.613,00	-2.545.387,00	99,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	477.000.000,00	474.454.613,00	-2.545.387,00	99,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.000.000,00	474.454.613,00	-2.545.387,00	99,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	302.552.500,00	294.874.114,00	-7.678.386,00	97,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	302.552.500,00	294.874.114,00	-7.678.386,00	97,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.552.500,00	294.874.114,00	-7.678.386,00	97,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.162.233.500,00	1.126.883.652,00	-1.035.349.848,00	52,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001		ORIENTASI DPRD	650.000.000,00	539.753.152,00	-110.246.848,00	83,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	539.753.152,00	-110.246.848,00	83,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	539.753.152,00	-110.246.848,00	83,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	750.000.000,00	38.393.000,00	-711.607.000,00	5,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	38.393.000,00	-711.607.000,00	5,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	38.393.000,00	-711.607.000,00	5,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	217.500.000,00	145.800.000,00	-71.700.000,00	67,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	217.500.000,00	145.800.000,00	-71.700.000,00	67,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.500.000,00	145.800.000,00	-71.700.000,00	67,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	270.000.000,00	213.750.000,00	-56.250.000,00	79,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	213.750.000,00	-56.250.000,00	79,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	213.750.000,00	-56.250.000,00	79,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	119.937.500,00	90.187.500,00	-29.750.000,00	75,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	119.937.500,00	90.187.500,00	-29.750.000,00	75,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.937.500,00	90.187.500,00	-29.750.000,00	75,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	9.796.000,00	0,00	-9.796.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.796.000,00	0,00	-9.796.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.796.000,00	0,00	-9.796.000,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	145.000.000,00	99.000.000,00	-46.000.000,00	68,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	99.000.000,00	-46.000.000,00	68,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	99.000.000,00	-46.000.000,00	68,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	563.350.000,00	353.412.200,00	-209.937.800,00	62,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	563.350.000,00	353.412.200,00	-209.937.800,00	62,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	563.350.000,00	353.412.200,00	-209.937.800,00	62,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.350.000,00	353.412.200,00	-209.937.800,00	62,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	5.113.490.000,00	4.693.817.545,00	-419.672.455,00	91,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	4.900.000.000,00	4.560.637.745,00	-339.362.255,00	93,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.900.000.000,00	4.560.637.745,00	-339.362.255,00	93,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000.000,00	4.560.637.745,00	-339.362.255,00	93,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	31.896.000,00	22.650.000,00	-9.246.000,00	71,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.896.000,00	22.650.000,00	-9.246.000,00	71,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.896.000,00	22.650.000,00	-9.246.000,00	71,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	181.594.000,00	110.529.800,00	-71.064.200,00	60,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.594.000,00	110.529.800,00	-71.064.200,00	60,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.594.000,00	110.529.800,00	-71.064.200,00	60,86	

LAMPIRAN 1.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	8.477.825.758,00	7.138.631.280,00	-1.339.194.478,00	84,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.857.678.258,00	5.848.354.579,00	-1.009.323.679,00	85,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.735.696.262,00	4.158.311.148,00	-577.385.114,00	87,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.735.696.262,00	4.158.311.148,00	-577.385.114,00	87,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.735.696.262,00	4.158.311.148,00	-577.385.114,00	87,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.735.696.262,00	4.158.311.148,00	-577.385.114,00	87,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	105.960.000,00	44.385.978,00	-61.574.022,00	41,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	105.960.000,00	44.385.978,00	-61.574.022,00	41,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	105.960.000,00	44.385.978,00	-61.574.022,00	41,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.960.000,00	44.385.978,00	-61.574.022,00	41,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	726.277.000,00	692.113.872,00	-34.163.128,00	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.823.000,00	15.509.000,00	-2.314.000,00	87,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.823.000,00	15.509.000,00	-2.314.000,00	87,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.823.000,00	15.509.000,00	-2.314.000,00	87,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.823.000,00	29.029.500,00	-1.793.500,00	94,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.823.000,00	29.029.500,00	-1.793.500,00	94,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.823.000,00	29.029.500,00	-1.793.500,00	94,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	52.293.000,00	43.272.000,00	-9.021.000,00	82,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.293.000,00	43.272.000,00	-9.021.000,00	82,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.293.000,00	43.272.000,00	-9.021.000,00	82,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.457.000,00	62.133.000,00	-14.324.000,00	81,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.457.000,00	62.133.000,00	-14.324.000,00	81,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.457.000,00	62.133.000,00	-14.324.000,00	81,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.956.000,00	16.242.650,00	-5.713.350,00	73,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.956.000,00	16.242.650,00	-5.713.350,00	73,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.956.000,00	16.242.650,00	-5.713.350,00	73,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	525.000.000,00	524.222.722,00	-777.278,00	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	525.000.000,00	524.222.722,00	-777.278,00	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	524.222.722,00	-777.278,00	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1.925.000,00	1.705.000,00	-220.000,00	88,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.925.000,00	1.705.000,00	-220.000,00	88,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	1.705.000,00	-220.000,00	88,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	996.614.996,00	727.702.457,00	-268.912.539,00	73,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	27.284.000,00	21.976.400,00	-5.307.600,00	80,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.284.000,00	21.976.400,00	-5.307.600,00	80,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.284.000,00	21.976.400,00	-5.307.600,00	80,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	132.000.000,00	102.547.057,00	-29.452.943,00	77,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	102.547.057,00	-29.452.943,00	77,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	102.547.057,00	-29.452.943,00	77,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	837.330.996,00	603.179.000,00	-234.151.996,00	72,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	837.330.996,00	603.179.000,00	-234.151.996,00	72,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.330.996,00	603.179.000,00	-234.151.996,00	72,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	289.860.000,00	222.571.124,00	-67.288.876,00	76,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	39.615.197,00	-634.803,00	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	39.615.197,00	-634.803,00	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	39.615.197,00	-634.803,00	98,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	134.650.000,00	117.099.927,00	-17.550.073,00	86,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.650.000,00	117.099.927,00	-17.550.073,00	86,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.650.000,00	117.099.927,00	-17.550.073,00	86,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.080.000,00	37.800.000,00	-2.280.000,00	94,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.080.000,00	37.800.000,00	-2.280.000,00	94,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.080.000,00	37.800.000,00	-2.280.000,00	94,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	74.320.000,00	28.056.000,00	-46.264.000,00	37,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	74.320.000,00	28.056.000,00	-46.264.000,00	37,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.320.000,00	28.056.000,00	-46.264.000,00	37,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	502.114.500,00	453.878.913,00	-48.235.587,00	90,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	417.311.000,00	377.986.326,00	-39.324.674,00	90,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	13.942.000,00	13.942.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.942.000,00	13.942.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.942.000,00	13.942.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	37.369.000,00	33.643.488,00	-3.725.512,00	90,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.369.000,00	33.643.488,00	-3.725.512,00	90,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.369.000,00	33.643.488,00	-3.725.512,00	90,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	361.800.000,00	326.200.838,00	-35.599.162,00	90,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	361.800.000,00	326.200.838,00	-35.599.162,00	90,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.800.000,00	326.200.838,00	-35.599.162,00	90,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	84.803.500,00	75.892.587,00	-8.910.913,00	89,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	84.803.500,00	75.892.587,00	-8.910.913,00	89,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.803.500,00	75.892.587,00	-8.910.913,00	89,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.803.500,00	75.892.587,00	-8.910.913,00	89,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.118.033.000,00	836.397.788,00	-281.635.212,00	74,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	668.654.000,00	468.322.725,00	-200.331.275,00	70,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	96.207.000,00	70.521.564,00	-25.685.436,00	73,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.207.000,00	70.521.564,00	-25.685.436,00	73,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.207.000,00	70.521.564,00	-25.685.436,00	73,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	53.847.000,00	40.211.600,00	-13.635.400,00	74,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.847.000,00	40.211.600,00	-13.635.400,00	74,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.847.000,00	40.211.600,00	-13.635.400,00	74,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	20.754.000,00	17.347.000,00	-3.407.000,00	83,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.754.000,00	17.347.000,00	-3.407.000,00	83,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.754.000,00	17.347.000,00	-3.407.000,00	83,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	50.034.000,00	31.770.355,00	-18.263.645,00	63,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.034.000,00	31.770.355,00	-18.263.645,00	63,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.034.000,00	31.770.355,00	-18.263.645,00	63,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	124.182.000,00	95.584.483,00	-28.597.517,00	76,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	124.182.000,00	95.584.483,00	-28.597.517,00	76,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.182.000,00	95.584.483,00	-28.597.517,00	76,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	104.224.000,00	71.065.299,00	-33.158.701,00	68,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	104.224.000,00	71.065.299,00	-33.158.701,00	68,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.224.000,00	71.065.299,00	-33.158.701,00	68,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	36.503.000,00	18.343.300,00	-18.159.700,00	50,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.503.000,00	18.343.300,00	-18.159.700,00	50,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.503.000,00	18.343.300,00	-18.159.700,00	50,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	182.903.000,00	123.479.124,00	-59.423.876,00	67,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	182.903.000,00	123.479.124,00	-59.423.876,00	67,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.903.000,00	123.479.124,00	-59.423.876,00	67,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	212.134.000,00	167.764.043,00	-44.369.957,00	79,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	84.560.000,00	62.277.416,00	-22.282.584,00	73,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.560.000,00	62.277.416,00	-22.282.584,00	73,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.560.000,00	62.277.416,00	-22.282.584,00	73,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	18.031.000,00	13.660.000,00	-4.371.000,00	75,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.031.000,00	13.660.000,00	-4.371.000,00	75,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.031.000,00	13.660.000,00	-4.371.000,00	75,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	10.240.000,00	9.741.000,00	-499.000,00	95,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.240.000,00	9.741.000,00	-499.000,00	95,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	9.741.000,00	-499.000,00	95,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	21.859.000,00	19.140.000,00	-2.719.000,00	87,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.859.000,00	19.140.000,00	-2.719.000,00	87,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.859.000,00	19.140.000,00	-2.719.000,00	87,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	33.328.000,00	25.557.127,00	-7.770.873,00	76,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.328.000,00	25.557.127,00	-7.770.873,00	76,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.328.000,00	25.557.127,00	-7.770.873,00	76,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	14.361.000,00	8.959.500,00	-5.401.500,00	62,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.361.000,00	8.959.500,00	-5.401.500,00	62,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.361.000,00	8.959.500,00	-5.401.500,00	62,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	15.117.000,00	14.325.000,00	-792.000,00	94,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.117.000,00	14.325.000,00	-792.000,00	94,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.117.000,00	14.325.000,00	-792.000,00	94,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	14.638.000,00	14.104.000,00	-534.000,00	96,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.638.000,00	14.104.000,00	-534.000,00	96,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.638.000,00	14.104.000,00	-534.000,00	96,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	237.245.000,00	200.311.020,00	-36.933.980,00	84,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	70.266.000,00	58.252.597,00	-12.013.403,00	82,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.266.000,00	58.252.597,00	-12.013.403,00	82,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.266.000,00	58.252.597,00	-12.013.403,00	82,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	14.619.000,00	13.830.000,00	-789.000,00	94,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.619.000,00	13.830.000,00	-789.000,00	94,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.619.000,00	13.830.000,00	-789.000,00	94,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	10.976.000,00	9.254.000,00	-1.722.000,00	84,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.976.000,00	9.254.000,00	-1.722.000,00	84,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.976.000,00	9.254.000,00	-1.722.000,00	84,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	8.539.000,00	7.580.000,00	-959.000,00	88,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.539.000,00	7.580.000,00	-959.000,00	88,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.539.000,00	7.580.000,00	-959.000,00	88,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	92.583.000,00	75.408.423,00	-17.174.577,00	81,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	92.583.000,00	75.408.423,00	-17.174.577,00	81,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.583.000,00	75.408.423,00	-17.174.577,00	81,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	9.099.000,00	5.662.000,00	-3.437.000,00	62,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.099.000,00	5.662.000,00	-3.437.000,00	62,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.099.000,00	5.662.000,00	-3.437.000,00	62,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	12.339.000,00	12.124.000,00	-215.000,00	98,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.339.000,00	12.124.000,00	-215.000,00	98,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.339.000,00	12.124.000,00	-215.000,00	98,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	18.824.000,00	18.200.000,00	-624.000,00	96,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.824.000,00	18.200.000,00	-624.000,00	96,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.824.000,00	18.200.000,00	-624.000,00	96,68	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	951.254.000,00	790.304.272,00	-160.949.728,00	83,08	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	951.254.000,00	790.304.272,00	-160.949.728,00	83,08	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	32.291.000,00	25.783.000,00	-6.508.000,00	79,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	32.291.000,00	25.783.000,00	-6.508.000,00	79,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.291.000,00	25.783.000,00	-6.508.000,00	79,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.291.000,00	25.783.000,00	-6.508.000,00	79,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	231.563.000,00	203.687.273,00	-27.875.727,00	87,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0002		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	231.563.000,00	203.687.273,00	-27.875.727,00	87,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	231.563.000,00	203.687.273,00	-27.875.727,00	87,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.563.000,00	203.687.273,00	-27.875.727,00	87,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	687.400.000,00	560.833.999,00	-126.566.001,00	81,58	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	290.334.000,00	194.924.215,00	-95.409.785,00	67,13	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	290.334.000,00	194.924.215,00	-95.409.785,00	67,13	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.334.000,00	194.924.215,00	-95.409.785,00	67,13	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004		SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	311.371.000,00	292.702.784,00	-18.668.216,00	94,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	311.371.000,00	292.702.784,00	-18.668.216,00	94,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.371.000,00	292.702.784,00	-18.668.216,00	94,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0005		FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	85.695.000,00	73.207.000,00	-12.488.000,00	85,42	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.695.000,00	73.207.000,00	-12.488.000,00	85,42	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.695.000,00	73.207.000,00	-12.488.000,00	85,42	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	826.246.382.781,00	803.068.102.884,86	-23.178.279.896,14	97,19	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.212.464.690,00	56.514.627.619,86	-697.837.070,14	98,78	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	3.262.521.843,50	107,81	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	207.052.515,00	177.052.515,00	690,17	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	-5.184.274,63	99,89	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.616.962.000,00	6.484.734.845,99	-4.132.227.154,01	61,07	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	-21.712.814.839,00	97,17	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	-11.440.261.166,00	98,39	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	-10.272.553.673,00	80,54	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000,00	482.122.013,00	-767.627.987,00	38,57	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000,00	0,00	-249.750.000,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	-517.877.987,00	48,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	115.400.416.899,00	112.189.017.122,84	-3.211.399.776,16	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.940.269.185,00	10.090.439.846,00	-849.829.339,00	92,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.175.000,00	17.202.300,00	-3.972.700,00	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.917.000,00	10.265.400,00	-2.651.600,00	79,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.917.000,00	10.265.400,00	-2.651.600,00	79,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.917.000,00	10.265.400,00	-2.651.600,00	79,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.258.000,00	6.936.900,00	-1.321.100,00	84,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.258.000,00	6.936.900,00	-1.321.100,00	84,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.258.000,00	6.936.900,00	-1.321.100,00	84,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.923.291.021,00	8.308.374.621,00	-614.916.400,00	93,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.895.670.021,00	8.285.133.371,00	-610.536.650,00	93,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.895.670.021,00	8.285.133.371,00	-610.536.650,00	93,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.587.796.938,00	7.996.232.941,00	-591.563.997,00	93,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.873.083,00	288.900.430,00	-18.972.653,00	93,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	27.621.000,00	23.241.250,00	-4.379.750,00	84,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.621.000,00	23.241.250,00	-4.379.750,00	84,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.621.000,00	23.241.250,00	-4.379.750,00	84,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	64.154.000,00	49.817.196,00	-14.336.804,00	77,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32.712.000,00	23.627.860,00	-9.084.140,00	72,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.712.000,00	23.627.860,00	-9.084.140,00	72,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.712.000,00	23.627.860,00	-9.084.140,00	72,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.442.000,00	26.189.336,00	-5.252.664,00	83,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	31.442.000,00	26.189.336,00	-5.252.664,00	83,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.442.000,00	26.189.336,00	-5.252.664,00	83,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	840.396.000,00	757.395.379,00	-83.000.621,00	90,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.069.000,00	12.722.000,00	-1.347.000,00	90,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.069.000,00	12.722.000,00	-1.347.000,00	90,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.069.000,00	12.722.000,00	-1.347.000,00	90,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.727.000,00	8.580.000,00	-8.147.000,00	51,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.727.000,00	8.580.000,00	-8.147.000,00	51,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.727.000,00	8.580.000,00	-8.147.000,00	51,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	69.447.000,00	41.265.000,00	-28.182.000,00	59,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	69.447.000,00	41.265.000,00	-28.182.000,00	59,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.447.000,00	41.265.000,00	-28.182.000,00	59,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.549.000,00	29.230.300,00	-4.318.700,00	87,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.549.000,00	29.230.300,00	-4.318.700,00	87,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.549.000,00	29.230.300,00	-4.318.700,00	87,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.522.000,00	27.787.450,00	-7.734.550,00	78,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.522.000,00	27.787.450,00	-7.734.550,00	78,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.522.000,00	27.787.450,00	-7.734.550,00	78,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	600.000.000,00	583.882.816,00	-16.117.184,00	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	583.882.816,00	-16.117.184,00	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	583.882.816,00	-16.117.184,00	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	26.690.000,00	24.350.000,00	-2.340.000,00	91,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	26.690.000,00	24.350.000,00	-2.340.000,00	91,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.690.000,00	24.350.000,00	-2.340.000,00	91,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	44.392.000,00	29.577.813,00	-14.814.187,00	66,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	44.392.000,00	29.577.813,00	-14.814.187,00	66,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.392.000,00	29.577.813,00	-14.814.187,00	66,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	215.418.000,00	175.137.000,00	-40.281.000,00	81,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	77.510.000,00	74.780.000,00	-2.730.000,00	96,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	77.510.000,00	74.780.000,00	-2.730.000,00	96,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.510.000,00	74.780.000,00	-2.730.000,00	96,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	137.908.000,00	100.357.000,00	-37.551.000,00	72,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	137.908.000,00	100.357.000,00	-37.551.000,00	72,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.908.000,00	100.357.000,00	-37.551.000,00	72,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	419.763.332,00	391.154.457,00	-28.608.875,00	93,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	71.524.000,00	66.310.000,00	-5.214.000,00	92,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.524.000,00	66.310.000,00	-5.214.000,00	92,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.524.000,00	66.310.000,00	-5.214.000,00	92,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.750.000,00	177.656.957,00	-23.093.043,00	88,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.750.000,00	177.656.957,00	-23.093.043,00	88,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.750.000,00	177.656.957,00	-23.093.043,00	88,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	147.489.332,00	147.187.500,00	-301.832,00	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	147.489.332,00	147.187.500,00	-301.832,00	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.489.332,00	147.187.500,00	-301.832,00	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	456.071.832,00	391.358.893,00	-64.712.939,00	85,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	70.000.458,00	67.639.800,00	-2.360.658,00	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.458,00	67.639.800,00	-2.360.658,00	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.458,00	67.639.800,00	-2.360.658,00	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	292.871.374,00	235.321.655,00	-57.549.719,00	80,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	292.871.374,00	235.321.655,00	-57.549.719,00	80,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.871.374,00	235.321.655,00	-57.549.719,00	80,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	44.720.000,00	42.890.938,00	-1.829.062,00	95,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	44.720.000,00	42.890.938,00	-1.829.062,00	95,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.720.000,00	42.890.938,00	-1.829.062,00	95,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	48.480.000,00	45.506.500,00	-2.973.500,00	93,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	48.480.000,00	45.506.500,00	-2.973.500,00	93,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.480.000,00	45.506.500,00	-2.973.500,00	93,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	102.052.140.178,00	100.029.948.273,84	-2.022.191.904,16	98,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	579.414.500,00	526.370.021,00	-53.044.479,00	90,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	46.000.000,00	43.239.750,00	-2.760.250,00	93,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	43.239.750,00	-2.760.250,00	93,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	43.239.750,00	-2.760.250,00	93,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	42.911.000,00	39.434.000,00	-3.477.000,00	91,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.911.000,00	39.434.000,00	-3.477.000,00	91,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.911.000,00	39.434.000,00	-3.477.000,00	91,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	127.923.000,00	121.783.591,00	-6.139.409,00	95,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	127.923.000,00	121.783.591,00	-6.139.409,00	95,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.923.000,00	121.783.591,00	-6.139.409,00	95,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	110.078.000,00	95.475.000,00	-14.603.000,00	86,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	110.078.000,00	95.475.000,00	-14.603.000,00	86,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.078.000,00	95.475.000,00	-14.603.000,00	86,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	3.764.000,00	3.683.500,00	-80.500,00	97,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.764.000,00	3.683.500,00	-80.500,00	97,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.764.000,00	3.683.500,00	-80.500,00	97,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	5.071.000,00	4.996.000,00	-75.000,00	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.071.000,00	4.996.000,00	-75.000,00	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.071.000,00	4.996.000,00	-75.000,00	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	63.645.000,00	50.632.298,00	-13.012.702,00	79,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	63.645.000,00	50.632.298,00	-13.012.702,00	79,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.645.000,00	50.632.298,00	-13.012.702,00	79,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	69.159.500,00	59.562.332,00	-9.597.168,00	86,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	69.159.500,00	59.562.332,00	-9.597.168,00	86,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.159.500,00	59.562.332,00	-9.597.168,00	86,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	110.863.000,00	107.563.550,00	-3.299.450,00	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.863.000,00	107.563.550,00	-3.299.450,00	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.863.000,00	107.563.550,00	-3.299.450,00	97,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	548.635.700,00	471.239.402,00	-77.396.298,00	85,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	270.264.700,00	232.458.109,00	-37.806.591,00	86,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	270.264.700,00	232.458.109,00	-37.806.591,00	86,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.264.700,00	232.458.109,00	-37.806.591,00	86,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	37.171.000,00	32.875.000,00	-4.296.000,00	88,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.171.000,00	32.875.000,00	-4.296.000,00	88,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.171.000,00	32.875.000,00	-4.296.000,00	88,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	122.802.000,00	103.623.793,00	-19.178.207,00	84,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	122.802.000,00	103.623.793,00	-19.178.207,00	84,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.802.000,00	103.623.793,00	-19.178.207,00	84,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	85.042.000,00	80.219.500,00	-4.822.500,00	94,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	85.042.000,00	80.219.500,00	-4.822.500,00	94,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.042.000,00	80.219.500,00	-4.822.500,00	94,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SPZD DENGAN INSTANSI TERKAIT	33.356.000,00	22.063.000,00	-11.293.000,00	66,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.356.000,00	22.063.000,00	-11.293.000,00	66,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.356.000,00	22.063.000,00	-11.293.000,00	66,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	407.104.000,00	295.548.794,00	-111.555.206,00	72,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	108.075.000,00	60.290.954,00	-47.784.046,00	55,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.075.000,00	60.290.954,00	-47.784.046,00	55,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.075.000,00	60.290.954,00	-47.784.046,00	55,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	50.079.000,00	44.970.640,00	-5.108.360,00	89,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.079.000,00	44.970.640,00	-5.108.360,00	89,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.079.000,00	44.970.640,00	-5.108.360,00	89,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	148.789.000,00	116.165.000,00	-32.624.000,00	78,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	148.789.000,00	116.165.000,00	-32.624.000,00	78,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.789.000,00	116.165.000,00	-32.624.000,00	78,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	67.803.000,00	55.929.700,00	-11.873.300,00	82,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.803.000,00	55.929.700,00	-11.873.300,00	82,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.803.000,00	55.929.700,00	-11.873.300,00	82,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	32.358.000,00	18.192.500,00	-14.165.500,00	56,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	32.358.000,00	18.192.500,00	-14.165.500,00	56,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.358.000,00	18.192.500,00	-14.165.500,00	56,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100.516.985.978,00	98.736.790.056,84	-1.780.195.921,16	98,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	-323.305,00	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	-323.305,00	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	-323.305,00	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGLOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.000.000.000,00	559.132.832,00	-440.867.168,00	55,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	559.132.832,00	-440.867.168,00	55,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	-440.867.168,00	55,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGLOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	-1.339.005.448,16	78,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	-1.339.005.448,16	78,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	-1.339.005.448,16	78,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	734.551.536,00	641.567.900,00	-92.983.636,00	87,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	734.551.536,00	641.567.900,00	-92.983.636,00	87,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	81.971.500,00	66.159.100,00	-15.812.400,00	80,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.971.500,00	66.159.100,00	-15.812.400,00	80,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.971.500,00	66.159.100,00	-15.812.400,00	80,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	49.114.000,00	44.497.000,00	-4.617.000,00	90,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.114.000,00	44.497.000,00	-4.617.000,00	90,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.114.000,00	44.497.000,00	-4.617.000,00	90,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	57.589.500,00	45.486.167,00	-12.103.333,00	78,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	57.589.500,00	45.486.167,00	-12.103.333,00	78,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.589.500,00	45.486.167,00	-12.103.333,00	78,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	274.070.536,00	246.202.121,00	-27.868.415,00	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	274.070.536,00	246.202.121,00	-27.868.415,00	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.070.536,00	246.202.121,00	-27.868.415,00	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	232.483.000,00	200.531.512,00	-31.951.488,00	86,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	232.483.000,00	200.531.512,00	-31.951.488,00	86,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.483.000,00	200.531.512,00	-31.951.488,00	86,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	39.323.000,00	38.692.000,00	-631.000,00	98,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.323.000,00	38.692.000,00	-631.000,00	98,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.323.000,00	38.692.000,00	-631.000,00	98,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.673.456.000,00	1.427.061.103,00	-246.394.897,00	85,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.673.456.000,00	1.427.061.103,00	-246.394.897,00	85,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	86.180.500,00	53.158.927,00	-33.021.573,00	61,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	86.180.500,00	53.158.927,00	-33.021.573,00	61,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.180.500,00	53.158.927,00	-33.021.573,00	61,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	43.112.000,00	40.200.000,00	-2.912.000,00	93,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	43.112.000,00	40.200.000,00	-2.912.000,00	93,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.112.000,00	40.200.000,00	-2.912.000,00	93,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	199.349.500,00	168.399.577,00	-30.949.923,00	84,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	199.349.500,00	168.399.577,00	-30.949.923,00	84,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.349.500,00	168.399.577,00	-30.949.923,00	84,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	35.802.000,00	24.587.424,00	-11.214.576,00	68,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.802.000,00	24.587.424,00	-11.214.576,00	68,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.802.000,00	24.587.424,00	-11.214.576,00	68,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	329.843.000,00	251.051.413,00	-78.791.587,00	76,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	329.843.000,00	251.051.413,00	-78.791.587,00	76,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.843.000,00	251.051.413,00	-78.791.587,00	76,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	37.086.000,00	29.062.000,00	-8.024.000,00	78,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	37.086.000,00	29.062.000,00	-8.024.000,00	78,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.086.000,00	29.062.000,00	-8.024.000,00	78,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	76.620.000,00	58.305.000,00	-18.315.000,00	76,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	76.620.000,00	58.305.000,00	-18.315.000,00	76,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.620.000,00	58.305.000,00	-18.315.000,00	76,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	15.463.000,00	13.131.000,00	-2.332.000,00	84,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	15.463.000,00	13.131.000,00	-2.332.000,00	84,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.463.000,00	13.131.000,00	-2.332.000,00	84,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	850.000.000,00	789.165.762,00	-60.834.238,00	92,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	789.165.762,00	-60.834.238,00	92,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	789.165.762,00	-60.834.238,00	92,84	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	-395.599.255,00	99,70	
	5.02.0.00.0.00.01.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	-395.599.255,00	99,71	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	104.400.745,00	-395.599.255,00	20,88	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.435.169.610,00	7.100.584.781,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.833.189.610,00	5.649.957.862,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.559.000,00	65.769.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	64.508.000,00	64.009.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.508.000,00	64.009.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.508.000,00	64.009.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.051.000,00	1.760.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.051.000,00	1.760.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.051.000,00	1.760.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.042.797.794,00	4.035.008.606,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.033.542.794,00	4.026.686.606,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.033.542.794,00	4.026.686.606,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.033.542.794,00	4.026.686.606,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	9.255.000,00	8.322.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.255.000,00	8.322.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.255.000,00	8.322.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	73.788.000,00	62.952.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	73.788.000,00	62.952.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	73.788.000,00	62.952.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.788.000,00	62.952.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	629.654.000,00	614.113.287,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.680.000,00	19.044.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.680.000,00	19.044.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.680.000,00	19.044.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	34.314.000,00	27.449.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.314.000,00	27.449.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.314.000,00	27.449.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	73.160.000,00	67.312.100,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	73.160.000,00	67.312.100,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.160.000,00	67.312.100,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.500.000,00	1.340.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.340.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.340.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	500.000.000,00	498.968.187,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	498.968.187,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	498.968.187,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	122.637.000,00	120.450.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	122.637.000,00	120.450.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	122.637.000,00	120.450.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.637.000,00	120.450.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	511.546.635,00	433.269.769,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	91.850.000,00	91.850.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.850.000,00	91.850.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.850.000,00	91.850.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	192.240.000,00	183.122.769,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	192.240.000,00	183.122.769,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.240.000,00	183.122.769,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	227.456.635,00	158.297.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	227.456.635,00	158.297.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.456.635,00	158.297.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	386.207.181,00	318.395.200,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	82.303.727,00	68.256.700,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.303.727,00	68.256.700,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.303.727,00	68.256.700,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	237.677.454,00	186.521.300,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.677.454,00	186.521.300,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.677.454,00	186.521.300,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	66.226.000,00	63.617.200,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	66.226.000,00	63.617.200,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.226.000,00	63.617.200,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.601.980.000,00	1.450.626.919,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	313.130.500,00	257.201.900,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	4.221.000,00	4.156.500,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.221.000,00	4.156.500,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.221.000,00	4.156.500,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	244.512.000,00	195.367.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	244.512.000,00	195.367.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.512.000,00	195.367.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	7.348.000,00	5.460.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.348.000,00	5.460.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.348.000,00	5.460.000,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	57.049.500,00	52.218.400,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	57.049.500,00	52.218.400,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.049.500,00	52.218.400,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	274.923.500,00	240.912.930,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	23.906.000,00	17.284.800,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.906.000,00	17.284.800,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.906.000,00	17.284.800,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	69.118.000,00	54.608.860,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.118.000,00	54.608.860,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.118.000,00	54.608.860,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	181.899.500,00	169.019.270,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	181.899.500,00	169.019.270,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.899.500,00	169.019.270,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	953.420.000,00	896.733.129,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	7.119.000,00	6.448.700,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.119.000,00	6.448.700,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.119.000,00	6.448.700,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	367.349.000,00	332.122.430,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	367.349.000,00	332.122.430,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.349.000,00	332.122.430,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	578.952.000,00	558.161.999,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	578.952.000,00	558.161.999,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.952.000,00	558.161.999,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	60.506.000,00	55.778.960,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	60.506.000,00	55.778.960,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.506.000,00	55.778.960,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.506.000,00	55.778.960,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	922.595.000,00	860.206.119,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	922.595.000,00	860.206.119,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	47.767.000,00	38.825.574,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.767.000,00	38.825.574,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.767.000,00	38.825.574,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.767.000,00	38.825.574,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	874.828.000,00	821.380.545,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005		PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA	675.251.000,00	645.144.045,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	675.251.000,00	645.144.045,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.251.000,00	645.144.045,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	199.577.000,00	176.236.500,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.577.000,00	176.236.500,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.577.000,00	176.236.500,00

JPATEN BELITUNG TIMUR
 NAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BIAYAAN



BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-334.584.829,00	95,49	
-183.231.748,00	96,85	
-790.000,00	98,81	
-499.000,00	99,22	
-499.000,00	99,22	
-499.000,00	99,22	
-499.000,00	99,22	
-291.000,00	85,81	
-291.000,00	85,81	
-291.000,00	85,81	
-7.789.188,00	99,80	
-6.856.188,00	99,83	
-6.856.188,00	99,83	
-6.856.188,00	99,83	
-933.000,00	89,91	
-933.000,00	89,91	
-933.000,00	89,91	
-10.836.000,00	85,31	
-10.836.000,00	85,31	
-10.836.000,00	85,31	
-10.836.000,00	85,31	
-15.540.713,00	97,53	
-1.636.000,00	92,08	
-1.636.000,00	92,08	
-1.636.000,00	92,08	

BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-6.865.000,00	79,99	
-6.865.000,00	79,99	
-6.865.000,00	79,99	
-5.847.900,00	92,00	
-5.847.900,00	92,00	
-5.847.900,00	92,00	
-160.000,00	89,33	
-160.000,00	89,33	
-160.000,00	89,33	
-1.031.813,00	99,79	
-1.031.813,00	99,79	
-1.031.813,00	99,79	
-2.187.000,00	98,21	
-2.187.000,00	98,21	
-2.187.000,00	98,21	
-2.187.000,00	98,21	
-78.276.866,00	84,69	
0,00	100,00	
0,00	100,00	
0,00	100,00	
-9.117.231,00	95,25	
-9.117.231,00	95,25	
-9.117.231,00	95,25	
-69.159.635,00	69,59	
-69.159.635,00	69,59	
-69.159.635,00	69,59	
-67.811.981,00	82,44	
-14.047.027,00	82,93	
-14.047.027,00	82,93	
-14.047.027,00	82,93	
-51.156.154,00	78,47	
-51.156.154,00	78,47	
-51.156.154,00	78,47	
-2.608.800,00	96,06	

BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-2.608.800,00	96,06	
-2.608.800,00	96,06	
-151.353.081,00	90,55	
-55.928.600,00	82,13	
-64.500,00	98,47	
-64.500,00	98,47	
-64.500,00	98,47	
-49.145.000,00	79,90	
-49.145.000,00	79,90	
-49.145.000,00	79,90	
-1.888.000,00	74,30	
-1.888.000,00	74,30	
-1.888.000,00	74,30	
-4.831.100,00	91,53	
-4.831.100,00	91,53	
-4.831.100,00	91,53	
-34.010.570,00	87,62	
-6.621.200,00	72,30	
-6.621.200,00	72,30	
-6.621.200,00	72,30	
-14.509.140,00	79,00	
-14.509.140,00	79,00	
-14.509.140,00	79,00	
-12.880.230,00	92,91	
-12.880.230,00	92,91	
-12.880.230,00	92,91	
-56.686.871,00	94,05	
-670.300,00	90,58	
-670.300,00	90,58	
-670.300,00	90,58	
-35.226.570,00	90,41	
-35.226.570,00	90,41	
-35.226.570,00	90,41	
-20.790.001,00	96,40	

BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
(Rp)	(%)	
-20.790.001,00	96,40	
-20.790.001,00	96,40	
-4.727.040,00	92,18	
-4.727.040,00	92,18	
-4.727.040,00	92,18	
-4.727.040,00	92,18	
-4.727.040,00	92,18	
-62.388.881,00	93,23	
-62.388.881,00	93,23	
-8.941.426,00	81,28	
-8.941.426,00	81,28	
-8.941.426,00	81,28	
-8.941.426,00	81,28	
-53.447.455,00	93,89	
-30.106.955,00	95,54	
-30.106.955,00	95,54	
-30.106.955,00	95,54	
-23.340.500,00	88,30	
-23.340.500,00	88,30	
-23.340.500,00	88,30	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	-1.021.516.785,00	92,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.049.637.322,00	11.375.880.983,00	-673.756.339,00	94,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.282.996.322,00	8.906.991.655,00	-376.004.667,00	95,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.282.996.322,00	8.906.991.655,00	-376.004.667,00	95,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.282.996.322,00	8.906.991.655,00	-376.004.667,00	95,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.282.996.322,00	8.906.991.655,00	-376.004.667,00	95,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	528.668.000,00	464.690.518,00	-63.977.482,00	87,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	41.650.000,00	39.690.000,00	-1.960.000,00	95,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.650.000,00	39.690.000,00	-1.960.000,00	95,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	39.690.000,00	-1.960.000,00	95,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	487.018.000,00	425.000.518,00	-62.017.482,00	87,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	487.018.000,00	425.000.518,00	-62.017.482,00	87,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.018.000,00	425.000.518,00	-62.017.482,00	87,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	987.357.000,00	866.215.296,00	-121.141.704,00	87,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.323.000,00	14.642.500,00	-1.680.500,00	89,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.323.000,00	14.642.500,00	-1.680.500,00	89,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.323.000,00	14.642.500,00	-1.680.500,00	89,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	222.319.000,00	195.304.000,00	-27.015.000,00	87,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.068.000,00	72.205.000,00	-26.863.000,00	72,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.068.000,00	72.205.000,00	-26.863.000,00	72,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	123.251.000,00	123.099.000,00	-152.000,00	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.251.000,00	123.099.000,00	-152.000,00	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	41.591.000,00	37.184.500,00	-4.406.500,00	89,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.369.000,00	25.469.500,00	-3.899.500,00	86,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.369.000,00	25.469.500,00	-3.899.500,00	86,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.222.000,00	11.715.000,00	-507.000,00	95,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.222.000,00	11.715.000,00	-507.000,00	95,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	159.962.000,00	130.911.000,00	-29.051.000,00	81,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	159.962.000,00	130.911.000,00	-29.051.000,00	81,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.962.000,00	130.911.000,00	-29.051.000,00	81,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.162.000,00	41.004.850,00	-6.157.150,00	86,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.162.000,00	41.004.850,00	-6.157.150,00	86,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.162.000,00	41.004.850,00	-6.157.150,00	86,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	500.000.000,00	447.168.446,00	-52.831.554,00	89,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	447.168.446,00	-52.831.554,00	89,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	447.168.446,00	-52.831.554,00	89,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	378.285.000,00	374.700.000,00	-3.585.000,00	99,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	55.395.000,00	53.700.000,00	-1.695.000,00	96,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	55.395.000,00	53.700.000,00	-1.695.000,00	96,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.395.000,00	53.700.000,00	-1.695.000,00	96,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	276.700.000,00	276.200.000,00	-500.000,00	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	276.700.000,00	276.200.000,00	-500.000,00	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	276.700.000,00	276.200.000,00	-500.000,00	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	46.190.000,00	44.800.000,00	-1.390.000,00	96,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	682.000,00	0,00	-682.000,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.000,00	0,00	-682.000,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	45.508.000,00	44.800.000,00	-708.000,00	98,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.508.000,00	44.800.000,00	-708.000,00	98,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	606.431.000,00	535.001.664,00	-71.429.336,00	88,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	96.366.000,00	79.141.500,00	-17.224.500,00	82,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.366.000,00	79.141.500,00	-17.224.500,00	82,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.366.000,00	79.141.500,00	-17.224.500,00	82,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	143.420.000,00	124.355.164,00	-19.064.836,00	86,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.420.000,00	124.355.164,00	-19.064.836,00	86,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.420.000,00	124.355.164,00	-19.064.836,00	86,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.890.000,00	4.880.000,00	-9.010.000,00	35,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.890.000,00	4.880.000,00	-9.010.000,00	35,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.890.000,00	4.880.000,00	-9.010.000,00	35,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	352.755.000,00	326.625.000,00	-26.130.000,00	92,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	352.755.000,00	326.625.000,00	-26.130.000,00	92,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.755.000,00	326.625.000,00	-26.130.000,00	92,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	265.900.000,00	228.281.850,00	-37.618.150,00	85,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	238.900.000,00	202.006.850,00	-36.893.150,00	84,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	238.900.000,00	202.006.850,00	-36.893.150,00	84,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.900.000,00	202.006.850,00	-36.893.150,00	84,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	27.000.000,00	26.275.000,00	-725.000,00	97,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.275.000,00	-725.000,00	97,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.275.000,00	-725.000,00	97,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.076.424.000,00	819.117.520,00	-257.306.480,00	76,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	860.414.000,00	642.402.500,00	-218.011.500,00	74,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	46.920.000,00	28.290.000,00	-18.630.000,00	60,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.920.000,00	28.290.000,00	-18.630.000,00	60,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.920.000,00	28.290.000,00	-18.630.000,00	60,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	271.350.000,00	248.820.000,00	-22.530.000,00	91,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	271.350.000,00	248.820.000,00	-22.530.000,00	91,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.350.000,00	248.820.000,00	-22.530.000,00	91,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	120.030.000,00	91.230.000,00	-28.800.000,00	76,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	120.030.000,00	91.230.000,00	-28.800.000,00	76,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.030.000,00	91.230.000,00	-28.800.000,00	76,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	87.600.000,00	64.320.000,00	-23.280.000,00	73,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.600.000,00	64.320.000,00	-23.280.000,00	73,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.600.000,00	64.320.000,00	-23.280.000,00	73,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	155.390.000,00	114.720.000,00	-40.670.000,00	73,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	155.390.000,00	114.720.000,00	-40.670.000,00	73,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.390.000,00	114.720.000,00	-40.670.000,00	73,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	179.124.000,00	95.022.500,00	-84.101.500,00	53,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	179.124.000,00	95.022.500,00	-84.101.500,00	53,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.124.000,00	95.022.500,00	-84.101.500,00	53,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	216.010.000,00	176.715.020,00	-39.294.980,00	81,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	123.390.000,00	103.175.020,00	-20.214.980,00	83,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.390.000,00	103.175.020,00	-20.214.980,00	83,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.390.000,00	103.175.020,00	-20.214.980,00	83,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	92.620.000,00	73.540.000,00	-19.080.000,00	79,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.620.000,00	73.540.000,00	-19.080.000,00	79,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.620.000,00	73.540.000,00	-19.080.000,00	79,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	448.781.000,00	358.327.034,00	-90.453.966,00	79,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	448.781.000,00	358.327.034,00	-90.453.966,00	79,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	86.430.000,00	38.370.000,00	-48.060.000,00	44,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.430.000,00	38.370.000,00	-48.060.000,00	44,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.430.000,00	38.370.000,00	-48.060.000,00	44,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	362.351.000,00	319.957.034,00	-42.393.966,00	88,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	362.351.000,00	319.957.034,00	-42.393.966,00	88,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.351.000,00	319.957.034,00	-42.393.966,00	88,30	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Manggar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	16.000.000,00	15.790.000,00	-210.000,00	98,68	
	7.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.000.000,00	15.790.000,00	-210.000,00	98,68	
	7.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	16.000.000,00	15.790.000,00	-210.000,00	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.788.594.079,00	3.418.433.239,00	-370.160.840,00	90,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.009.417.600,00	2.677.056.230,00	-332.361.370,00	88,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.523.000,00	3.491.000,00	-32.000,00	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.523.000,00	3.491.000,00	-32.000,00	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.523.000,00	3.491.000,00	-32.000,00	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.523.000,00	3.491.000,00	-32.000,00	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.976.943.100,00	1.717.025.624,00	-259.917.476,00	86,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.976.943.100,00	1.717.025.624,00	-259.917.476,00	86,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.976.943.100,00	1.717.025.624,00	-259.917.476,00	86,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.976.943.100,00	1.717.025.624,00	-259.917.476,00	86,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	55,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	327.915.000,00	278.982.936,00	-48.932.064,00	85,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.200.000,00	19.488.500,00	-14.711.500,00	56,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.200.000,00	19.488.500,00	-14.711.500,00	56,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	19.488.500,00	-14.711.500,00	56,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.751.000,00	37.353.000,00	-6.398.000,00	85,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.751.000,00	37.353.000,00	-6.398.000,00	85,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.751.000,00	37.353.000,00	-6.398.000,00	85,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.702.000,00	11.557.000,00	-3.145.000,00	78,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.702.000,00	11.557.000,00	-3.145.000,00	78,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.702.000,00	11.557.000,00	-3.145.000,00	78,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66.262.000,00	44.479.500,00	-21.782.500,00	67,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.262.000,00	44.479.500,00	-21.782.500,00	67,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.262.000,00	44.479.500,00	-21.782.500,00	67,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	6.424.000,00	-2.576.000,00	71,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	6.424.000,00	-2.576.000,00	71,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.424.000,00	-2.576.000,00	71,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	150.000.000,00	149.680.936,00	-319.064,00	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.680.936,00	-319.064,00	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.680.936,00	-319.064,00	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	484.416.500,00	481.087.820,00	-3.328.680,00	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	98.880.000,00	96.100.320,00	-2.779.680,00	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.880.000,00	96.100.320,00	-2.779.680,00	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.880.000,00	96.100.320,00	-2.779.680,00	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	384.536.500,00	383.987.500,00	-549.000,00	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	384.536.500,00	383.987.500,00	-549.000,00	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.536.500,00	383.987.500,00	-549.000,00	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	206.620.000,00	190.968.850,00	-15.651.150,00	92,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.300.000,00	34.675.050,00	-624.950,00	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.300.000,00	34.675.050,00	-624.950,00	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	34.675.050,00	-624.950,00	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	128.460.000,00	113.453.800,00	-15.006.200,00	88,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.460.000,00	113.453.800,00	-15.006.200,00	88,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.460.000,00	113.453.800,00	-15.006.200,00	88,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.340.000,00	33.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.340.000,00	33.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.340.000,00	33.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	9.520.000,00	9.500.000,00	-20.000,00	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.520.000,00	9.500.000,00	-20.000,00	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	9.500.000,00	-20.000,00	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.082.000,00	44.491.000,00	-7.591.000,00	85,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	34.995.000,00	28.380.000,00	-6.615.000,00	81,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	34.995.000,00	28.380.000,00	-6.615.000,00	81,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.995.000,00	28.380.000,00	-6.615.000,00	81,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.995.000,00	28.380.000,00	-6.615.000,00	81,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	17.087.000,00	16.111.000,00	-976.000,00	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	17.087.000,00	16.111.000,00	-976.000,00	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.087.000,00	16.111.000,00	-976.000,00	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.087.000,00	16.111.000,00	-976.000,00	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	594.646.479,00	566.727.109,00	-27.919.370,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	594.646.479,00	566.727.109,00	-27.919.370,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	594.646.479,00	566.727.109,00	-27.919.370,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	594.646.479,00	566.727.109,00	-27.919.370,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.646.479,00	566.727.109,00	-27.919.370,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.613.000,00	56.167.000,00	-446.000,00	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.613.000,00	56.167.000,00	-446.000,00	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	42.956.000,00	42.760.000,00	-196.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.956.000,00	42.760.000,00	-196.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.956.000,00	42.760.000,00	-196.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	13.657.000,00	13.407.000,00	-250.000,00	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.657.000,00	13.407.000,00	-250.000,00	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.657.000,00	13.407.000,00	-250.000,00	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.955.000,00	13.825.000,00	-130.000,00	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	13.955.000,00	13.825.000,00	-130.000,00	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	13.955.000,00	13.825.000,00	-130.000,00	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.955.000,00	13.825.000,00	-130.000,00	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.955.000,00	13.825.000,00	-130.000,00	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.880.000,00	60.166.900,00	-1.713.100,00	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.880.000,00	60.166.900,00	-1.713.100,00	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	50.200.000,00	48.486.900,00	-1.713.100,00	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.200.000,00	48.486.900,00	-1.713.100,00	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	48.486.900,00	-1.713.100,00	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Gantung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.500.000,00	18.510.000,00	3.010.000,00	119,41	
	7.01.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.500.000,00	18.510.000,00	3.010.000,00	119,41	
	7.01.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.500.000,00	18.510.000,00	3.010.000,00	119,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.591.562.006,00	3.464.023.935,00	-127.538.071,00	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.034.278.006,00	2.926.982.935,00	-107.295.071,00	96,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.999.226.800,00	1.959.798.976,00	-39.427.824,00	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.999.226.800,00	1.959.798.976,00	-39.427.824,00	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.999.226.800,00	1.959.798.976,00	-39.427.824,00	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.999.226.800,00	1.959.798.976,00	-39.427.824,00	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	61.334.000,00	49.076.000,00	-12.258.000,00	80,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	24.800.000,00	23.840.000,00	-960.000,00	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.800.000,00	23.840.000,00	-960.000,00	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	23.840.000,00	-960.000,00	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.034.000,00	7.186.000,00	-6.848.000,00	51,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.034.000,00	7.186.000,00	-6.848.000,00	51,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.034.000,00	7.186.000,00	-6.848.000,00	51,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.500.000,00	18.050.000,00	-4.450.000,00	80,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	18.050.000,00	-4.450.000,00	80,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	18.050.000,00	-4.450.000,00	80,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	314.485.000,00	291.306.480,00	-23.178.520,00	92,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.921.000,00	13.495.000,00	-6.426.000,00	67,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.921.000,00	13.495.000,00	-6.426.000,00	67,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.921.000,00	13.495.000,00	-6.426.000,00	67,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	61.168.000,00	50.540.000,00	-10.628.000,00	82,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.688.000,00	22.162.000,00	-8.526.000,00	72,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.688.000,00	22.162.000,00	-8.526.000,00	72,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.480.000,00	28.378.000,00	-2.102.000,00	93,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.480.000,00	28.378.000,00	-2.102.000,00	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.976.000,00	3.717.000,00	-2.259.000,00	62,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.976.000,00	3.717.000,00	-2.259.000,00	62,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.976.000,00	3.717.000,00	-2.259.000,00	62,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	61.420.000,00	61.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.420.000,00	61.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	61.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.000.000,00	15.699.500,00	-300.500,00	98,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.699.500,00	-300.500,00	98,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.699.500,00	-300.500,00	98,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	150.000.000,00	146.434.980,00	-3.565.020,00	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	146.434.980,00	-3.565.020,00	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	146.434.980,00	-3.565.020,00	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	68.692.000,00	64.254.000,00	-4.438.000,00	93,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	68.692.000,00	64.254.000,00	-4.438.000,00	93,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	68.692.000,00	64.254.000,00	-4.438.000,00	93,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.692.000,00	64.254.000,00	-4.438.000,00	93,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	483.210.206,00	468.441.479,00	-14.768.727,00	96,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.897.000,00	5.447.000,00	-10.450.000,00	34,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.897.000,00	5.447.000,00	-10.450.000,00	34,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.897.000,00	5.447.000,00	-10.450.000,00	34,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	64.800.000,00	63.239.479,00	-1.560.521,00	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.800.000,00	63.239.479,00	-1.560.521,00	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	63.239.479,00	-1.560.521,00	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	392.513.206,00	389.755.000,00	-2.758.206,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	392.513.206,00	389.755.000,00	-2.758.206,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.513.206,00	389.755.000,00	-2.758.206,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.330.000,00	94.106.000,00	-13.224.000,00	87,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	107.330.000,00	94.106.000,00	-13.224.000,00	87,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.330.000,00	94.106.000,00	-13.224.000,00	87,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.330.000,00	94.106.000,00	-13.224.000,00	87,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.984.000,00	10.110.000,00	-874.000,00	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	10.984.000,00	10.110.000,00	-874.000,00	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.984.000,00	10.110.000,00	-874.000,00	92,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.984.000,00	10.110.000,00	-874.000,00	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.984.000,00	10.110.000,00	-874.000,00	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	519.862.000,00	501.357.000,00	-18.505.000,00	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	519.862.000,00	501.357.000,00	-18.505.000,00	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	519.862.000,00	501.357.000,00	-18.505.000,00	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	501.387.000,00	484.557.000,00	-16.830.000,00	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.387.000,00	484.557.000,00	-16.830.000,00	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.475.000,00	16.800.000,00	-1.675.000,00	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.475.000,00	16.800.000,00	-1.675.000,00	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.468.000,00	6.150.000,00	-318.000,00	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.468.000,00	6.150.000,00	-318.000,00	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	6.468.000,00	6.150.000,00	-318.000,00	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.468.000,00	6.150.000,00	-318.000,00	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.468.000,00	6.150.000,00	-318.000,00	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.975.000,00	9.474.000,00	-501.000,00	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	9.975.000,00	9.474.000,00	-501.000,00	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	9.975.000,00	9.474.000,00	-501.000,00	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.975.000,00	9.474.000,00	-501.000,00	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.474.000,00	-501.000,00	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.995.000,00	9.950.000,00	-45.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.995.000,00	9.950.000,00	-45.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	9.995.000,00	9.950.000,00	-45.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.995.000,00	9.950.000,00	-45.000,00	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.000,00	9.950.000,00	-45.000,00	99,54	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Kelapa Kampit

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	27.500.000,00	35.395.000,00	7.895.000,00	128,70	
	7.01.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.500.000,00	35.395.000,00	7.895.000,00	128,70	
	7.01.0.00.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	27.500.000,00	35.395.000,00	7.895.000,00	128,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	3.600.542.644,00	3.381.113.761,00	-219.428.883,00	93,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.144.174.644,00	2.940.927.201,00	-203.247.443,00	93,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.193.074.000,00	2.043.757.705,00	-149.316.295,00	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.193.074.000,00	2.043.757.705,00	-149.316.295,00	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.193.074.000,00	2.043.757.705,00	-149.316.295,00	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.193.074.000,00	2.043.757.705,00	-149.316.295,00	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	153.957.380,00	136.949.196,00	-17.008.184,00	88,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.107.000,00	18.611.000,00	-1.496.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.107.000,00	18.611.000,00	-1.496.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.107.000,00	18.611.000,00	-1.496.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.919.820,00	12.889.000,00	-2.030.820,00	86,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.919.820,00	12.889.000,00	-2.030.820,00	86,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.919.820,00	12.889.000,00	-2.030.820,00	86,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.474.560,00	24.300.000,00	-9.174.560,00	72,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.474.560,00	24.300.000,00	-9.174.560,00	72,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.474.560,00	24.300.000,00	-9.174.560,00	72,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.456.000,00	8.445.000,00	-2.011.000,00	80,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.456.000,00	8.445.000,00	-2.011.000,00	80,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.456.000,00	8.445.000,00	-2.011.000,00	80,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	75.000.000,00	72.704.196,00	-2.295.804,00	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.704.196,00	-2.295.804,00	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.704.196,00	-2.295.804,00	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	592.593.264,00	572.527.693,00	-20.065.571,00	96,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.539.600,00	14.955.750,00	-3.583.850,00	80,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.539.600,00	14.955.750,00	-3.583.850,00	80,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.539.600,00	14.955.750,00	-3.583.850,00	80,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.400.000,00	52.446.943,00	-15.953.057,00	76,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.400.000,00	52.446.943,00	-15.953.057,00	76,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	52.446.943,00	-15.953.057,00	76,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	505.653.664,00	505.125.000,00	-528.664,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	505.653.664,00	505.125.000,00	-528.664,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.653.664,00	505.125.000,00	-528.664,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.050.000,00	182.192.607,00	-16.857.393,00	91,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	146.970.000,00	134.108.607,00	-12.861.393,00	91,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.970.000,00	134.108.607,00	-12.861.393,00	91,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.970.000,00	134.108.607,00	-12.861.393,00	91,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	24.480.000,00	24.344.000,00	-136.000,00	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.480.000,00	24.344.000,00	-136.000,00	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.344.000,00	-136.000,00	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	27.600.000,00	23.740.000,00	-3.860.000,00	86,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	23.740.000,00	-3.860.000,00	86,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	23.740.000,00	-3.860.000,00	86,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.697.000,00	10.139.000,00	-558.000,00	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.043.000,00	9.875.000,00	-168.000,00	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	10.043.000,00	9.875.000,00	-168.000,00	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.043.000,00	9.875.000,00	-168.000,00	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.043.000,00	9.875.000,00	-168.000,00	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	654.000,00	264.000,00	-390.000,00	40,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	654.000,00	264.000,00	-390.000,00	40,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	654.000,00	264.000,00	-390.000,00	40,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.000,00	264.000,00	-390.000,00	40,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	348.552.000,00	344.120.960,00	-4.431.040,00	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	348.552.000,00	344.120.960,00	-4.431.040,00	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	348.552.000,00	344.120.960,00	-4.431.040,00	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	348.552.000,00	344.120.960,00	-4.431.040,00	98,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.552.000,00	344.120.960,00	-4.431.040,00	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.489.000,00	12.677.000,00	-3.812.000,00	76,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.489.000,00	12.677.000,00	-3.812.000,00	76,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	8.632.000,00	5.804.000,00	-2.828.000,00	67,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.632.000,00	5.804.000,00	-2.828.000,00	67,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.632.000,00	5.804.000,00	-2.828.000,00	67,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	7.857.000,00	6.873.000,00	-984.000,00	87,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.857.000,00	6.873.000,00	-984.000,00	87,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.857.000,00	6.873.000,00	-984.000,00	87,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.711.000,00	8.550.000,00	-161.000,00	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	8.711.000,00	8.550.000,00	-161.000,00	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	8.711.000,00	8.550.000,00	-161.000,00	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.711.000,00	8.550.000,00	-161.000,00	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.711.000,00	8.550.000,00	-161.000,00	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.919.000,00	64.699.600,00	-7.219.400,00	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.919.000,00	64.699.600,00	-7.219.400,00	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	28.244.000,00	28.060.000,00	-184.000,00	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.244.000,00	28.060.000,00	-184.000,00	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.244.000,00	28.060.000,00	-184.000,00	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	25.950.000,00	25.734.600,00	-215.400,00	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.950.000,00	25.734.600,00	-215.400,00	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	25.734.600,00	-215.400,00	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	17.725.000,00	10.905.000,00	-6.820.000,00	61,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	17.725.000,00	10.905.000,00	-6.820.000,00	61,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	10.905.000,00	-6.820.000,00	61,52	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Simpang Pesak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	64.862.704,00	65.142.704,00	280.000,00	100,43	
	7.01.0.00.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.862.704,00	65.142.704,00	280.000,00	100,43	
	7.01.0.00.0.00.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	64.862.704,00	65.142.704,00	280.000,00	100,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	3.062.752.602,00	2.904.059.736,00	-158.692.866,00	94,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.626.097.602,00	2.468.108.436,00	-157.989.166,00	93,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.760.890.312,00	1.616.256.068,00	-144.634.244,00	91,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.760.890.312,00	1.616.256.068,00	-144.634.244,00	91,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.760.890.312,00	1.616.256.068,00	-144.634.244,00	91,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.760.890.312,00	1.616.256.068,00	-144.634.244,00	91,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	309.195.000,00	303.450.668,00	-5.744.332,00	98,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.731.000,00	20.522.000,00	-209.000,00	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.731.000,00	20.522.000,00	-209.000,00	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.731.000,00	20.522.000,00	-209.000,00	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	64.537.000,00	64.279.000,00	-258.000,00	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.537.000,00	64.279.000,00	-258.000,00	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.537.000,00	64.279.000,00	-258.000,00	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.352.000,00	25.229.000,00	-123.000,00	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.352.000,00	25.229.000,00	-123.000,00	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.352.000,00	25.229.000,00	-123.000,00	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	119.834.500,00	115.076.000,00	-4.758.500,00	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	119.834.500,00	115.076.000,00	-4.758.500,00	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.834.500,00	115.076.000,00	-4.758.500,00	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.740.500,00	28.392.000,00	-348.500,00	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.740.500,00	28.392.000,00	-348.500,00	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.740.500,00	28.392.000,00	-348.500,00	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.000.000,00	49.952.668,00	-47.332,00	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.952.668,00	-47.332,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.952.668,00	-47.332,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	409.472.290,00	408.836.500,00	-635.790,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.720.000,00	3.498.000,00	-222.000,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.498.000,00	-222.000,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.498.000,00	-222.000,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	17.963.500,00	-36.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.963.500,00	-36.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.963.500,00	-36.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	387.752.290,00	387.375.000,00	-377.290,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	387.752.290,00	387.375.000,00	-377.290,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.752.290,00	387.375.000,00	-377.290,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	146.540.000,00	139.565.200,00	-6.974.800,00	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	125.890.000,00	119.080.200,00	-6.809.800,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	125.890.000,00	119.080.200,00	-6.809.800,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.890.000,00	119.080.200,00	-6.809.800,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.650.000,00	20.485.000,00	-165.000,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.650.000,00	20.485.000,00	-165.000,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	20.485.000,00	-165.000,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.738.000,00	15.688.000,00	-50.000,00	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.398.000,00	4.348.000,00	-50.000,00	98,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	4.398.000,00	4.348.000,00	-50.000,00	98,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.398.000,00	4.348.000,00	-50.000,00	98,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.398.000,00	4.348.000,00	-50.000,00	98,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	357.762.000,00	357.108.300,00	-653.700,00	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	357.762.000,00	357.108.300,00	-653.700,00	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	357.762.000,00	357.108.300,00	-653.700,00	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	357.762.000,00	357.108.300,00	-653.700,00	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.762.000,00	357.108.300,00	-653.700,00	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.855.000,00	32.855.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.855.000,00	32.855.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	15.803.000,00	15.803.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.803.000,00	15.803.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.803.000,00	15.803.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	17.052.000,00	17.052.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.052.000,00	17.052.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.052.000,00	17.052.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Damar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	13.000.000,00	15.345.000,00	2.345.000,00	118,03	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.000.000,00	15.345.000,00	2.345.000,00	118,03	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	13.000.000,00	15.345.000,00	2.345.000,00	118,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	3.177.054.559,00	2.965.466.104,00	-211.588.455,00	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.797.255.559,00	2.609.581.804,00	-187.673.755,00	93,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.931.166.559,00	1.827.559.516,00	-103.607.043,00	94,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.931.166.559,00	1.827.559.516,00	-103.607.043,00	94,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.931.166.559,00	1.827.559.516,00	-103.607.043,00	94,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.931.166.559,00	1.827.559.516,00	-103.607.043,00	94,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	176.780.000,00	156.177.488,00	-20.602.512,00	88,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.476.000,00	9.177.000,00	-2.299.000,00	79,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.476.000,00	9.177.000,00	-2.299.000,00	79,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.476.000,00	9.177.000,00	-2.299.000,00	79,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.796.000,00	29.085.500,00	-8.710.500,00	76,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.796.000,00	29.085.500,00	-8.710.500,00	76,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.796.000,00	29.085.500,00	-8.710.500,00	76,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	28.428.000,00	23.319.000,00	-5.109.000,00	82,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.428.000,00	23.319.000,00	-5.109.000,00	82,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.428.000,00	23.319.000,00	-5.109.000,00	82,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	35.440.000,00	33.919.000,00	-1.521.000,00	95,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.440.000,00	33.919.000,00	-1.521.000,00	95,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.440.000,00	33.919.000,00	-1.521.000,00	95,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.640.000,00	11.150.000,00	-2.490.000,00	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.640.000,00	11.150.000,00	-2.490.000,00	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.640.000,00	11.150.000,00	-2.490.000,00	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.000.000,00	49.526.988,00	-473.012,00	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.526.988,00	-473.012,00	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.526.988,00	-473.012,00	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	85.804.000,00	82.150.000,00	-3.654.000,00	95,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	13.764.000,00	12.800.000,00	-964.000,00	92,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	13.764.000,00	12.800.000,00	-964.000,00	92,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.764.000,00	12.800.000,00	-964.000,00	92,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	72.040.000,00	69.350.000,00	-2.690.000,00	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	72.040.000,00	69.350.000,00	-2.690.000,00	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.040.000,00	69.350.000,00	-2.690.000,00	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	458.625.000,00	426.677.500,00	-31.947.500,00	93,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41.400.000,00	39.740.000,00	-1.660.000,00	95,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.400.000,00	39.740.000,00	-1.660.000,00	95,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	39.740.000,00	-1.660.000,00	95,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	416.625.000,00	386.437.500,00	-30.187.500,00	92,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	416.625.000,00	386.437.500,00	-30.187.500,00	92,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.625.000,00	386.437.500,00	-30.187.500,00	92,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	144.880.000,00	117.017.300,00	-27.862.700,00	80,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.620.000,00	112.177.300,00	-23.442.700,00	82,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.620.000,00	112.177.300,00	-23.442.700,00	82,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.620.000,00	112.177.300,00	-23.442.700,00	82,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	9.260.000,00	4.840.000,00	-4.420.000,00	52,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.260.000,00	4.840.000,00	-4.420.000,00	52,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.260.000,00	4.840.000,00	-4.420.000,00	52,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.137.000,00	22.339.000,00	-1.798.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	24.137.000,00	22.339.000,00	-1.798.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	24.137.000,00	22.339.000,00	-1.798.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.137.000,00	22.339.000,00	-1.798.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.137.000,00	22.339.000,00	-1.798.000,00	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.159.000,00	284.498.800,00	-13.660.200,00	95,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	298.159.000,00	284.498.800,00	-13.660.200,00	95,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	298.159.000,00	284.498.800,00	-13.660.200,00	95,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	298.159.000,00	284.498.800,00	-13.660.200,00	95,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.159.000,00	284.498.800,00	-13.660.200,00	95,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.803.000,00	18.879.000,00	-924.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.803.000,00	18.879.000,00	-924.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	19.803.000,00	18.879.000,00	-924.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.803.000,00	18.879.000,00	-924.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.803.000,00	18.879.000,00	-924.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.700.000,00	30.167.500,00	-7.532.500,00	80,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.700.000,00	30.167.500,00	-7.532.500,00	80,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	20.400.000,00	13.417.500,00	-6.982.500,00	65,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	13.417.500,00	-6.982.500,00	65,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	13.417.500,00	-6.982.500,00	65,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	12.600.000,00	12.150.000,00	-450.000,00	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.150.000,00	-450.000,00	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.150.000,00	-450.000,00	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN , PEMANFAATAN , DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	4.700.000,00	4.600.000,00	-100.000,00	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.600.000,00	-100.000,00	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.600.000,00	-100.000,00	97,87	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Simpang Renggang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	3.025.273.732,00	2.850.637.026,00	-174.636.706,00	94,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.431.866.732,00	2.271.241.374,00	-160.625.358,00	93,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.840.000,00	2.777.000,00	-63.000,00	97,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.840.000,00	2.777.000,00	-63.000,00	97,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.777.000,00	-63.000,00	97,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.777.000,00	-63.000,00	97,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.458.679.400,00	1.393.537.606,00	-65.141.794,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.458.679.400,00	1.393.537.606,00	-65.141.794,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.458.679.400,00	1.393.537.606,00	-65.141.794,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.458.679.400,00	1.393.537.606,00	-65.141.794,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	31.000.000,00	22.450.000,00	-8.550.000,00	72,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	10.500.000,00	9.450.000,00	-1.050.000,00	90,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	9.450.000,00	-1.050.000,00	90,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	9.450.000,00	-1.050.000,00	90,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.500.000,00	13.000.000,00	-7.500.000,00	63,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.500.000,00	13.000.000,00	-7.500.000,00	63,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	13.000.000,00	-7.500.000,00	63,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	292.201.000,00	241.669.547,00	-50.531.453,00	82,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.500.000,00	8.241.500,00	-6.258.500,00	56,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	8.241.500,00	-6.258.500,00	56,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	8.241.500,00	-6.258.500,00	56,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.059.000,00	22.474.000,00	-13.585.000,00	62,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.059.000,00	22.474.000,00	-13.585.000,00	62,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.059.000,00	22.474.000,00	-13.585.000,00	62,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	26.249.000,00	17.493.000,00	-8.756.000,00	66,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.625.000,00	11.873.000,00	-8.752.000,00	57,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.625.000,00	11.873.000,00	-8.752.000,00	57,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.624.000,00	5.620.000,00	-4.000,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.624.000,00	5.620.000,00	-4.000,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.999.000,00	48.754.000,00	-1.245.000,00	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.999.000,00	48.754.000,00	-1.245.000,00	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.000,00	48.754.000,00	-1.245.000,00	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.394.000,00	14.067.000,00	-1.327.000,00	91,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.394.000,00	14.067.000,00	-1.327.000,00	91,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.394.000,00	14.067.000,00	-1.327.000,00	91,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	150.000.000,00	130.640.047,00	-19.359.953,00	87,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	130.640.047,00	-19.359.953,00	87,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	130.640.047,00	-19.359.953,00	87,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.758.000,00	126.330.600,00	-1.427.400,00	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.378.000,00	9.650.000,00	-728.000,00	92,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	10.378.000,00	9.650.000,00	-728.000,00	92,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.378.000,00	9.650.000,00	-728.000,00	92,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	117.380.000,00	116.680.600,00	-699.400,00	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	116.130.000,00	115.430.600,00	-699.400,00	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.130.000,00	115.430.600,00	-699.400,00	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	378.664.332,00	373.167.500,00	-5.496.832,00	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	17.990.000,00	-10.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.990.000,00	-10.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.990.000,00	-10.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	358.164.332,00	353.177.500,00	-4.986.832,00	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	358.164.332,00	353.177.500,00	-4.986.832,00	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.164.332,00	353.177.500,00	-4.986.832,00	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	140.724.000,00	111.309.121,00	-29.414.879,00	79,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.580.000,00	42.997.393,00	-3.582.607,00	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.580.000,00	42.997.393,00	-3.582.607,00	92,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.580.000,00	42.997.393,00	-3.582.607,00	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	72.150.000,00	65.431.728,00	-6.718.272,00	90,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.150.000,00	65.431.728,00	-6.718.272,00	90,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.150.000,00	65.431.728,00	-6.718.272,00	90,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	8.024.000,00	0,00	-8.024.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.024.000,00	0,00	-8.024.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.024.000,00	0,00	-8.024.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	13.970.000,00	2.880.000,00	-11.090.000,00	20,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.970.000,00	2.880.000,00	-11.090.000,00	20,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.970.000,00	2.880.000,00	-11.090.000,00	20,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.085.000,00	15.932.000,00	-1.153.000,00	93,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.000.000,00	10.996.000,00	-4.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	11.000.000,00	10.996.000,00	-4.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.996.000,00	-4.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.996.000,00	-4.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	6.085.000,00	4.936.000,00	-1.149.000,00	81,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	6.085.000,00	4.936.000,00	-1.149.000,00	81,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.085.000,00	4.936.000,00	-1.149.000,00	81,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.085.000,00	4.936.000,00	-1.149.000,00	81,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.178.000,00	467.961.252,00	-10.216.748,00	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	478.178.000,00	467.961.252,00	-10.216.748,00	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	478.178.000,00	467.961.252,00	-10.216.748,00	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	478.178.000,00	467.961.252,00	-10.216.748,00	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.178.000,00	467.961.252,00	-10.216.748,00	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.820.000,00	24.541.400,00	-278.600,00	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.820.000,00	24.541.400,00	-278.600,00	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	9.820.000,00	9.667.400,00	-152.600,00	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.820.000,00	9.667.400,00	-152.600,00	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	9.667.400,00	-152.600,00	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	15.000.000,00	14.874.000,00	-126.000,00	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.874.000,00	-126.000,00	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.874.000,00	-126.000,00	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.328.000,00	60.965.000,00	-2.363.000,00	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.328.000,00	60.965.000,00	-2.363.000,00	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	16.973.000,00	16.885.000,00	-88.000,00	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.973.000,00	16.885.000,00	-88.000,00	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.973.000,00	16.885.000,00	-88.000,00	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	9.999.000,00	9.210.000,00	-789.000,00	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.000,00	9.210.000,00	-789.000,00	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	9.210.000,00	-789.000,00	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	9.990.000,00	9.666.000,00	-324.000,00	96,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.666.000,00	-324.000,00	96,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.666.000,00	-324.000,00	96,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	7.636.000,00	7.486.000,00	-150.000,00	98,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.636.000,00	7.486.000,00	-150.000,00	98,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.636.000,00	7.486.000,00	-150.000,00	98,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	18.730.000,00	17.718.000,00	-1.012.000,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	18.730.000,00	17.718.000,00	-1.012.000,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.730.000,00	17.718.000,00	-1.012.000,00	94,59	

LAMPIRAN 1.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : Kecamatan Dendang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	3.139.825.484,00	3.005.152.803,00	-134.672.681,00	95,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.747.217.484,00	2.626.778.779,00	-120.438.705,00	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	5.609.000,00	-391.000,00	93,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	5.609.000,00	-391.000,00	93,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.609.000,00	-391.000,00	93,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.609.000,00	-391.000,00	93,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.740.035.152,00	1.676.366.916,00	-63.668.236,00	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.740.035.152,00	1.676.366.916,00	-63.668.236,00	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.740.035.152,00	1.676.366.916,00	-63.668.236,00	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.740.035.152,00	1.676.366.916,00	-63.668.236,00	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	22.500.000,00	8.000.000,00	-14.500.000,00	35,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.500.000,00	8.000.000,00	-14.500.000,00	35,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	8.000.000,00	-14.500.000,00	35,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	8.000.000,00	-14.500.000,00	35,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	303.900.500,00	285.990.313,00	-17.910.187,00	94,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.356.000,00	25.918.000,00	-4.438.000,00	85,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.356.000,00	25.918.000,00	-4.438.000,00	85,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.356.000,00	25.918.000,00	-4.438.000,00	85,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.176.500,00	47.857.000,00	-4.319.500,00	91,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.176.500,00	47.857.000,00	-4.319.500,00	91,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.176.500,00	47.857.000,00	-4.319.500,00	91,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	43.690.000,00	43.536.000,00	-154.000,00	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.690.000,00	43.536.000,00	-154.000,00	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.690.000,00	43.536.000,00	-154.000,00	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	41.000.000,00	32.059.000,00	-8.941.000,00	78,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	32.059.000,00	-8.941.000,00	78,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	32.059.000,00	-8.941.000,00	78,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.678.000,00	11.678.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.678.000,00	11.678.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.678.000,00	11.678.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	125.000.000,00	124.942.313,00	-57.687,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.942.313,00	-57.687,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.942.313,00	-57.687,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50.646.000,00	38.945.000,00	-11.701.000,00	76,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	42.102.000,00	30.500.000,00	-11.602.000,00	72,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	42.102.000,00	30.500.000,00	-11.602.000,00	72,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.102.000,00	30.500.000,00	-11.602.000,00	72,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.544.000,00	8.445.000,00	-99.000,00	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	8.544.000,00	8.445.000,00	-99.000,00	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.544.000,00	8.445.000,00	-99.000,00	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	500.815.832,00	490.223.000,00	-10.592.832,00	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.969.000,00	1.735.000,00	-234.000,00	88,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.000,00	1.735.000,00	-234.000,00	88,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.969.000,00	1.735.000,00	-234.000,00	88,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.000.000,00	47.675.000,00	-325.000,00	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.675.000,00	-325.000,00	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.675.000,00	-325.000,00	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	450.846.832,00	440.813.000,00	-10.033.832,00	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	450.846.832,00	440.813.000,00	-10.033.832,00	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.846.832,00	440.813.000,00	-10.033.832,00	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	123.320.000,00	121.644.550,00	-1.675.450,00	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	104.040.000,00	102.364.550,00	-1.675.450,00	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.040.000,00	102.364.550,00	-1.675.450,00	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.040.000,00	102.364.550,00	-1.675.450,00	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.972.000,00	21.664.500,00	-307.500,00	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	17.000.000,00	16.956.500,00	-43.500,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	17.000.000,00	16.956.500,00	-43.500,00	99,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.956.500,00	-43.500,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.956.500,00	-43.500,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	4.972.000,00	4.708.000,00	-264.000,00	94,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	4.972.000,00	4.708.000,00	-264.000,00	94,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.972.000,00	4.708.000,00	-264.000,00	94,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.972.000,00	4.708.000,00	-264.000,00	94,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	327.757.000,00	314.591.524,00	-13.165.476,00	95,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	291.741.000,00	280.723.000,00	-11.018.000,00	96,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	291.741.000,00	280.723.000,00	-11.018.000,00	96,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	291.741.000,00	280.723.000,00	-11.018.000,00	96,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.741.000,00	280.723.000,00	-11.018.000,00	96,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	36.016.000,00	33.868.524,00	-2.147.476,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	36.016.000,00	33.868.524,00	-2.147.476,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.016.000,00	33.868.524,00	-2.147.476,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.016.000,00	33.868.524,00	-2.147.476,00	94,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.879.000,00	17.606.000,00	-273.000,00	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.879.000,00	17.606.000,00	-273.000,00	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	10.880.000,00	10.785.000,00	-95.000,00	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.880.000,00	10.785.000,00	-95.000,00	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	10.785.000,00	-95.000,00	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	6.999.000,00	6.821.000,00	-178.000,00	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.999.000,00	6.821.000,00	-178.000,00	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.999.000,00	6.821.000,00	-178.000,00	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	5.711.000,00	-289.000,00	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	6.000.000,00	5.711.000,00	-289.000,00	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	6.000.000,00	5.711.000,00	-289.000,00	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.711.000,00	-289.000,00	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.711.000,00	-289.000,00	95,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000,00	18.801.000,00	-199.000,00	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000,00	18.801.000,00	-199.000,00	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	19.000.000,00	18.801.000,00	-199.000,00	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	18.801.000,00	-199.000,00	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.801.000,00	-199.000,00	98,95	



PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	-1.522.497.616,00	93,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.874.142.898,00	3.329.180.991,00	-544.961.907,00	85,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	72.931.000,00	43.587.000,00	-29.344.000,00	59,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.033.000,00	19.019.000,00	-9.014.000,00	67,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	28.033.000,00	19.019.000,00	-9.014.000,00	67,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	28.033.000,00	19.019.000,00	-9.014.000,00	67,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	29.910.000,00	14.178.000,00	-15.732.000,00	47,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1		BELANJA OPERASI	29.910.000,00	14.178.000,00	-15.732.000,00	47,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	29.910.000,00	14.178.000,00	-15.732.000,00	47,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007			EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.988.000,00	10.390.000,00	-4.598.000,00	69,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	14.988.000,00	10.390.000,00	-4.598.000,00	69,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	14.988.000,00	10.390.000,00	-4.598.000,00	69,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.030.649.024,00	1.873.505.464,00	-157.143.560,00	92,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.003.849.024,00	1.854.651.464,00	-149.197.560,00	92,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.003.849.024,00	1.854.651.464,00	-149.197.560,00	92,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.003.849.024,00	1.854.651.464,00	-149.197.560,00	92,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003			PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1		BELANJA OPERASI	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	14.966.000,00	10.790.000,00	-4.176.000,00	72,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1		BELANJA OPERASI	14.966.000,00	10.790.000,00	-4.176.000,00	72,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	14.966.000,00	10.790.000,00	-4.176.000,00	72,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.884.000,00	8.064.000,00	-1.820.000,00	81,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1		BELANJA OPERASI	9.884.000,00	8.064.000,00	-1.820.000,00	81,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	9.884.000,00	8.064.000,00	-1.820.000,00	81,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.600.000,00	34.486.000,00	-1.114.000,00	96,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	23.900.000,00	23.486.000,00	-414.000,00	98,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1		BELANJA OPERASI	23.900.000,00	23.486.000,00	-414.000,00	98,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	23.486.000,00	-414.000,00	98,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	4.500.000,00	4.000.000,00	-500.000,00	88,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.000.000,00	-500.000,00	88,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.000.000,00	-500.000,00	88,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.200.000,00	7.000.000,00	-200.000,00	97,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.000.000,00	-200.000,00	97,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.000.000,00	-200.000,00	97,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	723.771.000,00	667.284.080,00	-56.486.920,00	92,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.076.000,00	21.962.000,00	-1.114.000,00	95,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.076.000,00	21.962.000,00	-1.114.000,00	95,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.076.000,00	21.962.000,00	-1.114.000,00	95,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.928.000,00	45.853.000,00	-11.075.000,00	80,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.928.000,00	45.853.000,00	-11.075.000,00	80,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.928.000,00	45.853.000,00	-11.075.000,00	80,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.260.000,00	2.865.000,00	-4.395.000,00	39,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.260.000,00	2.865.000,00	-4.395.000,00	39,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	2.865.000,00	-4.395.000,00	39,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	57.892.000,00	29.288.000,00	-28.604.000,00	50,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	57.892.000,00	29.288.000,00	-28.604.000,00	50,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.892.000,00	29.288.000,00	-28.604.000,00	50,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.615.000,00	19.556.000,00	-9.059.000,00	68,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.615.000,00	19.556.000,00	-9.059.000,00	68,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.615.000,00	19.556.000,00	-9.059.000,00	68,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	550.000.000,00	547.760.080,00	-2.239.920,00	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	547.760.080,00	-2.239.920,00	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	547.760.080,00	-2.239.920,00	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	84.755.000,00	84.279.000,00	-476.000,00	99,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	84.755.000,00	84.279.000,00	-476.000,00	99,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	84.755.000,00	84.279.000,00	-476.000,00	99,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.755.000,00	84.279.000,00	-476.000,00	99,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	521.610.916,00	392.018.095,00	-129.592.821,00	75,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	150.750.000,00	150.550.000,00	-200.000,00	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.750.000,00	150.550.000,00	-200.000,00	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.750.000,00	150.550.000,00	-200.000,00	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.200.000,00	46.758.595,00	-8.441.405,00	84,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.200.000,00	46.758.595,00	-8.441.405,00	84,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	46.758.595,00	-8.441.405,00	84,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	85.661.458,00	45.778.000,00	-39.883.458,00	53,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.661.458,00	45.778.000,00	-39.883.458,00	53,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.661.458,00	45.778.000,00	-39.883.458,00	53,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	229.999.458,00	148.931.500,00	-81.067.958,00	64,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	229.999.458,00	148.931.500,00	-81.067.958,00	64,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.999.458,00	148.931.500,00	-81.067.958,00	64,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	404.825.958,00	234.021.352,00	-170.804.606,00	57,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.250.000,00	37.183.947,00	-3.066.053,00	92,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	37.183.947,00	-3.066.053,00	92,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	37.183.947,00	-3.066.053,00	92,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	133.886.958,00	117.861.905,00	-16.025.053,00	88,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.886.958,00	117.861.905,00	-16.025.053,00	88,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.886.958,00	117.861.905,00	-16.025.053,00	88,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.790.000,00	6.850.000,00	-10.940.000,00	38,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.790.000,00	6.850.000,00	-10.940.000,00	38,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.790.000,00	6.850.000,00	-10.940.000,00	38,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	212.899.000,00	72.125.500,00	-140.773.500,00	33,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.400.000,00	47.800.500,00	-139.599.500,00	25,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.400.000,00	47.800.500,00	-139.599.500,00	25,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	25.499.000,00	24.325.000,00	-1.174.000,00	95,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.499.000,00	24.325.000,00	-1.174.000,00	95,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.760.533.000,00	1.342.103.462,00	-418.429.538,00	76,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.760.533.000,00	1.342.103.462,00	-418.429.538,00	76,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	71.912.000,00	57.404.000,00	-14.508.000,00	79,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.912.000,00	57.404.000,00	-14.508.000,00	79,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.912.000,00	57.404.000,00	-14.508.000,00	79,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	6.880.000,00	0,00	-6.880.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	0,00	-6.880.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	0,00	-6.880.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	1.583.273.000,00	1.265.139.462,00	-318.133.538,00	79,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.583.273.000,00	1.265.139.462,00	-318.133.538,00	79,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.583.273.000,00	1.265.139.462,00	-318.133.538,00	79,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	39.024.000,00	0,00	-39.024.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.024.000,00	0,00	-39.024.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.024.000,00	0,00	-39.024.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	59.444.000,00	19.560.000,00	-39.884.000,00	32,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.444.000,00	19.560.000,00	-39.884.000,00	32,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.444.000,00	19.560.000,00	-39.884.000,00	32,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.734.846.795,00	16.708.368.000,00	-26.478.795,00	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	16.734.846.795,00	16.708.368.000,00	-26.478.795,00	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	16.300.658.795,00	16.300.626.000,00	-32.795,00	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.300.658.795,00	16.300.626.000,00	-32.795,00	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	35.736.000,00	-14.000,00	99,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	16.264.908.795,00	16.264.890.000,00	-18.795,00	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	118.970.000,00	116.790.000,00	-2.180.000,00	98,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	118.970.000,00	116.790.000,00	-2.180.000,00	98,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.970.000,00	116.790.000,00	-2.180.000,00	98,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	59.716.000,00	56.850.000,00	-2.866.000,00	95,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.716.000,00	56.850.000,00	-2.866.000,00	95,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.716.000,00	56.850.000,00	-2.866.000,00	95,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	111.840.000,00	92.720.000,00	-19.120.000,00	82,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.840.000,00	92.720.000,00	-19.120.000,00	82,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.840.000,00	92.720.000,00	-19.120.000,00	82,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	143.662.000,00	141.382.000,00	-2.280.000,00	98,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	143.662.000,00	141.382.000,00	-2.280.000,00	98,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.662.000,00	141.382.000,00	-2.280.000,00	98,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	282.216.000,00	276.844.011,00	-5.371.989,00	98,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	282.216.000,00	276.844.011,00	-5.371.989,00	98,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	43.236.000,00	41.481.000,00	-1.755.000,00	95,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.236.000,00	41.481.000,00	-1.755.000,00	95,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.236.000,00	41.481.000,00	-1.755.000,00	95,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	91.580.000,00	89.983.011,00	-1.596.989,00	98,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.580.000,00	89.983.011,00	-1.596.989,00	98,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.580.000,00	89.983.011,00	-1.596.989,00	98,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	147.400.000,00	145.380.000,00	-2.020.000,00	98,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	147.400.000,00	145.380.000,00	-2.020.000,00	98,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.400.000,00	145.380.000,00	-2.020.000,00	98,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	489.123.000,00	44.131.997,00	-444.991.003,00	9,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	489.123.000,00	44.131.997,00	-444.991.003,00	9,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	52.392.000,00	0,00	-52.392.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.392.000,00	0,00	-52.392.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.392.000,00	0,00	-52.392.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	229.675.000,00	0,00	-229.675.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	229.675.000,00	0,00	-229.675.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.675.000,00	0,00	-229.675.000,00	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	41.426.000,00	24.685.000,00	-16.741.000,00	59,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.426.000,00	24.685.000,00	-16.741.000,00	59,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.426.000,00	24.685.000,00	-16.741.000,00	59,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	165.630.000,00	19.446.997,00	-146.183.003,00	11,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	165.630.000,00	19.446.997,00	-146.183.003,00	11,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.630.000,00	19.446.997,00	-146.183.003,00	11,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.554.564.500,00	1.472.300.116,00	-82.264.384,00	94,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.554.564.500,00	1.472.300.116,00	-82.264.384,00	94,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	408.233.500,00	398.701.500,00	-9.532.000,00	97,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	408.233.500,00	398.701.500,00	-9.532.000,00	97,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.482.000,00	205.950.000,00	-9.532.000,00	95,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	192.751.500,00	192.751.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	247.433.000,00	235.554.600,00	-11.878.400,00	95,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	247.433.000,00	235.554.600,00	-11.878.400,00	95,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.433.000,00	235.554.600,00	-11.878.400,00	95,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	84.108.000,00	70.114.636,00	-13.993.364,00	83,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.108.000,00	70.114.636,00	-13.993.364,00	83,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.108.000,00	70.114.636,00	-13.993.364,00	83,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	174.286.000,00	169.781.900,00	-4.504.100,00	97,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	174.286.000,00	169.781.900,00	-4.504.100,00	97,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.286.000,00	169.781.900,00	-4.504.100,00	97,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	640.504.000,00	598.147.480,00	-42.356.520,00	93,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	640.504.000,00	598.147.480,00	-42.356.520,00	93,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.504.000,00	598.147.480,00	-42.356.520,00	93,38	

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AMRULLAH, S.H.
Pembina Tekn/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
				Operasi		Modal		Tak Terduga	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8
								9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	458.033.467.609	424.357.900.379,00	110.283.882.989	100.063.255.767,30	0	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	207.388.829.989	198.792.072.125,00	25.165.535.845	23.212.581.004,24	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	207.388.829.989	198.792.072.125,00	25.165.535.845	23.212.581.004,24	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.964.352.514	167.792.135.579,00	716.207.000	704.025.600,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000	6.664.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.956.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.485.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.473.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.005.420.514	162.206.188.535,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168.994.623.514	162.197.411.535,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.997.000	3.977.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	137.559.000	127.719.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	87.663.000	78.663.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.896.000	49.056.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.998.000	16.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.998.000	16.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.032.530.000	978.580.091,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	31.797.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.763.000	224.399.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	18.512.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.467.000	126.241.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	58.295.320,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	499.935.771,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.300.000	19.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	716.207.000	704.025.600,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	350.600.000	349.485.600,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	365.607.000	354.540.000,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.194.425.000	3.899.347.207,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.400.000	142.464.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	611.625.000	594.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.347.000.000	3.162.732.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.620.000	556.638.746,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	69.771.195,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.660.000	399.047.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.960.000	87.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.245.112.475	30.856.953.527,00	24.449.328.845	22.508.555.404,24	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.737.076.420	17.277.230.761,00	13.921.068.000	12.757.665.338,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	480.636.000	388.829.367,97	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	249.825.000	202.399.196,00	3.209.585.000	3.054.649.375,38	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	130.629.000	101.800.052,00	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	112.000.000	111.568.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	1.469.800.000	1.433.894.398,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	38.303.000	36.977.000,00	389.649.000	382.388.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	199.485.000	192.621.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.516.000	100.000.000,00	1.005.160.000	999.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	682.826.000	573.871.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.874.388.100	2.679.497.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	80.746.000	53.685.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7.000.000	5.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.894.601.320	12.865.030.220,00	2.613.556.000	2.603.316.619,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.000.000	18.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.963.000	9.858.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	374.800.000	371.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	762.660.000	711.187.710,65	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.994.000	42.611.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24.000.000	24.000.000,00	3.874.022.000	3.072.031.367,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.765.433.760	8.183.258.534,00	8.214.200.840	7.584.547.821,24	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	517.200.000	449.600.732,85	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0	0,00	301.406.000	230.865.908,01	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0,00	149.828.000	149.464.323,28	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	1.809.500.340	1.797.366.059,23	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.328.000	0,00	622.260.000	461.351.891,87	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	399.478.000	398.912.552,30	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0,00	630.622.000	456.712.354,38	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	1.133.634.000	1.089.512.011,32	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0,00	401.644.000	391.755.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	200.271.000	195.172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0,00	620.238.000	607.279.890,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000	532.499.606,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.524.935.200	1.180.040.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99.712.000	73.356.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	32.998.000	22.505.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.905.205.560	5.860.926.528,00	1.328.448.500	1.326.027.098,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.000.000	4.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.990.000	6.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	114.994.000	114.312.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000	193.255.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	299.942.000	225.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.813.999.595	4.542.171.437,00	2.052.432.205	1.912.758.645,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	20.640.000	2.087.000,00	453.357.000	450.584.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0,00	249.307.000	248.457.400,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0,00	151.422.300	147.639.200,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	0	0,00	48.257.000	47.490.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	0,00	239.625.000	230.650.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	130.800.000	130.800.000,00	147.951.000	147.140.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.363.242.500	2.155.906.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.229.000	44.447.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	141.540.000	140.904.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.027.233.095	2.025.241.482,00	143.646.905	143.614.905,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	51.315.000	42.785.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	618.866.000	497.183.040,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	928.602.700	854.292.795,00	261.627.800	253.583.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	0	0,00	29.059.000	27.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	248.881.200	222.656.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.000.000	27.138.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000	19.593.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	470.320.000	449.346.695,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.000.000	14.103.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	542.000	485.000,00	19.458.000	18.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	131.859.500	120.970.000,00	88.140.500	82.540.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0,00	99.970.300	99.443.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	46.358.000	35.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	26.408.000	23.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	26.408.000	23.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	19.950.000	11.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	19.950.000	11.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	113.007.000	94.805.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	113.007.000	94.805.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87.507.000	71.435.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.500.000	23.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	20.000.000	13.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	13.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.4.01.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	13.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	206.783.435.532	186.073.207.911,00	10.635.669.797	8.246.509.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	120.891.980.607	108.330.361.111,00	3.332.932.497	2.933.066.193,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.199.356.842	76.971.269.341,00	118.487.000	97.460.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.259.000	17.766.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.259.000	17.766.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.917.746.526	75.124.690.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.896.319.526	75.106.234.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.427.000	18.456.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.500.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.351.500	544.322.002,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.477.000	15.980.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.695.000	116.825.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.624.000	14.161.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.944.000	76.644.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.886.500	60.308.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	249.977.102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.725.000	10.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	118.487.000	97.460.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	47.442.000	30.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	71.045.000	67.260.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.589.816	732.900.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	913.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.660.000	258.619.501,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606.929.816	473.367.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736.910.000	534.590.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	39.419.492,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.980.000	233.272.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.470.000	47.463.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.210.000	214.436.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.508.190.765	29.648.744.413,00	3.214.445.497	2.835.606.193,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.686.208.835	4.432.455.109,00	2.689.377.497	2.615.074.193,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	190.429.625	186.973.790,00	1.337.828.497	1.312.258.234,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0,00	124.920.910	78.864.740,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.000.000	8.000.000,00	1.021.892.000	1.020.416.219,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	204.736.090	203.535.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.220.200	171.243.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.068.346.010	3.901.667.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	109.995.000	104.470.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	69.218.000	60.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.821.981.930	25.216.289.304,00	525.068.000	220.532.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	384.498.000	333.696.279,00	3.560.000	3.510.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.207.000	40.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.500.000	91.663.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	310.424.000	303.263.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	442.637.000	380.787.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.120.999.000	949.982.500,00	217.022.000	217.022.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.602.500	518.638.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.436.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	765.043.000	706.415.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	204.417.000	204.022.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	894.949.700	862.886.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	168.607.000	127.780.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	269.902.460	234.899.360,00	99.112.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	40.356.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	91.104.000	83.330.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.394.000	8.184.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	518.603.420	232.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	234.551.000	200.803.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	268.201.000	134.185.704,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	52.879.000	41.281.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	517.323.150	205.595.965,00	173.446.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.456.106.200	19.340.016.274,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	58.715.000	20.299.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	97.554.000	59.791.968,00	31.928.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.101.000	11.882.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	23.580.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	126.291.000	118.579.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.930.020.000	1.516.250.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	721.382.000	494.798.516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	37.082.000	23.153.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	424.185.000	326.484.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	260.115.000	145.160.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.208.638.000	1.021.451.621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.208.638.000	1.021.451.621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10.168.000	5.173.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.995.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.995.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	5.173.000	5.173.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.173.000	5.173.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.245.000	188.924.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.036.000	27.891.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	31.036.000	27.891.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.739.000	71.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.739.000	71.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.470.000	89.872.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	102.470.000	89.872.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001		RSUD Muhammad Zein	56.194.286.499	51.123.010.700,00	5.932.745.500	4.284.858.555,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.787.023.999	48.998.879.200,00	2.234.214.000	2.108.586.197,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.318.861.932	8.147.777.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.318.861.932	8.147.777.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.000.000	72.408.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	72.408.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	157.923.500	130.065.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	68.342.000	64.065.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	89.581.500	66.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.414.223.224	4.236.082.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.414.223.224	4.236.082.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.144.000	30.800.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.144.000	30.800.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.947.794.843	36.511.810.051,00	2.076.290.500	1.978.521.197,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.947.794.843	36.511.810.051,00	2.076.290.500	1.978.521.197,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	134.305.000	110.694.000,00	3.698.531.500	2.176.272.358,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	134.305.000	110.694.000,00	3.698.531.500	2.176.272.358,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	2.355.531.500	877.282.258,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	134.305.000	110.694.000,00	1.343.000.000	1.298.990.100,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.272.957.500	2.013.437.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.272.957.500	2.013.437.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0001	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.272.957.500	2.013.437.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002		UPT Puskesmas Manggar	5.432.246.423	5.012.945.899,00	307.217.000	287.025.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.192.049.923	3.801.813.678,00	307.217.000	287.025.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.349.272.675	1.349.272.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.349.272.675	1.349.272.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.244.000	13.051.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.244.000	13.051.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.750.248	320.992.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.750.248	320.992.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.492.783.000	2.118.497.510,00	307.217.000	287.025.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.492.783.000	2.118.497.510,00	307.217.000	287.025.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	926.346.500	900.109.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.720.000	36.341.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	36.720.000	36.341.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	876.302.000	850.448.321,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.160.000	19.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.900.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.880.000	26.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.760.000	23.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	192.660.000	184.095.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.120.000	15.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.020.000	25.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	207.120.000	202.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	245.292.000	242.942.921,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.360.000	15.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.300.000	13.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	68.130.000	67.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.324.500	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.324.500	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	298.730.000	298.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	298.730.000	298.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	298.730.000	298.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.120.000	12.292.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.120.000	12.292.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0002	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.120.000	12.292.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003		UPT Puskesmas Mengkubang	3.986.762.744	3.654.264.405,00	38.631.500	38.340.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.851.141.744	2.634.561.020,00	38.631.500	38.340.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.235.096.538	1.235.096.487,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.235.096.538	1.235.096.487,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.415.706	357.838.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.840.000	63.641.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.575.706	294.197.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.120.000	138.042.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.120.000	138.042.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.073.509.500	903.582.833,00	38.631.500	38.340.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.073.509.500	903.582.833,00	38.631.500	38.340.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	957.891.000	851.663.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	107.856.000	107.005.836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	55.900.000	55.511.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	51.956.000	51.494.115,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	817.970.000	731.337.549,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.275.000	14.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.590.000	4.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.600.000	32.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	145.822.000	145.002.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000	12.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.280.000	65.292.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.280.000	13.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	190.380.000	172.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	221.303.000	183.773.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.640.000	8.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.400.000	44.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	32.065.000	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	32.065.000	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	177.730.000	168.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	177.730.000	168.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0003	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	177.730.000	168.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004		UPT Puskesmas Gantung	5.492.757.304	4.974.100.456,00	238.201.000	198.281.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.482.336.304	4.102.577.132,00	238.201.000	198.281.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.421.345.579	1.416.311.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.421.345.579	1.416.311.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.071.000	213.900.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.000	24.770.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.878.000	70.897.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.196.000	7.358.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.000	85.948.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	24.925.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	34.208.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	34.208.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.353.206	454.100.022,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000	99.557.187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.353.206	354.542.835,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.233.000	220.103.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.763.000	173.823.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.470.000	46.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.107.333.519	1.798.161.870,00	203.993.000	198.281.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.107.333.519	1.798.161.870,00	203.993.000	198.281.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	854.007.000	717.927.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	78.336.000	78.029.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	53.856.000	53.657.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24.480.000	24.371.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775.657.000	639.897.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.520.000	23.364.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.300.000	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.920.000	25.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.860.000	11.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.400.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.227.000	139.483.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.672.000	16.092.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148.860.000	142.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	197.218.000	170.018.339,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.560.000	10.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.280.000	5.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.200.000	12.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	65.040.000	59.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	137.655.000	137.604.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	137.655.000	137.604.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	137.655.000	137.604.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.759.000	15.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.759.000	15.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.759.000	15.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005		UPT Puskesmas Kelapa Kampit	5.239.684.503	4.532.491.491,00	105.624.000	47.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.285.765.503	3.713.850.310,00	105.624.000	47.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.463.385.175	1.463.258.562,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.463.385.175	1.463.258.562,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.344.500	147.306.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.578.000	7.657.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.837.000	40.002.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.896.000	1.818.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.033.500	47.871.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.957.184,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.754.538	467.015.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.312.000	1.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	23.128.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.042.538	442.847.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.650.000	296.616.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.580.000	247.696.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.070.000	48.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.843.631.290	1.339.653.849,00	105.624.000	47.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.843.631.290	1.339.653.849,00	105.624.000	47.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	800.176.500	678.263.681,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	786.846.000	664.943.681,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.020.000	31.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.640.000	2.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.720.000	51.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.560.000	13.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.700.000	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	147.380.000	96.313.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000	14.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.356.000	17.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.080.000	110.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	218.308.000	179.792.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.160.000	1.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	57.582.000	53.682.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	98.340.000	89.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.330.500	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.330.500	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	151.822.500	139.657.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	151.822.500	139.657.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	151.822.500	139.657.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.920.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.920.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.920.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006		UPT Puskesmas Sumpang Pesak	3.258.088.714	2.861.877.853,00	544.845.300	394.354.146,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.392.175.714	2.153.437.054,00	214.345.300	65.098.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.089.282.682	1.089.282.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.089.282.682	1.089.282.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.387.000	114.430.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	10.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.494.000	21.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.200.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.796.000	21.262.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.897.000	27.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	24.988.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	78.094.000	65.098.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	7.683.000	7.605.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	20.581.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	49.830.000	49.493.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.064.332	304.467.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	68.029.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.664.332	236.437.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.893.000	149.222.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.773.000	133.380.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.120.000	15.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	669.548.700	496.033.793,00	136.251.300	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	669.548.700	496.033.793,00	136.251.300	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	736.743.000	579.272.799,00	330.500.000	329.256.146,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	330.500.000	329.256.146,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0,00	258.500.000	257.426.741,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0,00	72.000.000	71.829.405,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.743.000	579.272.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.880.000	41.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.680.000	12.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.240.000	29.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000	14.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.880.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.700.000	69.934.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000	18.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.680.000	14.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.280.000	88.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.563.000	137.958.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.360.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	44.280.000	43.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	111.000.000	109.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.750.000	120.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	120.750.000	120.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.750.000	120.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.420.000	8.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.420.000	8.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.420.000	8.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007		UPT Puskesmas Renggang	3.508.026.272	3.197.166.365,00	74.561.000	46.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.206.426.272	2.083.105.986,00	74.561.000	46.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	749.115.150	749.115.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	749.115.150	749.115.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.168.000	263.754.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.912.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.340.000	104.147.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.947.000	12.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.608.000	50.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.273.000	64.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	22.198.595,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.294.122	492.333.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.800.000	97.163.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.494.122	395.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.070.000	162.805.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.980.000	136.845.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.090.000	25.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	461.779.000	415.098.030,00	74.561.000	46.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	461.779.000	415.098.030,00	74.561.000	46.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	983.923.500	803.257.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.381.500	139.528.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	46.970.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	99.964.000	99.735.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.463.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	39.984.000	39.793.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	780.222.000	650.409.379,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.360.000	39.015.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.104.000	10.284.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.200.000	30.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.760.000	1.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.880.000	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.298.000	151.553.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.920.000	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.020.000	11.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	177.000.000	155.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	192.320.000	157.717.379,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	960.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.640.000	2.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.120.000	18.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.640.000	62.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.320.000	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	284.332.500	278.302.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	284.332.500	278.302.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	284.332.500	278.302.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.344.000	32.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.344.000	32.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.344.000	32.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008		UPT Puskesmas Dendang	2.779.602.466	2.386.989.631,00	60.912.000	16.530.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.144.808.466	1.848.395.476,00	60.912.000	16.530.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	864.988.978	822.319.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	864.988.978	822.319.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.763.000	110.343.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.118.000	5.961.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.721.000	23.184.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.069.000	16.364.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.535.000	18.073.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.320.000	22.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	24.660.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	60.912.000	16.530.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	16.884.000	16.530.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	44.028.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.226.488	298.112.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.020.000	53.712.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.206.488	244.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.582.000	154.322.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.862.000	147.782.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.720.000	6.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	523.248.000	463.297.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	523.248.000	463.297.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	552.644.000	458.024.155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.882.000	83.642.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33.970.000	33.818.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	49.912.000	49.823.856,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.418.000	361.062.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.080.000	1.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.760.000	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.160.000	20.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.600.000	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	93.572.000	80.476.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.408.000	11.976.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.880.000	48.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	116.238.000	94.790.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.400.000	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	14.400.000	2.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.520.000	5.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	80.400.000	67.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.344.000	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.344.000	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	73.750.000	73.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	73.750.000	73.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	73.750.000	73.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.400.000	6.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	6.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.400.000	6.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.071.371.402	15.127.678.699,00	67.475.426.997	62.009.156.869,06	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.071.371.402	15.127.678.699,00	67.475.426.997	62.009.156.869,06	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.531.127.052	9.094.837.747,00	127.081.000	15.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.948.898.224	5.478.484.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.948.898.224	5.478.484.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.611.000	207.530.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	148.500.000	147.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.613.000	26.600.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.498.000	33.240.458,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.690.000	698.871.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.811.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.457.000	87.357.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.900.000	27.268.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.950.000	79.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.852.000	37.089.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	449.995.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.720.000	17.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	127.081.000	15.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	7.537.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	119.544.000	15.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.094.097.828	1.606.616.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	4.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	829.405.000	810.269.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.692.828	791.747.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.830.000	1.103.333.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.250.000	25.373.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.280.000	642.839.273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	385.500.000	206.748.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.100.000	199.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.700.000	29.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	690.875.000	668.066.400,00	15.128.889.496	11.904.791.600,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	290.875.000	271.266.400,00	10.495.168.136	8.469.151.350,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	99.750.000	81.074.400,00	2.399.318.092	2.043.960.100,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	91.125.000	91.125.000,00	1.539.520.302	1.243.265.750,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	0	0,00	5.316.416.213	4.213.784.600,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	100.000.000	99.067.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0	0,00	1.239.913.529	968.140.900,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	396.800.000,00	4.633.721.360	3.435.640.250,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0,00	4.633.721.360	3.435.640.250,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	396.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.406.814.790	2.074.279.000,00	1.956.589.145	1.333.252.934,59	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.406.814.790	2.074.279.000,00	1.956.589.145	1.333.252.934,59	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0,00	910.424.820	392.787.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.406.814.790	2.074.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0,00	394.836.325	393.568.200,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0,00	651.328.000	546.897.734,59	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	67.200.000	67.200.000,00	3.588.500.000	3.579.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.200.000	67.200.000,00	3.588.500.000	3.579.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	67.200.000	67.200.000,00	3.588.500.000	3.579.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	0,00	7.570.223.000	7.553.863.484,47	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	7.570.223.000	7.553.863.484,47	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	0,00	598.907.000	597.401.492,80	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	0	0,00	249.200.000	246.721.482,10	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0	0,00	349.716.000	348.313.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0	0,00	6.372.400.000	6.361.427.509,57	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	487.394.000	219.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	487.394.000	219.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	189.648.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	287.394.000	30.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	975.960.000	830.852.200,00	300.000.000	299.294.850,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	975.960.000	830.852.200,00	300.000.000	299.294.850,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	975.960.000	830.852.200,00	300.000.000	299.294.850,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.007.610.960	861.426.300,00	38.752.423.356	37.271.554.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.007.610.960	861.426.300,00	38.752.423.356	37.271.554.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000	199.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	151.612.500	71.165.000,00	23.518.098.666	22.607.547.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	140.200.000	92.092.500,00	5.285.415.000	5.210.513.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	19.200.000	2.560.000,00	5.849.512.000	5.368.061.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0	0,00	199.399.718	198.778.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460	496.008.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	0	0,00	2.550.950.272	2.541.533.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	0	0,00	1.349.047.700	1.345.122.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	482.754.000	353.814.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	292.938.000	260.255.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	192.942.000	175.414.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	99.996.000	84.841.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	189.816.000	93.559.489,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	40.000.000	20.008.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPIAKI	149.816.000	73.551.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.421.635.600	957.324.468,00	51.721.000	51.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	397.952.000	175.550.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	99.978.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	297.973.900	175.550.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	699.622.100	618.179.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	699.622.100	618.179.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	324.061.500	163.594.564,00	51.721.000	51.500.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	272.587.500	160.887.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	51.474.000	2.707.064,00	51.721.000	51.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.084.083.000	2.876.329.060,00	6.021.809.850	5.659.284.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.084.083.000	2.876.329.060,00	6.021.809.850	5.659.284.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0,00	22.516.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	22.516.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	22.516.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	742.567.000	664.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	650.840.000	600.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	650.840.000	600.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	91.727.000	63.487.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	37.766.000	19.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	53.961.000	44.477.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	116.180.000	77.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	116.180.000	77.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	116.180.000	77.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.618.608.000	1.565.602.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.618.608.000	1.565.602.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.618.608.000	1.565.602.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	606.728.000	568.487.060,00	5.999.293.850	5.659.284.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	606.728.000	568.487.060,00	5.999.293.850	5.659.284.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	194.123.000	190.148.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.2.10.1.04.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	412.605.000	378.339.060,00	5.999.293.850	5.659.284.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.972.811.336	15.404.631.789,00	527.785.000	488.605.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	10.942.317.334	10.765.533.848,00	99.457.000	99.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.799.531.334	6.670.292.348,00	99.457.000	99.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.251.212.334	5.175.855.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.251.212.334	5.175.855.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.350.000	161.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141.350.000	138.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	22.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.032.000	442.708.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.991.000	39.866.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.848.000	45.192.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.211.000	70.794.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.967.000	93.479.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.015.000	33.687.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	159.690.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	99.457.000	99.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	99.457.000	99.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.503.000	85.116.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.303.000	31.070.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.200.000	54.045.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.434.000	805.387.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	647.514.000	626.127.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.664.783,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.920.000	29.595.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.634.780.000	3.620.439.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.330.000	196.369.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	89.250.000	87.909.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	118.080.000	108.460.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.427.450.000	3.424.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.427.450.000	3.424.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	508.006.000	474.802.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	508.006.000	474.802.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.496.000	81.352.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	426.510.000	393.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.030.494.002	4.639.097.941,00	428.328.000	389.505.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.982.572.002	3.635.395.291,00	56.391.000	33.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.459.000	5.088.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.159.000	1.873.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000	3.215.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.990.466.502	1.770.002.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.988.597.502	1.768.339.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.869.000	1.663.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.838.000	1.728.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.838.000	1.728.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.000.000	24.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.500.000	24.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.042.000	491.457.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.994.000	19.844.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.979.000	18.268.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.536.000	30.417.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.995.000	29.474.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.538.000	20.507.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	372.946.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	56.391.000	33.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	56.391.000	33.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.107.166.500	1.060.230.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.629.000	34.111.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.020.000	84.010.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	963.517.500	942.108.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.600.000	282.388.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.650.000	209.120.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.950.000	73.268.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.047.922.000	1.003.702.650,00	371.937.000	356.205.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	38.250.000	37.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	38.250.000	37.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	939.275.000	904.459.650,00	241.026.000	226.805.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	79.480.000	67.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.020.000	27.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	20.160.000	15.750.000,00	180.637.000	167.030.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9.865.000	9.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	801.750.000	783.604.650,00	60.389.000	59.775.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70.397.000	61.683.000,00	130.911.000	129.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.400.000	28.300.000,00	130.911.000	129.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.997.000	33.383.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.732.936.350	6.083.980.795,00	457.655.500	447.119.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.732.936.350	6.083.980.795,00	457.655.500	447.119.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.346.492.350	3.894.453.922,00	457.655.500	447.119.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.092.741.580	1.985.750.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.092.741.580	1.985.750.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.000.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.771.500	465.299.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.695.000	32.169.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.512.000	50.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.508.000	2.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.933.000	56.056.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.523.500	26.511.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000	15.696.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	274.391.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.400.000	7.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	334.952.500	324.575.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	12.151.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	187.919.000	186.875.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	134.882.500	125.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.498.639.270	1.267.743.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.251.000	98.206.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.680.000	76.529.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.254.708.270	1.093.007.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.340.000	168.161.000,00	122.703.000	122.544.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000	37.560.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.380.000	106.237.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000	6.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	4.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000	13.163.000,00	122.703.000	122.544.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	975.925.000	927.809.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.579.000	18.048.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24.579.000	18.048.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	951.346.000	909.761.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	869.160.000	828.478.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.770.000	58.118.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.416.000	23.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	276.081.000	224.682.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	225.552.000	214.194.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	72.090.000	67.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	58.327.000	53.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	55.222.000	54.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.913.000	37.774.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	50.529.000	10.488.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.395.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000	3.400.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000	7.087.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	295.460.000	282.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	26.960.000	24.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.960.000	24.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	268.500.000	257.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	76.500.000	68.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	192.000.000	189.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	795.194.000	712.117.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.230.000	93.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.230.000	93.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	700.964.000	618.446.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	700.964.000	618.446.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	43.784.000	42.743.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.784.000	42.743.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.784.000	42.743.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	94.279.679.480	83.730.768.888,00	7.573.353.488	7.456.007.542,00	0	0,00	0	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.394.672.900	6.603.364.882,00	329.533.000	323.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.394.672.900	6.603.364.882,00	329.533.000	323.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.493.954.400	5.801.726.109,00	329.533.000	323.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.455.000	7.715.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.455.000	7.715.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.575.644.982	4.059.307.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.575.644.982	4.059.307.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.800.000	32.215.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.800.000	26.465.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	5.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.503.000	615.314.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	18.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.503.000	48.806.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	32.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	41.853.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	35.907.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	39.099.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	398.888.165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	329.533.000	323.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	38.215.000	37.787.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	52.720.000	51.413.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	238.598.000	234.300.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.403.964	731.510.467,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320.984.448	300.577.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.768.000	93.010.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.651.516	337.922.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.147.454	355.663.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.387.454	227.945.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.800.000	121.264.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.960.000	6.454.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	33.000.000	30.783.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	33.000.000	30.783.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	33.000.000	30.783.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	622.217.500	552.050.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	622.217.500	552.050.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	403.160.000	378.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	219.057.500	173.481.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	55.885.000	49.520.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55.885.000	49.520.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	55.885.000	49.520.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000	169.283.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.092.000	21.848.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.456.000	10.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.636.000	10.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	163.524.000	147.435.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.862.000	53.604.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	27.024.456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.138.000	7.171.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.524.000	59.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	790.313.000	606.829.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	790.313.000	606.829.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.037.000	34.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.037.000	34.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.037.000	34.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	265.878.000	185.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.104.000	95.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.104.000	95.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000	90.252.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000	90.252.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.041.000	52.816.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.041.000	52.816.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.041.000	52.816.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000	99.007.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000	99.007.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000	99.007.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	290.194.000	234.013.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.968.000	69.532.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000	69.532.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.826.000	95.480.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000	95.480.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	69.000.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.08.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000	69.000.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	313.792.892	293.766.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	313.792.892	293.766.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	193.792.892	190.506.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	58.231.000	56.964.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.500.000	28.533.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	18.731.000	18.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.000.000	9.751.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	51.409.392	50.868.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51.409.392	50.868.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	84.152.500	82.674.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.000.000	9.877.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	74.152.500	72.796.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000	19.545.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000	9.676.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000	9.676.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.868.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	10.000.000	9.868.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000	83.715.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	83.715.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	83.715.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	500.305.000	307.592.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	500.305.000	307.592.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	500.305.000	307.592.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	500.305.000	307.592.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	139.760.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.2.10.1.04.01.0000	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	360.545.000	307.592.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.567.988.504	10.745.008.666,00	1.144.413.500	1.123.547.439,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	12.567.988.504	10.745.008.666,00	1.144.413.500	1.123.547.439,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.457.917.210	4.991.035.572,00	172.803.000	170.145.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.071.938.848	3.817.171.761,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.071.938.848	3.817.171.761,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.700.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.700.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.991.000	364.287.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.971.000	3.683.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.673.000	38.715.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.350.000	28.236.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.997.000	4.210.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	280.394.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	172.803.000	170.145.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	172.803.000	170.145.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.447.362	632.465.411,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	125.715.411,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.447.362	504.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.840.000	163.610.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.350.000	154.460.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.490.000	9.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	324.689.000	258.837.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	257.931.000	215.796.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	257.931.000	215.796.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	66.758.000	43.041.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	66.758.000	43.041.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	682.193.800	493.487.658,00	595.133.500	578.059.439,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	503.354.300	327.741.758,00	583.873.500	566.830.439,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	157.241.000	26.699.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	346.113.300	301.042.758,00	583.873.500	566.830.439,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10.560.000	8.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	10.560.000	8.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	168.279.500	157.320.900,00	11.260.000	11.229.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	168.279.500	157.320.900,00	11.260.000	11.229.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	0,00	4.861.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0	0,00	4.861.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	0	0,00	4.861.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39.087.500	35.391.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	39.087.500	35.391.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.087.500	35.391.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	22.681.000	6.216.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.681.000	6.216.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.553.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.128.000	6.216.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.424.000	25.974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	26.424.000	25.974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	26.424.000	25.974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	205.232.000	181.071.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.232.000	181.071.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	153.196.000	135.002.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	46.681.000	46.069.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	5.355.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	57.783.000	840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.783.000	840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57.783.000	840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	52.627.500	30.687.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	52.627.500	30.687.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	19.756.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	32.871.500	30.687.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.699.353.494	4.721.467.000,00	371.616.000	370.543.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.699.353.494	4.721.467.000,00	371.616.000	370.543.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.552.000	630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	0,00	12.576.000	12.543.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	0	0,00	359.040.000	358.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.692.801.494	4.720.837.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	5.439.784.008	5.023.503.683,00	174.534.000	172.775.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.439.784.008	5.023.503.683,00	174.534.000	172.775.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.613.069.008	4.234.736.683,00	174.534.000	172.775.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.762.000	5.799.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.762.000	5.799.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.193.736.302	2.964.059.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.193.736.302	2.964.059.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	712.839.500	660.931.039,00	174.534.000	172.775.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.896.000	12.563.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.759.000	161.819.000,00	174.534.000	172.775.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.873.000	33.533.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.024.000	41.539.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	5.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	1.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	349.952.339,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.687.500	53.797.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.251.206	329.521.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.032.000	1.532.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.178.000	92.608.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.041.206	235.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.480.000	268.925.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000	39.281.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.360.000	172.399.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000	33.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.570.000	23.395.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	327.290.500	302.985.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	327.290.500	302.985.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10.636.000	10.464.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98.850.000	98.736.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	217.804.500	193.785.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	265.230.000	253.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	168.331.000	166.316.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	168.331.000	166.316.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	96.899.000	87.525.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	96.899.000	87.525.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	234.194.500	231.939.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	75.252.000	73.817.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	75.252.000	73.817.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	158.942.500	158.122.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	158.942.500	158.122.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.699.923.494	6.891.418.970,00	69.509.000	68.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.699.923.494	6.891.418.970,00	69.509.000	68.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.785.927.494	5.148.438.831,00	69.509.000	68.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.526.900.670	4.096.397.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.526.900.670	4.096.397.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.372.000	235.071.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.021.000	5.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.351.000	4.695.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.595.000	23.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.401.000	15.409.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	181.971.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.004.000	4.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	69.509.000	68.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	69.509.000	68.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.872.824	621.024.274,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000	46.898.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.872.824	572.125.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.282.000	195.945.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000	39.543.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.140.000	145.147.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.592.000	11.255.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.242.071.500	1.083.604.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.242.071.500	1.083.604.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.009.125.000	922.763.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	70.037.500	47.846.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5.408.000	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	41.100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	116.401.000	112.094.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	671.924.500	659.376.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	671.924.500	659.376.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18.216.000	18.112.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	78.958.500	71.421.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	574.750.000	569.842.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.742.845.000	2.752.657.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.742.845.000	2.752.657.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	603.502.000	545.203.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	41.423.500	29.082.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.945.500	21.826.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	17.478.000	7.256.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	562.078.500	516.121.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	95.695.000	65.714.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	371.400.000	365.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	44.984.000	41.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	49.999.500	43.037.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.976.655.000	1.362.066.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.271.435.000	929.393.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	57.466.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	526.000.000	439.762.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	191.600.000	132.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	280.653.000	203.846.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	133.182.000	96.069.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	196.450.000	111.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	117.000.000	81.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	48.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	31.450.000	29.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	253.020.000	97.722.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	68.315.000	27.192.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	159.903.000	59.115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.850.000	4.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	9.952.000	7.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	255.750.000	223.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	252.000.000	223.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.162.688.000	845.387.884,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	386.369.000	283.872.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.554.000	19.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	239.085.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.781.000	20.562.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	15.034.000	5.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	776.319.000	561.515.884,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.574.000	7.079.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	81.045.000	72.636.884,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	327.000.000	122.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	359.700.000	359.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.547.330.218	11.258.472.135,00	4.722.934.988	4.695.338.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	12.547.330.218	11.258.472.135,00	4.722.934.988	4.695.338.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.402.556.944	4.920.226.734,00	163.969.000	153.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.214.000	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.214.000	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.067.392.944	2.897.743.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.392.944	2.897.743.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.140.000	50.449.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.500.000	21.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.664.000	29.049.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.976.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	835.552.000	696.387.579,00	2.879.000	2.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.986.000	10.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.078.000	45.838.000,00	2.879.000	2.650.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.066.000	38.471.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.994.000	15.823.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.220.000	77.610.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.208.000	508.394.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	161.090.000	151.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	161.090.000	151.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	776.358.000	705.814.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.263.000	45.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.920.000	97.204.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.175.000	563.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.900.000	564.946.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	39.989.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.010.000	460.146.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.800.000	40.360.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.840.000	24.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.502.918.774	6.015.323.361,00	4.061.368.488	4.048.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.400.664.900	5.263.297.223,00	2.621.126.488	2.609.850.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	464.708.000	454.675.000,00	2.400.954.488	2.390.512.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.935.956.900	4.808.622.223,00	220.172.000	219.338.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	134.115.500	130.327.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	134.115.500	130.327.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	9.695.000	7.487.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	9.695.000	7.487.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	240.091.000	235.990.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.694.000	20.863.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.200.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.197.000	200.126.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	185.709.500	148.298.258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	65.920.500	55.957.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	78.246.000	55.610.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	41.543.000	36.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	498.242.874	209.222.500,00	1.436.504.000	1.434.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	164.998.500	122.592.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	333.244.374	86.630.000,00	1.436.504.000	1.434.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.900.000	6.300.000,00	3.738.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	7.900.000	6.300.000,00	3.738.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.500.000	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.500.000	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	641.854.500	322.922.040,00	497.597.500	493.438.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	541.854.500	322.922.040,00	497.597.500	493.438.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	541.854.500	322.922.040,00	497.597.500	493.438.500,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.420.554.030	9.511.085.431,00	495.820.000	462.750.500,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.420.554.030	9.511.085.431,00	495.820.000	462.750.500,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.545.217.430	5.974.551.213,00	262.460.000	231.044.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.872.367.430	4.493.975.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.872.367.430	4.493.975.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.222.000	39.714.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.222.000	39.714.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.275.000	584.589.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.036.000	33.122.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.284.000	57.180.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.965.000	49.127.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.990.000	59.844.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	385.314.844,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	262.460.000	231.044.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	36.810.000	36.329.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	225.650.000	194.715.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.964.500	456.115.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.562.500	69.942.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.080.000	154.146.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.322.000	232.026.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.388.500	400.156.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.776.500	217.736.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.662.000	121.545.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.950.000	49.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	11.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.225.653.000	1.051.580.773,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.225.653.000	1.051.580.773,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	31.330.000	27.651.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	527.002.500	471.294.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	277.732.500	219.287.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	293.375.000	255.768.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	96.213.000	77.578.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.649.683.600	2.484.953.445,00	233.360.000	231.706.500,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.119.981.600	2.091.905.133,00	126.044.000	125.424.500,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.598.100	14.142.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.099.383.500	2.077.762.623,00	126.044.000	125.424.500,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	529.702.000	393.048.312,00	107.316.000	106.282.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	50.000	0,00	94.531.500	93.880.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5.329.000	5.259.720,00	12.784.500	12.402.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	15.460.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	138.731.000	123.480.646,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	237.883.000	175.881.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	132.249.000	88.426.819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	999.182.840	743.617.617,00	100.000.000	99.639.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	999.182.840	743.617.617,00	100.000.000	99.639.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	71.445.000	34.918.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	71.445.000	34.918.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	71.445.000	34.918.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	158.909.000	106.431.443,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	158.909.000	106.431.443,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	158.909.000	106.431.443,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	274.245.000	215.827.336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	274.245.000	215.827.336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000	30.068.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	241.245.000	185.758.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	494.583.840	386.440.438,00	100.000.000	99.639.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	494.583.840	386.440.438,00	100.000.000	99.639.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.06.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	494.583.840	386.440.438,00	100.000.000	99.639.500,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.061.894.495	5.190.284.547,00	297.639.000	295.178.603,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.061.894.495	5.190.284.547,00	297.639.000	295.178.603,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.656.964.995	3.982.448.093,00	250.614.000	249.858.603,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.350.000	5.907.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.350.000	5.907.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.165.150	2.414.591.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.165.150	2.414.591.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.491.000	575.598.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.215.000	18.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.060.000	102.228.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.400.000	27.557.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.949.000	30.330.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.457.000	39.971.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.435.000	3.392.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.975.000	4.222.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	349.235.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	50.614.000	50.022.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	50.614.000	50.022.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.278.845	634.501.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	183.575.000	181.877.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.660.000	126.928.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.043.845	325.695.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.680.000	339.849.700,00	200.000.000	199.836.603,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.130.000	129.616.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.150.000	189.285.500,00	200.000.000	199.836.603,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.400.000	20.948.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.246.000	33.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.026.000	2.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.026.000	2.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	30.220.000	30.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	30.220.000	30.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	367.385.000	347.305.593,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	367.385.000	347.305.593,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	237.452.000	229.911.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	129.933.000	117.394.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	234.670.000	222.330.000,00	47.025.000	45.320.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	234.670.000	222.330.000,00	47.025.000	45.320.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	196.610.000	193.435.000,00	47.025.000	45.320.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	38.060.000	28.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	716.485.500	562.151.861,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	716.485.500	562.151.861,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	125.940.500	50.338.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	405.144.000	348.148.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	185.401.000	163.665.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.143.000	43.039.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.143.000	43.039.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	47.143.000	43.039.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.642.754.114	11.709.911.347,00	184.894.000	171.818.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.642.754.114	11.709.911.347,00	184.894.000	171.818.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.652.328.514	5.971.486.803,00	112.404.000	99.638.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.234.000	7.807.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.234.000	7.807.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.509.560.514	3.271.756.059,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.560.514	3.271.756.059,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.795.000	402.793.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	22.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	62.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.869.000	14.119.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.976.000	40.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000	19.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	74.950.000	54.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	189.579.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	112.404.000	99.638.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	12.151.000	9.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	100.253.000	89.738.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.456.159.000	1.287.586.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	620.291.000	575.513.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.843.000	149.760.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.987.000	269.858.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.038.000	292.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.099.580.000	1.001.543.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263.030.000	220.510.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.995.000	33.375.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.852.000	39.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	736.703.000	708.157.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	680.467.000	630.732.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	451.594.000	423.174.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	24.993.000	24.993.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	115.926.000	103.700.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	35.625.000	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	275.050.000	259.481.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.873.000	207.557.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	78.596.000	71.596.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.277.000	135.961.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.043.186.600	4.860.719.794,00	72.490.000	72.180.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.448.000	56.505.200,00	72.490.000	72.180.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	74.999.000	56.505.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	720.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	729.000	0,00	72.490.000	72.180.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891.096.600	834.176.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	384.511.500	338.246.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	499.985.100	495.930.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	6.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	455.938.000	376.665.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	49.800.000	47.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	349.343.000	280.966.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	13.092.000	12.299.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	43.703.000	35.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.009.278.000	3.006.954.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.000.000.000	3.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	9.278.000	6.954.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	610.426.000	586.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	260.999.000	260.769.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	75.977.000	65.977.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	273.450.000	259.672.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	266.772.000	246.972.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	266.772.000	246.972.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	48.181.000	38.783.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	95.000.000	93.467.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	123.591.000	114.722.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	274.361.000	230.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	274.361.000	230.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	274.361.000	230.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274.361.000	230.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	174.608.000	153.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	99.753.000	76.266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	281.359.000	237.287.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	281.359.000	237.287.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	281.359.000	237.287.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	281.359.000	237.287.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.346.000	10.112.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.872.000	38.708.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	193.141.000	188.466.901,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.175.909.802	6.419.395.517,00	43.796.000	42.860.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.175.909.802	6.419.395.517,00	43.796.000	42.860.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.429.378.844	4.737.904.041,00	43.796.000	42.860.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.406.229.138	2.974.183.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.406.229.138	2.974.183.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.145.000	537.547.092,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	20.818.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	51.372.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	34.926.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.145.000	58.852.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	30.125.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	341.452.592,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	43.796.000	42.860.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	43.796.000	42.860.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.640.706	921.277.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.900.000	138.382.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	843.740.706	782.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.364.000	304.895.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.300.000	34.457.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.080.000	201.944.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.984.000	38.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	29.494.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.644.140.000	1.604.111.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	946.162.000	907.193.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	946.162.000	907.193.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.932.000	156.892.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	157.932.000	156.892.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	540.046.000	540.026.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	540.046.000	540.026.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	31.168.000	29.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.168.000	29.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	31.168.000	29.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	34.505.000	12.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	34.505.000	12.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	34.505.000	12.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	36.717.958	34.654.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	36.717.958	34.654.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.03.0000	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	36.717.958	34.654.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.192.533.183	4.988.069.464,00	10.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.192.533.183	4.988.069.464,00	10.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.731.469.683	4.547.507.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.761.528.048	3.703.172.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.761.528.048	3.703.172.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.055.000	45.672.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.055.000	45.672.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.452.000	253.538.383,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.060.000	11.055.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.800.000	43.831.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.755.000	19.444.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.918.000	35.972.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.919.000	18.405.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.829.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.624.635	379.043.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.256.000	1.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.100.000	83.938.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.268.635	293.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.810.000	166.080.249,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.850.000	34.819.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.230.000	115.150.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.730.000	16.110.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	450.015.500	429.731.744,00	10.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	363.752.500	353.639.027,00	10.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.785.000	91.201.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.967.500	262.437.901,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0	0,00	10.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.263.000	76.092.717,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	68.375.000	58.571.717,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.888.000	17.521.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11.048.000	10.830.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	11.048.000	10.830.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	11.048.000	10.830.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	234.176.000	218.465.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	234.176.000	218.465.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	234.176.000	218.465.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	85.206.000	79.915.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	21.960.000	21.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	63.246.000	57.955.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	34.267.000	33.762.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	34.267.000	33.762.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	114.703.000	104.787.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	73.368.000	64.120.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	41.335.000	40.666.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	40.957.027.142	37.208.781.784,00	5.607.919.000	3.152.348.662,00	0	0,00	0	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.254.978.990	14.177.172.307,00	1.892.266.000	1.683.795.912,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	15.254.978.990	14.177.172.307,00	1.892.266.000	1.683.795.912,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.489.224.690	5.938.179.223,00	519.281.000	458.753.150,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.000.000	161.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	162.000.000	161.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.281.189.900	3.987.989.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.189.900	3.987.989.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.255.000	111.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.255.000	28.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.500.000	26.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.500.000	56.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.463.000	656.788.559,00	72.560.000	71.750.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.858.000	49.118.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.068.000	93.795.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.995.000	2.880.000,00	70.112.000	69.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.356.000	66.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.136.000	41.148.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	388.521.459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.050.000	14.905.000,00	2.448.000	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	185.711.000	181.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	185.711.000	181.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.015.874	508.055.301,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	168.131.500	131.940.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.600.000	167.289.301,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.987.000	12.172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.297.374	196.653.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.300.916	512.330.400,00	261.010.000	205.853.150,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	39.925.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.900.916	352.783.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.150.000	47.128.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.000.000	72.493.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	261.010.000	205.853.150,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.329.830.800	4.055.717.524,00	199.700.000	198.628.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.523.753.000	3.335.504.600,00	199.700.000	198.628.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	283.679.000	247.224.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0,00	199.700.000	198.628.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.240.074.000	3.088.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	670.230.000	615.574.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	494.242.500	442.255.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	175.987.500	173.318.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	82.806.500	82.460.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	82.806.500	82.460.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.041.300	22.178.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	53.041.300	22.178.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.935.925.500	2.812.027.890,00	521.920.000	465.925.520,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	294.009.000	262.992.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	157.080.000	136.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	136.929.000	126.392.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.870.000	45.468.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.870.000	45.468.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.596.046.500	2.503.567.650,00	521.920.000	465.925.520,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.469.000	73.370.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.163.593.500	1.114.244.604,00	521.920.000	465.925.520,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.348.160.000	1.308.267.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.824.000	7.684.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	109.073.500	70.730.470,00	5.694.000	5.105.842,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	109.073.500	70.730.470,00	5.694.000	5.105.842,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	71.189.500	36.743.000,00	5.090.000	4.600.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	37.884.000	33.987.470,00	604.000	505.842,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.390.924.500	1.300.517.200,00	645.671.000	555.383.400,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	219.100.500	190.046.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.100.500	190.046.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	220.769.000	206.277.000,00	589.061.000	499.833.400,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	220.769.000	206.277.000,00	589.061.000	499.833.400,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	951.055.000	904.193.500,00	56.610.000	55.550.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	108.005.500	68.666.000,00	56.610.000	55.550.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	843.049.500	835.527.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.361.956.202	2.692.882.856,00	2.842.397.000	724.660.750,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.361.956.202	2.692.882.856,00	2.842.397.000	724.660.750,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.841.086.202	1.226.429.582,00	2.842.397.000	724.660.750,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.211.567.702	1.120.397.582,00	2.842.397.000	724.660.750,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0,00	2.842.397.000	724.660.750,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	857.140.702	782.730.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	354.427.000	337.667.082,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	114.518.500	106.032.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	49.969.000	46.798.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	64.549.500	59.233.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	739.325.000	720.660.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	739.325.000	720.660.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	195.725.000	185.219.986,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	543.600.000	535.440.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	781.545.000	745.792.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	681.659.000	667.130.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.659.000	667.130.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	99.886.000	78.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	99.886.000	78.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14.370.776.032	13.232.846.257,00	213.682.000	186.646.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	14.370.776.032	13.232.846.257,00	213.682.000	186.646.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.979.703.732	10.459.272.296,00	67.497.000	62.440.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.955.000	18.270.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.955.000	18.270.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.014.452.568	8.755.899.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.014.452.568	8.755.899.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.100.000	78.147.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.600.000	54.522.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.500.000	23.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.267.000	504.809.924,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.018.000	15.212.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.171.000	59.589.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.185.000	45.029.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.114.000	51.162.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.447.000	32.037.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.572.000	2.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	296.619.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	65.497.000	60.440.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	59.873.000	54.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	5.624.000	5.555.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.921.164	784.195.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	3.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.760.000	134.889.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.158.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	646.961.164	641.517.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.008.000	317.949.995,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	35.061.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.230.000	185.646.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.128.000	53.979.300,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.360.000	33.161.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.040.000	10.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.655.619.300	1.392.503.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.383.119.300	1.180.203.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.383.119.300	1.180.203.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	272.500.000	212.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	272.500.000	212.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	0,00	3.500.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0	0,00	3.500.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0	0,00	3.500.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	204.758.000	181.515.774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	186.585.000	165.446.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.585.000	165.446.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	18.173.000	16.068.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	18.173.000	16.068.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.994.000	91.617.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	99.994.000	91.617.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	99.994.000	91.617.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	648.876.000	513.099.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	648.876.000	513.099.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	648.876.000	513.099.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	781.825.000	594.837.564,00	142.685.000	120.706.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	781.825.000	594.837.564,00	142.685.000	120.706.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	148.043.000	118.867.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	515.911.000	375.531.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0	0,00	142.685.000	120.706.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	97.885.000	85.649.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.986.000	14.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.435.952.918	6.731.363.856,00	659.574.000	557.246.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.435.952.918	6.731.363.856,00	659.574.000	557.246.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.773.572.918	4.220.492.656,00	364.035.000	281.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.994.000	3.696.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.994.000	3.696.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.449.719.418	3.116.725.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.449.719.418	3.116.725.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.622.000	433.997.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.256.000	11.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.558.000	92.021.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.961.000	31.651.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.151.000	31.203.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.588.000	42.872.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.640.000	1.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.468.000	4.242.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	218.721.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	364.035.000	281.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	232.804.000	168.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	131.231.000	113.350.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.837.500	375.947.219,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.987.500	34.687.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.620.000	73.149.719,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.230.000	268.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.400.000	273.125.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.420.000	210.466.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.880.000	43.903.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.100.000	18.756.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.144.525.000	1.033.791.921,00	234.518.000	233.646.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.144.525.000	1.033.791.921,00	234.518.000	233.646.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0,00	199.700.000	199.370.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.144.525.000	1.033.791.921,00	34.818.000	34.276.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.414.182.000	1.391.032.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.900.000	21.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.900.000	21.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.373.307.000	1.363.312.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	76.470.000	74.011.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.296.837.000	1.289.301.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.975.000	6.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.975.000	6.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	103.673.000	86.046.479,00	61.021.000	42.250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	103.673.000	86.046.479,00	61.021.000	42.250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	86.173.000	69.027.691,00	61.021.000	42.250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.500.000	17.018.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	533.363.000	374.516.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	533.363.000	374.516.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	489.503.000	332.016.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	489.503.000	332.016.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4.953.000	4.503.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	43.208.000	41.329.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6.210.000	6.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	422.002.000	270.321.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	13.130.000	9.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.061.000	2.798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.061.000	2.798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.061.000	2.798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	40.799.000	39.702.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	40.799.000	39.702.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.14.0000	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas	40.799.000	39.702.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	91.113.605.190	82.233.037.788,00	2.554.338.000	2.303.802.494,00	0	0,00	0	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	46.404.732.164	43.238.348.826,00	1.655.826.000	1.488.527.500,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	46.404.732.164	43.238.348.826,00	1.655.826.000	1.488.527.500,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.025.092.664	30.553.169.527,00	1.655.826.000	1.488.527.500,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	122.826.626,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000	122.826.626,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.589.519.520	14.656.175.171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.489.519.520	14.570.784.671,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000	67.780.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	17.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.327.000	31.837.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.327.000	31.837.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.773.800	232.778.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.771.800	60.769.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.002.000	172.009.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.056.694.000	2.952.444.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	237.973.000	230.391.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	915.699.000	854.951.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.272.000	123.853.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	144.750.000	143.515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.600.000.000	1.599.733.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.290.000	10.600.000,00	1.655.826.000	1.488.527.500,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	991.680.000	847.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	132.176.000	130.207.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.290.000	10.600.000,00	531.970.000	511.320.500,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.929.494.568	4.394.183.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.013.400.000	896.369.988,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.679.000	237.805.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.635.415.568	3.260.008.498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.547.405.000	3.165.316.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.890.000	407.107.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.710.015.000	1.625.790.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	17.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	682.200.000	586.937.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.710.000	336.331.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.590.000	191.650.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.111.378.276	898.972.068,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	468.291.138	342.238.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	213.258.350	167.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	9.533.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	409.828.788	380.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.409.845.000	2.315.026.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	338.938.000	336.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	337.609.000	308.836.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.733.298.000	1.669.196.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	555.867.500	458.439.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	143.520.000	101.543.306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.621.000	71.130.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	257.144.500	239.862.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.582.000	45.903.256,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.365.498.000	1.314.569.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	676.038.500	667.714.431,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	440.742.000	410.736.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	248.717.500	236.118.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.960.279.000	11.352.050.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	332.835.000	314.996.235,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	279.467.500	266.367.735,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.217.500	23.253.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	27.150.000	25.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.937.547.000	10.459.106.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.194.547.000	8.928.913.685,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	120.000.000	97.805.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000	1.432.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	586.358.500	476.213.577,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	174.030.000	164.330.263,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	149.018.500	82.681.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	263.310.000	229.202.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	103.538.500	101.733.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	93.284.500	91.658.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.254.000	10.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.419.360.500	1.333.128.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	349.991.500	327.882.897,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000	85.304.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	199.998.000	198.972.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.993.500	43.605.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	144.514.000	128.491.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	94.067.500	88.067.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.446.500	40.423.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	864.895.000	820.544.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	401.997.500	385.046.855,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	263.339.500	255.266.732,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	199.558.000	180.231.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	59.960.000	56.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	49.960.000	46.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	44.708.873.026	38.994.688.962,00	898.512.000	815.274.994,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	44.708.873.026	38.994.688.962,00	898.512.000	815.274.994,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.284.308.026	20.778.027.409,00	898.512.000	815.274.994,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.765.049.402	2.739.034.863,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.049.402	2.739.034.863,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	634.292.000	531.482.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112.292.000	89.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	32.502.829,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	447.000.000	409.299.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.221.154.000	1.788.923.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.983.000	47.684.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	746.618.000	692.121.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	81.950.000	64.196.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	731.849.000	535.129.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.963.000	121.553.105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.796.000	30.689.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	255.797.958,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.995.000	41.752.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	743.472.000	713.644.516,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	289.364.500	287.250.016,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	389.633.500	362.198.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	64.474.000	64.196.500,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.539.770.716	1.197.753.453,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.100.000	255.448.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.194.670.716	932.805.054,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.999.908	589.757.230,00	155.040.000	101.630.478,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	39.327.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	483.014.908	300.062.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.838.000	69.099.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.090.000	149.296.000,00	102.335.000	62.887.950,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.807.000	31.971.430,00	52.705.000	38.742.528,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.116.087.000	13.773.985.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.259.247.000	12.974.362.076,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	468.340.000	448.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	388.500.000	350.873.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	169.955.000	157.090.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.002.000	995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	96.458.000	88.331.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	72.495.000	67.764.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.424.565.000	18.216.661.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.373.963.000	1.269.787.576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.333.963.000	1.265.521.576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	40.000.000	4.266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	88.512.500	59.147.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	20.420.000	14.937.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.420.000	8.017.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	20.420.000	20.124.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	20.420.000	11.416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6.832.500	4.652.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	13.123.016.000	10.713.612.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.928.740.500	3.285.437.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	65.500.000	55.160.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.277.049.500	3.293.600.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.371.000.000	2.634.873.264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	701.173.500	675.213.005,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	477.000.000	474.454.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	302.552.500	294.874.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.162.233.500	1.126.883.652,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	650.000.000	539.753.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	750.000.000	38.393.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	217.500.000	145.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270.000.000	213.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	119.937.500	90.187.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.796.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	145.000.000	99.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	563.350.000	353.412.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	563.350.000	353.412.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.113.490.000	4.693.817.545,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.900.000.000	4.560.637.745,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	31.896.000	22.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	181.594.000	110.529.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	32.289.108.289	29.006.166.518,00	381.167.000	335.787.000,00	1.000.000.000	559.132.832,00	99.516.985.978	98.177.657.224,84

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01			PERENCANAAN	8.477.825.758	7.138.631.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.477.825.758	7.138.631.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.857.678.258	5.848.354.579,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.270.000	3.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.270.000	3.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.735.696.262	4.158.311.148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.735.696.262	4.158.311.148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.960.000	44.385.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.960.000	44.385.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.277.000	692.113.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.823.000	15.509.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.823.000	29.029.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.293.000	43.272.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.457.000	62.133.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.956.000	16.242.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.000.000	524.222.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.925.000	1.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.614.996	727.702.457,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.284.000	21.976.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	102.547.057,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	837.330.996	603.179.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.860.000	222.571.124,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	39.615.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.650.000	117.099.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	160.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.080.000	37.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.320.000	28.056.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	502.114.500	453.878.913,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	417.311.000	377.986.326,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.942.000	13.942.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	37.369.000	33.643.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.200.000	4.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	361.800.000	326.200.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.803.500	75.892.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84.803.500	75.892.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.118.033.000	836.397.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	668.654.000	468.322.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.207.000	70.521.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.847.000	40.211.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.754.000	17.347.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50.034.000	31.770.355,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.182.000	95.584.483,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	104.224.000	71.065.299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	36.503.000	18.343.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	182.903.000	123.479.124,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	212.134.000	167.764.043,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.560.000	62.277.416,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.031.000	13.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.240.000	9.741.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	21.859.000	19.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.328.000	25.557.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.361.000	8.959.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.117.000	14.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	14.638.000	14.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	237.245.000	200.311.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.266.000	58.252.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.619.000	13.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.976.000	9.254.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8.539.000	7.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	92.583.000	75.408.423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.099.000	5.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.339.000	12.124.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	18.824.000	18.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	14.624.900.921	13.236.890.066,00	258.530.000	215.337.000,00	1.000.000.000	559.132.832,00	99.516.985.978	98.177.657.224,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14.624.900.921	13.236.890.066,00	258.530.000	215.337.000,00	1.000.000.000	559.132.832,00	99.516.985.978	98.177.657.224,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.724.851.185	9.915.302.846,00	215.418.000	175.137.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.175.000	17.202.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.917.000	10.265.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.258.000	6.936.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.923.291.021	8.308.374.621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.895.670.021	8.285.133.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.621.000	23.241.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.154.000	49.817.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.712.000	23.627.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.442.000	26.189.336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	840.396.000	757.395.379,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.069.000	12.722.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.727.000	8.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.447.000	41.265.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.549.000	29.230.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.522.000	27.787.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	583.882.816,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.690.000	24.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44.392.000	29.577.813,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	215.418.000	175.137.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	77.510.000	74.780.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	137.908.000	100.357.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.763.332	391.154.457,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.524.000	66.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.750.000	177.656.957,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.489.332	147.187.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.071.832	391.358.893,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.458	67.639.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.871.374	235.321.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.720.000	42.890.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.480.000	45.506.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.535.154.200	1.293.158.217,00	0	0,00	1.000.000.000	559.132.832,00	99.516.985.978	98.177.657.224,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	579.414.500	526.370.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	46.000.000	43.239.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	42.911.000	39.434.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	127.923.000	121.783.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	110.078.000	95.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.764.000	3.683.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.071.000	4.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	63.645.000	50.632.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	69.159.500	59.562.332,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	110.863.000	107.563.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	548.635.700	471.239.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.264.700	232.458.109,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000	32.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	122.802.000	103.623.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	85.042.000	80.219.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000	22.063.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	407.104.000	295.548.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	108.075.000	60.290.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.079.000	44.970.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.789.000	116.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	67.803.000	55.929.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	32.358.000	18.192.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0,00	0	0,00	1.000.000.000	559.132.832,00	99.516.985.978	98.177.657.224,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93.176.934.900	93.176.611.595,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0	0,00	1.000.000.000	559.132.832,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.340.051.078	5.001.045.629,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	734.551.536	641.567.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	734.551.536	641.567.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	81.971.500	66.159.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	49.114.000	44.497.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.589.500	45.486.167,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	274.070.536	246.202.121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	232.483.000	200.531.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	39.323.000	38.692.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.630.344.000	1.386.861.103,00	43.112.000	40.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.630.344.000	1.386.861.103,00	43.112.000	40.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	86.180.500	53.158.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0,00	43.112.000	40.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	199.349.500	168.399.577,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	35.802.000	24.587.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	329.843.000	251.051.413,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	37.086.000	29.062.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	76.620.000	58.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15.463.000	13.131.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	850.000.000	789.165.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	7.312.532.610	6.980.134.781,00	122.637.000	120.450.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.312.532.610	6.980.134.781,00	122.637.000	120.450.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.710.552.610	5.529.507.862,00	122.637.000	120.450.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.559.000	65.769.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.508.000	64.009.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.051.000	1.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.042.797.794	4.035.008.606,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.033.542.794	4.026.686.606,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.255.000	8.322.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.788.000	62.952.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.788.000	62.952.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.654.000	614.113.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.680.000	19.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.314.000	27.449.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.160.000	67.312.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	498.968.187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	122.637.000	120.450.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	122.637.000	120.450.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.546.635	433.269.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91.850.000	91.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.240.000	183.122.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.456.635	158.297.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.207.181	318.395.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.303.727	68.256.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.677.454	186.521.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.226.000	63.617.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.601.980.000	1.450.626.919,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	313.130.500	257.201.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4.221.000	4.156.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	244.512.000	195.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7.348.000	5.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	57.049.500	52.218.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	274.923.500	240.912.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	23.906.000	17.284.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	69.118.000	54.608.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	181.899.500	169.019.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	953.420.000	896.733.129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	7.119.000	6.448.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	367.349.000	332.122.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	578.952.000	558.161.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.506.000	55.778.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.506.000	55.778.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	922.595.000	860.206.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	922.595.000	860.206.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	922.595.000	860.206.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	47.767.000	38.825.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	47.767.000	38.825.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	874.828.000	821.380.545,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	675.251.000	645.144.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	199.577.000	176.236.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	951.254.000	790.304.272,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	951.254.000	790.304.272,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	951.254.000	790.304.272,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	32.291.000	25.783.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	32.291.000	25.783.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	231.563.000	203.687.273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	231.563.000	203.687.273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	687.400.000	560.833.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	290.334.000	194.924.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	311.371.000	292.702.784,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	85.695.000	73.207.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.061.766.322	12.043.811.537,00	513.076.000	509.514.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	13.061.766.322	12.043.811.537,00	513.076.000	509.514.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	13.061.766.322	12.043.811.537,00	513.076.000	509.514.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.536.561.322	10.866.366.983,00	513.076.000	509.514.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.282.996.322	8.906.991.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.282.996.322	8.906.991.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528.668.000	464.690.518,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.650.000	39.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	487.018.000	425.000.518,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	851.884.000	731.401.296,00	135.473.000	134.814.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.323.000	14.642.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.068.000	72.205.000,00	123.251.000	123.099.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.369.000	25.469.500,00	12.222.000	11.715.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.962.000	130.911.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.162.000	41.004.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	447.168.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	682.000	0,00	377.603.000	374.700.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	55.395.000	53.700.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	276.700.000	276.200.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	682.000	0,00	45.508.000	44.800.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.431.000	535.001.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96.366.000	79.141.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.420.000	124.355.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.890.000	4.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.755.000	326.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.900.000	228.281.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.900.000	202.006.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	26.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.076.424.000	819.117.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	860.414.000	642.402.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46.920.000	28.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	271.350.000	248.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	120.030.000	91.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	87.600.000	64.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	155.390.000	114.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	179.124.000	95.022.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	216.010.000	176.715.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	123.390.000	103.175.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	92.620.000	73.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	448.781.000	358.327.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	448.781.000	358.327.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	86.430.000	38.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	362.351.000	319.957.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	22.999.376.106	21.627.659.004,00	386.229.000	361.227.600,00	0	0,00	0	0,00
7.01			KECAMATAN	22.999.376.106	21.627.659.004,00	386.229.000	361.227.600,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Manggar	3.788.594.079	3.418.433.239,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.009.417.600	2.677.056.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.523.000	3.491.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.523.000	3.491.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.943.100	1.717.025.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.976.943.100	1.717.025.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.915.000	278.982.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.200.000	19.488.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.751.000	37.353.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.702.000	11.557.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.262.000	44.479.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	6.424.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.680.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.416.500	481.087.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.880.000	96.100.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.536.500	383.987.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.620.000	190.968.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.300.000	34.675.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.460.000	113.453.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.340.000	33.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.520.000	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.082.000	44.491.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.995.000	28.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.995.000	28.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.087.000	16.111.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.087.000	16.111.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	594.646.479	566.727.109,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	594.646.479	566.727.109,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	594.646.479	566.727.109,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.613.000	56.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.613.000	56.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.956.000	42.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.657.000	13.407.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.955.000	13.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.955.000	13.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.955.000	13.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.880.000	60.166.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.880.000	60.166.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50.200.000	48.486.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.680.000	11.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Gantung	3.473.915.006	3.354.591.935,00	117.647.000	109.432.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.935.106.006	2.834.350.935,00	99.172.000	92.632.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.226.800	1.959.798.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.999.226.800	1.959.798.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.334.000	49.076.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.800.000	23.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.034.000	7.186.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	18.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.005.000	262.928.480,00	30.480.000	28.378.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.921.000	13.495.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.688.000	22.162.000,00	30.480.000	28.378.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.976.000	3.717.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.420.000	61.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	15.699.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	146.434.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	68.692.000	64.254.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	68.692.000	64.254.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.210.206	468.441.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.897.000	5.447.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000	63.239.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.513.206	389.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.330.000	94.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.330.000	94.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.984.000	10.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.984.000	10.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.984.000	10.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	501.387.000	484.557.000,00	18.475.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	501.387.000	484.557.000,00	18.475.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	501.387.000	484.557.000,00	18.475.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.468.000	6.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.468.000	6.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.468.000	6.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.975.000	9.474.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.975.000	9.474.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.975.000	9.474.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.995.000	9.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.995.000	9.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.995.000	9.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Kelapa Kampit	3.600.542.644	3.381.113.761,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.144.174.644	2.940.927.201,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.193.074.000	2.043.757.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.193.074.000	2.043.757.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.957.380	136.949.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.107.000	18.611.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.919.820	12.889.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.474.560	24.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.456.000	8.445.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	72.704.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.593.264	572.527.693,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.539.600	14.955.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	52.446.943,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	505.653.664	505.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.050.000	182.192.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.970.000	134.108.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.480.000	24.344.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.600.000	23.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.697.000	10.139.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.043.000	9.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.043.000	9.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	654.000	264.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	654.000	264.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	348.552.000	344.120.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	348.552.000	344.120.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	348.552.000	344.120.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.489.000	12.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.489.000	12.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.632.000	5.804.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.857.000	6.873.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.711.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.711.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.711.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.919.000	64.699.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.919.000	64.699.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.244.000	28.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.950.000	25.734.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pegelasan Batas Desa	17.725.000	10.905.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Simpang Pesak	3.062.752.602	2.904.059.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.626.097.602	2.468.108.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.760.890.312	1.616.256.068,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.760.890.312	1.616.256.068,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.195.000	303.450.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.731.000	20.522.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.537.000	64.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.352.000	25.229.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.834.500	115.076.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.740.500	28.392.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.952.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.472.290	408.836.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.720.000	3.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	17.963.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.752.290	387.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.540.000	139.565.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.890.000	119.080.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.650.000	20.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.738.000	15.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.340.000	11.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.340.000	11.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.398.000	4.348.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.398.000	4.348.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	357.762.000	357.108.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	357.762.000	357.108.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	357.762.000	357.108.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.300.000	30.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.300.000	30.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.300.000	30.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.855.000	32.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.855.000	32.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.803.000	15.803.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.052.000	17.052.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Damar	3.091.250.559	2.883.316.104,00	85.804.000	82.150.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.711.451.559	2.527.431.804,00	85.804.000	82.150.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.931.166.559	1.827.559.516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.931.166.559	1.827.559.516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.780.000	156.177.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.476.000	9.177.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.796.000	29.085.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.428.000	23.319.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.440.000	33.919.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.640.000	11.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.526.988,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	85.804.000	82.150.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	13.764.000	12.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	72.040.000	69.350.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.625.000	426.677.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000	39.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.625.000	386.437.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.880.000	117.017.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.620.000	112.177.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.260.000	4.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.137.000	22.339.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.137.000	22.339.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.137.000	22.339.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.159.000	284.498.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	298.159.000	284.498.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	298.159.000	284.498.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.803.000	18.879.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.803.000	18.879.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.803.000	18.879.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.700.000	30.167.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.700.000	30.167.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.400.000	13.417.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.600.000	12.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.700.000	4.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Simpang Renggang	2.893.141.732	2.719.936.426,00	132.132.000	130.700.600,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.299.734.732	2.140.540.774,00	132.132.000	130.700.600,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.840.000	2.777.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.840.000	2.777.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.458.679.400	1.393.537.606,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.458.679.400	1.393.537.606,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.000.000	22.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500.000	9.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.500.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.577.000	236.049.547,00	5.624.000	5.620.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.500.000	8.241.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.059.000	22.474.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.625.000	11.873.000,00	5.624.000	5.620.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.999.000	48.754.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.394.000	14.067.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	130.640.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.000	1.250.000,00	126.508.000	125.080.600,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	10.378.000	9.650.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.250.000	1.250.000,00	116.130.000	115.430.600,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.664.332	373.167.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	17.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.164.332	353.177.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.724.000	111.309.121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.580.000	42.997.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.150.000	65.431.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.024.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.970.000	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.085.000	15.932.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000.000	10.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000	10.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.085.000	4.936.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.085.000	4.936.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.178.000	467.961.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	478.178.000	467.961.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	478.178.000	467.961.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.820.000	24.541.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.820.000	24.541.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.820.000	9.667.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	14.874.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.996.000	9.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.996.000	9.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.996.000	9.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.328.000	60.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.328.000	60.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.973.000	16.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.999.000	9.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.990.000	9.666.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.636.000	7.486.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.730.000	17.718.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Dendang	3.089.179.484	2.966.207.803,00	50.646.000	38.945.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.696.571.484	2.587.833.779,00	50.646.000	38.945.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.609.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.609.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.740.035.152	1.676.366.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.740.035.152	1.676.366.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.900.500	285.990.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.356.000	25.918.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.176.500	47.857.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.690.000	43.536.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.000.000	32.059.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.678.000	11.678.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.942.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	50.646.000	38.945.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	42.102.000	30.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	8.544.000	8.445.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.815.832	490.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.969.000	1.735.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	47.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.846.832	440.813.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.320.000	121.644.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.040.000	102.364.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.280.000	19.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.972.000	21.664.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.000.000	16.956.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.000.000	16.956.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.972.000	4.708.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.972.000	4.708.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	327.757.000	314.591.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	291.741.000	280.723.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	291.741.000	280.723.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	36.016.000	33.868.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	36.016.000	33.868.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.879.000	17.606.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.879.000	17.606.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.880.000	10.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.999.000	6.821.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000	5.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000	5.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000	5.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000	18.801.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.000.000	18.801.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.000.000	18.801.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.585.172.193	23.064.324.577,00	110.254.000	108.604.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.585.172.193	23.064.324.577,00	110.254.000	108.604.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.585.172.193	23.064.324.577,00	110.254.000	108.604.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.763.888.898	3.220.576.991,00	110.254.000	108.604.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.931.000	43.587.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.033.000	19.019.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.910.000	14.178.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.988.000	10.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.030.649.024	1.873.505.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.003.849.024	1.854.651.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.950.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.966.000	10.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.884.000	8.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.600.000	34.486.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.900.000	23.486.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.771.000	667.284.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.076.000	21.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.928.000	45.853.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.260.000	2.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.892.000	29.288.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.615.000	19.556.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000	547.760.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	84.755.000	84.279.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	84.755.000	84.279.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.610.916	392.018.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.750.000	150.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000	46.758.595,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.661.458	45.778.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.999.458	148.931.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.326.958	209.696.352,00	25.499.000	24.325.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	37.183.947,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.886.958	117.861.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.790.000	6.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.400.000	47.800.500,00	25.499.000	24.325.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.760.533.000	1.342.103.462,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.760.533.000	1.342.103.462,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71.912.000	57.404.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.880.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.583.273.000	1.265.139.462,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	39.024.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	59.444.000	19.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.734.846.795	16.708.368.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.734.846.795	16.708.368.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.300.658.795	16.300.626.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	118.970.000	116.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	59.716.000	56.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	111.840.000	92.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	143.662.000	141.382.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	282.216.000	276.844.011,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	282.216.000	276.844.011,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.236.000	41.481.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	91.580.000	89.983.011,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	147.400.000	145.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	489.123.000	44.131.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	489.123.000	44.131.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52.392.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	229.675.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	41.426.000	24.685.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	165.630.000	19.446.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.554.564.500	1.472.300.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.554.564.500	1.472.300.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Audited 2024	Audited 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	137.250.986.724,87	153.535.018.028,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	137.250.986.725,00	153.535.018.028,00
3	Jumlah (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87
5	Jumlah (3+4)	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN - LO	801.032.308.367,88	959.246.420.398,15	(158.214.112.030,27)	(16,49)
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)
4	Pajak Daerah - LO	45.637.336.986,00	54.628.010.995,89	(8.990.674.009,89)	(16,46)
5	Retribusi Daerah - LO	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.630.468.885,37	5.523.052.522,61	107.416.362,76	1,94
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	633.944.984.834,00	772.128.801.415,00	(138.183.816.581,00)	(17,90)
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	42.706.357.017,00	63.170.046.464,00	(20.463.689.447,00)	(32,39)
12	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17
14	Pendapatan Hibah - LO	15.384.374.297,15	2.747.040.315,02	12.637.333.982,13	460,03
15	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	482.122.013,00	8.412.879.414,00	-7.930.757.401,00	(94,27)
16	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17
17	JUMLAH PENDAPATAN	801.032.308.367,88	959.246.420.398,15	(158.214.112.030,27)	(16,49)
18	BEBAN	867.666.687.807,34	916.908.503.884,54	-49.241.816.077,20	-5,37
19	BEBAN OPERASI	722.805.327.592,19	680.030.803.290,64	42.774.524.301,55	6,29
20	Beban Pegawai	404.594.252.545,00	348.460.794.122,00	56.133.458.423,00	16,11
21	Beban Barang dan Jasa	290.866.844.715,71	307.184.960.488,68	-16.318.115.772,97	-5,31
22	Beban Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71
23	Beban Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40
24	Beban Penyisihan Piutang	934.242.583,48	29.543.679,96	904.698.903,52	3.062,24
25	JUMLAH BEBAN OPERASI	722.805.327.592,19	680.030.803.290,64	42.774.524.301,55	6,29
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.976.085.587,61	129.894.379.575,15	(43.918.293.987,54)	-33,81
27	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	85.976.085.587,61	129.894.379.575,15	-43.918.293.987,54	-33,81
28	BEBAN TRANSFER	58.326.141.795,54	106.983.321.018,75	-48.657.179.223,21	-45,48
29	Beban Bagi Hasil	4.875.126.200,54	5.664.980.715,75	(789.854.515,21)	(13,94)
30	Beban Bantuan Keuangan	53.451.015.595,00	101.318.340.303,00	-47.867.324.708,00	-47,24
31	JUMLAH BEBAN TRANSFER	58.326.141.795,54	106.983.321.018,75	(48.657.179.223,21)	(45,48)
32	BEBAN TIDAK TERDUGA	559.132.832,00	0,00	559.132.832,00	100,00
33	Beban Tidak Terduga	559.132.832,00	0,00	559.132.832,00	100,00
34	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	559.132.832,00	0,00	559.132.832,00	100,00

NO.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
35	JUMLAH BEBAN	867.666.687.807,34	916.908.503.884,54	(49.241.816.077,20)	(5,37)
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(66.634.379.439,46)	42.337.916.513,61	-108.972.295.953,07	-257,39
37	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
38	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	451.683.950,00	0,00	451.683.950,00	100,00
39	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	2.114.986.321,00	(2.114.986.321,00)	(100,00)
40	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	451.683.950,00	2.114.986.321,00	-1.663.302.371,00	-78,64
41	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	265.340.880,00	284.700.393,00	(19.359.513,00)	(6,80)
42	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	6.642.207.761,08	-6.642.207.761,08	-100,00
43	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	265.340.880,00	6.926.908.154,08	(6.661.567.274,08)	(96,17)
44	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	186.343.070,00	(4.811.921.833,08)	4.998.264.903,08	-103,87
45	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(66.448.036.369,46)	37.525.994.680,53	(103.974.031.049,99)	(277,07)
46	POS LUAR BIASA				
47	Beban Luar Biasa	0,00	627.079.203,00	(627.079.203,00)	(100,00)
48	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	627.079.203,00	-627.079.203,00	-100,00
49	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	(627.079.203,00)	627.079.203,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT LO	(66.448.036.369,46)	36.898.915.477,53	(103.346.951.846,99)	(280,08)

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	1.674.692.772.260,24	1.628.789.534.927,84
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(66.448.036.369,46)	36.898.915.477,53
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Nilai persediaan	85.833.220,21	0,00
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Lain - lain	(65.470.967.283,30)	9.004.321.854,87
11	JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NERACA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Audited 2024	Audited 2023
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	48.190.923.456,12	124.812.697.586,40
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	809.000,00	0,00
6	Kas di BLUD	4.587.063.789,39	11.340.085.343,42
7	Kas di Bendahara BOS	0,00	51.317.973,72
8	Kas di Bendahara FKTP	0,00	1.221.647.996,60
9	Kas lainnya	336.642.496,00	331.789.626,00
10	Kas Dana BOSP	29.464.927,72	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	778.985.059,00	0,00
12	Setara Kas	0,00	0,00
13	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	8.475.188.247,50	8.013.357.890,50
15	Piutang Retribusi Daerah	2.536.432.810,82	2.103.595.119,82
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	13.797.115.820,50	5.554.046.509,50
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	9.385.192.675,00	9.210.217.076,00
20	Piutang Lainnya	4.522.888.473,00	4.635.142.553,00
21	Penyisihan Piutang	(10.912.776.069,10)	(9.813.617.352,77)
23	Persediaan	17.634.054.428,85	18.781.524.741,64
24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)	99.361.985.114,80	176.241.805.063,83
25	INVESTASI JANGKA PANJANG		
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
27	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
28	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
29	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
31	Dana Bergulir	0,00	0,00
32	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
33	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
34	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
35	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
36	Investasi Jangka Panjang Permanen		
37	Penyertaan Modal	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
38	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (35+39)	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
41	ASET TETAP		
42	Tanah	301.621.431.280,85	301.630.431.280,85
43	Peralatan dan Mesin	507.635.347.831,53	489.558.814.974,79
44	Gedung dan Bangunan	793.674.401.368,73	769.446.315.855,91
45	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.433.310.076.081,99	1.357.268.125.861,60
46	Aset Tetap Lainnya	29.086.725.322,39	27.508.738.722,39
47	Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	8.186.701.487,00	8.498.517.987,00
48	Akumulasi Penyusutan	(1.674.060.685.906,64)	(1.524.717.404.133,25)
49	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29

No	Uraian	Audited 2024	Audited 2023
50	DANA CADANGAN		
51	Dana Cadangan	0,00	0,00
52	Jumlah Dana Cadangan (51)	0,00	0,00
53	ASET LAINNYA		
54	Tagihan Jangka Panjang	3.669.889.672,59	4.568.806.133,59
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
56	Aset Tidak Berwujud	5.295.763.207,00	5.244.263.207,00
57	Aset Lain-lain	7.099.021.868,57	34.882.854.258,49
58	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.936.073.949,00)	(4.512.276.413,00)
59	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	212.451.000,00	0,00
60	Jumlah Aset Lainnya (54 s/d 59)	11.341.051.799,16	40.183.647.186,08
61	PROPERTI INVESTASI		
62	Properti Investasi Tanah	9.000.000,00	0,00
63	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	9.000.000,00	0,00
64	JUMLAH ASET (24+40+49+52+60+63)	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20
65	KEWAJIBAN		
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	298.634.379,00	289.712,00
68	Utang Bunga	0,00	0,00
69	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
70	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
71	Pendapatan yang diterima dimuka	101.590.104,00	280.074.213,50
72	Utang Belanja	8.430.933.956,12	7.670.270.220,46
73	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
74	Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00
75	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s/d 75)	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
78	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
79	Utang kepada lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
81	Utang Kepada Masyarakat	0,00	0,00
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (78 sd 81)	0,00	0,00
83	JUMLAH KEWAJIBAN (76+82)	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
84	EKUITAS		
85	Ekuitas	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
86	Jumlah Ekuitas (85)	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
87	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (83+86)	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Audited 2024	Audited 2023
	ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI		
1	Penerimaan Pajak Daerah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	41.907.741.709,36	40.643.635.235,32
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	84.152.033.000,00	155.771.890.842,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	449.044.881.195,00	431.104.192.225,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00
10	Penerimaan Dana Insentif	0,00	26.408.103.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	39.725.596.000,00	38.883.640.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	0,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	42.531.381.418,00	52.921.000.512,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	2.557.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	482.122.013,00	8.412.879.414,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	845.905.200.234,23	912.392.421.885,81
	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI		
18	Pembayaran Pegawai	403.168.134.091,00	348.510.979.782,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	283.694.328.636,00	308.500.423.497,20
22	Pembayaran Belanja Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga	559.132.832,00	627.079.203,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.001.045.629,84	5.511.251.457,44
27	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	93.176.611.595,00	101.318.340.303,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	812.009.240.531,84	788.823.579.242,64
29	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	33.895.959.702,39	123.568.842.643,17
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	451.683.950,00	833.737.500,00

No	U r a i a n	Audited 2024	Audited 2023
32	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	119.725.000,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	451.683.950,00	953.462.500,00
34	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS INVESTASI		
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	21.637.802.774,00	33.092.550.506,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	21.625.491.627,24	35.617.596.997,30
37	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.392.666.064,06	70.488.019.993,00

No	U r a i a n	Audited 2024	Audited 2023
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.583.086.600,00	1.754.080.380,00
39	Perolehan Aset Lainnya	51.500.000,00	0,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	0,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	118.290.547.065,30	140.952.247.876,30
42	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(117.838.863.115,30)	(139.998.785.376,30)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	104.400.745,00	145.911.430,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	104.400.745,00	145.911.430,00
46	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
47	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
48	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	104.400.745,00	145.911.430,00
49	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.728.945.395,40	60.395.924.509,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	59.728.945.395,40	60.395.924.509,00
52	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS		
53	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.726.860.610,40	60.395.924.509,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	59.726.860.610,40	60.395.924.509,00
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00
56	Kenaikan/Penurunan Kas	(16.284.031.303,13)	(16.284.031.303,13)
57	Saldo Awal Kas	137.757.538.526,14	154.041.569.829,27
58	Koreksi SILPA	0,00	0,00
59	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	137.757.538.526,14	154.041.569.829,27
60	Saldo Akhir Kas	53.921.120.643,23	137.757.538.526,14

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran, oleh karena itu Pemerintah Pusat/Daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan akhir tahun anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud:

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahun anggaran, yang disampaikan Bupati Belitung Timur kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur yang menjadi evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- Mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai keadilan dan kemakmuran;
- Sebagai alat kendali untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah di Kabupaten Belitung Timur;
- Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya;
- Sebagai transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan APBD selama tahun anggaran;
- Sebagai evaluasi Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur diantaranya adalah:

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- Menyediakan informasi mengenai cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi manajerial dalam menyusun perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang lebih akuntabel dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dimasa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu kelengkapan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selama 1 (satu) Tahun Anggaran Bupati sebagai Kepala Daerah kepada DPRD yang penyusunannya berlandaskan kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) berbunyi "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; ayat (2) yang berbunyi "Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab IX tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban APBN/APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pada Paragraf Tujuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 320 ayat (1) berbunyi "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir"; ayat (2) yang berbunyi "Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD; ayat (3) yang berbunyi "Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan";
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 936);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 7.56/2024 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);
- hh. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Belitung Timur;
- ii. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 47);
- jj. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Kategori Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 15);

- kk. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
- ll. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020 Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 26);
- mm. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Transisi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Tahun 56);
- nn. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Redistribusi Tanah Pensertifikatan Khusus Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Tahun 46);
- oo. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72);
- pp. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73);
- qq. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);
- rr. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
- ss. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8);
- tt. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11);
- uu. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 26);
- vv. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 30).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dalam Pencapaian Target Pendapatan yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1.	Laporan Realisasi Anggaran
5.2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3.	Neraca
5.4.	Laporan Operasional
5.5.	Laporan Arus Kas
5.6.	Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab VII	Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga faktor yang memengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh pandemi covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian di tahun 2020-2021 lalu, dan masih berdampak juga di tahun 2022 dan 2023, dan di tahun 2024 dampaknya sudah lebih membaik terhadap kinerja perekonomian makro Kabupaten Belitung Timur.

Beberapa indikator ekonomi makro yang menggambarkan capaian kinerja ekonomi di Kabupaten Belitung Timur antara lain:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu dicermati dari dua pendekatan yaitu PDRB dengan pendekatan Lapangan Usaha, dan PDRB dengan pendekatan Pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan PDRB dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang pengeluaran oleh seluruh aktor ekonomi terhadap barang dan jasa dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Berikut disajikan PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.1.

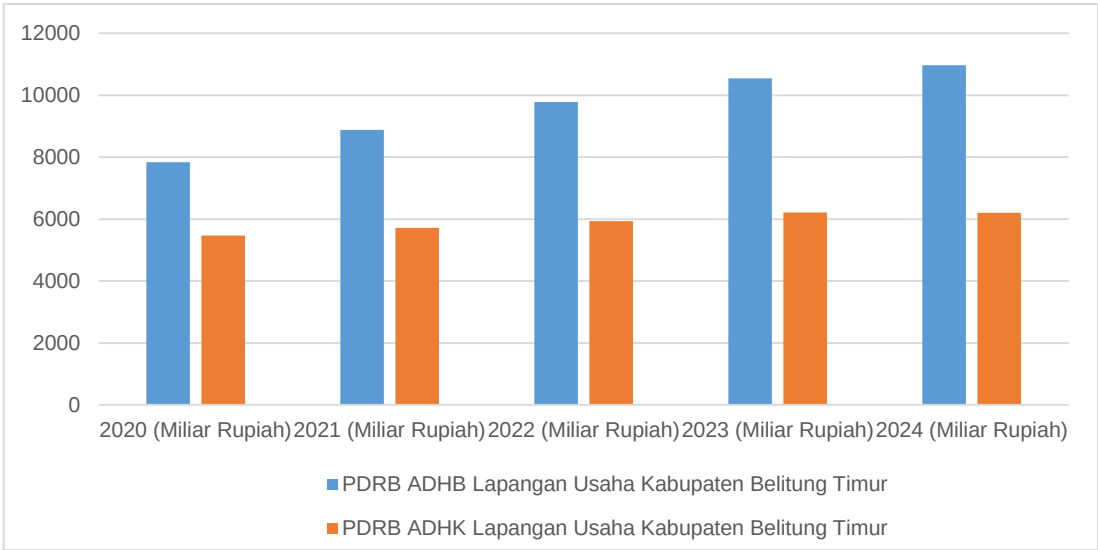
Tabel 2. 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

No.	Kategori PDRB	2020 (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	2023 (Miliar Rupiah)	2024 (Miliar Rupiah)
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	7.833,74	8.882,48	9.783,22	10.544,79	10.973,33
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	5.465,46	5.714,79	5.931,09	6.209,89	6.207,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik 2. 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK
Kabupaten Belitng Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Belitng Timur dalam 5 (lima) tahun ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik di lihat dari Produk PDRB ADHB dengan pendekatan lapangan usaha, maupun dilihat dari PDRB ADHK dengan pendekatan lapangan usaha, namun demikian pada tahun 2024 jika dilihat dari data yang ada berdasarkan PDRB ADHK mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6.209,89 miliar, sedangkan di tahun 2024 sebesar 6.207,8 miliar atau turun sekitar 2,09 miliar.

1) PDRB Pendekatan Lapangan Usaha

PDRB Pendekatan Lapangan Usaha, dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan yaitu; dilihat dari Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pendekatan Lapangan Usaha

Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Lebih rinci peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pendekatan Lapangan Usaha disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

No.	Kategori PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	2020 (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	2023 (Miliar Rupiah)	2024 (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2028,97	2255,73	2445,63	2709,89	2994,77
2	Pertambangan dan Penggalian	1134,93	1328,73	1305,17	1231,44	1282,73
3	Industri Pengolahan	1586,89	1942,43	2321,74	2468,74	2286,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,75	7,57	7,5	7,81	8,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,69	1,79	1,91	1,98	2,18
6	Konstruksi	637,38	694,99	728,14	815,7	855,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	835,15	923,78	1110,33	1221,58	1252,33
8	Transportasi dan Pergudangan	160,99	173,01	202,41	230,45	248,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195,06	217,66	254,36	289,81	316,5
10	Informasi dan Komunikasi	100	105,72	114,98	133,4	148,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	38,14	43,39	50,23	59,24	61,2
12	Real Estate	244,96	255,53	278,67	305,16	325,62
13	Jasa Perusahaan	22,88	25	28,44	32,33	34,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	458,58	489,94	492,87	548,73	619,86
15	Jasa Pendidikan	216,63	232,84	243,9	270,11	306,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,02	134,8	141,72	157,61	162,04
17	Jasa lainnya	45,72	49,56	55,24	60,82	68,25
PDRB ADHB Lapangan Usaha Belitung Timur		7833,74	8882,48	9783,22	10544,79	10973,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha di dominasi oleh 5 (lima) penyumbang terbesar yaitu; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Lebih rinci peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha disajikan pada tabel berikut ini.

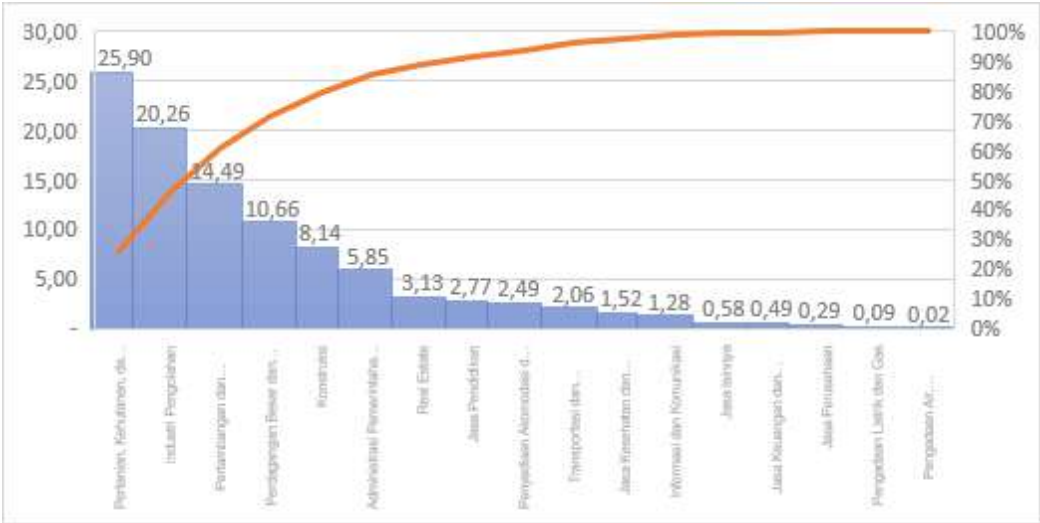
Tabel 2. 3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

No.	Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1407,55	1426,66	1447,93	1520,08	1617,56
2	Pertambangan dan Penggalian	959,66	996,21	994,83	976,11	961,17
3	Industri Pengolahan	1083,66	1163,93	1233,19	1278,84	1066,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,61	4,05	3,95	4,09	4,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	1,04	1,09	1,09	1,14
6	Konstruksi	401,23	415,43	416,06	457,27	474,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	527,72	565,73	634,5	665,92	666,85
8	Transportasi dan Pergudangan	104,57	110,24	121,5	128,02	134,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,33	135,4	153,11	171,17	181,32
10	Informasi dan Komunikasi	87,74	92,15	99,09	113,09	124,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,01	26,04	27,76	31,78	32,51
12	Real Estate	160,25	166,39	176,18	186,13	194,68
13	Jasa Perusahaan	14,22	15,09	16,46	17,77	19,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,55	340,53	341,55	371,64	419,11
15	Jasa Pendidikan	134,75	138,74	142,22	154,8	172,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,09	87,41	89,61	97,91	100,37
17	Jasa lainnya	28,54	29,76	32,07	34,2	36,91
PDRB ADHK Lapangan Usaha Belitung Timur		5465,46	5714,79	5931,09	6209,89	6207,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Adapun distribusi peranan masing-masing komponen Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020–2024



2) PDRB Pendekatan Pengeluaran

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir

Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
PDRB ADHB Pendekatan Pengeluaran Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Kategori PDRB Pengeluaran new	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.664,35	4.854,78	5.244,55	5.579,69	5.884,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61,72	64,42	69,26	74,58	83,05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.007,57	1.066,36	1.091,59	1.188,39	1.342,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.373,51	2.501,13	2.814,86	3.064,29	3.180,94
5	Perubahan Inventori	8,36	84,02	42,34	46,39	6,82
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	281,77	311,77	520,62	591,46	488,38
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7833,74	8882,48	9783,22	10544,79	10973,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data di atas PDRB dengan pendekatan pengeluaran di sepanjang 5 (lima) tahun ini yang memiliki kontribusi terbesar ada pada Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), setelahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan yang selanjutnya pengeluaran konsumsi pemerintah, serta penyumbang lainnya ada pada ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa, Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan perubahan Inventori.

Adapun distribusi peranan masing-masing komponen pengeluaran konsumsi terhadap total PDRB Kabupaten Belitung Timur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Pengeluaran di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020–2024

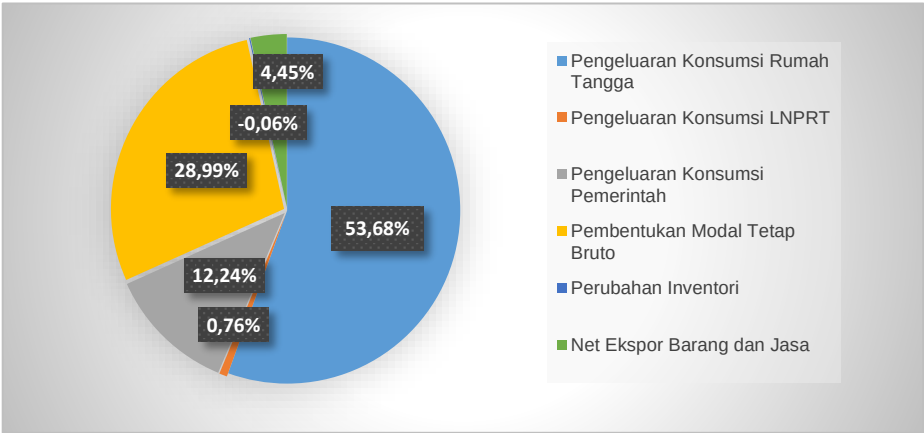
Kategori PDRB Pengeluaran new	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,54	54,66	53,61	52,91	53,63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,79	0,73	0,71	0,71	0,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,86	12,01	11,16	11,27	12,24
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,3	28,16	28,77	29,06	28,99
Perubahan Inventori	0,11	0,95	0,43	0,44	-0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3,6	3,51	5,32	5,61	4,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2020–2024, PDRB Kabupaten Belitung Timur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), di tahun 2024 kontribusinya sebesar 53,63%. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, untuk tahun 2024 yakni sekitar 28,99% namun mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2023 yang sebesar 29,06%. Dan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi di tahun 2024 sebesar 12.2%. Sedangkan komponen Net Ekspor Barang dan Jasa

sempat mengalami penurunan peranan pada tahun 2020 dan 2022, namun meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2023 dan di tahun 2024 mengalami penurunan masih di 4,45%. Dan untuk Pengeluaran Konsumsi LNPR dan Perubahan Inventori memberi kontribusi yang relative lebih kecil dari tahun 2020-2024. Dan untuk memberikan gambaran masing-masing kontribusi berikut kami sajikan dalam bentuk grafik di berikut ini.

Grafik 2,1
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Pengeluaran
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Belitung Timur mengalami kenaikan sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang di tahun 2020 sempat mengalami pertumbuhan bernilai minus. Hal ini disebabkan dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020, namun membaik kembali pada tahun 2021–2023. Di tahun 2022 PDRB berada di posisi 3,79% ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di posisi 4,56%, di tahun 2023 ada di posisi 4,70% dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi -0,03%. Untuk lebih jelasnya, kami sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2020-2024 (Persen)

Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	1,36	1,49	4,98	6,41
Pertambangan dan Penggalian	-1,52	3,81	-0,14	-1,88	-1,53
Industri Pengolahan	-0,64	7,41	5,95	3,7	-16,6
Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	12,3	-2,47	3,39	6,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,83	2,96	4,82	0,54	4,71
Konstruksi	-3,69	3,54	0,15	9,9	3,74

Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,75	7,2	12,15	4,95	0,14
Transportasi dan Pergudangan	-7,95	5,42	10,21	5,37	5,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,19	8,04	13,08	11,8	5,93
Informasi dan Komunikasi	10,12	5,03	7,53	14,14	10
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	8,43	6,63	14,46	2,32
Real Estate	2,39	3,84	5,88	5,65	4,59
Jasa Perusahaan	-12,02	6,13	9,07	7,94	7,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,62	5,58	0,3	8,81	12,77
Jasa Pendidikan	-3,14	2,97	2,5	8,85	11,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	10,52	2,52	9,25	2,52
Jasa lainnya	-8,16	4,27	7,76	6,64	7,94
PDRB	-0,63	4,56	3,78	4,70	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

c. Pendapatan Per Kapita

Salah satu Indicator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atau Pendapatan per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Dan jika dilihat dari pengeluaran perkapita penduduk adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2021-2024

Kabupaten	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belitung Timur	11.730,00	11.760,00	12.357,00	12.536,00	12.610,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 8
Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Garis Kemiskinan	Rupiah/ kapita/bulan	725.395	798.017	854.534	899.482	907.577
Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,52	7,20	6,49	6,73	6,36
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	8,56	9,29	8,47	8,89	8,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,19	0,29	0,19	0,23	0,15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	0,70	1,15	0,90	0,91	0,64
Indeks Koefisien Gini	Poin	0,25	0,24	0,25	0,23	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur jika dilihat dari pendapatan perkapita/perbulan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 8,095 atau sebesar 0,90% peningkatan ini menunjukkan masyarakat miskin tidak banyak berubah. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,37%, dan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,39 ribu jiwa. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi ekonomi; pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga meningkat, pariwisata mulai beranjak naik, namun masih relatif kecil serta harga bahan pokok mulai stabil, namun belum diimbangi dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) antara tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran penting tentang kedalaman dan ketimpangan kemiskinan di masyarakat wilayah Kabupaten Belitung Timur. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin, atau turun sebesar 34,78%, artinya ketimpangan di antara penduduk miskin berkurang.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran mengenai seberapa jauh rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, jika dilihat dari data tabel diatas ada penurunan sebesar 0,27 poin atau turun 29,67%, artinya penurunan ini memiliki indikator positif menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk miskin membaik, dan potensi untuk keluar dari kemiskinan meningkat

Indeks koefisien gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks koefisien gini yang digunakan untuk Kabupaten Belitung Timur menggunakan angka gini rasio pada Provinsi Bangka Belitung.

e. **TPAK dan TPT**

Berikut disajikan data TPAK dan TPT Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2024.

Tabel 2. 9
TPAK dan TPT Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,23	69,23	67,36	70,48	70,56
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,93	3,78	2,50	2,41	2,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dibandingkan dengan tahun 2023 tahun 2024 menunjukkan tren stabil dengan sedikit peningkatan, meningkat sebesar 0,08%, artinya meskipun kenaikannya kecil, arahnya positif, menandakan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang siap bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi seiring dengan keadaan yang mempengaruhinya. Pada tahun 2022, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini mencerminkan kondisi sudah mulai membaik setelah pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian di berbagai sektor mengalami pelemahan. Pada tahun 2023, angka TPT menurun dibandingkan dari tahun 2022 sebesar 0,09% hal ini dikarenakan sudah mulai membaiknya kondisi lapangan pekerjaan setelah terlepas dari covid-19, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,05% untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan meningkat sebesar 0,22% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

f. **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia	70,92	71,42	72,29	72,86	73,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat jika IPM Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini berarti semakin baiknya tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur di mana masyarakat dapat merasakan akses kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak.

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan Ibukota Manggar merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung Induk yang dipisahkan oleh wilayah daratan dan terletak di Pulau Belitung. Letak Geografis Kabupaten Belitung Timur adalah 107⁰ 45' - 108⁰ 18' Bujur Timur dan 02⁰ 30' - 03⁰ 15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,94 Km² yang terdiri dari luas darat 2.506,91 Km² dan luas wilayah laut 15.461,103 Km². Kabupaten ini berada pada posisi alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2002, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Belitung
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Laut Natuna

Secara geografis batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada peta berikut ini.



Letak Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03 Km². Secara Topografi Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m diatas permukaan laut dan isinya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral, bijih timah dan bahan galian seperti pasir kuarsa, batu granit, dan tanah liat.

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tercatat 130.159 jiwa, jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan penyebaran penduduk sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

NO.	NAMA KEC/DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH KEPALA KELUARGA (JIWA)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	KEC. MANGGAR	20.699	19.888	40.587	11.305	3.083	14.388
	LALANG JAYA	1.919	1.771	3.690	1.047	257	1.304
	KURNIA JAYA	2.846	2.743	5.589	1.543	445	1.988
	PADANG	4.108	4.014	8.122	2.258	543	2.801
	KELUBI	1.466	1.321	2.787	852	179	1.031
	LALANG	2.636	2.527	5.163	1.436	454	1.890
	BARU	4.856	4.695	9.551	2.573	767	3.340
	PULAU BUKU LIMAU	435	430	865	232	50	282
	MEKAR JAYA	1.585	1.580	3.165	858	287	1.145
	BENTAIAJN JAYA	848	807	1.655	506	101	607
2	KEC. GANTUNG	16.066	14.869	30.935	8.783	1.928	10.711
	GANTUNG	3.331	3.124	6.455	1.800	412	2.212
	SELINSING	3.694	3.390	7.084	1.985	459	2.444
	JANGKAR ASAM	912	823	1.735	486	98	584
	LILANGAN	1.983	1.863	3.846	1.109	172	1.281
	LENGGANG	2.444	2.350	4.794	1.354	389	1.743
	BATU PENYU	2.815	2.555	5.370	1.549	316	1.865
	LIMBONGAN	887	764	1.651	500	82	582
3	KEC. DENDANG	5.722	5.346	11.068	3.402	482	3.884
	DENDANG	1.059	978	2.037	600	104	704
	JANGKANG	1.760	1.660	3.420	1.055	141	1.196
	NYURUK	1.732	1.598	3.330	1.043	140	1.183
	BALOK	1.171	1.110	2.281	704	97	801
4	KEC. KELAPA KAMPIT	10.040	9.511	19.551	5.776	1.245	7.021
	MENTAWAK	2.074	1.988	4.062	1.183	252	1.435
	SENYUBUK	2.188	2.149	4.337	1.269	303	1.572
	CENDIL	888	833	1.721	540	87	627
	BUDING	1.581	1.435	3.016	925	166	1.091
	MAYANG	1.746	1.611	3.357	996	205	1.201
	PEMBAHARUAN	1.563	1.495	3.058	863	232	1.095
5	KEC. DAMAR	7.085	6.800	13.885	4.067	917	4.984
	AIR KELIK	1.111	1.095	2.206	654	158	812
	MEMPAYA	1.172	1.154	2.326	702	146	848
	BURONG MANDI	797	740	1.537	467	90	557
	MENGKUBANG	1.871	1.762	3.633	1.036	255	1.291
	SUKAMANDI	2.134	2.049	4.183	1.208	268	1.476
6	KEC. SIMPANG RENGGIANG	3.965	3.747	7.712	2.447	453	2.900
	SIMPANG TIGA	862	756	1.618	508	82	590
	RENGGIANG	1.025	938	1.963	632	111	743
	AIK MADU	548	527	1.075	345	65	410
	LINTANG	1.530	1.526	3.056	962	195	1.157
7	KEC. SIMPANG PESAK	4.494	4.263	8.757	2.533	506	3.039
	SIMPANG PESAK	2.037	1.897	3.934	1.137	188	1.325

NO.	NAMA KEC/DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH KEPALA KELUARGA (JIWA)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
	TANJUNG BATU ITAM	959	921	1.880	550	140	690
	TANJUNG KELUMPANG	1.003	932	1.935	556	116	672
	DUKONG	495	513	1.008	290	62	352
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN		68.071	64.424	132.495	38.313	8.614	46.927

Sumber : Data Penduduk Semester II, 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah menetapkan program prioritas dan target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023. Dengan penjabaran anggaran sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Ringkasan APBD Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024 (Perda 16 Tahun 2023) (Rp)
Anggaran Pendapatan	832.718.865.833,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00
Pendapatan Transfer	728.016.515.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	959.352.217.513,00
Belanja Operasi	750.519.980.532,00
Belanja Pegawai	412.700.220.253,00
Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00
Belanja Modal	113.214.442.435,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)
Pembiayaan Daerah	

Uraian	APBD 2024 (Perda 16 Tahun 2023) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/73/BAKUDA/2024 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 serta usulan OPD teknis terkait DAK yang akan melakukan penyesuaian Juknis DAK maka dilakukan pergeseran APBD.

Dalam melaksanakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan pertimbangan diatas ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Ringkasan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024 (Perda No. 16 Tahun 2023) (Rp)	Pergeseran I (Perbup No. 7 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	832.718.865.833,00	836.666.465.833,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00	103.452.600.833,00
Pendapatan Transfer	728.016.515.000,00	731.964.115.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	959.352.217.513,00	963.299.817.513,00
Belanja Operasi	750.519.980.532,00	754.822.163.332,00
Belanja Pegawai	412.700.220.253,00	416.422.213.721,00
Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999,00	311.724.197.331,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00	24.893.752.280,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00
Belanja Modal	113.214.442.435,00	112.859.859.635,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00	94.617.794.546,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)	(126.633.351.680,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00	126.633.351.680,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan pergeseran kedua atas usulan dari OPD dan Pergeseran ketiga dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi

Khusus (DAK) TA. 2024, Dana Alokasi Umum (DAU) SG, sisa DAU SG TA.2023 dan Dana Insentif Fiskal (DIF) TA. 2024 yang menyebabkan perubahan APBD dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Ringkasan Pergeseran APBD II dan III Tahun Anggaran 2024

Uraian	Pergeseran I (Perbup No. 7 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran II (Perbup No. 8 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran III (Perbup No. 11 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	836.666.465.833,00	836.666.465.833,00	836.666.465.833,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00	103.452.600.833,00	103.452.600.833,00
Pendapatan Transfer	731.964.115.000,00	731.964.115.000,00	731.964.115.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja :	963.299.817.513,00	963.299.817.513,00	963.299.817.513,00
Belanja Operasi	754.822.163.332,00	754.822.163.332,00	754.822.163.332,00
Belanja Pegawai	416.422.213.721,00	416.422.213.721,00	416.422.213.721,00
Belanja Barang dan Jasa	311.724.197.331,00	311.724.197.331,00	311.724.197.331,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00	24.893.752.280,00	24.893.752.280,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00
Belanja Modal	112.859.859.635,00	112.859.859.635,00	112.859.859.635,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00	94.617.794.546,00	94.617.794.546,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)	(126.633.351.680,00)	(126.633.351.680,00)
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00	126.633.351.680,00	126.633.351.680,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-

Sehubungan dengan perkembangan yang sesuai asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Oktober 2023 dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024 (Perda No. 16 Tahun 2023) (Rp)	PAPBD (Perda No. 26 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	832.718.865.833,00	870.303.164.061,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00	102.461.502.970,00
Pendapatan Transfer	728.016.515.000,00	766.591.911.091,00

Uraian	APBD 2024 (Perda No. 16 Tahun 2023) (Rp)	PAPBD (Perda No. 26 Tahun 2024) (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	959.352.217.513,00	1.004.054.150.786,00
Belanja Operasi	750.519.980.532,00	777.319.202.331,00
Belanja Pegawai	412.700.220.253,00	431.239.777.796,00
Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999,00	319.529.070.301,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00	25.008.354.234,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.542.000.000,00
Belanja Modal	113.214.442.435,00	127.410.219.477,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00	98.324.728.978,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)	(133.750.986.725,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00	137.750.986.725,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00	137.250.986.725,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-	500.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00	133.750.986.725,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-

Dalam rangka penyesuaian penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pergeseran setelah Perubahan APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16

Ringkasan Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	PAPBD (Perda No. 26 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran setelah PABPD (Perbup No. 30 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	870.303.164.061,00	871.495.421.061,00
Pendapatan Asli Daerah	102.461.502.970,00	102.461.502.970,00
Pendapatan Transfer	766.591.911.091,00	767.784.168.091,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	1.004.054.150.786,00	1.005.246.407.786,00
Belanja Operasi	777.319.202.331,00	777.319.202.331,00
Belanja Pegawai	431.239.777.796,00	431.239.777.796,00
Belanja Barang dan Jasa	319.529.070.301,00	319.524.770.301,00
Belanja Hibah	25.008.354.234,00	25.012.654.234,00
Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.542.000.000,00
Belanja Modal	127.410.219.477,00	127.410.219.477,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	98.324.728.978,00	99.516.985.978,00
Surplus / Defisit	(133.750.986.725,00)	(133.750.986.725,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	137.750.986.725,00	137.750.986.725,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00
Penerimaan kembali Pinjaman	500.000.000,00	500.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	133.750.986.725,00	133.750.986.725,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka indikator pencapaian target kinerja APBD dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 17

Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	568.317.350.598,00	524.421.156.146,30	92,28
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	101.853.032.968,00	91.186.776.430,00	89,53
Urusan Pemerintahan Pilihan	46.564.946.142,00	40.361.130.446,00	86,68
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	93.667.943.190,00	84.536.840.282,00	90,25
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	133.187.261.267,00	128.078.743.574,84	96,16
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Unsur Kewilayahan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Unsur Pemerintahan Umum	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15

Untuk lebih rincinya realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

- Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 18

Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintahan

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI
Pelayanan Umum	740.338.707.259,00	692.629.128.489,84
Ketertiban Dan Keamanan	6.357.839.000,00	6.167.266.150,00
Ekonomi	102.422.852.006,00	93.563.922.556,47
Perlindungan Lingkungan Hidup	13.711.043.394,00	11.669.992.501,00
Perumahan Dan Fasilitas Umum	13.446.780.785,00	11.943.144.994,59
Kesehatan	55.228.672.762,00	43.383.399.312,00
Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00
Pendidikan	65.154.596.378,00	61.441.150.214,24
Perlindungan Sosial	2.381.563.000,00	2.084.239.773,00
Total	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14

Untuk lebih rincinya realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan dan kondisi ekonomi secara umum, dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Pencapaian Kinerja TA.2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	(2.658.094.050,77)	97,41
Pendapatan Transfer	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	(21.712.814.839,00)	97,17
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	(767.627.987,00)	38,58
Total Pendapatan Daerah	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	(25.138.536.876,77)	97,12
Belanja Operasi	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	(64.046.751.856,00)	91,76
Belanja Modal	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	(13.119.672.411,70)	89,70
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	(440.867.168,00)	55,91
Belanja Transfer	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	(1.339.328.753,16)	98,65
Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	(78.946.620.188,86)	92,15
Surplus (Defisit)	(133.750.986.725,00)	(79.942.903.412,91)	53.808.083.312,09	59,77
Penerimaan Pembiayaan	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	(395.599.255,00)	99,71
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	(395.599.255,00)	99,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	53.412.484.057,09	53.412.484.057,09	0,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan APBD mengalami defisit sebesar Rp79.942.903.412,91 atau realisasi pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024. Total realisasi pendapatan sebesar Rp846.356.884.184,23 sedangkan total belanja daerah terealisasi sebesar Rp926.299.787.597,14 atau 92,15% dari anggaran.

3.1.1 Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur, diupayakan peningkatan pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan-pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pendapatan asli daerah tercapai dari target sebesar 97,41%, Realisasi pendapatan transfer terealisasi sebesar 97,17% dari anggaran, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 38,58% .

Realisasi pendapatan secara keseluruhan kurang dari target yang dianggarkan, terealisasi sebesar 97,12% atau sebesar Rp846.356.884.184,23. Rincian pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Nilai	
		Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82
Retribusi Daerah	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89
Lain-lain PAD Yang Sah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 yaitu pendapatan pajak daerah sebesar Rp45.008.024.533,50 atau 107,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp41.745.502.690,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.621.143.001,00 atau 101,04% dari target sebesar Rp7.542.823.521,00.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.814.815.725,37 atau 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.820.000.000,00.

Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp42.359.425.659,36 atau 87,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp48.353.176.759,00.

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp703.539.971.834,00 atau sebesar 98,40% dari anggaran sebesar Rp714.980.233.000,00.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp42.531.381.418,00 atau 80,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.803.935.091,00.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp482.122.013,00 atau 38,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.249.750.000,00.

3.1.2 Pengeluaran

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran Anggaran induk maupun pengeluaran anggaran perubahan/tambahan yang dilakukan secara efisiensi mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam semua sektor pengeluaran dengan melakukan pengawasan preventif secara proaktif, sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik maupun non fisik.

Realisasi pengeluaran yang membebani anggaran secara keseluruhan masih di bawah anggaran yang dialokasikan, hal tersebut disebabkan serapan belanja yang tidak maksimal sehingga menimbulkan SiLPA. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi masing-masing belanja sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi
- Realisasi belanja operasi berupa realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial mencapai 91,76% atau sebesar Rp713.272.450.475,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp777.319.202.331,00. Rincian belanja operasi sebagai berikut.

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja pegawai	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Belanja barang dan jasa	319.524.770.301,00	283.694.28.636,00	88,79
3	Belanja hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43
4	Belanja bantuan sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81
	TOTAL	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76

b. Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal mencapai 89,70% atau sebesar Rp114.290.547.065,30 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp127.410.219.477,00. Belanja modal pada belanja peralatan dan mesin hanya terealisasi sebesar 87,38% dari anggaran yang telah ditetapkan; belanja gedung dan bangunan mencapai 83,47% dari anggaran; belanja jalan, irigasi dan jaringan mencapai realisasi sebesar 92,42% dari anggaran; belanja aset tetap lainnya mencapai realisasi sebesar 98,71% dari anggaran; dan belanja aset lainnya mencapai realisasi sebesar 99,57% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Modal

No.	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57
	TOTAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70

3.1.3 Klasifikasi Belanja berdasarkan Organisasi dan Fungsi

a. Klasifikasi Belanja Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi organisasi atas realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 5
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

No	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	232.554.365.834	222.004.653.129,24	95,46
2	Dinas Kesehatan	155.292.073.330,00	138.911.848.550,00	89,45
3	RSUD Muhammad Zein	62.127.031.999	55.407.869.255,00	89,18
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95.152.996.249	85.980.041.128,06	90,36
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.041.774.334	10.864.633.848,00	98,4
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.458.822.002	5.028.602.941,00	92,12
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.980.904.850	7.137.929.695,00	89,44
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.823.388.740	7.770.121.999,00	88,06
9	Dinas Pertanian dan Pangan	14.898.250.924	13.713.259.099,00	92,05
10	Dinas Lingkungan Hidup	13.712.402.004	11.868.556.105,00	86,55

No	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008	5.196.278.683,00	92,55
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.512.277.494	9.712.676.812,00	84,37
13	Dinas Perhubungan	17.270.265.206	15.953.810.635,00	92,38
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.472.094.030	10.441.159.749,00	91,01
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.359.533.495	5.485.463.150,00	86,26
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.827.648.114	11.881.729.347,00	92,63
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.424.059.004	9.879.799.123,00	73,6
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.436.989.183	5.206.535.191,00	95,76
19	Dinas Perikanan	17.147.244.990	15.860.968.219,00	92,5
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.628.889.918	7.663.126.364,00	88,81
21	Sekretariat Daerah	48.060.558.164	44.726.876.326,00	93,06
22	Inspektorat	13.574.842.322	12.553.325.537,00	92,47
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.429.079.758	7.928.935.552,00	84,09
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	115.400.416.899	112.189.017.122,84	97,22
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.357.764.610	7.960.790.900,00	95,25
26	Sekretariat DPRD	45.607.385.026	39.809.963.956,00	87,29
27	Kecamatan Manggar	3.788.594.079	3.418.433.239,00	90,23
28	Kecamatan Gantung	3.591.562.006	3.464.023.935,00	96,45
29	Kecamatan Kelapa Kampit	3.600.542.644	3.381.113.761,00	93,91
30	Kecamatan Simpang Pesak	3.062.752.602	2.904.059.736,00	94,82
31	Kecamatan Damar	3.177.054.559	2.965.466.104,00	93,34
32	Kecamatan Simpang Renggang	3.025.273.732	2.850.637.026,00	94,23
33	Kecamatan Dendang	3.139.825.484	3.005.152.803,00	95,71
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.695.426.193	23.172.928.577,00	93,83
Total		1.005.246.407.786	926.299.787.597,14	92,15

b. Klasifikasi Belanja berdasarkan Fungsi

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi anggaran dan realisasinya dapat disajikan sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI	%
Pelayanan Umum	740.338.707.259,00	692.629.128.489,84	93,56
Pendidikan	175.680.559.514,00	168.496.161.179,00	95,91
Kesehatan	165.933.277.567,00	153.688.976.335,00	92,62
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.658.208.052,00	9.110.737.747,00	85,48
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	22.516.000,00	-	
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10.937.951.336,00	10.438.087.639,00	95,43
Sosial	4.804.147.850,00	4.341.572.922,00	90,37
Tenaga Kerja	6.823.487.400,00	6.125.226.109,00	89,77
Lingkungan Hidup	5.630.720.210,00	5.161.180.572,00	91,66
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008,00	5.196.278.683,00	92,55

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI	%
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.769.432.494,00	6.960.018.970,00	89,58
Perhubungan	5.566.525.944,00	5.073.876.734,00	91,15
Komunikasi Dan Informatika	6.807.677.430,00	6.205.595.213,00	91,16
Penanaman Modal	4.907.578.995,00	4.232.306.696,00	86,24
Kepemudaan Dan Olahraga	6.764.732.514,00	6.071.124.803,00	89,75
Statistik	274.361.000,00	230.036.000,00	83,84
Kebudayaan	5.473.174.844,00	4.780.764.041,00	87,35
Perpustakaan	4.731.469.683,00	4.547.507.220,00	96,11
Kearsipan	234.176.000,00	218.465.727,00	93,29
Kelautan Dan Perikanan	7.008.505.690,00	6.396.932.373,00	91,27
Pertanian	11.047.200.732,00	10.521.712.296,00	95,24
Perdagangan	5.137.607.918,00	4.501.842.656,00	87,63
Sekretariat Daerah	48.060.558.164,00	44.726.876.326,00	93,06
Sekretariat Dprd	45.607.385.026,00	39.809.963.956,00	87,29
Perencanaan	8.477.825.758,00	7.138.631.280,00	84,20
Kuangan	115.400.416.899,00	112.189.017.122,84	97,22
Kepegawaian	7.435.169.610,00	7.100.584.781,00	95,50
Pendidikan Dan Pelatihan	922.595.000,00	860.206.119,00	93,24
Penelitian Dan Pengembangan	951.254.000,00	790.304.272,00	83,08
Inspektorat Daerah	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Kecamatan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Ketertiban Dan Keamanan	6.357.839.000,00	6.167.266.150,00	97,00
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5.562.645.000,00	5.455.149.150,00	98,07
Sosial	795.194.000,00	712.117.000,00	89,55
Ekonomi	102.422.852.006,00	93.563.922.556,47	91,35
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	65.396.129.812,00	59.963.541.418,47	91,69
Tenaga Kerja	900.718.500,00	801.638.773,00	89,00
Pangan	313.792.892,00	293.766.842,00	93,62
Perhubungan	11.703.739.262,00	10.879.933.901,00	92,96
Komunikasi Dan Informatika	4.108.696.600,00	3.768.240.718,00	91,71
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.099.182.840,00	843.257.117,00	76,72
Penanaman Modal	1.451.954.500,00	1.253.156.454,00	86,31
Persandian	281.359.000,00	237.287.818,00	84,34
Kelautan Dan Perikanan	10.138.739.300,00	9.464.035.846,00	93,35
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.537.257.300,00	2.897.779.961,00	81,92
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.957.919.000,00	2.786.767.200,00	94,21
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	533.363.000,00	374.516.508,00	70,22
Perlindungan Lingkungan Hidup	13.711.043.394,00	11.669.992.501,00	85,11
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.129.056.600,00	4.655.024.468,00	90,76
Pertanahan	500.305.000,00	307.592.500,00	61,48
Lingkungan Hidup	8.081.681.794,00	6.707.375.533,00	82,99
Perumahan Dan Fasilitas Umum	13.446.780.785,00	11.943.144.994,59	88,82
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.363.403.935,00	3.407.531.934,59	78,09

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI	%
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.083.376.850,00	8.535.613.060,00	93,97
Kesehatan	55.228.672.762,00	43.383.399.312,00	78,55
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	51.485.827.762,00	40.630.741.470,00	78,92
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.742.845.000,00	2.752.657.842,00	73,54
Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00	55,08
Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00	55,08
Pendidikan	65.154.596.378,00	61.441.150.214,24	94,30
Upendidikan	56.873.806.320,00	53.508.491.950,24	94,08
Kepemudaan Dan Olahraga	6.062.915.600,00	5.810.604.544,00	95,84
Kebudayaan	1.746.530.958,00	1.681.491.476,00	96,28
Perpustakaan	471.343.500,00	440.562.244,00	93,47
Perlindungan Sosial	2.381.563.000,00	2.084.239.773,00	87,52
Sosial	1.591.250.000,00	1.477.409.873,00	92,85
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	790.313.000,00	606.829.900,00	76,78
Total	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15

3.1.4 Kinerja Keuangan Berdasarkan Urusan Pemerintah

Berdasarkan Urusan Pemerintah, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian realisasi pendapatan berdasarkan urusan tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3. 5

Kinerja Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.478.021.164,00	40.516.963.975,37	95,38
1.	RSUD Muhammad Zein	31.684.000.000,00	29.565.756.335,37	93,31
2.	UPT Puskesmas Manggar	2.741.000.570,00	2.733.679.909,00	99,73
3.	UPT Puskesmas Mengkubang	1.104.784.593,00	1.100.585.695,00	99,62
4.	UPT Puskesmas Gantung	2.274.915.734,00	2.364.814.922,00	103,95
5.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.827.144.000,00	1.701.323.184,00	93,11
6.	UPT Puskesmas Simpang Pesak	755.684.511,00	812.304.959,00	107,49
7.	UPT Puskesmas Renggiang	507.885.449,00	649.986.572,00	127,98
8.	UPT Puskesmas Dendang	464.949.965,00	599.266.645,00	128,89
9.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.117.656.342,00	989.245.754,00	88,51
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.095.829.412,00	1.013.140.840,00	92,45
1.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	101.029.412,00	125.185.840,00	123,91
2.	Dinas Lingkungan Hidup	830.000.000,00	707.033.000,00	85,18
3.	Dinas Perhubungan	117.000.000,00	123.532.000,00	105,58
4.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	47.800.000,00	57.390.000,00	120,06
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.497.625.000,00	1.548.593.780,00	103,40
1.	Dinas Perikanan	210.605.000,00	175.140.400,00	83,16
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.095.000.000,00	1.150.547.380,00	105,07

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	9.600.000,00	5.400.000,00	56,25
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	182.420.000,00	217.506.000,00	119,23
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	40.700.000,00	59.900.000,00	147,17
1.	Sekretariat Daerah	40.700.000,00	59.900.000,00	147,17
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	826.246.382.781,00	803.068.102.884,86	97,19
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	826.246.382.781,00	803.068.102.884,86	97,19
	UNSUR KEWILAYAHAN	136.862.704,00	150.182.704,00	109,73
1.	Kecamatan Manggar	16.000.000,00	15.790.000,00	98,69
2.	Kecamatan Gantung	15.500.000,00	18.510.000,00	119,42
3.	Kecamatan Kelapa Kampit	27.500.000,00	35.395.000,00	128,71
4.	Kecamatan Simpang Pesak	64.862.704,00	65.142.704,00	100,43
5.	Kecamatan Damar	13.000.000,00	15.345.000,00	118,04
	Total Pendapatan	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12

Kinerja keuangan berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pencapaian kinerja realisasi anggaran belanjanya dapat dilihat sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Pencapaian Kinerja Anggaran dan Belanja Urusan Pemerintah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	568.317.350.598,00	524.421.156.146,30	92,28
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	232.554.365.834,00	222.004.653.129,24	95,46
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	217.419.105.329,00	194.319.717.805,00	89,38
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85.546.798.399,00	77.136.835.568,06	90,17
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.105.892.850,00	8.535.613.060,00	93,74
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16.500.596.336,00	15.893.236.789,00	96,32
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7.190.591.850,00	6.531.099.795,00	90,83
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	101.853.032.968,00	91.186.776.430,00	89,53
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.724.205.900,00	6.926.864.882,00	89,68
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	790.313.000,00	606.829.900,00	76,78
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	313.792.892,00	293.766.842,00	93,62
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	500.305.000,00	307.592.500,00	61,48
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	13.712.402.004,00	11.868.556.105,00	86,55
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008,00	5.196.278.683,00	92,55
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.769.432.494,00	6.960.018.970,00	89,58
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.742.845.000,00	2.752.657.842,00	73,54
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	17.270.265.206,00	15.953.810.635,00	92,38
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	10.916.374.030,00	9.973.835.931,00	91,37
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.099.182.840,00	843.257.117,00	76,72

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.359.533.495,00	5.485.463.150,00	86,26
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	12.827.648.114,00	11.881.729.347,00	92,63
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	274.361.000,00	230.036.000,00	83,84
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	281.359.000,00	237.287.818,00	84,34
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	7.219.705.802,00	6.462.255.517,00	89,51
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.202.813.183,00	4.988.069.464,00	95,87
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	234.176.000,00	218.465.727,00	93,29
Urusan Pemerintahan Pilihan	46.564.946.142,00	40.361.130.446,00	86,68
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	17.147.244.990,00	15.860.968.219,00	92,50
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00	55,08
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	14.584.458.032,00	13.419.492.257,00	92,01
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	8.095.526.918,00	7.288.609.856,00	90,03
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	533.363.000,00	374.516.508,00	70,22
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	93.667.943.190,00	84.536.840.282,00	90,25
Sekretariat Daerah	48.060.558.164,00	44.726.876.326,00	93,06
Sekretariat DPRD	45.607.385.026,00	39.809.963.956,00	87,29
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	133.187.261.267,00	128.078.743.574,84	96,16
Perencanaan	8.477.825.758,00	7.138.631.280,00	84,20
Keuangan	115.400.416.899,00	112.189.017.122,84	97,22
Kepegawaian	7.435.169.610,00	7.100.584.781,00	95,50
Pendidikan Dan Pelatihan	922.595.000,00	860.206.119,00	93,24
Penelitian Dan Pengembangan	951.254.000,00	790.304.272,00	83,08
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Inspektorat Daerah	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Unsur Kewilayahan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Kecamatan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Unsur Pemerintahan Umum	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15

3.2 Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Pendapatan yang Telah Ditetapan

Pada tahun 2024, Anggaran pendapatan yang terdiri komponen pendapatan asli daerah dengan sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 tidak dapat direalisasikan secara keseluruhan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi baik internal maupun eksternal.

Pencapaian target pendapatan pajak daerah sebagaimana yang disebutkan di atas mengalami hambatan-hambatan antara lain:

- a. Turun naiknya perekonomian masyarakat yang menyebabkan rendahnya perputaran uang yang beredar di masyarakat, serta menurunnya event-event yang masuk kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) antara lain pagelaran kesenian/musik/tari/busana, permainan biliar dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), serta pertandingan olahraga;

- b. Terjadinya *miss* persepsi terhadap penerapan ketentuan perpajakan khususnya pajak air tanah pada sebagian kalangan masyarakat, yang menyebabkan wajib pajak belum bersedia menyetorkan pajak air tanah meskipun pemanfaatan air tanah tersebut untuk diperjualbelikan/selain konsumsi kebutuhan rumah tangga;
- c. Menurunnya hasil panen sarang burung walet, serta tidak adanya penampung hasil panen sarang burung walet, menyebabkan sebagian petani atau pengusaha sarang burung walet tidak melakukan panen serta belum menyetorkan pajak sarang burung walet;
- d. Menurunnya transaksi atas tanah yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya BPHTB Pemindahan Hak, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rata-rata dibawah Rp80.000.000,00 sebagai pengurang, sehingga tidak dibebankan pajak BPHTB atau BPHTB Nihil;
- e. Masih rendahnya kesadaran dan transparansi masyarakat akan manfaat membayar pajak daerah bagi pembangunan daerah, diikuti dengan rendahnya pemanfaatan pelayanan transaksi secara digital maupun kemudahan secara elektronik lainnya dalam menyetorkan pajak daerah, sehingga trend yang muncul adalah pajak daerah tidak disetorkan tanpa dilakukannya penagihan atau pemungutan, hal ini terus berlangsung secara berkesinambungan meskipun terhadap wajib pajak telah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Trend ini muncul lebih khususnya terhadap wajib pajak dengan kategori menengah ke bawah dan nilai setoran yang dilaporkan rata-rata dengan kisaran antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan;
- f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan guna melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi berupa pendataan subjek dan objek pajak baru, fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, maupun tugas penagihan pajak daerah terutama dengan jangkauan lokasi yang jauh maka diperlukan dukungan sarana prasarana mobilitas bagi petugas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial serta CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan maupun laporan finansial.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini telah disesuaikan dengan nomenklatur/akun rekening pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung Timur. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran 3.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010, dan diturunkan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional serta pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. “Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas”. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur belum memuat dan mengatur kebijakan akuntansi Aset Properti Investasi.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Aset
2. Kebijakan Akuntansi kewajiban
3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LRA
5. Kebijakan Akuntansi belanja
6. Kebijakan Akuntansi transfer
7. Kebijakan Akuntansi pembiayaan
8. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LO
9. Kebijakan Akuntansi beban
10. Kebijakan Akuntansi lainnya

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan Ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- c. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.1.1 ASET LANCAR

1. Kas Dan Setara Kas

- 1). Definisi Kas dan setara kas
 - a. Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan.
 - b. Kas adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintahan.

Kas meliputi:

- a) Seluruh dana yang harus dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai dana persediaan;
- b) Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- c) Dana tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
- d) Dana tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari:

- a) Kas di kas daerah;
 - b) Kas di bendahara penerimaan;
 - c) Kas di bendahara pengeluaran; dan
 - d) Kas di badan layanan umum daerah (BLUD).
- c. Setara Kas adalah suatu investasi jangka pendek, yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat dan mudah melalui mekanisme pasar dana, serta nilai investasinya itu sendiri tidak berubah secara drastis dalam periode yang singkat.
 - d. Setara kas meliputi investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.
 - e. Setara kas terdiri dari; simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari (3) bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - f. Kas di kas Daerah adalah dana tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan dana daerah/bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau rekening Kas Umum Daerah.
 - g. Kas di Bendahara Penerimaan adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, penyimpanan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - h. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksana APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - i. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / unit kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 - j. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan dana daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- 2) Pengukuran Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- 3) Pengakuan Kas dan Setara Kas
Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
Kas dan setara dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2. Investasi Jangka Pendek

- 1) Definisi Investasi Jangka Pendek
 - a. Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang berlangsung kurang dari satu tahun. Biasanya investasi jangka pendek memiliki rentang waktu antara 3 hingga 12 bulan saja. Investasi dengan jangka waktu pendek tersebut memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam mencairkan dana serta sifatnya lebih fleksibel.Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok jangka pendek antara lain adalah:
 - a) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambahkan kepemilikan saham pada suatu badan usaha;
 - b) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
 - c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- c. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: Deposito lebih dari 3 (tiga)

- bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- d. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan dari bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.
- 2) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - 3) Pengakuan Investasi Jangka Pendek
 - a. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehan / nilai dana yang ditempatkan.
 - b. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
 - c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
 - a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
 - e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

3. Piutang

1) Definisi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah dana yang wajib dibayar kepada Pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- b. Piutang terbagi menjadi:

- a) Piutang pendapatan, dan
- b) Piutang lainnya.

Piutang pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:

- (a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah;

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapat daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintahan daerah yang meliputi Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

- (b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, Dan Piutang Pendapatan Lainnya.

- (c) Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian; dan
2. Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah di bawahnya.

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari yang dibedakan menjadi:

- (a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang

berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

(b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan. Uang muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah Uang muka pengadaan barang/jasa.

Panjar kegiatan adalah suatu pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

2) Pengukuran Piutang

- a. Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- c. Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
- d. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah terutang yang diterbitkan;
 - Dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak atau retribusi daerah yang diterbitkan;
 - Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
 - b) Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang

- nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- c) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak di atur dalam Undang-Undang.
 - e. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a) Piutang pemberi pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/ atau apabila berupa barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/ atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/ atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum bayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau dana muka yang telah diterima.
 - d) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan dana muka yang telah dibayar pemerintah daerah.
 - f. Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil dicatat sebagai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - g. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:
 - a) Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
 - h. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai-nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

3) Pengakuan Piutang

- a. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dan harus dipenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan;
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/ atau
 - c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
- c. Piutang pendapatan berdasarkan transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
 - a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH Pemerintah Daerah.
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum di transfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum di transfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
 - d) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
 - e) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

- d. Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatangani Surat Keputusan Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti Kerugian Daerah.
- e. Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:
 - a) Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/ Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk Pembayaran Uang Muka Beban Belanja/ Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
 - b) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Piutang
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d. Dalam hal terdapat barang/jasa yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4. Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Metode Penghapusan Langsung;
Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.
- b. Metode Penyisihan.
Metode penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar

dibandingkan dengan total aset lancar.

- 1) Definisi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
 - b. Kualitas piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
 - c. Debitur adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
- 2). Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a. Pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih wajib dilakukan yaitu:
 - (a) Penilaian kualitas piutang;
 - (b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
 - b. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (a) Jenis piutang;
 - (b) Jatuh tempo piutang; dan
 - (c) Upaya penagihan.Jenis piutang untuk penentuan kualitas piutang sebagai berikut:
 - (a) Piutang pajak daerah yang penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
 - (b) Piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*);
 - (c) Piutang Retribusi daerah;
 - (d) Piutang selain pajak dan retribusi daerah.Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan; dan
 - (d) Kualitas macet.Kualitas lancar piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari (satu) tahun; dan/ atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan atau
 - (d) Wajib pajak kooperatif; dan/ atau
 - (e) Wajib pajak likuid; dan/ atau
 - (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ bandingKualitas kurang lancar piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/ atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
 - (d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/

atau

(e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas diragukan piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak tidak kooperatif;
- (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau
- (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 3 (tahun) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
- (d) Wajib pajak tidak bangkrut/meninggal dunia; dan/ atau
- (e) Wajib pajak keadaan kahar (*force majeure*).

Kualitas piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/ atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- (c) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/ atau
- (d) Wajib Pajak likuid; dan/ atau
- (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas kurang lancar piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 4 (Empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas lancar piutang pajak daerah *official assessment*, diragukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang sampai dengan 4 (Empat) bulan; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/ atau
- (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/ atau

- (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/ atau
- (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Kualitas lancar piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau
- (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/ atau
- (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas diragukan piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
- (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas macet piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
- (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Kualitas lancar piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

Kualitas kurang lancar piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

Kualitas diragukan piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

Kualitas macet piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara;

3) Pengakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. Paling sedikit sebesar 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
- d. 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/ atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitur atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitur dalam hal:

- (a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/ atau
- (b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:

- (a) Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
- (b) Tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitur, kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

Penentuan Kualitas Dana Bergulir Yang Dikelola Sendiri, Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/ atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- (c) Penerima dana menyetujui jatuh tempo; dan/ atau
- (d) Penerima dana kooperatif.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/ atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/ atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/ atau meninggal dunia; dan/ atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- a) Pencatatan perubahan jumlah piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - c) Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
 - d) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambahkan akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan / persetujuan / keputusan.
 - e) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:
 - (a) Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - (b) Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

5. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

6. Persediaan

1) Definisi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, bekas pakai seperti komponen bekas.
- d) Untuk barang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- e) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- f) Persediaan meliputi:
 - Barang Pakai Habis, terdiri dari:
 - (1) Bahan:
 - (a) Bahan Bangunan dan Konstruksi
 - (b) Bahan Kimia
 - (c) Bahan Peledak
 - (d) Bahan Bakar dan Pelumas
 - (e) Bahan Baku
 - (f) Bahan Kimia Nuklir
 - (g) Barang Dalam Proses
 - (h) Bahan/Bibit Tanaman
 - (i) Isi Tabung Pemadam Kebakaran
 - (j) Isi Tabung Gas
 - (k) Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
 - (l) Bahan Lainnya
 - (2) Suku Cadang:
 - (a) Suku Cadang Alat Angkutan
 - (b) Suku Cadang Alat Besar
 - (c) Suku Cadang Alat Kedokteran
 - (d) Suku Cadang Alat Laboratorium
 - (e) Suku Cadang Alat Pemancar
 - (f) Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
 - (g) Suku Cadang Alat Pertanian
 - (h) Suku Cadang Alat Bengkel
 - (i) Suku Cadang Alat Persenjataan
 - (j) Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
 - (k) Suku Cadang Lainnya
 - (3) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor :
 - (a) Alat Tulis Kantor
 - (b) Kertas dan Cover
 - (c) Bahan Cetak

- (d) Benda Pos
- (e) Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
- (f) Bahan Komputer
- (g) Perabot Kantor
- (h) Alat Listrik
- (4) Perlengkapan Dinas
 - (a) Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
 - (b) Perlengkapan Pendukung Olahraga
 - (c) Suvenir/Cendera Mata
 - (d) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- (5) Obat-obatan
 - (a) Obat
 - (b) Obat-obatan Lainnya
- (6) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
 - (a) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
 - (b) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
- (7) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - (a) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - (b) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
- (8) Natura dan Pakan
 - (a) Natura
 - (b) Pakan
 - (c) Natura dan Pakan Lainnya
- (9) Persediaan Penelitian
 - (a) Persediaan Penelitian Biologi
 - (b) Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
 - (c) Persediaan Penelitian Teknologi
 - (d) Persediaan Penelitian Lainnya
- (10) Persediaan dalam Proses
 - (a) Persediaan Dalam Proses
 - (b) Persediaan Dalam Proses Lainnya
- 2) Pengakuan persediaan
Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau ke penugasannya berpindah.
 - c. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - d. Persediaan diakui sebagai beban, karena beberapa jenis persediaan penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang habis pakai.
- 3) Pengukuran Persediaan
 - a. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

- b. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:
 - (a) Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 - (b) Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifat *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - c. Metode periodik adalah merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan dan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan fisik.
 - d. Metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
 - e. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 - f. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*
 - g. Pengukuran nilai persediaan dilakukan menggunakan:
 - h. Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
 - i. Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) jika persediaan dicatat secara perpetual.
 - j. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
 - k. Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.
 - l. Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Persediaan
- a. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
 - b. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak

- dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Jika terjadi selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
 - d. Jika terjadi selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - e. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

7. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD.

2) Pengakuan Aset Untuk Konsolidasi

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3) Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan pada entitas akuntansi PPKD.

4.3.1.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapat dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.
- d. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

- e. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak memiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- f. Investasi permanen berupa:
 - (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- h. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:
 - i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo nya oleh pemerintah daerah;
 - j. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - k. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - l. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- 2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang
 - a. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - b. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - c. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - d. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - (a) Dividen Tunai;
 - (b) Dividen Saham; dan
 - (c) Bagian Laba.
 - e. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang sah).
 - (b) Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

- f. Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode Ekuitas akan menambahkan nilai investasi pemerintah.
 - g. Pengakuan untuk hasil investasi untuk bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - (b) Apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
- a. Pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen yaitu:
 - (a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaannya dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehan tidak ada.
 - c. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - d. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
 - e. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) Metode biaya;
 - (b) Metode Ekuitas;
 - (c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 - f. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

- g. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/Ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - h. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - i. Metode Ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan atau jika kepemilikan lebih 50%. Dengan menggunakan metode Ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - j. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.3.1.3 Aset Tetap

1. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
- e. Masa Manfaat adalah :
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah dan/ atau pelayanan publik; yang mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau

- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik dengan batas minimal kapitalisasi aset.
 - f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
 - g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
 - h. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang dinilai signifikan dan Umur Manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - k. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
 - l. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - n. Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 2) Pengakuan Aset Tetap
- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 6) Memenuhi nilai minimal kapitalisasi aset tetap.
- c) Pengakuan aset tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 3) Pengukuran Aset Tetap
 - a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
 - d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
 - e) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (a) Tanah
Komponen Biaya Perolehan adalah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
 - (b) Peralatan dan Mesin
Komponen Biaya Perolehan adalah harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - (c) Gedung dan Bangunan
Komponen Biaya Perolehan adalah harga pembelian harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), notaris, dan pajak.
 - (d) Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Komponen Biaya Perolehannya adalah biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
 - (e) Aset Tetap Lainnya
Komponen Biaya Perolehannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
 - f) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

- g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - h) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap
- a) Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Calk.
 - b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - (c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang Umur Manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - (d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk rdana perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - (f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - (h) Aset tetap yang dihentikan dari pengguna aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
 - (i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Ekuitas.

2. Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- 1) Definisi Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama Umur Manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusunan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap berhubungan.
 - c. Umur Manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/ atau pelayanan publik.
 - d. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir Umur Manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 2) Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
- a. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara Umur Manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- 3) Pengukuran Penyusutan Aset Tetap
- a. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan Umur Manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah;
 - (b) Umur Manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Umur Manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;
 - (c) Umur Manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkut Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat bengkel bermesin	10
1	3	2	10	Alat bengkel tak bermesin	5
1	3	2	11	Alat ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/ Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu – Rambu	50
1	3	3	11	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah Bersih	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
04	16	05	01	Jaringan Lainnya	20
05	18	01	03	Alat Kesenian	4
05	18	01	04	Alat Olah Raga	4
05	18	02	02	Alat Olah Raga Air	4
05	18	02	03	Alat Olah Raga Udara	4
05	18	02	04	Alat Olah Raga Lainnya	4

- (d) Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan;
- (e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama;
- (f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana;
- (g) Untuk Perhitungan Aset tetap yang diperoleh sebelum adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan sejak awal tahun buku. Sedangkan untuk Perhitungan Aset Tetap yang diperoleh setelah adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan di tahun buku berkenaan;
- (h) Terhadap aset tetap yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan Umur Manfaat ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset;

- (i) Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas;
- (j) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
- (k) Renovasi/restorasi/overhaul sebagaimana dimaksud pada huruf h dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/ atau kapasitas dan/ atau volume aset yang direnovasi;
- (l) Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka Umur Manfaatnya mengikuti sisa Umur Manfaat aset induk; dan
- (m) Umur Manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud huruf I sesuai tabel di bawah ini:

Uraian	Umur Manfaat			
	Masa Manfaat Awal	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)		
		s.d 50%	>50% s.d. 100%	>100%
Kelompok 1	2	0	1	2
Kelompok 2	3	1	2	4
Kelompok 3	5	2	3	5
Kelompok 4	8	3	6	8
Kelompok 5	10	4	8	10
Kelompok 6	20	8	15	20

- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurangan nilai Aset Tetap dan disajikan secara akuntansi.

3. **Kapitalisasi Aset Tetap**

- 1) Definisi Kapitalisasi Aset Tetap
 - a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditure*) yang dapat berakibat memperpanjang Umur Manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - b. Kapasitas adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi. Dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
 - d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - e. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.

- f. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
 - g. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
 - h. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
 - i. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - j. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kualitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
 - k. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
- 2) Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap
- a. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) Bertambah ekonomi/efisien, dan/ atau
 - (b) Bertambah umur ekonomi, dan/ atau
 - (c) Bertambah volume, dan/ atau
 - (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/ atau
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- 3) Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap
- a. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten.
 - b. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - (b) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.
 - (c) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan satuan atau volume per transaksi.

- c. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:
 - (a) Pengadaan tanah;
 - (b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - (c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
 - (d) Pembangunan gedung dan bangunan;
 - (e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 - (f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
 - (g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- d. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
- e. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- f. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
- g. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
- h. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- i. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - (a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - (b) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - (c) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai “Konstruksi Dalam Pengerjaan”
- j. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - (a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperlukan untuk keperluan pembangunan.
 - (b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan

- dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- k. Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - l. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - (a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - (b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - (c) Kapitalisasi yang menambah Umur Manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan Umur Manfaatnya.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap
 - a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).
 - b. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

4.3.1.4 Dana Cadangan

- 1) Definisi Dana Cadangan
 - a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukkan yang lain. Peruntukkan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dari kas ke dana cadangan.
- 3) Pengukuran Dana Cadangan
 - a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Dana Cadangan
 - a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
 - b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pendapatan asli daerah lainnya kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.

4.3.1.5 Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lainnya terdiri dari:

- (a) Tagihan Jangka Panjang;
- (b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
- (c) Aset Tidak Berwujud;
- (d) Aset Lain-Lain.
- b. Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- d. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga adalah:
 - (a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - (b) Bangunan, kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu bekerjasama BKS.
 - (c) Bangun, serah, kelola – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - (d) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terkait dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- e. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- f. Jenis Aset Tak Berwujud adalah:
- (a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - (b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - (c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - (d) *Software*. *Software computer* yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware komputer* tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - (e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (f) Hasil kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - (g) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - (h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
- g. Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- h. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

- 2) Pengakuan Aset Lainnya
 - (a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepengusaanya berpindah.
 - (b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - (c) Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
 - (d) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - (e) Aset kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun, Serah, Kelola – BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - (f) Dalam rangka kerja sama pola Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Bulid, Operate, Transfer - BOT*, harus diakui adanya Utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - (g) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola barang dan/ atau Pengguna Barang.
 - (h) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - (i) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (j) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhir perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (k) Aset Tak Berwujud diakui pada saat:
 - (a) Manfaat ekonomi di masa datang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - (b) Biaya perolehan atau nilai wajar nya dapat diukur dengan andal.
 - (l) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan diklasifikasikan ke dalam lain-lain.
- 3) Pengukuran Aset Lainnya
 - a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.
 - c. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - (a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan

- dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- (b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- d. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- e. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- (a) Harga beli, termasuk biaya *import* dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga;
 - (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- f. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari;
 - (c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi;
 - (d) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud sehingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut di masa datang atau potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut;
 - (e) Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan Umur Manfaat 5

- tahun; dan
- (f) Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
 - g. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - h. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari pengguna aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - i. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 - j. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan
- a. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
 - b. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
 - c. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan Pihak Ketiga menurut jenisnya.
 - d. Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 - (a) Umur Manfaat dan metode amortisasi;
 - (b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
 - (c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
 - e. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.3.1.6 Amortisasi Aset Lainnya

- 1) Definisi Amortisasi Aset Lainnya
 - a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - b. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.
 - c. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki Umur Manfaat tak terbatas.
- 2) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya
 - a. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - b. Berdasarkan Umur Manfaat, Aset Tak Berwujud (ATB) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - (a) ATB umur manfaat terbatas (*finite life*). Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang disajikan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum

- atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek;
- (b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
 Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.
- 3) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- 4) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya
 Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul antara lain karena:

- Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada lembaga daerah;
- Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- Kewajiban Jangka Pendek; dan
- Kewajiban Jangka Panjang

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Definisi Kewajiban Jangka Pendek

- Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
- Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
 - Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - Utang Beban; dan
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
- Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - Pendapatan Diterima Dimuka;
 - Utang Beban; dan
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
- Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - Definisi Utang Pihak Ketiga (PFK)
 Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotongan pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran jaminan kesehatan, TASPEN, dan TAPERA.

Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT TASPEN, PT ASABRI, BP TAPERA, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut / dipotong.

2) Pengakuan Utang Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi / pos kewajiban jangka pendek.

(b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*);

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah

disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca pada klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD.
- Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor.

2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar

- negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
 - 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca kewajiban jangka pendek.
6. Pendapatan Diterima Dimuka;
- 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
 - 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintahan daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.
7. Utang Beban; dan
- 1) Definisi Utang Beban
 - a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

- b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
 - a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk satu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Pengakuan Utang Beban
Utang Beban diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 3) Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Beban
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk Dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

2. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang

- yang tidak termasuk pada Kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya Kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
 - c. Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 - d. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
 - e. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
 - f. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - b. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
 - 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan Bangun Serah Kelola (BSK) sebesar nilai yang belum dibayar.
 - b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang Kemitraan disajikan Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang.
 - b. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- 1) Definisi Ekuitas
 - a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
 - b. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - c. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - d. Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi EKUITAS untuk DIKONSOLIDASIKAN dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
 - e. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi

- pada rincian akun kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
 - 2) Pengakuan Ekuitas
Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
 - 3) Pengukuran Ekuitas
Pengukuran atas Ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan disajikan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

- 1) Definisi Pendapatan LRA
 - a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
 - b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan dana daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 - e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - f. Pendapatan LRA terdiri dari:
 - (a) Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
 - (b) Pendapatan Transfer – LRA
 - (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
- 2) Pengakuan Pendapatan LRA
 - a. Pengakuan Pendapatan LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
 - b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD
 - d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - e. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
 - f. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - g. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya

sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- a. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

1) Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah).

2) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4.2 Pendapatan Transfer – LRA

1) Definisi Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada DAERAH untuk mendanai kebutuhan DAERAH dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA
 - a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
 - b. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA
Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4.3 Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

- 1) Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah – LRA
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah – LRA,
 - b. Dana Darurat- LRA,
 - c. Pendapatan Lainnya – LRA.
- 2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
 - a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
- 3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Definisi Belanja
 - a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.
- 2) Pengakuan Belanja
 - a. Pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas

- dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Belanja diakui pada saat:
 - c. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
 - d. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan setelah mendapat pengesahan dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - e. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - f. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 3) Pengukuran Belanja
- Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja
- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5.1 Belanja Operasi

- 1) Definisi Belanja Operasi
 - a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PKKD.
 - c. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.
- 2) Pengakuan Belanja Operasi
 - a. Pengakuan Belanja Operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.5.2 Belanja Modal

- 1) Definisi Belanja Modal
 - a. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tak berwujud.
 - b. Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD dan SKPKD dan BLUD juga memiliki kewenangan untuk pengelolaannya.
- 2) Pengakuan Belanja Modal
 - a. Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - b. Bersamaan dengan pengakuan Belanja modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).
- 3) Pengukuran Belanja Modal
Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal
Belanja modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.5.3 Belanja Tak Terduga

- 1) Definisi Belanja Tak Terduga
 - a. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 - b. Belanja Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- 2) Pengakuan Belanja Tak Terduga
Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah pencairan dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Pengukuran Belanja Tak Terduga
Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

- 1) Definisi Transfer
 - a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran dana dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- b. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) diklasifikasi dalam pendapatan transfer.
 - d. Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran dana dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dan bagi hasil oleh pemerintah daerah.
 - e. Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar terdiri dari:
 - f. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan
 - g. Transfer Bantuan Keuangan.
 - h. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lebih rendah.
 - i. Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.
- 2) Pengakuan Transfer
- a. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan belanja.
 - b. Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
 - c. Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 3) Pengukuran Transfer
- Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Transfer
- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari :
 - (a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - (b) Pengeluaran pembiayaan.

4.3.7.1 Penerimaan Pembiayaan

- 1) Definisi Penerimaan Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

- 2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
 - a. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - b. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelola Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan – LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.3.7.2 Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
- 2) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 3) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).
 - b. Pembentukan dana cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan – LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.3.7.3 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - b. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - (a) Surplus / Defisit – LRA
 - (b) Pembiayaan Netto
 - (c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - (d) Perubahan SAL
 - c. Surplus/defisit – LRA adalah lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

- d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
 - f. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi dan Laporan Perubahan SAL.
- 2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 3) Penyajian Dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

- 1) Definisi Pendapatan – LO
 Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 Pendapatan – LO terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah – LO
 - b. Pendapatan Transfer – LO
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - d. Pendapatan Non Operasional – LO
 - e. Pos Luar Biasa – LO
- 2) Pengakuan Pendapatan – LO
- a. Pendapatan – LO dapat diakui:
 - (a) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - (b) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 Pada saat timbulnya hak atas pendapatan artinya bahwa:
 - Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - b. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - (1) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - (2) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
 - (3) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.

- c. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
 - d. Pendapatan – LO diakui pada saat / bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.
- Untuk kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:
- (a) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambahan Pendapatan Pajak – LO
 - (b) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.
 - (c) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.
 - (d) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.
 - (e) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO pada saat/bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
 - (f) Perbedaan waktu tidak signifikan
 - (g) Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan (timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.
 - (h) Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi
 - (i) Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi, misalnya Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara observatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
 - (j) Tidak ada dokumen penetapan
 - (k) Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assessment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

- (l) Masa transisi perubahan sistem akuntansi
 - (m) Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan pendapatan LO dapat dilakukan pada saat penerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - (n) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.
- 3) Pengukuran Pendapatan – LO
- a. Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
 - b. Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan – LO
- Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

- 1) Definisi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO
 - a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
- 2) Pengakuan Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah – LO
 - a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.
 - b. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan antar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
 - c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
 - d. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa Pendapatan Asli Daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui pada saat dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan

Kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

- e. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
 - f. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi pada saat dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi pada periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).
 - g. Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.
 - h. Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan pada bulan Mei untuk 12 bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 bulan.
- 3) Penyajian Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah – LO
- Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO
- Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.2 Pendapatan Transfer – LO

- 1) Definisi Pendapatan Transfer – LO
 - a. Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - b. Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.
- 2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO
 - a. Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer. Karena alasan kepastian pendapatan dan distribusi pengakuan pendapatan untuk keperluan laporan interim maka Pendapatan Transfer – LO diakui atau dicatat pada saat penerimaan kas berdasarkan Nota Kredit dari bank.

- b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.
- 3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LO
Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO
Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - (LO)

- 1) Definisi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - (LO)
 - a. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dalam perimbangan).
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
 - c. Pendapatan Hibah – LO,
 - d. Dana Darurat – LO
 - e. Pendapatan Lainnya – LO
- 2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.
 - a. Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.
 - b. Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
 - c. Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.
- 3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
 - a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.4 Pendapatan Non Operasional – LO

- 1) Definisi Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
 - (a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - (b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
 - (c) Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
- 2) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO
 - a. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
 - b. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara telah diterima.
- 3) Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.8.5 Pos Luar Biasa – LO

- 1) Definisi Pos Luar Biasa – LO
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- 2) Pengakuan Pos Luar Biasa – LO
 - a. Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.
 - b. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
- 3) Pengukuran Pos Luar Biasa – LO
Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Pos Luar Biasa – LO
Pos Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Definisi Beban
 - a. Beban adalah penurunan ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. Beban terdiri dari:
 - (a) Beban Operasi
 - (b) Beban Transfer
 - (c) Beban Non Operasional
 - (d) Beban Luar Biasa
- 2) Pengakuan Beban
 - a. Beban dapat diakui pada:
 - (a) Saat timbulnya kewajiban;
 - (b) Saat terjadi konsumsi aset; dan
 - (c) Saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
 - c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- g. Beban diakui pada saat/bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- h. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
 - (a) Perbedaan waktu tidak signifikan
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.
 - (b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama
Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.
 - (c) Karakteristik belanja operasional
Sifat dari tagihan belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.
 - (d) Masa transisi perubahan sistem akuntansi
Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat pengeluaran kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- i. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

3) Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.1 Beban Operasi

1) Definisi Beban Operasi

- a. Beban Operasi adalah pengeluaran dana atau kewajiban untuk mengeluarkan dana dari entitas dalam rangka kegiatan operasi entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- b. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lainnya.
 - (a) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk dana atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - (b) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang merupakan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - (c) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah yang terkait biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - (d) Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - (e) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk dana, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - (f) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk dana atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (g) Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- (h) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait keterlambatan piutang.
- (i) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

2) Pengakuan Beban Operasi

- a. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- b. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- c. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/ pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurangan beban.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i. Beban penyusutan dan amortisasi saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- k. Beban Lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Beban Operasi
Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi
Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.2 Beban Transfer

- 1. Definisi Beban Transfer
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran dana atau kewajiban untuk mengeluarkan dana dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- 3. Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
- 4. Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.3 Beban Non Operasional

- 1) Definisi Beban Non Operasional
Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 2) Pengakuan Beban Non Operasional
 - a. Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
 - b. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadi beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).
- 3) Pengukuran Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.4 Beban Luar Biasa

- 1) Definisi Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
- 2) Pengakuan Beban Luar Biasa
 - a. Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
 - b. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan

- pengeluaran kas (basis kas).
- 3) Pengukuran Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
Pos luar biasa disajikan terpisahkan dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Lainnya

4.3.10.1 Kebijakan Akuntansi Koreksi

- 1) Definisi Koreksi
- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
 - b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
 - c. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
 - (a) Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
 - (b) Kesalahan perhitungan matematis,
 - (c) Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
 - (d) Kesalahan interpretasi fakta,
 - (e) Kecurangan, atau
 - (f) Kelalaian.
 - d. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan tidak berulang; dan
 - (b) Kesalahan berulang dan sistematis.
 - e. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya.
 - f. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
 - g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan – LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
 - h. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

- 2) Pengakuan Koreksi
Koreksi diakui saat ditemukan kesalahan.
- 3) Pengukuran koreksi
Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Koreksi
 - a. Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Hal- hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan – LO diantaranya adalah:
 - c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.
 - d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
 - e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan – LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2024.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berasal dari potensi daerah itu sendiri maupun dari Provinsi atau Pemerintah Pusat. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp871.495.421.061,00 dengan realisasi sebesar Rp846.356.884.184,23 atau sebesar 97,12% jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,33%. Hal ini terjadinya karena adanya penurunan penerimaan pada setiap akun pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dibandingkan tahun sebelumnya. Uraian dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 5. 1
Realisasi Pendapatan

No.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81
2	Pendapatan Transfer	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17	797.524.959.927,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58	8.412.879.414,00
	Jumlah	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12	913.345.884.385,81

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 97,41% jika dibanding realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,08%, Pendapatan transfer terealisasi 97,17% jika dibanding Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,45% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 38,58% jika dibanding Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 94,27%, dengan penjelasan masing masing pendaptan dijabarkan berikut ini.

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang HKPD disebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp99.803.408.919,23 atau sebesar 97,41% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp102.461.502.970,00 rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88
2.	Retribusi Daerah	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32
	Jumlah	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Kepala Daerah lainnya juga dibentuk dalam rangka mengatur pelaksanaan secara teknis atas diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tersebut yang untuk saat ini sedang dalam proses pembahasan secara intensif. Pemungutan pajak daerah dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur selaku perangkat daerah yang mengampu urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Secara rinci, dari target anggaran tahun 2024 khusus mata anggaran pajak daerah disusun dan ditetapkan sebesar Rp41.745.502.690,00, maka realisasi yang dicapai sampai

dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.008.024.533,50 atau melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 107,82%, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp55.223.937.728,88, maka secara angka penerimaan pajak daerah mengalami penurunan di tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp10.215.913.195,38 atau secara persentase mengalami penurunan penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 18,50%. Penurunan dan perbandingan berdasarkan mata anggaran pajak daerah tersebut secara rinci akan dijelaskan berdasarkan tabel berikutnya dalam laporan pendapatan daerah ini.

Pemungutan dan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode Penetapan Bupati dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dan metode perhitungan sendiri (*Self Assesment*) oleh wajib pajak.

Metode Penetapan Bupati dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Metode *Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan dan pembayaran pajak daerah selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan metode perhitungan sendiri (*Self Assesment*) oleh wajib pajak. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri sebagai Wajib dan Subjek Pajak Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Metode perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak ini terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang melingkupi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau pajak MBLB, serta pajak sarang burung walet.

Pencapaian target kinerja penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2024, dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) mata anggaran pajak daerah, sebanyak 16 (enam belas) mata anggaran pajak daerah tidak dapat terealisasi hingga 100%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, situasi perputaran uang di masyarakat yang

disebabkan oleh berbagai kondisi, serta faktor wajib pajak itu sendiri juga mempengaruhi capaian kinerja atas target penerimaan pajak daerah dimaksud. Terhadap target capaian kinerja pendapatan pajak daerah untuk setiap mata anggaran dimaksud.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak menyusun dan menetapkan target kinerja tahunan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan Kinerja Pajak Daerah Tahun 2024, hal ini dilakukan dalam rangka untuk tetap mengantisipasi adanya penerimaan berupa pendaftaran atas objek dan subjek pajak daerah, serta adanya penyetoran pajak daerah dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun wajib pajak yang berbentuk badan usaha.

Target dan realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2024 serta realisasi capaian pada tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 3
Realisasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		
1	Pajak Hotel	50.000.000,00	57.873.815,00	115,75	89.782.522,00
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	28.000.000,00	34.980.000,00	124,93	50.372.000,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	8.710.000,00
4	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	100.000.000,00	152.698.586,00	152,70	124.426.760,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	54.200.000,00	5.984.568,00	11,04	47.990.250,00
6	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.550.000.000,00	1.647.589.723,00	106,30	1.423.260.381,00
7	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.200.000,00	1.034.000,00	24,62	923.000,00
8	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.400.000,00	13.773.692,00	102,79	25.382.000,00
9	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.300.000,00	300.000,00	23,08	1.100.000,00
10	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	54.000.000,00	30.055.000,00	55,66	130.354.500,00
11	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	800.000,00	400.000,00	50,00	2.000.000,00
12	Pajak Pertandingan Olahraga	5.200.000,00	4.200.000,00	80,77	17.246.250,00
13	Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron/ Megatron	230.000.000,00	273.770.764,00	119,03	231.881.500,50
14	Pajak Reklame Kain	87.000.000,00	82.767.565,00	95,14	56.526.579,00
15	Pajak Reklame Melekat/Stiker	9.200.000,00	15.155.700,00	164,74	9.093.750,00
16	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		
18	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.200.000.000,00	11.463.421.593,00	102,35	8.498.244.799,00
19	Pajak Parkir	10.000.000,00	2.569.000,00	25,69	13.176.300,00
20	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	47.291.349,00	94,58	58.725.754,00
21	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00	53.090.000,00	62,46	81.505.000,00
22	Pajak Granit/Andesit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Pajak Kaolin	537.000.000,00	656.658.642,50	122,28	857.034.657,50
24	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Pajak Pasir Kuarsa	19.500.000.000,00	22.076.560.751,50	113,21	34.102.185.680,50
26	Pajak Tanah Liat	1.500.000.000,00	1.648.002.224,00	109,87	1.642.596.420,00
27	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.569.102.690,00	4.256.609.223,00	119,26	2.539.484.694,00
28	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	1.500.000.000,00	1.274.944.475,00	85,00	1.429.526.050,50
29	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru	1.600.000.000,00	1.208.293.862,50	75,52	3.782.408.880,88
JUMLAH		41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88

Penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp45.008.024.533,50 atau tercapai sebesar 107,82% dari target anggaran sebesar Rp41.745.502.690,00 jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2023 sebesar Rp55.223.937.728,88 terjadi penurunan secara angka yaitu sebesar Rp10.215.913.195,38 atau secara persentase menurun sebesar 18,50%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya penerimaan salah satunya mata anggaran pajak daerah yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dimana pada tahun 2023 capaian penerimaan pajak MBLB adalah sebesar Rp36.601.816.758,00 sedangkan penerimaan pajak MBLB pada tahun 2024 hanya sebesar Rp24.381.221.618,00. Menurunnya produksi dan pengiriman Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh perusahaan-perusahaan tambang sangat mempengaruhi penerimaan pajak asli daerah khususnya di Kabupaten Belitung Timur, mengingat pajak MBLB masih dianggap sebagai primadona sumber pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan data pada tabel 5.3 tentang capaian atau realisasi pajak daerah tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak hotel per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp57.873.815,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp50.000.000,00, atau capaian sebesar 115,75%, realisasi pajak hotel tahun sebelumnya yaitu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp89.782.522,00 dari target anggaran sebesar Rp87.647.400,00 atau dengan capaian sebesar 102,44%. Perbandingan penerimaan pajak hotel per 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak hotel per 31 Desember 2024 secara angka penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp31.908.707,00 atau penurunan sebesar 35,53%. Penurunan penerimaan pajak hotel tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya

event-event kepariwisataan yang berdampak pada berkurangnya wisatawan menginap di Kabupaten Belitung Timur.

- 2) Penerimaan pajak rumah penginapan dan sejenisnya per tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp34.980.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp28.000.000,00 atau terealisasi sebesar 124,93%. Sedangkan capaian atau realisasi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.372.000,00 dari target anggaran sebesar Rp35.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 143,92%. Perbandingan antara penerimaan atau realisasi di tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp15.392.000,00 atau penurunan sebesar 30,55%. Penurunan ini antara lain karena berkurangnya event-event kepariwisataan sehingga memberikan dampak pada berkurangnya wisatawan menginap di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, terhitung sejak Januari 2024 dimana rumah kost yang melebihi 10 (sepuluh) pintu yang masuk dalam sub mata anggaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya tidak lagi masuk dalam kategori yang dapat dipungut pajak daerah atau bukan sebagai objek pajak daerah sebagaimana pada tahun 2023, hal ini mempengaruhi capaian persentase atas penerimaan pajak rumah penginapan dan sejenisnya sampai dengan akhir Desember 2024.
- 3) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) untuk tahun 2024 tidak ada anggaran dan realisasi atau bernilai Rp0,00, di tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp8.710.000,00, atau turun 100%.
- 4) Penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp152.698.586,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp100.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 152,70%. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp124.426.760,00 dari target anggaran sebesar Rp110.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 113,12%. Perbandingan penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya per 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp28.271.826,00 atau kenaikan sebesar 22,72%. Kenaikan penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya pada tahun 2024 antara lain oleh karena meningkatnya kesadaran wajib pajak rumah makan dan sejenisnya, salah satunya adalah dengan peningkatan pembayaran pajak daerah secara online, banyaknya kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun penyelenggara kegiatan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan ramah tamah pada rumah makan, dimana hal ini juga mempengaruhi peningkatan penerimaan pada mata anggaran PBJT Jasa Boga/Katering.
- 5) Penerimaan pajak warung dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.984.568,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp54.200.000,00 atau capaian sebesar 11,04%. Sedangkan capaian atau

realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.990.250,00 dari target anggaran sebesar Rp50.890.112,00 atau capaian sebesar 94,30%. Perbandingan realisasi per 31 Desember 2023 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 maka penerimaan pajak warung dan sejenisnya mengalami penurunan jauh sebesar Rp42.005.682,00 atau sebesar 87,52%. Penurunan atas penerimaan pajak warung dan sejenisnya untuk tahun 2024 lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan pada APBD-P tahun 2024 antara lain disebabkan menurunnya daya beli masyarakat seiring turun naiknya perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Belitung Timur;

- 6) Penerimaan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.647.589.723,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp1.550.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 106,30%. Sedangkan capaian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.423.260.381,00 dari target anggaran penerimaan sebesar Rp1.150.000.000,00 atau capaian sebesar 123,76%. Perbandingan capaian atau realisasi per 31 Desember 2023 dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2024, maka di tahun 2024 ini Penerimaan atas Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya mengalami peningkatan sebesar Rp224.329.342,00 atau kenaikan sebesar 15,76%. Peningkatan penerimaan ini disebabkan karena banyaknya kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun organisasi kemasyarakatan sehingga mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- 7) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.034.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp4.200.000,00 atau capaian sebesar 24,62%, sedangkan realisasi tahun sebelumnya adalah sebesar Rp923.000,00 dari target anggaran sebesar Rp5.056.000,00 atau hanya sebesar 18,26%. Dibandingkan dengan capaian per tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana meningkat meskipun tidak signifikan yaitu sebesar Rp111.000,00 atau kenaikan sebesar 12,02%. Penerimaan pajak pada tahun 2024 yang tidak begitu signifikan disebabkan oleh berkurangnya event-event penyelenggaraan hiburan, mengingat berbagai faktor yang ada antara lain daya atau stabilitas keuangan di masyarakat, minat kunjungan atas event-event tertentu, serta pertimbangan dari Pihak Penyelenggara terkait keuntungan bisnis atas suatu penyelenggaraan event itu sendiri.
- 8) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

adalah sebesar Rp13.773.692,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp13.400.000,00 atau dengan capaian sebesar 102,79%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp25.382.000,00 dari target anggaran sebesar Rp23.389.984,00 atau capaian sebesar 108,52%, maka penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya mengalami penurunan sebesar Rp11.608.308,00 atau sebesar 45,73%. Sama halnya dengan pendapatan dari mata anggaran pajak hiburan lainnya, kondisi keuangan atau stabilitas perekonomian masyarakat yang belum stabil juga menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak hiburan khususnya diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya.

- 9) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak permainan biliard dan bowling sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp300.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp1.300.000,00 atau capaian sebesar 23,08%. Dibandingkan dengan capaian per 31 Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.100.000,00 dari target anggaran sebesar Rp4.273.360,00 atau capaian sebesar 25,74%, maka pada tahun 2024 penerimaan Pajak tersebut mengalami penurunan sebesar Rp800.000,00 atau 72,72%. Kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil juga menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak daerah tersebut.
- 10) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak hiburan pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan untuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp30.055.000,00 dari target anggaran sebesar Rp54.000.000,00 atau capaian sebesar 55,66%. Sedangkan capaian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp130.354.500,00 dari target anggaran sebesar Rp125.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 104,28%. Dibandingkan dengan capaian penerimaan pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp100.299.500,00 atau sebesar 76,94%. Penurunan penerimaan ini oleh karena berkurangnya event-event hiburan, dimana pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) event penyelenggaraan hiburan pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dan dengan hasil penerimaan yang tidak begitu signifikan, baik dari sisi penerimaan pajak hiburan dari hasil penjualan karcis tanda masuk maupun karcis parkir kendaraan roda dua dan roda empat.
- 11) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak panty pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp400.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp800.000,00 atau capaian sebesar 50,00%. Sedangkan capaian per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp2.000.000,00 dari target

anggaran sebesar Rp1.787.296,00 atau capaian sebesar 111,90%. Dibandingkan dengan akhir tahun 2023, maka capaian penerimaan dari mata anggaran pajak ini mengalami penurunan sebesar Rp1.600.000,00 atau sebesar 80,00%. Kondisi ini disebabkan antara lain kurangnya minat konsumen untuk pemanfaatan layanan khususnya Panti Pijat oleh karena ketersediaan fasilitas pada panti pijat tersebut yang kurang memadai, dan adanya masyarakat yang berprofesi sebagai tukang pijat namun tidak menyediakan rumah atau panti khusus dan telah memiliki konsumen/pelanggan tersendiri.

- 12) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak pertandingan olah raga, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp4.200.000,00 dari target anggaran sebesar Rp5.200.000,00 atau sebesar 80,77%. Sedangkan capaian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.246.250,00 dari target anggaran sebesar Rp16.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 107,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 maka penurunan penerimaan pada tahun 2024 ini yaitu sebesar Rp13.046.250,00 atau penurunan sebesar 75,64%. Penurunan penerimaan pajak pertandingan olah raga pada tahun 2024 ini antara lain mengingat pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) event pertandingan olah raga, yaitu kejuaraan sepak bola Desa Balok, kejuaraan futsal di GOR Kecamatan Damar, serta turnamen voly Desa Simpang Tiga dengan hasil penerimaan pajak daerah yang tidak begitu signifikan baik penerimaan pajak daerah dari hasil penjualan karcis penonton maupun penjualan karcis parkir.
- 13) Selanjutnya untuk penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp273.770.764,00 dari target anggaran sebesar Rp230.000.000,00 atau capaian sebesar 119,03%. Sedangkan capaian per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp231.881.500,50 dari target anggaran sebesar Rp245.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 94,65%. Dibandingkan dengan penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 maka pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan penerimaan yaitu sebesar Rp41.889.263,50 atau sebesar 18,06%. Peningkatan penerimaan pajak reklame pada tahun 2024 antara lain oleh karena:
 - meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan media reklame sebagai sarana untuk memperkenalkan produk, bisnis maupun layanan yang diberikan, dan
 - pelaksanaan peningkatan kegiatan intensifikasi Pajak Reklame, proses penagihan dan pengawasan pajak daerah yang dimaksimalkan terhadap reklame yang diselenggarakan oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun

- pihak lainnya, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah maupun yang belum terdaftar.
- 14) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame kain sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp82.767.565,00 dari target anggaran sebesar Rp87.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 95,14%. Sedangkan untuk capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp56.526.579,00 dari target anggaran sebesar Rp96.879.648,00 atau capaian kinerja sebesar 58,35%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, penerimaan pajak reklame kain di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp26.240.986,00 atau capaian peningkatan sebesar 46,42%. Peningkatan penerimaan pajak daerah atas reklame ini sama halnya dengan peningkatan pada penerimaan pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron oleh karena:
- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan Media Reklame sebagai sarana untuk memperkenalkan brand/produk, jenis usaha/bisnis, maupun layanan yang diberikan kepada konsumen, serta
 - pelaksanaan peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah, baik pada proses pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta penagihan dan pengawasan pajak daerah yang terus dimaksimalkan terhadap penyelenggaraan reklame oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya.
- 15) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame melekat atau stiker sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp15.155.700,00 dari target anggaran sebesar Rp 9.200.000,00 atau dengan capaian sebesar 164,74%. Sedangkan untuk tahun 2023 capaian penerimaan pajak Reklame Melekat atau Stiker adalah sebesar Rp9.093.750,00 dari target anggaran sebesar Rp11.248.640,00 atau dengan capaian sebesar 80,84%. Dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka capaian pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp6.061.950,00 atau peningkatan sebesar 66,66%. Peningkatan penerimaan pajak daerah jenis pajak reklame melekat/stiker ini oleh karena:
- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku usaha yang memanfaatkan Media Reklame Melekat/Stiker ini sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan *Brand*/produk, jenis usaha/bisnis, maupun layanan yang diberikan kepada konsumen, mengingat reklame jenis melekat/stiker ini cukup efektif untuk diselenggarakan dengan pertimbangan tempat penyelenggaraan, biaya pengadaan/cetak stiker, maupun dari sisi perizinan penyelenggaraan reklame tersebut; dan

- pelaksanaan peningkatan intensifikasi pajak daerah, baik pada proses pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta penagihan dan pengawasan pajak daerah yang terus dimaksimalkan terhadap penyelenggaraan reklame oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya.
- 16) Selanjutnya, penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame selebaran, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat terealisasi dari target anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Kondisi ini juga terjadi terhadap capaian realisasi pada tahun 2023 dimana target anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi. Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, tidak tercapainya target realisasi selama 2 (dua) tahun terakhir disebabkan oleh minimnya wajib pajak yang menggunakan reklame jenis selebaran, baik wajib pajak yang telah terdaftar maupun wajib pajak reklame selaku pemohon baru pada BPKPD Kabupaten Belitung Timur.
 - 17) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Pajak Penerangan Jalan atau PPJ khususnya Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat terealisasi meskipun target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini hanya dengan nilai target sebesar Rp100.000,00. Kondisi ini juga terjadi terhadap capaian kinerja di tahun 2023 yang tidak dapat terealisasi dengan target anggaran yang sama di tahun anggaran 2024.
 - 18) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khususnya pajak penerangan jalan sumber lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi dengan nilai penerimaan sebesar Rp11.463.421.593,00 dari target anggaran sebesar Rp11.200.000.000,00 atau capaian sebesar 102,35%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp8.498.244.799,00 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.200.000.000,00 atau dengan capaian target kinerja sebesar 118,03%. Perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan per tanggal 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak penerangan jalan sumber lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.965.176.794,00 atau meningkat sebesar 34,89%. Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak penerangan jalan sumber lain ini cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan diharapkan akan menjadi salah satu penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan.
 - 19) Penerimaan pajak parkir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp2.569.000,00 dari target anggaran sebesar Rp10.000.000,00 atau capaian sebesar 25,69%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp13.176.300,00 dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp13.000.000,00 atau capaian

kinerja sebesar 101,36%. Perbandingan penerimaan pajak parkir per 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak parkir per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.607.300,00 atau penurunan sebesar 80,50%. Penurunan penerimaan dari mata anggaran pajak parkir di tahun 2024 ini antara lain oleh karena penerimaan pajak parkir khususnya pada tahun-tahun sebelumnya lebih didominasi atas adanya setoran/pembayaran oleh penyelenggara event tertentu seperti *grasstrack*, turnamen olah raga, maupun event pagelaran kesenian dan hiburan, dimana penyelenggara event disamping melakukan penjualan karcis masuk penonton juga sekaligus menyelenggarakan layanan parkir dengan tarif tertentu, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Sedangkan pada tahun 2024 penyelenggaraan event yang ada tidak terlalu memberikan dampak secara signifikan atas peningkatan penerimaan dari sisi pajak parkir.

- 20) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Pajak Air Tanah (PAT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp47.291.349,00 dari target anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau capaian sebesar 94,58%. Sedangkan pada tahun 2023 capaian penerimaan PAT adalah sebesar Rp58.725.754,00 dari target anggaran sebesar Rp13.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 451,74%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan PAT tahun 2023, maka capaian penerimaan PAT pada tahun 2024 menurun sebesar Rp11.434.405,00 atau sebesar 19,47%. Penurunan penerimaan PAT pada tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh menurunnya produksi air tanah oleh pelaku usaha yang dipengaruhi oleh cuaca panas/kemarau, serta menurunnya penjualan hasil produksi air tanah kepada konsumen sehingga berdampak pula pada pembayaran dan penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk selama tahun 2024.
- 21) Selanjutnya, penerimaan pajak daerah atas pajak sarang burung walet sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp53.090.000,00 dari target anggaran sebesar Rp85.000.000,00 atau capaian sebesar 62,46%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp81.505.000,00 dari target anggaran sebesar Rp75.242.600,00 atau capaian kinerja sebesar 108,32%. Dibandingkan dengan capaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.415.000,00 atau sebesar 34,86%. Penurunan penerimaan pajak sarang burung walet ini antara lain oleh karena menurunnya hasil produksi sarang burung walet, serta laporan dan keterangan wajib pajak sarang burung walet yang mana kegiatan ekspor sarang burung walet yang menurun, sehingga pihak penampung dan pelaku usaha sarang burung walet tidak dapat menjual hasil panen sarang burung walet. Hal ini sangat berpengaruh pula

terhadap capaian target atas penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak sarang burung walet ini.

- 22) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) jenis granit/andesit sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak terealisasi dari target anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Tidak tercapainya target kinerja penerimaan pajak MBLB jenis granit/andesit pada tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh belum adanya pelaku usaha yang memiliki izin penambangan jenis granit/andesit di wilayah Kabupaten Belitung Timur, meskipun secara mata anggaran tetap dicantumkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dari jenis mata anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dari pajak MBLB jenis granit/andesit ini akan dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan.
- 23) Penerimaan pajak MBLB jenis kaolin sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp656.658.642,50 dari target anggaran sebesar Rp537.000.000,00 atau capaian sebesar 122,28%, sedangkan untuk capaian di tahun 2023 adalah sebesar Rp857.034.657,50 dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp650.000.000,00 atau dengan capaian kinerja sebesar 131,85%. Perbandingan penerimaan pajak kaolin per 31 Desember 2023 dengan penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp200.376.015,00 atau penurunan sebesar 23,38%. Penurunan penerimaan pajak MBLB jenis kaolin di tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh stabilitas produksi yang cenderung menurun oleh perusahaan, penurunan permintaan atau pembelian jenis komoditi kaolin, serta deposit atau jumlah kandungan berdasarkan hasil survey pihak pelaku usaha/perusahaan yang ada di beberapa wilayah pertambangan di Belitung Timur yang cenderung tidak begitu potensial lagi untuk diproduksi khususnya MBLB jenis kaolin.
- 24) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya jenis pasir dan kerikil sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat terealisasi dari target anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Penerimaan pajak atas pasir dan kerikil di tahun 2023 dan 2024 yang tidak dapat direalisasikan antara lain disebabkan oleh karena belum adanya pelaku usaha yang memiliki IUP OP jenis pasir dan kerikil di wilayah Kabupaten Belitung Timur, dimana jenis MBLB pasir dan kerikil ini tergolong dalam klasifikasi produksi bahan galian untuk kegiatan proyek tertentu seperti bangunan, serta akititas penimbunan (kegiatan urug) suatu bidang/lahan tertentu khususnya di Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi secara mata anggaran tetap dicantumkan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis mata anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dari pajak MBLB jenis pasir dan kerikil ini akan dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan.

- 25) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya jenis Pasir kuarsa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp22.076.560.751,50 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.500.000.000,00 atau capaian sebesar 113,21%. Sedangkan untuk tahun 2023, pajak pasir kuarsa terealisasi sebesar Rp34.102.185.680,50 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.938.258.980,00 atau dengan capaian kinerja sebesar 103,53%. Dibandingkan dengan capaian per tanggal 31 Desember 2024, maka penerimaan pajak yang bersumber dari pajak pasir kuarsa mengalami penurunan sebesar Rp12.025.624.929,00 atau sebesar 35,26%. Penurunan penerimaan pajak MBLB jenis komoditas pasir kuarsa meskipun secara angka mengalami penurunan namun secara persentase mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, antara lain diakibatkan oleh produksi beberapa perusahaan yang cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasar atas komoditas tersebut, serta beberapa perusahaan yang memiliki Wilayah Izin Usaha Produksi (WIUP) belum meningkatkan Status Perizinan menjadi Izin Usaha Produksi (IUP), sehingga perusahaan tersebut belum dapat melakukan aktifitas penambangan bahan galian. Hal ini juga berdampak pada stabilitas penerimaan pajak MBLB khususnya komoditas pasir kuarsa.
- 26) Selanjutnya, untuk penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) khususnya jenis tanah liat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.648.002.224,00 dari target anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau capaian sebesar 109,87%. Sedangkan untuk tahun 2023, terealisasi sebesar Rp1.642.596.420,00 dari jumlah target anggaran perubahan sebesar Rp1.413.376.122,00 atau dengan capaian kinerja sebesar 116,22%. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan pajak tanah liat mengalami peningkatan sebesar Rp5.405.804,00 atau peningkatan sebesar 0,33%. Peningkatan penerimaan pajak tanah liat pada tahun 2024 ini oleh karena stabilitas produksi oleh perusahaan, peningkatan permintaan atau pembelian jenis komoditas tanah liat, serta aktifitas pengiriman yang tidak menemui berbagai kendala,
- 27) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah terealisasi sebesar Rp4.256.609.223,00 dari target anggaran sebesar Rp3.569.102.690,00 atau capaian sebesar 119,26%.

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.539.484.694,00 dari target anggaran sebesar Rp2.474.204.395,00 atau capaian kinerja sebesar 102,64%, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp1.717.124.529,00 atau kenaikan sebesar 67,62%. Peningkatan atau kenaikan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2024 antara lain:

- dilakukannya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2024 yaitu dari tarif sebesar 0,05% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi 0,10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diberlakukan untuk keseluruhan objek pajak PBB-P2 di Wilayah Kabupaten Belitung Timur, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 tahun 2024.
- adanya kerjasama antara BPKPD Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk melakukan pengawasan atas penagihan piutang pajak daerah PBB-P2 terhadap wajib pajak perorangan maupun badan usaha yang juga memberikan dampak pada pembayaran piutang PBB-P2, baik pada tahun berjalan maupun piutang PBB-P2 pada tahun-tahun sebelumnya.
- peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah PBB-P2 yang berdampak pada penambahan objek pajak baru atau pendaftaran baru khusus PBB-P2 dari beberapa wilayah se-Kabupaten Belitung Timur.
- Meningkatnya kinerja kolektor PBB-P2 untuk menyampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2024, khususnya di wilayah pedesaan dimana memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak PBB-P2 secara keseluruhan, baik tahun berjalan maupun piutang PBB-P2 tahun sebelumnya dari objek dan wajib pajak di wilayah kerja kolektor PBB-P2.

28) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus pemindahan hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah terealisasi sebesar Rp1.274.944.475,00 dari target anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau capaian sebesar 85,00%. Sedangkan untuk tahun 2023 capaian pajak BPHTB pemindahan hak adalah sebesar Rp1.429.526.050,50 dari target anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 109,96%. Dibandingkan dengan penerimaan per tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan daerah atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemindahan hak pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp154.581.575,50 atau penurunan sebesar 10,81%. Penurunan penerimaan pajak BPHTB perolehan hak baru pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan penerimaan BPHTB pemindahan

hak pada tahun 2023 antara lain disebabkan oleh minimnya transaksi atas tanah yang menyebabkan menurunnya penerimaan dari sisi BPHTB pemindahan hak. Kondisi ekonomi dan iklim investasi baik perorangan maupun badan usaha/perusahaan juga mempengaruhi minimnya aktifitas transaksi atas tanah khususnya di Kabupaten Belitung Timur.

- 29) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus pemberian hak baru sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.208.293.862,50 dari target anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 75,52%. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.782.408.880,88 dari target anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 126,08%. Dibandingkan dengan penerimaan per tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan daerah atas BPHTB pemberian hak baru mengalami penurunan sebesar Rp2.574.115.018,38 atau penurunan sebesar 68,05%. Penurunan penerimaan BPHTB pemberian hak baru pada tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh minimnya aktifitas pendaftaran hak atas tanah oleh masyarakat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung Timur, disamping itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bidang tanah yang rata-rata berada di bawah nilai pembebasan BPHTB yang diberikan yaitu sebesar Rp80.000.000,00 sehingga memberikan dampak pula pada peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak daerah Kabupaten Belitung Timur atas BPHTB pemberian hak baru tersebut.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi adalah terdiri atas; 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha dan 3) retribusi perizinan tertentu. Dan objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah sedangkan wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan, yang atasnya wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil. retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, dipungut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target dan realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 4
Realisasi Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	4.840.806.405,00	5.070.452.553,00	104,74	2.497.583.940,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.377.887.704,00	2.343.838.773,00	98,57	2.235.021.071,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	324.129.412,00	206.851.675,00	63,82	331.352.047,00
Total		7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04%	5.063.957.058,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Retribusi Jasa Umum		4.840.806.405,00	5.070.452.553,00	104,74	2.497.583.940,00
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	UPT Puskesmas	447.150.063,00	810.762.515,00	181,32	1.239.273.840,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Muhammad Zein	3.195.000.000,00	3.028.369.538,00	94,78	0,00
3	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	805.400.000,00	708.308.000,00	87,94	750.859.000,00
4	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	90.000.000,00	96.532.000,00	107,26	90.755.000,00
5	Pelayanan Pasar - Pelataran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.500.000,00	65.748.500,00	170,78	47.382.000,00
6	Pelayanan Pasar -Los	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000,00	352.296.000,00	140,92	259.612.000,00
7	Pelayanan Pasar -Kios	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00	0,00
8	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	76.667.000,00
9	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.756.342,00	5.436.000,00	42,61	2.832.000,00
10	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	DPMPTSP, DISPERINDAG	0,00	0,00	0,00	30.203.100,00
	Retribusi Jasa Usaha		2.377.887.704,00	2.343.838.773,00	98,57	2.235.021.071,00
12	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKPD	45.500.000,00	30.000.000,00	65,93	324.000,00
13	Retribusi Penyewaan Tanah	Dinas Perikanan, Kec.Simpang Pesak, Kec. Damar	66.407.704,00	62.607.704,00	94,28	63.873.000,00
14	Retribusi Penyewaan Bangunan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55.500.000,00	66.550.000,00	119,91	61.200.000,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
15	Retribusi Pemakaian Laboratorium	DLH	0,00	0,00	0,00	41.041.000,00
16	Retribusi Pemakaian Ruang	Setda, Disperindag, Diskan, Kec. Manggar, Kec. Damar, Kec. Kelapa Kampit, Kec. Gantung, Kec. Simpang Pesak	120.880.000,00	144.918.000,00	119,89	104.393.500,00
17	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	DLH, DPUPRPRKP, Disbudpar, Setda	237.100.000,00	104.925.000,00	44,25	220.650.000,00
18	Retribusi Pemakaian Alat	Disbudpar, Disnaker KUKM, Diskan, Kec. Damar	33.460.000,00	52.320.000,00	156,37	27.845.000,00
19	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	630.000.000,00	586.822.000,00	93,15	629.093.000,00
20	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00
21	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
23	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	160.000.000,00	129.943.000,00	81,21	83.975.000,00
24	Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	Disbudpar, Setda, Kec. Gantung,	46.000.000,00	60.000.000,00	130,43	56.500.000,00
25	Rumah Potong Hewan	Dian Pertanian dan Pangan	9.600.000,00	5.400.000,00	56,25	2.848.000,00
26	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dispora, Disbudpar, Kec. Gantung, Kec.Kelapa Kampit	69.440.000,00	91.073.000,00	131,15	78.206.000,00
27	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan	115.000.000,00	86.771.000,00	75,45	0,00
28	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	DPUPRPRKP, Dinas Perikanan	762.000.000,00	895.509.069,00	117,52	835.427.571,00
	Retribusi Perizinan Tertentu		324.129.412,00	206.851.675,00	63,82	331.352.047,00
29	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPUPRPRKP	229.900.000,00	94.365.835,00	41,05	277.928.047,00
30	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA	Disnaker KUKM	94.229.412,00	112.485.840,00	119,37	53.424.000,00
	Jumlah		7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00

Data tabel di atas menunjukkan, pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp7.621.143.001,00 atau 101,04% dari anggaran sebesar Rp7.542.823.521,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.063.957.058,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.557.185.943,00 atau 50,50%. Retribusi daerah terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan retribusi jasa umum merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. pendapatan retribusi jasa umum tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.840.806.405,00 dan terealisasi sebesar Rp5.070.452.553,00 atau 104,74% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.497.583.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.572.868.613,00 atau naik 103,01%.

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi jasa usaha berhubungan dengan pemakaian aset daerah, tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.343.838.773,00 atau 98,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.377.887.704,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.235.021.071,00 mengalami peningkatan sebesar Rp108.817.702,00 atau 4,87%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp324.129.412,00 dan terealisasi sebesar Rp206.851.675,00 atau 63,82%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp331.352.047,00 mengalami penurunan sebesar Rp124.500.372,00 atau 37,57%.

Rincian target dan realisasi retribusi daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diterima dan dikelola melalui BPKPD Kabupaten Belitung Timur berupa pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah

(Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 5
Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
	JUMLAH	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.820.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.814.815.725,37 atau 99,89%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.523.052.523,00 mengalami penurunan sebesar Rp708.236.797,24 atau 12,82%.

Tabel 5. 6
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah

NO.	URAIAN	JUMLAH
Jenis Saham		Seri A
1	Modal Saham	19.257.000.000,00
2	Agio Saham	8.742.678.000,00
3	Sisa setoran	322.000,00
4	Jumah Setoran Saham (Modal+Agio+Sisa setoran)	28.000.000.000,00
5	Lembar Saham yang dimiliki	19,257
6	Total Lembar saham gabungan	1.167.877,50
7	Persentase kepemilikan	1.70%
8	Dividen yang dibayar untuk tahun buku 2023	4.814.815.725,37
9	Total yang telah dibayar sampai dengan tahun buku 2023	53.381.719.323,69

Untuk penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta yaitu penempatan saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar sejak tahun 2004, dengan dasar penempatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, dan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp4.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Swasta Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar, per 31 Desember 2024

menerima dividen atas tahun buku 2023 sebesar Rp4.814.815.725,37. Pembagian deviden tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Bank Sumsel Babel.

Informasi mengenai setoran modal saham disampaikan kepada Bupati Belitung Timur melalui surat nomor 380/DIR/III/B/2024 perihal Dividen Saham Tahun Buku 2023, yang berisikan setoran saham Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung per *cut off* Desember 2023.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah guna mengakuntansikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun pada tahun 2024 ini OPD yang menghasilkan pendapatan ini antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, RSUD Muhammad Zein, dan 7 UPT Puskesmas. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro Kas Daerah, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah untuk periode tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 7

Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	505.000.000,00	451.683.950,00	89,44	953.462.500,00
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	505.000.000,00	451.683.950,00	89,44	833.737.500,00
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	119.725.000,00
2	Jasa Giro	4.000.000.000,00	2.321.997.231,00	58,05	3.823.148.496,00
	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	2.309.638.597,00	57,74	3.811.233.570,00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	11.914.926,00
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	12.358.634,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	7.853.335,00	0,00	12.071.263,00
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	7.853.335,00	0,00	12.071.263,00
4	Pendapatan Bunga	3.650.000.000,00	2.150.213.419,00	58,91	1.695.876.067,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.650.000.000,00	2.150.213.419,00	58,91	1.695.876.067,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	898.916.461,00	0,00	1.962.507.204,00
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	898.916.461,00	0,00	1.962.507.204,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.300.000.000,00	457.287.944,37	19,88	136.526.860,60
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.300.000.000,00	457.287.944,37	19,88	136.526.860,60
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	61.962.000,00	110.235.661,62	177,91	99.994.295,40
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	1.737.552,58	173,76	2.285.135,76
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.500.000,00	1.593.654,00	106,24	1.832.531,00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	750.000,00	124.228,00	16,56	354.200,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.000.000,00	4.347.670,00	144,92	1.632.130,00
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.036.432,04	207,29	353.945,64
	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	12.000,00	0,00	0,00	635.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.000.000,00	101.396.125,00	184,36	92.901.353,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	18.000.000,00	9.052.130,00	50,29	20.945.900,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	500.000,00	2.004.880,00	400,98	50.750,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	17.500.000,00	7.047.250,00	40,27	20.895.150,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00	86.546.844,00	86,55	2.135.830.410,00
10	Pendapatan BLUD	37.718.214.759,00	35.865.638.683,37	95,09	30.756.734.739,32
	Pendapatan BLUD	37.718.214.759,00	35.865.638.683,37	95,09	30.756.734.739,32
	Jumlah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan anggaran lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp48.353.176.759,00 terealisasi sebesar Rp42.359.425.659,36 atau sebesar 87,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp41.597.097.735,32 mengalami kenaikan sebesar Rp762.327.924,04 atau naik 1,83%. Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, terealisasi sebesar Rp451.683.950,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp451.683.950,00.
- Pendapatan ini berasal dari penjualan peralatan dan mesin sesuai Keputusan Bupati No. HK.00.00-742 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Kendaraan Dinas Operasional akibat Pemindahtanganan dalam Bentuk Penjualan secara Lelang (e-Auction yang Bersifat Open Bidding), tanggal 2 Desember 2024, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin (Lelang)

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
A. KENDARAAN				
1	Lot 2: 1 (satu) unit Mobil Pick Up Ford Ranger Single Cabin/ Beban, BN 8126 XZ, Nomor Rangka MNBBSBE40BW958051, Nomor Mesin WLAT1299849, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.686.500,00
2	Lot 3: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu/ Xenia F601, BN 1159 XZ, Nomor Rangka MHKFMREK35K016985, Nomor Mesin DB20946, BPKB ada, STNK ada	AFRIANTO	JL. BANGAU SAKTI GG CENDRAWASIH, RT/RW 003/004, Kel/Desa SIMPANG BARU, Kecamatan TAMPAN, KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU	36.718.550,00
3	Lot 4: 1 (satu) unit Mobil ISUZU ELF, BN 9008 GZ, Nomor Rangka MHCNH55EY8J0251459, Nomor Mesin M025459, BPKB ada, STNK ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	77.510.000,00
4	Lot 7: 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA/F602RM-GMSFJJ, BN 1131 XZ, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK043008, Nomor Mesin DBV2210, BPKB ada, STNK ada	JANDRA	DUSUN REBO, RT/RW 000/000, Kel/Desa REBO, Kecamatan SUNGAILIAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68.747.360,00
5	Lot 8: 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt 120 SS, BN 1061 XZ, Nomor Rangka	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN	15.232.350,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
	MHMT120SB3R091569, Nomor Mesin 4G17C360328, BPKB ada, STNK ada		KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	
6	Lot 9: 1 (satu) unit Mobil SUZUKI APV DLX, BN 9005 XZ, Nomor Rangka MHYGDN41V7J157938, Nomor Mesin G15AID161977, BPKB ada, STNK ada	ROSSI SATRIA	Dsn. Nibung Punggur RT/RW 004/002 Kel/ Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77.423.220,00
7	Lot 11: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 5097 GZ, Nomor Rangka MH1JB51177K989717, Nomor Mesin JB51E1978841, BPKB ada, STNK ada	Mario Susanto	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 010/005 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	2.041.600,00
8	Lot 14: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, BN 2431 XZ, Nomor Rangka MH34ST1105K953826, Nomor Mesin 4ST-1318729, BPKB ada, STNK ada	HENDY AZWAR	JLN HANDAYANI, RT/RW 005/002, Kel/Desa MEKAR JAYA, Kecamatan MANGGAR, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.401.180,00
9	Lot 15: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 2375 XZ, Nomor Rangka MH1JB51135K345208, Nomor Mesin JB51E-1346909, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.545.300,00
10	Lot 16: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 2473 XZ, Nomor Rangka MH1JB51105K345232, Nomor Mesin JB51E-1346862, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.512.500,00
11	Lot 20: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 2472 XZ, Nomor Rangka MH1JB51175K345258, Nomor Mesin JB51E1346762, BPKB ada, STNK ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	2.337.500,00
12	Lot 22: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 2614 XZ, Nomor Rangka MH31S70027K219356, Nomor Mesin 1S7221538, BPKB ada, STNK ada	HERU GAUTAMA	JL. JENDRAL SUDIRMAN, RT/RW 020/000, Kel/Desa LENGANG, Kecamatan GANTUNG, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.484.000,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
13	Lot 23: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 2594 XZ, Nomor Rangka MH31S70027K219618, Nomor Mesin 1S7219822, BPKB ada, STNK ada	ARYA	Jl. Jendral Sudirman Dalam RT/RW 017/007 Kel/ Desa Lesung Batang KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	2.486.200,00
14	Lot 24: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 5131 GZ, Nomor Rangka MH31S70027K219648, Nomor Mesin 1S7219649, BPKB ada, STNK ada	HERU GAUTAMA	JL. JENDRAL SUDIRMAN, RT/RW 020/000, Kel/Desa LENGGANG, Kecamatan GANTUNG, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.486.000,00
15	Lot 25: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, BN 2001 XZ, Nomor Rangka MH34D72038J157737, Nomor Mesin 4D7-1157778, BPKB ada, STNK ada	PURNAWIASA	JL. BUKIT BETUNG II, RT/RW 011/000, Kel/Desa BUKIT BETUNG, Kecamatan SUNGAILIAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.718.500,00
16	Lot 26: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1S7 Jupiter MX, BN 5128 GZ, Nomor Rangka MH31S70027K219366, Nomor Mesin 1S7 221622, BPKB ada, STNK ada	Mario Susanto	Jl.Gatot Subroto, RT/RW 010/005, Kel/Desa Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.511.000,00
17	Lot 27: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 5224 GZ, Nomor Rangka MH1JB91118K492784, Nomor Mesin JB91E-1492564, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	1.392.790,00
18	Lot 28: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 5207 GZ, Nomor Rangka MH1JB81168K336945, Nomor Mesin JB81E-1333458, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	1.687.710,00
19	Lot 29: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 5036 GZ, Nomor Rangka MH1HB42136K057424, Nomor Mesin HB42E-1043251, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	1.170.150,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
20	Lot 30: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 2321 XZ, Nomor Rangka MH1JB91128K464993, Nomor Mesin JB91E-1464353, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.547.000,00
21	Lot 31: 1 (satu) unit HONDA NF12A1CF M/T, BN 5491 GZ, Nomor Rangka MH1JBG110DK123090, Nomor Mesin JBG1E-1122147, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.958.000,00
22	Lot 32: 1 (satu) unit Suzuki/FK 110 SCD K6 , BN 2556 XZ, Nomor Rangka MH8BE4DFA6J245138, Nomor Mesin E451-ID245373, BPKB ada, STNK ada	Mario Susanto	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 010/005 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	945.700,00
23	Lot 35: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun/FL 125 SD, BN 2308 XZ, Nomor Rangka MH8BF45CA9J-158622, Nomor Mesin F496-ID-290507, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	797.640,00
24	Lot 36: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun/FL 125 SD, BN 2311 XZ, Nomor Rangka MH8BF45CA9J-158639, Nomor Mesin F496-ID-290578, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	797.640,00
25	Lot 37: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun/FL 125 SD, BN 2306 XZ, Nomor Rangka MH8BF45CA9J-159738, Nomor Mesin F496-1D-299408, BPKB ada, STNK tidak ada	Mario Susanto	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 010/005 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	1.219.920,00
26	Lot 38: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/GL 160 D, BN 2697 XZ, Nomor Rangka MH1KC12147K039551, Nomor Mesin KC12E1039825, BPKB ada, STNK ada	MUTIARA WAHYU IRZAH	Jl. Air Kelubi RT/RW 004/002 Kel/ Desa Lesung Batang KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	3.371.000,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
27	Lot 40: 1 (satu) Paket, Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebanyak 5 (lima) unit Terdiri dari : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha YT-115, BN 5105 ZA, Nomor Rangka MNBBSBE40BW958051, Nomor Mesin WLAT1299849, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RD, BN 5051 GZ, Nomor Rangka MH34ST2106K062331, Nomor Mesin 4ST-1420898, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RD, BN 5050 GZ, Nomor Rangka MH1KC11126K021050, Nomor Mesin KC11E1021004, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, BN 5052 TZ, Nomor Rangka MH34ST2106K062303, Nomor Mesin 4ST1420824, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 5138 GZ, Nomor Rangka MH3K70027K219698, Nomor Mesin K7219093, BPKB ada, STNK tidak ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	10.004.670,00
28	Lot 41 : 1 (satu) Paket terdiri dari Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 (satu) unit dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebanyak 2 (Dua) unit Terdiri dari : - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Ford Ranger Single Cabin/ Beban, BN 3002 GZ, Nomor Rangka MJJSD21126K000921, Nomor Mesin J2438126, BPKB ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 5531 GZ, Nomor Rangka MJJSD21126K000921, Nomor Mesin J2438126, BPKB ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2040 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMEJ050735, Nomor Mesin AP162FMJE7097600, BPKB ada, STNK tidak ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	26.145.650,00
29	Lot 42: 1 (satu) Paket, Kendaraan Roda Tiga Sebanyak 5 (Lima) unit terdiri dari: - 1 (satu) Sepeda Motor Roda Tiga Kaisar / Triseda 250 M/T, BN 2845 XE, Nomor Rangka MGDT25MKTJJ400156, Nomor Mesin 167MM-J1223011, BPKB ada, STNK ada. - Sepeda Motor Roda Tiga 8,5 kw/ 9600 rpm,	ANRY JONNY PANDAPOTAN SITORUS	Jl. Jendral Sudirman Inspektur Yazid NO. 6000 RT/RW 036/011 Kel/ Desa Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	7.393.000,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
	BN 2691 XZ, Nomor Rangka MGRVR15TACL201737, Nomor Mesin YX161FMG12201908, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2736 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMC0000556, Nomor Mesin 155FMJC1126353, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2690 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMCJ0000467, Nomor Mesin 155FMJC1126286, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2041 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMEJ050736, Nomor Mesin AP162FMJE7097487, BPKB ada, STNK ada.			
30	Lot 43: 1 (satu) Paket, Kendaraan Roda Tiga Sebanyak 4 (Empat) unit terdiri dari: - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2109 XZ, Nomor Rangka MGC1220TMFJ010298, Nomor Mesin 163ML- 2LE1375751, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2110 XZ, Nomor Rangka MGC1220TMFJ010300, Nomor Mesin 163ML- 2LE1375900, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2111 XZ, Nomor Rangka MGC1220TMFJ010222, Nomor Mesin 163ML- 2LE1375770, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2281 XZ, Nomor Rangka MGDT15MKTJJ001004, Nomor Mesin 162MJJ1222372, BPKB ada, STNK ada.	MOHKAMAD	Jl. K.H Dewantara RT/RW 019/000 Kel/ Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.015.090,00
			JUMLAH	387.287.720,00
B. PERALATAN DAN MESIN				
1	Peralatan dan mesin berupa Refrigerator/Freezer, Portable Generating Set dan Printer (Peralatan Personal Komputer)	AFRIZAL	Jl. Sawah Ladang, RT/RW 002/006, Kel/Desa Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	16.452.000,00
2	scrap Peralatan dan mesin berbagai merk dan jenis	IMAM FIRDAUS	JL. KERIKIL3, RT/RW 072/014, Kel/Desa KEBUNBUNGA, Kecamatan SUKARAMI, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN	47.944.230,00
			JUMLAH	64.396.230,00
			TOTAL KESELURUHAN	451.683.950,00

- (2) Pendapatan Jasa Giro pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.321.997.231,00 atau 57,74%, yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah sebesar Rp2.309.638.597,00 dan pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK Puskesmas sebesar Rp12.358.634,00. Jasa giro pada kas daerah merupakan pendapatan dari jasa giro RKUD dan jasa giro rekening bendahara daerah sebesar Rp1.904.391.618,00 dan penerimaan dari remunerasi dana TDF sebesar Rp405.246.979,00.
- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, terealisasi sebesar Rp7.853.335,00 terdiri dari bunga pendapatan piutang UMKM dan bunga dari piutang petani, yang sebelumnya di catat pada pendapatan dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kemudian di reklas pada akun yang sesuai.
- (4) Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam bentuk deposito di Bank Sumselbabel Cabang Manggar dan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manggar, dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp3.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.150.213.419,00 atau 58,91%.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, merupakan pengembalian atas LHP BPK dan Inspektorat yang terealisasi sebesar Rp898.916.461,00.
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp457.287.944,37 atau 19,88%.
- (7) Pendapatan Denda Pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Denda Pajak terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah, Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan total target pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp61.962.000,00 terealisasi sebesar Rp110.235.661,62 atau 177,91%, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp99.994.295,40 terdapat kenaikan pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp10.241.366,22 atau 10,24%.
- (8) Pendapatan Denda Retribusi didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 46. Pendapatan denda retribusi terealisasi sebesar Rp9.052.130,00 atau 50,29% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000,00. Pendapatan denda retribusi ini berasal dari denda retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

- (9) Pendapatan dari Pengembalian, Tahun 2024 target dari pendapatan pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi Rp86.546.844,00 atau 86,55%, mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.135.830.410,00.
- (10) Pendapatan BLUD tahun 2024 di anggarkan sebesar Rp37.718.214.759,00 dan terealisasi sebesar Rp35.865.638.683,37 atau 95,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp30.756.734.739,32 Pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp5.108.903.944,05 atau 14,24%.

Pendapatan BLUD ini terdiri dari:

- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (berasal dari pendapatan klaim BPJS), dianggarkan sebesar Rp37.257.705.392,00 dan terealisasi sebesar Rp35.382.188.574,00 atau 94,97%,
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00 teralisasi sebesar Rp300.898.313,00 atau 89,82%
- Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp125.509.367,00 dan terealisasi sebesar Rp182.551.796,37 atau 145,45%.

Pendapatan BLUD pada jasa layanan dipisahkan dari retribusi jasa umum pelayanan kesehatan karena pendapatan BLUD ini tidak termasuk dalam tarif yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan pasal 74 yang memuat pengecualian objek dari retribusi pelayanan kesehatan.

5.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Atau penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 9

Realisasi Pendapatan Transfer

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40%	742.046.959.415,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55%	55.478.000.512,00
Jumlah	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17%	797.524.959.927,00

Pendapatan transfer tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp767.784.168.091,00 dan terealisasi sebesar Rp746.071.353.252,00 atau terealisasi sebesar 97,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp797.524.959.927,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.453.606,675,00 atau turun 6,45%. Penurunan ini didapatkan dari turunnya pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer Pemerintah Daerah. Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer untuk periode 2024 dan 2023, yang diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. pada Kabupaten Belitung Timur pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 hanya menerima 3 (tiga) jenis yaitu: dana perimbangan, dana desa, dan dana insentif fiskal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 terealisasi sebesar Rp703.539.971.834,00 atau 98,40% dari anggaran Rp714.980.233.000,00, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp742.046.959.415,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.506.987.581,00 atau turun 5,19%. Rincian realisasi Pemerintah Pusat dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 10
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	DANA PERIMBANGAN	645.154.152.000,00	633.713.890.834,00	98,23%	676.755.216.415,00
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	84.152.033.000,00	84.152.033.000,00	100,00%	155.771.890.842,00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.043.629.000,00	12.043.629.000,00	100,00%	18.238.134.218,00
	DBH PPh Pasal 21	6.331.230.000,00	6.243.260.000,00	98,61%	5.739.953.226,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	231.344.000,00	319.314.000,00	138,03%	196.399.988,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	722.426.000,00	722.426.000,00	100,00%	1.093.689.922,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	558.190.000,00	2.094.248.000,00	375,19%	3.101.304.039,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	52.317.270.000,00	50.781.212.000,00	97,06%	113.576.942.936,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.694.978.000,00	7.694.978.000,00	100,00%	8.721.071.302,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.252.966.000,00	4.252.966.000,00	100,00%	5.104.395.211,00
1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.361.356.000,00	449.044.881.195,00	99,71%	431.104.192.225,00
	DAU	400.207.316.000,00	400.207.316.000,00	100,00%	431.104.192.225,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.864.758.000,00	6.548.283.195,00	83,26%	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	13.883.052.000,00	13.883.052.000,00	100,00%	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.620.618.000,00	7.620.618.000,00	100,00%	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	20.785.612.000,00	20.785.612.000,00	100,00%	0,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.611.208.000,00	25.520.279.483,00	83,37	15.453.308.952,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	647.922.000,00	525.563.040,00	81,12%	327.073.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.822.935.000,00	2.305.497.701,00	81,67%	672.247.900,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.682.129.000,00	2.230.336.544,00	83,16%	2.380.047.052,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	154.756.000,00	153.535.000,00	99,21%	0,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00%	489.110.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.744.989.000,00	4.550.727.450,00	95,91%	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.730.535.000,00	682.056.750,00	24,98%	3.222.198.300,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.556.315.000,00	12.966.609.000,00	95,65%	7.022.918.700,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	380.826.000,00	358.000.000,00	94,01%	710.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	508.214.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00%	121.500.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.890.801.000,00	1.747.953.998,00	60,47%	0,00
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.029.555.000,00	74.996.697.156,00	93,71%	74.425.824.396,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.548.430.000,00	18.538.070.957,00	99,94%	18.929.600.334,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	100,00%	0,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	39.731.950.000,00	38.486.304.000,00	96,86%	37.128.317.550,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	877.565.000,00	877.565.000,00	100,00%	1.044.537.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.170.880.000,00	2.168.960.000,00	99,91%	2.113.020.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	430.920.000,00	419.950.000,00	97,45%	289.580.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.970.587.000,00	8.587.172.445,00	78,27%	8.820.155.539,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.777.903.000,00	1.985.643.960,00	71,48%	2.120.210.150,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.473.160.000,00	1.177.383.539,00	79,92%	1.105.065.528,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	618.006.000,00	512.014.700,00	82,85%	357.682.000,00
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	386.798.866,00	74,38%	266.043.220,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00%	162.575.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00%	1.691.165.065,00
	DAK Non Fisik-PK2UMK	400.154.000,00	346.833.689,00	86,68%	397.873.010,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	26.408.103.000,00
3	Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	100,00%	38.883.640.000,00
4	Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	30.100.485.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40%	742.046.959.415,00

Berikut dijelaskan pendapatan transfer Pemerintah Pusat:

5.1.1.1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2024 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan, terealisasi sebesar Rp633.713.890.834,00 atau 98,23% dari anggaran Rp645.154.152.000,00 menurun sebesar Rp43.041.325.581,00 dari Tahun 2023. Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

5.1.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp84.152.033.000,00 terealisasi sebesar Rp84.152.033.000,00, atau terealisasi 100,00%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp155.771.890.842,00 ada penurunan dana transfer DBH sebesar Rp71.619.857.842,00 atau turun senilai 45.98%.

5.1.1.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp449.044.881.195,00 dari anggaran sebesar Rp450.361.356.000,00 atau terealisasi 99,71%. Dana transfer

umum - DAU mengalami peningkatan sebesar Rp17.940.688.970,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp431.104.192.225,00 atau naik sebesar 4,16%.

5.1.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp30.611.208.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.520.279.483,00 atau 83,37 %, jika dibanding tahun 2023 realisasi Rp15.453.308.952,00 ada kenaikan sebesar Rp10.066.970.531,00 atau naik 65,14%.

5.1.1.1.5 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari anggaran sebesar Rp80.029.555.000,00 terealisasi sebesar Rp74.996.697.156,00 atau terealisasi 93,71%, dibanding tahun 2023 naik sebesar Rp570.872.760,00 atau naik senilai 0,77%.

5.1.1.1.6 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atau perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan. Dana transfer Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2024 tidak ada penyaluran dari Pemerintah Pusat ke daerah.

5.1.1.1.7 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2024 pendapatan dana desa terealisasi 100% yaitu sebesar Rp39.725.596.000,00, dan tahun 2023 terealisasi Rp38.883.640.000,00, jika dibanding tahun 2023 naik sebesar Rp841.956.000,00 atau naik senilai 2,17%.

5.1.1.1.8 Insentif Fiskal

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mendapat insentif fiskal sebesar Rp30.100.485.000,00 dan terealisasi 100%.

5.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dianggarkan sebesar Rp52.803.935.091,00 dan terealisasi sebesar Rp42.531.381.418,00 atau terealisasi 80,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp55.478.000.512,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.946.619.094,00 atau turun senilai 23,34%.

5.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil tahun 2024 terealisasi sebesar Rp42.531.381.418,00 atau 80,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.803.935.091,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp52.921.000.512,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.389.619.094,00 atau turun 19,63%. Pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan bagi hasil pajak. Untuk lebih rinci pendapatan bagi hasil pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 11
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.500.000.000,00	10.066.914.807,00	105,97%	14.335.792.740,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.500.000.000,00	8.719.835.591,00	102,59%	8.681.468.167,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.303.935.091,00	15.144.017.277,00	67,90%	18.213.013.249,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	2.500.000.000,00	1.498.017.763,00	59,92%	2.059.817.476,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.000.000.000,00	7.102.595.980,00	71,03%	9.630.908.880,00
	Jumlah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55%	52.921.000.512,00

Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi pada tahun 2024 belum termasuk bagi hasil untuk triwulan IV tahun 2024. Hal ini dikarenakan bagi hasil triwulan IV baru akan ditransfer setelah Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung tentang besaran bagi hasil triwulan IV diterbitkan pada awal tahun berikutnya.

5.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/602/BAKUDA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/73/bakuda/2024 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, yang semula dianggarkan sebesar Rp3.947.600.000,00 namun dengan adanya perubahan ketetapan Keputusan Gubernur ini, maka anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi menjadi Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terealisasi sebesar Rp2.557.000.000,00.

5.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah diatur sebagai berikut: hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.249.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp482.122.013,00 atau sebesar 38,58%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	8.412.879.414,00
2.1	Lain-lain Pendapatan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	1.152.504.058,00
2.2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	7.260.375.356,00
	Jumlah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58%	8.412.879.414,00

5.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp249.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00, dan pada tahun 2023 realisasi Rp0,00.

5.1.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp482.122.013,00, atau sebesar 48,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Atas Pengembalian Hibah KONI TA 2023	385.546.969,00
2	Pendapatan Atas Pengembalian Hibah DPD KNPI Beltim TA. 2023	35.721.715,00
3	Pengembalian atas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) atas Pekerjaan Hibah Gedung Kantor Pos Perwakilan TNI AU Pangkalan H.A.S Hanandjoeddin TA. 2023	21.732.000,00
4	Pengembalian atas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) atas Pekerjaan Hibah Gedung Baru Lantai Dua Kantor Kejaksaan Negeri Beltim TA. 2023	33.555.000,00
5	Pengembalian atas Laporan Hasil BPK atas Belanja Dana Hibah KNPI Kab. Beltim TA. 2023	5.566.329,00
	Jumlah	482.122.013,00

5.1.4 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau ekuitas dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran. Pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based-budgeting*). Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran 2023 terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 14
Realisasi Belanja

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20
2	Belanja Modal	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
4	Belanja Transfer	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44
	Jumlah	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15	929.775.827.118,94

Dari tabel diatas, realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp926.299.787.597,14 atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp1.005.246.407.786,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp929.775.827.118,94 mengalami penurunan sebesar Rp3.475.439.521,80 atau 0,37%.

5.1.4.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 15
Realisasi Belanja Operasi

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pegawai	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00
2	Belanja Barang dan Jasa	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20
3	Belanja Hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43	23.980.505.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00
	Jumlah	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20

Anggaran Belanja Operasi pada tahun 2024 seperti ditunjukkan pada tabel diatas adalah sebesar Rp777.319.202.331,00 terealisasi sebesar Rp713.272.450.475,00 atau 91,76%. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp681.366.908.279,20 mengalami peningkatan sebesar Rp31.905.542.195,80 atau 4,68%. Belanja Operasi lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akun belanja pegawai ini meliputi gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, gaji dan tunjangan serta penerimaan lainnya DPRD dan KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 16
Realisasi Belanja Pegawai

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	228.767.988.113,00	214.567.769.664,00	93,79	189.178.088.988,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	127.809.819.249,00	119.062.009.067,00	93,16	102.453.897.710,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.314.116.508,00	42.016.206.044,00	97,00	43.362.148.314,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.057.647.000,00	12.772.762.076,00	97,82	12.509.590.195,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	475.277.154,00	343.918.860,00	72,36	422.454.575,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	611.428.788,00	581.600.000,00	95,12	584.800.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	17.203.500.984,00	13.823.868.380,00	80,35	-
	Jumlah	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00

Belanja pegawai tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp431.239.777.796,00 dan terealisasi sebesar Rp403.168.134.091,00 atau sebesar 93,49% jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp54.657.154.309,00 atau 15,68%.

Realisasi belanja pegawai yang terbesar ada di beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Muhammad Zein, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Inspektorat. Realisasi belanja pegawai ini sesuai dengan jumlah dan jabatan pegawai yang ada pada SKPD, sedangkan untuk Sekretariat DPRD juga termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD. Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2024 serta tahun 2023 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 17
Realisasi Belanja Pegawai per OPD

No	Nama OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	162.197.411.535,00	147.692.511.524,00
2	Dinas Kesehatan	75.106.234.325,00	47.601.095.940,00
3	RSUD Muhammad Zein	17.903.708.141,00	33.541.319.324,00
4	Sekretariat DPRD	15.713.396.939,00	15.101.888.667,00
5	Sekretariat Daerah	15.293.023.531,00	13.534.979.791,00
6	Inspektorat	8.906.991.655,00	6.095.434.246,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	8.755.899.616,00	7.960.457.019,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.996.232.941,00	7.874.251.594,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.478.484.990,00	5.651.365.652,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	5.175.855.036,00	3.365.788.848,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.493.975.250,00	3.820.614.546,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.158.311.148,00	4.283.083.639,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.096.397.019,00	731.792.426,00
14	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.059.307.665,00	3.477.499.084,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.026.686.606,00	3.427.616.432,00
16	Dinas Perikanan	3.987.989.963,00	3.544.570.622,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	3.802.051.761,00	3.467.321.249,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.703.172.948,00	3.236.360.931,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.271.756.059,00	3.045.121.852,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.108.429.086,00	495.158.313,00
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.974.183.807,00	2.811.098.926,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.964.059.598,00	2.807.768.813,00
23	Dinas Perhubungan	2.897.743.978,00	2.622.894.513,00
24	UPT Puskesmas Manggar	2.634.340.278,00	131.945.587,00
25	UPT Puskesmas Gantung	2.469.157.701,00	108.514.092,00
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.414.591.248,00	3.804.483.411,00
27	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	2.273.916.658,00	121.291.787,00
28	Kecamatan Kelapa Kampit	2.043.757.705,00	1.953.289.303,00
29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.985.750.401,00	3.678.642.101,00
30	Kecamatan Gantung	1.959.798.976,00	1.836.575.343,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.854.651.464,00	1.225.075.339,00
32	Kecamatan Damar	1.827.559.516,00	1.733.733.007,00
33	UPT Puskesmas Mengkubang	1.784.290.879,00	110.577.227,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.768.339.750,00	1.396.024.022,00
35	Kecamatan Manggar	1.717.025.624,00	1.698.353.856,00
36	Kecamatan Dendang	1.676.366.916,00	1.539.524.185,00
37	Kecamatan Simpang Pesak	1.616.256.068,00	1.387.848.548,00

No	Nama OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023
38	UPT Puskesmas Simpang Pesak	1.483.975.675,00	83.656.769,00
39	Kecamatan Simpang Renggang	1.393.537.606,00	1.360.732.023,00
40	UPT Puskesmas Dendang	1.140.654.817,00	64.951.346,00
41	UPT Puskesmas Renggang	1.052.859.212,00	85.767.885,00
	Total	403.168.134.091,00	348.510.979.782,00

5.1.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp319.524.770.301,00 dan terealisasi sebesar Rp283.694.328.636,00 atau sebesar 88,79% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp24.806.094.861,20 atau 8,04%.

Tabel 5. 18
Belanja Barang Jasa

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	66.835.340.544,00	57.737.470.455,00	86,39	66.449.589.062,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	100.940.000,00	99.315.090,00	98,39	17.349.540,00
3	Belanja Jasa Kantor	90.331.440.953,00	81.058.099.432,00	89,73	96.592.339.304,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.673.826.232,00	20.330.425.024,00	93,80	19.214.521.348,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.817.098.500,00	1.525.371.920,00	83,95	3.452.517.038,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	550.005.000,00	468.895.000,00	85,25	722.171.910,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	65.725.000,00	55.300.000,00	84,14	82.500.000,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	3.206.893.085,00	2.309.781.150,00	72,03	3.050.250.500,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.124.740.000,00	1.012.613.500,00	90,03	670.713.400,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	577.000.000,00	556.431.999,00	96,44	579.736.052,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.972.192.000,00	2.000.346.188,00	67,30	1.640.116.270,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah	307.873.083,00	288.900.430,00	93,84	366.011.467,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.505.000,00	23.416.720,00	69,89	31.670.824,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.716.245.200,00	11.926.281.660,00	86,95	12.502.544.687,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.337.891.000,00	4.136.289.280,00	95,35	4.583.776.463,14
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	275.000.000,00	274.333.700,00	99,76	1.614.156.150,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.421.138.800,00	41.560.049.418,00	84,09	40.222.683.728,96
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.144.275.000,00	4.747.815.000,00	92,29	9.274.295.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	231.400.000,00	222.640.000,00	96,21	31.900.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.342.439.036,00	19.309.174.925,00	99,83	15.924.904.167,10
21	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.543.675.000,00	3.829.110.647,00	84,27	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.916.126.868,00	30.222.267.098,00	91,82	31.476.676.586,00
	Jumlah	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20

Dari belanja barang dan jasa tersebut terdapat belanja barang yang menghasilkan persediaan yaitu belanja barang pakai habis senilai Rp42.426.531.835,00 atau 86,47% dari anggaran sebesar Rp49.063.109.094,00 dan belanja barang tak habis pakai terealisasi sebesar Rp99.315.090,00 atau 89,39% dari anggaran sebesar Rp100.940.000,00 dengan perincian berikut ini:

Tabel 5. 19
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	49.063.109.094,00	42.426.531.835,00
1.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	273.569.500,00	210.702.037,00
1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.144.476.355,00	1.711.482.872,00
1.3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.386.410.000,00	2.107.969.125,00
1.4	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.825.000,00	3.637.500,00
1.5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	360.336.300,00	256.796.340,00
1.6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	48.153.000,00	35.864.000,00
1.7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	257.611.000,00	175.380.553,00
1.8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	246.000.000,00	203.610.000,00
1.9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.790.652.120,00	6.115.936.296,00
1.10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	414.965.000,00	249.834.546,00
1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	33.199.000,00	30.880.000,00
1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.851.000,00	46.768.000,00
1.13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.938.324.800,00	1.592.584.525,00
1.14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.474.801.600,00	1.289.553.800,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.749.131.382,00	4.631.287.635,00
1.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	158.290.000,00	137.960.000,00
1.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.814.010.000,00	1.618.883.895,00
1.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.886.445.820,00	1.581.968.479,00
1.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.860.164.905,00	3.585.680.000,00
1.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	761.134.500,00	728.960.844,00
1.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	564.902.000,00	539.446.960,00
1.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	746.565.000,00	660.227.700,00
1.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.383.891.000,00	1.166.807.000,00
1.24	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.395.307.860,00	1.299.369.756,00
1.25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.451.268.392,00	9.013.526.972,00
1.26	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.621.268.560,00	3.152.118.000,00
1.27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	244.555.000,00	279.295.000,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	100.940.000,00	99.315.090,00
2.1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.870.000,00	8.085.090,00
2.2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	92.070.000,00	91.230.000,00
	Total	49.164.049.094,00	42.525.846.925,00

Untuk Belanja Barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp15.310.938.620,00 tidak dicatat sebagai persediaan karena rekening belanja tersebut tidak terdapat di Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20
Belanja Barang Pakai Habis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.517.500,00	7.218.638.250,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.851.809.000,00	1.631.207.700,00
3	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	105.000.000,00	105.000.000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	300.809.000,00	279.207.700,00
5	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	476.091.000,00	412.015.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	72.642.000,00	52.607.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.092.525.500,00	3.470.930.800,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
8	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.000.000,00	5.800.000,00
9	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	62.500.000,00	58.750.000,00
10	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	155.581.000,00	145.450.000,00
11	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	465.184.500,00	440.933.000,00
12	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	185.945.000,00	181.337.000,00
13	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	85.631.750,00	75.900.000,00
14	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.906.500,00	29.700.000,00
15	Belanja Pakaian Teknik	1.591.000,00	1.580.670,00
16	Belanja Pakaian Adat Daerah	262.206.000,00	247.530.000,00
17	Belanja Pakaian Batik Tradisional	405.921.000,00	377.920.000,00
18	Belanja Pakaian Olahraga	305.370.700,00	294.401.500,00
19	Belanja Pakaian Paskibraka	283.000.000,00	282.030.000,00
	Total	17.772.231.450,00	15.310.938.620,00

Untuk belanja iuran jaminan/asuransi dikelola oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No	OPD	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.988.800,00
2	Dinas Kesehatan	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.749.741.500,00
		Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.518.834.800,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa	785.873.840,00
4	Dinas Pendidikan	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.480.800,00
		Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24.351.000,00
5	Dinas Perhubungan	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	761.904,00
		Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	952.380,00
6	Dinas Perikanan	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.000.000,00
		Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	47.600.000,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000.000,00

No	OPD	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	42.840.000,00
Total			20.330.425.024,00

Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri terealisasi sebesar Rp41.560.049.418,00 atau 84,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.421.138.800,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.337.365.689,04 atau 3,32% dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp40.222.683.728,96. Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 22
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	891.424.710,00	1.076.276.561,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.245.404.566,00	1.078.072.988,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	372.946.080,00	297.453.346,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.263.554.005,00	1.251.734.730,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.272.004.489,00	1.071.975.891,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.215.538.528,00	1.579.940.172,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	625.406.940,00	1.656.574.518,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	349.952.339,00	342.414.176,00
9	Dinas Kesehatan	1.264.564.012,00	2.411.202.137,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	632.594.576,00	921.592.154,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	438.550.134,00	499.660.849,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	641.341.461,00	561.418.530,96
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		81.198.575,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.429.808.082,00	477.653.360,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	686.741.229,00	1.023.168.111,00
16	Dinas Pendidikan	739.406.344,00	806.481.466,00
17	Dinas Perhubungan	743.013.793,00	700.938.502,00
18	Dinas Perikanan	540.710.089,00	630.653.673,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.900.595,00	148.605.597,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	334.239.811,00	291.207.236,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	575.173.645,00	492.384.099,00
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	595.172.533,00	837.551.424,00
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	809.401.495,00	785.062.632,00

No.	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
24	Inspektorat	1.410.676.330,00	1.181.509.953,00
25	Kecamatan Damar	62.574.388,00	62.278.898,00
26	Kecamatan Dendang	156.976.837,00	132.966.763,00
27	Kecamatan Gantung	178.220.980,00	158.512.125,00
28	Kecamatan Kelapa Kampit	97.467.656,00	158.407.618,00
29	Kecamatan Manggar	196.251.566,00	123.407.173,00
30	Kecamatan Simpang Pesak	84.664.468,00	77.884.900,00
31	Kecamatan Simpang Renggang	157.291.299,00	175.290.152,00
32	RSUD Muhammad Zein	72.408.898,00	68.909.575,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	183.190.651,00	147.196.090,00
34	Sekretariat Daerah	3.999.190.769,00	4.598.385.264,00
35	Sekretariat DPRD	17.654.836.435,00	11.811.470.886,00
36	UPT Puskesmas Dendang	24.660.315,00	213.670.382,00
37	UPT Puskesmas Gantung	24.925.119,00	339.806.501,00
38	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	49.957.184,00	366.495.048,00
39	UPT Puskesmas Mengkubang	96.720.000,00	491.664.349,00
40	UPT Puskesmas Renggang	22.198.595,00	314.256.240,00
41	UPT Puskesmas Simpang Pesak	24.988.472,00	305.478.123,00
42	UPT Puskesmas Manggar		471.872.961,00
Total		41.560.049.418,00	40.222.683.728,96

Dari tabel realisasi tersebut diatas, rating 5 realisasi anggaran OPD terbesar terdapat pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 5. 23
Realisasi Perjalanan Dinas Terbesar

No.	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	17.654.836.435,00	11.811.470.886,00
2	Sekretariat Daerah	3.999.190.769,00	4.598.385.264,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.429.808.082,00	477.653.360,00
4	Inspektorat	1.410.676.330,00	1.181.509.953,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.272.004.489,00	1.071.975.891,00
Total		25.766.516.105,00	19.140.995.354,00

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2024 dan 2023 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD

No	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.813.654.294,00	5.139.220.523,00

No	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.752.031.613,00	4.781.216.255,74
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.870.758.191,00	3.931.630.301,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.240.657.125,00	5.805.624.400,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.770.624.404,00	4.615.994.528,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.138.094.566,00	11.056.837.708,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.438.155.288,00	13.763.927.494,40
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.059.444.085,00	2.474.364.625,00
9	Dinas Kesehatan	33.224.726.786,00	37.467.379.935,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.484.433.999,00	5.898.913.602,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.942.956.905,00	7.606.443.674,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.483.115.269,00	15.609.568.148,96
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	995.162.712,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.547.679.793,00	1.413.343.377,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.775.693.299,00	7.028.448.441,00
16	Dinas Pendidikan	34.171.314.342,00	32.789.276.754,10
17	Dinas Perhubungan	8.360.728.157,00	11.777.196.855,00
18	Dinas Perikanan	10.189.182.344,00	5.926.511.577,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.997.451.278,00	1.220.393.231,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.503.362.243,00	1.732.718.785,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	4.770.713.483,00	4.310.352.736,00
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.516.060.294,00	5.957.190.166,00
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.287.674.834,00	3.283.862.326,00
24	Inspektorat	3.136.819.882,00	2.944.585.373,00
25	Kecamatan Damar	1.055.756.588,00	1.133.576.976,00
26	Kecamatan Dendang	1.289.840.887,00	1.465.976.353,00
27	Kecamatan Gantung	1.394.792.959,00	1.463.285.240,00
28	Kecamatan Kelapa Kampit	1.337.356.056,00	1.607.983.745,00
29	Kecamatan Manggar	1.701.407.615,00	1.644.290.581,00
30	Kecamatan Simpang Pesak	1.287.803.668,00	1.477.274.560,00
31	Kecamatan Simpang Renggang	1.326.398.820,00	1.268.801.912,00
32	RSUD Muhammad Zein	33.219.302.559,00	38.966.522.661,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	5.589.678.812,00	4.800.318.343,00
34	Sekretariat Daerah	24.955.325.295,00	26.792.219.279,00
35	Sekretariat DPRD	23.281.292.023,00	17.484.016.234,00
36	UPT Puskesmas Dendang	1.246.334.814,00	1.207.291.732,00
37	UPT Puskesmas Gantung	2.504.942.755,00	1.844.916.717,00
38	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	2.258.574.833,00	2.172.478.027,00
39	UPT Puskesmas Manggar	2.378.605.621,00	2.205.049.348,00
40	UPT Puskesmas Mengkubang	1.869.973.526,00	1.784.495.077,00
41	UPT Puskesmas Renggang	2.144.307.153,00	2.350.072.569,00
42	UPT Puskesmas Simpang Pesak	1.377.902.178,00	1.301.690.615,00
Total		283.694.928.636,00	308.500.423.497,20

5.1.4.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang /barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah tidak wajib tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Belanja Hibah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp25.012.654.234,00 dan terealisasi sebesar Rp24.870.987.748,00 atau sebesar 99,43%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp23.980.505.000,00. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan Rp890.482.748,00 atau 3,71%. Adapun rincian dari belanja hibah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 25
Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	15.492.751.500,00	15.492.751.500,00	13.283.990.000,00
	a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.492.751.500,00	15.492.751.500,00	11.000.000.000,00
	b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			2.283.990.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	8.355.233.000,00	8.264.246.248,00	9.685.210.000,00
	a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	2.200.000.000,00
	b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.490.000.000,00
	c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.985.960.000,00	2.973.070.000,00	1.995.210.000,00
	c. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	519.273.000,00	441.176.248,00	0.00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	154.760.939,00	104.100.000,00	103.340.000,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	964.908.795,00	964.890.000,00	907.965.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	45.000.000,00	45.000.000,00	
	Total	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00

- (1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
- Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
- Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diberikan Berdasarkan:
- Keputusan Bupati Belitung Timur No.188.45-649 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penerima Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024. Pemberian hibah dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaaten Belitung Timur.

- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-69 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, dilaksanakan dalam rangka mendukung pengamanan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, diberikan kepada Kepolisian Resor Belitung Timur dan Komando Distrik Militer 0414/Belitung

- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-689 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Dan Perlengkapan Ruang Operator Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Kepolisian Resor Belitung Timur 2024, dengan rincian:

Tabel 5. 26

Realisasi Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pemberian Hibah Uang Tahap II pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada BAWASLU Belitung Tmur	3.000.000.000,00
2	Pemberian Hibah Uang Tahap II pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada KPU Belitung Timur	8.000.000.000,00
3	Pemberian Hibah Uang pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Kepolisian Resor Belitung Timur	3.500.000.000,00
4	Pemberian Hibah Uang pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komando Distrik Militer 0414/Belitung	800.000.000,00
5	Pemberian Hibah uang untuk pembelian Traffic Law Enforcement Mobile dan perlengkapan ruang operator Traffic Law Enforcement Mobile dan pada Kepolisian Resor Belitung Timur	192.751.500,00
Total		15.492.751.500,00

- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
- a) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Hibah ini dikelola oleh Sekretariat Daerah, dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia secara terstruktur dan berkelanjutan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-17 Tahun 2024 Tentang Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024. Pagu Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.850.000.000,00 terealisasi sebesar 100,00%, dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur	350.000.000,00
2	Lembaga Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Belitung Timur	1.200.000.000,00
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung Timur	300.000.000,00
Total		1.850.000.000,00

- b) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki surat Keterangan Terdaftar

Belanja ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga, dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Prestasi di Kabupaten Belitung Timur. Hibah uang diberikan kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur berdasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: DK.01.02/19/NPHD/III/2024 dan Nomor: 01/NPHD/KONI BELTIM/III/2024, terealisasi 100,00% dari pagu anggaran Rp3.000.000.000,00.

- c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja hibah ini dikelola OPD Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan. Belanja Hibah Uang pada Sekeretariat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-17 Tahun 2024 Tentang Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar 100,00% dari pagu anggaran Rp1.140.000.000,00.

Belanja hibah uang pada Dinas Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan sekolah negeri dan sekolah swasta yang terealisasi sebesar 99,41% atau Rp1.833.070.000,00 dari anggaran Rp1.844.040.000,00. Rincian realisasi hibah uang kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
OPD Sekretariat Daerah		
1	Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia Kabupaten Belitung Timur	60.000.000,00
2	Dewan Mesjid Indonesia Kabupaten Belitung Timur	60.000.000,00
3	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Belitung Timur	80.000.000,00
4	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Belitung Timur	60.000.000,00
5	Yayasan Al Jannatul Wildan Seroja	155.000.000,00
6	Yayasan Daarun Najaah Al Mahmud	160.000.000,00
7	Yayasan Mesjid Agung Darussalam	50.000.000,00
8	Yayasan Mesjid Al-Ihsan Dusun Lalang	160.000.000,00
9	Yayasan Mesjid Baiturraman	160.000.000,00
10	Yayasan Mesjid Simpang Kater	25.000.000,00
11	Yayasan Roudlotus Sahliyyin Al-Mustarsyidin	170.000.000,00
Total		1.140.000.000,00

No.	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
OPD Dinas Pendidikan			
BOP PAUD		1.607.680.000,00	1.607.680.000,00
1	TK KEMALA BHAYANGKARI 05 MANGGAR	53.120.000,00	53.120.000,00
2	TK BAPTIST MANGGAR	14.080.000,00	14.080.000,00
3	TK REGINA PACIS II MANGGAR	4.480.000,00	4.480.000,00
4	TK MELATI 2 MANGGAR	55.040.000,00	55.040.000,00
5	TK ABA II KELAPA KAMPIT	21.120.000,00	21.120.000,00
6	TK Karunia Gantung	8.320.000,00	8.320.000,00
7	TK AISIYIAH GANTUNG	31.360.000,00	31.360.000,00
8	TK MELATI GANTUNG	40.960.000,00	40.960.000,00
9	TK IT AL IHRAM BENTAIAH	10.880.000,00	10.880.000,00
10	TK MUTIARA BUNDA DENDANG	34.560.000,00	34.560.000,00
11	TK KUTILANG	14.080.000,00	14.080.000,00
12	TK MELATI 3 DAMAR	49.920.000,00	49.920.000,00
13	TPA SEROJA	17.280.000,00	17.280.000,00
14	KB RIFQAH	16.000.000,00	16.000.000,00
15	KB MELATI	8.320.000,00	8.320.000,00
16	KB KUTILANG	12.800.000,00	12.800.000,00
17	PAUD ANUGRAH MANGGAR	20.480.000,00	20.480.000,00
18	KB MAWADDAH I	13.440.000,00	13.440.000,00
19	KB BUKU LIMAU	12.800.000,00	12.800.000,00
20	KB SEROJA	87.680.000,00	87.680.000,00
21	KB CERIA	17.280.000,00	17.280.000,00
22	KB PAUD AISIYIAH II	19.840.000,00	19.840.000,00

No.	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
23	KB KASIH IBU	19.840.000,00	19.840.000,00
24	PAUD MATAHARI	15.360.000,00	15.360.000,00
25	KB CAHAYA HATI	31.360.000,00	31.360.000,00
26	KB Alam Telubang Batu	8.960.000,00	8.960.000,00
27	KB PERMATA BUNDA	16.000.000,00	16.000.000,00
28	KB TUNAS JAYA	21.120.000,00	21.120.000,00
29	KB CERDAS TERPADU	2.560.000,00	2.560.000,00
30	POS PAUD LESTARI	17.280.000,00	17.280.000,00
31	POS PAUD KURNIA SEJATI II	12.800.000,00	12.800.000,00
32	POS PAUD MAJU LESTARI	7.680.000,00	7.680.000,00
33	KB MAWAR	21.120.000,00	21.120.000,00
34	KB AL-AMIN	19.840.000,00	19.840.000,00
35	KB BOUGAINVILLEA	21.120.000,00	21.120.000,00
36	KB KEJORA	21.120.000,00	21.120.000,00
37	KB KURNIA SEJATI	16.000.000,00	16.000.000,00
38	PAUD ANUGRAH	17.920.000,00	17.920.000,00
39	PAUD AL-BAROKAH	14.080.000,00	14.080.000,00
40	KB AL BAROKAH	49.280.000,00	49.280.000,00
41	KB ATFALUL IHSAN	16.640.000,00	16.640.000,00
42	KB SAKURA	23.680.000,00	23.680.000,00
43	KB BINA ANANDA	28.800.000,00	28.800.000,00
44	KB KASIH BUNDA	9.600.000,00	9.600.000,00
45	KB TIARA BUNDA	15.360.000,00	15.360.000,00
46	KB BINA TARUNA	18.560.000,00	18.560.000,00
47	KB BINA KELIDANG	22.400.000,00	22.400.000,00
48	KB PERTIWI NUSANTARA	3.840.000,00	3.840.000,00
49	KB BIMA KID S	13.440.000,00	13.440.000,00
50	KB BINA PERTIWI	30.720.000,00	30.720.000,00
51	KB JAYA LESTARI	12.800.000,00	12.800.000,00
52	KB PEMATANG PERMAI	15.360.000,00	15.360.000,00
53	KB NUJAU LESTARI	28.800.000,00	28.800.000,00
54	KB ARWANA	33.280.000,00	33.280.000,00
55	KB PELANGI	26.240.000,00	26.240.000,00
56	KB. CEMPAKA	16.640.000,00	16.640.000,00
57	KB BINA KASIH BUNDA	31.360.000,00	31.360.000,00
58	KB MERANTEH	14.720.000,00	14.720.000,00
59	KB HARAPAN BUNDA	26.880.000,00	26.880.000,00
60	KB BATU PENYU LESTARI	33.920.000,00	33.920.000,00
61	KB MENTARI	33.280.000,00	33.280.000,00
62	KB BINA INSANI	21.760.000,00	21.760.000,00
63	KB MANDIRI	30.720.000,00	30.720.000,00
64	KB MELATI PUTIH	24.320.000,00	24.320.000,00
65	KB AT-TAQWA	26.240.000,00	26.240.000,00
66	KB MUTIARA PERSADA	26.240.000,00	26.240.000,00
67	PAUD MADU CERIA	9.600.000,00	9.600.000,00
68	KB TARUNA MAJU	18.560.000,00	18.560.000,00
69	KB CAHAYA	17.920.000,00	17.920.000,00
70	KB HARAPAN NUSA	9.600.000,00	9.600.000,00
71	KB TUNAS BANGSA	15.360.000,00	15.360.000,00
72	KB KARTIKA	14.720.000,00	14.720.000,00

No.	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
73	KB PERTIWI	22.400.000,00	22.400.000,00
74	KB BINA MUDA	16.640.000,00	16.640.000,00
BOP KESETARAAN		236.360.000,00	225.390.000,00
75	PKBM BINA TARUNA	62.920.000,00	55.710.000,00
76	PKBM TARUNA MAJU	65.230.000,00	61.470.000,00
77	PKBM CEMPAKA	108.210.000,00	108.210.000,00
Total		1.844.040.000,00	1.833.070.000,00

d) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah Barang didasarkan pada proposal yg di ajukan SD Baptist Manggar dan yang kemudian disetujui oleh kementerian dan ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Kerja SD yang tertuang dalam kegiatan DPA dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Realisasi Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	130.629.000,00	101.800.052,00
2	Pengadaan Mebel Sekolah	38.303.000,00	36.977.000,00
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	249.825.000,00	202.399.196,00
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.516.000,00	100.000.000,00
Jumlah		519.273.000,00	441.176.248,00

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas Swasta terealisasi 67,27% atau Rp104.100.000,00 dari pagu anggaran Rp154.760.939,00 dikarenakan ada satuan pendidikan yang terlambat mengajukan proposal untuk belanja hibah daerah. Hibah Uang Dana Bos (Dak Non Fisik) kepada SD Baptis terealisasi sebesar 100,00% atau Rp104.100.000,00 dari Anggaran sebesar Rp104.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 Tentang Penerima Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024. SD Baptist sekolah yang memiliki prestasi diberikan anggaran sebesar Rp22.500.000,00 terealisasi 100,00%
- Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: HK .00.03-591 TAHUN 2024 Tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan

Pendidikan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Tahun anggaran 2024 sebesar Rp81.600.000,00 terealisasi sebesar Rp81.600.000,00 atau 100,00%.

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-660 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-217 Tahun 2024 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai. OPD pengelola hibah bantuan keuangan kepada partai politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terealisasi 100,00% dengan Anggaran sebesar Rp964.908.795,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 30

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Belitung Timur	109.173.750,00	95.100.000,00
2	Partai Politik Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Belitung Timur	76.695.000,00	76.305.000,00
3	Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Belitung Timur	173.021.250,00	163.635.000,00
4	Partai Politik Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Belitung Timur	95.756.250,00	88.605.000,00
5	Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Belitung Timur	75.176.250,00	69.855.000,00
6	Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Belitung Timur	102.813.750,00	105.315.000,00
7	Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Belitung Timur	106.680.000,00	104.985.000,00
8	Partai Politik Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Belitung Timur	64.428.750,00	65.340.000,00
9	Partai Politik DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Belitung Timur	72.592.500,00	73.890.000,00
10	Partai Politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Belitung Timur	64.695.000,00	64.935.000,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Belitung Timur	13.282.500,00	-
12	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belitung Timur	10.575.000,00	-
	Total	964.890.000,00	907.965.000,00

Bantuan Keuangan pada Partai Politik Tahun 2024 diberikan bertahap secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara dengan rincian:

Tabel 5. 31

Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No.	Partai Politik	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap I periode Jan sd Sept)	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap II periode Okt sd Des)	Realisasi (Rp)
1	GOLKAR	9/12x6340x15000 = 71.325.000,00	3/12x10093x15000 = 37.848.750,00	109.173.750,00
2	NASDEM	9/12x5087x15000 = 57.228.750,00	3/12x5191x15000 = 19.466.250,00	76.695.000,00

No.	Partai Politik	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap I periode Jan sd Sept)	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap II periode Okt sd Des)	Realisasi (Rp)
3	PDI P	9/12x10909x15000 = 122.726.250,00	3/12x13412x15000 = 50.295.000,00	173.021.250,00
4	PBB	9/12x5907x15000 = 66.453.750,00	3/12x7814x15000 = 29.302.500,00	95.756.250,00
5	HANURA	9/12x4657x15000 = 52.391.250,00	3/12x6076x15000 = 22.785.000,00	75.176.250,00
6	PKS	9/12x7021x15000 = 78.986.250,00	3/12x6354x15000 = 23.827.500,00	102.813.750,00
7	GERINDRA	9/12x6999x15000 = 78.738.750,00	3/12x7451x15000 = 27.941.250,00	106.680.000,00
8	PAN	9/12x4356x15000 = 49.005.000,00	3/12x4113x15000 = 15.423.750,00	64.428.750,00
9	PERINDO	9/12x4926x15000 = 55.417.500,00	3/12x4580x15000 = 17.175.000,00	72.592.500,00
10	DEMOKRAT	9/12x4329x15000 = 48.701.250,00	3/12x4265x15000 = 15.993.750,00	64.695.000,00
11	PKB		3/12x3542x15000 = 13.282.500,00	13.282.500,00
12	PPP		3/12x2820x15000 = 10.575.000,00	10.575.000,00
	Jumlah	680.973.750,00	283.916.250,00	964.890.000,00

(5) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaran sebesar 100,00% dari anggaran Rp45.000.000,00. Hibah ini diberikan kepada PKBM Bina Taruan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 untuk pendidikan kesetaraan kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

5.1.4.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.542.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.539.000.000,00 atau sebesar 99,81% dan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp375.000.000,00. Rincian belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 32
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggarn	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100,00	160.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	192.000.000,00	189.000.000,00	98,44	215.000.000,00
	Total	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja bantuan sosial kepada individu tahun 2024 berupa uang yang ditujukan untuk peningkatan akses

masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-627 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2024. Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Rp1.350.000.000,00 terealisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33
Bantuan Sosial kepada Individu

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Bantuan Sosial (Rp)
1	Deki Purwansyah	Desa Aik Kelik	30.000.000,00
2	Sarmadi	Dusun air lanci	30.000.000,00
3	Sahidi	Dusun air lanci	30.000.000,00
4	Norlistia	Dsn. Baru Selatan Rt/Rw 018/008 Desa Baru Kec. Manggar	30.000.000,00
5	Rudi	Dusun Baru Utara I Desa Baru	30.000.000,00
6	Asnawi	Dusun Baru Utara I Rt 05/03 Desa Baru	30.000.000,00
7	Haryadi	Dusun Libut Rt 010/04	30.000.000,00
8	Sudirman	Dusun Baru Utara I RT 005/003 Desa Baru	30.000.000,00
9	Buatang	Dusun Baru Utara II Rt 008/004 Desa Baru Manggar	30.000.000,00
10	Selfi	Dusun Baru Utara II RT/RW 007/004 DESA BARU MANGGAR	30.000.000,00
11	Rahma	Dusun Baru Utara 1 RW 001 RT 001	30.000.000,00
12	Diran	Jalan Jendral Sudirman Rt 002/000	30.000.000,00
13	Mahai	Dusun Gunong RT 014/000 Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	30.000.000,00
14	Suratmi	Dusun Ban Motor RT 001, DESA LALANG, MANGGAR	30.000.000,00
15	Wahidun	Dusun Harapan RT 24	30.000.000,00
16	Yangcit	Dusun Teratai RT 12	30.000.000,00
17	Indra Gunawan	Dsn. Langkang Rt/Rw 027/006 Desa Lintang Kec. Simpang Renggiang	30.000.000,00
18	Susina	Dsn Balai Selatan Rt 011/005 Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit	30.000.000,00
19	Harma	Dusun Penirukan	30.000.000,00
20	Yuli Esendi	Dusun Penirukan	30.000.000,00
21	Rahman Yahya	Dusun Penirukan I	30.000.000,00
22	Suparman	Dusun Penirukan I	30.000.000,00
23	Masri	Jalan Pering Dusun Air Sagu	30.000.000,00
24	Armawan	Dusun Aik Sagu	30.000.000,00
25	Saimal	Dsn gajah mada RT 003, RW 002. DESA MEKAR JAYA MANGGAR	30.000.000,00
26	Jusman	Dsn gajah mada rt 005/002	30.000.000,00
27	Baseran	Dusun Mempaya III Rt 12	30.000.000,00
28	Bastiar	Dusun Mempaya III Rt 15	30.000.000,00
29	Samin	Dsn Mempaya III Rt 15	30.000.000,00
30	Burhan	Dusun Mempaya III Rt 13	30.000.000,00
31	Suherman	Dusun Manggarawan Rt.001 Rw.001	30.000.000,00
32	Sugiarto	Dsn Sukamandi RT.001/001	30.000.000,00
33	Erni Susanti	Dusun Sukamandi Rt 001/001	30.000.000,00

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Bantuan Sosial (Rp)
34	Sarinten	Dsn Libut RT.010/04	30.000.000,00
35	Bahima	Dusun Libut Rt 014.06	30.000.000,00
36	Haryadi	Dsn Libut RT.010/04	30.000.000,00
37	Hardianto	Dusun Libut Rt 010/04	30.000.000,00
38	Sarudin	Dsn Libut RT.010/04	30.000.000,00
39	Harjoni	Dusun Garumedang Rt 016/007 Desa Sukamandi	30.000.000,00
40	Husin Tamrin	Dusun Garumedang RT.017/007 Desa Sukamandi	30.000.000,00
41	Suwandi	Dusun Garumedang RT.09/009 Desa Sukamandi	30.000.000,00
42	Surahman	Dusun Sukamandi RT 003/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
43	Hermanto	Dusun Sukamandi RT 001/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
44	Amirudin	Dusun Sukamandi Rt 001/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
45	Syaipul Amsyah	Dusun Sukamandi RT 002/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
TOTAL			1.350.000.000,00

(2) **Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-228 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Veteran/Janda Veteran, Pejuang’45/Janda Pejuang’45 dan Warakawuri Penerima Bantuan Langsung Tunai TA 2024. Belanja bantuan sosial berupa uang yang ditujukan kepada Kelompok Masyarakat di anggarkan sebesar Rp192.000.000,00 dan terealisasi Rp189.000.000 atau sebesar 98,44% Hal ini disebabkan beberapa penerima meninggal dunia dan tidak dapat digantikan. rincian penerima bantuan tesebut sebagai berikut:

Tabel 5. 34

Bantuan Sosial Kepada Veteran/Janda Veteran

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Realisasi (Rp)
1	Ny. Ratna Arsjad Sain	Desa Lalang Kecamatan Manggar	12.000.000,00
2	Suwito	Desa Lalang Kecamatan Manggar	12.000.000,00
3	Ny. Rukinah Japari Sipon	Desa Lalang Kecamatan Manggar	11.000.000,00
4	Ny. Sakdiah Hamim	Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar	12.000.000,00
5	Ny. Hamsyiah	Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	12.000.000,00
6	Ny. Widaini Awi Jasin	Desa Baru Kecamatan Manggar	12.000.000,00
7	Hotman Efendi	Desa Baru Kecamatan Manggar	12.000.000,00
8	Ny. Juairiah Budhi	Desa Padang Kecamatan Manggar	12.000.000,00
9	Ny. Rumhati Syamsan	Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit	12.000.000,00
10	Dower Sugeng	Desa Gantung Kecamatan Gantung	10.000.000,00
11	Moch. Wiki	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
12	Abd. Rasyid	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
13	Ny. Sri Eko Yuliati Idris	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
14	Ny. Utik Aimar Soekarno	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
15	Ny. Salha	Desa Lenggang Kecamatan Gantung	12.000.000,00
16	Asmawi	Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	12.000.000,00
Total			189.000.000,00

5.1.4.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

Tabel 5. 35
Belanja Modal

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38	33.092.550.506,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47	35.617.596.997,30
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42	70.488.019.993,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71	1.754.080.380,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57	0,00
	Jumlah	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30

Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp127.410.219.477,00 dan terealisasi sebesar Rp114.290.547.065,30 atau sebesar 89,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp140.952.247.876,30 mengalami penurunan sebesar Rp26.661.700.811,00 atau 18,91%.

Untuk realisasi belanja modal pada tahun 2024 dan 2023 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 36
Belanja Modal per OPD Tahun 2024

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	122.637.000	120.450.000,00	412.853.500,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.254.000	108.604.000,00	231.598.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	428.328.000	389.505.000,00	494.372.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	258.530.000	215.337.000,00	376.310.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	-	485.397.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.886.193.000,00	767.520.750,00	3.179.599.100,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	184.894.000,00	171.818.000,00	2.297.376.895,21
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.534.000,00	172.775.000,00	260.835.000,00
9	Dinas Kesehatan	3.332.932.497,00	2.933.066.193,00	8.052.237.100,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	495.820.000,00	462.750.500,00	1.231.043.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.144.413.500,00	1.123.547.439,00	2.723.999.495,53
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73.497.236.847,00	67.668.440.869,06	66.138.581.738,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	7.925.000,00

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.509.000,00	68.600.000,00	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	297.639.000,00	295.178.603,00	301.464.300,00
16	Dinas Pendidikan	25.165.535.845,00	23.212.581.004,24	33.115.447.863,56
17	Dinas Perhubungan	4.722.934.988,00	4.695.338.500,00	5.558.702.805,00
18	Dinas Perikanan	1.892.266.000,00	1.683.795.912,00	1.288.289.978,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	659.574.000,00	557.246.000,00	316.250.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.280.000,00	-	264.431.608,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	213.682.000,00	186.646.000,00	410.501.000,00
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	457.655.500,00	447.119.000,00	563.396.200,00
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	429.533.000,00	423.139.500,00	137.371.000,00
24	Inspektorat	513.076.000,00	509.514.000,00	180.335.562,00
25	Kecamatan Damar	85.804.000,00	82.150.000,00	83.468.500,00
26	Kecamatan Dendang	50.646.000,00	38.945.000,00	127.475.000,00
27	Kecamatan Gantung	117.647.000,00	109.432.000,00	66.328.000,00
28	Kecamatan Simpang Renggang	132.132.000,00	130.700.600,00	48.367.960,00
29	Kecamatan Manggar	-	-	119.150.000,00
30	Kecamatan Kelapa Kampit	-	-	67.325.000,00
31	RSUD Muhammad Zein	5.932.745.500,00	4.284.858.555,00	8.644.422.290,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	99.457.000,00	99.100.000,00	36.445.000,00
33	Sekretariat Daerah	1.655.826.000,00	1.488.527.500,00	1.797.064.500,00
34	Sekretariat DPRD	898.512.000,00	815.274.994,00	1.441.090.917,00
35	UPT Puskesmas Dendang	60.912.000,00	16.530.000,00	32.405.000,00
36	UPT Puskesmas Gantung	238.201.000,00	198.281.000,00	-
37	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	105.624.000,00	47.830.000,00	-
38	UPT Puskesmas Manggar	307.217.000,00	287.025.000,00	-
39	UPT Puskesmas Mengkubang	38.631.500,00	38.340.000,00	-
40	UPT Puskesmas Renggang	74.561.000	46.225.000,00	-
41	UPT Puskesmas Simpang Pesak	544.845.300	394.354.146,00	460.387.064,00
	Total	127.410.219.477	114.290.547.065,30	140.952.247.876,30

Rincian belanja modal per jenis pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 37

Realisasi Belanja Modal per Jenis pada SKPD

No	Nama OPD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.450.000,00	-	-	-	-	120.450.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	108.604.000,00	-	-	-	-	108.604.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	389.505.000,00	-	-	-	-	389.505.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	215.337.000,00	-	-	-	-	215.337.000,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	134.462.750,00	633.058.000,00	-	-	-	767.520.750,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	99.638.000,00	72.180.000,00	-	-	-	171.818.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	172.775.000,00	-	-	-	-	172.775.000,00
8	Dinas Kesehatan	1.790.891.740,00	990.479.119,00	151.695.334,00	-	-	2.933.066.193,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	462.750.500,00	-	-	-	-	462.750.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.123.547.439,00	-	-	-	-	1.123.547.439,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	402.289.000,00	-	67.214.651.869,06	-	51.500.000,00	67.668.440.869,06
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68.600.000,00	-	-	-	-	68.600.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.342.000,00	199.836.603,00	-	-	-	295.178.603,00
14	Dinas Pendidikan	5.843.026.912,00	15.786.467.492,24	-	1.583.086.600,00	-	23.212.581.004,24
15	Dinas Perhubungan	2.896.535.500,00	-	1.798.803.000,00	-	-	4.695.338.500,00
16	Dinas Perikanan	572.404.962,00	1.111.390.950,00	-	-	-	1.683.795.912,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	357.876.000,00	199.370.000,00	-	-	-	557.246.000,00

No	Nama OPD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Jumlah
18	Dinas Pertanian dan Pangan	181.146.000,00	5.500.000,00	-	-	-	186.646.000,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	324.575.000,00	122.544.000,00	-	-	-	447.119.000,00
20	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	272.087.000,00	151.052.500,00	-	-	-	423.139.500,00
21	Inspektorat	233.314.000,00	276.200.000,00	-	-	-	509.514.000,00
22	Kecamatan Damar	82.150.000,00	-	-	-	-	82.150.000,00
23	Kecamatan Dendang	38.945.000,00	-	-	-	-	38.945.000,00
24	Kecamatan Gantung	109.432.000,00	-	-	-	-	109.432.000,00
25	Kecamatan Simpang Renggang	15.270.000,00	115.430.600,00	-	-	-	130.700.600,00
26	RSUD Muhammad Zein	2.590.443.455,00	1.496.675.100,00	197.740.000,00	-	-	4.284.858.555,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	99.100.000,00	-	-	-	-	99.100.000,00
28	Sekretariat Daerah	1.488.527.500,00	-	-	-	-	1.488.527.500,00
29	Sekretariat DPRD	649.448.016,00	165.826.978,00	-	-	-	815.274.994,00
30	UPT Puskesmas Dendang	16.530.000,00	-	-	-	-	16.530.000,00
31	UPT Puskesmas Gantung	198.281.000,00	-	-	-	-	198.281.000,00
32	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	47.830.000,00	-	-	-	-	47.830.000,00
33	UPT Puskesmas Manggar	287.025.000,00	-	-	-	-	287.025.000,00
34	UPT Puskesmas Mengkubang	38.340.000,00	-	-	-	-	38.340.000,00
35	UPT Puskesmas Renggang	46.225.000,00	-	-	-	-	46.225.000,00
36	UPT Puskesmas Simpang Pesak	65.098.000,00	299.480.285,00	29.775.861,00	-	-	394.354.146,00
	Total	21.637.802.774,00	21.625.491.627,24	69.392.666.064,06	1.583.086.600,00	51.500.000,00	114.290.547.065,30

Adapun rincian dari belanja modal sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38
Belanja Modal Pompa	20.630.000,00	20.550.000,00	99,61
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	58.507.000,00	56.840.000,00	97,15
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	105.000.000,00	91.602.750,00	87,24
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	991.680.000,00	847.000.000,00	85,41
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.436.504.000,00	1.434.800.000,00	99,88
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	232.804.000,00	168.000.000,00	72,16
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.676.000,00	28.490.000,00	92,87
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	359.040.000,00	358.000.000,00	99,71
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.258.400.000,00	1.230.000.000,00	97,74
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.398.000,00	7.389.000,00	99,88
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	388.500.000,00	379.000.000,00	97,55
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	143.040.500,00	141.000.000,00	98,57
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	31.236.000,00	19.000.000,00	60,83
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.903.000,00	7.881.000,00	99,72
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	362.000,00	358.000,00	98,90
Belanja Modal Alat Ukur Universal	9.788.000,00	9.175.000,00	93,74
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.563.000,00	2.100.000,00	21,96
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	142.685.000,00	120.706.000,00	84,60
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	200.000.000,00	198.500.000,00	99,25
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	80.000.000,00	79.235.000,00	99,04
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	36.057.000,00	33.206.000,00	92,09
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	358.226.500,00	345.405.000,00	96,42
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	370.114.910,00	336.127.640,00	90,82
Belanja Modal Mebel	1.872.647.000,00	1.778.281.016,00	94,96
Belanja Modal Alat Pembersih	30.311.000,00	23.722.000,00	78,26
Belanja Modal Alat Pendingin	547.943.000,00	512.650.000,00	93,56
Belanja Modal Alat Dapur	29.067.000,00	26.795.000,00	92,18
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	450.631.000,00	437.887.000,00	97,17
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.896.000,00	4.650.000,00	94,98
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	13.982.500,00	12.450.000,00	89,04
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	162.108.000,00	157.342.000,00	97,06
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	49.031.000,00	38.130.000,00	77,77
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	275.081.500,00	253.352.842,00	92,10
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	24.402.000,00	18.360.000,00	75,24
Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	29.785.000,00	23.250.000,00	78,06
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	434.678.090,00	433.226.120,00	99,67
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	855.531.500,00	448.693.000,00	52,45
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	507.133.825,00	419.816.985,00	82,78
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	307.687.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	673.326.638,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	99.301.037,00	74.772.273,00	75,30
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	272.558.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	170.775.000,00	158.530.890,00	92,83
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	6.609.500,00	6.500.000,00	98,34
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	16.373.000,00	14.400.000,00	87,95
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	239.625.000,00	230.650.000,00	96,25
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	404.639.500,00	393.600.000,00	97,27
Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	179.234.000,00	173.230.439,00	96,65
Belanja Modal Personal Computer	3.218.512.500,00	2.949.854.000,00	91,65

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	615.184.500,00	573.975.000,00	93,30
Belanja Modal Peralatan Jaringan	320.324.500,00	312.800.500,00	97,65
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	53.434.500,00	38.382.500,00	71,83
Belanja Modal Sumur Pemboran	38.500.000,00	37.972.000,00	98,63
Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	47.508.000,00	7.559.100,00	15,91
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	69.146.000,00	56.450.000,00	81,64
Belanja Modal Alat Penolong	31.850.000,00	31.500.000,00	98,90
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	211.432.000,00	209.965.000,00	99,31
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	800.427.000,00	790.872.000,00	98,81
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	354.557.000,00	352.438.500,00	99,40
Belanja Modal Peralatan Senam	3.560.000,00	3.510.000,00	98,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.519.557.705,00	2.517.072.022,00	99,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.544.568.300,00	2.200.797.197,00	86,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.132.404.000,00	1.041.848.281,00	92,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	199.700.000,00	198.628.000,00	99,46
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	949.175.000,00	801.301.609,38	84,42
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.813.500.000,00	1.768.250.439,59	97,50
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	752.800.000,00	179.294.000,00	23,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.682.087.940,00	10.998.819.482,56	86,73
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	787.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.869.278.000,00	1.832.806.950,30	98,05
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	365.610.000,00	310.306.400,00	84,87
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	584.500.000,00	496.242.900,00	84,90
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.080.597.000,00	629.058.000,00	58,21
Belanja Modal Bangunan Parkir	621.833.000,00	509.721.475,41	81,97
Belanja Modal Taman	46.130.000,00	45.908.000,00	99,52
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Modal Tugu	202.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pagar	2.621.415.000,00	2.613.621.089,00	99,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	199.000.000,00	197.685.000,00	99,34
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42
Belanja Modal Jalan Kabupaten	38.752.423.356,00	37.271.554.000,00	96,18
Belanja Modal Jalan Lainnya	5.245.660.850,00	4.907.125.000,00	93,55
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.633.721.360,00	3.435.640.250,00	74,14
Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	2.399.318.092,00	2.043.960.100,00	85,19
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	5.316.416.213,00	4.213.784.600,00	79,26
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30.000.000,00	29.775.861,00	99,25
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.270.045.529,00	998.078.000,00	78,59
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	13.177.906.799,00	12.863.657.468,47	97,62
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	195.250.000,00	194.425.200,00	99,58
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.761.339.145,00	1.138.827.734,59	64,66
Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.900.527.488,00	1.898.934.850,00	99,92
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	199.498.000,00	199.163.000,00	99,83
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	199.000.000,00	197.740.000,00	99,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	10.280.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Kartografi	2.454.000,00	2.200.000,00	89,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.591.093.700,00	1.580.886.600,00	99,36
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57
JUMLAH BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70

5.1.4.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan terhadap gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

5.1.4.3.1 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2024 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp559.132.832,00 atau sebesar 55,91%, jika dibanding dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp67.946.371,00 atau 10,84%. Anggaran dan realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 38
Belanja tidak terduga

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
	Total	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00

Belanja tidak terduga ini digunakan untuk pembayaran bantuan sosial yang tidak direncanakan (bantuan berobat bagi masyarakat) berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-342 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024.

5.1.4.4 BELANJA TRANSFER

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk transfer. Transfer/ Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum/ khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada parpol.

Belanja Transfer pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp99.516.985.978,00 dan terealisasi sebesar Rp98.177.657.224,84 atau sebesar 98,65%. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 39
Belanja Transfer

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bagi Hasil	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	78,88	5.511.251.457,44
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.847.791.380,00	4.582.381.939,39	78,36	5.016.180.284,17
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	492.259.698,00	418.663.690,45	85,05	495.071.173,27

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
2	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	99,99	101.318.340.303,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	100,00	61.962.933.203,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	53.451.338.900,00	53.451.015.595,00	99,99	38.883.640.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	471.767.100,00
	Jumlah	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44

5.1.4.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil merupakan bagi hasil kepada Pemerintah Desa terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang disalurkan kepada desa pertriwulan berdasarkan:

- Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45-109 Tahun 2024 Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan IV (Periode Bulan Oktober – Desember 2023)
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-320 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan I (Periode Januari-Maret 2024)
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-590 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan II (Periode April-Juni 2024)
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-685 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan III (Periode Juli-September 2024).

Tahun 2024 Belanja Transfer Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp5.001.045.629,84 atau 78,88%, dari anggaran sebesar Rp6.340.051.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp510.205.827,60 atau 9,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.511.251.457,44.

Tabel 5. 40

Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2024		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
1	Desa Buku Limau	24.774.896,00	8.827.761,00	33.602.657,00	27.486.802,00	6.871.044,19	34.357.846,19
2	Desa Baru	267.892.261,00	20.000.000,00	287.892.261,00	92.361.053,32	32.641.484,10	125.002.537,42

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2024		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
3	Desa Kurnia Jaya	34.044.260,00	15.187.066,00	49.231.326,00	53.761.678,95	11.865.672,75	65.627.351,70
4	Desa Lalang	25.000.000,00	12.106.279,00	37.106.279,00	52.047.513,30	9.301.038,35	61.348.551,65
5	Desa Lalang Jaya	36.108.834,00	12.201.956,00	48.310.790,00	66.865.048,67	8.514.007,00	75.379.055,67
6	Desa Padang	328.691.821,00	39.744.060,00	368.435.881,00	110.599.628,23	41.032.177,80	151.631.806,03
7	Desa Kelubi	27.527.662,00	10.128.963,00	37.656.625,00	33.074.071,90	7.826.311,99	40.900.383,89
8	Desa Mekar Jaya	40.603.302,00	11.678.924,00	52.282.226,00	59.373.253,40	9.229.555,73	68.602.809,13
9	Desa Bentaian Jaya	38.538.727,00	9.523.011,00	48.061.738,00	31.881.200,95	7.301.584,42	39.182.785,37
10	Desa Air Kelik	28.215.854,00	9.995.015,00	38.210.869,00	296.394.805,14	7.692.452,72	304.087.257,86
11	Desa Mempaya	27.527.662,00	9.274.252,00	36.801.914,00	29.882.279,50	7.961.802,62	37.844.082,12
12	Desa Burong Mandi	26.151.279,00	9.344.415,00	35.495.694,00	30.655.133,45	7.370.393,80	38.025.527,25
13	Desa Mengkubang	50.926.175,00	13.860.350,00	64.786.525,00	74.028.766,50	9.232.964,63	83.261.731,13
14	Desa Sukamandi	310.850.359,00	16.941.137,00	327.791.496,00	72.803.865,71	12.287.382,03	85.091.247,74
15	Desa Mayang	52.302.558,00	9.969.502,00	62.272.060,00	38.284.318,01	7.639.036,58	45.923.354,59
16	Desa Senyubuk	35.785.961,00	14.007.054,00	49.793.015,00	42.502.796,06	11.093.142,69	53.595.938,75
17	Desa Pembaharuan	44.732.451,00	21.476.207,00	66.208.658,00	52.285.727,81	18.223.308,73	70.509.036,54
18	Desa Mentawak	32.345.003,00	11.015.566,00	43.360.569,00	29.384.183,61	9.119.693,60	38.503.877,21
19	Desa Cendil	42.667.877,00	10.364.965,00	53.032.842,00	30.004.004,81	7.604.943,93	37.608.948,74
20	Desa Buding	28.215.854,00	11.213.298,00	39.429.152,00	32.626.729,15	8.620.622,41	41.247.351,56
21	Desa Simpang Tiga	26.839.471,00	10.358.587,00	37.198.058,00	30.950.628,21	8.013.964,23	38.964.592,44
22	Desa Renggang	33.721.386,00	10.824.213,00	44.545.599,00	36.856.916,51	7.836.789,54	44.693.706,05
23	Desa Aik Madu	33.721.386,00	9.255.116,00	42.976.502,00	29.380.801,51	7.197.307,32	36.578.108,83
24	Desa Lintang	28.215.854,00	10.135.341,00	38.351.195,00	32.081.872,46	7.696.133,43	39.778.005,89
25	Desa Selinsing	57.808.091,00	13.407.481,00	71.215.572,00	62.134.989,70	12.298.806,56	74.433.796,26
26	Desa Gantung	70.883.730,00	11.704.437,00	82.588.167,00	45.163.543,95	9.440.098,37	54.603.642,32
27	Desa Jangkar Asam	121.809.906,00	9.886.582,00	131.696.488,00	119.983.430,41	7.822.867,99	127.806.298,40
28	Desa Lilangan	647.851.998,00	10.282.045,00	658.134.043,00	510.031.843,46	7.852.738,20	517.884.581,66
29	Desa Lenggang	139.014.695,00	25.335.164,00	164.349.859,00	57.800.794,95	24.553.467,49	82.354.262,44
30	Desa Limbongan	1.300.003.277,00	10.345.830,00	1.310.349.107,00	1.294.533.177,96	7.924.248,34	1.302.457.426,30
31	Desa Batu Penyu	39.915.110,00	10.307.559,00	50.222.669,00	116.451.108,65	9.729.072,14	126.180.180,79
32	Desa Simpang Pesak	765.344.007,00	11.717.194,00	777.061.201,00	100.750.509,08	10.429.886,84	111.180.395,92
33	Desa Tanjung Batu Itam	350.243.428,00	10.498.912,00	360.742.340,00	176.660.847,41	8.394.266,03	185.055.113,44
34	Desa Tanjung Kelumpang	330.230.372,00	10.141.720,00	340.372.092,00	173.126.771,81	9.475.923,36	182.602.695,17
35	Desa Dukong	278.852.350,00	9.133.926,00	287.986.276,00	414.927.527,31	7.469.503,62	422.397.030,93
36	Desa Dendang	32.345.003,00	9.873.825,00	42.218.828,00	33.486.820,21	7.503.311,74	40.990.131,95

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2024		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
37	Desa Jangkang	25.463.088,00	10.939.025,00	36.402.113,00	29.413.764,31	7.933.346,96	37.347.111,27
38	Desa Nyuruk	36.474.153,00	10.862.481,00	47.336.634,00	31.380.608,21	8.118.573,64	39.499.181,85
39	Desa Balok	26.151.279,00	10.390.479,00	36.541.758,00	30.963.122,81	7.544.764,58	38.507.887,39
	Total	5.847.791.380,00	492.259.698,00	6.340.051.078,00	4.582.381.939,39	418.663.690,45	5.001.045.629,84

5.1.4.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp93.176.611.595,00 atau 99,99% dari pagu anggaran Rp93.176.934.900,00 jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp101.318.340.303,00 mengalami penurunan 8,04% atau Rp8.141.728.708,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 terdiri dari Belanja Dana Desa dan Belanja Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Dana Desa

Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaan 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024. Dana Desa. Tahun 2024 dianggarkan Rp39.725.596.000,00 terealisasi 100,00% dibanding dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp61.962.933.203,00 mengalami penurunan 38,89% atau Rp22.237.337.203,00. Anggaran dan realisasi Dana Desa tahun 2024 dapt dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 41
Rincian Belanja Dana Desa

No	Nama Kecamatan/ Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	9.556.209.000,00	9.556.209.000,00
1	PEMERINTAH DESA LALANG JAYA	812.563.000,00	812.563.000,00
2	PEMERINTAH DESA KURNIA JAYA	1.027.750.000,00	1.027.750.000,00
3	PEMERINTAH DESA PADANG	1.368.877.000,00	1.368.877.000,00
4	PEMERINTAH DESA KELUBI	1.045.289.000,00	1.045.289.000,00
5	PEMERINTAH DESA LALANG	973.081.000,00	973.081.000,00
6	PEMERINTAH DESA BARU	1.643.803.000,00	1.643.803.000,00
7	PEMERINTAH DESA BUKU LIMAU	717.900.000,00	717.900.000,00
8	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.143.223.000,00	1.143.223.000,00
9	PEMERINTAH DESA BENTAIAN JAYA	823.723.000,00	823.723.000,00
	KECAMATAN GANTUNG	7.990.180.000,00	7.990.180.000,00
10	PEMERINTAH DESA GANTUNG	1.297.713.000,00	1.297.713.000,00
11	PEMERINTAH DESA SELINGSING	1.182.022.000,00	1.182.022.000,00
12	PEMERINTAH DESA JANGKAR ASAM	889.008.000,00	889.008.000,00
13	PEMERINTAH DESA LILANGAN	1.406.465.000,00	1.406.465.000,00

No	Nama Kecamatan/ Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
14	PEMERINTAH DESA LENGGANG	1.067.889.000,00	1.067.889.000,00
15	PEMERINTAH DESA BATU PENYU	1.091.774.000,00	1.091.774.000,00
16	PEMERINTAH DESA LIMBONGAN	1.055.309.000,00	1.055.309.000,00
	KECAMATAN DENDANG	3.844.854.000,00	3.844.854.000,00
17	PEMERINTAH DESA DENDANG	846.430.000,00	846.430.000,00
18	PEMERINTAH DESA JANGKANG	940.256.000,00	940.256.000,00
19	PEMERINTAH DESA NYURUK	1.116.351.000,00	1.116.351.000,00
20	PEMERINTAH DESA BALOK	941.817.000,00	941.817.000,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	6.156.579.000,00	6.156.579.000,00
21	PEMERINTAH DESA MENTAWAK	1.204.274.000,00	1.204.274.000,00
22	PEMERINTAH DESA SENYUBUK	1.034.250.000,00	1.034.250.000,00
23	PEMERINTAH DESA CENDIL	794.953.000,00	794.953.000,00
24	PEMERINTAH DESA BUDING	1.015.388.000,00	1.015.388.000,00
25	PEMERINTAH DESA MAYANG	1.237.088.000,00	1.237.088.000,00
26	PEMERINTAH DESA PEMBAHARUAN	870.626.000,00	870.626.000,00
	KECAMATAN DAMAR	4.919.680.000,00	4.919.680.000,00
27	PEMERINTAH DESA AIR KELIK	999.670.000,00	999.670.000,00
28	PEMERINTAH DESA MEMPAYA	909.593.000,00	909.593.000,00
29	PEMERINTAH DESA BURONG MANDI	779.255.000,00	779.255.000,00
30	PEMERINTAH DESA JANGKAR ASAM	1.080.462.000,00	1.080.462.000,00
31	PEMERINTAH DESA SUKAMANDI	1.150.700.000,00	1.150.700.000,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	3.699.090.000,00	3.699.090.000,00
32	PEMERINTAH DESA SIMPANG TIGA	1.068.922.000,00	1.068.922.000,00
33	PEMERINTAH DESA RENGGIANG	863.773.000,00	863.773.000,00
34	PEMERINTAH DESA AIK MADU	763.288.000,00	763.288.000,00
35	PEMERINTAH DESA LINTANG	1.003.107.000,00	1.003.107.000,00
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	3.559.004.000,00	3.559.004.000,00
36	PEMERINTAH DESA SIMPANG PESAK	929.340.000,00	929.340.000,00
37	PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM	1.037.306.000,00	1.037.306.000,00
38	PEMERINTAH DESA TANJUNG KELUMPANG	816.861.000,00	816.861.000,00
39	PEMERINTAH DESA DUKONG	775.497.000,00	775.497.000,00
Total		39.725.596.000,00	39.725.596.000,00

- Belanja Alokasi Dana Desa
- Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Belitung

Timur Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2023

Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur

Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja alokasi dana desa sebesar Rp53.451.015.595,00 atau 100,00% dari pagu anggaran Rp53.451.338.900,00 mengalami kenaikan 37,46% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp38.883.640.000,00. Rinciaan anggaran dan belanja alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 42
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	12.906.898.165,00	12.907.263.580,00
1	PEMERINTAH DESA LALANG JAYA	1.372.637.814,00	1.373.038.214,00
2	PEMERINTAH DESA KURNIA JAYA	1.469.017.952,00	1.468.982.967,00
3	PEMERINTAH DESA PADANG	1.699.595.134,00	1.699.631.534,00
4	PEMERINTAH DESA KELUBI	1.312.827.273,00	1.312.827.273,00
5	PEMERINTAH DESA LALANG	1.472.748.519,00	1.472.712.119,00
6	PEMERINTAH DESA BARU	1.871.926.666,00	1.871.926.666,00
7	PEMERINTAH DESA BUKU LIMAU	1.193.779.414,00	1.193.779.414,00
8	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.271.862.051,00	1.271.862.051,00
9	PEMERINTAH DESA BENTAIAAN JAYA	1.242.503.342,00	1.242.503.342,00
	KECAMATAN GANTUNG	10.003.921.184,00	10.003.194.599,00
10	PEMERINTAH DESA GANTUNG	1.588.819.199,00	1.588.819.199,00
11	PEMERINTAH DESA SELINGSING	1.575.193.059,00	1.575.193.059,00
12	PEMERINTAH DESA JANGKAR ASAM	1.238.011.067,00	1.237.319.467,00
13	PEMERINTAH DESA LILANGAN	1.403.673.391,00	1.403.673.391,00
14	PEMERINTAH DESA LENGGANG	1.441.290.411,00	1.441.290.411,00
15	PEMERINTAH DESA BATU PENYU	1.469.712.306,00	1.469.677.321,00
16	PEMERINTAH DESA LIMBONGAN	1.287.221.751,00	1.287.221.751,00
	KECAMATAN DENDANG	5.336.292.329,00	5.336.219.529,00
17	PEMERINTAH DESA DENDANG	1.241.669.414,00	1.241.596.614,00
18	PEMERINTAH DESA JANGKANG	1.428.995.085,00	1.428.995.085,00
19	PEMERINTAH DESA NYURUK	1.364.147.918,00	1.364.147.918,00
20	PEMERINTAH DESA BALOK	1.301.479.912,00	1.301.479.912,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	8.413.139.952,00	8.413.176.352,00
21	PEMERINTAH DESA MENTAWAK	1.520.102.912,00	1.520.102.912,00
22	PEMERINTAH DESA SENYUBUK	1.543.908.978,00	1.543.908.978,00
23	PEMERINTAH DESA CENDIL	1.195.928.736,00	1.195.928.736,00

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
24	PEMERINTAH DESA BUDING	1.493.253.874,00	1.493.326.674,00
25	PEMERINTAH DESA MAYANG	1.387.265.697,00	1.387.229.297,00
26	PEMERINTAH DESA PEMBAHARUAN	1.272.679.755,00	1.272.679.755,00
	KECAMATAN DAMAR	6.565.160.730,00	6.565.233.530,00
27	PEMERINTAH DESA AIR KELIK	1.229.885.769,00	1.229.885.769,00
28	PEMERINTAH DESA MEMPAYA	1.261.165.294,00	1.261.238.094,00
29	PEMERINTAH DESA BURONG MANDI	1.210.256.441,00	1.210.256.441,00
30	PEMERINTAH DESA MENGKUBANG	1.446.785.987,00	1.446.785.987,00
31	PEMERINTAH DESA SUKAMANDI	1.417.067.239,00	1.417.067.239,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	5.029.925.532,00	5.029.890.597,00
32	PEMERINTAH DESA SIMPANG TIGA	1.266.460.684,00	1.266.460.684,00
33	PEMERINTAH DESA RENGGIANG	1.232.817.372,00	1.232.817.372,00
34	PEMERINTAH DESA AIK MADU	1.168.861.636,00	1.168.826.701,00
35	PEMERINTAH DESA LINTANG	1.361.785.840,00	1.361.785.840,00
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	5.196.001.008,00	5.196.037.408,00
36	PEMERINTAH DESA SIMPANG PESAK	1.460.768.184,00	1.460.768.184,00
37	PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM	1.245.256.481,00	1.245.292.881,00
38	PEMERINTAH DESA TANJUNG KELUMPANG	1.298.704.772,00	1.298.704.772,00
39	PEMERINTAH DESA DUKONG	1.191.271.571,00	1.191.271.571,00
Total		53.451.338.900,00	53.451.015.595,00

SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp846.356.884.184,23 dan belanja daerah sebesar Rp926.299.787.597,14 dihasilkan defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan sebesar Rp79.942.903.412,91.

5.1.5 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.5.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Adapun anggaran/realisasi tahun anggaran 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 43
Penerimaan Pembiayaan

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
1	Penggunaan SiLPA	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	100,00	153.535.018.028,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	104.400.745,00	20,88	145.911.430,00
	Jumlah	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	99,71	153.680.929.458,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp137.355.387.470,00, terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp137.250.986.725,00 dan Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp104.400.745,00 yang merupakan penerimaan kembali pemberian pembiayaan perkuatan permodalan bagi KUKM sebesar Rp103.706.300,00 dan dari pinjaman petani sebesar Rp694.445,00.

5.1.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Adapun tabel penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 44
Rincian Penggunaan SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	8.021.217.747,00	8.021.217.747,00
	Pajak Daerah	4.599.166.951,00	4.599.166.951,00
	Retribusi Daerah	146.098.571,00	146.098.571,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	3.275.952.225,00	3.275.952.225,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.019.421.139,00	15.019.421.139,00
	Transfer Pemerintah Pusat	10.113.557.300,00	10.113.557.300,00
	Transfer antar Daerah	4.905.863.839,00	4.905.863.839,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	152.504.058,00	152.504.058,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	152.504.058,00	152.504.058,00
4	Penghematan Belanja	102.166.440.464,00	102.166.440.464,00
	Belanja Operasi	71.664.067.342,00	71.664.067.342,00
	Belanja Modal	13.340.752.144,00	13.340.752.144,00
	Belanja Tidak Terduga	15.491.757.642,00	15.491.757.642,00
	Belanja Transfer	1.669.863.336,00	1.669.863.336,00
6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00
	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00
7	Sisa Belanja Lainnya	11.391.403.317,00	11.391.403.317,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	11.340.085.343,00	11.340.085.343,00
	Sisa Dana BOS	51.317.974,00	51.317.974,00
	TOTAL	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00

5.1.5.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.400.745,00, dengan rincian seperti dibawah ini:

Tabel 5. 45
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan kembali pinjaman daerah	104.400.745,00	145.911.430,00
	Jumlah	104.400.745,00	145.911.430,00

5.1.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 merupakan penyertaan modal.

5.1.5.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 merupakan penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 46
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	137.250.986.724,87	153.535.018.028,00
2	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	137.250.986.725,00	153.535.018.028,00
3	Jumlah (1-2)	(0,13)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87
5	Jumlah (3+4)	53.412.484.056,96	137.250.986.724,87
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	53.412.484.056,96	137.250.986.724,87

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal pada tahun 2024 sebesar Rp137.250.986.724,87 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp153.535.018.028,00 terjadi penurunan sebesar Rp16.284.031.303,13 atau 10,61%.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 penggunaan SAL sebesar Rp137.250.986.725,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp153.535.018.028,00 terjadi penurunan sebesar Rp16.284.031.303,13.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2024 sebesar Rp53.412.484.056,96 atau turun sebesar Rp83.838.502.667,91 dari tahun 2023.

- Surplus/Defisit –LRA
Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/(Defisit) LRA tahun 2024 sebesar (Rp79.942.903.412,91).
- Pembiayaan Neto
Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan neto tahun 2024 sebesar Rp133.355.387.470,00 sedangkan pembiayaan neto tahun 2023 sebesar Rp153.680.929.458,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.325.541.988,00.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00.

5.2.5 Lain-Lain
Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.3 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pertanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan neraca di laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur jumlah aset Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.551.690.760.266,81 yang terdiri dari aset lancar Rp99.361.985.114,80, investasi jangka panjang Rp41.524.725.887,00, aset tetap Rp1.399.453.997.465,85 dan aset lainnya Rp11.341.051.799,16 Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 senilai Rp1.551.690.760.266,81 dengan rincian, jumlah kewajiban sebesar Rp8.831.158.439,12 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp8.831.158.439,12, kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 dan ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.542.859.601.827,69.

Untuk memberikan gambaran pergerakan aset dan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. 47
Neraca per 31 Desember 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Trend
1	Aset			
1.1	Aset lancar	99.361.985.114,80	176.241.805.063,83	Turun
1.2	Investasi jangka panjang	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00	Naik
1.3	Aset tetap	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29	Turun
1.4	Aset lainnya	11.341.051.799,16	40.183.647.186,08	Turun
1.5	Properti investasi tanah	9.000.000,00	0,00	Naik
	Total Aset	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20	Turun
2	Kewajiban			
2.1	Kewajiban jangka pendek	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96	Naik
2.2	Kewajiban jangka panjang	-	-	-
	Total Kewajiban	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96	Naik
3	Ekuitas	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24	Turun
	Total Kewajiban dan Ekuitas	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20	Turun

Melihat dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa secara keseluruhan aset yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp130.952.646.139,39 atau turun sebesar 7,78% dari tahun 2023. Penurunan tersebut berasal dari turunnya aset lancar sebesar Rp76.879.819.949,03 dan aset tetap sebesar Rp29.739.543.083,44, dan aset lainnya turun senilai Rp28.842.595.386,92 dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2024 adanya penempatan aset investasi pada properti investasi tanah senilai Rp9.000.000,00.

Untuk kewajiban Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp880.524.293,16 atau senilai 11,07%. Dan untuk nilai ekuitas Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah senilai Rp1.542.859.601.827,69 dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp131.833.170.432,55 atau 7,87%. Dan untuk total kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp1.551.690.760.266,81, jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp130.952.646.139,39 atau turun 7,78%.

5.3.1 ASET

5.3.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- 1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
- 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk klasifikasi diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.3.1.1.1Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan

perhitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp48.190.923.456,12, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 48
Kas di Kas Daerah

NO.	URAIAN	NO. REKENING	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000001	96.546.566,00	22.449.836.318,26
2	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000002	48.094.376.890,12	102.362.861.268,14
3	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000007	0,00	0,00
4	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000019	0,00	0,00
	Jumlah		48.190.923.456,12	124.812.697.586,40

Sebagaimana rincian kas di kas daerah pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45-289 Tahun 2019 tentang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar. Menetapkan Nomor Rekening 163.300.0001 (menampung operasional rutin, penerimaan pajak, retribusi, penerimaan lain-lain) dan Rekening 163.300.0002 (Menampung gaji dan pendapatan transfer pusat) sebagai Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Rekening 163.300.0001 memiliki saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.546.566,00 dan Rekening 163.300.0002 memiliki saldo sebesar Rp48.094.376.890,12. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan saldo kas di kas daerah sebesar Rp76.621.774.130,28 atau turun senilai 61,39%.
- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 900/383/KEP/DPKD/2008 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah untuk Penampungan Penerimaan kembali Pinjaman Program Penguatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Belitung Timur. Menetapkan Nomor Rekening 163.300.0007 bernama Rekening Pengembalian Program KUMK.
- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45-907 Tahun 2012 tentang Rekening Bank Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Penampungan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar Dengan Nomor Rekening 163.300.0019. Memutuskan Keputusan Bupati tentang Rekening Bank Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada

PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar.

Berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 Desember 2024 Nomor KU.06.02/1009/BPKPD/2024 perihal pemindahbukuan Kas, kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dimana Saldo Kas per 31 Desember 2024 atas Nomor rekening 163.300.0001, 163.300.0007 dan 163.300.0019, untuk dipindahbukukan/(overbooking) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor Rekening 163.300.0002, sehingga pada 31 Desember 2024 rekening dengan nomor 163.300.0007 dan 163.300.0019 bersaldo Rp0,00.

Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 memiliki silpa dari dana transfer Pemerintah Pusat yang terdapat pada kas daerah adalah sebesar Rp37.013.390.573,72 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan	Belanja	Sisa Kas di Kas Daerah
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	84.152.033.000,00	83.267.293.333,00	884.739.667,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	400.207.316.000,00	375.973.528.393,00	24.233.787.607,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17.534.845.146,00	17.534.845.146,00	-
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	19.469.506.493,00	18.394.952.583,00	1.074.553.910,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.956.051.246,00	8.868.230.308,00	1.087.820.938,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.924.324.222,00	20.682.429.007,00	3.241.895.215,00
7	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.520.279.483,00	25.426.465.481,00	93.814.002,00
8	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	79.898.888.468,72	76.067.110.896,00	3.831.777.572,72
9	Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	-
10	Insentif Fiskal	33.035.544.660,00	30.470.542.998,00	2.565.001.662,00
Jumlah		733.424.384.718,72	696.410.994.145,00	37.013.390.573,72

5.3.1.1.2Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan adalah kas yang ada di bendahara penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 49
Kas di Bendahara Penerimaan

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah kas yang ada di bendahara pengeluaran sampai dengan per 31 Desember 2024, dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 50

Kas di Bendahara Pengeluaran

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	809.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp809.000,00, yang terdapat pada dinas Pendidikan sebesar Rp209.000,00 dan pada dinas Kesehatan sebesar Rp600.000,00, atas sisa kas tersebut sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 25 Februari 2025 oleh dinas Pendidikan dan pada tanggal 26 Februari 2025 oleh dinas Kesehatan. Dan untuk Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 adalah Rp0,00

5.3.1.1.4Kas di BLUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-412 Tahun 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2024 seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam pelaksanaan pelayanannya. Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp4.587.063.789,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 51

Kas di BLUD

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Muhammad Zein	2.415.510.430,79	11.340.085.343,42
2	Puskesmas Mengkubang	166.019.269,00	0,00
3	Puskesmas simpang Pesak	366.386.655,00	0,00
4	Puskesmas Gantung	404.781.837,00	0,00
5	Puskesmas Dendang	194.267.137,60	0,00
6	Puskesmas Manggar	387.073.193,00	0,00
7	Puskesmas Kelapa Kampit	435.950.625,00	0,00
8	Puskesmas Renggiang	217.074.642,00	0,00
	Jumlah	4.587.063.789,39	11.340.085.343,42

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 ada penurunan sebesar Rp6.753.021.554,03 atau turun senilai 59,55% dari tahun 2023 yang sebesar Rp11.340.085.343,42.

Kas di BLUD pada RSUD Muhammad Zein dan 7 (tujuh) puskesmas ditempatkan pada rekening giro.

5.3.1.1.5Kas di Bendahara BOS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS dikonsolidasikan ke dalam anggaran dan pendapatan OPD teknis di OPD Dinas Pendidikan.

Saldo kas di Kas di Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan 31 Desember 2023 senilai Rp51.317.973,72, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan sejumlah Rp51.317.973,72 atau turun sebesar 100%. Penurunan ini karena adanya pengalihan kode akun yang semula di akun kas dana BOS dialihkan atau disesuaikan ke akun kas dana BOSP sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 52
Kas di Bendahara BOS

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo BOS APBN	0,00	51.317.973,72
	Dana BOS APBN SD dan SMP	0,00	29.272.135,72
	Dana BOS APBN PAUD/Kesetaraan	0,00	2.194.342,00
2	Saldo BOS APBD (dari 2021)	0,00	19.851.496,00
	Jumlah	0,00	51.317.973,72

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp51.317.973,72, dan besaran ini di alihkan ke akun BOSP.

5.3.1.1.6Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Berdasarkan Kas Dana Kapitasi pada FKTP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Akun Kas di Bendahara FKTP ini di tahun 2024 di alihkan rekeningnya menjadi Kas di BLUD untuk Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan ke rekening Kas Dana BOK Puskesmas sesuai akun yang ada di SIPD dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 53
Kas Dana Kapitasi pada FKTP

NO.	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)		
		FKTP + BOK	FKTP	BOK	FKTP + BOK
1	UPT Puskesmas Manggar	0,00	58.915.794,00	41.845.013,00	100.760.807,00

NO.	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)		
		FKTP + BOK	FKTP	BOK	FKTP + BOK
2	UPT Puskesmas Mengkubang	0,00	7.356.407,00	73.933.993,00	81.290.400,00
3	UPT Puskesmas Gantung	0,00	36.410.785,00	197.058.378,00	233.469.163,00
4	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	0,00	122.111.290,00	45.232.213,00	167.343.503,00
5	UPT Puskesmas Simpang Pesak	0,00	50.115.489,00	198.441.231,00	248.556.720,00
6	UPT Puskesmas Renggiang	0,00	28.411.100,00	93.312.115,00	121.723.215,00
7	UPT Puskesmas Dendang	0,00	58.297.034,60	210.207.154,00	268.504.188,60
	Jumlah	0,00	361.617.899,60	860.030.097,00	1.221.647.996,60

5.3.1.1.7Kas Lainnya

Kas lainnya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, atau kas lainnya untuk perlakuan tertentu. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor. Penerimaan kas lainnya per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp336.646.496,00 dan di tahun 2023 sebesar Rp331.789.626,00, sebagaimana terdapat dalam tabel beikut ini.

Tabel 5. 54

Kas Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Lainnya	336.642.496,00	331.789.626,00
	Jumlah	336.642.496,00	331.789.626,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kas lainnya berasal dari:

- Dana yang terdapat pada dinas Pendidikan yang tidak ada petunjuk penggunaannya sebesar Rp334.267.999,00 di tahun 2024 dan di tahun 2023 sebesar Rp331.499.914,00, ada kenaikan sebesar Rp2.768.085,00 atau naik senilai 0,84% yang berasal dari bunga tahun 2024, dan dapat dijelaskan perubahannya sebagai berikut:

No.	Sekolah	Rekening Sekolah	Besaran Dana	Kode Sandi	Tanggal Transaksi/ Tanggal Diterima	Keterangan D1 Rekening Koran	Dana Sampai Saat Ini (Sesuai Rekening Koran) 2023	Selisih (Bunga Bank)	Total Besaran Dana Ditambah Bunga Bank 2023	Bunga Bank Tahun 2024	Total Dana per 31 Desember 2024
1	SMPN 1 KELAPA KAMPIT	1630906138	21.450.000,00	22	10 Oktober 2012	SML33278 3A/088/110 .10/10/2012 .123 TSA SP2D- 332783/nsk asi SKN Inward	21.170.322,00	-279.678,00	21.170.322,00	159.764,00	21.330.086,00
2	SMPN 1 MANGGAR	1630906148	5.850.000,00	-	10 Oktober 2012	Nota Kredit LLG (Kode Sandi 22)	30.253.201,00	24.403.201,00	30.253.201,00	228.329,00	30.481.530,00

No.	Sekolah	Rekening Sekolah	Besaran Dana	Kode Sandi	Tanggal Transaksi/ Tanggal Diterima	Keterangan D1 Rekening Koran	Dana Sampai Saat Ini (Sesuai Rekening Koran) 2023	Selisih (Bunga Bank)	Total Besaran Dana Ditambah Bunga Bank 2023	Bunga Bank Tahun 2024	Total Dana per 31 Desember 2024
3	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630906139	15.125.000,00	22	29 Nopember 2012	-	16.424.877,00	1.299.877,00	16.424.877,00	123.955,00	16.548.832,00
	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630900239	74.970.000,00	1010	26 Oktober 2005	-	263.651.514,00	88.711.514,00	263.651.514,00	2.256.037,00	265.907.551,00
	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630900239	99.970.000,00	1010	18 Januari 2016						
	Jumlah		217.365.000,00				331.499.914,00	114.134.914,00	331.499.914,00	2.768.085,00	334.267.999,00

Sumber data berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

- Pajak yang belum disetor pada dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.374.497,00, dan baru disetor pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PAJAK BELUM DISETOR PER 31 DESEMBER 2024				PAJAK DISETOR PADA TAHUN 2025				KET
		PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SD NEGERI 7 MANGGAR			80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	10 Februari 2025
			85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00	
2	SD NEGERI 3 MANGGAR			22.170,00	22.170,00			22.170,00	22.170,00	30 Januari 2025
		1.397.297,00	392.500,00	94.740,00	1.884.537,00	297.297,00	7.000,00		304.297,00	23 Januari 2025
3	SD NEGERI 13 MANGGAR				-	1.100.000,00	392.500,00	64.340,00	1.556.840,00	4 Februari 2025
					-			23.400,00	23.400,00	6 Februari 2025
4	SD NEGERI 25 MANGGAR	49.590,00			49.590,00	49.590,00			49.590,00	31 Januari 2025
5	SD NEGERI 12 MANGGAR		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	25 Februari 2025
				150.240,00	150.240,00			150.240,00	150.240,00	31 Januari 2025
				42.960,00	42.960,00			42.960,00	42.960,00	10 Maret 2025
JUMLAH HUTANG PAJAK PER 31 DES 2024					2.374.497,00	JUMLAH PAJAK DI SETOR			2.374.497,00	

- Kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp331.789.626,00, terdiri dari kas yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp331.499.914,00 dan pajak BOK yang belum disetor per 31

Desember 2023 pada Puskesmas Gantung dan baru disetor pada tahun 2024 sebesar Rp289.712,00.

5.3.1.1.8Kas Dana BOSP

Kas dan BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.464.927,72 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00, rekening ini adalah merupakan pengalihan dari rekening Kas Dana BOS di tahun 2023, berikut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 55
Kas Dana BOSP

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	SDN	18.400.189,80
2	SMPN	11.029.432,92
JUMLAH SDN DAN SMPN		29.429.622,72
3	TK Negeri	32.000,00
4	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)	3.305,00
Total		29.464.927,72

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana BOSP per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana bos apbn sd dan smp 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited) 2023	29.272.135,72
	Saldo bank	2.926.489,00
	saldo tunai	26.345.646,72
PENERIMAAN		
2	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	9.674.019,00
3	Koreksi Kredit	0
4	Setoran Tunai	0
5	Penerimaan Pajak	130.361.881,00
6	Penerimaan Dana BOS	
	a. BOS Reguller	18.456.470.957,00
	c. BOS Afirmasi	0
	d. BOS Kinerja	1.487.500.000,00
	e. Kurang Salur Tahun Sebelumnya	
	JUMLAH PENERIMAAN	20.084.006.857,00
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	20.113.278.992,72
PENGELUARAN		
7	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	0
	b. Belanja Barang dan Jasa BOSP Reguler	16.013.074.850,00
	c. Barang dan Jasa BOS Kinerja	0,00
	d. Belanja Modal	
	- Peralatan dan Mesin BOSP Reguler	2.353.457.117,00
	- Peralatan dan Mesin Kinerja	0,00
	- Aset Tetap BOSP Reguler	1.575.886.600,00
	- Aset Tetap Kinerja	0,00
8	Biaya Administrasi	0
9	Pengeluaran Pajak	130.361.881,00

No.	Uraian	Dana bos apbn sd dan smp 2024 (Rp)
10	Koreksi	0
11	Setoran Bunga/Jasa Giro (Stor Dindik)	0,00
12	Tarik XFER Giro /Stor Autodebet)	11.068.922,00
	JUMLAH PENGELUARAN	20.083.849.370,00
13	Saldo Kas Dana BOSP SDN dan SMPN	29.429.622,72
	a. Tunai	377.318,00
	b. Bank	29.052.304,72

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana TK Negeri per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/ kesetaraan 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited) 2023	0
	Saldo Awal	2.194.342,00
	Saldo bank	2.194.342,00
	saldo tunai	0
2	Koreksi Saldo Awal	0
	PENERIMAAN	
3	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	203.312,00
4	Koreksi Kredit	-
5	Setoran Tunai	-
6	Penerimaan Pajak	3.102.904,00
7	Penerimaan Dana BOS	
	a. BOS Reguller	561.280.000,00
	c. BOS Afirmasi	0
	d. BOS Kinerja	0
	e. Kurang Salur Tahun Sebelumnya	
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	566.780.558,00
	PENGELUARAN	
8	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	0
	b. Belanja Barang dan Jasa	417.633.095,00
	c. Belanja Modal	143.614.905,00
9	Biaya Administrasi	
10	Tarik Exfer jasa giro	2.397.654,00
11	Setor Pajak	3.102.904,00
12	Setoran Bunga/Jasa Giro	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	566.748.558,00
13	Saldo Akhir	32.000,00
	a. Tunai	0
	b. Bank	32.000,00

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited)	0,00
	Saldo Awal	0,00
	Saldo bank	0,00
	saldo tunai	0,00
2	Koreksi Saldo Awal	0,00
PENERIMAAN		149.634.475,00
3	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	74.475,00
4	Koreksi Kredit	0,00
5	Setoran Tunai	0,00
6	Penerimaan Pajak	0,00
7	Penerimaan Dana BOS	0,00
	a. BOS Reguller Tahap 1	74.780.000,00
	b. BOS Reguller Tahap 2	74.780.000,00
	c. BOS Kinerja	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	149.634.475,00
PENGELUARAN		
8	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	124.556.695,00
	c. Belanja Modal	25.000.000,00
9	Biaya Administrasi	0,00
10	Tarik Exfer jasa giro	11.870,00
11	Setor Pajak	62.605,00
12	Setoran Bunga/Jasa Giro	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	149.631.170,00
13	Saldo Akhir	3.305,00
	a. Tunai	0,00
	b. Bank	3.305,00

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

5.3.1.1.9Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp778.985.059,00 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00, rekening ini adalah merupakan pengalihan dari rekening Kas Dana Kapitasi pada FKTP di tahun 2023, berikut dapat kami sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 56
Kas Dana BOK Puskesmas

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Puskesmas Mengkubang	104.557.451,00
2	Puskesmas simpang Pesak	157.472.201,00
3	Puskesmas Gantung	138.540.337,00
4	Puskesmas Dendang	95.959.951,00
5	Puskesmas Manggar	28.685.679,00

No.	Uraian	2024 (Rp)
6	Puskesmas Kelapa Kampit	123.112.819,00
7	Puskesmas Renggiang	130.656.621,00
	Total	778.985.059,00

5.3.1.1.10 Setara Kas

Setara kas pada tahun 2024 senilai Rp0,00 dan pada tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.1.11 Investasi jangka Pendek

Investasi jangka pendek tahun 2024 Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.1.12 Piutang Pajak Daerah

Pemungutan pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang pajak dan retribusi daerah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.475.188.247,50 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.013.357.890,50 terdiri dari; piutang pajak hotel, piutang pajak restoran, piutang pajak hiburan, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), untuk lebih jelasnya berikut di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 57
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel dan Penginapan	25.736.000,00	25.736.000,00
2	Pajak Restoran, Cafe, Warung Makan/Minum	29.446.190,00	29.446.190,00
3	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.776.000,00	3.776.000,00
4	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2.639.272.328,50	3.231.329.164,50
5	Piutang Pajak Tanah Liat	95.741.220,00	333.839.940,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.682.216.509,00	4.389.230.596,00
	Jumlah	8.475.188.247,50	8.013.357.890.50

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan piutang pajak daerah sebesar Rp461.830.357,00 atau naik sebesar 5,76% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut dijelaskan piutang pajak daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Piutang pajak hotel dan penginapan terdapat pada Hotel Nusa Indah II sejak tahun 2009 sebesar Rp25.376.000,00 tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2024.
- b. Pajak restoran, cafe, warung makan minum, terdapat pada Restoran Nusa Indah II sejak tahun 2009 sebesar Rp29.446.190,00 tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2024
- c. Piutang pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan per 31 Desember 2024 atas nama debitur Subandri sebesar Rp2.776.000,00.
- d. Piutang pajak pasir kuarsa, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 58
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PASIR KUARSA)					
1	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. DHIKA YOGATAMA	2019	165.380.772,50	243.380.772,50
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. DHIKA YOGATAMA	2020	34.437.500,00	34.437.500,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BINA USAHA CIPTA PRATAMA	2020	91.681.800,00	91.681.800,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI BILLITON RAYA	2019	720.748.855,00	720.748.855,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI BILLITON RAYA	2020	84.172.612,50	84.172.612,50
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI PASUNDAN MINING	2019	257.458.125,00	287.458.125,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI PASUNDAN MINING	2020	140.543.012,50	140.543.012,50
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA	2019	576.449.651,00	1.225.818.987,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. PERMATA BATU ITAM	2022	313.000.000,00	313.000.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. KARYA MELATI BELITONG	2023	0,00	90.087.500,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. KARYA MELATI BELITONG	2024	51.562.500,00	0,00
12	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. PRIMA SUMBER ALAM MAKMUR	2024	203.837.500,00	0,00
	JUMLAH			2.639.272.328,50	3.231.329.164,50

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan (pasir kuarsa) terdapat penurunan sebesar Rp592.056.836,00 atau turun sebesar 18,32%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- e. Piutang Pajak Tanah Liat
Piutang pajak tanah liat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 59
Piutang Pajak Tanah Liat

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)				
1	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. SETIA MAJU PRATAMA	2019	5.182.776,00	65.182.776,00
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. ALBETA MAJU SUKSES	2022	90.558.444,00	268.657.164,00
	JUMLAH			95.741.220,00	333.839.940,00

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa pajak tanah liat terdapat penurunan sebesar Rp238.098.720,00 atau turun sebesar 71,32%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 60
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

No.	Uraian		Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
	PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN				
1	PBB-P2	WP PBB 2009 S/D 2011	2009-2011	107.925.096,00	108.658.082,00
2	PBB-P2	WP PBB 2012	2012	112.520.574,00	113.503.930,00
3	PBB-P2	WP PBB 2013	2013	106.754.442,00	107.949.771,00
4	PBB-P2	WP PBB 2014	2014	147.159.219,00	150.335.389,00
5	PBB-P2	WP PBB 2015	2015	349.225.126,00	357.775.775,00
6	PBB-P2	WP PBB 2016	2016	346.913.989,00	357.495.543,00
7	PBB-P2	WP PBB 2017	2017	314.386.110,00	327.202.254,00
8	PBB-P2	WP PBB 2018	2018	322.684.032,00	336.927.509,00
9	PBB-P2	WP PBB 2019	2019	341.774.076,00	351.865.929,00
10	PBB-P2	WP PBB 2020	2020	370.347.718,00	392.556.413,00
11	PBB-P2	WP PBB 2021	2021	460.862.130,00	505.005.785,00
12	PBB-P2	WP PBB 2022	2022	521.665.177,00	562.032.914,00
13	PBB-P2	WP PBB 2023	2023	605.233.158,00	717.921.302,00
14	PBB-P2	WP PBB 2024	2024	1.574.765.662,00	0,00
	JUMLAH			5.682.216.509,00	4.389.230.596,00

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.292.985.913,00 atau naik sebesar 29,46%.

Berikut disajikan rekapitulasi piutang pajak daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, umur piutang, kualitas dan nilai piutang tahun 2024.

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel (SA)	Hotel Nusa Indah II	2009	> 3 tahun	Macet	25.736.000,00
2	Pajak Restoran (SA)	Restoran Nusa Indah II	2009	> 3 tahun	Macet	29.446.190,00
3	Pajak Balap Kendaraan Bermotor (SA)	Subandri	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	2.776.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (SA)					2.735.013.548,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Dhika Yogatama	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	165.380.772,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Dhika Yogatama	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	34.437.500,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bina Usaha Cipta Pratama	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	91.681.800,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Billiton Raya	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	720.748.855,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Billiton Raya	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	84.172.612,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Pasundan Mining	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	257.458.125,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Pasundan Mining	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	140.543.012,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	576.449.651,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Permata Batu Itam	2022	1 - 2 tahun	Kualitas kurang lancar	313.000.000,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Karya Melati Belitong	2024	< 1 tahun	Lancar	51.562.500,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Prima Sumber Alam Makmur	2024	< 1 tahun	Lancar	203.837.500,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. Setia Maju Pratama	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	5.182.776,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. Albeta Maju Sukses	2022	1 - 2 tahun	Kualitas kurang lancar	90.558.444,00
5	Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (Oa)					5.682.216.509,00
	PBB-P2	WP PBB	2009 S/D 2011	> 3 tahun	Macet	107.925.096,00
	PBB-P2	WP PBB	2012	> 3 tahun	Macet	112.520.574,00
	PBB-P2	WP PBB	2013	> 3 tahun	Macet	106.754.442,00
	PBB-P2	WP PBB	2014	> 3 tahun	Macet	147.159.219,00
	PBB-P2	WP PBB	2015	> 3 tahun	Macet	349.225.126,00
	PBB-P2	WP PBB	2016	> 3 tahun	Macet	346.913.989,00
	PBB-P2	WP PBB	2017	> 3 tahun	Macet	314.386.110,00
	PBB-P2	WP PBB	2018	> 3 tahun	Macet	322.684.032,00
	PBB-P2	WP PBB	2019	> 3 tahun	Macet	341.774.076,00
	PBB-P2	WP PBB	2020	> 3 tahun	Macet	370.347.718,00
	PBB-P2	WP PBB	2021	> 3 tahun	Macet	460.862.130,00
	PBB-P2	WP PBB	2022	1 tahun sd 3 tahun	Kualitas Diragukan	521.665.177,00
	PBB-P2	WP PBB	2023	1 tahun sd 3 tahun	Kualitas Diragukan	605.233.158,00
	PBB-P2	WP PBB 2024	2024	4 bulan - 1 tahun	Kurang Lancar	1.574.765.662,00
	JUMLAH					8.475.188.247,50

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi Daerah

Pemungutan pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang pajak dan retribusi daerah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo

akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas umum daerah. Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp2.536.432.810,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61
Piutang Retribusi Daerah

No.	Jenis Piutang	OPD	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	113.701.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD M ZEIN	817.328.766,46	619.074.309,46
3	Retribusi Pelayanan Pasar / Sewa Petak Kios dan Los dan Plank	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.480.000,00	3.480.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	783.750,00	783.750,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPUPRP2KP	16.412.976,00	16.412.976,00
6	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Gudang Perikanan Sewa dan Pabrik Es)	Dinas Perikanan	202.453.166,66	202.453.166,66
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemakaian Ruangan)	Dinas Perikanan	333.333,00	333.333,00
8	Retribusi Pemakaian Alat (Sewa Keramba Jaring Apung)	Dinas Perikanan	15.120.000,00	14.040.000,00
9	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.867.000,00	12.231.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan	11.742.400,00	-
11	Retribusi Sistem Penyediaan air minum (Pokok)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	924.522.510,00	612.696.676,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.038.050,00	11.038.050,00
13	Retribusi Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	497.350.858,70	497.350.858,70
	Jumlah Piutang Retribusi		2.536.432.810,82	2.103.595.119,82

Piutang pajak daerah pada tahun 2024 sesuai dengan Piutang retribusi daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp432.837.691,00 atau meningkat senilai 20,58% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut disajikan

pengurangan dan penambahan piutang retribusi daerah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5. 62
Rincian Tambah Kurang Piutang Retribusi Daerah

No.	Jenis Piutang	OPD	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023	Koreksi Piutang	Penambahan Piutang 2024	Pengurangan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	113.701.000,00	62.039.515,00	-	175.740.515,00	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD M ZEIN	619.074.309,46	-	216.548.310,00	18.293.853,00	817.328.766,46
3	Retribusi Pelayanan Pasar / Sewa Petak Kios dan Los dan Plank	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.480.000,00	-	-	-	3.480.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	783.750,00	-	-	-	783.750,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPUPRP2KP	16.412.976,00	-	-	-	16.412.976,00
6	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Gudang Perikanan Sewa dan Pabrik Es)	Dinas Perikanan	202.453.166,66	-	-	-	202.453.166,66
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemakaian Ruangan)	Dinas Perikanan	333.333,00	-	-	-	333.333,00
8	Retribusi Pemakaian Alat (Sewa Keramba Jaring Apung)	Dinas Perikanan	14.040.000,00	-	5.400.000,00	4.320.000,00	15.120.000,00
9	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.231.000,00	-	30.036.000,00	6.400.000,00	35.867.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan	-	-	11.742.400,00	-	11.742.400,00
11	Retribusi Sistem Penyediaan air minum (Pokok)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	612.696.676,00	226.480,00	365.453.616,00	53.854.262,00	924.522.510,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.038.050,00	-	-	-	11.038.050,00
13	Retribusi Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	497.350.858,70	-	-	-	497.350.858,70
	Jumlah Piutang Retribusi		2.103.595.119,82	62.265.995,00	629.180.326,00	258.608.630,00	2.536.432.810,82

Berikut disajikan rekapitulasi piutang retribusi daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, umur piutang, kualitas dan nilai piutang tahun 2024.

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					50.385.050
	Piutang Retribusi Los					3.480.000
			Sebelum 2013	> 1 tahun	Macet	540.000
			2013	> 1 tahun	Macet	1.200.000
			2014	> 1 tahun	Macet	900.000
			2015	> 1 tahun	Macet	840.000
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan					35.867.000
			2017	> 1 tahun	Macet	1.000.000
			2019	> 1 tahun	Macet	500.000
			2020	> 1 tahun	Macet	2.332.000
			2023	> 1 tahun	Macet	1.999.000
		SARTO /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.750.000
		INDRA /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.250.000
		ASMIATI /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.000.000
		ERMIATI /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.000.000
		SUHADI /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.000.000
		ASNIDAR /GANTUNG	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	500.000
		AMRAN /GANTUNG	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	500.000
		YUDI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.125.000
		PANJI AGUSTIN /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.666.000
		SURYANI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.499.000
		MERY NOVIYANTI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.499.000
		TUMINI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.332.000
		EVITASARI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.165.000
		HAYATUN /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	3.000.000
		ANDI ERVINA /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.500.000

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
		MIE MIE /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.750.000
		MARIATI /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.250.000
		HARTAWAN /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.250.000
		AGUS SUCIPTO /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	500.000
		EMMY HUSIN /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	750.000
		DEDY TRIANA /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	750.000
		FEBBIOLA WIJAYA /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	500.000
		SAHARUM /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	250.000
		TJIU SIU KHIUN /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	250.000
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					11.038.050
		Haryani	2014	> 1 tahun	Macet	4.902.000
		Yuliana (HO)	2014	> 1 tahun	Macet	4.218.750
		Ramli (HO)	2014	> 1 tahun	Macet	1.917.300
2	DINAS PERIKANAN					229.648.899,66
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					202.453.166,66
		Toni Hartono (Pabrik Es)	2009	> 1 tahun	Macet	2.000.000,00
		Sugianto/KUD Cahaya Laut (Pabrik Es)	2009	> 1 tahun	Macet	3.500.000,00
		Ayung (Galon)	2011	> 1 tahun	Macet	4.200.000,00
		Ayung (Kantor KUD)	2011	> 1 tahun	Macet	2.875.000,00
		Asniar (6 Bulan)	2011	> 1 tahun	Macet	2.062.500,00
		Ayung (Gudang Perikanan)	2012	> 1 tahun	Macet	2.916.666,66
		Asmadin	2013	> 1 tahun	Macet	21.680.000,00
		Badrun (1 tahun)	2013	> 1 tahun	Macet	6.125.000,00
		Sudiarto (6 Bulan)	2013	> 1 tahun	Macet	3.700.000,00
		Sartono (Bengkel)	2013	> 1 tahun	Macet	4.500.000,00
		Anterisno (APMS)	2013	> 1 tahun	Macet	4.500.000,00
		Alex Hardinan (Cool Room)	2013	> 1 tahun	Macet	3.000.000,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
		Bambang (Pabrik Es)	2013	> 1 tahun	Macet	9.000.000,00
		Bambang (Galon)	2013	> 1 tahun	Macet	1.800.000,00
		Sudin (Pabrik Es)	2013	> 1 tahun	Macet	18.000.000,00
		Sudin (Cool Room)	2013	> 1 tahun	Macet	2.000.000,00
		Sudin (Galon)	2013	> 1 tahun	Macet	1.200.000,00
		Badrun	2016	> 1 tahun	Macet	6.125.000,00
		Hariyanto	2016	> 1 tahun	Macet	7.400.000,00
		Zulzalali	2016	> 1 tahun	Macet	2.395.000,00
		Amril Norman	2016	> 1 tahun	Macet	2.395.000,00
		Jupin Samil	2016	> 1 tahun	Macet	1.101.750,00
		Ahmad Jamhir (SPDN Gantung)	2016	> 1 tahun	Macet	6.062.500,00
		JONI	2017	> 1 tahun	Macet	6.200.000,00
		TEI VIE	2017	> 1 tahun	Macet	4.512.250,00
		SAHID	2017	> 1 tahun	Macet	3.700.000,00
		ADE FAHROZI	2017	> 1 tahun	Macet	1.812.500,00
		SIRAJUDDIN	2017	> 1 tahun	Macet	3.000.000,00
		TONY	2017	> 1 tahun	Macet	14.800.000,00
		BADRUN	2017	> 1 tahun	Macet	7.250.000,00
		SUHAIMI	2017	> 1 tahun	Macet	6.002.500,00
		JUNAIDI	2017	> 1 tahun	Macet	2.800.000,00
		SYAMSUDIN	2017	> 1 tahun	Macet	1.084.375,00
		JUPIN SAMIL	2017	> 1 tahun	Macet	3.084.375,00
		ZULZALALI	2017	> 1 tahun	Macet	4.668.750,00
		YAYAT SUYATNA (Cool Storage)	2022	> 1 tahun	Macet	25.000.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	REKA	2020	> 1 tahun	Macet	333.333,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat (sewa keramba jaring apung)					15.120.000,00
		ALI SUDARMAN	2021	> 1 tahun	Macet	1.080.000,00
		BADRIANTO	2022	> 1 tahun	Macet	2.160.000,00
		TARDIANSYAH	2022	> 1 tahun	Macet	2.160.000,00
		SYAHRULYANS YAH	2022	> 1 tahun	Macet	2.160.000,00
		AGUS SUSANTO	2022	> 1 tahun	Macet	1.080.000,00
		ALI SUDARMAN	2022	> 1 tahun	Macet	1.080.000,00
		ANTON	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	1.080.000,00
		TARDIANSYAH	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.160.000,00
		AHMAD	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.160.000,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
	Piutang Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Rubianto	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	11.742.400,00
3	DPUPRP2RKP					940.935.486,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					16.412.976,00
		IKK Nek Tinik	2016	> 1 tahun	Macet	16.412.976,00
	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					924.522.510,00
		IKK Nek Tinik	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	66.184.874
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	3.219.029
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	524.474,00
		IKK Manggar	2019	> 1 tahun	Macet	1.668.879
			2020	> 1 tahun	Macet	13.926.349
			2021	> 1 tahun	Macet	24.533.405
			2022	> 1 tahun	Macet	76.485.883
			2023	> 1 tahun	Macet	134.327.888
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	169.328.599
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	12.114.348
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	8.854.796,00
		IKK Damar	2019	> 1 tahun	Macet	11.289.678
			2020	> 1 tahun	Macet	33.370.604
			2021	> 1 tahun	Macet	49.946.369
			2022	> 1 tahun	Macet	92.161.789
			2023	> 1 tahun	Macet	121.358.050
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	104.563.578
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	501.940
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	161.978,00
4	RSUD M.ZEIN					817.328.766,46
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan					817.328.766,46
		Pasien Umum	2017	> 1 tahun	Macet	119.307.752,85
			2018	> 1 tahun	Macet	153.059.342,43
			2019	> 1 tahun	Macet	35.270.011,43
			2020	> 1 tahun	Macet	91.995.963,00
			2021	> 1 tahun	Macet	48.651.202,00
			2022	> 1 tahun	Macet	2.884.673,00
			2022	> 1 tahun	Macet	25.744.805,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
			2022	> 1 tahun	Macet	2.419.825,00
			2022	> 1 tahun	Macet	12.451.126,00
			2023	> 1 tahun	Macet	57.307.667,00
			2023	> 1 tahun	Macet	16.237.501,00
			2023	> 1 tahun	Macet	35.007.619,00
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	126.019.232,00
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	36.941.748,00
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	11.186.794,00
		MCS RS Bakti Timah	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	12.446.621,00
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.131.915,00
		Rumah Sakit Utama	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.750.000,00
		Sewa Lapak	2017	> 1 tahun	Macet	442.968,75
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.448.000,00
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	1.218.000,00
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	406.000,00
		PT. Jasa Raharja	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	21.000.000,00
5	BPKPD					497.350.858,70
	Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat (Perizinan Pertambangan)			> 1 tahun	Macet	497.350.858,70
6	Dinas Perhubungan					783.750,00
	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		2011	> 1 tahun	Macet	783.750,00
	TOTAL					2.536.432.810,82

5.3.1.1.14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.15 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang lain-lain PAD yang sah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Lain-lain PAD yang sah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp13.797.115.820,50 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.554.046.509,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Jenis Piutang	Opd	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023
1	Piutang Jasa Giro Kas Daerah	BPKPD	-	10.125.051,00
2	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	DPUPRP2KP	11.643.730,00	11.643.730,00
3	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perikanan	9.856.425,50	10.050.825,50
5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Denda Air Minum)	DPUPRP2KP	83.856.400,00	83.963.000,00
6	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	Dinas Perikanan	108.000,00	-
7	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	RSUD M ZEIN	13.397.332.810,00	5.438.263.903,00
8	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Dendang	7.254.200,00	-
9	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Gantung	59.381.100,00	-
10	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	106.223.685,00	-
11	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Manggar	30.233.900,00	-
12	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Mengkubang	23.412.800,00	-
13	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Renggang	37.715.970,00	-
14	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Simpang Pesak	30.096.800,00	-
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah			13.797.115.820,50	5.554.046.509,50

Berdasarkan tabel Piutang Lain-lain PAD yang sah di atas pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.243.069.311,00 atau meningkat senilai 148,42% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.1.1.16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sampai dengan akhir 31 Desember 2024 Rp0,00 dan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.3.1.1.17 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer antar Daerah sampai dengan akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.022.999.592,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.210.217.076,00. Besaran piutang ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/24/BAKUDA/2025 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Periode masa Pajak Triwulan IV Tahun 2024, dan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/23/BAKUDA/2025 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Masa Pajak Triwulan IV Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65

Piutang Transfer Antar Daerah

No. Urut	Jenis Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.305.460.518,00	2.286.707.995,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	939.429.644,00	1.316.072.910,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.469.923.986,00	5.103.843.559,00
4	Pajak Air Permukaan	308.185.444,00	503.592.612,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.362.193.083,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	9.385.192.675,00	9.210.217.076,00

Piutang transfer antar daerah berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 sebesar Rp9.385.192.675,00 dan tahun 2023 sebesar Rp9.210.217.076,00 atau meningkat sejumlah Rp174.975.599,00 atau sebesar 1,90%. Dan untuk

Piutang transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp9.210.217.076,00 telah masuk ke kas daerah pada tanggal 27 Maret 2024.

5.3.1.1.18 Piutang Lainnya

Piutang lainnya per 31 Desember 2024 Rp4.522.888.473,00,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.635.142.553,00 ini adalah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 66
Piutang Lainnya

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.522.888.473,00	4.635.142.553,00
	Piutang Lainnya	4.522.888.473,00	4.635.142.553,00

Berdasarkan table diatas piutang lainnya menurun sebesar Rp112.254.080,00 atau 2,42%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.1.1.19 Penyisihan Piutang

Metode penyisihan piutang adalah penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relative besar dibandingkan dengan total aset lancar. Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.899.158.069,10 dan per 31 Desember 2023 Rp9.813.617.352,77, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67
Penyisihan Piutang

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.162.107.586,25)	(1.268.197.494,77)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)
4	Penyisihan Piutang Lainnya (Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang)	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)
	Jumlah	(10.912.776.069,10)	(9.813.617.352,77)

Jika dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyisihan piutang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.099.158.716,33 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp9.813.617.352,77 atau meningkat sejumlah 11,20% dari tahun 2023.

Berikut dijelaskan kenaikan dan penurunan Penyisihan Piutang Daerah Tahun 2024:

Tabel 5. 68
Rincian Kenaikan dan Penurunan Penyisihan Piutang

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase	Trend
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)	(65.728.193,50)	1,38%	Naik

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase	Trend
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.148.489.586,25)	(1.268.197.494,77)	(880.292.091,48)	69,41%	Naik
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)	(153.390.891,35)	315,16%	Naik
4	Penyisihan Piutang Lainnya (Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang)	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)	13.870.460,00	-0,37%	Turun
	Jumlah	(10.899.158.069,10)	(9.813.617.352,77)	(1.085.540.716,33)	11,06%	Naik

Untuk lebih rincinya penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 69
Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah			
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.736.000,00)	(25.736.000,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(29.446.190,00)	(29.446.190,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	(1.388.000,00)	(1.888.000,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	(1.068.013.164,25)	(1.445.871.269,75)
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	(11.647.232,40)	(59.457.104,40)
6	Penyisihan Piutang PBBP2	(3.701.478.245,70)	(3.209.582.074,70)
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)
Penyisihan Piutang Retribusi			
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(670.262.082,45)	(522.771.760,41)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(3.480.000,00)	(3.480.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	(783.750,00)	(783.750,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(16.412.976,00)	(16.412.976,00)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(202.786.499,66)	(202.786.499,66)
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.747.000,00)	(9.741.600,00)
7	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(19.449.000,00)	(3.832.000,00)
8	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	(58.712,00)	0,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(730.738.657,44)	0,00

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
10	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	(11.038.050,00)	(11.038.050,00)
11	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat	(497.350.858,70)	(497.350.858,70)
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	(2.162.107.586,25)	(1.268.197.494,77)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.856.965,50)	(9.964.857,50)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(82.101.931,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	(110.102.451,00)	(38.705.598,65)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)
	Penyisihan Piutang Lainnya		
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan penyisihan piutang sebagai berikut:

- Penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.837.708.832,35 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.771.980.638,85. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp65.728.193,50 atau naik senilai 1,38%.
- Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024 Sebesar Rp2.162.107.586,25 dan per 31 Desember 2023 Rp1.268.197.494,77, jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp893.910.091,48 atau naik senilai 70,49%.
- Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp202.061.347,50 dan tahun 2023 sebesar Rp48.670.456,15, jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp153.390.891,35 atau naik 315,16%.
- Penyisihan piutang lainnya berupa penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat tahun 2024 sebesar Rp3.710.898.303,00 dan tahun 2023 sebesar Rp3.724.768.763,00 ada penurunan sebesar Rp13.870.460,00 atau turun sebesar 0,37%.

➤ **Penyisihan Piutang Pajak**

Berikut secara terinci penyisihan piutang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 70
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah			
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.736.000,00)	(25.736.000,00)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(29.446.190,00)	(29.446.190,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	(1.388.000,00)	(1.888.000,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	(1.068.013.164,25)	(1.445.871.269,75)
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	(11.647.232,40)	(59.457.104,40)
6	Penyisihan Piutang PBBP2	(3.701.478.245,70)	(3.209.582.074,70)
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)

- Dari tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:
- Penyisihan piutang pajak hotel-hotel sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami penambahan ataupun penurunan yaitu sebesar Rp25.736.000,00.
 - Penyisihan piutang pajak restoran-restoran dan sejenisnya sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami penambahan ataupun penurunan yaitu sebesar Rp29.446.190,00.
 - Penyisihan piutang pajak hiburan-pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan tahun 2024 sebesar Rp1.388.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.888.000,00 ada penurunan sebesar Rp500.000,00 atau turun sebesar 26,48%.
 - Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa tahun 2024 sebesar Rp1.068.013.164,25 dan tahun 2023 sebesar Rp1.445.871.269,75 atau turun sebesar Rp377.858.105,50,00.
 - Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat tahun 2024 sebesar Rp11.647.232,40 dan tahun 2023 sebesar Rp59.457.104,40 atau turun sebesar Rp47.809.872,00 atau turun sebesar 90,41%.
 - Penyisihan piutang PBBP2 tahun 2024 sebesar Rp3.701.478.245,70 dan tahun 2023 sebesar Rp3.209.582.074,70, ada kenaikan sebesar Rp491.896.171,00 atau naik 15,33%.

➤ **Penyisihan Piutang Retribusi**

Berikut secara lebih rinci penyisihan piutang retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 71
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(670.262.082,45)	(522.771.760,41)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(3.480.000,00)	(3.480.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	(783.750,00)	(783.750,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(16.412.976,00)	(16.412.976,00)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(202.786.499,66)	(202.786.499,66)
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.747.000,00)	(9.741.600,00)
7	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(19.449.000,00)	(3.832.000,00)
8	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	(58.712,00)	0,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(730.738.657,44)	0,00
10	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	(11.038.050,00)	(11.038.050,00)
11	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat	(497.350.858,70)	(497.350.858,70)
		(2.162.107.586,25)	(1.268.197.494,77)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa:

- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp670.262.082,45 dan tahun 2023 sebesar Rp522.771.760,41 turun sebesar Rp147.490.322,04 atau turun 28,21%
- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan sampai dengan tahun 2024 tidak ada perubahan pembayaran atau pun penambahan masih sebesar Rp3.480.000,00
- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor ada pada dinas Perhubungan berupa pengujian kendaraan bermotor per 31 Desember 2023 senilai Rp783.750,00. Penyisihan piutang retribusi ini sejak tahun 2011, dan dikategorikan piutang macet yang kemudian akan diusulkan untuk penghapusan.
- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp16.412.976,00.
Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ada pada dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya dinas ini memiliki nama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), tidak adanya pembayaran atas piutang pengendalian menara telekomunikasi dikarenakan berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 46/PUU-XII/2014, tahun 2014 yang menyatakan bahwa piutang tersebut masih ada, namun sampai saat ini tidak dapat diselesaikan, (piutang ini merupakan pelimpahan piutang dari dinas perhubungan pada tahun 2017, dimana pihak ketiga yaitu

PT. K sudah pernah ditagih, oleh Dinas PUPR pada tahun 2017 dan 2018 tetapi tidak melakukan pembayaran). Piutang ini timbul pada dinas PUPR tahun 2017, karena adanya peleburan dinas, perubahan struktur organisasi dan perubahan nomenklatur dinas, serta perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Belitung Timur maka otomatis tupoksi disesuaikan termasuk tupoksi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang sebelumnya di kelola oleh dinas Perhubungan sekarang dikelola oleh dinas PUPR, dan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan pelimpahan dari dinas terkait (Dinas Perhubungan), sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 900/1782/DISHUB-I/2017 tanggal 9 Desember 2017, perihal Pelimpahan Piutang Retribusi dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Piutang Retribusi dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 01/a/2.9.1/2017 tanggal 29 Desember 2017, perihal Pemungutan Retribusi Telekomunikasi kepada PT. K.

Dan pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berubah nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sejumlah Rp202.786.499,00 tidak ada perubahan penambahan maupun pengurangan sampai dengan tahun 2024.
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat tahun 2024 sebesar Rp9.747.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp9.741..600,00 ada kenaikan sebesar Rp5.400,00
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan Rp2.162.107.586,25 ada kenaikan sebesar Rp893.910.091,48 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp3.832.000,00 atau naik 70,49%.
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sampai dengan tahun 2024 tidak ada penambahan ataupun pengurangan yaitu sebesar Rp58.712,00.
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebesar Rp730.738.657,44 dan tahun sebelumnya tidak ada penyisihan.
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp11.038.050,00 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan atas penyisihan tersebut.
- Penyisihan piutang retribusi perizinan pertambangan eks dinas Pertambangan tidak ada perubahan nilai yaitu senilai Rp497.350.858,70 yang belum diserahkan kepada provinsi. Piutang tersebut tidak bisa dilakukan penagihan dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah terkait Pertambangan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Piutang tersebut direncanakan akan diserahkan ke provinsi menunggu persetujuan Tim Personil Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D).

- **Penyisihan Piutang Lain-Lain-PAD Yang Sah**
penyisihan piutang lain-lain-PAD yang sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp202.061.347,5 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp48.670.456,15 atau turun sejumlah Rp153.390.891,35 atau naik senilai 315,16%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72
Rincian Penyisihan Piutang
Lain-Lain-PAD Yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang lain Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.856.965,50)	(9.964.857,50)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(82.101.931,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	(110.102.451,00)	(38.705.598,65)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat tahun 2024 sebesar Rp9.856.965,50 dan tahun 2023 sebesar Rp9.964.857,50 atau turun Rp107.892,00 atau turun 1,08%.
- Penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan Rp82.101.931,00 dan tahun 2023 tidak ada penyisihan.
- Penyisihan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan tahun 2024 Rp110.102.451,00 dan tahun 2023 sebesar Rp38.705.598,65, naik sebesar Rp71.396.852,35 atau naik 184,46%.

- **Penyisihan Piutang Lainnya**
Penyisihan piutang lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.710.898.303,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.724.768.763,00 atau turun sejumlah Rp13.870.460,00 atau turun senilai 0,37%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)

5.3.1.1.20 Persediaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan stock opname persediaan per 31 Desember 2024 yang dilakukan antara Inspektorat dan pengelola barang OPD serta telah dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Kekayaan Daerah BPKPD Kabupaten Belitung Timur, nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.634.054.428,85 dan 31 Desember 2023 senilai Rp18.781.524.741,64. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada penurunan sebesar Rp1.147.470.312,79 atau turun senilai 6,11%. Adapun rincian persediaan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 74
Persediaan Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan Persediaan (Rp)	Persentase	Trend
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	139.455.000,00	75.128.750,00	64.326.250	0,86	Naik
2	Bahan Kimia	1.194.412.115,40	1.169.609.330,71	24.802.785	0,02	Naik
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.990.000,00	1.901.000,00	89.000	0,05	Naik
4	Bahan/Bibit Tanaman	129.764.000,00	227.746.500,00	(97.982.500)	(0,43)	Turun
5	Isi Tabung Gas	14.749.000,00	22.004.419,00	(7.255.419)	(0,33)	Turun
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	233.482.933,03	140.056.049,67	93.426.883	0,67	Naik
7	Bahan Lainnya	9.577.983.913,07	6.295.824.759,29	3.282.159.154	0,52	Naik
8	Suku Cadang Alat Angkutan	13.200.000,00	0,00	13.200.000	0,00	Naik
9	Suku Cadang Alat Besar	30.636.000,00	84.915.000,00	(54.279.000)	(0,64)	Turun
10	Suku Cadang Lainnya	148.731.847,59	154.137.827,95	(5.405.980)	(0,04)	Turun
11	Alat Tulis Kantor	250.668.075,00	181.828.731,00	68.839.344	0,38	Naik
12	Kertas dan Cover	104.766.600,00	109.458.690,00	(4.692.090)	(0,04)	Turun
13	Bahan Cetak	394.221.155,00	404.341.355,00	(10.120.200)	(0,03)	Turun
14	Benda Pos	4.010.000,00	8.050.000,00	(4.040.000)	(0,50)	Turun
15	Bahan Komputer	469.174.700,00	434.449.700,00	34.725.000	0,08	Naik
16	Perabot Kantor	86.594.430,00	85.396.906,50	1.197.524	0,01	Naik
17	Alat Listrik	422.261.835,71	1.652.070.162,71	(1.229.808.327)	(0,74)	Turun
18	Perlengkapan Pendukung Olahraga	100.000,00	1.748.700,00	(1.648.700)	(0,94)	Turun
19	Suvenir/Cendera Mata	4.726.000,00	6.873.500,00	(2.147.500)	(0,31)	Turun
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.543.300,00	22.093.500,00	29.449.800	1,33	Naik
21	Obat	2.607.586.448,05	4.552.772.586,05	(1.945.186.138)	(0,43)	Turun
22	Obat-obatan Lainnya	1.155.386.946,00	2.678.322.550,76	(1.522.935.605)	(0,57)	Turun

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan Persediaan (Rp)	Persentase	Trend
23	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	339.171.380,00	233.430.602,00	105.740.778	0,45	Naik
24	Natura	138.634.750,00	117.183.000,00	21.451.750	0,18	Naik
25	Pakan	29.574.000,00	86.189.820,00	(56.615.820)	(0,66)	Turun
26	Natura dan Pakan Lainnya	0	35.991.301,00	(35.991.301)	(1,00)	Turun
27	Pipa Lainnya	91.230.000,00	0	91.230.000	0,00	Naik
	Jumlah	17.634.054.428,85	18.781.524.741,64	-1.147.470.312,79	-6,11%	Turun

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah nvestasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi non permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi non permanen terdiri dari; 1)investasi dalam surat utang Negara, 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga, 3) investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen terdiri dari; 1) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara, 2) investasi permanen lainnya. Pada tahun 2024, Investasi jangka panjang non permanen neraca sebesar Rp0,00.

3.3.1.2.1.1 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.2 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.3 Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam obligasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.4 Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi dalam proyek pembangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.5 Dana Bergulir

Dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.6 Deposito Jangka Panjang

Deposito jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.7 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.8 Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tanpa ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden.

Nilai Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.524.725.887,00 dan Per 31 Desember 2023 Rp37.024.413.607,00, jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp4.500.312.280,00, 12,15%

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal

Penyertaan modal kepada BUMD yaitu kepada PERUMDAM Pelangi Timur dan PT. Pembangunan Belitung Timur disajikan dengan metode ekuitas. Dari tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tidak ada penambahan penyertaan modal.

Pada tahun 2024 total penyertaan modal pada PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur berdasarkan ekuitas bernilai Rp9.199.756.054,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.384.102.895,00, atau meningkat sebesar Rp815.653.160,00 atau 9,73%. Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDAM Pelangi Timur tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijelaskan bahwa PERUMDAM Pelangi Timur memperoleh laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp806.165.599,00, dan tahun 2024 terdapat penyesuaian laba ditahan sebesar Rp9.487.561,00 oleh KAP.

Dan untuk lebih jelas berikut disajikan pergerakan ekuitas pada BUMD PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 disandingkan dengan 2023, sebagaimana

tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 75

Ekuitas pada PERUMDAM Pelangi Timur

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	13.980.247.000,00	13.980.247.000,00
Modal Hibah	585.629.100,00	585.629.100,00
(1) Laba (Rugi) ditahan (akumulatif sd tahun 2023)	(8.181.773.205,00)	(10.296.759.526,00)
(2) Laba (Rugi) tahun berjalan tahun 2024	806.165.599,00	1.321.165.411,00
(3) Koreksi Laba Ditahan	9.487.561,00	793.820.910,00
Ekuitas	9.199.756.054,00	8.384.102.895,000

Sumber data: Laporan Keuangan PERUMDAM Pelangi Timur tahun 2024 yang sudah di audit oleh KAP

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Ekuitas BUMD Perumdam Pelangi Timur per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp815.653.160,00 atau naik senilai 9,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

PT. Pembangunan Belitung Timur nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp324.969.832,00 (data berdasarkan laporan keuangan LPE *unaudited* tahun 2024). PT. Pembangunan Belitung Timur tahun 2024 mengalami kerugian sebesar Rp265.340.880,00 berdasarkan laporan keuangan Laba/Rugi PT. Pembangunan Belitung Timur tahun 2024 (data berdasarkan laporan keuangan *unaudited* tahun 2024).

Berikut disajikan pergerakan ekuitas pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 76

Ekuitas pada PT. Pembangunan Belitung Timur

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Modal Saham	5.000.000.000,00	5.050.000.000,00
Saldo Laba (Rugi) ditahan (akumulatif)	(4.409.689.288,00)	(4.212.164.395,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(265.340.880,00)	(197.524.893,00)
Ekuitas	324.969.832,00	640.310.712,00

Sumber data: Laporan Keuangan Anaudited PT. PBT Tahun 2024 dengan Tahun pembanding 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2024, PT. Pembangunan Belitung Timur mengalami penurunan nilai ekuitas senilai

kerugian (Rp265.340.880,00), atau turun 41,44% jika dibandingkan dari tahun 2023. Data yang disajikan masih menggunakan laporan keuangan *unaudited* tahun 2024, dikarenakan data laporan keuangan *audited* tahun 2024 tidak diterima.

PT. Pembangunan Belitung Timur pada tahun 2024 berkurang nilai modal saham sebesar Rp50.000.000,00, karena adanya kelebihan pencatatan setoran modal saham.

Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Belitung Timur telah dilakukan sejak tahun 2015. BUMD ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Merry, SH, MKn Notaris di Bangka Belitung Nomor 01 tanggal 4 September 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2454852.AH.01.01. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang usaha pembangunan, jasa, perdagangan, perikanan, perindustrian, pertanian dan pengangkutan darat. Sejak perusahaan ini beroperasi sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dikarenakan operasional yang tidak berjalan lancar.

Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp32.000.000.000,00.

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta pada PT. BPD Sumsel Babel untuk tahun buku 2023 mendapatkan deviden senilai Rp4.814.815.725,37 yang diterima tahun 2024 berdasarkan hasil RUPS tanggal 6 Maret 2024. Dan di tahun 2023 untuk tahun buku 2022 diterima deviden Rp5.523.052.522,61. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada penurunan pendapatan diveden sebesar Rp708.236.797,24 atau naik 12,82%. Dan berikut disajikan bagian laba atas penyertaan modal pada pihak swasta kepada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar.

Tabel 5. 77
Bagian Laba atas Penyertaan
Modal yang Diterima Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Jenis Saham		Seri A
1	Modal Saham	19.257.000.000,00
2	Agio Saham	8.742.678.000,00
3	Sisa setoran	322.000,00
4	Jumah Setoran Saham (Modal+Agio+Sisa setoran)	28.000.000.000,00
5	Lembar Saham yang dimiliki	19,257
6	Total Lembar saham gabungan	1.167.877,50
7	Persentase kepemilikan	1,65%
8	Dividen yang dibayar untuk tahun buku 2023	4.814.815.725,37
9	Total yang telah dibayar sampai dengan tahun buku 2023	53.381.719.323,69

Untuk penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta yaitu penempatan saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar sejak tahun 2004, dengan dasar penempatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember menjadi senilai Rp32.000.000.000,00.

Atas penyertaan modal sampai dengan per 31 Desember 2024 dividen yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas penyertaan modal tahun buku 2023 adalah sebesar Rp4.814.815.725,37, dan untuk deviden tahun buku 2022 yang diterima tahun 2023 adalah sebesar Rp5.523.052.522,61 atau turun senilai 12,82%. Pembagian deviden tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Bank Sumsel Babel.

Informasi mengenai perhitungan dividen disampaikan oleh Bank Sumsel Babel melalui surat nomor 315/MGR/2/B/2024 perihal Konfirmasi Data mengenai perhitungan dividen Kabupaten Belitung Timur tahun buku 2023 dan 2022.

Besaran Dividen saham yang diterima atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk tahun buku 2023 yang diterima tahun 2024 masih menggunakan dasar perhitungan penyertaan modal dengan besaran penyertaan modal Rp28.000.000.000,00.

Pembagian dividen yang diterima berbeda pada setiap tahunnya tergantung dari keuntungan bank dan posisi kepemilikan saham pada bank tersebut. Sebagaimana pembagian deviden untuk tiga tahun terakhir yaitu, untuk tahun buku 2021 diterima dividen pada tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp4.282.259.902,25 dan untuk tahun 2022 diterima devidennya pada tahun 2023 (17 Maret 2023) sebesar Rp5.523.052.522,61 dan untuk tahun buku 2023 diterima devidennya pada tahun 2024 (8 Maret 2024) sebesar Rp4.814.815.725,37. Dan total deviden yang telah dibayarkan sampai dengan tahun buku 2023 yang terima tahun 2024 adalah sebesar Rp53.381.719.323,69.

5.3.1.2.2.2 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah

Investasi-pemberian pinjaman daerah tahun 2024 adalah Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.399.453.997.465,85 meliputi aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Tanah	301.621.431.280,85	301.630.431.280,85
Peralatan dan Mesin	507.635.347.831,53	489.558.814.974,79
Gedung dan Bangunan	793.674.401.368,73	769.446.315.855,91
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.433.310.076.081,99	1.357.268.125.861,60
Aset Tetap Lainnya	29.086.725.322,39	27.508.738.722,39
Konstruksi dlm Pengerjaan	8.186.701.487,00	8.498.517.987,00
Akumulasi Penyusutan	(1.674.060.685.906,64)	(1.524.717.404.133,25)
Jumlah	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
301.621.431.280,85	301.630.431.280,85

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp301.621.431.280,85 dan 2023 sebesar Rp301.630.431.280,85 merupakan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Hal tersebut menunjukkan tidak ada penambahan Aset Tetap Tanah di tahun 2024, sedangkan pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.000.000,00 merupakan pengurangan pencatatan Aset Tetap Tanah untuk disajikan dalam Properti Investasi karena akan dioptimalkan pemanfaatannya yang berada di Kantor Kecamatan Gantung.

Nilai Aset Tanah sebesar Rp301.621.431.280,85 tersebut terdiri dari 827 bidang tanah. Dari 827 bidang tanah tersebut sebanyak 396 bidang telah bersertifikat dan 431 bidang belum bersertifikat. Dari 431 bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut 333 bidang merupakan Tanah untuk Jalan baik Jalan Kabupaten maupun Jalan Lainnya dan sisanya 98 bidang merupakan Tanah Gedung Bangunan dan Tanah Kosong Lainnya.

Dari 98 bidang Tanah Gedung Bangunan dan Tanah Kosong Lainnya terdapat 1 (satu) bidang tanah perumahan dinas guru ini merupakan hibah hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung, di mana pada tahun 2007 dilakukan penilaian oleh PT.Sucofindo dengan luas 20.000 m2 senilai Rp200.000.000,00 dengan keterangan tanah tanpa memiliki surat. Dan telah dilakukan proses sertifikasi untuk tanah perumahan dinas guru pada Dinas Pendidikan tersebut menjadi 6 bidang tanah seluas 11.314 m2 dengan sertifikat no: 29.07.01.02.4.00188, 29.07.01.02.4.00189, 29.07.01.02.4.00190, 29.07.01.02.4.00191, 29.07.01.02.4.00192 dan 29.07.01.02.4.00193.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-01/L.9.14.2/Gp.2/09/2024 telah dilaksanakan penyerahan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik dengan luas 3.354 m2 dari Kejaksaan Belitung Timur yang merupakan hasil pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Belitung Timur yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, bidang tanah tersebut terdiri dari : Sertifikat no.19.06.03.02.01922 luas 1000 m2, sertifikat no.19.07.01.02.02163 luas 330 m2, sertifikat no.29.07.01.02.02795 luas 585 m2, sertifikat no.29.07.01.02.02825 luas 1080 m2 dan sertifikat no.29.07.01.02.07246 dengan luas 359 m2.

Data aset tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdapat Tanah Kosong Lainnya seluas 431,17 Ha belum tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sesuai dengan surat pernyataan Bupati nomor: 228.b/ASET/KAB.BELTIM/VII/2021 tanggal 11 Mei 2022 telah dilakukan survey dan pemeriksaan terhadap lahan tersebut

sehingga didapat pengurangan luasan lahan tersebut yang awalnya 431,17 Ha menjadi seluas 228,11 Ha. Selanjutnya Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengoptimalkan kegiatan untuk memastikan sisa lahan 228,11 Ha dengan melakukan rapat pada tanggal 3 Agustus 2022 dan bersurat kepada Kantor ATR/BPN wilayah Belitung Timur serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PT.Timah, Tbk terkait lahan yang bersinggungan langsung dengan IUP PT.Timah,Tbk. Setelah didapat data-data valid terkait luasan lahan perkantoran tersebut maka dilakukan mapping oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga didapat luasan lahan milik Pemerintah Kabupaten Belitung seluas 225,708 Ha. Untuk aset tanah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur seluas 225,708 sedang dilakukan proses penetapan ulang Surat Keputusan Bupati Belitung Timur.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
507.635.347.831,53	489.558.814.974,79

Saldo tersebut merupakan aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 78

Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	489.558.814.974,79	24.250.058.130,82	6.173.525.274,08	507.635.347.831,53
	Jumlah	489.558.814.974,79	24.250.058.130,82	6.173.525.274,08	507.635.347.831,53

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin total nilai Rp24.250.058.130,82 terdiri dari belanja Intrakompatabel peralatan dan mesin Rp21.637.802.774,00, Mutasi tambah berasal dari Reklasifikasi antar akun sebesar Rp60.934.800,00 dan Hibah Masuk sebesar Rp2.551.320.556,82 dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Intrakompatabel Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	649.448.016,00
2	Sekretariat Daerah	1.488.527.500,00
3	Kantor Camat Gantung	109.432.000,00
4	Kantor Camat Damar	82.150.000,00
5	Kantor Camat Simpang Renggang	15.270.000,00
6	Kantor Camat Dendang	38.945.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	402.289.000,00
8	Dinas Perhubungan	2.896.535.500,00
9	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	2.590.443.455,00

No.	Uraian	Jumlah
10	Dinas Kesehatan	1.790.891.740,00
11	UPTD Puskesmas Manggar	287.025.000,00
12	UPTD Puskesmas Mengkubang	38.340.000,00
13	UPTD Puskesmas Gantung	198.281.000,00
14	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	47.830.000,00
15	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	65.098.000,00
16	UPTD Puskesmas Simpang Renggiang	46.225.000,00
17	UPTD Puskesmas Dendang	16.530.000,00
18	Dinas Pendidikan	5.843.026.912,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	99.638.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	324.575.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daeah	389.505.000,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68.600.000,00
23	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	172.775.000,00
24	Dinas Perikanan	572.404.962,00
25	Dinas Pertanian dan Pangan	181.146.000,00
26	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	272.087.000,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	357.876.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	215.337.000,00
29	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.342.000,00
30	Inspektorat	233.314.000,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	1.123.547.439,00
32	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	134.462.750,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	99.100.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.450.000,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	462.750.500,00
	JUMLAH	21.637.802.774,00

B. Reklasifikasi antar akun

No.	Reklasifikasi		Jumlah	Keterangan
1	4.1.0	Sekretariat Daerah	49.850.000,00	Dari Belanja Barjas ke PM
2	7.3.6	Dinas kesehatan	5.984.800,00	Dari JIJ ke PM
3	8.1.1	Dinas Pendidikan	5.100.000,00	Dari ATL ke PM
		Total	21.684.800,00	

C. Hibah Masuk

No.	HIBAH 2024		Jumlah	Keterangan
1	7.2.1	UPTD Muhammad Zein	562.965.045,00	1. hibah PT. Elefan Adiwidia Bentela Rp500.000.000 2. hibahThomasong dental Supply Rp19.600.000 3. hibah PT. Worckhadrt Pharma Indo Rp4.620.000 4. Hibah Provinsi Rp45.045.045 Jumlah total hibah masuk di UPTD Muhammad Zein 569.265.045,00, dari jumlah tersebut ada barang

No.	HIBAH 2024		Jumlah	Keterangan
				ekstrakompatabel sejumlah Rp6.300.000,00 sehingga total hibah masuk yang dicatat sebesar Rp 562.965.045,00
2	11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	1.557.572.446,00	HIBAH DIRJEN PSP berupa Crawler Excavator + Attachment
3	17.1.1	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	124.500.000,00	HIBAH DARI KEMENTRIAN
4	18.3.1	Satuan Polisi Pamong Praja	36.395.000,00	HIBAH DARI KEMENTRIAN
5	9.5.1	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	249.888.065,83	HIBAH DARI KEMENTRIAN
	TOTAL		2.551.320.556,82	

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.173.525.274,08 merupakan Penghapusan Peralatan dan Mesin pada beberapa OPD karena lelang sebesar Rp1.616.875.450,00, Penghapusan karena pemindahtangan/hibah pada sebesar Rp122.038.000,00 dan Reklasifikasi ke Aset Rusak sebesar Rp2.276.561.610,08, Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa sebesar Rp290.977.500,00 Reklasifikasi ke Belanja Modal Rp369.110.500,00 dan Aset dibawah kapitalisasi sebesar Rp1.497.962.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Lelang				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	4.56.1	Kantor Camat Dendang	158.000.000,00	SK No HK.00.03-472 Tahun 2024
2	7.2.1	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	239.308.000,00	
3	7.3.1	Dinas Kesehatan	420.600.000,00	
4	7.3.2	UPTD Puskesmas Manggar	29.600.000,00	
5	7.3.3	UPTD Puskesmas Mengkubang	12.000.000,00	
6	7.3.6	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	263.650.000,00	
7	8.1.1	Dinas Pendidikan	73.022.450,00	
8	11.2.1	Dinas Perikanan	18.600.000,00	
9	13.3.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	
10	16.4.1	Dinas Lingkungan Hidup	325.095.000,00	
11	19.2.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47.000.000,00	
JUMLAH			1.616.875.450,00	
B. Hibah Keluar				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	9.6.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.038.000,00	Hibah Mobil Ke Yayasan Maju Jaya Istiqomah
JUMLAH			122.038.000,00	
C. Reklafikasi ke Aset Rusak				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
RUSAK BERAT				
1	7.3.1	Dinas Kesehatan	72.050.000,00	

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
2	7.3.2	UPTD Puskesmas Manggar	18.500.000,00	
3	7.3.3	UPTD Puskesmas Mengkubang	18.500.000,00	
4	7.3.4	UPTD Puskesmas Gantung	902.805.754,08	
5	7.3.8	UPTD Puskesmas Dendang	166.186.000,00	
6	8.1.1	Dinas Pendidikan	132.924.000,00	
7	13.4.1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	304.388.008,00	
8	15.2.1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	256.394.248,00	
9	18.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	190.450.000,00	
10	19.2.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214.363.600,00	
JUMLAH			2.276.561.610,08	

D. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	247.572.000,00	
2	14.1.1	Inspektorat	455.000.000,00	
3	16.4.1	Dinas Lingkungan Hidup	3.958.000,00	
4	2.2.1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	43.992.500,00	
JUMLAH			290.977.500,00	

E. Reklasifikasi ke Belanja Modal

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	274.870.250,00	Reklas dari PM ke GB
2	6.2.1	Dinas Perhubungan	56.268.250,00	Reklas dari PM Ke JJI
3	8.1.1	Dinas Pendidikan	37.972.000,00	Reklas dari PM ke JJI
JUMLAH			369.110.500,00	

F. Aset di bawah Kapitalisasi

Kode UPB	Nama OPD	Jumlah
1.1.1	Sekretariat DPRD	9.180.000,00
4.51.1	Kantor Camat Gantung	4.014.000,00
4.54.1	Kantor Camat Damar	42.200.000,00
4.56.1	Kantor Camat Dendang	1.220.000,00
5.2.1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	7.389.000,00
6.2.1	Dinas Perhubungan	107.550.000,00
7.2.1	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	92.303.352,00
7.3.1	Dinas Kesehatan	6.910.000,00
7.3.2	UPTD Puskesmas Manggar	18.125.000,00
7.3.3	UPTD Puskesmas Mengkubang	640,00
7.3.4	UPTD Puskesmas Gantung	15.650.000,00
7.3.5	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	7.930.000,00
7.3.7	UPTD Puskesmas Simpang Renggiang	3.750.000,00
7.3.6	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	7.605.000,00
7.3.8	UPTD Puskesmas Dendang	8.250.000,00

Kode UPB	Nama OPD	Jumlah
8.1.1	Dinas Pendidikan	974.374.020,00
9.4.1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	28.250.000,00
9.5.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.795.000,00
10.1.1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	5.850.000,00
11.2.1	Dinas Perikanan	3.473.842,00
11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	23.610.000,00
12.2.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.820.000,00
12.3.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.400.000,00
13.3.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.130.000,00
13.4.1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.242.000,00
14.1.1	Inspektorat	1.600.000,00
16.4.1	Dinas Lingkungan Hidup	2.470.000,00
17.1.1	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	7.560.000,00
18.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.325.000,00
21.2.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.346.000,00
	Jumlah	1.497.962.214,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
793.674.401.368,73	769.446.315.855,91

Saldo tersebut merupakan aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 79

Rincian Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	769.446.315.855,91	24.591.005.634,53	362.920.121,71	793.674.401.367,73
	Jumlah	769.446.315.855,91	24.591.005.634,53	369.920.121,71	793.674.401.367,73

Penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.591.005.634,53 dari Belanja Modal Gedung Bangunan tahun 2024 sebesar Rp21.625.491.627,24. Selanjutnya ada mutasi tambah yang berasal dari Hibah sebesar Rp2.257.303.220,29 Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp310.388.297,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp298.822.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Modal Intrakompatabel Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Gedung dan Bangunan
1	Sekretariat DPRD	165.826.978,00
2	Kantor Camat Simpang Renggang	115.430.600,00
3	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	1.496.675.100,00
4	Dinas Kesehatan	990.479.119,00

No	Nama OPD		Gedung dan Bangunan	
5	UPTD Puskesmas Simpang Pesak		299.480.285,00	
6	Dinas Pendidikan		15.786.467.492,00	
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		72.180.000,00	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		122.544.000,00	
9	Dinas Perikanan		1.111.390.950,00	
10	Dinas Pertanian dan Pangan		5.500.000,00	
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		151.052.500,00	
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		199.370.000,00	
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		199.836.603,00	
14	Inspektorat		276.200.000,00	
15	Dinas Kebudayaan & Pariwisata		633.058.000,00	
	JUMLAH		21.625.491.627,00	
B. Hibah Masuk				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	8.1.1	Dinas Pendidikan	2.257.303.220,29	Hibah dari Kementerian
JUMLAH			2.257.303.220,29	
C. Belanja Reklasifikasi Dari Barang Dan Jasa				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	1.1.1	Sekretariat DPRD	149.296.000,00	
2	7.3.1	Dinas Kesehatan	8.000.000,00	
3	7.2.1	RSUD Muhammad Zein	11.694.000,00	
4	12.3.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	141.398.237,00	
JUMLAH			157.296.000,00	
D. Reklasifikasi Belanja Modal				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	274.870.250,00	Belanja Reklas dari Peralatan dan mesin ke Gedung dan Bangunan
2	7.3.1	Dinas Kesehatan	23.952.300,00	Belanja Reklas dari Jalan, Jaringan , dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan
	JUMLAH		298.822.550,00	

Sedangkan pengurangan aset Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp362.920.121,71 merupakan penghapusan aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.01.03.796 TAHUN 2024 sebesar Rp79.781.513,71 Reklasifikasi ke Belanja Modal Lainnya Rp219.978.376,00 Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp48.350.000,00 dan Aset dibawah kapitalisasi sebesar Rp14.810.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penghapusan

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	14.1.1	Inspektorat	14.962.500,00	Berdasarkan Kep. Bupati Belitung Timur Nomor HK.01.03.796 TAHUN 2024
2	4.1.3	Satuan Polisi Pamong Praja	64.819.013,71	
JUMLAH			79.781.514,71	

B. Reklasifikasi ke Belanja Modal

No.	SKPD		Nilai	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1.	11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	2.000.000,00	Reklas dari GB ke KDP
2.	12.2.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.639.500,00	Reklas dari GB ke KDP
3.	16.4.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.500.000,00	Reklas dari GB ke KDP
4.	11.2.1	Dinas Perikanan	40.638.876,00	Reklas dari GB ke JJI
5.	11.2.1	Dinas Perikanan	70.200.000,00	Reklas dari GB ke PM Barang Ekstrakompatabel
JUMLAH			219.978.376,00	

C. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD		Nilai	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1.	11.2.1	Dinas Perikanan	48.350.000,00	
JUMLAH			48.350.000,00	

D. Aset dibawah Kapitalisasi

No.	SKPD		Nilai	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1.	11.2.1	Dinas Perikanan	14.810.232,00	Reklas dari GB ke KDP
JUMLAH			14.810.232,00	

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.433.310.076.081,99	1.357.268.125.861,60

Saldo tersebut merupakan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 80
Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.357.268.125.861,60	76.093.335.320,39	51.385.100,00	1.433.310.076.081,60
	Jumlah	1.357.268.125.861,60	76.093.335.320,39	51.385.100,00	1.433.310.076.081,31

Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp76.093.335.320,39 terdiri dari Belanja Modal Intrakompatabel Tahun 2024 sebesar Rp69.392.666.064,00. Mutasi Tambah berasal dari Reklas dari KDP yang telah selesai Rp420.956.000,00 Reklas dari Belanja Modal Rp134.879.125,32 Reklas masuk dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.000.000,00 Hibah Masuk Rp6.142.834.130,33 dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Modal Intrakompatabel Jalan Jaringan dan Irigasi

No	OPD	Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	67,214,651,869.00
2	Dinas Perhubungan	1,798,803,000
3	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	197,740,000.00
4	Dinas Kesehatan	151,695,334.00
5	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	29,775,861.00

B. Reklasifikasi Dari KDP Yang Sudah Selesai

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	5.2.1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	420.956.000,00	

C. Reklasifikasi Dari Peralatan Dan Mesin

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	56.268.250,00	Reklas dari PM ke JJI
2	8.1.1	Dinas Pendidikan	37.972.000,00	Reklas dari PM ke JJI
3	11.2.1	Dinas Perikanan	40.638.876,00	Reklas dari GB ke JJI
Total			134.879.126,00	

D. Reklasifikasi Dari Belanja Barang Jasa

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	7.3.1	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	

E. Hibah Masuk

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	5.2.1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.660.814.000,00	Dari Kementerian
2	6.2.1	Dinas Perhubungan	2.418.681.101,00	Dari Kementerian
3	8.1.1	Dinas Pendidikan	63.339.029,33	Dari Kementerian
Total			6.142.834.130,033	

Sedangkan Pengurangan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp51.385.100,00 terdiri dari Reklasifikasi ke Belanja Modal sebesar Rp29.937.100,00 Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp21.448.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

A. Reklasifikasi Ke Belanja Modal				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	7.3.1	Dinas Kesehatan	5.984.800,00	Dari JJI ke PPM
2	7.3.1	Dinas Kesehatan	23.952.300,00	Dari JJI ke GB
		Total	29.937.100,00	
B. Reklasifikasi Ke Aset Rusak				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	19.2.1	Badan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	21.448.000,00	
		Total	134.879.126,00	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
29.086.725.322,39	27.508.738.722,39

Saldo tersebut merupakan aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 81
Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	27.508.738.722,39	1.583.086.600,00	5.100.000,00	29.086.725.322,39
	Jumlah	27.508.738.722,39	1.583.086.600,00	5.100.000,00	29.086.725.322,39

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.583.086.600,00 berasal dari realisasi Belanja BOS APBN TA 2024 pada Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk pengurangannya terdapat reklas belanja Aset Tetap Lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.100.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
8.186.701.487,00	8.498.517.987,00

Saldo tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 82
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	KDP pada Sekretariat Daerah	334.906.000,00	0	0	334.906.000,00
2	KDP pada Kantor Camat Simpang Pesak	48.730.000,00	0	0	48.730.000,00
3	KDP pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.311.028.427,00	0	420.956.000,00	3.890.072.427,00
4	KDP pada Dinas Perhubungan	2.151.075.000,00	0	0	2.151.075.000,00
5	KDP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	329.100.000,00	0	0	329.100.000,00
6	KDP pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	420.030.500,00	0	0	420.030.500,00
7	KDP pada Dinas Perikanan	208.703.000,00	0	0	208.703.000,00
8	KDP pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	348.144.060,00	0	0	348.144.060,00
9	KDP pada Inspektorat	43.300.000,00	0	0	43.300.000,00
10	KDP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.750.000,00	0	0	32.750.000,00
11	KDP pada Dinas Lingkungan Hidup	239.501.000,00	0	0	239.501.000,00
12	KDP pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	99.639.500,00	0	99.639.500,00
13	KDP pada Dinas Pertanian dan Pangan	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00
14	KDP pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2.000.000,00	7.500.000,00	0	9.500.000,00
15	KDP pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	29.250.000,00	0	0	29.250.000,00
	Jumlah	8.498.517.987,00	109.139.500,00	420.956.000,00	8.186.701.487,00

Penambahan KDP sebesar Rp109.139.500,00 merupakan reklafikasi antar akun belanja modal pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Reklas Belanja Modal				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	2.000.000,00	Reklas Belanja KDP dari Gedung dan Bangunan
2	12.2.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.639.500,00	Reklas Belanja KDP dari Gedung dan Bangunan (DED gedung PLUT)
3	17.1.1	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	7.500.000,00	Reklas Belanja KDP dari Gedung dan Bangunan
JUMLAH			109.139.500,00	

Pengurangan KDP sebesar Rp420.956.000,00 merupakan nilai KDP yang direklas dan dikapitalisasi ke Aset Gedung Bangunan di Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(1.674.060.685.906,64)	(1.524.717.404.133,25)

Saldo tersebut merupakan akumulasi penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 83

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan Mesin	(394.530.458.657,21)	(28.146.113.277,01)	(2.483.767.402,21)	(420.198.689.264,78)
2	Bangunan Gedung	(187.723.184.786,86)	(15.626.084.639,60)	37.215.697.932,32	(240.564.967.358,60)
3	Jalan Irigasi Jaringan	(942.457.875.922,18)	(41.763.173.893,94)	27.439.510.114,61	(1.011.660.559.930,73)
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	(16.916.240,00)	1.619.553.111,00	(1.636.469.351,00)
	Jumlah	(1.524.717.404.133,25)	(85.552.228.051,61)	(63.790.993.755,72)	(1.674.060.685.906,64)

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp85.552.228.051,61 merupakan nilai beban penyusutan tahun 2024. Sedangkan nilai pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp63.790.993.755,72 merupakan nilai akumulasi penyusutan atas aset yang dihapuskan, dihibahkan, dan dibebankan di tahun sebelumnya dan koreksi saldo awal karena perubahan aplikasi dari SIMDA BMD ke Valid BMD.

5.3.1.4 DANA CADANGAN

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

Dana cadangan tahun 2024 Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.669.889.672,59 dan per 31 Desember 2023 Rp4.568.806.133.59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 84
Rincian Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	2024	2023
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	969.408.873,00	969.408.873,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.700.480.799,59	3.599.397.260,59
	Jumlah	3.669.889.672,59	4.568.806.133,59

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp898.916.461,00 atau turun sebesar 19,68%.

Adapun rincian atas tagihan jangka panjang pada tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 85
Rekapitulasi Kerugian Daerah Tahun 2024

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
A	Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	0,00	969.408.873,00
1	Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Proses Penetapan	989.108.873,00	19.700.000,00	0,00	0,00	969.408.873,00
3	Informasi	284.140,00	0,00-	284.140,00	0,00	0,00-
B	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain	3.667.681.807,71	1.429.018.619,00	1.428.416.494,71	0,00	810.246.694,00
1	Penetapan	791.471.740,71	35.382.667,00	703.387.271,71	0,00	52.701.802,00
2	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informasi	2.876.210.067,00	1.393.635.952,00	725.029.223,00	0,00	757.544.892,00
C	Pihak Ketiga	14.150.475.831,29	5.969.685.449,95	6.290.556.275,75	0,00	1.890.234.105,59
1	Penetapan	10.001.167.929,91	3.890.388.858,48	5.692.832.575,75	0,00	417.946.495,68
2	Proses Penetapan	1.363.434.551,47	804.495.811,47	0,00	0,00	558.938.740,00
3	Informasi	2.785.873.349,91	1.274.800.780,00	597.723.700,00	0,00	913.348.869,91
	Jumlah	18.807.550.652,00	7.418.404.068,95	7.719.256.910,46	0,00	3.669.889.672,59

Tabel 5. 86
Rekapitulasi Kerugian Daerah Tahun 2023

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
A	Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	0,00	969.408.873,00
1	Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proses Penetapan	989.108.873,00	19.700.000,00	0,00	0,00	969.408.873,00
3	Informasi (HP APIP)	284.140,00	0,00	284.140,00	0,00	0,00

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
B	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain	3.622.582.255,71	1.311.372.579,00	1.393.961.672,71	0,00	917.248.004,00
1	Penetapan	791.471.740,71	35.382.667,00	703.387.271,71	0,00	52.701.802,00
2	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informasi (HP BPK)	2.766.997.515,00	1.275.989.912,00	686.454.401,00	0,00	804.553.202,00
4	Informasi (HP APIP)	64.113.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	59.993.000,00
C	Pihak Ketiga	13.390.504.502,29	4.609.434.969,95	6.098.920.275,75	0,00	2.682.149.256,59
1	Penetapan	10.001.167.929,91	3.778.846.158,48	5.692.832.575,75	0,00	529.489.195,68
2	Proses Penetapan	1.363.434.551,47	107.417.811,47	0,00	0,00	1.256.016.740,00
3	Informasi (HP BPK)	1.947.110.480,00	708.142.000,00	406.087.700,00	0,00	832.880.780,00
4	Informasi (HP APIP)	78.791.540,91	15.029.000,00	0,00	0,00	63.762.540,91
	Jumlah	18.002.479.771,00	5.940.507.548,95	7.493.166.088,46	0,00	4.568.806.133,59

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga tahun 2024 Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
5.295.763.207,00	5.244.263.207,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.295.763.207,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.244.263.207,00 merupakan nilai atas aset tetap yang tidak mempunyai wujud fisik untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, terdiri dari:

Tabel 5. 87
Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	5.244.263.207,00	51.500.000,00	0,00	5.295.763.207,00
	Jumlah	5.244.263.207,00	51.500.000,00	0,00	5.295.763.207,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud berbentuk Software sebesar Rp51.500.000,00 pada tahun 2024 merupakan dari Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Software	51.500.000,00	Belanja Modal
	Jumlah		51.500.000,00	

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
7.099.021.868,57	34.882.854.258,49

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.099.021.868,57 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.882.854.258,49. Adapun Aset lain-lain pada tahun 2023 sebesar Rp34.882.854.258,49 terdiri dari Rp4.801.012.258,00 merupakan asset rusak OPD dan sebesar Rp30.081.842.000,00 merupakan dana **Treasury Deposit Facility** (TDF) dari Pemerintah Pusat. Dana TDF tersebut telah masuk ke RKUD Kabupaten Belitung Timur tahun 2024.

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.099.021.868,57 merupakan Aset Rusak pada beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88
Rekapitulasi Aset Rusak OPD

No.	Nama SKPD	SALDO AWAL	TOTAL MUTASI TAMBAH 2024	TOTAL MUTASI KURANG 2024	SALDO AKHIR
1	Pengelola Barang	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	4.760.000,00	-	-	4.760.000,00
3	Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan	14.215.000,00	-	-	14.215.000,00
4	Kantor Camat Kelapa Kampit	43.200.000,00	-	-	43.200.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.472.171.600,00	-	-	3.472.171.600,00
6	Dinas Kesehatan	-	72.050.000,00	-	72.050.000,00
7	UPTD Puskesmas Manggar	66.937.900,00	18.500.000,00	-	85.437.900,00
8	UPTD Puskesmas Mengkubang	-	18.500.000,00	-	18.500.000,00
9	UPTD Puskesmas Gantung	-	902.805.754,08	-	902.805.754,08
10	UPTD Puskesmas Dendang	-	166.186.000,00	-	166.186.000,00
11	Dinas Pendidikan	1.118.205.258,00	132.924.000,00	-	1.251.129.258,00
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	15.086.000,00	-	-	15.086.000,00

No.	Nama SKPD	SALDO AWAL	TOTAL MUTASI TAMBAH 2024	TOTAL MUTASI KURANG 2024	SALDO AKHIR
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	304.388.008,00	-	304.388.008,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	256.394.248,00	-	256.394.248,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.841.500,00	-	-	4.841.500,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	190.450.000,00	-	190.450.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.200.000,00	235.811.600,00	-	238.011.600,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000,00	-	-	300.000,00
19	Dinas Perpustakaan	9.095.000,00	-	-	9.095.000,00
	JUMLAH	4.801.012.258,00	2.298.009.610,08	-	7.099.021.868,08

Penambahan sebesar Rp2.279.509.610,08 yang merupakan aset rusak pada beberapa OPD yang merupakan pengusulan perubahan aset tetap ke asset rusak dari OPD tersebut.
Tidak ada pengurangan asset rusak pada tahun 2024.

5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
(4.936.073.949,00)	(4.512.276.413,00)

Saldo tersebut merupakan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 89
Rincian Akumulasi
Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO.	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Daerah	468.780.000,00	465.721.665,00	3.058.335,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.351.000,00	73.027.500,00	39.323.500,00
3	Dinas Perhubungan	234.592.289,00	187.160.003,00	47.432.286,00
4	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	253.391.000,00	242.391.000,00	11.000.000,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.000.000,00	6.333.333,00	3.666.667,00

NO.	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
6	Dinas Pendidikan	622.112.548,00	586.349.020,00	35.763.528,00
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	113.270.000,00	113.270.000,00	-
8	Dinas Perikanan	148.500.000,00	148.500.000,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.750.000,00	1.750.000,00	-
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	367.483.000,00	367.483.000,00	-
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	369.658.000,00	369.658.000,00	-
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	323.551.912,00	312.740.188,00	10.811.724,00
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	75.600.000,00	39.375.000,00	36.225.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.120.000,00	198.120.000,00	-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.540.003.200,00	1.325.014.704,00	214.988.496,00
16	Dinas Perpustakaan	96.911.000,00	75.383.000,00	21.528.000,00
	TOTAL	4.936.073.949,00	4.512.276.413,00	423.797.536,00

5.3.1.5.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mendapatkan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp212.451.000,00, yang mana dana tersebut belum masuk ke rekening kas umum daerah, namun sudah dilakukan pencatatan. *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Berikut untuk lebih rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 90

Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	30.250.000,00	0,00
2	DBH SDA Minyak Bumi-LO	2.000,00	0,00
3	DBH Sawit-LO	164.972.000,00	0,00
4	DBH PBB-LO	17.227.000,00	0,00
Jumlah		212.451.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada tahun 2024 sebesar Rp212.451.000,00 dan tahun 2023 Rp0,00, hal ini karena pada tahun 2023 karena keterbatasan pada aplikasi yang digunakan

(SIMDA) dana tersebut di catat pada akun aset lain-lain dan tahun 2024 disesuaikan dengan akun yang berkenaan.

5.3.1.6 PROPERTI INVESTASI
5.3.1.6.1 PROPERTI INVESTASI

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
9.000.000,00	0,00

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.000.000,00 terdiri dari :

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Properti Investasi	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Jumlah		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

Penambahan Properti Investasi sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Kantor Kecamatan Gantung sebesar Rp9.000.000,00

5.3.2 KEWAJIBAN
5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2024 terdiri dari sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 91
Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	298.634.379,00	289.712,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	101.590.104,00	280.074.213,50
3	Utang Belanja	8.430.933.956,12	7.670.270.220,46
Jumlah		8.831.158.439,12	7.950.634.145,96,12

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp8.831.158.439,12 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.950.634.145,96, naik sebesar Rp880.524.293,16 atau 11,07%.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang penghitungan pihak ketiga tahun 2024 adalah sebesar Rp298.634.379,00 dan tahun 2023 sebesar Rp289.712,00. Berikut untuk lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 92
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	296.259.882,00	-
2	Utang PPh 21	537.500,00	238.000,00
3	Utang PPh 23	390.110,00	51.712,00
4	Utang PPN Pusat	1.446.887,00	-
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		298.634.379,00	289.712,00

Berdasarkan pada tabel di atas dijelaskan bahwa utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 adalah sebesar Rp298.634.379,00, dan tahun 2023 sebesar Rp289.712,00 atau meningkat sebesar Rp298.344.667,00.

Utang PFK tahun 2023 adalah berupa Utang Pajak PPh pasal 21 Rp238.000,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp51.712,00 yang terdapat pada Puskesmas Gantung, dan telah disetor pada tahun 2024.

Utang PFK tahun 2024 adalah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 93
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.777.454,00	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024 (Iuran BPJS Kesehatan 4% untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2024)	Inspektorat	11.662.688,00	0,00
3	Utang PPh 23 (utang PFK (PPN, PPh21, PPh23) pada Sekolah TA.2024)	Dinas Pendidikan	390.110,00	51.712,00
4	Utang PPh 21 (utang PFK (PPN, PPh 21, PPh 23) pada Sekolah TA.2024)	Dinas Pendidikan	537.500,00	238.000,00

No	Uraian	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5	Utang PPN Pusat (penyesuaian hutang PFK (PPN, PPh21, PPh23) pada Sekolah TA.2024)	Dinas Pendidikan	1.446.887,00	0,00
6	Utang Iuran Jaminan Kesehatan (Penyesuaian Hutang Iuran Jaminan Kesehatan (PNS dan PPPK) pada Dinas Kesehatan TA. 2024)	Dinas Kesehatan	279.819.740,00	0,00
Jumlah			298.634.379,00	289.712,00

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa utang PFK untuk iuran jaminan kesehatan terdiri dari utang iuran jaminan kesehatan ASN tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa iuran jaminan kesehatan 4% senilai Rp4.777.454,00, dan utang iuran jaminan kesehatan ASN tahun 2024 (iuran BPJS Kesehatan 4% untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS (bulan Desember tahun 2024) pada Inspektorat Daerah sebesar Rp11.662.688,00 dan utang iuran jaminan kesehatan (PNS dan PPPK) pada Dinas Kesehatan atas tahun 2024 (bulan Januari sampai dengan Desember 2024) berdasarkan surat tagihan BPJS Kesehatan Nomor 1044/III-04.0525 perihal Tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) 4% Jasa Pelayanan Medis Pemda Kabupaten Belitung Timur dan Nomor 394/III-04/0225 perihal Tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) 4% Jasa Pelayanan Medis P3K Pemda Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah nilai Rp279.819.740,00.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3 Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.5 Pendapatan yang Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka untuk tahun 2024 sebesar Rp101.590.104,00 dan tahun 2023 sebesar Rp280.074.213,50 secara keseluruhan menurun sejumlah Rp178.484.109,5 atau turun 63,73%.
Untuk lebih rinci pendapatan diterima dimuka dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 94
Pendapatan yang Diterima Dimuka

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	71.754.488,00	36.054.888,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	-	34.308.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah NonPersil-Tanah Kering	29.835.616,00	197.153.328,50
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	12.557.997,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		101.590.104,00	280.074.213,50

5.3.2.1.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pembayaran pada tahun berikutnya karena jasa sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran. Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 Rp8.430.933.956,12 dan per 31 Desember 2023 Rp7.670.270.220,46 sebesar Rp756.372.997,09 turun 9,95%.

Tabel 5. 95
Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A.	Utang Belanja Pegawai	4.647.810.637,00	68.142.588,00
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	0	15.101.000,00
2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	0	801.000,00
3	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	0	2.500.000,00
4	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	0	2.000,00
5	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0	49.738.588,00
6	Utang Belanja Pegawai BLUD	4.647.810.637,00	0
B	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.122.798.186,37	5.815.883.070,37
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0	11.458.531,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.003.000,00	0
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.112.795.186,37	5.804.424.539,37
C	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.644.100,00	71.644.100,00
1	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	71.644.100,00	71.644.100,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
D	Utang Belanja Bagi Hasil	1.588.681.032,75	1.714.600.462,09
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.480.848.481,25	1.565.867.939,79
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	107.832.551,50	148.732.522,30
Jumlah Utang Belanja		8.430.933.956,12	7.670.270.220,46

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

A. Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp4.647.810.637,00 dan tahun 2023 sebesar Rp68.142.588,00, atau naik sebesar Rp4.579.668.049,00. Utang belanja pegawai merupakan utang belanja pegawai pada BLUD, Untuk lebih rinci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. 96
Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Mengkubang	8.270.055	0,00
2	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Manggar	10.189.766	0,00
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	27.051.132	0,00
4	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Gantung	20.348.348	0,00
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Renggiang	5.004.134	0,00
6	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Simpang Pesak	10.437.148	0,00
7	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Dendang	2.488.542	0,00
8	Utang Belanja Pegawai BLUD	RSUD Muhammad Zein	4.564.021.512	0,00
Jumlah			4.647.810.637,00	0,00

B. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp2.122.798.186,37 dan tahun 2023 sebesar Rp5.815.883.070,37 atau turun sebesar Rp3.693.084.884,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 97
Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	11.458.531,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.003.000,00	0,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.112.795.186,37	5.804.424.539,37
	Jumlah	2.122.798.186,37	5.815.883.070,37

Untuk lebih rinci utang belanja barang dan jasa tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 98
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2023
1	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan NON PNS pada Puskesmas Kelapa Kampit	-	11.458.531,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (DLH)	10.003.000,00	-
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (RSUD M.ZIEN)	2.099.277.269,37	5.804.424.539,37
4	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Dendang)	413.138,00	-
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Gantung)	3.404.092,00	-
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Kelapa Kampit)	4.017.154,00	-
7	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Manggar)	1.903.794,00	-
8	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Mengkubang)	1.095.065,00	-
9	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Renggiang)	1.083.102,00	-
10	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Simpang Pesak)	1.601.572,00	-
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	2.122.798.186,37	5.815.883.070,37

C. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.644.100,00 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 99
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Pengadaan Aset Tetap Sesuai Progres Fisik Berdasarkan Klaim PPTK dan Pengawas Lapangan (CV ENZET INDO KONTRUKSI) TA 2022 Dinas PUPR	71.644.100,00	71.644.100,00
	Jumlah	71.644.100,00	71.644.100,00

Utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor ini adalah merupakan utang tahun 2022 yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan per 31 Desember 2024, utang ini pada tahun 2023 disajikan pada utang jangka pendek lainnya, dan di tahun 2024 dipindahkan ke akun hutang belanja sesuai dengan nomenklatur terbaru.

Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi utang merupakan belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor ini adalah berupa utang

pengadaan aset tetap sesuai progres fisik berdasarkan klaim PPTK dan pengawas lapangan (CV ENZET INDO KONTRUKSI) TA 2022 dinas PUPR sebesar Rp71.644.100,00 dan ini dikarenakan putus kontrak. Berdasarkan berita acara kontrak kerja Nomor: 01/KPJP-APBD/Normalisasi/SDA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 paket pekerjaan normalisasi dan revitalisasi saluran air Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang; surat pemutusan kontrak Nomor 600/04/995/DISPUTR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022; Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor: 01/BAP/Normalisasi/DPUTR-SDA/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

D. Utang Belanja Bagi Hasil

Utang belanja bagi hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.681.032,75 dan tahun 2023 sebesar Rp1.714.600.462,09. Dan untuk lebih rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 100
Utang Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.480.848.481,25	1.565.867.939,79
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	107.832.551,50	148.732.522,30
	Jumlah Utang Belanja Bagi Hasil	1.588.681.032,75	1.714.600.462,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 ada penurunan sebesar Rp125.919.429,34 atau turun 7,34% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.2.1.7 Pendapatan yang ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.8 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.2.2.2 Utang kepada lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang kepada lembaga keuangan bank pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.2.2.3 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.2.2.4 Utang Kepada Masyarakat
Utang kepada masyarakat pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00

5.3.3 EKUITAS

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.542.859.601.827,69 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 101
Ekuitas

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Ekuitas	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
	Jumlah	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24

Rincian ekuitas sebesar Rp1.542.859.601.827,69 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 102
Rincian Ekuitas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	99.361.985.114,80	176.241.805.063,83
2.	Investasi Jangka Panjang	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
3.	Aset Tetap	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29
4.	Dana Cadangan	0	0
5.	Aset Lainnya	11.341.051.799,16	40.183.647.186,08
6.	Jumlah Aset (1 s.d 5)	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20
7.	Kewajiban Jangka Pendek	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
8.	Kewajiban Jangka Panjang	0	0
9.	Jumlah Kewajiban (7 + 8)	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
	Ekuitas (Aset-Kewajiban)	1.551.690.760.266,81	1.674.692.772.260,24

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang mencerminkan Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi pendapatan LO tahun 2024 sebesar Rp801.032.308.367,88 mengalami penurunan sebesar Rp158.214.112.030,27 atau 16,49% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp959.246.420.398,15. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis

pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 103
Pendapatan - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)
2.	Pendapatan Transfer – LO	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17
	Jumlah	801.032.308.367,88	959.246.420.398,15	(158.214.112.030,27)	(16,49)

Pada pencatatan Pendapatan-LO terdapat perbedaan dengan Pendapatan-LRA. Hal ini dikarenakan adanya mutasi tambah kurang terhadap piutang pendapatan, pendapatan diterima dimuka, dan adanya pendapatan hibah dari pemerintah Pusat serta Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp108.514.470.206,73 mengalami penurunan sebesar Rp4.273.182.583,40 atau 3,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp112.787.652.790,13. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 104
Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	45.637.336.986,00	54.628.010.995,89	(8.990.674.009,89)	(16,46)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.630.468.885,37	5.523.052.522,61	107.416.362,76	1,94
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17
	Jumlah	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp45.637.336.986,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.990.674.009,89 atau 16,46% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp54.628.010.995,89. Adapun rincian pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 105
Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	92.853.815,00	148.864.522,00	(56.010.707,00)	(37,63)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
2	Pajak Restoran	1.806.272.877,00	1.595.677.391,00	210.595.486,00	13,20
3	Pajak Hiburan	48.762.692,00	174.503.750,00	(125.741.058,00)	(72,06)
4	Pajak Reklame	539.176.124,50	322.291.239,01	216.884.885,49	67,29
5	Pajak Penerangan Jalan	11.463.421.593,00	8.498.244.799,00	2.965.176.794,00	34,89
6	Pajak Parkir	2.569.000,00	13.176.300,00	(10.607.300,00)	(80,50)
7	Pajak Air Tanah	47.291.349,00	58.725.754,00	(11.434.405,00)	(19,47)
8	Pajak Sarang Burung Walet	53.090.000,00	81.505.000,00	(28.415.000,00)	(34,86)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.551.066.062,00	35.502.750.453,50	(11.951.684.391,50)	(33,66)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.549.595.136,00	3.020.336.856,00	2.529.258.280,00	83,74
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.483.238.337,50	5.211.934.931,38	(2.728.696.593,88)	(52,35)
	Jumlah	45.637.336.986,00	54.628.010.995,89	(8.990.674.009,89)	(16,46)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan
Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	45.637.336.986,00
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	45.008.024.533,50
Selisih	629.312.452,50
Uraian keterangan selisih:	
Piutang Pajak tahun 2024	8.475.188.247,50
Piutang Pajak tahun 2023	(8.013.357.890,50)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	-
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	167.482.095,50
Jumlah	629.312.452,50

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.999.104.178,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.637.908.116,00 atau 49,20% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.361.196.062,00. Kenaikan pendapatan retribusi tahun 2024 ada pada beberapa subjek retribusi seperti pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan lain-lain. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 106
Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.861.645.995,00	1.351.077.840,00	2.510.568.155,00	185,82
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	708.308.000,00	750.859.000,00	(42.551.000,00)	(5,67)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	96.532.000,00	90.755.000,00	5.777.000,00	6,37
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	421.044.500,00	306.994.000,00	114.050.500,00	37,15
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	76.667.000,00	(76.667.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	5.436.000,00	2.832.000,00	2.604.000,00	91,95
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	30.203.100,00	(30.203.100,00)	(100,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	435.482.185,00	476.397.237,00	(40.915.052,00)	(8,59)
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	610.458.000,00	634.375.000,00	(23.917.000,00)	(3,77)
10	Retribusi Terminal-LO	27.000.000,00	29.645.000,00	(2.645.000,00)	(8,92)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	129.943.000,00	83.975.000,00	45.968.000,00	54,74
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	60.000.000,00	56.500.000,00	3.500.000,00	6,19
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	5.400.000,00	2.848.000,00	2.552.000,00	89,61
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	91.073.000,00	78.206.000,00	12.867.000,00	16,45
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.305.621.823,00	1.092.817.838,00	212.803.985,00	19,47
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	34.308.000,00	19.116.000,00	15.192.000,00	79,47
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	94.365.835,00	277.928.047,00	(183.562.212,00)	(66,05)
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	112.485.840,00	0,00	112.485.840,00	100,00
	Jumlah	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20

Rincian pendapatan retribusi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 107
Pendapatan Retribusi Daerah Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	(175.740.515,00)	1.351.077.840,00	(1.526.818.355,00)	(113,01)
2	RSUD Muhammad Zein	3.226.623.995,00	0,00	3.226.623.995,00	100,00
3	UPT Puskesmas Manggar	113.860.000,00	0,00	113.860.000,00	100,00
4	UPT Puskesmas Mengkubang	51.408.000,00	0,00	51.408.000,00	100,00
5	UPT Puskesmas Gantung	164.739.000,00	0,00	164.739.000,00	100,00
6	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	126.060.000,00	0,00	126.060.000,00	100,00
7	UPT Puskesmas Simpang Pesak	53.657.000,00	0,00	53.657.000,00	100,00

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8	UPT Puskesmas Renggiang	69.039.000,00	0,00	69.039.000,00	100,00
9	UPT Puskesmas Dendang	54.947.000,00	0,00	54.947.000,00	100,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.296.020.258,00	1.453.177.885,00	(157.157.627,00)	(10,81)
11	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	159.493.840,00	19.116.000,00	140.377.840,00	734,35
12	Dinas Pertanian dan Pangan	5.400.000,00	2.848.000,00	2.552.000,00	89,61
13	Dinas Lingkungan Hidup	707.033.000,00	821.880.000,00	(114.847.000,00)	(13,97)
14	Dinas Perhubungan	123.532.000,00	197.067.000,00	(73.535.000,00)	(37,31)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	731.080.000,00	(731.080.000,00)	(100,00)
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	57.390.000,00	51.320.000,00	6.070.000,00	11,83
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	215.478.000,00	195.036.000,00	20.442.000,00	10,48
19	Dinas Perikanan	187.768.400,00	44.989.000,00	142.779.400,00	317,37
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.172.178.500,00	337.343.100,00	834.835.400,00	247,47
21	Sekretariat Daerah	71.191.000,00	69.131.237,00	2.059.763,00	2,98
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	206.888.132,00	30.000.000,00	176.888.132,00	589,63
23	Kecamatan Manggar	15.790.000,00	11.996.500,00	3.793.500,00	31,62
24	Kecamatan Gantung	18.510.000,00	10.000.000,00	8.510.000,00	85,10
25	Kecamatan Kelapa Kampit	35.395.000,00	18.171.000,00	17.224.000,00	94,79
26	Kecamatan Simpang Pesak	27.097.568,00	6.297.500,00	20.800.068,00	330,29
27	Kecamatan Damar	15.345.000,00	10.665.000,00	4.680.000,00	43,88
	Jumlah	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20

Perbedaan perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	7.999.104.178,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.621.143.001,00
Selisih	377.961.177,00
Uraian keterangan selisih :	
Piutang Retribusi Tahun 2024	2.536.432.810,82
Piutang Retribusi Tahun 2023	(2.103.595.119,82)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2024	(90.339.015,00)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2023	97.728.496,00
Koreksi SA piutang retribusi pelayanan kesehatan BPJS	(62.039.515,00)
Koreksi SA piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan	(226.480,00)
Jumlah	377.961.177,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO merupakan pencatatan atas penerimaan laba dari penyertaan modal Pemerintah Daerah (Dividen) pada

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan). Adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp5.630.468.885,37 mengalami kenaikan sebesar Rp107.416.362,76 atau 1,94% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.523.052.522,61. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja positif berupa laba bersih Bank Sumselbabel dan BUMD Perumdam Belitung Timur yang tumbuh cukup signifikan sehingga menyebabkan deviden yang diterima oleh pemegang saham juga meningkat.

Tabel 5. 108
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61	(708.236.797,24)	(12,82)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	815.653.160,00	0,00	815.653.160,00	100,00
	Jumlah	5.630.468.885,37	5.523.052.522,61	107.416.362,76	1,94

Perbedaan perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	5.630.468.885,37
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA	4.814.815.725,37
Selisih	815.653.160,00
Uraian keterangan selisih :	
Penyesuaian laba/laba ditahan pada Perumdam pelangi Timur TA.2024	815.653.160,00
Jumlah	815.653.160,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-Lain PAD yang SAH merupakan kelompok penerimaan yang tidak diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah. Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat tidak rutin.

Lain-lain PAD yang Sah untuk periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.247.560.157,36 mengalami kenaikan sebesar Rp1.972.166.947,73 atau 4,17% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp47.275.393.209,63. Adapun rincian lain-lain PAD yang sah-LO dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 109 Lain-lain PAD yang Sah					
No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0,00	953.462.500,00	(953.462.500,00)	(100,00)
2	Jasa Giro-LO	2.311.872.180,00	3.833.273.547,00	(1.521.401.367,00)	(39,69)
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	12.071.263,00	(12.071.263,00)	(100,00)
4	Pendapatan Bunga-LO	2.150.213.419,00	1.695.876.067,00	454.337.352,00	26,79
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	4.469.313.342,31	(4.469.313.342,31)	(100,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	457.287.944,37	136.526.860,60	320.761.083,77	234,94
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	110.235.661,62	99.994.295,40	10.241.366,22	10,24
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	8.765.530,00	57.950.700,00	(49.185.170,00)	(84,87)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	86.546.844,00	2.106.159.177,00	(2.019.612.333,00)	(95,89)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	44.122.638.578,37	33.910.765.457,32	10.211.873.121,05	30,11
	Jumlah	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17

Rincian Lain-lain PAD yang Sah per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 110 Lain-lain PAD yang Sah Per OPD					
No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	RSUD Muhammad Zein	34.500.068.237,37	33.910.765.457,32	589.302.780,05	1,74
2	UPT Puskesmas Manggar	2.650.053.809,00	0,00	2.650.053.809,00	100,00
3	UPT Puskesmas Mengkubang	1.072.590.495,00	0,00	1.072.590.495,00	100,00
4	UPT Puskesmas Gantung	2.259.457.022,00	0,00	2.259.457.022,00	100,00
5	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.681.486.869,00	0,00	1.681.486.869,00	100,00
6	UPT Puskesmas Simpang Pesak	788.744.759,00	0,00	788.744.759,00	100,00
7	UPT Puskesmas Renggiang	618.663.542,00	0,00	618.663.542,00	100,00
8	UPT Puskesmas Dendang	551.573.845,00	0,00	551.573.845,00	100,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.624.650,00	54.499.350,00	(49.874.700,00)	(91,51)
10	Dinas Perhubungan	0,00	1.035.000,00	(1.035.000,00)	(100,00)
11	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	50.750,00	(50.750,00)	(100,00)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.028.000,00	2.069.000,00	(41.000,00)	(1,98)
13	Dinas Perikanan	108.000,00	120.021.600,00	(119.913.600,00)	(99,91)
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.004.880,00	0,00	2.004.880,00	100,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.116.156.048,99	13.186.952.052,31	(8.070.796.003,32)	(61,20)
	Jumlah	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17

Perbedaan perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	49.247.560.157,36
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	42.359.425.659,36
Selisih	6.888.134.498,00
Uraian keterangan selisih :	
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024	13.797.115.820,50
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	(5.554.046.509,50)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2024	(11.251.089,00)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2023	14.863.622,00
Koreksi piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah (denda air minum) pada DPUPRP2KP	(93.600,00)
Reklas pendapatan keg operasional ke keg non operasional (surplus penjualan peralatan dan mesin)	(451.683.950,00)
Penyesuaian pengurangan kerugda tahun 2024	(898.916.461,00)
Penyesuaian pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir terhadap piutang dana bergulir	(7.853.335,00)
Jumlah	6.888.134.498,00

5.4.1.2 **PENDAPATAN TRANSFER – LO**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp676.651.341.851,00 mengalami penurunan sebesar Rp158.647.506.028,00 atau 18,99% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp835.298.847.879,00.

Tabel 5. 111
Rincian pendapatan transfer -LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	633.944.984.834,00	772.128.801.415,00	(138.183.816.581,00)	(17,90)
	Dana Perimbangan -LO	603.679.527.834,00	706.837.058.415,00	(103.157.530.581,00)	(14,59)
	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	26.408.103.000,00	(26.408.103.000,00)	(100,00)
	Dana Desa-LO	0,00	38.883.640.000,00	(38.883.640.000,00)	(100,00)
	Insentif Fiskal-LO	30.100.485.000,00	0,00	30.100.485.000,00	100,00
	DBH Sawit-LO	164.972.000,00	0,00	164.972.000,00	100,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	42.706.357.017,00	63.170.046.464,00	(20.463.689.447,00)	(32,39)
	Jumlah	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk periode tahun 2024 secara total terealisasi sebesar Rp603.679.527.834,00 mengalami penurunan sebesar Rp103.157.530.581,00 atau 14,59% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp706.837.058.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112
Pendapatan Dana Perimbangan - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil	54.117.670.000,00	185.853.732.842,00	(131.736.062.842,00)	(70,88)
2	Dana Alokasi Umum	449.044.881.195,00	431.104.192.225,00	17.940.688.970,00	4,16
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00	10.066.970.531,00	65,14
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00	570.872.760,00	0,77
	Jumlah	603.679.527.834,00	706.837.058.415,00	(103.157.530.581,00)	(14,59)

Dana Bagi Hasil - LO

Realisasi Dana Bagi Hasil – LO tahun 2024 sebesar Rp54.117.670.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp131.736.062.842,00 atau sebesar 70,88% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp185.853.732.842,00 dengan rincian :

Tabel 5. 113
Pendapatan Dana Bagi Hasil - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.084.483.000,00	20.214.507.218,00	(10.130.024.218,00)	(50,11)
2	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	5.164.193.000,00	6.819.020.226,00	(1.654.827.226,00)	(24,27)
3	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPD	87.970.000,00	427.743.988,00	(339.773.988,00)	(79,43)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
4	Dana Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi	389.752.000,00	1.426.365.922,00	(1.036.613.922,00)	(72,68)
5	Dana Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.566.308.000,00	3.659.494.039,00	(2.093.186.039,00)	(57,20)
6	Dana Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Royalty	24.877.020.000,00	139.481.134.936,00	(114.604.114.936,00)	(82,16)
7	Dana Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	7.694.978.000,00	8.721.071.302,00	(1.026.093.302,00)	(11,77)
8	Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan	4.252.966.000,00	5.104.395.211,00	(851.429.211,00)	(16,68)
	Jumlah	54.117.670.000,00	185.853.732.842,00	(131.736.062.842,00)	(70,88)

Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Dana Alokasi Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp449.044.881.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.940.688.970,00 atau 4,16% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp431.104.192.225,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO tahun 2024 sebesar Rp25.520.279.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.066.970.531,00 atau sebesar 65,14% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp15.453.308.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	525.563.040,00	0,00	525.563.040,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	2.305.497.701,00	0,00	2.305.497.701,00	100,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.230.336.544,00	0,00	2.230.336.544,00	100,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	153.535.000,00	0,00	153.535.000,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	4.550.727.450,00	0,00	4.550.727.450,00	100,00
6	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	682.056.750,00	3.222.198.300,00	(2.540.141.550,00)	(78.83)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	12.966.609.000,00	7.022.918.700,00	5.943.690.300,00	84,63
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	358.000.000,00	710.000.000,00	(352.000.000,00)	(49,58)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	508.214.000,00	(508.214.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	121.500.000,00	(121.500.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	1.747.953.998,00	0,00	1.747.953.998,00	100,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	0,00	327.073.000,00	(327.073.000,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	0,00	672.247.900,00	(672.247.900,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	0,00	2.380.047.052,00	(2.380.047.052,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO	0,00	489.110.000,00	(489.110.000,00)	(100,00)
	Jumlah	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00	10.066.970.531,00	65,14

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO tahun 2024 sebesar Rp74.996.697.156,00 mengalami kenaikan sebesar Rp570.872.760,00 atau sebesar 0,77% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp74.425.824.396,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 115
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.538.070.957,00	18.929.600.334,00	(391.529.377,00)	(2,07)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.510.000.000,00	0,00	1.510.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	38.486.304.000,00	37.128.317.550,00	1.357.986.450,00	3,66
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	877.565.000,00	1.044.537.000,00	(166.972.000,00)	(15,99)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.168.960.000,00	2.113.020.000,00	55.940.000,00	2,65
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	419.950.000,00	289.580.000,00	130.370.000,00	45,02
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	8.587.172.445,00	8.820.155.539,00	(232.983.094,00)	(2,64)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.985.643.960,00	2.120.210.150,00	(134.566.190,00)	(6,35)
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa-an-LO	1.177.383.539,00	1.105.065.528,00	72.318.011,00	6,54
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	512.014.700,00	357.682.000,00	154.332.700,00	43,15

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	386.798.866,00	266.043.220,00	120.755.646,00	45,39
12	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	162.575.000,00	(162.575.000,00)	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	1.691.165.065,00	(1.691.165.065,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	346.833.689,00	397.873.010,00	(51.039.321,00)	(12,83)
	Jumlah	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00	570.872.760,00	0,77

b. Dana Insentif Daerah
 Dana Insentif Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp26.408.103.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 116
Dana Insentif Daerah – LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	26.408.103.000,00	(26.408.103.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	26.408.103.000,00	(26.408.103.000,00)	(100,00)

c. Dana Desa
 Sesuai Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, untuk pencatatan dana desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan dana desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp38.883.640.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117
Dana Desa

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Desa	0,00	38.883.640.000,00	(38.883.640.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	38.883.640.000,00	(38.883.640.000,00)	(100,00)

d. Dana Insentif Fiskal
 Dana Insentif Fiskal untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp30.100.485.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 118
Dana Insentif Fiskal

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	0,00	30.100.485.000,00	100,00
	Jumlah	30.100.485.000,00	0,00	30.100.485.000,00	100,00

e. DBH Sawit
DBH Sawit untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp164.972.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 119
DBH Sawit

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Sawit	164.972.000,00	0,00	164.972.000,00	100,00
	Jumlah	164.972.000,00	0,00	164.972.000,00	100,00

Perbedaan perhitungan Pendapatan Transfer Pusat-LO dengan Pendapatan Transfer Pusat -LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	633.944.984.834,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	703.539.971.834,00
Selisih	(69.594.987.000,00)
Uraian keterangan selisih :	
Penyesuaian Penerimaan TDF Tahun 2023 (LRA)	(30.081.842.000,00)
Penyesuaian Pencatatan TDF Tahun 2023 (diluar DBH Sawit/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	47.479.000,00
Dana Desa yang tidak masuk di catatan LO secara sistem	(39.725.596.000,00)
DBH Lainnya - DBH Sawit (TDF yang belum diterima kasnya)	164.972.000,00
Jumlah	(69.594.987.000,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp42.706.357.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.463.689.447,00 atau sebesar 32,39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp63.170.046.464,00 dengan rincian :

Tabel 5. 120
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	42.706.357.017,00	60.613.046.464,00	(17.906.689.447,00)	(29,54)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	10.085.667.330,00	16.622.500.735,00	(6.536.833.405,00)	(39.33)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	3.765.581.305,00	9.997.541.077,00	(6.231.959.772,00)	(62,33)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.087.708.724,00	23.316.856.808,00	(4.229.148.084,00)	(18,14)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	1.302.610.595,00	2.563.410.088,00	(1.260.799.493,00)	(49,18)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.464.789.063,00	8.112.737.756,00	352.051.307,00	4,34
2.	Bantuan Keuangan	0,00	2.557.000.000,00	(2.557.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	42.706.357.017,00	63.170.046.464,00	(20.463.689.447,00)	(32,39)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	42.706.357.017,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA	42.531.381.418,00
Selisih	174.975.599,00
Uraian keterangan selisih :	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024	8.022.999.592,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023	9.210.217.076,00
piutang bagi hasil pajak rokok	(1.362.193.083,00)
Jumlah	174.975.599,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp15.866.496.310,15 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.706.576.581,13 atau sebesar 42,17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.159.919.729,02. Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 121
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah - LO	15.384.374.297,15	2.747.040.315,02	12.637.333.982,13	460,03
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)
	Jumlah	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp15.384.374.297,15, mengalami kenaikan sebesar Rp12.637.333.982,13 atau sebesar 460,03% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.747.040.315,02. Rincian pendapatan hibah, terdiri dari :

Tabel 5. 122
Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	11.542.038.558,44	36.800.000,00	11.505.238.558,44	31.264,24
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.065.321.693,71	2.309.142.270,35	756.179.423,36	32,75
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	8.977.500,00	(8.977.500,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	224.065.345,00	(224.065.345,00)	(100,00)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	777.014.045,00	168.055.199,67	608.958.845,33	362,36
	Jumlah	15.384.374.297,15	2.747.040.315,02	12.637.333.982,13	460,03

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 sebesar Rp482.122.013,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.930.757.401,00 atau 94,27% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8.412.879.414,00, dengan rincian :

Tabel 5. 123
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	482.122.013,00	1.152.504.058,00	(670.382.045,00)	(58,17)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	7.260.375.356,00	(7.260.375.356,00)	(100,00)
	Jumlah	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah -LO dengan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah - LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah-LO	15.866.496.310,15
Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah-LRA	482.122.013,00
Selisih	15.384.374.297,15
Uraian keterangan selisih :	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	11.542.038.558,44

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.065.321.693,71
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	777.014.045,00
Jumlah	15.384.374.297,15

5.4.2 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya pengelompokkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp867.666.687.807,34, mengalami penurunan sebesar Rp49.241.816.077,20 atau sebesar 5,37% dibandingkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp916.908.503.884,54.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp722.805.327.592,19 mengalami kenaikan sebesar Rp42.774.524.301,55 atau 6,29% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp680.030.803.290,64. Adapun rincian beban operasi, sebagai berikut:

Tabel 5. 124
Beban Operasi - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	404.594.252.545,00	348.460.794.122,00	56.133.458.423,00	16,11
2	Beban Barang dan Jasa	290.866.844.715,71	307.184.960.488,68	(16.318.115.772,97)	(5,31)
3	Beban Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71
4	Beban Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40
5	Beban Penyisihan Piutang	934.242.583,48	29.543.679,96	904.698.903,52	3.062,24
	Jumlah	722.805.327.592,19	680.030.803.290,64	42.774.524.301,55	6,29

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp404.594.252.545,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.133.458.423,00 atau 16,11% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp348.460.794.122,00. Adapun rincian beban pegawai, sebagai berikut:

Tabel 5. 125
Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	214.864.029.546,00	189.175.843.318,00	25.688.186.228,00	13,58
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	119.062.009.067,00	102.381.558.627,00	16.680.450.440,00	16,29

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.016.206.044,00	43.386.547.407,00	(1.370.341.363,00)	(3,16)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.772.762.076,00	12.509.590.195,00	263.171.881,00	2,10
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	343.918.860,00	422.454.575,00	(78.535.715,00)	(18,59)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	581.600.000,00	584.800.000,00	(3.200.000,00)	(0,55)
7	Beban Pegawai BLUD	14.953.726.952,00	0,00	14.953.726.952,00	100,00
	Total Beban Pegawai	404.594.252.545,00	348.460.794.122,00	56.133.458.423,00	16,11

Perbedaan perhitungan Beban pegawai -LO dengan Belanja Pegawai-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban pegawai	404.594.252.545,00
Belanja Pegawai	403.168.134.091,00
Selisih	1.426.118.454,00
Uraian keterangan selisih :	
Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	4.647.810.637,00
Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	(68.142.588,00)
Penyesuaian hutang barjas (jaspel ASN) RSUD ke beban pegawai karena tahun 2024 dianggarkan ke anggaran belanja pegawai	(3.468.213.477,00)
Penyesuaian hutang jaminan kesehatan ke beban pegawai	296.259.882,00
Penghapusan hutang insentif pegawai pada DPMP TSP	18.404.000,00
Jumlah	1.426.118.454,00

5.4.2.1.2 **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp290.866.844.715,71 mengalami penurunan sebesar Rp16.318.115.772,97 atau 5,31% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp307.184.960.488,68, adanya penyesuaian realisasi tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan, yang semula berdasarkan Laporan Keuangan Audited TA. 2023 sebesar Rp306.668.211.470,51 menjadi sebesar Rp307.184.960.488,68 yaitu penambahan dari beban lain-lain senilai Rp516.749.018,17.

Adapun rincian beban barang dan jasa TA. 2024 diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

Tabel 5. 126
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis	62.989.497.527,36	60.784.821.888,81	2.204.675.638,55	3,63
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.085.090,00	652.408.058,17	(644.322.968,17)	(98,76)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.630.707.607,00	(118.309.500,00)	1.749.017.107,00	(1.478,34)
4	Beban Jasa Kantor	81.068.102.432,00	96.603.797.835,00	(15.535.695.403,00)	(16,08)
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.330.425.024,00	19.214.521.348,00	1.115.903.676,00	5,81
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.525.371.920,00	3.452.517.038,00	(1.927.145.118,00)	(55,82)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	468.895.000,00	722.171.910,00	(253.276.910,00)	(35,07)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	55.300.000,00	82.500.000,00	(27.200.000,00)	(32,97)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.189.087.150,00	2.792.011.500,00	(602.924.350,00)	(21,59)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.012.613.500,00	591.759.400,00	420.854.100,00	71,12
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	556.431.999,00	579.736.052,00	(23.304.053,00)	(4,02)
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.346.188,00	1.640.116.270,00	360.229.918,00	21,96
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	288.900.430,00	371.690.987,00	(82.790.557,00)	(22,27)
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	23.416.720,00	25.991.304,00	(2.574.584,00)	(9,91)
15	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.926.281.660,00	12.311.639.587,00	(385.357.927,00)	(3,13)
16	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.986.993.280,00	4.384.578.463,14	(397.585.183,14)	(9,07)
17	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	274.333.700,00	1.614.156.150,00	(1.339.822.450,00)	(83,00)
18	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.560.049.418,00	40.222.683.728,96	1.337.365.689,04	3,32
19	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.747.815.000,00	9.274.295.000,00	(4.526.480.000,00)	(48,81)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.640.000,00	31.900.000,00	190.740.000,00	597,93
21	Beban Barang dan Jasa BOS	19.299.513.250,00	15.921.320.167,10	3.378.193.082,90	21,22
22	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.829.110.647,00	0,00	3.829.110.647,00	100,00
23	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.053.575.410,35	36.028.653.301,50	(4.975.077.891,15)	(13,81)
	Total Beban Barang dan Jasa	290.866.844.715,71	307.184.960.488,68	(16.318.115.772,97)	(5,31)

Perbedaan perhitungan Beban barang dan jasa-LO dengan Belanja barang dan jasa-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban barang dan jasa	290.866.844.715,71
Belanja barang dan jasa	283.694.328.636,00
Selisih	7.172.516.079,71
Uraian keterangan selisih :	
Penambahan Persediaan Tahun 2024	1.147.471.312,79
selisih reklas	58.737.500,00
ektrakomp	1.630.707.607,00
pendapatan hibah	4.385.181.228,71
penyesuaian hutang	23.520.917,00
koreksi SA persediaan	85.833.220,21
selisih penambahan dan pembayaran hutang pada rsud (Rp1.009.821.819-Rp976.649.757)	33.172.062,00
pembayaran hutang barjas pada PKM Kelapa Kampit	(11.458.531,00)
Berkurangnya beban pemeliharaan	(180.649.237,00)
Jumlah	7.172.516.079,71

Dari rincian beban barang dan jasa sebesar Rp290.866.844.715,71 tersebut, terdapat Beban Persediaan dari barang pakai habis, Beban Barang Tak Habis Pakai, beban barang dan jasa BOS, beban barang dan jasa BLUD, dan beban barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp72.430.133.500,96. Adapun rincian beban persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 127
Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	saldo awal	Koreksi Saldo Awal	pembelian LRA	Reklas dr Aset Tetap	Reklas Persediaan (+)	Sumbangan Pihak Ketiga	Pendapatan hibah	Reklas Persediaan (-)	Reklas Ke Aset Tetap (-)	Persediaan Kadaluarsa (-)	Saldo Akhir persediaan	Perhitungan Beban
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	75.128.750,00	78.724.500,00	210.702.037,00	-	-	-	-	-	-	-	139.455.000,00	225.100.287,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	919.975.219,40	-	1.711.482.872,00	-	-	-	-	-	-	-	1.194.162.115,40	1.437.295.976,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.901.000,00	-	2.107.969.125,00	-	-	-	-	-	-	-	1.990.000,00	2.107.880.125,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	-	-	3.637.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637.500,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	227.746.500,00	-	256.796.340,00	-	-	-	-	-	-	-	129.764.000,00	354.778.840,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	35.864.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.864.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	249.500,00	-	175.380.553,00	-	-	-	-	-	-	-	265.000,00	175.365.053,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	140.056.049,67	-	203.610.000,00	-	-	214.049.000,00	-	-	-	-	233.482.933,03	324.232.116,64
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.013.181.882,29	7.108.720,21	6.115.936.296,00	242.572.000,00	-	-	214.417.498,00	-	-	-	6.787.055.535,11	5.806.160.861,39
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	249.834.546,00	-	-	-	-	59.480.000,00	-	-	13.200.000,00	177.154.546,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	84.915.000,00	-	-	-	59.480.000,00	-	-	-	-	-	30.636.000,00	113.759.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	30.880.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	34.480.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	154.137.827,95	-	46.768.000,00	-	-	-	-	-	-	-	148.731.847,59	52.173.980,36

No.	Uraian	saldo awal	Koreksi Saldo Awal	pembelian LRA	Reklas dr Aset Tetap	Reklas Persediaan (+)	Sumbangan Pihak Ketiga	Pendapatan hibah	Reklas Persediaan (-)	Reklas Ke Aset Tetap (-)	Persediaan Kadaluarsa (-)	Saldo Akhir persediaan	Perhitungan Beban
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.176.731,00	-	1.592.584.525,00	-	-	-	-	-	-	-	141.256.300,00	1.605.504.956,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.732.990,00	-	1.289.553.800,00	-	-	-	-	-	-	-	92.271.600,00	1.302.015.190,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.653.855,00	-	4.631.287.635,00	-	-	-	16.508.000,00	-	-	-	393.996.155,00	4.518.453.335,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.800.000,00	-	137.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.540.000,00	142.220.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.724.700,00	-	1.618.883.895,00	-	-	-	-	-	-	-	466.504.700,00	1.585.103.895,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	62.193.906,50	-	1.581.968.479,00	813.000,00	-	-	-	-	10.600.000,00	-	82.990.430,00	1.551.384.955,50
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.553.828.655,71	-	3.585.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	385.749.735,71	4.753.758.920,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	728.960.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	728.960.844,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	539.446.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	539.446.960,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.873.500,00	-	660.227.700,00	-	-	-	-	-	-	-	4.726.000,00	662.375.200,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.004.000,00	-	1.166.807.000,00	92.342.500,00	-	-	-	-	-	-	2.675.000,00	1.259.478.500,00

No.	Uraian	saldo awal	Koreksi Saldo Awal	pembelian LRA	Reklas dr Aset Tetap	Reklas Persediaan (+)	Sumbangan Pihak Ketiga	Pendapatan hibah	Reklas Persediaan (-)	Reklas Ke Aset Tetap (-)	Persediaan Kadaluarsa (-)	Saldo Akhir persediaan	Perhitungan Beban
25	Beban Obat-Obatan-Obat	3.174.161.317,05	-	1.299.369.756,00	-	-	-	3.829.985.494,71	-	-	-	2.607.181.448,05	5.696.335.119,71
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.054.246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.246,76
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	233.430.602,00	-	9.013.526.972,00	-	-	-	110.221.236,00	-	-	-	339.171.380,00	9.018.007.430,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	117.183.000,00	-	3.152.118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	138.634.750,00	3.130.666.250,00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	86.189.820,00	-	279.295.000,00	-	-	-	-	-	-	-	29.574.000,00	335.910.820,00
30	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	8.085.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.085.090,00
31	Beban Pipa-Pipa Lainnya	-	-	91.230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	91.230.000,00	-
32	Beban Persediaan BOS	24.250.825,00	-	7.404.785.933,00	-	-	-	-	-	-	-	33.912.500,00	7.395.124.258,00
33	Beban Persediaan BLUD	4.937.974.863,31	-	16.289.144.896,00	-	-	-	-	-	-	291.046.914,75	4.141.897.998,96	16.794.174.845,60
34	Beban Persediaan BOK PKM	-	-	554.190.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	554.190.400,00
	JUMLAH	18.781.524.741,64	85.833.220,21	66.773.968.154,00	339.327.500,00	59.480.000,00	214.049.000,00	4.171.132.228,71	59.480.000,00	10.600.000,00	291.046.914,75	17.634.054.428,85	72.430.133.500,96

5.4.2.1.3 **Beban Hibah**

Beban Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp24.870.987.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp890.482.748,00 atau sebesar 3,71% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp23.980.505.000,00. Adapun rincian beban hibah sebagai berikut :

Tabel 5. 128
Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.492.751.500,00	13.283.990.000,00	2.208.761.500,00	16,63
2	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.264.246.248,00	9.685.210.000,00	(1.420.963.752,00)	(14,67)
3	Beban Hibah Dana BOS	104.100.000,00	103.340.000,00	760.000,00	0,74
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	964.890.000,00	907.965.000,00	56.925.000,00	6,27
5	Beban Hibah Dana BOSP	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
	TOTAL	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71

5.4.2.1.4 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada tahun 2024 sebesar Rp1.539.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.000.000,00 atau sebesar 310,40% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp375.000.000,00. Beban bantuan sosial tahun 2023 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.350.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp189.000.000,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 129
Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.350.000.000,00	160.000.000,00	1.190.000.000,00	743,75
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	189.000.000,00	215.000.000,00	(26.000.000,00)	(12,09)
	TOTAL	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40

5.4.2.1.5 **Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp934.242.583,48, mengalami kenaikan sebesar

Rp904.698.903,52 atau 3.062,24% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp29.543.679,96.
Adapun rincian beban penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5. 130
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	491.896.171,00	177.900.787,85	313.995.383,15	176,50
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	334.804.085,48	35.974.700,00	298.829.385,48	830,67
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	107.542.327,00	(184.331.807,89)	291.874.134,89	(158,34)
	TOTAL	934.242.583,48	29.543.679,96	904.698.903,52	3.062,24

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp85.976.085.587,61 mengalami penurunan sebesar Rp43.918.293.987,54 atau 33,81% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp129.894.379.575,15. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi, terdiri dari:

Tabel 5. 131
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.146.113.277,01	34.514.398.640,60	(6.368.285.363,59)	(18,45)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.626.084.639,60	16.665.603.798,00	(1.039.519.158,40)	(6,24)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.763.173.895,00	78.460.921.757,55	(36.697.747.862,55)	(46,77)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	16.916.240,00	0,00	16.916.240,00	100,00
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	423.797.536,00	253.455.379,00	170.342.157,00	67,21
	TOTAL	85.976.085.587,61	129.894.379.575,15	(43.918.293.987,54)	(33,81)

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatandan Mesin tahun 2024 sebesar Rp28.146.113.277,01 mengalami penurunan sebesar Rp6.368.285.363,59 atau 18,45% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp34.514.398.640,60.
Beban penyusutan peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 132
Rincian Beban penyusutan peralatan dan mesin per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	434.340.802,00	260.504.668,00	173.836.134,00	66,73

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
2	Sekretariat Daerah	1.596.835.704,00	1.873.402.048,00	(276.566.344,00)	(14,76)
3	Kantor Camat Manggar	216.676.183,00	149.157.396,00	67.518.787,00	45,27
4	Kantor Camat Gantung	170.049.129,00	179.465.494,00	(9.416.365,00)	(5,25)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	114.575.440,00	144.620.848,00	(30.045.408,00)	(20,78)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	74.327.285,00	104.040.322,00	(29.713.037,00)	(28,56)
7	Kantor Camat Damar	103.454.164,00	109.486.261,00	(6.032.097,00)	(5,51)
8	Kantor Camat Simpang Renggang	84.354.743,00	93.049.991,00	(8.695.248,00)	(9,34)
9	Kantor Camat Dendang	(61.374.299,00)	109.333.025,00	(170.707.324,00)	(156,14)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	663.480.339,00	748.334.842,00	(84.854.503,00)	(11,34)
11	Dinas Perhubungan	1.511.434.605,00	1.820.622.339,00	(309.187.734,00)	(16,98)
12	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	7.089.164.889,00	9.598.568.623,00	(2.509.403.734,00)	(26,14)
13	Dinas Kesehatan	(30.807.114,00)	614.805.653,00	(645.612.767,00)	(105,01)
14	UPTD Puskesmas Manggar	802.277.670,00	903.823.797,00	(101.546.127,00)	(11,24)
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	402.108.884,01	492.754.306,00	(90.645.421,99)	(18,40)
16	UPTD Puskesmas Gantung	(373.341.501,00)	571.510.398,00	(944.851.899,00)	(165,33)
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	591.377.301,00	715.703.157,00	(124.325.856,00)	(17,37)
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	244.774.584,00	459.480.319,00	(214.705.735,00)	(46,73)
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	384.385.078,00	480.474.701,00	(96.089.623,00)	(20,00)
20	UPTD Puskesmas Dendang	105.849.703,00	367.641.399,00	(261.791.696,00)	(71,21)
21	Dinas Pendidikan	6.265.454.734,00	5.456.543.250,00	808.911.484,00	14,82
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	372.422.783,00	410.311.137,00	(37.888.354,00)	(9,23)
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112.032.922,00	110.664.972,00	1.367.950,00	1,24
24	Badan Penanggulangan Bencana Daeah	551.227.221,00	500.536.651,00	50.690.570,00	10,13
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.863.944,00	372.004.393,00	(139.140.449,00)	(37,40)
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	261.709.416,00	345.726.328,00	(84.016.912,00)	(24,30)
27	Dinas Perikanan	583.349.795,00	617.437.516,00	(34.087.721,00)	(5,52)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	430.772.568,00	407.565.041,00	23.207.527,00	5,69
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	195.556.451,00	192.893.815,00	2.662.636,00	1,38
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	398.640.474,00	322.528.364,00	76.112.110,00	23,60
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah + Pengelola	287.543.405,00	367.947.798,00	(80.404.393,00)	(21,85)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(180.025.567,00)	281.596.414,00	(461.621.981,00)	(163,93)
33	Inspektorat	168.897.282,00	149.709.647,00	19.187.635,00	12,82

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
34	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	193.741.860,00	451.667.232,00	(257.925.372,00)	(57,11)
35	Dinas Lingkungan Hidup	1.635.494.898,00	1.749.570.991,00	(114.076.093,00)	(6,52)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.025.253.687,00	955.668.128,00	69.585.559,00	7,28
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(76.070.170,00)	116.570.295,00	(192.640.465,00)	(165,26)
38	Satuan Polisi Pamong Praja	185.306.665,00	241.638.081,00	(56.331.416,00)	(23,31)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	151.509.531,00	496.946.473,00	(345.436.942,00)	(69,51)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	884.640.476,00	802.946.604,00	81.693.872,00	10,17
41	Dinas Perpustakaan	341.847.313,00	367.145.919,00	(25.298.606,00)	(6,89)
	TOTAL	28.146.113.277,01	34.514.398.640,60	(6.368.285.363,59)	(18,45)

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp15.626.084.639,60 mengalami penurunan sebesar Rp1.039.519.158,40 atau sebesar 6,24% dibandingkan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp16.665.603.798,00.

Beban penyusutan gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 133

Rincian Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	237.883.196,00	233.439.358,00	4.443.838,00	1,90
2	Sekretariat Daerah	1.039.798.455,00	1.083.645.063,00	(43.846.608,00)	(4,05)
3	Kantor Camat Manggar	69.033.401,00	109.966.347,00	(40.932.946,00)	(37,22)
4	Kantor Camat Gantung	140.745.224,00	148.376.115,00	(7.630.891,00)	(5,14)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	146.781.092,00	157.289.320,00	(10.508.228,00)	(6,68)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	130.708.437,00	157.102.774,00	(26.394.337,00)	(16,80)
7	Kantor Camat Damar	67.203.860,00	68.022.086,00	(818.226,00)	(1,20)
8	Kantor Camat Simpang Renggiang	53.861.008,00	54.912.075,00	(1.051.067,00)	(1,91)
9	Kantor Camat Dendang	78.913.951,00	83.028.258,00	(4.114.307,00)	(4,96)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	303.315.872,00	300.645.848,00	2.670.024,00	0,89
11	Dinas Perhubungan	251.992.995,00	257.288.208,00	(5.295.213,00)	(2,06)
12	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	1.380.691.355,00	1.376.525.516,00	4.165.839,00	0,30
13	Dinas Kesehatan	158.868.476,00	154.236.170,00	4.632.306,00	3,00
14	UPTD Puskesmas Manggar	184.343.808,00	121.887.688,00	62.456.120,00	51,24
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	112.803.094,00	100.690.593,00	12.112.501,00	12,03
16	UPTD Puskesmas Gantung	144.486.253,00	126.229.922,00	18.256.331,00	14,46

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	212.504.475,00	175.623.418,00	36.881.057,00	21,00
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	175.843.599,00	154.338.306,00	21.505.293,00	13,93
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	154.420.031,00	143.144.364,00	11.275.667,00	7,88
20	UPTD Puskesmas Dendang	143.931.495,00	120.750.828,00	23.180.667,00	19,20
21	Dinas Pendidikan	5.385.639.776,60	6.398.237.304,00	(1.012.597.527,40)	(15,83)
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	895.096.259,00	858.823.198,00	36.273.061,00	4,22
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115.335.978,00	116.681.964,00	(1.345.986,00)	(1,15)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.754.018,00	88.830.882,00	1.923.136,00	2,16
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	90.395.062,00	96.825.714,00	(6.430.652,00)	(6,64)
27	Dinas Perikanan	1.239.162.612,00	1.241.421.698,00	(2.259.086,00)	(0,18)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	223.315.083,00	234.300.481,00	(10.985.398,00)	(4,69)
29	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	54.062.199,00	52.824.984,00	1.237.215,00	2,34
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	713.135.211,00	729.593.633,00	(16.458.422,00)	(2,26)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah + Pengelola	143.595.908,00	147.060.822,00	(3.464.914,00)	(2,36)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.700.655,00	76.811.999,00	(111.344,00)	(0,14)
33	Inspektorat	45.163.409,00	80.340.610,00	(35.177.201,00)	(43,79)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.725.443,00	101.735.284,00	(7.009.841,00)	(6,89)
35	Dinas Lingkungan Hidup	206.190.321,00	206.438.722,00	(248.401,00)	(0,12)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	591.764.100,00	597.649.889,00	(5.885.789,00)	(0,98)
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	68.273.600,00	66.616.293,00	1.657.307,00	2,49
38	Satuan Polisi Pamong Praja	31.232.599,00	66.382.261,00	(35.149.662,00)	(52,95)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	145.429.690,00	146.092.968,00	(663.278,00)	(0,45)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	93.914.274,00	95.902.700,00	(1.988.426,00)	(2,07)
41	Dinas Perpustakaan	134.068.365,00	135.890.135,00	(1.821.770,00)	(1,34)
	TOTAL	15.626.084.639,60	16.665.603.798,00	(1.039.519.158,40)	(6,24)

3. **Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp41.763.173.895,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.697.747.862,55 atau 46,77% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp78.460.921.757,55. Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 134
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	19.747.297,00	18.432.058,00	1.315.239,00	7,14
2	Sekretariat Daerah	228.641.152,00	249.653.000,00	(21.011.848,00)	(8,42)
3	Kantor Camat Manggar	1.005.754,00	1.005.754,00	0,00	0,00
4	Kantor Camat Gantung	5.465.756,00	5.657.563,00	(191.807,00)	(3,39)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	21.530.062,00	21.723.551,00	(193.489,00)	(0,89)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	4.456.741,00	4.456.741,00	0,00	0,00
7	Kantor Camat Damar	5.218.223,00	5.218.475,00	(252,00)	(0,00)
8	Kantor Camat Simpang Renggang	1.368.103,00	1.368.102,00	1,00	0,00
9	Kantor Camat Dendang	9.039.809,00	9.894.562,00	(854.753,00)	(8,64)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36.861.556.250,00	73.651.480.785,00	(36.789.924.535,00)	(49,95)
11	Dinas Perhubungan	1.425.658.196,00	1.199.276.307,00	226.381.889,00	18,88
12	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	128.592.329,00	113.921.372,00	14.670.957,00	12,88
13	Dinas Kesehatan	6.723.908,00	6.466.409,00	257.499,00	3,98
14	UPTD Puskesmas Manggar	14.574.211,00	8.248.708,00	6.325.503,00	76,68
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	11.809.818,00	11.461.590,00	348.228,00	3,04
16	UPTD Puskesmas Gantung	47.609.286,00	36.054.572,00	11.554.714,00	32,05
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	54.539.328,00	51.730.260,00	2.809.068,00	5,43
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	14.370.636,00	13.253.425,00	1.117.211,00	8,43
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	24.959.075,00	25.210.281,00	(251.206,00)	(1,00)
20	UPTD Puskesmas Dendang	33.584.350,00	31.071.584,00	2.512.766,00	8,09
21	Dinas Pendidikan	183.256.562,00	179.435.465,00	3.821.097,00	2,13
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	166.991.483,00	198.992.968,00	(32.001.485,00)	(16,08)
23	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.778.671,00	13.929.685,00	(4.151.014,00)	(29,80)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daeah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.424.776,00	2.424.776,00	0,00	0,00

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.526.499,00	3.563.118,00	(36.619,00)	(1,03)
27	Dinas Perikanan	578.962.242,00	631.017.430,00	(52.055.188,00)	(8,25)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	59.195.599,00	76.125.774,00	(16.930.175,00)	(22,24)
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.540.833,00	3.540.834,00	(1,00)	(0,00)
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	104.344.757,00	186.581.960,00	(82.237.203,00)	(44,08)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.528.516,00	7.936.618,00	(408.102,00)	(5,14)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.309.444,00	7.995.621,00	(686.177,00)	(8,58)
33	Inspektorat	5.707.501,00	5.707.500,00	1,00	0,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.754.614,00	6.601.300,00	(846.686,00)	(12,83)
35	Dinas Lingkungan Hidup	1.393.337.621,00	1.393.628.625,00	(291.004,00)	(0,02)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	263.096.657,00	223.120.236,00	39.976.421,00	17,92
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.270.267,00	1.270.266,00	1,00	0,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja	2.605.145,00	2.605.145,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.543.842,00	13.177.942,00	(7.634.100,00)	(57,93)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	29.258.700,00	28.391.513,00	867.187,00	3,05
41	Dinas Perpustakaan	9.289.882,00	9.289.881,00	1,00	0,00
	TOTAL	41.763.173.895,00	78.460.921.756,00	(36.697.747.861,00)	(46,77)

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp16.916.240,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 135

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	2.437.500,00	0,00	2.437.500,00	100,00
2	Dinas Pendidikan	962.490,00	0,00	962.490,00	100,00
3	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	13.516.250,00	0,00	13.516.250,00	100,00
	TOTAL	16.916.240,00	0,00	16.916.240,00	100,00

5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp423.797.536,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp170.342.157,00 atau 67,21% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp253.455.379,00. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 136
Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	3.058.335,00	3.670.000,00	(611.665,00)	(16,67)
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.323.500,00	19.349.000,00	19.974.500,00	103,23
3	Dinas Perhubungan	47.432.286,00	30.264.858,00	17.167.428,00	56,72
4	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	11.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	(8,33)
5	Dinas Kesehatan	3.666.667,00	2.000.000,00	1.666.667,00	83,33
6	Dinas Pendidikan	35.763.528,00	43.864.234,00	(8.100.706,00)	(18,47)
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.811.724,00	5.897.304,00	4.914.420,00	83,33
8	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	36.225.000,00	18.900.000,00	17.325.000,00	91,67
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	10.405.000,00	(10.405.000,00)	(100,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	214.988.496,00	95.872.983,00	119.115.513,00	124,24
11	Dinas Perpustakaan	21.528.000,00	11.232.000,00	10.296.000,00	91,67
	TOTAL	423.797.536,00	253.455.379,00	170.342.157,00	67,21

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban transfer tahun 2024 sebesar Rp58.326.141.795,54 mengalami penurunan sebesar Rp48.657.179.223,21 atau 45,48% dibandingkan tahun 2023 terealisasi Rp106.983.321.018,75. Beban transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp4.875.126.200,54 mengalami penurunan sebesar Rp789.854.515,21 atau 13,94% dibandingkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.664.980.715,75.

Tabel 5. 137
Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.497.362.480,89	5.161.830.909,78	(664.468.428,89)	(12,87)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	377.763.719,65	503.149.805,97	(125.386.086,32)	(24,92)
	TOTAL	4.875.126.200,54	5.664.980.715,75	(789.854.515,21)	(13,94)

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp53.451.015.595,00 mengalami penurunan sebesar

Rp47.867.324.708,00 atau 47,24% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp101.318.340.303,00.

Tabel 5. 138
Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	100.846.573.203,00	(100.846.573.203,00)	(100,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.451.015.595,00	471.767.100,00	52.979.248.495,00	11.229,96
	TOTAL	53.451.015.595,00	101.318.340.303,00	(47.867.324.708,00)	(47,24)

5.4.2.3 BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga pada tahun 2024 sebesar Rp559.132.832,00. Beban tidak terduga ini digunakan untuk pembayaran bantuan sosial yang tidak direncanakan (bantuan berobat bagi masyarakat) berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-342 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024.

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2024 mengalami surflus sebesar Rp186.343.070,00, dibanding tahun 2023 dengan nilai defisit sebesar (Rp4.811.921.833,08), yang terdiri dari :

Tabel 5. 139
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	451.683.950,00	0,00	451.683.950,00	100,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	2.114.986.321,00	2.114.986.321,00	(100,00)
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	265.340.880,00	284.700.393,00	(19.359.513,00)	(6,80)
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	6.642.207.761,00	(6.642.207.761,00)	(100,00)
	TOTAL	186.343.070,00	(4.811.921.833,08)	4.998.264.903,08	(103,87)

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada tahun 2024 sebesar Rp451.683.950,00, yang merupakan pendapatan lelang dari Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp387.287.720,00 dan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp64.396.230,00.

5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Pada tahun 2024 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.114.986.321,00, yang merupakan Surplus dari penyertaan modal kepada BUMD PT. PERUMDAM Pelangi Timur.

5.4.3.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada tahun 2024 sebesar Rp265.340.880,00 yang merupakan kerugian pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur (berdasarkan LK unaudited) sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp284.700.393,00 yang merupakan defisit dari BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur sebesar Rp197.524.893,00 dan penghapusan aset lain-lain sebesar Rp87.175.500,00.

5.4.3.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0.00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp6.642.207.761,08.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp627.079.203,00 yang merupakan beban tidak terduga.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT LO

Per 31 Desember 2024 defisit-LO sebesar (Rp66.448.036.369,46) mengalami penurunan sebesar Rp103.346.951.846,99 atau 280,08% dibandingkan tahun 2023 yang mengalami surplus-LO sebesar Rp36.898.915.477,53.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Fungsi Laporan Arus Kas Adalah menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5. 140
Laporan Arus Kas

No.	Uraian	2024	2023
1	Aktivitas Operasi	33.895.959.702,39	123.568.842.643,17
2	Aktivitas Investasi	(117.838.863.115,30)	(139.998.785.376,30)
3	Aktivitas Pendanaan	104.400.745,00	145.911.430,00
4	Aktivitas Transitoris	2.084.785,00	0,00
	Arus Kas Bersih kenaikan/ penurunan	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Berdasarkan data penetapan Arus Kas per 31 Desember 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah Arus Kas masuk sebesar Rp845.905.200.234,23 dan jumlah Kas Keluar sebesar Rp812.009.240.531,84 sehingga terdapat Arus Kas Bersih sebesar Rp33.895.959.702,39. Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Hibah, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk dari aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp845.905.200.234,23 mengalami penurunan sebesar Rp66.487.221.651,58 atau turun 7,29% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp912.392.421.885,81 Arus kas masuk atas aktivitas operasi tersebut terdiri dari :

Tabel 5. 141
Arus Kas Masuk

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88
Penerimaan Retribusi Daerah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	41.907.741.709,36	40.643.635.235,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil	84.152.033.000,00	155.771.890.842,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	449.044.881.195,00	431.104.192.225,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00
Penerimaan Dana Insentif	0	26.408.103.000,00
Penerimaan Dana Desa	39.725.596.000,00	38.883.640.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	0
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	42.531.381.418,00	52.921.000.512,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0	2.557.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	482.122.013,00	8.412.879.414,00
Jumlah Arus Kas Masuk	845.905.200.234,23	912.392.421.885,81

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sejumlah Rp45.008.024.533,50 adalah arus kas masuk dari penerimaan pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp55.223.937.728,88 atau turun sebesar 18,50%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142
Pendapatan Pajak Daerah

URAIAN	2024	2023
4.1.01.06.01.0001 - Pajak Hotel	57.873.815,00	89.782.522,00
4.1.01.06.07.0001 - Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	34.980.000,00	50.372.000,00
4.1.01.07.02.0001 - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	152.698.586,00	124.426.760,00
4.1.01.06.08.0001 - Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	8.710.000,00
4.1.01.07.05.0001 - Pajak Warung dan Sejenisnya	5.984.568,00	47.990.250,00
4.1.01.07.07.0001 - Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.647.589.723,00	1.423.260.381,00
4.1.01.08.02.0001 - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.034.000,00	923.000,00

URAIAN	2024	2023
4.1.01.08.05.0001 - Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.773.692,00	25.382.000,00
4.1.01.08.07.0001 - Pajak Permainan Biliar dan Bowling	300.000,00	1.100.000,00
4.1.01.08.08.0001 - Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	30.055.000,00	130.354.500,00
4.1.01.08.09.0001 - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	400.000,00	2.000.000,00
4.1.01.08.10.0001 - Pajak Pertandingan Olahraga	4.200.000,00	17.246.250,00
4.1.01.09.01.0001 - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	273.770.764,00	231.881.500,50
4.1.01.09.02.0001 - Pajak Reklame Kain	82.767.565,00	56.526.579,00
4.1.01.09.03.0001 - Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.155.700,00	9.093.750,00
4.1.01.10.02.0001 - Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.463.421.593,00	8.498.244.799,00
4.1.01.11.01.0001 - Pajak Parkir	2.569.000,00	13.176.300,00
4.1.01.12.01.0001 - Pajak Air Tanah	47.291.349,00	58.725.754,00
4.1.01.13.01.0001 - Pajak Sarang Burung Walet	53.090.000,00	81.505.000,00
4.1.01.14.15.0001 - Pajak Kaolin	656.658.642,50	857.034.657,50
4.1.01.14.24.0001 - Pajak Pasir Kuarsa	22.076.560.751,50	34.102.185.680,50
4.1.01.14.30.0001 - Pajak Tanah Liat	1.648.002.224,00	1.642.596.420,00
4.1.01.15.01.0001 - PBBP2	4.256.609.223,00	2.539.484.694,00
4.1.01.16.01.0001 - BPHTB-Pemindahan Hak	1.274.944.475,00	1.429.526.050,50
4.1.01.16.02.0001 - BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.208.293.862,50	3.782.408.880,88
Jumlah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sejumlah Rp7.621.143.001,00 adalah arus kas masuk dari penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp5.063.957.058,00 atau naik sebesar 50,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143
Pendapatan Retribusi Daerah

URAIAN	2024	2023
4.1.02.01.01.0001 - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	810.762.515,00	1.239.273.840,00
4.1.02.01.01.0005 - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.028.369.538,00	0,00
4.1.02.01.02.0001 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	708.308.000,00	750.859.000,00
4.1.02.01.04.0001 - Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	96.532.000,00	90.755.000,00
4.1.02.01.05.0001 - Retribusi Pelataran	65.748.500,00	47.382.000,00
4.1.02.01.05.0002 - Retribusi Los	352.296.000,00	259.612.000,00
4.1.02.01.05.0003 - Retribusi Kios	3.000.000,00	0,00
4.1.02.01.06.0001 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	76.667.000,00
4.1.02.01.09.0001 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.436.000,00	2.832.000,00

URAIAN	2024	2023
4.1.02.01.11.0001 - Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	30.203.100,00
4.1.02.02.01.0001 - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00	324.000,00
4.1.02.02.01.0002 - Retribusi Penyewaan Tanah	62.607.704,00	63.873.000,00
4.1.02.02.01.0003 - Retribusi Penyewaan Bangunan	66.550.000,00	61.200.000,00
4.1.02.02.01.0004 - Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	41.041.000,00
4.1.02.02.01.0005 - Retribusi Pemakaian Ruangan	144.918.000,00	104.393.500,00
4.1.02.02.01.0006 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	104.925.000,00	220.650.000,00
4.1.02.02.01.0007 - Retribusi Pemakaian Alat	52.320.000,00	27.845.000,00
4.1.02.02.02.0002 - Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	586.822.000,00	629.093.000,00
4.1.02.02.04.0001 - Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	2.645.000,00
4.1.02.02.04.0002 - Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	27.000.000,00	27.000.000,00
4.1.02.02.05.0001 - Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	129.943.000,00	83.975.000,00
4.1.02.02.06.0001 - Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	60.000.000,00	56.500.000,00
4.1.02.02.07.0001 - Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.400.000,00	2.848.000,00
4.1.02.02.09.0001 - Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	91.073.000,00	78.206.000,00
4.1.02.02.11.0003 - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	86.771.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0004 - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	895.509.069,00	835.427.571,00
4.1.02.03.07.0001 - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	94.365.835,00	277.928.047,00
4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	112.485.840,00	53.424.000,00
Jumlah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD. Realisasi Arus Kas Masuk pada Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan adalah sebesar Rp4.814.815.725,37 dan tahun 2023 sebesar Rp5.523.052.522,61 atau turun sebesar 12,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	2024	2023
4.1.03.02.01.0001 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.814.815.725,37	5.523.052.522.61
JUMLAH	4.814.815.725,37	Rp5.523.052.522.61

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun 2024 realisasi penerimaan tahun sebesar Rp41.907.741.709,36 sedangkan penerimaan tahun 2023 Rp40.643.635.235,32 terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp1.264.106.474,04 atau 3,11%.

Tabel 5. 145
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	2024	2023
4.1.04.05.01.0001 - Jasa Giro pada Kas Daerah	2.309.638.597,00	3.811.233.570,00
4.1.04.05.02.0001 - Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	11.914.926,00
4.1.04.05.07.0001 - Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	12.358.634,00	-
4.1.04.06.01.0001 - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.853.335,00	12.071.263,00
4.1.04.07.01.0001 - Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.150.213.419,00	1.695.876.067,00
4.1.04.08.02.0001 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	898.916.461,00	1.962.507.204,00
4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	457.287.944,37	136.526.860,60
4.1.04.12.06.0001 - Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.737.552,58	2.285.135,76
4.1.04.12.07.0001 - Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.593.654,00	1.832.531,00
4.1.04.12.08.0002 - Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	42.308,00	-
4.1.04.12.08.0005 - Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	316.200,00
4.1.04.12.08.0007 - Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	77.920,00	2.000,00
4.1.04.12.08.0009 - Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.000,00	36.000,00
4.1.04.12.09.0001 - Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.347.670,00	1.632.130,00
4.1.04.12.12.0001 - Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.036.432,04	353.945,64
4.1.04.12.13.0001 - Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	635.000,00
4.1.04.12.15.0001 - Pendapatan Denda PBBP2	101.396.125,00	92.901.353,00
4.1.04.13.01.0005 - Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-	50.750,00
4.1.04.13.01.0026 - Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	2.004.880,00	-
4.1.04.13.02.0001 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	372.200,00
4.1.04.13.02.0004 - Pendapatan Denda Retribusi Terminal	-	1.035.000,00
4.1.04.13.02.0011 -Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	17.418.950,00
4.1.04.13.02.0014 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	2.028.000,00	2.069.000,00
4.1.04.13.02.0018 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	194.400,00	-

Uraian	2024	2023
4.1.04.13.02.0036 - Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.824.850,00	-
4.1.04.15.03.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	1.146.968.762,00
4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	487.929.048,00
4.1.04.15.07.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	384.364.000,00
4.1.04.15.65.0010 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	-	116.568.600,00
4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	10.152.900,00	-
4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	76.393.944,00	-
4.1.04.16.02.0001 - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	35.382.188.574,00	30.756.734.739,32
4.1.04.16.04.0001 - Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	300.898.313,00	-
4.1.04.16.06.0001 - Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	182.551.796,37	-
Jumlah	41.907.741.709,36	40.643.635.235,32

- e. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**
 Merupakan pendapatan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepa daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tahun 2024 penerimaan transfer dana perimbangan sebesar Rp633.713.890.834 dan pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp69.826.081.000,00.

Dana Perimbangan sebesar Rp633.713.890.834,00, terdiri dari:

Tabel 5. 146
Dana Perimbangan

Uraian	2024	2023
DBH	84.152.033.000,00	155.771.890.842,00
4.2.01.01.01.0001 - DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.043.629.000,00	18.238.134.218,00
4.2.01.01.01.0002 - DBH PPh Pasal 21	6.243.260.000,00	5.739.953.226,00
4.2.01.01.01.0003 - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	319.314.000,00	196.399.988,00
4.2.01.01.01.0005 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	722.426.000,00	1.093.689.922,00
4.2.01.01.01.0008 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.094.248.000,00	3.101.304.039,00
4.2.01.01.01.0009 - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	50.781.212.000,00	113.576.942.936,00
4.2.01.01.01.0010 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.694.978.000,00	8.721.071.302,00
4.2.01.01.01.0013 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.252.966.000,00	5.104.395.211,00
DAU	549.561.857.834,00	520.983.325.573,00
4.2.01.01.02.0001 - DAU	400.207.316.000,00	431.104.192.225,00

Uraian	2024	2023
4.2.01.01.02.0004 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.548.283.195,00	-
4.2.01.01.02.0005 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	13.883.052.000,00	-
4.2.01.01.02.0006 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.620.618.000,00	-
4.2.01.01.02.0007 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	20.785.612.000,00	-
4.2.01.01.03.0001 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	525.563.040,00	327.073.000,00
4.2.01.01.03.0002 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.305.497.701,00	672.247.900,00
4.2.01.01.03.0003 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.230.336.544,00	2.380.047.052,00
4.2.01.01.03.0017 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	153.535.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0030 - DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	489.110.000,00
4.2.01.01.03.0032 - DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.550.727.450,00	
4.2.01.01.03.0033 - DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	682.056.750,00	3.222.198.300,00
4.2.01.01.03.0035 - DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.966.609.000,00	7.022.918.700,00
4.2.01.01.03.0045 - DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	358.000.000,00	710.000.000,00
4.2.01.01.03.0052 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	508.214.000,00
4.2.01.01.03.0059 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	121.500.000,00
4.2.01.01.03.0060 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.747.953.998,00	0,00
4.2.01.01.04.0001 - DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.538.070.957,00	18.929.600.334,00
4.2.01.01.04.0003 - DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.510.000.000,00	
4.2.01.01.04.0004 - DAK Non Fisik-TPG PNSD	38.486.304.000,00	37.128.317.550,00
4.2.01.01.04.0005 - DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	877.565.000,00	1.044.537.000,00
4.2.01.01.04.0007 - DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.168.960.000,00	2.113.020.000,00
4.2.01.01.04.0008 - DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	419.950.000,00	289.580.000,00
4.2.01.01.04.0011 - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.587.172.445,00	8.820.155.539,00
4.2.01.01.04.0015 - DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.985.643.960,00	2.120.210.150,00
4.2.01.01.04.0018 - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.177.383.539,00	1.105.065.528,00
4.2.01.01.04.0020 - DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	512.014.700,00	357.682.000,00
4.2.01.01.04.0022 - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	386.798.866,00	266.043.220,00
4.2.01.01.04.0023 - DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	162.575.000,00

Uraian	2024	2023
4.2.01.01.04.0024 - DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	1.691.165.065,00
4.2.01.01.04.0025 - DAK Non Fisik-PK2UMK	346.833.689,00	397.873.010,00
Total	633.713.890.834,00	676.755.216.415,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya sebesar Rp69.826.081.000,00, sebagai berikut:

Tabel 5. 147
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	2024	2023
4.2.01.02.01.0001 - DID	-	26.408.103.000,00
4.2.01.05.01.0001 - Dana Desa	39.725.596.000,00	38.883.640.000,00
4.2.01.06.01.0001 - Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	-
Jumlah	69.826.081.000,00	65.291.743.000,00

- f. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp42.531.381.418.00 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 sebesar Rp55.478.000.512,00 terdapat penurunan Rp12.946.619.094 atau 23.34%dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 148
Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Bagi Hasil	42.531.381.418,00	52.921.000.512,00
4.2.02.01.01.0001 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.066.914.807,00	14.335.792.740,00
4.2.02.01.01.0002 - Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.142.224.571,00	8.681.468.167,00
4.2.02.01.01.0003 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.721.628.297,00	18.213.013.249,00
4.2.02.01.01.0004 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.498.017.763,00	2.059.817.476,00
4.2.02.01.01.0005 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.102.595.980,00	9.630.908.880,00
Bantuan Keuangan	-	2.557.000.000,00
4.2.02.02.02.0001 - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	2.557.000.000,00
Total	42.531.381.418,00	55.478.000.512,00

- g. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp482.122.013.00 yang merupakan pendapatan atas pengembalian Hibah pada Badan. Lembaga. dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Tabel 5. 149
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	2024	2023
4.3.03.01.02.0005 - Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	482.122.013,00	1.152.504.058,00

Uraian	2024	2023
4.3.03.02.01.0002 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	-	7.260.375.356,00
Jumlah	482.122.013,00	8.412.879.414,00

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan arus kas keluar dari belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dengan realisasi pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp812.009.240.531,84 sedangkan pengeluaran kas aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp788.823.579.242,64 ada kenaikan pengeluaran Rp23.185.661.289,20 atau 2,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150
Arus Kas Keluar

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Pegawai	403.168.134.091,00	348.510.979.782,00
2	Belanja Barang dan jasa	283.694.328.636,00	308.500.423.497,20
3	Belanja Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00
5	Belanja Tak terduga	559.132.832,00	627.079.203,00
6	Belanja Bagi Hasil	5.001.045.629,84	5.511.251.457,44
7	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.611.595,00	101.318.340.303,00
	Jumlah	812.009.240.531,84	788.823.579.242,64

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimasa yang akan datang.

Arus Kas Investasi terdiri dari: (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap. Aset tetap Lainnya. dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2024 merupakan penerimaan atas penjualan aset dari peralatan dan mesin sebesar Rp451.683.950,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 151
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	823.343.500,00
2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	10.394.000,00

NO.	URAIAN	2024	2023
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	387.287.720,00	-
4	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	64.396.230,00	-
5	Hasil Penjualan Biota Perairan	-	119.725.000,00
	Jumlah	451.683.950,00	953.462.500,00

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar tahun 2024 merupakan pengeluaran atas belanja modal sebesar Rp118.290.547.065,30 yang terdiri dari :

Tabel 5. 152
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.637.802.774,00	33.092.550.506,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.625.491.627,24	35.617.596.997,30
3	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	69.392.666.064,06	70.488.019.993,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.583.086.600,00	1.754.080.380,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	51.500.000,00	-
6	Penyeertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	118.290.547.065,30	140.952.247.876,30

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka Panjang dan/atau pelunasan utang jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka Panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka Panjang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari penerimaan kembali pinjaman sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain adalah pemberian pinjaman.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 153
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	104.400.745,00	145.911.430,00
	Jumlah	104.400.745,00	145.911.430,00

Tabel 5. 154
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya (luran JKK&JKM)	0,00	0,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00

NO.	URAIAN	2024	2023
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Tabel 5. 155
Arus Masuk Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.728.945.395,40	60.395.924.509.00
	Jumlah	59.728.945.395,40	60.395.924.509.00

Tabel 5. 156
Arus Keluar Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.726.860.610,40	60.395.924.509.00
	Jumlah	59.726.860.610,40	60.395.924.509.00

Kenaikan/Penurunan Kas senilai

Tabel 5. 157
Rincian Kenaikan/Penurunan Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)
	Jumlah	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)

Saldo Akhir Kas

Tabel 5. 158
Rincian Saldo Akhir Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Kas di Kas Daerah	48.190.923.456,12	124.812.697.586,40
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	809.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.587.063.789,39	11.340.085.343,42
5	Kas Dana BOS	0,00	51.317.973,72
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.221.647.996,60
7	Kas Lainnya	333.874.411,00	331.789.626,00
8	Kas Dana BOSP	29.464.927,72	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	778.985.059,00	0,00
	Jumlah	53.921.120.643,23	137.757.538.526,14

Pada Laporan Arus Kas, saldo kas sebesar Rp53.921.120.643.23 namun pada Laporan Neraca saldo kas sebesar Rp53.923.888.728,23 perbedaan kas sebesar

Rp2.768.085,00 merupakan bunga pada rekening kas lainnya (kas bendahara BOS sekolah yang tidak diketahui sumber peruntukannya) pada rekening SMPN 1 Manggar Rp228.329,00, rekening SMPN 2 Simpang Pesak Rp2.379.992,00 dan rekening SMPN 1 Kelapa Kampit sebesar Rp159.764,00 yang bukan merupakan transaksi arus kas tetapi menambah kas lainnya pada neraca.

Pada laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA LRA) tercatat sebesar Rp53.412.484.057,09 sedangkan saldo kas pada Laporan Arus Kas (LAK) Rp53.921.120.643.23 terdapat selisih sebesar Rp508.636.586,14 dengan penjelasan selisih sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Selisih SILPA dari tahun-tahun sebelumnya yang masih ditelusuri	174.762.174,82
Kas Lainnya, yang terdiri dari : Pencatatan Dana BOS yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya pada SMPN 2 Simpang Pesak	263.651.514,00
Reklas kas yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya yang di catat di dana bos ke kas lainnya pada SMPN 1 Manggar	30.253.201,00
Reklas kas yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya yang di catat di dana bos ke kas lainnya pada SMPN 1 Kelapa Kampit	21.170.322,00
Reklas kas yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya yang di catat di dana bos ke kas lainnya pada SMPN 2 Simpang Pesak	16.424.877,00
Pembulatan Desimal penganggaran SAL awal tahun 2023, dalam SIPD tidak membaca angka dibelakang koma sehingga angka dibelakang yang lebih besar dari 5 akan dibulatkan keatas dan lebih kecil dari 5 akan dibulatkan kebawah	0,45
Pembulatan Desimal penganggaran SAL awal tahun 2024, dalam SIPD tidak membaca angka dibelakang koma sehingga angka dibelakang yang lebih besar dari 5 akan dibulatkan keatas dan lebih kecil dari 5 akan dibulatkan kebawah	(0,13)
Kas lainnya atas pajak sekolah bos yang belum disetorkan	2.374.497,00
Jumlah	508.636.586,14

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari laporan operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau kesalahan yang mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan menjadi penghubung antara laporan operasional dengan neraca. Rincian perubahan ekuitas pada tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 159
Rincian Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	1.674.692.772.260,24	1.628.789.534.927,84
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(66.448,036.369,46)	36.898.915.477,53

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	85.833.220,21	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	(65.470.967.283,30)	9.004.321.854,87
7	EKUITAS AKHIR	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp1.674.692.772.260,24 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2023.

5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit) – LO tahun anggaran 2024 adalah defisit sebesar Rp66.448.036.369,46 yang berasal dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp801.032.308.367,88 dikurangi dengan jumlah beban sebesar Rp867.666.687.807,34 dan ditambah dengan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional sebesar Rp186.343.070,00 dan ditambah surplus/(defisit) dari pos luar biasa Rp0,00 sehingga didapatkan Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar (Rp66.448.036.369,46) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp36.898.915.477,53 mengalami penurunan sebesar Rp103.346.951.846,99 atau 280,08%.

5.6.3 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2024. Berikut dijelaskan dampak komulatif sebesar terdiri dari:

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan tahun 2024 adalah senilai Rp85.833.220,21 dan tahun 2023 tidak ada nilai koreksi atas hal tersebut.

5.6.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2024 bernilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.6.3.3 Lain – Lain

Tabel 5. 160
Rincian Perubahan Ekuitas Lain-Lain

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
2	Kas di BLUD	361.617.899,60
3	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	(361.617.899,60)
4	Kas Lainnya	2.768.085,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	62.039.515,00
6	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	226.480,00
7	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	93.600,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
8	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000,00
9	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	377.858.105,50
10	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	47.809.872,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	21.600,00
12	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(559.068.894,00)
13	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	108.432,00
14	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(80.409.550,00)
15	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	34.393.841,65
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	13.870.460,00
17	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(50.000.000,00)
18	Pompa	0,00
19	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(149.380.000,00)
20	Kendaraan Bermotor Penumpang	(240.408.000,00)
21	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(193.000.000,00)
22	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(273.980.450,00)
23	Kendaraan Bermotor Khusus	(558.750.000,00)
24	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(323.395.000,00)
25	Mebel	0,00
26	Alat Pendingin	0,00
27	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
28	Alat Kedokteran Umum	(4.330.000,00)
29	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00
30	Alat Laboratorium Umum	4.330.000,00
31	Alat Laboratorium Pertanian	0,00
32	Bangunan Gedung Kantor	(79.781.513,71)
33	Bangunan Kesehatan	0,00
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
35	Pagar	0,00
36	Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00
38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
41	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(119.123.215,00)
42	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(12,00)
43	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	850.005,00
44	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	(8,00)
45	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2,00)
46	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(131.408,00)
47	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9,00
48	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.166.685,00
49	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(30.000.001,00)
50	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4,00
51	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.950.000,00
52	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(44.878.880,00)
53	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	1,00
54	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(3.595.000,00)
55	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	15.180.000,00
56	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	20.331.250,00
57	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(7.855.809,00)
58	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(17.650.000,00)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(14.430.000,00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	25.754.200,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	12.702.800,00
62	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	9.979.200,00
63	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	2.400.000,00
64	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	(6.683.483,00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	3.979.180,00
66	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(96.496.600,00)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(13.564.814,00)
68	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	55.947.625,44
69	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.334.416.193,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
70	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	3.470.000,00
71	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.200.000,00
72	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	78.711.001,00
73	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.559.333,00)
74	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.915.984,00
75	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(2.171.400,00)
76	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	51.564.600,00
77	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.795.200,00
78	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.171.400,00
79	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	699.997,00
80	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	22.026.348,00
81	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	29.589.982,00
82	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(7,00)
83	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(1,00)
84	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	2,00
85	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	557.481.811,00
86	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	2.400.001,00
87	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(6.900.024,00)
88	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	26.572.938,00
89	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	29.375.001,00
90	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4,00
91	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	10.191.000,00
92	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	(1,00)
93	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(993.850.000,00)
94	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	993.850.000,00
95	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(54.863.739,00)
96	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.960.003,00
97	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	2,00
98	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	2,00
99	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	28.014.901,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
100	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	900.000,00
101	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	1.562.915,00
102	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	1.372.000,00
103	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	5.013.176,00
104	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	9.452.585,00
105	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	33.156.444,00
106	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	96.496.625,00
107	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	33.210.500,00
108	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	(150.000,00)
109	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	9.901.800,00
110	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	3,00
111	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	(2,00)
112	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(385.996,00)
113	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	8,00
114	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	49.325.374,00
115	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	95.457.736,00
116	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	31.254.966,00
117	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	19.197.325,00
118	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	11.562.498,00
119	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	21.303.333,00
120	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	17.698.550,00
121	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1.784.999,00
122	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	30.711.627,00
123	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	11,00
124	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	1,00
125	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	0,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
126	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	19,00
127	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	(1,00)
128	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	(8,00)
129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	(3,00)
130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	(8,00)
131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(76,00)
132	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	176,00
133	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan Propeller Model Workshop	3,00
134	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(68.332.987,00)
135	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	4.661.608,00
136	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	700.000,00
137	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.091.374,00
138	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(115.416.034,00)
139	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	1.092.332,00
140	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	149.450.330,00
141	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(8.420.903,00)
142	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	2.581.270,00
143	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	2.755.507,00
144	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(4.152.870.789,00)
145	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(420.165.955,00)
146	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(5.864.700,00)
147	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(29.184.326,00)
148	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(521.252.174,00)
149	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(4.164.453.548,00)
150	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(204.820.622,00)
151	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(841.212.546,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
152	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(18.728.224.307,00)
153	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(760.450.343,00)
154	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(667.613.064,00)
155	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(15.550.703,00)
156	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(211.271.427,00)
157	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	(21.790.267,00)
158	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(929.151.854,00)
159	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(94.097.765,00)
160	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(311.837.535,00)
161	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(403.084.299,00)
162	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(4.027.943,00)
163	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(3.204.481,00)
164	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(14.290.480,00)
165	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(145.795.466,00)
166	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(1.347.572.601,00)
167	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(783.025.456,14)
168	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(732.375.017,00)
169	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(444.101.265,00)
170	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(51,00)
171	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(11.859.186,00)
172	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(2.323.839,00)
173	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	4,00
174	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	7.772.907,00
175	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	13.277.809,00
176	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(1.189.108.021,00)
177	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	(76.168.622,00)
178	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(22.362.801.554,37)
179	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(477.144.591,39)

No	Uraian	Nilai (Rp)
180	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(275.854.280,00)
181	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(621.747,00)
182	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	1,00
183	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	(35.778,00)
184	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	26,00
185	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(9,00)
186	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(141.349.004,00)
187	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(208.981,00)
188	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	(620.422.550,00)
189	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(269.236,00)
190	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(100.461.303,00)
191	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(72.004.806,00)
192	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(8.876.989,00)
193	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(18.911.621,00)
194	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	(11.432.996,00)
195	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	4,00
196	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(4.539.036,00)
197	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(155.760.715,00)
198	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(236.195.357,00)
199	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	(4,00)
200	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(147.405.726,00)
201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4,00
202	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(523.704.487,00)
203	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(195.593.732,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
204	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	4,00
205	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(4,00)
206	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	(12,00)
207	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(291.744.100,00)
208	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	175,00
209	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(1.376.373,00)
210	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(11,00)
211	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(44.667.606,00)
212	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(67.925.754,00)
213	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(82.599.346,00)
214	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	1,00
215	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(1,00)
216	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	6,00
217	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(3.271.341,00)
218	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	(4,00)
219	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	7,00
220	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(57.408.671,00)
221	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(74.230.006,00)
222	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(776.618.049,00)
223	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(686.074.562,32)
224	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(1.613.668.344,00)
225	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	15.101.000,00
226	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	801.000,00
227	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	2.500.000,00
228	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	2.000,00
229	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	270.105.855,00
230	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,04
Jumlah		(65.470.967.283,30)

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.542.859.601.827,69 yang berasal dari ekuitas awal Rp1.674.692.772.260,24 ditambah dengan surplus/(defisit)-LO sebesar (Rp66.448.036.369,46), ditambah koreksi nilai persediaan Rp85.833.220,21 dan koreksi ekuitas lainnya tahun berjalan sebesar (Rp65.470.967.283,30).

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 Rp1.542.859.601.827,69 ini mengalami penurunan sebesar Rp131.833.170.432,55 atau turun 7,87% dari tahun 2023 sebesar Rp1.674.692.772.260,24. Penurunan ekuitas tahun 2024 sebesar Rp131.833.170.432,55 menggambarkan penurunan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan selisih antara kenaikan/(penurunan) total aset tahun 2024 sebesar (Rp130.952.646.139,39) dan kenaikan total kewajiban sebesar (Rp880.524.293,16).

PENJELASAN MANDATORY SPENDING

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain Kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain:

- a. **Anggaran Fungsi Pendidikan**
- Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen), tahun 2024 untuk anggaran dan realisasi fungsi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan
Pada Perubahan APBD TA. 2024

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	232.554.365.834	222.004.653.129,24
	1) Belanja Operasi:	207.388.829.989	198.792.072.125,00
	a. belanja pegawai;	168.994.623.514	162.197.411.535,00
	b. belanja barang dan jasa;	35.829.212.536	34.171.314.342,00
	c. belanja hibah;	2.564.993.939	2.423.346.248,00
	d. belanja bantuan sosial.		-
	2) Belanja Modal;	25.165.535.845	23.212.581.004,24
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	7.219.705.802	6.462.255.517,00
	1) Belanja Operasi:	7.175.909.802	6.419.395.517,00
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	7.175.909.802	6.419.395.517,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	43.796.000	42.860.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	5.202.813.183	4.988.069.464,00
	1) Belanja Operasi:	5.192.533.183	4.988.069.464,00
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	5.192.533.183	4.988.069.464,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	10.280.000	-
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	12.827.648.114	11.881.729.347,00

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	1) Belanja Operasi:	12.642.754.114	11.709.911.347,00
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	12.642.754.114	11.709.911.347,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	184.894.000	171.818.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)	257.804.532.933	245.336.707.457,24
3	Total Belanja Daerah	1.005.246.407.786	926.299.787.597,14
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,65%	26,49%

b. Anggaran Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji, secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai, pada tahun 2024 anggaran kesehatan sebesar 28,03% dan realisasi belanja 27,33% dengan rumusan sebagai berikut

**Tabel Alokasi Anggaran Kesehatan
Pada Perubahan APBD TA. 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	a Urusan Bidang Kesehatan	217.419.105.329,00	194.319.717.805,00
	1 Belanja Operasi	206.783.435.532,00	186.073.207.911,00
	a Belanja Pegawai	118.275.551.219,00	105.836.662.248,00
	b Belanja Barang dan Jasa	88.507.884.313,00	80.236.545.663,00
	c Belanja Hibah		
	d Belanja Bantuan Sosial		
	2 Belanja Modal	10.635.669.797,00	8.246.509.894,00
	b Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	208.500.000,00	173.233.208,00
	1 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	9.533.208,00
	2 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	188.500.000,00	163.700.000,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	217.627.605.329,00	194.492.951.013,00
3	Total Belanja Daerah	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14
4	Gaji ASN	228.767.988.113,00	214.567.769.664,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	776.478.419.673,00	711.732.017.933,14
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	28,03%	27,33%

c. Anggaran Infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemerintah Daerah menyesuaikan posi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Anggaran dan realisasi belanja infrasturstrur dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Alokasi Anggaran Infrastruktur Daerah
Pada Perubahan APBD TA. 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	a) Belanja Modal	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30
	1 tanah;		-

No	Komponen Perhitungan	Jumlah APBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	2 peralatan dan mesin;	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00
	3 Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24
	4 jalan, irigasi, dan jaringan;	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06
	5 aset tetap lainnya;	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00
	5 aset lainnya;	51.721.000,00	51.500.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan	18.329.136.200,00	16.336.904.640,00
2	a) Belanja Hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan.		
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	172.294.009.911,00	157.037.439.453,30
4	Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil Daerah dan/atau Desa	905.729.421.808	828.122.130.372,30
	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	19,02%	18,96%

d. Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK untuk melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindakan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan untuk APBD sampai dengan Rp 1 Triliun setidaknya dialokasikan 1%, diatas Rp1 Triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja APBD untuk Inspektorat/APIP. Tahun 2024 anggaran dan realisasi fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Alokasi Perhitungan Belanja Pengawasan
Perubahan APBD TA. 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah APBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain tercantum pada:	1.525.205.000	1.177.444.554,00
	a) Penyelenggaraan pengawasan internal pada SKPD Inspektorat	860.414.000	642.402.500,00
	b) Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada SKPD Inspektorat	216.010.000	176.715.020,00
	c) Pendampingan dan Asistensi	448.781.000	358.327.034,00
2	Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14
3	Seharusnya	0,75%	
4	Persentase Anggaran	0,15%	0,13%

Upaya Penanganan Stunting

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tahun 2024 alokasi anggaran upaya penurunan stunting sebesar Rp32.292.458.270,00 terealisasi sebesar Rp28.488.976.700,00 atau 88,22%.

Tabel Alokasi Anggaran Upaya Penanganan Stunting
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.822.500	139.657.500
2	UPT Puskesmas Manggar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	298.730.000	298.730.000
3	UPT Puskesmas Mengkubang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.730.000	168.040.000
4	UPT Puskesmas Mengkubang	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
5	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.275.000	14.580.000
6	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.160.000	19.480.000
7	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	81.280.000	65.292.500
8	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26.880.000	26.880.000
9	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
10	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.000.000	18.000.000
11	UPT Puskesmas Mengkubang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	190.380.000	172.980.000
12	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.356.000	17.916.000
13	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	33.600.000	32.520.000
14	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	147.380.000	96.313.500
15	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	192.660.000	184.095.400
16	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	31.020.000	31.020.000
17	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.120.000	15.120.000
18	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28.020.000	25.080.000
19	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	60.720.000	51.060.000
20	UPT Puskesmas Manggar	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	207.120.000	202.920.000
21	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	112.080.000	110.880.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
22	UPT Puskesmas Manggar	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.120.000	12.292.500
23	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.920.000	720.000
24	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.000.000	14.160.000
25	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.520.000	23.364.324
26	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
27	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.920.000	25.920.000
28	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	225.227.000	141.583.000
29	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.000.000	12.000.000
30	UPT Puskesmas Gantung	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	148.860.000	142.980.000
31	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
32	UPT Puskesmas Gantung	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.655.000	108.626.699
33	UPT Puskesmas Gantung	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.759.000	15.992.000
34	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,Insentif Fiskal	20.456.106.200	19.268.576.300
35	Dinas Kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	102.470.000	89.872.700
36	Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	110.739.000	71.160.000,00
37	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	367.625.000	307.637.025
38	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	109.995.000	104.470.111,00

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
39	UPT Puskesmas Renggiang	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	33.344.000	32.500.000
40	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	324.878.000	274.695.519
41	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	114.500.000	91.663.200,00
42	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.677.000	25.605.000
43	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.173.000	5.173.000
44	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	424.185.000	326.484.790,00
45	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	91.104.000	83.330.093,00
46	Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.995.000	-
47	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	518.603.420	232.855.000,00
48	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	39.360.000	39.015.000
49	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	43.200.000	30.480.000
50	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	690.769.150	205.595.965

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	14.850.000	
52	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	165.298.000	151.553.000
53	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.920.000	7.200.000
54	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
55	UPT Puskesmas Gantung	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600.000	-
56	UPT Puskesmas Renggiang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	177.000.000	155.340.000
57	UPT Puskesmas Renggiang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	284.332.500	278.302.500
58	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.184.829.000	1.167.004.500,00
59	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.672.000	13.992.000
60	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
61	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	268.201.000	134.185.704,00
62	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.080.000	1.920.000
63	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.160.000	20.040.000
64	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	93.572.000	80.476.000
65	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.000.000	-
66	UPT Puskesmas Dendang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	50.880.000	48.720.000
67	UPT Puskesmas Dendang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	73.750.000	7.350.000
68	RSUD Muhammad Zein	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.272.957.500	1.624.067.500

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
69	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
70	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	30.240.000	29.100.000
71	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
72	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	170.700.000	69.934.000
73	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.200.000	18.180.000
74	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	98.280.000	88.740.000
75	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Penerimaan Pembiayaan	120.750.000	101.430.000
76	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
77	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
78	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.280.000	13.440.000
79	UPT Puskesmas Mengkubang	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	600.000	-
80	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
81	UPT Puskesmas Renggiang	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	960.000	-
82	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	234.551.000	200.803.350
83	Dinas Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	31.036.000	27.891.520,00
84	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.408.000	11.976.000
85	UPT Puskesmas Dendang	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.400.000	6.820.000
86	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	41.880.000	41.820.000
87	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.680.000	14.100.000
88	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	600.000	480.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
89	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
90	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.420.000	8.418.000
91	UPT Puskesmas Mengkubang	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
92	UPT Puskesmas Gantung	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
93	Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		
94	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	80.400.000	67.680.000
95	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.520.000	5.520.000
96	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	57.582.000	53.682.000
97	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.200.000	12.060.000
98	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	98.340.000	89.600.000
99	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	44.400.000	44.280.000
100	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.640.000	8.280.000
101	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	86.640.000	62.340.000
102	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	65.040.000	59.580.000
103	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	44.280.000	43.260.000
104	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.120.000	18.720.000
105	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.020.000	11.040.000
106	Dinas Kesehatan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	23.580.000	-

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
107	Dinas Kesehatan	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	126.291.000	118.579.500
108	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	111.000.000	109.260.000
109	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	68.130.000	67.320.000
110	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.300.000	13.110.000
111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	14.850.000	4.064.000
TOTAL				32.292.458.270	28.488.976.700

Dana Alokasi Umum

Menurut amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) DAU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
- b. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- a. bagian DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah; dan
- b. bagian DAU untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah.

DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah digunakan untuk:

- a. mendukung penggajian PPPK Daerah;
- b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- c. kegiatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk tahun anggaran 2024 hanya menerima penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

Syarat Penyaluran DAU bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran	30%	45%	25%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Februari	Paling Cepat April	Paling cepat Juli
Syarat Salur	Laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan rencana penggunaan sisa DAU pada setiap bidang	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I minimal 50%	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan II minimal 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	5 Feb – 30 Juni	5 April – 31 Agst	5 Juli – 14 November

Adapun rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaan pada Kabupaten Beitung Timur, sebagai berikut:

1. Penggajian Formasi PPPK, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp6.548.283.195,00 terealisasi sebesar Rp6.548.238.195,00 atau persentase penyerapan DAU sebesar 100,00%, sedangkan Sisa DAU PPK 2023 sebesar Rp10.986.561.951 dianggarkan kembali dalam APBD 2024 dan terealisasi sebesar Rp10.986.561.951 atau 100,00%.
2. Bidang pendidikan, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp13.883.052.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.409.894.251,00 atau persentase penyerapan DAU sebesar 96,59% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp473.157.749,00, sedangkan sisa DAU tahun 2023 sebesar Rp5.586.454.493,00 yang dilaksanakan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.985.058.332,00 atau 89,23%
3. Bidang kesehatan, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp7.620.618.000,00 terealisasi sebesar Rp6.717.181.016,00 atau 88,14% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp903.436.984,00 untuk DAU tahun 2023 sebesar Rp2.335.433.246,00 yang dilaksanakan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.151.049.292,00 atau 92,10%.
4. Bidang pekerjaan umum, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp20.785.612.000,00 terealisasi sebesar Rp17.835.306.954,73 atau 85,81% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp2.950.305.045,27. Sisa DAU tahun 2023 yang dilaksanakan tahun 2024 sebesar Rp3.138.712.222,00 terealisasi sebesar Rp2.847.122.052,00 atau 90,71%.

PENGAJIAN FORMASI P3K

PPPK	Jumlah Formasi yang diangkat sampai dengan Tahun 2023	Jumlah Formasi 2023 yang diangkat Tahun 2024	Anggaran Pembayaran PPPK		Realisasi Pembayaran PPPK		Sisa DAU PPPK	
			Formasi yang diangkat s.d Tahun 2023	Formasi 2023 yang diangkat Tahun 2024	Formasi yang diangkat s.d Tahun 2023	Formasi 2023 yang diangkat Tahun 2024	DAU PPPK Tahun 2023	DAU PPPK Tahun 2024
Guru	193	75	193	75	2.365.069.135,00	2.721.233.293,00	4.008.617.663,00	
Tenaga Kesehatan	143	73	143	73	3.908.764.039,00	2.478.680.473,00	3.454.784.606,00	
Tenaga Teknis	105	38	105	38	929.822.875,00	1.348.369.429,00	3.523.159.682,00	
Total	441	186	441	186	7.203.656.049,00	6.548.283.195,00	10.986.561.951,00	-

DAU BIDANG PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.517.062.189	-	2.621.712.093,00	2.722.302.540,00	173.047.556			
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	540.740.000	-	92.061.000,00	445.870.640,00	2.808.360	Jumlah Sarana Prasarana Sekolah yang di Rehabilitasi	6	Unit
3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	199.485.000	-	192.621.000,00	-	6.864.000	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2	Paket
4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	169.600.000	-	-	168.000.000,00	1.600.000	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	200	Unit
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.005.160.000	-	-	999.800.000,00	5.360.000	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	3	Paket
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	682.826.000	-	489.871.993,00	84.000.000,00	108.954.007	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi akademik/non akademik	150	Peserta Didik

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.028.500.000	-	1.028.500.000,00	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	596	Orang
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	80.746.000	-	28.583.000,00	25.102.000,00	27.061.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	Orang
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.810.005.189	-	790.075.100,00	999.529.900,00	20.400.189	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	104	Satuan Pendidikan
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.953.975.000	339.625.000,00	625.112.300,00	828.274.306,94	160.963.393			
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	399.478.000	-	-	398.912.552	565.448	Jumlah Perpustakaan yang di Rehab	2	Ruang
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	291.536.000	-	-	286.897.649	4.638.351	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab	2	Unit
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000	-	440.515.500,00	91.984.106,00	117.500.394	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi akademik/non akademik	12	Peserta Didik
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	513.249.000	339.625.000,00	161.720.000,00	-	11.904.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	220	Orang

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99.712.000	-	22.876.800,00	50.480.000,00	26.355.200	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi	130	Orang
16	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.234.229.000	-	1.088.282.500,00	28.607.000,00	117.339.500			
17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.155.000.000	-	1.072.442.500,00	-	82.557.500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	333	Orang
18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.229.000	-	15.840.000,00	28.607.000,00	34.782.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	Orang
19	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	104.500.000	-	62.500.000,00	27.138.700,00	14.861.300			
20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.500.000	-	62.500.000,00	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	40	Orang

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.000.000	-	-	27.138.700,00	14.861.300	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30	Orang
22	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.500.000	-	15.798.000,00	42.756.000,00	6.946.000			
23	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	40.000.000	-	13.248.000,00	21.936.000,00	4.816.000	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3	Dokumen
24	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.500.000	-	2.550.000,00	20.820.000,00	2.130.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	Laporan
25	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.537.022.811	-	1.537.022.811,00	-	-			
26	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.537.022.811	-	1.537.022.811,00	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	Organisasi

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.470.763.000	3.470.763.000,00	-	-	-			
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.470.763.000	3.470.763.000,00	-	-	-	Jumlah orang yang menerima gaji & tunjangan ASN	1450	Orang/Bulan
	TOTAL	13.883.052.000	3.810.388.000	5.950.427.704	3.649.078.547	473.157.749			

SISA DAU BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.051.250.000						
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.051.250.000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	Ruang	1.575.610.100	6 ruang	475.639.900,00
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.005.686.000						
4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	149.828.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	1	Unit	147.464.323	1 unit	2.363.676,72
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	855.858.000	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	24	Satuan Pendidikan	820.197.250	24 satdik	35.660.750,00
6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	75.423.000						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	75.423.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	136	Orang	62.790.500	72 orang	12.632.500,00
8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.196.000						
9	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	153.196.000	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	135.002.870	1 dokumen	18.193.130,00
10	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	225.025.000						
11	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	225.025.000	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan n Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	800	Orang	225.025.000	780 orang	-
12	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.896.000						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	49.896.000	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	420	Orang	49.896.000	400 orang	-
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	32.999.000						
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	32.999.000	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	12	Unit	28.505.200	10 unit	4.493.800,00
16	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.082.950.793						
17	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.082.950.793	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	Organisasi	1.082.950.793	1 organisasi	-
18	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	542.151.200						
19	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	542.151.200	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30	Objek	530.957.796	30 objek	11.193.404,00
20	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	367.877.500						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
21	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	367.877.500	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	80	Orang	326.658.500	80 orang	41.219.000,00
	TOTAL	5.586.454.493				4.985.058.332		601.396.160,72

DAU BIDANG KESEHATAN

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Tahap I	Realisasi Penyerapan Tahap II	Realisasi Penyerapan Tahap III	Sisa Pagu	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.496.301.200	79.300.500	499.920.900	802.198.317	114.881.483			
2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.437.418.000	73.200.000	499.920.900	772.931.799	91.365.301	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang di Sediakan	4	Paket
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.883.200	6.100.500	-	29.266.518	23.516.182	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20	Unit
4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.221.067.000	228.702.075	2.035.853.206	1.167.956.218	788.555.501			
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	227.073.000	-	96.750.000	80.279.400	50.043.600	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1468	Orang

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Tahap I	Realisasi Penyerapan Tahap II	Realisasi Penyerapan Tahap III	Sisa Pagu	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80.211.000	-	9.621.400	56.138.000	14.451.600	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1655	Orang
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.677.000	-	-	25.605.000	3.072.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7742	Orang
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	367.625.000	-	203.035.665	104.601.360	59.987.975	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19442	Orang
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	325.500.000	-	-	298.000.000	27.500.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83806	Orang
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	397.005.000	-	358.827.875	-	38.177.125	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11620	Orang
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.436.500	-	-	-	34.436.500	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23035	Orang
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	192.410.000	190.534.375	-	-	1.875.625	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	798	Orang
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92.545.000	-	90.777.500	1.440.000	327.500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	328	Orang
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	213.016.000	-	160.802.766	-	52.213.234	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2332	Orang

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Tahap I	Realisasi Penyerapan Tahap II	Realisasi Penyerapan Tahap III	Sisa Pagu	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	114.487.000	-	-	78.780.800	35.706.200	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2518	Orang
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.567.000	-	-	61.948.093	6.618.907	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	174.360.000	38.167.700	-	58.366.765	77.825.535	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	Dokumen
18	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.905.154.500	-	1.116.038.000	402.796.800	386.319.700	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen
19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.903.249.800	1.903.249.800	-	-	-			
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.903.249.800	1.903.249.800	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang/Bulan
	TOTAL	7.620.618.000	2.211.252.375	2.535.774.106	1.970.154.535	903.436.984			

SISA DAU BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.027.892.000						
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.027.892.000	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	Unit	965.103.519,00	6 unit	62.788.481,00

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.136.246						
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.805.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2380	Orang	97.666.119,00	1468 orang	138.881,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	364.331.246	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84859	Orang	364.331.246,00	83806 orang	-
6	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	244.680.000						
7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	244.680.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55	Orang	176.715.000,00	55 orang	67.965.000,00
8	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	299.400.000						
9	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	299.400.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	299.400.000,00	1 dokumen	-
10	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	34.498.000						
11	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.546.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	8.922.200,00	12 laporan	15.623.800,00
12	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	9.952.000	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	Laporan	7.351.000,00	1 laporan	2.601.000,00
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.327.000						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.327.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang/Bulan	58.327.000,00	476 orang/bulan	-
15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000						
16	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	9.533.208,00	2 orang	10.466.792,00
17	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	188.500.000						
18	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	188.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	Orang	163.700.000,00	22 orang	24.800.000,00
	TOTAL	2.335.433.246				2.151.049.292,00		184.383.954,00

DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.865.498.834	1.802.501.280,00	1.038.553.800,00	4.287.108.420,00	1.737.335.334,00			
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.199.923.529	265.284.180,00	-	663.209.820,00	271.429.529,00	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1	Unit
3	Pembangunan Tanggul Sungai	5.166.507.213	1.111.264.200,00	740.842.800,00	2.222.528.000,00	1.091.872.213,00	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,27	KM
4	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.499.068.092	425.952.900,00	297.711.000,00	1.401.370.600,00	374.033.592,00	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	4	KM

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.510.240	626.702.700,00	417.801.800,00	1.044.504.500,00	911.501.240,00			
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.000.510.240	626.702.700,00	417.801.800,00	1.044.504.500,00	911.501.240,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,5	KM
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.046.164.325	-	594.579.960,00	345.885.974,00	105.698.391,00			
8	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	651.328.000	-	395.436.960,00	151.460.774,00	104.430.266,00	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	520	SR
9	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	394.836.325	-	199.143.000,00	194.425.200,00	1.268.125,00	Perpipaan yang dioptimalisasi	2	Unit
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000	1.520.000.000,00	1.680.000.000,00	-	-			
11	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.200.000.000	1.520.000.000,00	1.680.000.000,00	-	-	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	278	Rumah Tangga
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.496.754.101	373.746.734,00	926.583.497,93	174.222.288,80	22.201.580,27			

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
13	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.496.754.101	373.746.734,00	926.583.497,93	174.222.288,80	22.201.580,27	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8	Sistem Drainase Perkotaan
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.176.684.500	900.934.800,00	1.899.929.850,00	202.251.350,00	173.568.500,00			
15	Rekonstruksi Jalan	3.176.684.500	900.934.800,00	1.899.929.850,00	202.251.350,00	173.568.500,00	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,1	KM
	TOTAL	20.785.612.000	5.223.885.514,00	6.557.448.907,93	6.053.972.532,80	2.950.305.045,27			

SISA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.191.890.170						
2	Pembangunan Kanal Banjir	1.191.890.170	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.408	KM	900.300.000,00	0,310 km	291.590.170,00
3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.946.822.052						
4	Rekonstruksi Jalan	1.946.822.052	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.8	KM	1.946.822.052,00	0,8 km	-
	TOTAL	3.138.712.222				2.847.122.052,00		291.590.170,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung Timur ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Kabupaten Belitung Timur ini merupakan realisasi pemekaran kabupaten yang semula menjadi bagian wilayah Kabupaten Belitung.

Batas Wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sijuk, Kecamatan Bada, dan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Luas wilayah secara keseluruhan 2.506,91 km².

Dalam menjalankan pemerintahan umum dan pembangunan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Camat Manggar, Kantor Camat Gantung, Kantor Camat Kelapa Kampit, Kantor Camat Simpang Pesak, Kantor Camat Damar, Kantor Camat Simpang Renggang, dan Kantor Camat Dendang.

Anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pertama kali disusun pada tahun anggaran 2004 secara definitif terpisah dari Anggaran Kabupaten Belitung Induk. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak dengan Bupati terpilih atas nama Drs. Burhanudin dan Wakil Bupati terpilih atas nama Khairil Anwar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak dengan hasil pemilihan sebagaimana tertuang dalam naskah pelantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dengan kepala daerah terpilih atas nama Kamarudin Muten dan Wakil Bupati terpilih atas nama Khairil Anwar.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2024-2029 dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/500/I/2024 dengan Ketua DPRD dijabat oleh Fezzi Uktolseja, SE, MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua I dijabat oleh Agus Firmansyah dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan Wakil Ketua II dijabat oleh Dwi Nanda Putra dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026, sebagai pedoman serta arah yang akan dicapai dalam kurun waktu kedepan adapun Visi Kabupaten Belitung Timur adalah :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Misi Kabupaten yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi adalah :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2024 memperoleh penghargaan diantaranya:

1. Sertifikat Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penghargaan Atas Kepatuhan Harmonisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan Raperkada (Rancangan Peraturan Kepala Daerah) Tahun 2023, yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sertifikat Adipura Tahun 2024 Kategori Kota Kecil, yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 dengan Predikat Terbaik II Perencanaan dan Pencapaian Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kategori BB (Sangat Baik), yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Penghargaan Manggala Karya Kencana, yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia;
8. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024, yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia;
9. Penghargaan Top 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024, yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
10. Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia;
11. Apresiasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3, yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Penghargaan Atas Capaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Terbaik ke-2 se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024, yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peringkat 3 Kategori Pengelolaan Kompetensi pada Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024 Pemerintah Kabupaten, yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
14. Hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan nilai 99.58 kategori AA (ISTIMEWA), yang diberikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Republik Indonesia;
15. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024, yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia;

16. Penghargaan sebagai Top Unit Pelayanan Publik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Kepada Puskesmas Gantung, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Kampit Kabupaten Belitung Timur), yang diberikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Penghargaan Atas Pengadaan Seleksi CASN Formasi Tahun 2024 menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara, yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara Palembang;
18. Penghargaan Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Terbaik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nilai 4,16 Sangat Baik, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga memiliki program unggulan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Yuk Sekolah, dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
- b. Program Yuk Gi Nyelik Pasien, dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Program Yuk Ke Ume, dengan sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat;
- d. Program Beltim Terang Benderang, dengan sasaran meningkatnya investasi, meningkatnya cakupan luas penerangan jalan kabupaten dan meningkatnya pertumbuhan sektor usaha masyarakat;
- e. Program Lawang Beltim, dengan sasaran meningkatnya kemudahan akses informasi dan layanan bagi masyarakat dan stakeholder lainnya.

BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah yang disajikan bersama Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Laporan Keuangan yang disajikan agar dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara jelas, transparan, dan akuntabel tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, tapi juga dapat dipahami oleh publik maka dengan CaLK dapat menjadi suatu media penjelasan yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sekaligus sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dalam menilai kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur di masa yang akan datang.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL serta penyajian-penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pos-pos dalam Laporan Keuangan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan bertanggung gugat.

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Piutang Retribusi	113.701.000,00	62.039.515,00	-	175.740.515,00	-
2	Rumah Sakit Muhammad Zeid	Piutang Retribusi	619.074.309,46		216.548.310,00	18.293.853,00	817.328.766,46
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.438.263.903,00		13.393.021.053,00	5.433.952.146,00	13.397.332.810,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi	629.109.652,00	226.480,00	365.453.616,00	53.854.262,00	940.935.486,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	95.606.730,00	93.600,00	3.446.850,00	3.647.050,00	95.500.130,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Retribusi	26.749.050,00		30.036.000,00	6.400.000,00	50.385.050,00
5	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi	783.750,00		0,00	0,00	783.750,00
6	Dinas Perikanan	Piutang Retribusi	216.826.499,66		17.142.400,00	4.320.000,00	229.648.899,66
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.050.825,50		-	194.400,00	9.964.425,50
7	BPKPD	Piutang Retribusi	507.475.909,70		0,00	10.125.051,00	497.350.858,70
		Piutang Pajak Daerah	8.013.357.890,50		5.804.995.136,00	5.343.164.779,00	8.475.188.247,50
		Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	9.210.217.076,00		9.385.192.675,00	9.210.217.076,00	9.385.192.675,00
8	UPT Puskesmas Dendang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		7.254.200,00		7.254.200,00
9	UPT Puskesmas Gantung	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		59.381.100,00		59.381.100,00
10	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		106.223.685,00		106.223.685,00

NO.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7
11	UPT Puskesmas Manggar	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		30.233.900,00		30.233.900,00
12	UPT Puskesmas Mengkubang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		23.412.800,00		23.412.800,00
13	UPT Puskesmas Renggiang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		37.715.970,00		37.715.970,00
14	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-		30.096.800,00		30.096.800,00
		JUMLAH	24.881.216.599,82	62.359.600,00	29.510.154.501,00	20.259.909.139,00	34.193.929.553,82

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1.	Piutang Pajak	8.475.188.247,50	(4.837.708.832,35)	3.637.479.415,15
2.	Piutang Retribusi	2.536.432.810,82	(2.162.107.586,25)	374.325.224,57
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.797.115.820,50	(202.061.347,50)	13.595.054.473,00

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.522.888.473,00	(3.710.898.303,00)	811.990.170,00

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12
1	2004	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	- Perda Kab. Belitim Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga - Perbup Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 - Perbup Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008 - Perbup Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2009 Tanggal 06 Maret 2009 - Perbup Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2010 - Perbup Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2011 - Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pembelian Saham	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00	28.000.000.000,00	0,00	4.814.815.725,37	0,00
	2024	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	- Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Penyertaan Modal	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	4.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2	2006	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur	- Perda Kab. Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur	Penempatan Modal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			- Perbup Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur								
			- Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012.								
			- Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015.								
3	2015	PT. Pembangunan Belitung Timur	- Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada PT. Pembangunan Belitung Timur	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19710602 200604 1 005



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Sekretariat DPRD	19.957.463.748,58	955.390.994,00	0,00	20.912.854.742,58
2	Sekretariat Daerah	120.208.041.400,87	1.538.377.500,00	0,00	121.746.418.900,87
3	Kantor Camat Manggar	6.756.893.556,00	71.500.000,00	0,00	6.828.393.556,00
4	Kantor Camat Gantung	11.235.049.919,18	105.418.000,00	9.000.000,00	11.331.467.919,18
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	11.444.630.847,00	0,00	0,00	11.444.630.847,00
6	Kantor Camat Simpang Pesak	8.911.478.655,00	0,00	0,00	8.911.478.655,00
7	Kantor Camat Damar	7.511.287.900,00	39.950.000,00	0,00	7.551.237.900,00
8	Kantor Camat Simpang Renggang	4.659.338.866,00	130.700.600,00	0,00	4.790.039.466,00
9	Kantor Camat Dendang	6.451.715.300,00	37.725.000,00	158.000.000,00	6.331.440.300,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.441.685.265.577,10	71.691.321.868,38	420.956.000,00	1.512.955.631.445,48
11	Dinas Perhubungan	82.146.408.463,00	6.763.897.601,00	0,00	88.910.306.064,00
12	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	193.561.015.953,00	4.866.214.248,00	239.308.000,00	198.187.922.201,00
13	Dinas Kesehatan	18.566.424.788,68	101.424.740,00	492.650.000,00	18.175.199.528,68
14	UPTD Puskesmas Manggar	14.569.078.192,85	390.694.000,00	48.100.000,00	14.911.672.192,85
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	12.003.482.819,84	907.274.200,00	30.500.000,00	12.880.257.019,84
16	UPTD Puskesmas Gantung	16.182.043.688,06	478.956.445,00	902.805.754,08	15.758.194.378,98
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	20.114.262.321,20	396.177.234,00	0,00	20.510.439.555,20
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	14.207.300.969,57	980.916.246,00	263.650.000,00	14.924.567.215,57
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	16.007.286.755,67	97.603.000,00	0,00	16.104.889.755,67
20	UPTD Puskesmas Dendang	13.032.642.429,97	478.245.474,00	166.186.000,00	13.344.701.903,97
21	Dinas Pendidikan	395.902.552.202,09	24.808.737.299,68	205.946.450,00	420.505.343.051,77
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	72.546.468.065,44	171.818.000,00	0,00	72.718.286.065,44
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.267.201.095,20	418.869.000,00	0,00	10.686.070.095,20

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.233.088.728,00	336.710.000,00	0,00	4.569.798.728,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.016.710.394,00	68.600.000,00	122.038.000,00	12.963.272.394,00
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	10.361.272.795,00	166.925.000,00	0,00	10.528.197.795,00
27	Dinas Perikanan	97.178.553.805,02	1.546.961.838,00	18.600.000,00	98.706.915.643,02
28	Dinas Pertanian dan Pangan	25.308.068.380,50	1.740.608.446,00	0,00	27.048.676.826,50
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.941.002.471,00	414.319.500,00	0,00	6.355.321.971,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.240.256.789,65	1.063.851.797,00	0,00	53.304.108.586,65
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	19.003.915.445,00	211.207.000,00	30.000.000,00	19.185.122.445,00
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.496.572.490,00	288.936.603,00	670.995.568,00	9.114.513.525,00
33	Inspektorat	9.273.757.482,00	507.459.000,00	14.962.500,00	9.766.253.982,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.029.646.109,00	0,00	256.394.248,00	10.773.251.861,00
35	Dinas Lingkungan Hidup	52.425.738.659,53	1.117.119.439,00	325.095.000,00	53.217.763.098,53
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	50.445.970.286,78	884.460.750,00	0,00	51.330.431.036,78
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.459.309.323,00	84.279.000,00	190.450.000,00	7.353.138.323,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja	14.528.052.618,74	135.495.000,00	64.819.013,71	14.598.728.605,03
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.968.687.693,00	120.450.000,00	282.811.600,00	14.806.326.093,00
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.877.244.533,02	398.412.000,00	0,00	23.275.656.533,02
41	Dinas Perpustakaan	16.195.763.165,00	0,00	0,00	16.195.763.165,00
	TOTAL	2.953.910.944.685,54	124.517.006.827,06	4.913.268.138,79	3.073.514.683.371,81

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	301.630.431.280,85	0,00	9.000.000,00	301.621.431.280,85
2	Peralatan dan Mesin	489.558.814.974,79	22.157.671.416,82	4.081.138.560,08	507.635.347.831,53
3	Gedung dan Bangunan	769.446.315.855,91	24.307.867.026,53	79.781.513,71	793.674.401.368,73
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.357.268.125.861,60	76.063.398.219,71	21.448.000,00	1.433.310.076.081,31
5	Aset Tetap Lainnya	27.508.738.722,39	1.577.986.600,00	0,00	29.086.725.322,39
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.498.517.987,00	410.083.560,00	721.900.060,00	8.186.701.487,00

BUPATI BELITUNG TIMUR

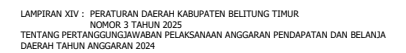
ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



No.	SKPD	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi												Rusak Berat	Koreksi	Reklasifikasi / Penghapusan	Lelang	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	
			Bertambah						Berkurang											
			TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN						
1	Sekretariat DPRD	19.957.463.748,58	0,00	640.268.016,00	315.122.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912.854.742,58	
2	Sekretariat Daerah	120.208.041.400,87	0,00	1.538.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.746.418.900,87	
3	Kantor Camat Manggar	6.756.893.556,00	0,00	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.393.556,00	
4	Kantor Camat Gantung	11.235.049.919,18	0,00	105.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	11.331.467.919,18	
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	11.444.630.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444.630.847,00	
6	Kantor Camat Simpang Pesak	8.911.478.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911.478.655,00	
7	Kantor Camat Damar	7.511.287.900,00	0,00	39.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.237.900,00	
8	Kantor Camat Simpang Renggliang	4.659.338.866,00	0,00	15.270.000,00	115.430.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.039.466,00	
9	Kantor Camat Dendang	6.451.715.300,00	0,00	37.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000.000,00	6.331.440.300,00	
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.441.685.265.577,10	0,00	394.900.000,00	0,00	71.296.421.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.955.631.445,48	
11	Dinas Perhubungan	82.146.408.463,00	0,00	2.215.275.000,00	274.870.250,00	4.273.752.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.910.306.064,00	
12	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	193.561.015.953,00	0,00	3.061.105.148,00	1.607.369.100,00	197.740.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.308.000	198.187.922.201,00	
13	Dinas Kesehatan	18.566.424.788,68	0,00	101.424.740,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.050.000,00	0,00	0,00	420.600.000,00	18.175.199.528,68
14	UPTD Puskesmas Manggar	14.569.078.192,85	0,00	390.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	29.600.000,00	14.911.672.192,85
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	12.003.482.819,84	0,00	507.828.000,00	399.446.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.880.257.019,84
16	UPTD Puskesmas Gantung	16.182.043.688,06	0,00	279.159.000,00	199.797.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.805.754,08	0,00	0,00	0,00	15.758.194.378,98
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	20.114.262.321,20	0,00	272.419.000,00																

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi												Rusak Berat	Koreksi	Reklasifikasi / Penghapusan	Lelang	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Bertambah						Berkurang										
			TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN					
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	10.361.272.795,00	0,00	166.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.197.795,00	
27	Dinas Perikanan	97.178.553.805,02	0,00	568.931.120,00	937.391.842,00	40.638.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	98.706.915.643,02
28	Dinas Pertanian dan Pangan	25.308.068.380,50	0,00	1.735.108.446,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048.676.826,50
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.941.002.471,00	0,00	263.267.000,00	51.413.000,00	0,00	0,00	99.639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355.321.971,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.240.256.789,65	0,00	422.139.500,00	340.768.237,00	0,00	0,00	300.944.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.304.108.586,65
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	19.003.915.445,00	0,00	211.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.185.122.445,00
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.496.572.490,00	0,00	89.100.000,00	199.836.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.663.500	0,00	0,00	0,00	300.944.060,00	304.388.008,00	0,00	0,00	0,00	9.114.513.525,00
33	Inspektorat	9.273.757.482,00	0,00	231.259.000,00	275.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.500	0,00	9.766.253.982,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.029.646.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.394.248,00	0,00	0,00	0,00	10.773.251.861,00
35	Dinas Lingkungan Hidup	52.425.738.659,53	0,00	1.117.119.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.095.000,00	53.217.763.098,53
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	50.445.970.286,78	0,00	251.402.750,00	625.558.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.330.431.036,78
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.459.309.323,00	0,00	84.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.450.000,00	0,00	0,00	0,00	7.353.138.323,00
38	Satuan Polisi Pemong Praja	14.528.052.618,74	0,00	135.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.819.013,71	0,00	14.598.728.605,03
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.968.687.693,00	0,00	120.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.811.600,00	0,00	0,00	47.000.000,00	14.806.326.093,00
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.877.244.533,02	0,00	398.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275.656.533,02
41	Dinas Perpustakaan	16.195.763.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195.763.165,00
	TOTAL	2.953.910.944.682,54	0,00	22.157.671.416,82	24.307.867.026,53	76.063.398.219,71	1.577.986.600,00	410.083.560,00	0,00	187.701.500,00	0,00	0,00	0,00	721.900.060,00	2.298.009.610,08	9.000.000,00	79.781.513,71	1.616.875.450,00	3.073.514.683.371,81

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,
ANRULI L.H. S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710902 200604 1 005



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Sekretariat DPRD	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
2	Sekretariat Daerah	482.995.000,00	0,00	0,00	482.995.000,00
3	Kantor Camat Manggar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kantor Camat Gantung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	43.200.000,00	0,00	0,00	43.200.000,00
6	Kantor Camat Simpang Pesak	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kantor Camat Damar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kantor Camat Simpang Renggang	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kantor Camat Dendang	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.568.916.600,00	76.155.000,00	0,00	3.645.071.600,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	24.655.000,00	0,00	24.655.000,00	0,00
12	Dinas Perhubungan	246.802.289,00	0,00	0,00	246.802.289,00
13	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	253.391.000,00	0,00	0,00	253.391.000,00
14	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	72.050.000,00	0,00	82.050.000,00
15	UPTD Puskesmas Manggar	66.937.900,49	18.500.000,00	0,00	85.437.900,49
16	UPTD Puskesmas Mengkubang	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
17	UPTD Puskesmas Gantung	0,00	902.805.754,08	0,00	902.805.754,08
18	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
21	UPTD Puskesmas Dendang	0,00	166.186.000,00	0,00	166.186.000,00
22	Dinas Pendidikan	1.747.071.406,00	132.924.000,00	0,00	1.879.995.406,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	128.356.000,00	0,00	0,00	128.356.000,00
28	Dinas Perikanan	148.500.000,00	0,00	0,00	148.500.000,00
29	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.591.500,00	0,00	0,00	6.591.500,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	417.483.000,00	0,00	0,00	417.483.000,00
33	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	369.658.000,00	304.388.008,00	0,00	674.046.008,00
34	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	335.346.520,00	256.394.248,00	0,00	591.740.768,00
36	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	190.450.000,00	0,00	190.450.000,00
39	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.320.000,00	235.811.600,00	0,00	436.131.600,00
41	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.778.553.250,00	0,00	0,00	1.778.553.250,00
42	Dinas Perpustakaan	117.238.000,00	0,00	0,00	117.238.000,00
TOTAL		10.045.275.465,49	2.374.164.610,08	24.655.000,00	12.394.785.075,57

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI HUTANG	MUTASI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
1	2	3		4	5	6
1.	Kewajiban Jangka Pendek	7.670.270.220,46	(270.105.855,04)	7.269.834.405,75	6.239.064.815,05	8.430.933.956,12
	Jumlah	7.670.270.220,46	(270.105.855,04)	7.269.834.405,75	6.239.064.815,05	8.430.933.956,12

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005





KABUPATEN BELITUNG TIMUR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	Bidang Penyediaan Air Minum	APBD	AKTIF															
	1. Perumdam Pelangi Timur			5.650.086.770,00	3.549.669.285,00	0,00	9.199.756.055,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	13.980.247.000,00	585.629.100,00	(7.366.120.045,00)	9.199.756.055,00	100,00	9.199.756.055,00
	Sub Total (1)			5.650.086.770,00	3.549.669.285,00	0,00	9.199.756.055,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	13.980.247.000,00	585.629.100,00	(7.366.120.045,00)	9.199.756.055,00	100,00	9.199.756.055,00
2	Bidang Lainnya	APBD	AKTIF															
	1. PT. Pembangunan Belitung Timur (Perseroda)			734.829.940,00	10.800.001,00	0,00	745.629.941,00	420.660.109,00	0,00	420.660.109,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.675.030.168,00)	324.969.832,00	99,75	324.157.407,42
	Sub Total (2)			734.829.940,00	10.800.001,00	0,00	745.629.941,00	420.660.109,00	0,00	420.660.109,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.675.030.168,00)	324.969.832,00	99,75	324.157.407,42
	Total Seluruh Bidang Industri			6.384.916.710,00	3.560.469.286,00	0,00	9.945.385.996,00	420.660.109,00	0,00	420.660.109,00	7.000.000.000,00	0,00	13.980.247.000,00	585.629.100,00	(12.041.150.213,00)	9.524.725.887,00	99,99	9.523.913.462,42

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH S.H.
Pembina Tk. IV.b
NIP.197106022006041005



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LABA RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Bidang Penyediaan Air Minum	APBD	AKTIF	5.747.006.303,00	(2.731.378.299,00)	3.015.628.004,00	251.663.318,00	(2.461.125.723,00)	806.165.599,00	
	1. Perumdam Pelangi Timur									
	Sub Total (1)			5.747.006.303,00	(2.731.378.299,00)	3.015.628.004,00	251.663.318,00	(2.461.125.723,00)	806.165.599,00	
2	Bidang Lainnya									
	1. PT. Pembangunan Belitung Timur (Perseroda)			-	(265.340.880,00)	(265.340.880,00)	-	-	(265.340.880,00)	
	Sub Total (2)			-	(265.340.880,00)	(265.340.880,00)	-	-	(265.340.880,00)	
Total Seluruh Bidang Industri				5.747.006.303,00	(2.996.719.179,00)	2.750.287.124,00	251.663.318,00	(2.461.125.723,00)	540.824.719,00	

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005